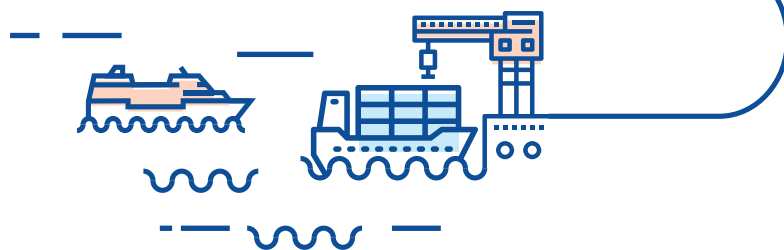


PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)



INOVASI, INTEGRASI, KONTRIBUSI



2018

LAPORAN TAHUNAN



Masa depan industri jasa kepelabuhanan tampak menjanjikan seiring dengan terus bertumbuhnya industri transportasi laut, meningkatnya permintaan akan kargo peti kemas dan *bulk*, serta ekspansi pusat-pusat perdagangan di ranah regional. Meski demikian, pergeseran pada tren ekonomi, arus perdagangan, serta pola demografis global menjadi beberapa faktor yang akan mempengaruhi para pelaku bisnis untuk terus beradaptasi dengan perubahan ini. Sebagai salah satu entitas bisnis di sektor bisnis ini, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) telah menetapkan program-program kerja untuk meraih keunggulan di tengah kompetisi industri jasa kepelabuhanan.

Pelaksanaan program kerja ini mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan untuk menjadi *"Emerging Industry Leader"* dengan melakukan transformasi menjadi *"Full-Handling Terminal System & Logistic Integration-Integrated Industrial Port Estate"*. Upaya-upaya inovasi dan integrasi dalam pelaksanaan program-program kerja di tahun 2018 bukan hanya sebagai dasar pelaksanaan visi dan misi perusahaan, namun juga upaya untuk meningkatkan kontribusi Pelindo III kepada Negara.



KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN

2018



MERAH KEUNGGULAN MELALUI INOVASI, INTEGRASI, KONTRIBUSI

Masa depan industri jasa kepelabuhanan tampak menjanjikan seiring dengan terus bertumbuhnya industri transportasi laut, meningkatnya permintaan akan kargo peti kemas dan *bulk*, serta ekspansi pusat-pusat perdagangan di ranah regional. Meski demikian, pergeseran pada tren ekonomi, arus perdagangan, serta pola demografis global menjadi beberapa faktor yang akan mempengaruhi para pelaku bisnis untuk terus beradaptasi dengan perubahan ini. Sebagai salah satu entitas bisnis di sektor bisnis ini, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) telah menetapkan program-program kerja untuk meraih keunggulan di tengah kompetisi industri jasa kepelabuhanan.

Pelaksanaan program kerja ini mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan untuk menjadi *"Emerging Industry Leader"* dengan melakukan transformasi menjadi *"Full-Handling Terminal System & Logistic Integration-Integrated Industrial Port Estate"*. Upaya-upaya inovasi dan integrasi dalam pelaksanaan program-program kerja di tahun 2018 bukan hanya sebagai dasar pelaksanaan visi dan misi perusahaan, namun juga upaya untuk meningkatkan kontribusi Pelindo III kepada Negara.

2017



MEMBANGUN PERUBAHAN POSITIF MELALUI TRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN (SDM, PROSES, DAN TEKNOLOGI)

Seiring dengan perubahan yang berjalan secara dinamis pada aspek sosial, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi dewasa ini, menuntut Perusahaan sebagai entitas bisnis di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Proses bisnis dan konektivitas yang berlangsung cepat dan tanpa batas sangat diperlukan bagi Perusahaan dalam rangka meningkatkan performa layanan serta menyejajarkan aktivitas usaha dengan standar layanan yang berlaku secara global dengan tetap mengusung nilai-nilai bisnis yang berlaku secara nasional sebagai diferensiasi.

Perusahaan percaya, dengan adanya perubahan ke arah yang positif, Perusahaan akan bergerak dinamis dalam melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan usaha yang dijalankan.

Tema *"Membangun Perubahan Positif Melalui Transformasi Budaya Perusahaan (SDM, Proses dan Teknologi)"* sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam melakukan perubahan dari aspek kecil hingga besar yang membawa dampak positif bagi kelangsungan usaha Perusahaan. Serta menggambarkan tujuan-tujuan progresif dalam menggapai satu tujuan yang lebih baik.

**2016****TOWARDS ICT BASED
ENTERPRISE**

Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelindo III diselenggarakan secara komprehensif dan mengacu pada prinsip *IT Governance* sesuai regulasi dan standar *Best Practice* bidang layanan IT. Hal ini tercermin dari mulai proses perencanaan, pengembangan, operasionalisasi, dan pemeliharaan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan diselenggarakan berbasis kapabilitas, yaitu dengan mengembangkan kapabilitas pelayanan bisnis maupun penguatan kapabilitas internal Teknologi Informasi baik sumber daya manusia maupun infrastruktur.

2015**MANAGING
THE FUTURE**

Tahun 2015 merupakan momentum strategis bagi Pelindo III untuk melanjutkan langkah pengembangan Perusahaan dengan visi pencapaian masa depan gemilang. Seluruh upaya yang dilakukan berorientasi kepada kesinambungan manajemen yang solid dan tangguh.

Karena itu, kami terus bekerja keras mendayagunakan segala potensi serta sumber daya yang ada guna menggapai target-target dan harapan Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang dapat dipetik hasilnya di masa depan. Sebab, kami tidak hanya bekerja untuk hari ini saja, tetapi mengelola usaha yang hidup berkesinambungan untuk generasi mendatang.

2014**BOOSTING
YOUR LOGISTICS**

Seiring dengan adanya perubahan visi yakni berkomitmen memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima, Pelindo III berharap dapat menjadi salah satu mata rantai dalam memperlancar integrasi logistik yang ada dengan memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan yang prima sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Untuk mencapai visi tersebut Pelindo III mengimplementasikan beberapa strategi pengembangan perusahaan diantaranya revitalisasi pelabuhan modernisasi pelabuhan serta peningkatan kapasitas pelabuhan. Dengan strategi-strategi tersebut diharapkan Pelindo III dapat terus berkontribusi dalam mendukung arus logistik di Indonesia.

DAFTAR ISI

01

- 01 Tema
- 02 Kesenambungan Tema Laporan Tahunan
- 04 Daftar Isi
- 06 Referensi Kriteria ARA 2016
- 18 Ringkasan Kinerja 2018
- 20 Grafik Ikhtisar Keuangan
- 23 Grafik Ikhtisar Operasional
- 24 Ikhtisar Keuangan
- 26 Ikhtisar Operasional
- 26 Ikhtisar Saham
- 27 Ikhtisar Obligasi
- 28 Pemeringkat Obligasi
- 30 Ikhtisar Dividen
- 31 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
- 32 Pemenuhan Aspirasi Pemangku Kepentingan
- 33 Testimoni
- 34 Tim Penyusun
- 35 Tentang Laporan Tahunan Pelindo III 2018

LAPORAN MANAJEMEN

- 39 Laporan Dewan Komisaris
- 45 Laporan Direksi

02

PROFIL PERUSAHAAN

- 54 Informasi Perusahaan
- 56 Riwayat Singkat Perusahaan
- 58 Jejak Langkah Perusahaan
- 60 Penghargaan dan Sertifikasi
- 66 Peristiwa Penting 2018
- 70 Makna Logo Perusahaan
- 71 Bidang Usaha
- 73 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
- 76 Struktur Organisasi

03

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

- 126 Sumber Daya Manusia
- 152 Teknologi Informasi

- 78 Profil Dewan Komisaris
- 84 Profil Direksi
- 90 Daftar dan Profil Pejabat Senior
- 94 Daftar dan Profil General Manager
- 100 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
- 102 Pemegang Saham Utama dan Pengendali
- 103 Daftar Entitas Anak dan Asosiasi
- 112 Struktur Grup Perusahaan
- 114 Kronologi Pencatatan Saham
- 114 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
- 116 Informasi Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan
- 118 Informasi Pada Website Perusahaan
- 120 Alamat Kantor Pusat, Perwakilan, dan Cabang Perusahaan
- 122 Wilayah Operasional Perusahaan

04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

- 164 Tinjauan Umum
- 167 Tinjauan Kinerja Operasional
- 177 Kinerja Entitas Anak
- 187 Tinjauan Kinerja Keuangan
- 187 • Laporan Posisi Keuangan
- 194 • Laporan Laba (Rugi)
- 196 • Laporan Arus Kas
- 198 • Kemampuan Membayar Utang



05

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

- 200 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur
- 201 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
- 202 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntansi
- 202 Prospek Usaha
- 203 Proyeksi Tahun 2019
- 204 Aspek Pemasaran
- 206 Dividen
- 207 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)
- 207 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- 208 Informasi Realisasi Investasi Barang Modal
- 210 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
- 216 Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait
- 217 Perubahan Kebijakan Akuntansi
- 219 Informasi Kelangsungan Usaha
- 222 Tata Kelola Perusahaan
- 229 Penilaian Penerapan GCG
- 235 Key Performance Indicator (KPI)
- 239 Rapat Umum Pemegang Saham
- 245 Dewan Komisaris
- 259 Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
- 274 Direksi
- 295 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
- 300 Asesmen Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi
- 301 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- 305 Informasi Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi
- 306 Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 308 Sekertaris Perusahaan
- 311 Satuan Pengawasan Intern
- 316 Akuntan Publik
- 317 Sistem Pengendalian Internal
- 319 Manajemen Risiko Perusahaan
- 337 Kode Etik
- 342 Perkara Penting Perusahaan dan Grup 2018
- 343 Pemenuhan Aspek Kepatuhan
- 345 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
- 347 Kebijakan dan Pengendalian Gratifikasi
- 349 Sistem Pelaporan Pelanggaran
- 352 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- 353 Akses dan Informasi Perusahaan
- 356 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 357 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup
- 359 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
- 367 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
- 372 Tanggung Jawab Kepada Konsumen
- 379 Pernyataan Tanggung Jawab

07

LAPORAN KEUANGAN



REFERENSI KRITERIA ARA 2016

NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
(A)	Faktor-faktor yang diuji Kesesuaian Penerapannya	
I.	UMUM	
01.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	✓
02.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	✓
03.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	✓
04.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	✓
II.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	
01.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali 3. Total laba (rugi) komprehensif a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali 4. Laba (rugi) per saham.	20, 24
	Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	20, 25
02.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	25
03.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	25
04.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
05.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik - Jumlah saham yang beredar; - Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: - Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; - Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. - Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: - Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	26
06.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Informasi memuat: - Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); - Tingkat bunga/imbalan; - Tanggal jatuh tempo; dan - Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	27
III.	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	
01.	Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: - Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; - Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; - Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan - Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	39-41
02.	Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: - Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: - Kebijakan strategis; - Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan - Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; - Analisis tentang prospek usaha; - Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan - Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	45-48
03.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: - Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; - Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; - Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan - Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	379
IV.	PROFIL PERUSAHAAN	
01.	Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	54-55
02.	Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	55-59



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
03.	Bidang usaha Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	71-72
04.	Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	76-77
05.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	73-75
06.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	78-82
07.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	84-89
08.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	147, 148, 146, 133-144, 145
09.	Komposisi Pemegang saham Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	100-102
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	103-111



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
11.	Struktur grup perusahaan Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	112-113
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatitkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	114
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatitkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	114-115
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	116-117
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	60-65
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan	103-111, 120-121
17.	Informasi pada Website Perusahaan Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	118



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. Yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	251, 284, 265, 273, 272, 310, 314
V.	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN	
01.	Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi c. Penjualan/pendapatan usaha d. Profitabilitas	167-176
02.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	187-198
03.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang	198-199
04.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	200
05.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	201



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
06.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	208-209
07.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	203
08.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	202
09.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	202
10.	Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	204-205
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	206
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	207
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	207



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	210-215
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	216
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	217-218
17.	Informasi kelangsungan usaha. Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	219
VI.	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	
01.	Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	245-258
02.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	257
03.	Uraian Direksi Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	274-294



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
04.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2018, agar diungkapkan.	229-234
05.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/ atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	301-304
06.	Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal rapat 2. Peserta rapat 3. Agenda rapat Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	252, 284, 295
07.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	102
08.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	305
09.	Komite Audit Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	260-266



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	273
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Komite Pemantau Manajemen Risiko Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	266-273
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	308-310
13.	Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	311-315
14.	Akuntan Publik Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	316
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	319-336
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	317-318



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	357-358
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	359-366
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	367-371
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	372-377
21.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	342
22.	Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	353
23.	Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	337-341



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
24.	Pengungkapan mengenai whistleblowing system Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	349-351
25.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	306-307
VII.	INFORMASI KEUANGAN	
01.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	383
02.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	383
03.	Opini auditor independen atas laporan keuangan	386
04.	Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	385-387
05.	Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasi kasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	388-395
06.	Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	391
07.	Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	394-395
08.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	417-453



NO	PENJELASAN KRITERIA	HALAMAN
09.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	467-472
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	436-438, 484-494
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	423-425, 478-481
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	167-176
13.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	438-445, 514-516
14.	Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	383, 385-387



LAPORAN
MANAJEMEN



PROFIL
PERUSAHAAN



TINJAUAN
PENDUKUNG BISNIS



ANALISIS DAN
PEMBAHASAN MANAJEMEN

PRODUKSI
ARUS KAPAL:

274.686.348 GT

▲ 25.848.014 GT



PENDAPATAN
PELAYANAN KAPAL:

RP1,49 TRILIUN

▲ RP538 MILIAR



PRODUKSI NONPETI KEMAS
GENERAL CARGO:

9.501.934 TON

▲ 606.483 TON

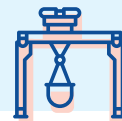


PRODUKSI NONPETI KEMAS
CURAH KERING:

31.117.746 TON

PRODUKSI NONPETI KEMAS
CURAH CAIR:

32.261.714 TON



PENDAPATAN
PENGUSAHAAN
PROPERTI:

RP392 MILIAR



RINGKASAN



RATING BAA3

(OUTLOOK STABLE)

DARI MOODY'S

*diterbitkan 6 Februari 2018

RATING BBB-

(OUTLOOK STABLE)

DARI FITCH RATINGS

*diterbitkan 23 April 2018



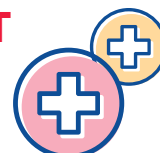
PENCAPAIAN KPI:

104,15



TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN:

AA SEHAT



MERAHI

**TRUSTED COMPANY BASED
ON CORPORATE GOVERNANCE
PERCEPTION INDEX**

Oleh: SWA Magazine dan IICG



TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN

PRODUKSI
ARUS PETI KEMAS:

5.337.673 TEU'S

▲ 417.954 TEU'S

PENDAPATAN
PELAYANAN PETI KEMAS:

RP6,02 TRILIUN

▲ RP797 MILIAR



PRODUKSI NONPETI KEMAS
TRAFIK PENUMPANG:

3.087.954 ORANG

▲ 130.596 ORANG

PRODUKSI NONPETI KEMAS
ARUS HEWAN:

142.644 EKOR

▲ 9.481 EKOR

PENDAPATAN
NONPETI KEMAS:

RP961 MILIAR

▲ RP188 MILIAR



KINERJA 2018



PENDAPATAN
OPERASIONAL:

RP10,17 TRILIUN

▲ RP1,32 TRILIUN



LABA
KOMPREHENSIF:

RP2,12 TRILIUN

▲ RP629 MILIAR



SKOR KPKU:

631,25



SKOR ASESMEN
PELAKSANAAN GCG:

92,587

KATEGORI SANGAT BAIK



Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal
Penumpang Gapura Surya Nusantara
Meraih Predikat **PRIMA UTAMA**

Oleh: Kementerian Perhubungan

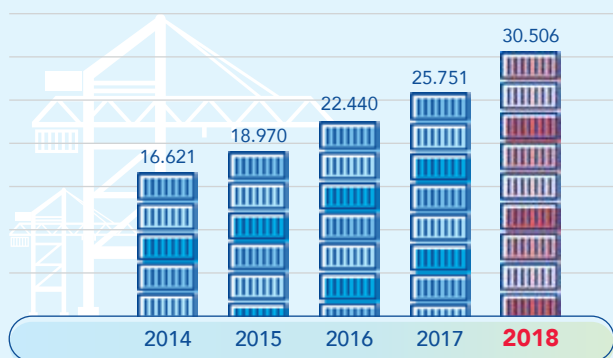


GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN

GRAFIK POSISI KEUANGAN

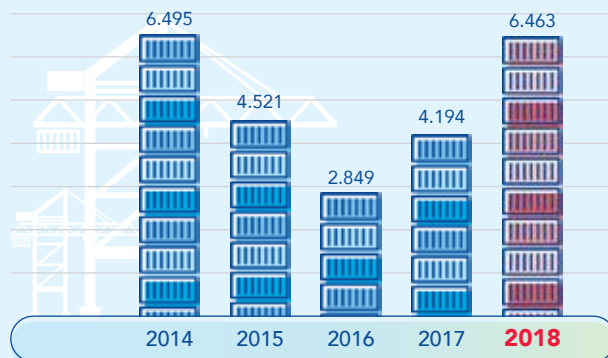
JUMLAH ASET

Rp miliar



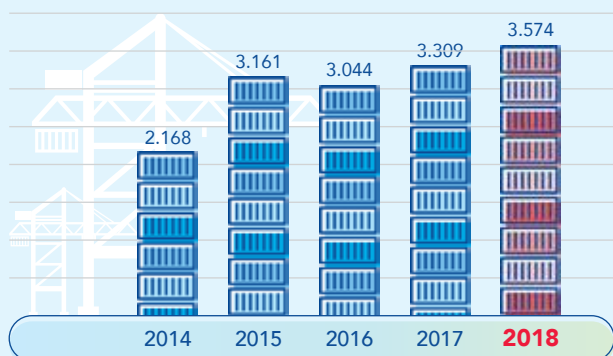
ASET LANCAR

Rp miliar



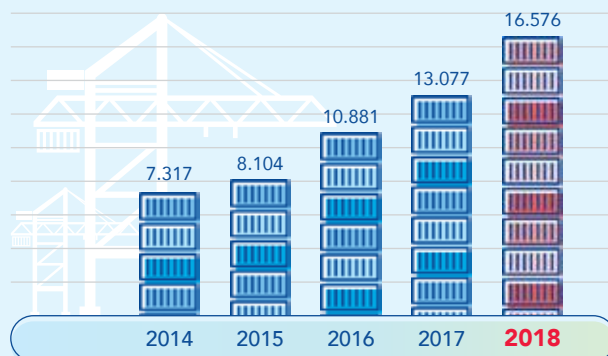
LIABILITAS JANGKA PENDEK

Rp miliar



LIABILITAS JANGKA PANJANG

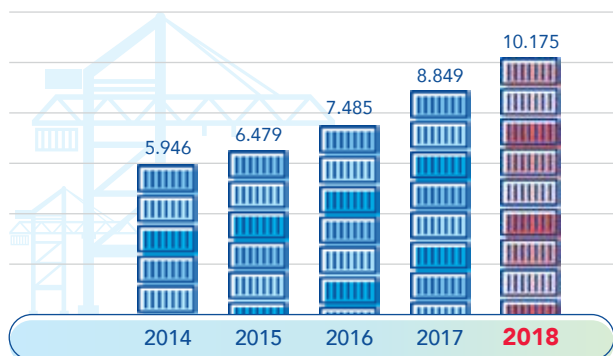
Rp miliar



GRAFIK LAPORAN LABA (RUGI)

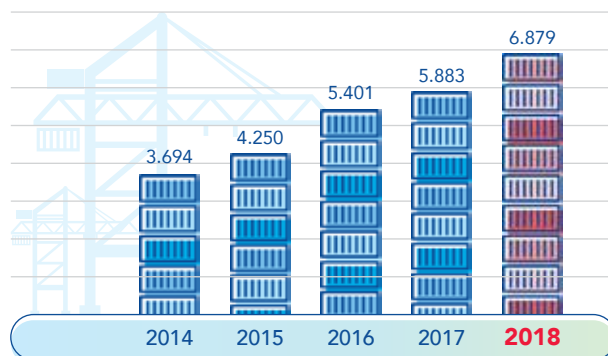
PENDAPATAN USAHA

Rp miliar



BEBAN USAHA

Rp miliar





TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



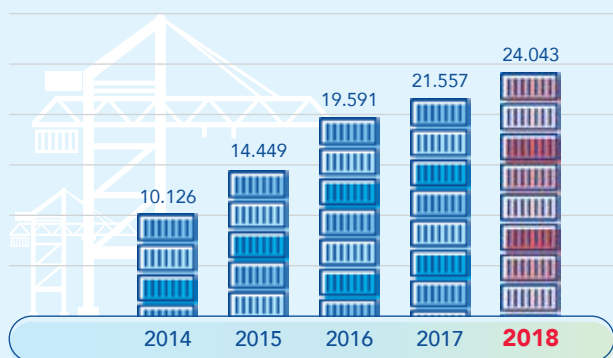
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN

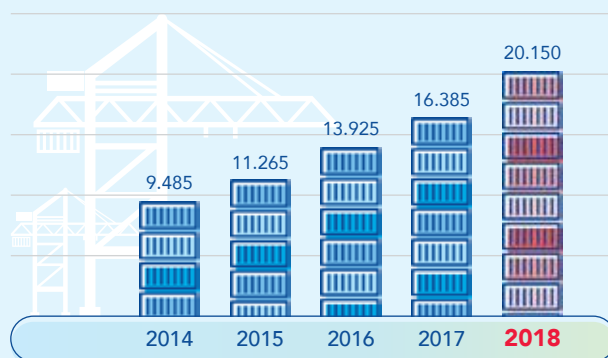
ASET TIDAK LANCAR

Rp miliar



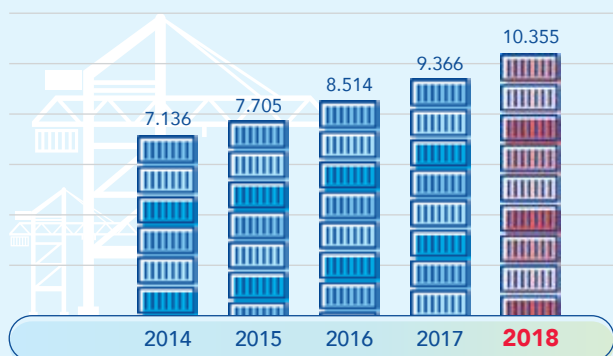
JUMLAH LIABILITAS

Rp miliar



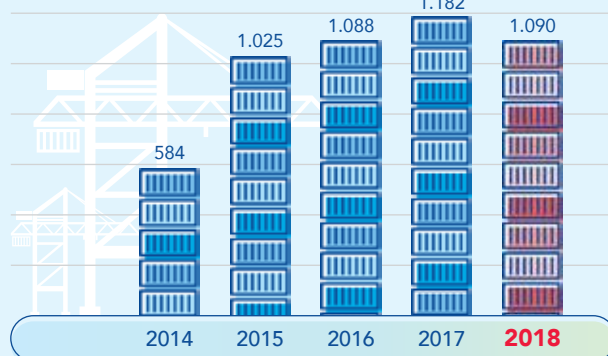
EKUITAS

Rp miliar



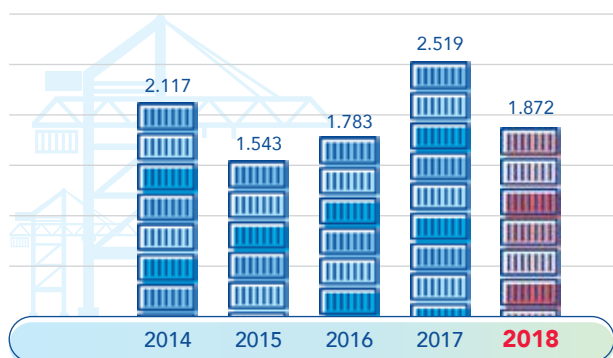
INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Rp miliar



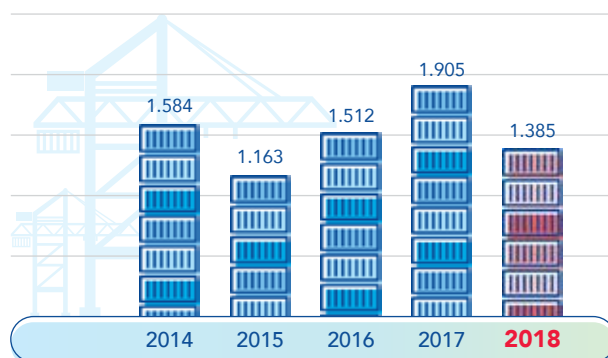
LABA SEBELUM PAJAK

Rp miliar



LABA TAHUN BERJALAN

Rp miliar

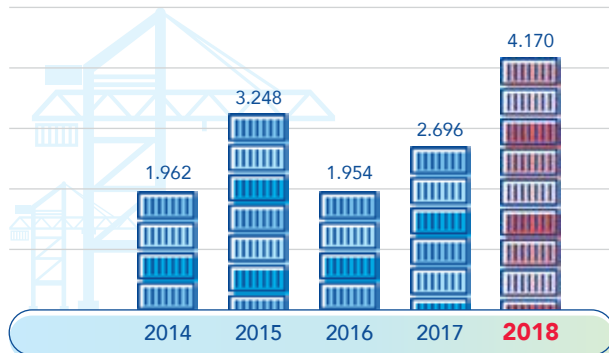




GRAFIK ARUS KAS

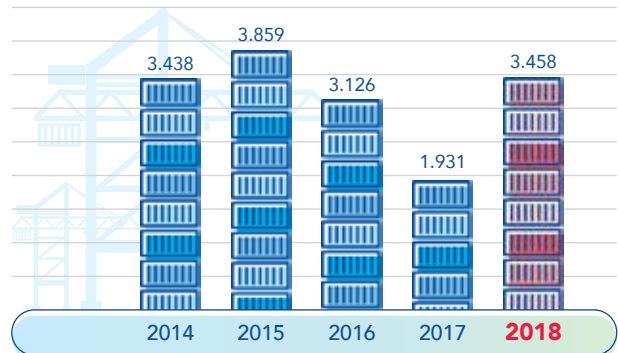
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Rp miliar



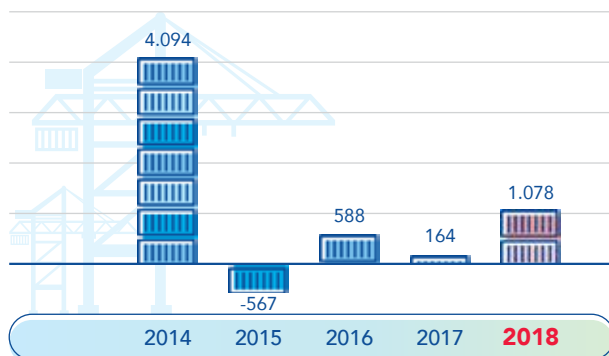
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Rp miliar



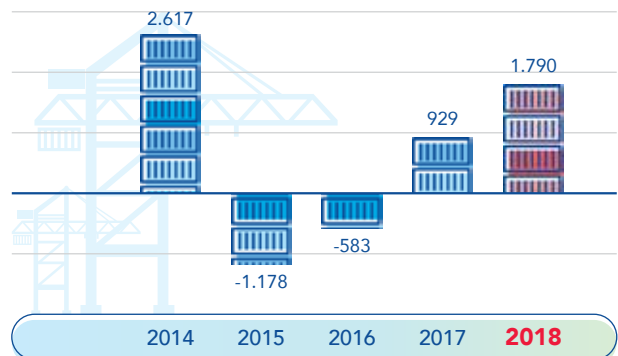
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Rp miliar



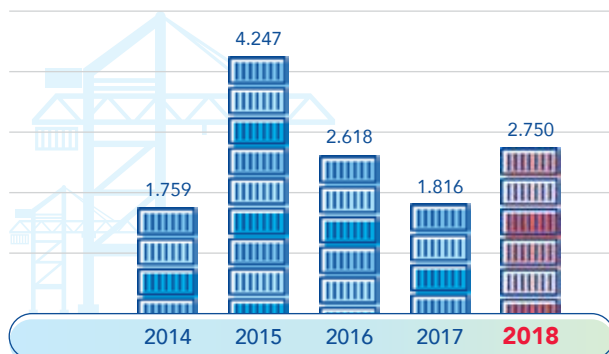
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS

Rp miliar



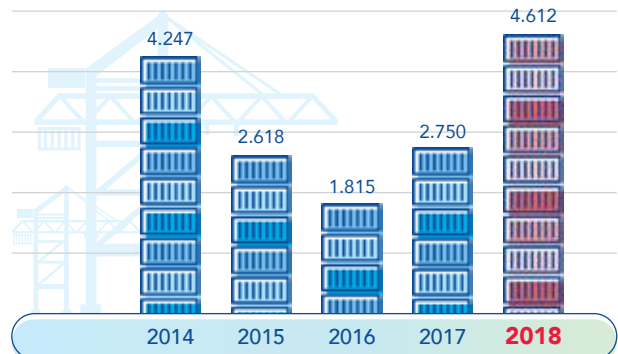
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

Rp miliar



KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

Rp miliar





TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

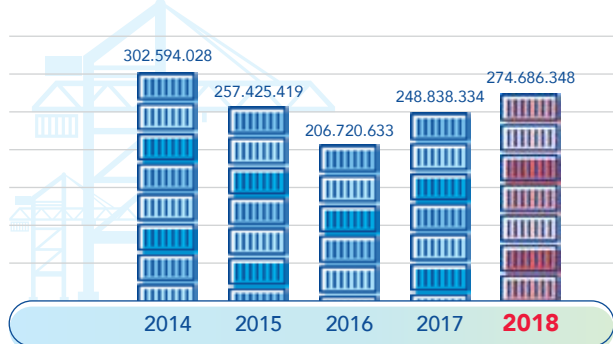


LAPORAN
KEUANGAN

GRAFIK IKHTISAR OPERASIONAL

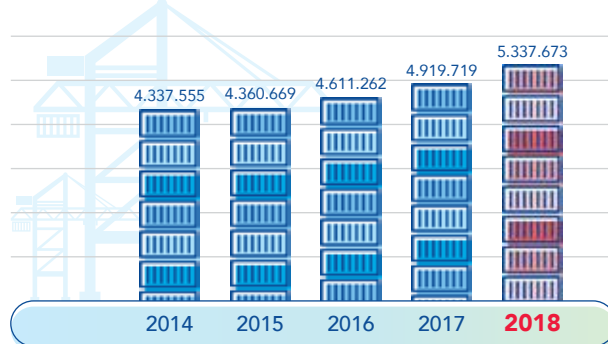
ARUS KAPAL

dalam GT



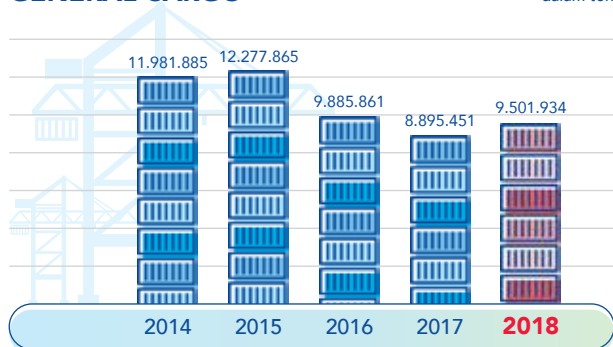
ARUS PETI KEMAS

dalam TEUs



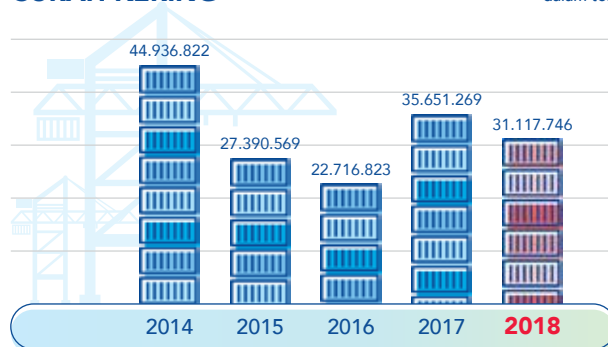
GENERAL CARGO

dalam ton



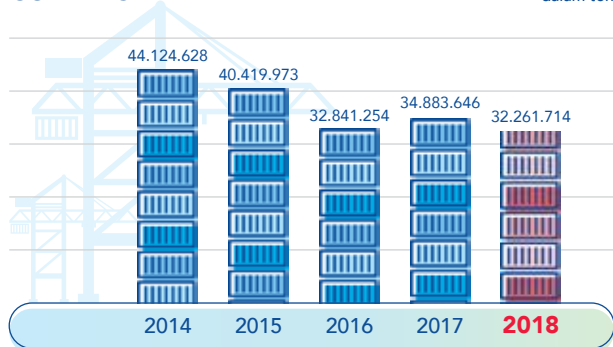
CURAH KERING

dalam ton



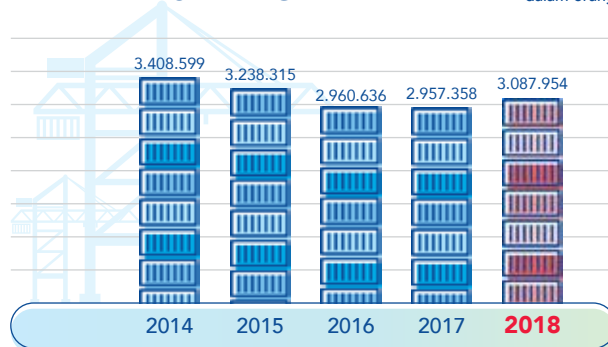
CURAH CAIR

dalam ton



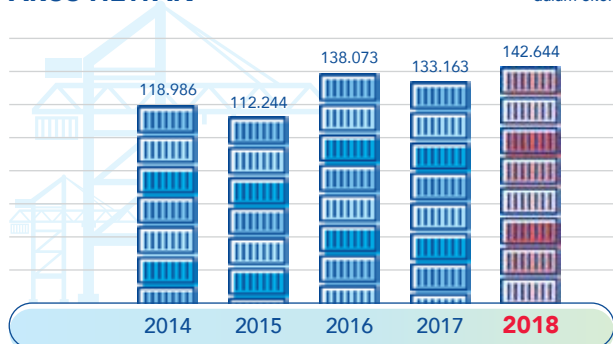
TRAFIK PENUMPANG

dalam orang



ARUS HEWAN

dalam ekor





IKHTISAR KEUANGAN

LABA RUGI KOMPREHENSIF

dalam jutaan Rupiah

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
Pendapatan Usaha	10.175	8.849	7.485	6.479	5.946
Beban Usaha	6.879	5.883	5.401	4.250	3.694
Beban Bunga Pinjaman	808	600	477	398	145
Laba Sebelum Pajak	1.872	2.519	1.783	1.543	2.117
Beban Pajak	487	613	271	380	533
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.385	1.905	1.512	1.163	1.584
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	740	(409)	1140	1	(73)
Laba Tahun Berjalan	1.385	1.905	1.512	1.163	1.584
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.125	1.496	2.652	1.164	1.511
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	760	1.341	1.037	703	1.192
Kepentingan Non Pengendali	626	563	475	460	392
Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada	1.503	932	2.170	702	1.194
Kepentingan Non Pengendali	622	564	483	462	393
Laba Per Saham (dalam ribuan)	745	1.316	1.018	689	1.170

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

dalam jutaan Rupiah

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
Aset	30.506	25.751	22.440	18.970	16.621
Aset Lancar	6.463	4.194	2.849	4.521	6.495
Aset Tidak Lancar	24.043	21.557	19.591	14.449	10.126
Investasi pada Entitas Asosiasi	1.090	1.182	1.088	1.025	584
Liabilitas	20.150	16.385	13.925	11.265	9.485
Liabilitas Jangka Pendek	3.574	3.309	3.044	3.161	2.168
Liabilitas Jangka Panjang	16.576	13.077	10.881	8.104	7.317
Ekuitas	10.355	9.366	8.514	7.705	7.136

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

dalam jutaan Rupiah

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	4.170	2.696	1.954	3.248	1.962
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(3.458)	(1.931)	(3.126)	(3.859)	(3.438)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.078	164	588	(567)	4.094
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	1.790	929	(583)	(1.178)	2.617
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.750	1.816	2.618	4.247	1.759
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	4.612	2.750	1.815	2.618	4.247

RASIO KEUANGAN

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
Rasio Kas	105,60%	82,16%	66,97%	91,45%	195,82%
Rasio Lancar	168,72%	132,31%	170,46%	174,38	305,30%
Rasio Liabilitas terhadap Aset	66,05%	56,77%	56,52%	59,38%	57,07%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	143,14%	131,33%	129,97%	146,20%	132,91%
Return on Assets (ROA)	4,54%	8,01%	6,82%	6,14%	9,09%
Return on Equity (ROE)	11,31%	19,72%	23,81%	11,78%	23,83%
Return on Investment (ROI)	16,08%	17,48%	13,98%	13,92%	16,48%



IKHTISAR OPERASIONAL

URAIAN	SATUAN	2018	2017	2016	2015	2014
Arus Kapal	unit	68.153	66.547	62.091	66.923	78.778
	GT	274.686.348	248.838.334	206.720.633	257.425.419	302.594.028
Arus Peti Kemas	box	4.316.897	3.989.126	3.764.398	3.569.017	3.568.769
	TEUs	5.337.673	4.919.719	4.611.262	4.360.669	4.337.555
General Kargo	ton	9.501.934	8.895.451	9.885.861	12.277.865	11.981.885
	M3	3.299.894	2.458.047	2.961.555	4.011.698	6.003.869
Curah Kering	ton	31.117.746	35.651.269	22.716.823	27.390.569	44.936.822
Curah Cair	ton	32.261.714	34.883.646	32.841.254	40.419.973	44.124.628
Trafik Penumpang	orang	3.087.954	2.957.358	2.960.636	3.238.315	3.408.599
Arus Hewan	ekor	142.644	133.163	138.073	112.244	118.986

IKHTISAR SAHAM

Hingga 31 Desember 2018, kepemilikan saham Perusahaan 100% dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak diperdagangkan di bursa efek manapun. Dengan demikian, informasi mengenai:

1. Ikhtisar kinerja perdagangan saham yang terdiri dari jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat dicatatkan, harga saham tertinggi, terendah dan penutupan, serta volume perdagangan;
2. Informasi aksi korporasi yang meliputi bentuk-bentuk aksi korporasi, tanggal pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;
3. Sanksi penghentian saham yang berupa penghentian perdagangan saham dan penghapusan pencatatan saham.

tidak dapat disajikan karena tidak sesuai dengan status Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak melaksanakan pencatatan saham di bursa efek.



IKHTISAR OBLIGASI

OBLIGASI GLOBAL 2014

URAIAN	INFORMASI
Jenis Sekuritas	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang	U.S Dollar
Distribusi	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar	USD 500.000.000
Tenor	10 tahun
Tanggal Terbit	1 Oktober 2014
Tanggal Jatuh Tempo	1 Oktober 2024
Tingkat Bunga	4,875% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga	31 Maret dan 30 September
Spread to Benchmark	239,5 bps
Oversubscribed	13x melebihi size yang ditawarkan
Current Yield	4,534%
Rating Senior Unsecured	- Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan pada 10 September 2014 - BB+ (<i>Outlook Stable</i>) oleh S&P Global Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014 - BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014

OBLIGASI GLOBAL 2018

URAIAN	INFORMASI
Jenis Sekuritas	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang	U.S Dollar
Distribusi	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar	USD 500.000.000
Tenor	5 tahun
Tanggal Terbit	2 Mei 2018
Tanggal Jatuh Tempo	2 Mei 2023
Tingkat Bunga	4,5% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga	2 Mei dan 2 November
Spread to Benchmark	239,5 bps
Oversubscribed	2x melebihi size yang ditawarkan
Current Yield	4,283%
Rating Senior Unsecured	- Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan pada 6 Februari 2018 - BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 23 April 2018



PEMERINGKAT OBLIGASI

LEMBAGA PEMERINGKAT

STANDARD AND POOR'S (S&P)

Alamat	12 Marina Boulevard Level 22, #22-01 MBFC Tower 3 Singapore 018982
Telepon	+65 65 306401 / +65 65 306403
Faksimile	-
Surel	annabelle.teo@spglobal.com
Jasa yang Diberikan	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III
Imbalan	USD 70.000/tahun
Surat Penunjukan	Mandate Letter dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014
Periode Penugasan	2014 - sekarang

MOODY'S

Alamat	Moody's Investor Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower, Singapore 048623
Telepon	+65 6398 8300
Faksimile	-
Surel	daryl.soh@moodys.com
Jasa yang Diberikan	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III
Imbalan	USD 64.000/tahun
Surat Penunjukan	Mandate Letter dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014
Periode Penugasan	2014 - sekarang

**FITCH RATINGS**

Alamat	One Raffles Quay, South Tower #22-11, Singapore 048583
Telepon	+65 6796 7200
Faksimile	-
Surel	louis.pang@fitchratings.com
Jasa yang Diberikan	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III
Imbalan	USD 70.000/tahun
Surat Penunjukan	Mandate Letter dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III Tertanggal 1 Juli 2014
Periode Penugasan	2014 - sekarang

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

Alamat	Panin Tower Senayan City, 17th Floor, Jl. Asia Afrika Lot. 19, RT. 1/RW.3, Gelora, Jakarta Pusat 12220
Telepon	+62 21 7278 2380
Faksimile	+62 21 7278 2370
Surel	martin.pandiangan@pefindo.co.id
Jasa yang Diberikan	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Dalam Negeri Pelindo III
Imbalan	Rp192.500.000/tahun
Surat Penunjukan	<i>Purchase Order No. 0200000021/2017</i>
Periode Penugasan	2017



IKHTISAR DIVIDEN

Perusahaan memberikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perkembangan dividen yang disalurkan Perusahaan selama 5 tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

TAHUN	DIBAYARKAN TAHUN	DIVIDEN (RIBU RUPIAH)	LABA PERUSAHAAN (RIBU RUPIAH)	RISALAH RUPS	TANGGAL PEMBAYARAN
2014	2015	238.803.153	1.194.015.768	KU.04/24.1/P.III-2015	12 Mei 2015
2015	2016	196.709.330	702.533.323.000	Akta Notaris Emi Susilowati, SH. No. 14.-	17 Mei 2016
2016	2017	311.198.916	1.037.329.721.501	Akta Notaris Emi Susilowati, SH. No. 05.-	8 Mei 2017
2017	2017	311.198.916	1.037.329.721	Akta Notaris Emi Susilowati, SH. No. 02.-	8 November 2017
2018	2018	441.147.068	1.470.490.226	Akta Notaris Emi Susilowati, SH. No. 02.-	3 April 2018

Keterangan: Informasi kebijakan dan rincian pembagian dividen terakhir disajikan di bab Analisis dan Pembahasan Manajemen.



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perusahaan" atau "Pelindo III" yang didefinisikan sebagai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang penyedia jasa kepelabuhanan. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) secara umum.



PEMENUHAN ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Aspirasi Pemangku Kepentingan merupakan aspirasi atau *mandate* yang diberikan oleh segenap pihak yang dapat memengaruhi dan memiliki kepentingan terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Pelindo III telah melakukan penjangkauan *mandate* Pemangku Kepentingan untuk menentukan arah Perusahaan dalam jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM

Pelindo III sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi inti di bidang jasa pelayanan kepelabuhanan senantiasa berkomitmen untuk memberikan dividen kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN) serta berupaya memperlancar integrasi logistik dalam upaya mendukung pembangunan dalam lingkup makro ekonomi. Lebih lanjut, Perusahaan akan berupaya memenuhi keinginan Pemegang Saham yang antara lain:

1. Mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi kinerja Perusahaan;
2. Pencapaian sasaran kinerja Perusahaan melalui peningkatan produktivitas layanan dan operasional yang unggul berlandaskan kaidah dan norma penyelenggaraan perusahaan yang baik (GCG);
3. Meningkatkan kesadaran terhadap kontrol dan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal Perusahaan, guna menunjang keberhasilan manajemen.

PELANGGAN

Bagi Perusahaan, pelanggan bukan hanya sebagai pengguna jasa kepelabuhanan yang menghasilkan nilai bagi Perusahaan, Pelindo III juga menyadari bahwa pelanggan merupakan salah satu aset Perusahaan yang penting. Untuk itu, upaya perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh Perusahaan guna mendapatkan *beyond customer expectation*. Adapun kebutuhan dan keinginan pelanggan antara lain:

1. Kenyamanan dan penyederhanaan proses pelayanan untuk menghasilkan pelayanan terbaik;
2. Ketepatan waktu pelayanan, sistem informasi yang *real time* dan tarif jasa pelabuhan yang kompetitif;
3. Penyediaan layanan jasa yang terintegrasi guna pemenuhan keinginan pelanggan yang heterogen;
4. Kesiapan dan ketersediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan yang andal;
5. Jaminan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak.

PEGAWAI

Pegawai merupakan entitas yang sentral dalam suatu perusahaan. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi

dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan perusahaan/organisasi. Menyadari hal tersebut, Pelindo III senantiasa memenuhi aspirasi pegawai Perusahaan yang antara lain:

1. Kejelasan *career path system* sesuai dengan kompetensi, baik *hard skill* maupun *soft skill*, dan minat pegawai;
2. Peningkatan kompetensi pegawai berwawasan global sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan organisasi;
3. Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif melalui implementasi budaya kerja dan sistem manajemen kinerja yang transparan;
4. Peningkatan kesejahteraan berdasarkan prestasi kerja pegawai;
5. Kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan berperan aktif dalam menentukan arah pengembangan usaha korporasi ke depan.

MASYARAKAT

Perusahaan berupaya memperhatikan kehadiran dan keberadaan masyarakat disekitarnya, melalui berbagai program *corporate social responsibility* (CSR) dengan harapan agar terbentuk komunitas di lingkungan sekitar Pelabuhan yang menjadi garda terdepan dalam mendukung berbagai upaya pengembangan Pelabuhan, khususnya ketika muncul permasalahan yang bersifat sosial di sekitar Pelabuhan tersebut. Adapun keinginan masyarakat yang akan dipenuhi oleh Perusahaan antara lain:

1. Berwawasan lingkungan dalam segala kegiatan pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan;
2. Berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Pelabuhan melalui kegiatan CSR yang terdiri dari program kemitraan dan bina lingkungan.

MITRA KERJA

Peran Pemangku Kepentingan yang tidak kalah pentingnya bagi Pelindo III adalah mitra kerja. Mitra kerja merupakan pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, maupun produk yang dibutuhkan Perusahaan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Mengingat, pentingnya peranan mitra kerja tersebut, maka Perusahaan berupaya untuk memenuhi keinginan dan aspirasi mitra kerja yang antara lain:

1. Transparansi dan adil dalam pelaksanaan kerja sama usaha;
2. Penyederhanaan proses untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembayaran;
3. Keberlangsungan kerja sama usaha dalam jangka panjang.



TESTIMONI

HERRY SANTOSO

Manajer Cabang Maersk Line Surabaya

Kami sebagai pelanggan Pelindo III mengapresiasi kinerja selama ini, terutama mengenai inovasi yang berkesinambungan baik dari segi infrastruktur maupun noninfrastruktur. Dari 3 pelabuhan/terminal peti kemas, yakni Terminal Petikemas Semarang, Terminal Petikemas Surabaya, dan Terminal Teluk Lamong terus melakukan pembaruan agar pelayanan ke pelanggan terus meningkat dan hal ini sangat kami rasakan efeknya dengan melakukan *upsized* kapal-kapal kami yang berada di pelabuhan tersebut. Sampai saat ini kami belum merasakan kendala yang berarti dan kami harap agar *performance* yang sudah dicapai sekarang tetap terus ditingkatkan.

MAJAH ANDRIANSYAH

General Manager SITC Indonesia

Pelindo III memiliki jaringan pelabuhan-pelabuhan yang sangat luas di Indonesia, yang menjembatani kawasan Indonesia bagian timur dan barat. Dengan kesulitan yang sangat kompleks dan tantangan yang dihadapi, Pelindo III telah berhasil menyinergikan setiap potensi yang ada dengan dukungan leadership management yang sangat profesional. Pelindo III senantiasa mendorong peningkatan produktivitas dan memiliki lompatan-lompatan dalam efisiensi kinerja dan biaya, sehingga hal ini yang menjadikan Pelindo III selalu lebih maju dalam penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepelabuhanan. Kami berharap Pelindo III akan terus berinovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga semakin memperkuat perannya dalam menjembatani kawasan Indonesia bagian timur dan barat, serta memperkuat kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.

NUR SAIDAH

Direktur PT ISPAT INDO

Dalam beberapa tahun terakhir kami telah bekerja sama dengan Pelindo III. Pelayanan yang diberikan oleh Pelindo III sangat memuaskan dan kami merasakan peningkatan pelayanan di dua tahun terakhir ini. Semoga hal ini senantiasa terjaga.

RODY

Manajer Departemen Pengadaan dan Ekspor Impor PT Ajinomoto Indonesia

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelayanan Pelindo III ada di luar ekspektasi saya karena Pelindo III telah memberikan *performance* yang baik. Saya senang karena dari segi komunikasi, tim Pelindo III memberikan respon dengan cepat dan sangat *welcome*. Dengan kinerja yang cukup memuaskan tersebut, kami pun telah memperpanjang kerja sama dengan volume yang lebih besar.

YUDHOARTO

Manajer Cabang Surabaya Samudra Shipping Line

Pelindo III telah menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam terciptanya industri kepelabuhanan yang berdaya saing global melalui peningkatan pada aspek operasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan usaha. Fokus Pelindo III dalam peningkatan kualitas jasa kepelabuhanan ini berdampak positif kepada berkembangnya industri pelayaran nasional. Kami benar-benar merasakan dampak positif komitmen Pelindo III dalam memberikan jasa layanan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Harapan kami kedepan, semoga Pelindo III akan terus meningkatkan investasinya, khususnya untuk menunjang pengembangan sarana infrastruktur kepelabuhanan.



TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2018

PENGARAH:
TOTO HELI YANTO

Direktur Sumber Daya Manusia

KETUA:
FARUQ HIDAYAT

Sekretaris Perusahaan

SEKRETARIS:
RUDI HERDYANTORO

 Asisten Sekretaris Perusahaan
 Hubungan Investor dan
 Tata Kelola Perusahaan

ANGGOTA

1.	R. Suryo Khasabu	Asisten Sekretaris Perusahaan Hubungan Masyarakat
2.	Roy Darma Putra	Asisten Sekretaris Perusahaan Kemitraan dan Bina Lingkungan
3.	Suratmin	Staf Sekretariat Dewan Komisaris
4.	Nugroho	Satuan Pengawasan Intern
5.	Adri Supriyadi	Sekretaris Perusahaan
6.	Ayuningtyas Dyah Hapsari	Sekretaris Perusahaan
7.	Dony Eko Prasetyo	Sekretaris Perusahaan
8.	Hafid Novalsyah	Sekretaris Perusahaan
9.	Kharis Fauzi	Sekretaris Perusahaan
10.	Luqman Firmansyah	Sekretaris Perusahaan
11.	Mutia Rizky	Sekretaris Perusahaan
12.	Mukhammad Saifulloh	Sekretaris Perusahaan
13.	Rahma Yasinta	Sekretaris Perusahaan
14.	Anisa Bella	Sekretaris Perusahaan
15.	Karina Rindang Trapsilasiwi	Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan
16.	Tri Sakti Ambarwati	Biro Hukum
17.	Laila Nuriyah	Direktorat Operasi dan Komersial
18.	Mega Khoirunnisak	Direktorat Operasi dan Komersial
19.	Anak Agung Bagus Dasta Hariwangsa	Direktorat Teknik
20.	Siti Mariyam	Direktorat Teknik
21.	Anny Lutfiyah	Direktorat Teknik
22.	Angga Adi Prebawa	Direktorat Sumber Daya Manusia
23.	Indra Teguh Wicaksana	Direktorat Sumber Daya Manusia
24.	Liliana Aristia Saviera	Direktorat Sumber Daya Manusia
25.	Afri Nur Karya	Direktorat Keuangan
26.	Candra Septiana	Direktorat Keuangan
27.	Dirga Arya F.	Direktorat Keuangan
28.	Yulia Widarsi	Direktorat Keuangan
29.	Rachmatika Astarini	Direktorat Keuangan
30.	Rakhmat Affianto	Direktorat Keuangan
31.	Ranisa Triananda S.	Direktorat Keuangan
32.	Hizkia Pandhega	Pengadaan Barang dan Jasa



TENTANG LAPORAN TAHUNAN PELINDO III 2018

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2018 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III dengan tema “Meraih Keunggulan melalui Inovasi, Integrasi, Kontribusi”. Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian dan fakta dari perkembangan bisnis Perusahaan pada 2018 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan.

Laporan Tahunan 2018 Pelindo III menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi Perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip GCG.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Sehingga, para Pemegang Saham serta seluruh Pemangku Kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perusahaan pada 2018.



01

LAPORAN MANAJEMEN









LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Kita patut bersyukur sekaligus berbangga pada capaian yang berhasil diraih oleh Pelindo III di tahun 2018, sebab Perusahaan tetap menunjukkan kinerja yang baik di tengah kondisi ekonomi global yang cukup menantang. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas disusunnya Laporan Tahunan 2018 ini, yang merupakan bentuk komitmen Pelindo III untuk menyampaikan hasil kinerja dan pencapaian di bidang operasional, keuangan, tata kelola Perusahaan, dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

IKLIM PEREKONOMIAN TAHUN 2018

Di tahun 2018, kondisi perekonomian global terbilang cukup menantang dan dinamis, dimana hal tersebut memicu ketidakpastian bagi setiap pelaku usaha. Perang dagang Amerika Serikat dan China hingga pengetatan likuiditas merupakan beberapa contoh pemicu ketidakstabilan perekonomian di tingkat internasional. Sebagai imbasnya, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi, sehingga nilai tukar rata-rata di tahun 2018 mencapai Rp14.247/USD.

Di tengah kondisi global tersebut, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,15% dimana hal ini didukung oleh stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi Pemerintah, dan peningkatan investasi. Sejumlah kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan peran investasi untuk pengembangan infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman terus mengalami peningkatan. Pemerintah juga terus menunjukkan komitmennya untuk merealisasikan visi agar Indonesia dapat menjadi Poros Maritim Dunia dengan membangun pelabuhan-pelabuhan baru. Hingga akhir tahun 2018, sebanyak 19 pelabuhan baru telah berhasil dibangun, sementara 8 pelabuhan masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan selesai pada tahun 2019.

Dampak perkembangan perekonomian dunia dan kinerja perekonomian Indonesia, terutama dengan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi, memengaruhi kondisi keuangan Pelindo III. Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan oleh seluruh jajaran Komisaris dan Direksi untuk tetap menjaga kelangsungan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada masyarakat guna menunjang pembangunan nasional.

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang dihadirkan oleh kondisi makroekonomi baik global maupun nasional, Pelindo III terus melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan kesempatan yang ada serta meminimalkan

berbagai dampak negatif bagi kinerja Perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan melakukan berbagai kerja sama dengan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan arus kunjungan kapal, arus peti kemas, arus barang dan penumpang, meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, melakukan sinergi dengan Pelindo I, II, dan IV serta Badan Usaha Milik Negara lainnya, juga melakukan berbagai diversifikasi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Perusahaan.

STRATEGI DAN KINERJA PERUSAHAAN 2018

Sebagai BUMN yang telah diberi mandat oleh Pemerintah untuk menjadi terminal operator dalam membangun dan mengembangkan pelabuhan di wilayah timur Indonesia, Pelindo III berfokus di wilayah kerja yang diamanatkan dengan senantiasa berinovasi dan bersinergi untuk mengembangkan potensi baru di lingkungan pelabuhan. Hal ini merupakan salah satu langkah Perusahaan untuk mewujudkan Pelindo III sebagai *world class operator*.

Guna meningkatkan profitabilitas dan kelangsungan usaha, Perusahaan melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui kegiatan usaha di sekitar pelabuhan. Misalnya, memaksimalkan penyewaan lahan, kegiatan usaha untuk mendukung penyediaan lahan untuk penumpukan barang, penyediaan sarana listrik, penyediaan sarana air bersih, penyederhanaan prosedur pelayanan kepelabuhanan dengan menggunakan Teknologi Informasi yang terintegrasi, serta transaksi pembayaran nontunai agar mempermudah mekanisme pembayaran dan juga meningkatkan keamanan transaksi. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Pelindo III memiliki keunggulan di bidang penerapan Teknologi Informasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Hal ini merupakan poin plus bagi Perusahaan dan bermanfaat dalam meningkatkan daya tawar maupun keunggulan kompetitif Perusahaan.

Efektivitas pelaksanaan strategi-strategi Perusahaan diukur menggunakan KPI yang ditetapkan oleh RUPS dan disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung pertumbuhan yang berkesinambungan. Pada tahun 2018, Perusahaan mampu mencapai skor KPI sebesar 102,42% yang telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham yakni 100%.

Di tahun 2018, Perusahaan juga berhasil menangkap dan memanfaatkan peluang. Beberapa di antaranya adalah merealisasikan investasi di Pelabuhan Benoa, yaitu melakukan kegiatan pengerukan alur dan kolam pelabuhan dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan *annual meeting*

World Bank dan IMF tahun 2018, sehingga dapat melayani kapal-kapal pesiar dengan total penumpang hingga 3.000 orang; mengembangkan terminal gas/pelabuhan untuk suplai energi di pelabuhan Tanjung Perak, Celukan Bawang, dan Tanjung Emas Semarang dalam rangka mengantisipasi rencana Pemerintah untuk mengembangkan pembangkit listrik hingga 35.000 MW; serta investasi pengembangan fasilitas pelabuhan berupa pengadaan kapal, alat angkut, peralatan bongkar muat, dan fasilitas penunjang lainnya di berbagai Pelabuhan Cabang dan Anak Perusahaan Pelindo III. Peluang-peluang tersebut telah memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan Pelindo III, serta turut menyukseskan program nasional penyelenggaraan Tol Laut yang sebagian besar memanfaatkan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke wilayah timur Indonesia.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap Direksi, Dewan Komisaris senantiasa melakukan *monitoring* secara konsisten untuk memastikan program-program strategis dan program pendukung lainnya dapat terimplementasi melebihi target yang ditentukan. Bentuk pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan.

Di tahun 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menerapkan langkah strategis serta menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanat RUPS. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Perusahaan, baik dalam kinerja operasional maupun kinerja keuangan. Di sisi kinerja operasional atau trafik, secara keseluruhan relatif mencapai target RKAP 2018 karena tercapainya arus kunjungan kapal, arus barang (kecuali dalam satuan ton), arus peti kemas, serta arus hewan.

Realisasi arus kapal tercapai sebesar 68.153 unit atau 107% dari RKAP 2018 sebesar 63.689 unit, sedangkan dalam satuan GT terealisasi sebesar 274,69 juta GT atau 110% dari RKAP 2018 sebesar 250,01 juta GT. Sementara itu, arus barang dalam satuan ton terealisasi sebesar 72,88 juta ton atau 91% dari RKAP 2018, dalam satuan m3 terealisasi sebesar 3,3 juta m3 atau 123% dari RKAP 2018, dalam satuan MMBTU terealisasi sebesar 10,91 juta MMBTU atau 94% dari RKAP 2018, sedangkan dalam satuan unit terealisasi sebanyak 264,64 ribu unit atau 141% dari target RKAP.

Di sisi arus peti kemas, tahun 2018 Perusahaan berhasil merealisasikan sebesar 4.316.897 box atau 105% dari RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar 4.117.839 box, sedangkan dalam satuan TEUs terealisasi sebesar 5.337.673 TEUs atau 105% dari RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar 5.106.706 TEUs. Sementara itu, realisasi arus hewan pada tahun 2018 secara total tercapai sebesar 142.644 ekor atau 126% dari RKAP 2018 sebesar 113.519 ekor.

Di sisi kinerja keuangan, realisasi laba tahun berjalan mampu tercapai sebesar Rp1,39 triliun atau 75% dari RKAP 2018 yang berjumlah Rp1,86 triliun. Secara umum, pencapaian laba tahun berjalan dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika

Serikat. Depresiasi Rupiah juga berdampak pada beban di luar usaha yang terealisasi sebesar Rp733 miliar atau 611% dari RKAP 2018 dan 1094% dari realisasi tahun 2017.

Guna meminimalkan dampak penurunan nilai tukar Rupiah, Direksi telah mengimplementasikan upaya-upaya strategis dengan optimal. Hasil dari upaya ini ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi pendapatan usaha sebesar 15% dan EBITDA sebesar 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini membuktikan bahwa terdapat pertumbuhan berkelanjutan di tahun 2018. Pencapaian target kinerja tahun 2018 tersebut di atas didukung oleh pelaksanaan program strategis yang direncanakan secara komprehensif, *challenging*, *achievable*, dan *accountable*.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pelindo III memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan. Oleh karenanya, setiap tindakan yang diambil oleh Perusahaan selalu mengacu pada prinsip GCG. Perusahaan juga menerbitkan pedoman etika dan perilaku (*Code of Conduct*) sebagai acuan bagi seluruh insan Pelindo III mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga Pegawai.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan pemberian nasihat kepada Direksi untuk menyempurnakan *Board Manual*, *Code of Corporate Governance*, dan *Code of Conduct*. Selain itu, telah dilakukan pembahasan terkait SOP Pedoman Kerja Sama bersama Direksi untuk memastikan proses kerja sama yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip GCG.

Di sisi lain, Pelindo III berhasil memperoleh predikat "Trusted Company" dalam ajang CGPI 2018. Selain itu dalam pelaksanaan *self-assessment* GCG, Perusahaan mampu meraih skor sebesar 92,587 dengan kategori "Sangat Baik". Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan setiap organ utama Perusahaan telah menjalankan fungsinya secara independen dan profesional untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

Di tahun buku 2018, Dewan Komisaris juga berhasil melaksanakan pengawasan sesuai dengan rencana kerja tanpa hambatan yang berarti. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris juga telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Komite Audit dan Satuan Pengawasan Intern telah bekerja sama dalam mengawasi penerapan pengendalian internal Perusahaan dengan baik.

PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan telah menjalankan program *Whistleblowing System* (WBS) sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.78/HK.03/P.III-2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Menurut pandangan Dewan Komisaris penerapan WBS sudah efektif, hal ini didukung dengan terus dilakukannya sosialisasi oleh Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP). Pada tahun 2018, jumlah pengaduan tercatat nihil.



PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2018, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan yaitu pergantian jabatan anggota Dewan Komisaris yang semula dijabat oleh Soritaon Siregar digantikan oleh Dedi Syarif Usman yang disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018. Melalui Surat Keputusan yang sama, Kementerian BUMN selaku RUPS juga menetapkan Zainal Abidin dan Heddy Lugito sebagai Komisaris Independen Pelindo III. Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris menjadi:

Komisaris Utama	: Hari Bowo
Komisaris	: Dedi Syarif Usman
Komisaris	: Wahyu Satrio Utomo
Komisaris Independen	: Heddy Lugito
Komisaris Independen	: Zainal Abidin

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelindo III senantiasa berkomitmen dalam melaksanakan program *community development* melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dituangkan dalam RKAP. Di tahun 2018, realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan mengalami peningkatan sebanyak 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Bantuan di bidang Pendidikan dan/atau Pelatihan menjadi bantuan dengan nilai realisasi terbesar yang tersalurkan dari program ini, yaitu sebesar Rp12,61 miliar.

Di aspek lingkungan, Perusahaan telah merealisasikan target/rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Manajemen. Perusahaan telah membuat ruang terbuka hijau di daerah Kumai, kegiatan bersih sungai kali Lamong, serta pembangunan beberapa bank sampah di Gresik dan Kampung Hidroponik Simokalongan yang merupakan kampung binaan Perusahaan.

PROSPEK BISNIS DAN TARGET 2019

Di tahun 2019 mendatang, Dewan Komisaris optimis bahwa industri kepelabuhanan dapat tumbuh dengan baik dan menjanjikan. Hal ini dapat ditinjau dari membaiknya tren nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan juga komitmen Pemerintah dalam membangun sistem

konektivitas laut di 2019. Optimisme Pemerintah terhadap pembangunan tol laut di tahun 2019 melalui pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru juga menjadi indikasi positif terhadap peluang bisnis di Industri kepelabuhanan tahun 2019.

Harapan Dewan Komisaris terkait prioritas strategis jangka pendek/menengah (hingga 5 tahun ke depan) adalah agar Perusahaan dapat menjamin keberlanjutan dan kelancaran arus distribusi logistik nasional. Oleh karena itu Dewan Komisaris sangat mendukung komitmen Manajemen dalam memberikan pelayanan terbaik dan optimal untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional yang selama ini telah dan sedang dilakukan oleh Perusahaan. Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, Perusahaan menetapkan strategi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dievaluasi setiap 5 tahun sekali.

Dewan Komisaris juga berharap agar di tahun 2019 Pemerintah tetap menjaga kebijakan yang mendukung stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi Pemerintah, dan peningkatan investasi. Kebijakan lain yang sangat penting adalah dalam rangka menjaga inflasi dan nilai tukar Rupiah, sehingga tidak banyak risiko likuiditas maupun risiko pasar yang akan dihadapi Perusahaan.

Dewan Komisaris berharap, guna menghadapi tantangan ke depan, program *Integrated Billing System*, konektivitas antar terminal, peningkatan kinerja peti kemas, dan terutama sinergi BUMN dapat berjalan secara optimal; karena program-program tersebut menjadi faktor kunci dalam meraih kesuksesan Pelindo III di tahun-tahun mendatang.

PENUTUP

Mewakili Dewan Komisaris, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam merealisasikan tujuan dan target di tahun 2018. Apresiasi tertinggi juga kami tujukan kepada Pemegang Saham, Direksi, Manajemen, segenap Karyawan, serta jajaran Pemangku Kepentingan yang telah memberikan upaya terbaiknya bagi keberlangsungan usaha Pelindo III sepanjang tahun 2018. Dengan komitmen dan antusias yang tinggi, kami meyakini Pelindo III mampu merealisasikan Visi Perusahaan di tahun 2019, yaitu untuk Menjadi Pemimpin Bisnis di Pelabuhan.

Atas nama Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Hari Bowo
Komisaris Utama





TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



01.
HARI BOWO
KOMISARIS UTAMA

02.
ZAINAL ABIDIN
KOMISARIS
INDEPENDEN

03.
WAHJU SATRIO WIDODO
KOMISARIS

04.
HEDDY LUGITO
KOMISARIS
INDEPENDEN

05.
DEDI SYARIF USMAN
KOMISARIS





LAPORAN DIREKSI

Di tahun 2018, Pelindo III berhasil memperoleh penghargaan-penghargaan signifikan, seperti predikat Trusted Company dalam ajang CGPI 2018, predikat Badan Publik Informatif dalam acara Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 Kategori BUMN, serta meraih predikat Silver Winner pada ajang Indonesia Inhouse Magazine Awards 2018 (InMA).

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena berkat rahmat-Nya, di tahun 2018 Pelindo III telah berhasil mencapai kinerja yang membanggakan. Sebagai Direktur Utama Pelindo III, perkenankanlah saya untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan periode tahun buku 2018. Disusunnya Laporan Tahunan ini merupakan bentuk komitmen Pelindo III untuk menyampaikan hasil kinerja dan pencapaian Perusahaan di bidang operasional, keuangan, tata kelola Perusahaan, dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

IKLIM PEREKONOMIAN TAHUN 2018

Iklim perekonomian global di tahun 2018 terbilang cukup menantang, kondisi ini terutama disebabkan oleh adanya perang dagang Amerika Serikat dan China serta normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Perang dagang yang terjadi telah memicu naiknya tingkat proteksi internasional dan hal ini berimbas pada timbulnya risiko kerugian substansial terhadap pemulihan perekonomian global. Sementara itu, normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Amerika Serikat berdampak pada menurunnya nilai mata uang negara-negara berkembang terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mengalami depresiasi cukup signifikan, sehingga nilai tukar rata-rata Rupiah di tahun 2018 mencapai Rp14.247/USD.

Pemerintah Indonesia berhasil menjaga perekonomian nasional tumbuh disekitar 5,15% di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Langkah Pemerintah untuk tetap fokus membangun program investasi pada bidang infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman layak mendapat apresiasi karena langkah tersebut akan mendorong kelancaran aktivitas perekonomian nasional di masa mendatang. Antusiasme Pemerintah dalam merealisasikan

Indonesia sebagai Negara Poros Maritim juga terus berkembang. Hal ini tampak dari telah terbangunnya 19 pelabuhan baru.

Di sisi industri kepelabuhanan nasional, sesuai dengan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), aspek barang yang dibongkar dan dimuat di dalam negeri mengalami penurunan masing-masing 9% dan 6% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, aspek keberangkatan dan kedatangan penumpang dari pelayaran dalam negeri meningkat masing-masing sebesar 4% dan 3% dibandingkan dengan 2017.

Di antara 7 provinsi yang menjadi wilayah operasional Pelindo III, ekonomi Bali mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah operasional lainnya, yaitu mencapai 6,35% atau naik 14,00% dari tahun 2017 yang tercatat 5,57%. Penyumbang tertinggi ekonomi Bali berasal dari sisi produksi kategori konstruksi, yaitu sebesar 10,44%. Sebaliknya, ekonomi NTB mengalami pertumbuhan terendah dibanding wilayah operasional lainnya, dengan mengalami kontraksi menjadi -4,56% atau turun 3.900,00% dari 2017 yang tercatat 0,12%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi NTB dikarenakan adanya penurunan kinerja pada subkategori pertambangan bijih logam dibanding 2017, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti pada kategori pertambangan dan penggalian.

STRATEGI DAN KINERJA PERUSAHAAN

Guna meraih keunggulan di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan iklim kompetisi di industri jasa kepelabuhanan, Pelindo III telah menetapkan beberapa program kerja. Hal ini mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan untuk menjadi "Emerging Industry Leader" dengan melakukan transformasi menjadi "Full-Handling Terminal System and Logistic Integration-Integrated Industrial Port Estate". Upaya-upaya inovasi dan integrasi dalam pelaksanaan program-program kerja di

tahun 2018 bukan hanya sebagai dasar pelaksanaan visi dan misi Perusahaan, namun juga upaya untuk meningkatkan kontribusi Pelindo III kepada Negara.

Direksi dan segenap Manajemen Pelindo III telah menetapkan 15 program kerja. Hingga 31 Desember 2018, seluruh program kerja tersebut telah terealisasi sebesar 100%. Rincian 15 program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pemasaran dan Penjualan
 1. Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan
 2. Optimalisasi pemanfaatan aset tanah pelabuhan
 3. Peningkatan pangsa pasar
 4. Rencana kerja sama usaha baru
- B. Produksi dan Kualitas Produk
 5. Peningkatan produk kualitas layanan
 6. Peningkatan pelayanan terhadap pelanggan
 7. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan
- C. Teknik dan Teknologi
 8. Pengembangan sistem pelayanan berbasis TI
- D. Keuangan dan Akuntansi
 9. Pengendalian piutang usaha
 10. Peningkatan kinerja dan sistem keuangan Perusahaan
- E. Sistem dan Organisasi
 11. Peningkatan implementasi Sistem Manajemen
- F. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 12. Implementasi *Knowledge Management*
 13. Peningkatan kompetensi SDM bidang operasional
- H. Investasi
 14. Investasi *Level of Revenue*
 15. Investasi *Level of Service*

KINERJA OPERASIONAL

Di sisi kinerja operasional, Perusahaan mencatatkan realisasi kunjungan kapal sebesar 68.153 unit dan 274,69 juta GT, sehingga masing-masing tercapai sebesar 107% dan 110% dari target RKAP 2018. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun ini meningkat sebanyak 2% pada satuan unit dan 10% pada satuan GT yang mana pada tahun lalu masing-masing tercatat sebesar 66.547 unit dan 248,83 juta GT.

Arus barang dengan satuan ton terealisasi sebesar 72,88 juta ton atau 91% dari target RKAP 2018 dan turun 8% dari tahun lalu yang tercatat 79,43 juta ton. Arus barang dengan satuan m3 terealisasi sebesar 3,3 juta m3 atau 123% dari target RKAP 2018 dan naik 32% dari tahun lalu yang tercatat 2,5 juta m3. Realisasi arus *Liquefied Natural Gas* (LNG) mencapai 10,91 juta MMBTU atau 94% dari target RKAP 2018 dan naik 16% dari tahun lalu yang tercatat 9,4 juta MMBTU. Sementara itu, arus kendaraan dalam satuan unit mencapai 264.648 unit atau 141% dari target RKAP 2018 dan naik 47% dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 180.477 unit.

Arus peti kemas tercatat sebesar 4.316.897 boks dan 5.337.673 TEUs, sehingga masing-masing tercapai 105% dan 105% dari target RKAP. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun ini meningkat sebanyak 8% baik pada satuan boks maupun TEUs yang mana pada tahun lalu masing-masing tercatat sebesar 3.989.126 boks dan 4.919.719 TEUs.

Di segmen arus penumpang, realisasinya tercapai sebanyak 3.087.954 orang atau sebesar 99% dari target RKAP 2018 dan naik 4% dari tahun lalu yang tercatat sebesar 2.957.358 orang. Arus hewan terealisasi sebesar 142.644 ekor atau 126% dari anggarannya dan naik 7% dari tahun lalu yang tercatat sebesar 133.163 ekor.

KINERJA KEUANGAN

Sejalan dengan realisasi kegiatan operasional, maka realisasi di bidang keuangan menunjukkan capaian laba tahun berjalan pada tahun 2018 sebesar Rp1,38 triliun atau 75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,86 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laba tahun berjalan menurun 27% yang mana realisasinya tercatat Rp1,90 triliun. Di sisi pendapatan usaha bersih, Perusahaan berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp10,17 triliun atau 101% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan usaha meningkat 15% yang mana realisasinya tercatat sebesar Rp8,84 triliun.

Sementara itu, realisasi beban usaha tercatat sebesar Rp6,87 triliun atau 99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6,92 triliun dan meningkat 17% dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp5,88 triliun. Realisasi saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2018 berhasil mencapai Rp4,61 triliun atau 145% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3,17 triliun, dimana saldo kas Induk sebesar Rp 3,15 triliun dan saldo kas Anak Perusahaan sebesar Rp1,45 triliun. Dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi kas dan setara kas meningkat 68% yang mana realisasinya tercatat Rp2,75 triliun.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Sebagai entitas bisnis, Pelindo III tidak terlepas dari risiko-risiko usaha. Profil risiko yang dihadapi Perusahaan di 2018 antara lain adalah keterlambatan/ketidaksesuaian penyelesaian investasi; kecelakaan/insiden K3 dan lingkungan; *down system*, jaringan dan aplikasi pelayanan operasional; kerusakan fasilitas/peralatan saat pelayanan; rendahnya utilisasi fasilitas/peralatan yang telah diinvestasikan; kerusakan/kehilangan barang pengguna jasa saat pelayanan operasional; ketidakpatuhan/pelanggaran dalam menjalankan prosedur; penggunaan aset atau properti tanpa alas hak/wanprestasi pihak ke-2.

Perusahaan melalui Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko telah melakukan upaya untuk menurunkan tingkat kemungkinan-kejadian dan/atau konsekuensi dari risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah perbaikan penentuan prioritas dan penjadwalan, peningkatan peran manajemen proyek; Peningkatan budaya HSSE secara berkelanjutan, *safety patrol* gabungan secara konsisten; Pengecekan dan pengujian dukungan TIK, evaluasi kecukupan *back up* secara berkala dengan berbagai skenario; melakukan uji berkala terhadap kinerja operasional dan pemeliharaan; mengoptimalkan fungsi dan tugas tim tanggap darurat, membangun dan membentuk model *Business Continuity*; mengevaluasi efektivitas hasil investasi, pemetaan dan penyusunan rencana alternatif yang potensial dan terukur; pengawasan grup kerja secara konsisten,



memastikan kepatuhan instruksi kerja dan kelayakan fasilitas/peralatan; melakukan uji laik alat operasional dan pemeliharaan yang dipantau konsistensinya, dan sebagainya.

PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada aspek tata kelola Perusahaan, implementasi prinsip-prinsip GCG di Pelindo III pada tahun 2018 telah berjalan dengan baik. Perusahaan berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan GCG serta wajib diketahui dan dijalankan oleh seluruh Insan Pelindo III mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Pegawai. Hal ini dilakukan guna memenuhi tuntutan Pemangku Kepentingan dalam mencapai target Perusahaan.

Dalam 5 tahun terakhir, skor penilaian GCG Perusahaan terus meningkat, hal ini menandai keinginan kuat Perusahaan dalam penerapan GCG. Berdasarkan hasil *self-assessment*, di tahun 2018 penerapan GCG mengalami kemajuan signifikan, baik dalam lingkup penerapan maupun kedalaman masing-masing aspek. Hasil skor GCG untuk aspek Direksi berhasil mencapai 32,652 dari total maksimum 35 dan hasil ini meningkat 0.19 poin dari tahun lalu yang tercatat 32,458. Secara keseluruhan, skor GCG yang berhasil diraih Perusahaan di 2018 adalah sebesar 92,587 dari angka maksimum sebesar 100, naik 4% dari tahun lalu yang tercatat 88,946. Selain itu, dari sisi tingkat kesehatan perusahaan, berdasarkan penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 maka tingkat kesehatan Perusahaan pada tahun 2018 berada pada posisi SEHAT kategori AA dengan skor 89,00. Capaian ini relatif sama dengan tahun sebelumnya yang mencapai skor 90,80 dengan posisi SEHAT kategori AA.

Di sisi lain, Pelindo III juga berhasil memperoleh penghargaan-penghargaan signifikan selama tahun 2018, seperti predikat Trusted Company dalam ajang CGPI 2018, predikat Badan Publik Informatif dalam acara Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 Kategori BUMN, serta meraih predikat Silver Winner pada ajang Indonesia Inhouse Magazine Awards 2018 (InMA).

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Di tahun 2018, terdapat perubahan dalam komposisi Direksi sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Susunan Direksi sebelum mengalami perubahan adalah:

- Direktur Utama: IG. N. Ashkara Danadiputra
- Direktur Komersial dan Operasional: Mohammad Iqbal
- Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi: Husein Latief
- Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Toto Heli Yanto
- Direktur Keuangan: U. Saefudin Noer

Setelah mengalami perubahan, susunan Direksi adalah:

- Direktur Utama: Doso Agung
- Direktur Operasi dan Komersial: Putut Sri Muljanto
- Direktur Teknik: Joko Noerhudha
- Direktur Sumber Daya Manusia: Toto Heli Yanto
- Direktur Keuangan: Iman Rachman

- Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis: Toto Nugroho

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelindo III berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan pihak masyarakat di sekitar Perusahaan. Program yang dijalankan di antaranya berbentuk bantuan permodalan bagi pengusaha kecil dengan pinjaman berbunga rendah, pembiayaan seperti pelatihan dan mengikutsertakan Mitra Binaan pada pameran berskala nasional maupun internasional yang bertujuan untuk memajukan usaha Mitra Binaan, sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh publik maupun penyempurnaan infrastruktur yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Dana yang telah disalurkan untuk program Kemitraan hingga 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp13.541 juta, sementara pada program Bina Lingkungan terealisasi sebesar Rp41.396 juta.

Program PKBL Pelindo III telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, beberapa capaian signifikan program PKBL misalnya Kampoeng Lawas Maspati kini menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Surabaya. Gaung Kampoeng Lawas Maspati sebagai kampung yang memiliki sejarah dan kearifan lokal yang terjaga dengan baik telah sampai ke luar negeri, terbukti dengan jumlah kunjungan turis mancanegara yang mencapai 75 kunjungan dengan total 500 orang turis.

PROSPEK DAN TARGET 2019

Direksi menilai prospek bisnis kepelabuhanan di masa mendatang akan cukup menjanjikan. Hal ini didukung dari beberapa faktor seperti membaiknya beberapa fundamental makroekonomi nasional dan atensi Pemerintah dalam mendorong kemajuan sistem konektivitas laut nasional.

Manajemen Pelindo III telah merumuskan prospek bisnis di tahun 2019. Penentuan prospek tersebut didasarkan pada beberapa faktor seperti kebijakan Pemerintah terkait jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, pungutan terhadap jasa kepelabuhanan; kegiatan atas perusahaan pelayanan pemanduan, pelayanan labuh, serta penyediaan dan perusahaan tanah yang mendapatkan pelimpahan dari pemerintah; dan juga estimasi perekonomian (*economic outlook*) di tahun 2019 yang diproyeksikan oleh Pemerintah akan tumbuh menguat dari 2018. Pemerintah melalui dokumen nota keuangan APBN 2019 memproyeksikan ekonomi nasional akan melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3%.

Perusahaan juga telah menyusun RKAP 2019 dimana dasar penyusunannya menggunakan asumsi makroekonomi sebagai berikut:

- Kurs USD terhadap Rupiah: Rp15.000/USD
- Harga BBM nonsubsidi: Rp11.000/liter
- Pertumbuhan ekonomi: 5,3%
- Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (3 bulan): 5,3%
- Inflasi: 3,5%



Proyeksi Perusahaan dalam RKAP 2019 untuk akun pendapatan usaha adalah sebesar Rp11,21 triliun atau meningkat 10% dari realisasi 2018. Aset Perusahaan diproyeksikan sebesar Rp34,98 triliun atau meningkat 15% dari realisasi 2018. Sementara itu, laba tahun berjalan ditargetkan sebesar Rp2,08 triliun atau meningkat 50% dari realisasi 2018.

Untuk konteks jangka panjang, Perusahaan juga telah menentukan arah pengembangan Perusahaan untuk 5 tahun kedepan guna mendukung terlaksananya visi dan misi. Arah pengembangan Perusahaan tersebut bertujuan untuk:

- Melampaui standar kinerja pelayanan pelabuhan yang dipersyaratkan Pemerintah;
- Mendominasi penguasaan pangsa pasar curah dan kargo di wilayah Pelindo III;
- Mengembangkan bisnis perusahaan dalam rantai nilai bisnis kepelabuhanan;
- Meningkatkan sinergi antar Cabang, Anak, dan Cucu Perusahaan dalam pelayanan dan pengembangan bisnis;
- Memanfaatkan peluang bisnis strategis di luar jasa kepelabuhanan

PENUTUP

Sebagai penutup laporan ini, saya mewakili anggota Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam merealisasikan tujuan dan target Perusahaan di tahun 2018. Apresiasi tertinggi juga kami tujukan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, jajaran Manajer, segenap Pegawai/Staf, serta seluruh Pemangku Kepentingan yang telah memberikan upaya terbaiknya bagi keberlangsungan usaha Pelindo III sepanjang tahun 2018. Dengan komitmen dan antusias yang tinggi, kami meyakini Pelindo III akan terus mampu merealisasikan visi yaitu menjadi pemimpin bisnis di pelabuhan.

Atas nama Dewan Direksi
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Doso Agung
Direktur Utama







TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



01.
DOSO AGUNG
DIREKTUR UTAMA

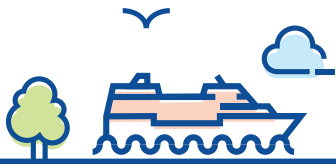
02.
PUTUT SRI MULJANTO
DIREKTUR OPERASI
DAN KOMERSIAL

03.
JOKO NOERHUDHA
DIREKTUR TEKNIK

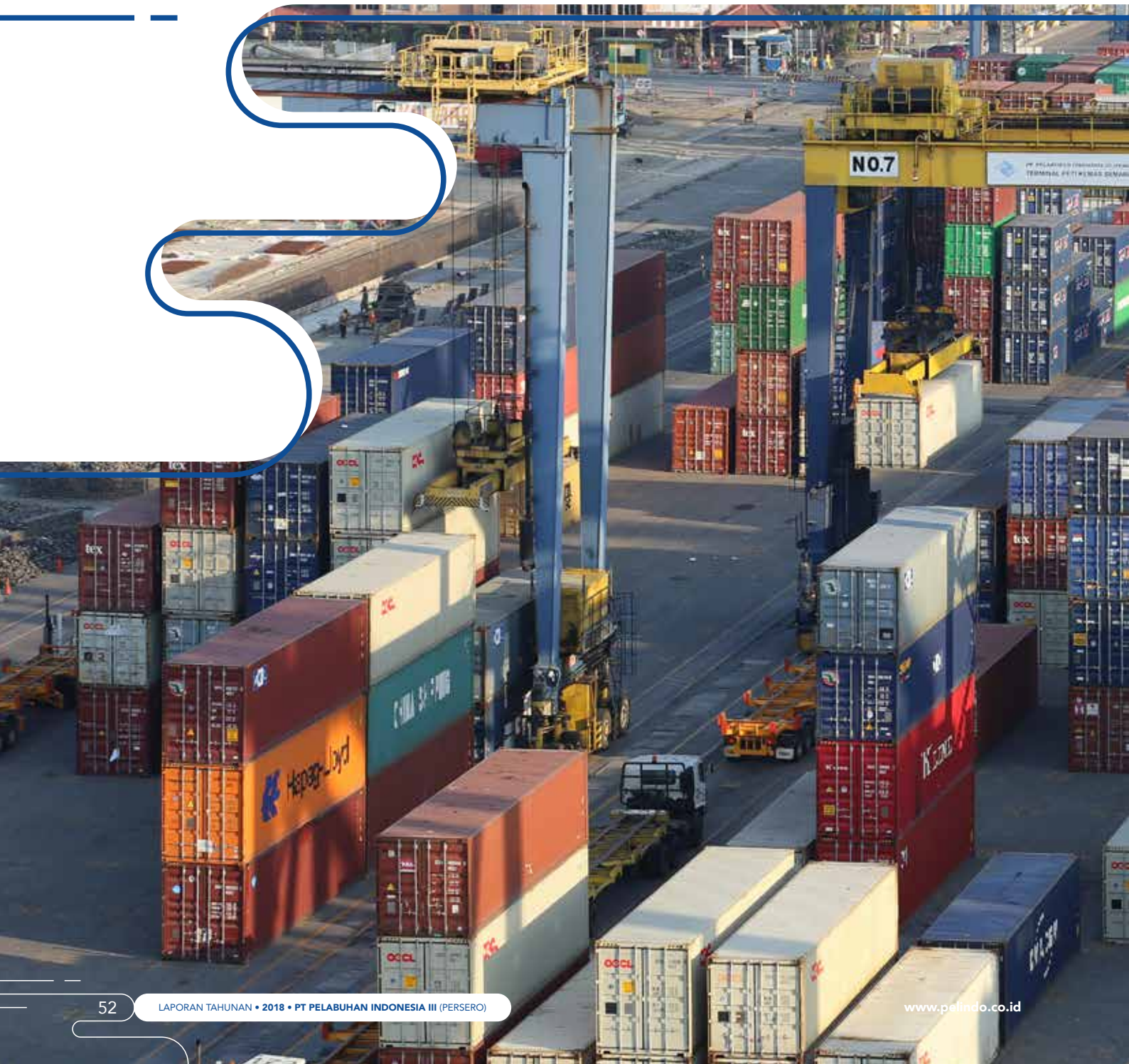
04.
TOTO HELI YANTO
DIREKTUR SUMBER
DAYA MANUSIA

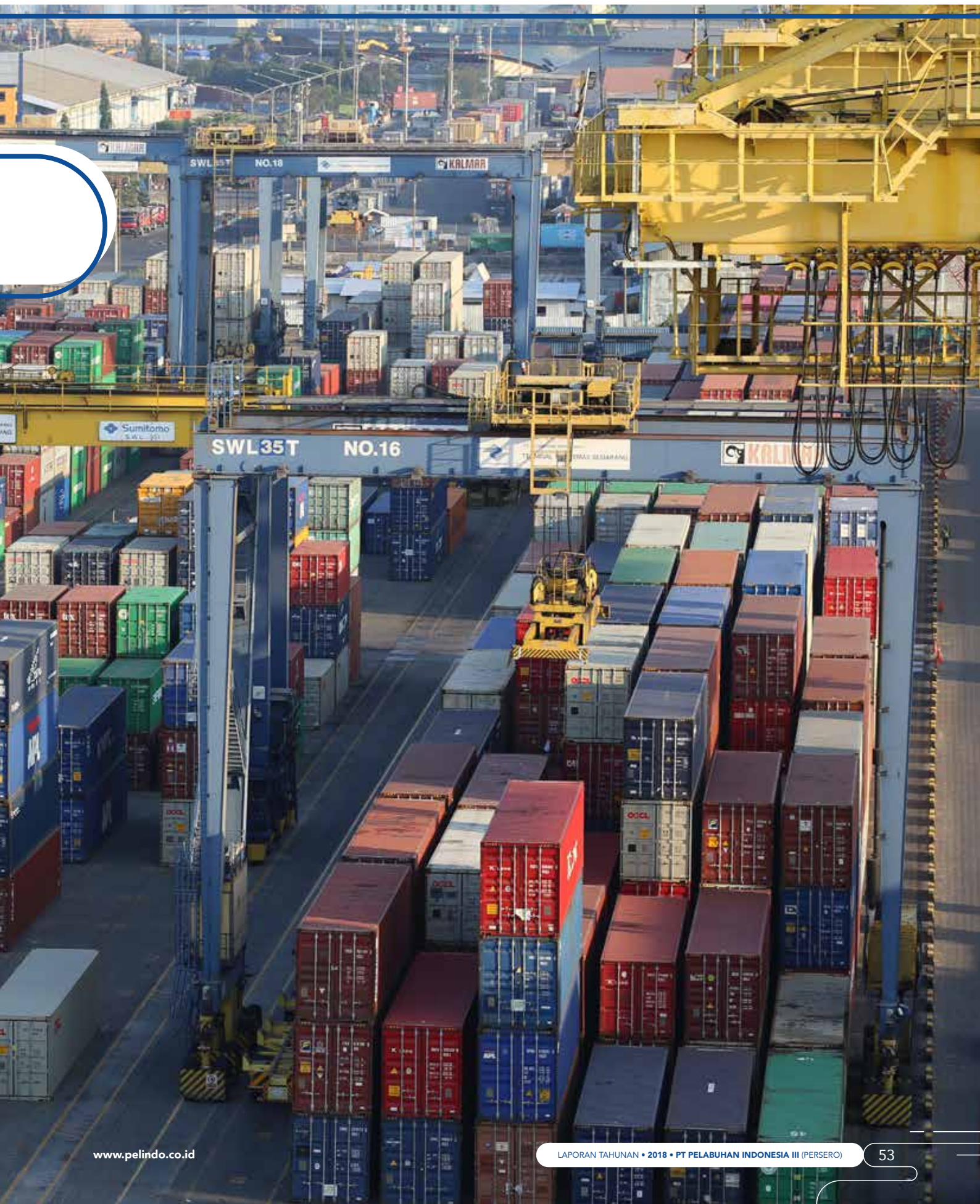
05.
IMAN RACHMAN
DIREKTUR KEUANGAN

06.
TOTO NUGROHO
DIREKTUR TRANSFORMASI
DAN PENGEMBANGAN
BISNIS



02 PROFIL PERUSAHAAN







LAPORAN
MANAJEMEN



PROFIL
PERUSAHAAN



TINJAUAN
PENDUKUNG BISNIS



ANALISIS DAN
PEMBAHASAN MANAJEMEN

INFORMASI PERUSAHAAN





Nama Lengkap Perusahaan	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Penyebutan Lain	Pelindo III
Bidang Usaha	Penyedia Jasa Kepelabuhanan
Status Perusahaan	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Alamat Kantor Pusat	Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya 60165, Indonesia
Telepon	(031) 3298631-37, Kantor Pusat (021) 30044591, 30044566 - Kantor Perwakilan
Faksimile	(031) 3295204, 3295207 - Kantor Pusat (021) 30044567, 30044566 - Kantor Perwakilan
Situs Web	www.pelindo.co.id
Surel	humas@pelindo.co.id, info@pelindo.co.id
Tanggal Pendirian	1 Desember 1992
Tanggal Beroperasi	1 Desember 1992
Dasar Hukum Pendirian	Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991
Akta Pendirian	Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 5 tanggal 1 Desember 1992 tentang Perubahan Perum menjadi Perseroan
Modal Dasar	Rp3.200.000.000.000
Modal Disetor	Rp1.018.953.000.000
NPWP	01.061.000.4-093.000
TDP	503/12131.0/436.6.11/2013
SIUP	KP 88 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011
Jumlah Kantor Pelayanan	1 Kantor Pusat, 4 Regional, dan 43 Pelabuhan
Jumlah Karyawan	4.855 orang (2018) 4.467 orang (2017) 4.114 orang (2016) 4.383 orang (2015) 2.321 orang (2014)
Pemegang Saham	Republik Indonesia (100%)

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

TANGGAL PERESMIAN	PERUBAHAN NAMA
1969	Badan Pengusahaan Pelabuhan
1983	Perum Pelabuhan
2011	Badan Usaha Pelabuhan



RIWAYAT SINGKAT

Pelindo III merupakan perusahaan yang berperan dalam mengelola dan membawahi 43 pelabuhan umum di 7 wilayah provinsi Indonesia. Didirikan pada 1 Desember 1992, Perusahaan terus melakukan pengembangan dan memberikan layanan terintegrasi di segmen penyediaan jasa kepelabuhanan. Hingga saat ini, Perusahaan juga berperan sebagai Perusahaan Induk (*holding company*) dari anak usaha yang ada.

Setelah cukup lama berkiprah sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor perhubungan, Perusahaan senantiasa bekerja keras dalam memenuhi segala tugas, wewenang, dan

tanggung jawabnya untuk mengelola 43 pelabuhan umum yang terbagi dalam 4 regional. Tujuh wilayah provinsi tersebut adalah di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai *holding company*, Perusahaan membawahi 10 Anak Usaha dan Perusahaan Afiliasi yang bergerak dalam beragam sektor terkait jasa kepelabuhanan seperti logistik, layanan kesehatan, bongkar muat peti kemas, pengelola terminal curah cair dan gas, sarana bantu pemanduan, operator terminal, penyedia tenaga kerja, jasa pemeliharaan, pengelolaan alur pelayaran, kawasan industri, bongkar muat, dan lain sebagainya.



TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



PERUSAHAAN

Sebagai penyedia jasa kepelabuhanan terpenting di Indonesia, Perusahaan memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Perusahaan mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan, dan lingkungan maritim. Saat ini status Perusahaan bukan lagi sebagai regulator melainkan operator Pelabuhan yang

secara otomatis mengubah bisnis Perusahaan dari *Port Operator* menjadi *Terminal Operator*.

Surat dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diterbitkan bulan Februari 2011 menjelaskan tentang penunjukan Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), semakin menegaskan peran Perusahaan sebagai *Terminal Operator*.



JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

1960

Pelindo III pada awal berdirinya merupakan sebuah Perusahaan Negara yang pendiriannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1960.

1969

Selanjutnya pada kurun waktu 1969- 1983 bentuk Perusahaan Negara diubah dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1969.

1983

Terjadi perubahan nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1983 & Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1985. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak diusahakan.

1992

Perubahan status dari Perum menjadi Perseroan seiring pesatnya perkembangan dunia usaha. Perubahan ini dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 5 Tanggal 1 Desember 1992.





2011

Perubahan Anggaran Dasar Desember 2011 tentang Keputusan Menteri BUMN No. 236 tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri BUMN selaku Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan, Perseroan Terbatas, serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan Pejabat Eselon BUMN.

2017

- Di tahun 2017, Perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp1,90 triliun atau 115% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,65 triliun.
- Investasi pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp2,45 triliun atau 52% dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp4,68 triliun. Realisasi investasi tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan Perseroan sebagai “*Emerging Industry Leader*” dengan melakukan transformasi menjadi “*Full Handling Terminal System & Logistic Integration-Integrated Industrial Port Estate*”.

2018

Tahun 2018 menjadi penanda perubahan yang berkesinambungan bagi Pelindo III. Dengan adanya revolusi industri 4.0, Pelindo III menghadirkan aplikasi Home Terminal Services (HTS) yang berbasis *mobile app* guna memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi kepelabuhanan. Di sisi lain, ekspansi bisnis juga dilakukan Pelindo III, khususnya pada bisnis energi, properti dan pariwisata, serta logistik. Tujuan dari ekspansi bisnis ini adalah untuk memberikan pelayanan terintegrasi bagi pelanggan dengan menyediakan *integrated beyond port services*.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

PENGHARGAAN

Informasi mengenai penghargaan yang berhasil diraih oleh Pelindo III di tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut:



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

**PENGHARGAAN 2018**

NO.	NAMA PENGHARGAAN	PREDIKAT	PENERIMA	PENYELENGGARA	TANGGAL
1.	Penghargaan atas Penerapan SMK3 di Lingkungan Tempat Kerja	-	PT Terminal Peti Kemas Surabaya	Gubernur Jawa Timur	12 Januari 2018
2.	Penghargaan atas Pelaksanaan Program K3 Lingkungan Tempat Kerja	-	PT Terminal Peti Kemas Surabaya	Gubernur Jawa Timur	12 Januari 2018
3.	Indonesia Inhouse Magazine Awards 2018 (InMA)	Silver Winner	Pelindo III	Serikat Perusahaan Pers	7 Februari 2019
4.	Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 Kategori BUMN	Badan Publik Informatif	Pelindo III	Komisi Informasi Pusat	5 November 2018
5.	Penghargaan atas Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja	Kategori Platinum	RS. PHC Surabaya	Gubernur Jawa Timur	12 Januari 2018
6.	Penghargaan atas Penerapan SMK3 di Lingkungan Tempat Kerja	-	Pelindo III Cabang Gresik	Gubernur Jawa Timur	12 Januari 2018
7.	Penghargaan atas Pelaksanaan Program K3 Lingkungan Tempat Kerja sejak 1 November 2012 - 31 Oktober 2017	-	Kantor Pusat	Gubernur Jawa Timur	12 Januari 2018
8.	Penghargaan atas Pelaksanaan Program K3 Lingkungan Tempat Kerja sejak 1 November 2013 - 31 Oktober 2017	-	Pelindo III Cabang Tanjung Perak	Gubernur Jawa Timur	12 Januari 2018
9.	Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2018	Prima Utama	Pelabuhan Tanjung Perak	Kementerian Perhubungan	17 September 2018
10.	Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2018	Prima Utama	Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara	Kementerian Perhubungan	17 September 2018
11.	Indonesia Good Corporate Governance Awards 2018	Trusted Company	Pelindo III	SWA Magazine dan IICG	19 Desember 2018

SERTIFIKASI

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001:2015)

Pelindo III telah memperoleh sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, mengacu pada SNI ISO 9001:2015 dan sesuai SK penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 308/KEP/BSN/12/2015. Saat ini ISO 9001:2015 telah diterapkan pada 17 Cabang Pelabuhan dan 1 Kantor Pusat di lingkungan Perusahaan:

SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001:2015)

NO.	CABANG	VERSI	NOMOR SERTIFIKAT	BADAN SERTIFIKASI	MASA BERLAKU
1.	Kantor Pusat	2015	01 100 1535145/01	TUV Rheinland	27 Februari 2018 s.d. 9 Februari 2019
2.	Tanjung Perak	2015	01 100 1535145/02	TUV Rheinland	
3.	Banjarmasin	2015	01 100 1535145/03	TUV Rheinland	
4.	Tanjung Emas	2015	01 100 1535145/04	TUV Rheinland	
5.	TPKS	2015	01 100 1535145/05	TUV Rheinland	
6.	Tanjung Intan	2015	01 100 1535145/06	TUV Rheinland	
7.	Kotabaru	2015	01 100 1535145/07	TUV Rheinland	
8.	Gresik	2015	01 100 1535145/08	TUV Rheinland	
9.	Benoa	2015	01 100 1535145/09	TUV Rheinland	
10.	Kupang	2015	01 100 1535145/10	TUV Rheinland	
11.	Sampit	2015	01 100 1535145/11	TUV Rheinland	
12.	Tanjung Wangi	2015	01 100 1535145/12	TUV Rheinland	
13.	Kumai	2015	01 100 1535145/13	TUV Rheinland	
14.	Lembar	2015	01 100 1535145/14	TUV Rheinland	
15.	Tanjung Tembaga	2015	01 100 1535145/15	TUV Rheinland	
16.	Bima	2015	01 100 1535145/116	TUV Rheinland	
17.	Maumere	2015	01 100 1535145/17	TUV Rheinland	
18.	Celukan Bawang	2015	01 100 1535145/18	TUV Rheinland	



SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (ISO 14001:2015)

Pelindo III telah memperoleh sertifikat penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 mengacu pada SNI ISO 14001:2015 sesuai dengan SK penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 282/KEP/BSN/12/2015. Saat ini, ISO 14001:2015 telah diterapkan pada 9 Cabang dan 1 Kantor Pusat yaitu:

SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (ISO 14001:2015)

NO.	CABANG	VERSI	NOMOR SERTIFIKAT	BADAN SERTIFIKASI	MASA BERLAKU
1.	Kantor Pusat	2015	01 104 1535145/01	TUV Rheinland	28 Januari 2018 s.d 29 Februari 2019
2.	Tanjung Perak	2015	01 104 1535145/02	TUV Rheinland	
3.	Banjarmasin	2015	01 104 1535145/03	TUV Rheinland	
4.	Tanjung Emas	2015	01 104 1535145/04	TUV Rheinland	
5.	TPKS	2015	01 104 1535145/05	TUV Rheinland	
6.	Tanjung Intan	2015	01 104 1535145/06	TUV Rheinland	
7.	Kotabaru	2015	01 104 1535145/07	TUV Rheinland	
8.	Gresik	2015	01 104 1535145/08	TUV Rheinland	
9.	Benoa	2015	01 104 1535145/09	TUV Rheinland	
10.	Kupang	2015	01 104 1535145/10	TUV Rheinland	

SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3)

STANDAR YANG DIMILIKI

Pelindo III berkomitmen melaksanakan secara konsisten pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan efisien dengan cara:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Peminimalan terjadinya penyakit akibat kerja dan nihilnya ancaman keamanan dan kecelakaan kerja;
3. Menumbuhkan kesadaran kerja yang mengutamakan kaidah-kaidah K3;
4. Melibatkan seluruh komponen Perusahaan untuk ikut bertanggung jawab atas terlaksananya program K3 agar tercapainya kinerja usaha yang optimal; dan
5. Mematuhi peraturan Perundang-Undangan dan persyaratan lainnya dalam bidang Jasa Kepelabuhanan, terutama yang berkaitan dengan aspek K3.

Dalam rangka pemenuhan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pelindo III memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan secara aman dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Pelindo III No. 37/KPTS.UM.7.03/P.III-1995 tentang Kebijakan K3 di Lingkungan Pelindo III tanggal 28 Agustus 1995.

Perusahaan juga telah menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di 17 Cabang Pelabuhan dan 1 Kantor Pusat di lingkungan Perusahaan. Berikut ini adalah daftar Pelabuhan yang telah menerapkan SMK3 beserta No. Sertifikat dan masa berlakunya:

**SERTIFIKAT SMK3**

NO.	CABANG PELABUHAN	AUDITOR	NOMOR SERTIFIKAT	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1.	Tanjung Perak	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
2.	Tanjung Emas	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
3.	Tanjung Intan	Pt Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
4.	Banjarmasin	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
5.	Benoa	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
6.	Tenau Kupang	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
7.	Kotabaru	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
8.	TPKS	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
9.	Gresik	PT Sucofindo Indonesia	No. 168 tahun 2014	14 Mei 2014 s.d. 13 Mei 2017	Dalam Proses Pembaruan
10.	Sampit	PT TUV Rheinland	No. 168 tahun 2014	15 Mei 2014 s.d. 13 Mei 2017	Dalam Proses Pembaruan
11.	Lembar	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
12.	Tanjung Wangi	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
13.	Celukan Bawang	PT TUV Rheinland	No. 143 tahun 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019	
14.	Kumai	PT TUV Rheinland	No. 143 tahun 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019	
15.	Kantor Pusat	PT TUV Rheinland	No. 143 tahun 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019	
16.	Bima	PT TUV Rheinland	No. 201 tahun 2017	14 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020	
17.	Maumere	PT TUV Rheinland	No. 201 tahun 2018	15 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020	
18.	Tanjung Tembaga	PT TUV Rheinland	No. 201 tahun 2019	16 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020	



SISTEM MANAJEMEN PENGAMAN PELABUHAN INTERNASIONAL

Pelindo III telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Pelabuhan mengacu pada Amandemen Konvensi International Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 Bab XI-2 tentang *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)* dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 tahun 2003 tentang pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang ISPS Code di Wilayah Indonesia, saat ini ISPS Code telah diterapkan pada 10 Cabang Pelabuhan dan 1 UPP di lingkungan Perusahaan yaitu:

SERTIFIKAT ISPS CODE

NO.	CABANG PELABUHAN	BADAN SERTIFIKASI	NOMOR SERTIFIKAT	MASA BERLAKU
1.	Tanjung Perak	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	002-0096-DN	28 November 2014 s.d. 24 November 2019
2.	Tanjung Emas	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	002-0075-DN	18 Agustus 2014 s.d. 17 Agustus 2019
3.	Tanjung Intan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	002-0163-DN	3 Januari 2016 s.d. 2 Januari 2021
4.	Benoa	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	002-0176-DN	9 Agustus 2017 s.d. 12 Juni 2022
5.	Tenau Kupang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	02-0345-DN	23 Agustus 2014 s.d. 22 Agustus 2019
6.	Kotabaru	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	02-0231-DN	29 Desember 2015 s.d. 28 Desember 2020
7.	TPKS	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	02-0074-DN	18 Agustus 2014 s.d. 17 Agustus 2019
8.	Gresik	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	02-0336-DV	4 Februari 2014 s.d. 3 Februari 2019
9.	Lembar	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	02-0182-DN	27 Maret 2018 s.d. 27 Maret 2023
10.	Tanjung Wangi	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	02-0256 - DN	16 Maret 2018 s.d. 20 Maret 2023
12.	Bagendang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	02-0467 - DV	19 November 2018 s.d. 15 November 2023
13.	Celukan Bawang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	02-0438-DV	2 Mei 2018 s.d. 25 April 2023

PERISTIWA PENTING 2018



12 JANUARI 2018

Pelindo III Group Menerima 7 Penghargaan K3 dari Menteri Tenaga Kerja

Pelindo III Group meraih penghargaan Zero Accident untuk untuk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Gresik, Terminal Petikemas Surabaya (TPS), juga unit Kantor Pusat Pelindo III. Selain itu, Pelindo III Group juga menerima penghargaan Penerapan SMK3 untuk Pelabuhan Gresik dan TPS. Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS juga diterima oleh PT Pelindo Husada Citra, pengelola Rumah Sakit PHC Surabaya.



25 JANUARI 2018

Peresmian PHC Baby Daycare

PT Pelindo Husada Citra (PT PHC), anak usaha Pelindo III, meresmikan fasilitas PHC Baby Daycare (Tempat Penitipan Anak) di RS PHC Surabaya sebagai tempat penitipan anak bagi karyawan yang bekerja di daerah Surabaya Utara.



1 FEBRUARI 2018

Launching Aplikasi Home Terminal Services (HTS)

Untuk mempercepat dan mempermudah proses pemesanan layanan jasa kepelabuhanan, Pelindo III meluncurkan aplikasi *mobile*, Home Terminal Service. Melalui teknologi tersebut, pengguna jasa dapat memesan berbagai jasa kepelabuhanan melalui aplikasi *smartphone*.



5 FEBRUARI 2018

MoU Pelindo III dengan PT Wika dan Askrindo

Pelindo III telah menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk merealisasikan salah satu Program Strategis Nasional (PSN), yaitu *flyover* Teluk Lamong dengan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB). Pelindo III juga menjalin kesepakatan dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo dalam hal penjaminan risiko atas aset yang dimiliki oleh Perusahaan.



12 MARET 2018

MoC Pelindo III dengan PT Muria Sumba Manis, PT Sriboga Flour Mill, dan PT Indonesia Bulk Terminal

Pelindo III telah menandatangani *Memorandum of Collaboration* (MoC) dengan 3 perusahaan swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur daerah. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Muria Sumba Manis, PT Sriboga Flour Mill, dan PT Indonesia Bulk Terminal. Melalui kolaborasi ini, diharapkan adanya pengoptimalan aset pelabuhan untuk meningkatkan iklim usaha di Indonesia bagian timur.



9 APRIL 2018

LoI Pelindo III dengan PT Mentari Line, PT Tanto Intim Line, dan PT Pelayaran Tempuran Mas Tbk

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama antara BJTI dan LEGI untuk penyediaan fasilitas *shore connection* kapal, Pelindo III telah menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan 3 perusahaan swasta, yaitu PT Mentari Line, PT Tanto Intim Line, dan PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk.



20 APRIL 2018

Pelindo III Akuisisi Saham APBS dengan Porsi Kepemilikan menjadi 90%

Pelindo III telah mengakuisisi saham pada PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) melalui akuisisi masing-masing 15% saham dari Van Oord (kontraktor pengerukan asal Belanda) dan PT Gerbang Samudera Utama (GSU), memberikan Pelindo III kontrol penuh dengan 90% saham.



30 APRIL 2018

Pengadaan 7 Reach Stacker baru bagi Pelindo III

Pelindo III berinvestasi untuk mendatangkan 7 *Reach Stacker* bagi beberapa pelabuhan yang dikelolanya. Pengadaan ini akan meningkatkan produktivitas operasional di lapangan penumpukan seiring peningkatan arus peti kemas.



TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



21 FEBRUARI 2018

Pengiriman Bantuan dari ACT ke Palestina melalui Tanjung Perak
Kapal kemanusiaan yang membawa bantuan untuk Palestina berangkat dari Dermaga Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Pelabuhan Tanjung Perak. Kegiatan yang diinisiasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia ini kembali melayarkan Kapal Kemanusiaan dengan mengangkut 10.000 ton beras yang dikirim secara bertahap.



21 FEBRUARI 2018

PT PDS resmikan pusat pelatihan Improvement Center Pelindo (ICP)
PT PDS sebagai salah satu anak perusahaan Pelindo III telah meresmikan Improvement Center Pelindo (ICP) untuk memaksimalkan kinerja Perusahaan.



21 FEBRUARI 2018

Mou Pelindo III dengan Van Oord, PT Wika, dan PT PP
Pelindo III telah menandatangani 3 kontrak terkait proyek pengembangan infrastruktur di sektor maritim sebagai bagian dari rencana investasi untuk tahun 2018. Realisasi proyek ini melibatkan kontraktor spesialis proyek maritim asal Belanda, Van Oord, serta sinergi antar-BUMN dari PT Wika Gedung dan PT Pembangunan Perumahan (PP). Proyek pengembangan ini akan dilaksanakan di Tanjung Perak (Surabaya), Benoa (Bali), dan Gili Mas Lembar (Lombok).



25 FEBRUARI 2018

Perpanjangan Dermaga Multipurpose 1 Tanjung Intan, Cilacap
Pelindo III telah menyelesaikan proyek revitalisasi dermaga multipurpose 1 Pelabuhan Tanjung Intan. Revitalisasi fasilitas tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan daya saing logistik Cilacap dan kawasan sekitarnya.



2 MEI 2018

Pelindo III Rilis Obligasi Global Senilai US \$500 Juta
Pelindo III menerbitkan obligasi global US\$500 juta untuk mendanai sejumlah program strategis Perusahaan.



3 MEI 2018

Terminal Teluk Lamong dinobatkan sebagai Perusahaan Kreatif 2018
PT Terminal Teluk Lamong (TTL), anak usaha Pelindo III, meraih penghargaan sebagai salah satu Indonesia Most Creative Company 2018 di Jakarta.



7 MEI 2018

Bimbingan Teknis Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Komisi Informasi Pusat
Komisi Informasi Pusat memberikan Bimbingan Teknis Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Ruang Bromo, Lantai V Kantor Pusat Pelindo III, Surabaya.



13 MEI 2018

Pelindo III serahkan Setoran Pajak ke Negara sebesar Rp1,8 Triliun
Berdasarkan hasil keputusan hasil RUPS, Pelindo III melakukan pembayaran kontribusi ke negara berupa dividen perusahaan dengan nilai total sebesar Rp1,8 triliun. Ini merupakan level tertinggi sepanjang sejarah pendirian Perusahaan.



3 JUNI 2018

Kunjungan Dalian Maritime University ke Pelindo III Cabang Tanjung Perak

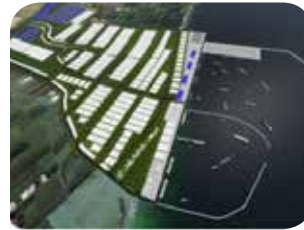
Beberapa dosen pengajar dan mahasiswa/mahasiswi Dalian Maritime University dari China menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pelindo III setelah sebelumnya mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan studi banding program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayaran dan Kemaritiman (On-board Training) dengan 2 universitas negeri di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.



4 JUNI 2018

Pelindo III Terapkan BIM untuk Proyek Investasi

Pelindo III menjadi BUMN di sektor logistik pertama yang menerapkan *Building Information Modelling* (BIM) dalam melakukan perencanaan pembangunan untuk proyek investasinya. BIM menjadi bagian penting dalam penerapan *Architecture, Engineering, Construction, Operation, dan Maintenance* (AECOM) untuk mewujudkan infrastruktur pelabuhan lebih cepat terselesaikan.



6 JUNI 2018

Pelindo III dengan PSA Kembangkan Kendal

Pelindo III berencana akan kerja samakan Kendal International Port dengan 2 perusahaan berskala internasional. Kerja sama tersebut dituangkan dalam MoC yang ditandatangani oleh CEO Pelindo III Ari Askhara, President Director PT China Communications Construction Engineering Indonesia Fan Fiyeng, dan Head of Terminal Services PSA Seow Hwee di Jakarta.



1 JULI 2018

Transformasi Logo Pelindo III

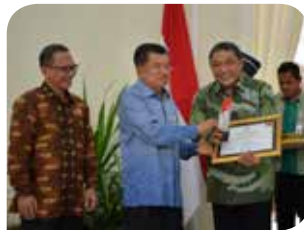
Berdasarkan Peraturan Direksi No. PER.0011/HM.03/HOFC-2018 tanggal 25 Juni 2018, Pelindo melakukan pergantian logo Perusahaan.



1 NOVEMBER 2018

MoU Pelindo III dengan BNN terkait Pemberantasan Narkoba

Pelindo III bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam meningkatkan penguatan pengawasan penyelundupan narkotika di wilayah pelabuhan laut. Kerja sama ini dilakukan melalui sosialisasi Kepala BNN RI Heru Winarko kepada Direksi dan Pejabat Struktural Pelindo III.



5 NOVEMBER 2018

Pelindo III Raih Juara Pertama BUMN Informatif dari Komisi Informasi Pusat

Pelindo III terpilih menjadi salah satu BUMN Informatif oleh Komisi Informasi Pusat pada acara penganugerahan keterbukaan informasi tahun 2018 bagi badan publik di Indonesia.



11 NOVEMBER 2018

Susunan Direksi Pelindo III telah Lengkap

Putut Sri Muljanto dan Toto Nugroho diangkat untuk melengkapi susunan Direksi Pelindo III. Putut Sri Muljanto diangkat menjadi Direktur Operasi dan Komersial, sedangkan Toto Nugroho menjadi Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis.



12 NOVEMBER 2018

Pelindo III Adakan Magang Bersertifikat untuk Milenial

Pelindo III menyambut para generasi milenial calon pemimpin masa depan untuk ikut berkontribusi dalam bisnis usaha perusahaan, dalam sebuah kegiatan bertajuk Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. Mereka berasal dari mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang akan belajar dan menimba ilmu selama 6 bulan.



19 DESEMBER 2018

Pelindo III Bawa Sektor Maritim Masuki Jajaran BUMN dengan Penerapan TI Terbaik

Pelindo III meraih 2 penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi Forum Teknologi Informasi (FORTI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Awards 2018. Kedua penghargaan yang dimenangi yaitu peringkat keempat dengan nilai *maturity level* di atas 3 untuk kategori *IT Governance Awards 2018* dan *IT Governance Outstanding Awards 2018*.



27 DESEMBER 2018

MoU Pelindo III dengan PGN LNG

Pelindo III dan PGN LNG telah menandatangani MoU untuk kerja sama penyediaan fasilitas terminal LNG bagi PGN LNG (Pertamina Group) di Pelabuhan Tanjung Perak guna mendukung pasokan LNG di area Jawa Timur.



TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



11 JULI 2018

MoU Pelindo III dengan WIKA untuk Pembangunan Pelabuhan Bumiharjo dan Bagendang
Pelindo III menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT WIKA untuk proyek perpanjangan dermaga di Pelabuhan Bagendang, pembangunan dermaga multipurpose di Pelabuhan Bumiharjo, serta *design and build* Terminal Kalibaru Tahap I.



17 SEPTEMBER 2018

Pelindo III Terima 11 Penghargaan dari Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, menyerahkan 11 penghargaan pelayanan prima kepada Pelindo III dari 147 penghargaan pelayanan prima sektor transportasi yang diserahkan kepada para insan transportasi Indonesia.



20 SEPTEMBER 2018

Pergantian Direktur Utama Pelindo III
Direktur Utama IG. N. Askhara Danadiputra digantikan oleh Doso Agung yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo IV.



31 OKTOBER 2018

MoU Pelindo III dengan Kejaksaan Tinggi terkait Pendampingan Proyek Strategis
Untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan terhadap proyek strategis di beberapa pelabuhan di provinsi yang menjadi naungan Pelindo III, Perusahaan melakukan kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Kejaksaan Tinggi Negeri di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.



22 NOVEMBER 2018

Pelindo III Terima Penghargaan SNI Awards
Pelindo III dan dua anak usahanya, PT Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) dan PT Terminal Teluk Lamong (TTL) memenangi SNI Awards 2018 dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).



6 DESEMBER 2018

Pelindo III Luncurkan Inovasi Pusat Kontrol Layanan Kepelabuhanan
Pelindo III meresmikan Port Operations Command Center (POCC) atau pusat kontrol operasional pelabuhan untuk pelayanan kapal dan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. POCC tersebut beroperasi selama 24 jam nonstop dalam 7 hari seminggu dan diperkuat oleh 64 operator yang bekerja secara terjadwal.



14 DESEMBER 2018

Sinergi Pelindo I, II, III, dan IV dalam Mengoptimalkan Aset dan Layanan
BUMN kepelabuhanan Pelindo I, II, III, dan IV menyiapkan rencana sinergi guna mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasanya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja sama optimalisasi aset, *engineering project*, dan penyediaan suku cadang antara PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) dengan PT Equiport Inti Indonesia, serta perjanjian pertukaran informasi dan dukungan penyediaan suku cadang antara PT JPPI dan dengan PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA).

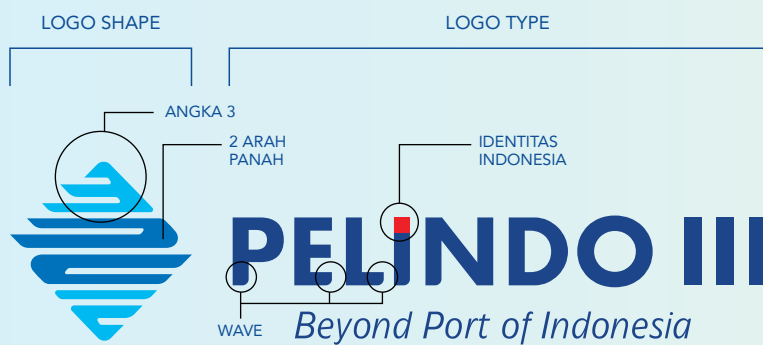


16 DESEMBER 2018

Pelindo Charity Run dalam Rangka HUT Pelindo I-IV
Memperingati HUT ke-26, BUMN Kepelabuhanan Pelindo I, II, III, dan IV serentak menyelenggarakan aksi sosial bertajuk Pelindo Charity Run di Pelabuhan Tanjung Perak. Kurang lebih 5.000 peserta berpartisipasi dalam acara ini.



MAKNA LOGO PERUSAHAAN



LOGO SHAPE

Pengkinian dan perbaikan terhadap bentuk logo sebelumnya dengan tidak menghilangkan bentuk (*shape*) dasarnya, yaitu dua arah panah bersayap yang merepresentasikan Pelindo III yang selalu bergerak dinamis dan fleksibel, sehingga adaptif terhadap segala perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan juga membangun hubungan yang erat dengan lingkungan sekitarnya.

Hidden shape (tersamar) angka 3, dalam desain logo, yang melambangkan Pelindo III.

LOGOTYPE

Dipilih *font type* yang lebih tegas, melambangkan Perusahaan yang menjunjung integritas, dinamis, dan selalu menjadi yang terdepan. Dilakukan modifikasi dalam bentuk setengah lengkungan pada bagian kaki *font type* tersebut. Modifikasi ini dimaksudkan untuk membuat perbedaan dan menjadikannya unik, dimana lengkungan tersebut juga melambangkan gelombang lautan.

WARNA

Komposisi warna yang digunakan merupakan kombinasi *Bright Cerulean*, *Ocean Blue*, dan *Dark Cerulean*, yang menggambarkan laut dan langit biru; dimana laut merupakan tempat dilakukannya kegiatan bisnis utama dari Pelindo III.

Terdapat elemen warna merah dalam *logotype* Pelindo III, yang menunjukan Perusahaan yang berasal dari Indonesia, dan sebagai pemisah dari singkatan Pelabuhan Indonesia.



BIDANG USAHA

BIDANG USAHA UTAMA

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta meningkatkan nilai Perusahaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, *multipurpose (general cargo)* barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
4. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, *general cargo*, dan kendaraan;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, *multipurpose*, penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan lahan untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri, dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multimoda;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum; dan
9. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi muatan

BIDANG USAHA PENUNJANG

Selain kegiatan usaha utama sesuai yang dimaksud pada Ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan, Pelindo III dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Bidang usaha penunjang Perusahaan antara lain:

1. Pelayanan Air
2. Pelayanan Listrik
3. Pengusahaan Peralatan
4. Pelayanan Konsolidasi Muatan
5. Pengusahaan Properti
6. Kawasan Industri
7. Pengusahaan *Docking Kapal*
8. Pengusahaan *Forwarding*
9. Pas Pelabuhan
10. Pelayanan Kesehatan

BIDANG USAHA KEPELABUHANAN

Bidang usaha Pelayanan Kapal meliputi:

1. Pelayanan labuh, yaitu pelayanan penyediaan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
2. Pelayanan Pemanduan, yaitu kegiatan pelayanan membantu Nahkoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar;
3. Pelayanan Penundaan, yaitu kegiatan pelayanan menarik, mendorong, atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk tambat ke/untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestel*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal, dan fasilitas tambat lainnya yang menggunakan kapal tunda; dan
4. Pelayanan Penambatan, yaitu kegiatan pelayanan kapal melakukan ikat tali di tambatan/dermaga untuk melakukan bongkar muat barang atau kegiatan lainnya.

Bidang usaha Pelayanan barang, yang meliputi:

1. Pelayanan Bongkar Muat, yaitu pelayanan pembongkaran/pemuatan muatan dari atau ke kapal;
2. Pelayanan Gudang Penumpukan, yaitu pelayanan penimbunan sementara muatan setelah dibongkar atau dimuat dari atau ke kapal pada ruangan tertutup; dan
3. Pelayanan Lapangan Penumpukan, yaitu pelayanan penumpukan sementara muatan setelah dibongkar atau akan dimuat dari/ke kapal pada lapangan penumpukan terbuka.



PRODUK DAN LAYANAN

Merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha Perusahaan adalah menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu meliputi perusahaan:

1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal;
2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
3. Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang maupun hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang;
4. Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
5. Lahan untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;
6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air bersih dan instalasi limbah pembuangan;
7. Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang maupun hewan;
8. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan;
9. Jasa pelayanan kesehatan;
10. Jasa transportasi laut;
11. Jasa penyewaan fasilitas dan peralatan di bidang kepelabuhanan;
12. Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
13. Properti di lingkungan pelabuhan;
14. Kawasan industri di lingkungan pelabuhan;
15. Kawasan wisata di lingkungan pelabuhan;
16. Depo peti kemas;
17. Jasa konsultan di bidang kepelabuhanan;
18. Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhan; dan
19. Jasa konstruksi di bidang kepelabuhan.





VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan aspirasi pemangku kepentingan, jajaran Perusahaan telah menetapkan Visi dan Misi Perusahaan. Visi Pelindo III yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2015-2019 telah disesuaikan dan sejalan dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana status dan posisi Perusahaan selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) telah mengalami perubahan fungsi dari yang sebelumnya sebagai penyelenggara usaha kepelabuhanan menjadi hanya penyelenggara usaha terminal pelabuhan.

Perusahaan telah melakukan penyesuaian pada Visi dan Misi untuk review RJPP 2015-2019. Pada RJPP 2015-2019 sebelumnya, Perusahaan berkeinginan untuk menjadi pemain global. Maka, ruang lingkup pelayanan jasa kepelabuhanan diperluas tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga regional/global. Oleh karena itu, ditetapkanlah Visi Perusahaan yaitu "Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan yang Prima". Namun Visi tersebut dianggap sudah tercapai di periode 2015-2017. Oleh karena itu, dalam tinjauan RJPP 2015-2019 Perusahaan menetapkan Visi dan Misi baru, Visi Perusahaan sampai dengan tahun 2019 yaitu:

VISI

"MENJADI PEMIMPIN BISNIS DI PELABUHAN"

Guna merealisasikan Visi Perusahaan tersebut, maka disusunlah Misi Perusahaan sebagai penjabaran dari Visi Perusahaan. Misi yang disusun juga mengakomodasi UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta memperhatikan kondisi objektif yang ada. Misi Perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah:

MISI

- Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk peningkatan kepuasan Stakeholder;
- Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa layanan bisnis di pelabuhan melalui prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik; dan
- Menciptakan solusi bisnis yang cerdas melalui integritas dan kerja sama dengan mitra strategis.

PERNYATAAN

Visi dan Misi Perusahaan telah dibahas, dikaji, ditinjau kembali, serta disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam RJPP 2015-2019. Ini dibuktikan dengan telah disetujuinya draft RJPP tahun 2015-2019, untuk kemudian diserahkan kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN) pada tanggal 2 November 2017.

TUJUAN PERUSAHAAN

Untuk memastikan pencapaian Misi Perusahaan tersebut di atas, Perusahaan telah menetapkan 2 tujuan Perusahaan yaitu:

1. Keberlanjutan korporasi melalui layanan bisnis yang efektif dan efisien. Dalam kurun 5 tahun (2015-2019), Perusahaan akan mengembangkan lini usahanya sehingga tidak hanya berfokus pada bisnis intinya sebagai penyedia jasa kepelabuhanan tetapi juga menyediakan berbagai lini usaha di pelabuhan. Mulai dari penyediaan air bersih menggunakan *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) hingga bisnis properti di pelabuhan. Untuk itu, Perusahaan akan memastikan pencapaian *operational service excellence* melalui implementasi inisiatif penyiapan *people-process-technology* guna mendapatkan layanan bisnis yang efektif dan efisien.
2. Tujuan Perusahaan berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul Badan Usaha Milik Negara (KPKU-BUMN) adalah: **"Menjadi Emerging Industry Leader Pada Tahun 2018"**

BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, serta Tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan, manajemen Perusahaan menyadari perlunya dukungan budaya organisasi yang selaras dengan karakteristik bisnis, lingkungan bisnis, dan strategi Perusahaan yang telah terumuskan. Budaya yang dimaksud perlu dimiliki oleh seluruh Insan Pelindo III serta terinternalisasi dengan baik di setiap proses bisnis Perusahaan. Nilai inti perusahaan adalah sebagai berikut:

CUSTOMER FOCUS

Senantiasa menjadikan pengguna jasa sebagai fokus utama dalam penyediaan pelayanan jasa yang prima.

CARE

Senantiasa mewujudkan kepedulian untuk kepentingan Perusahaan baik secara internal maupun eksternal.

INTEGRITY

Insan Pelindo III menjunjung tinggi integritas diri dalam menjalankan semua kegiatan Perusahaan.

Evaluasi dan *monitoring* dilaksanakan setiap 3 bulan untuk memastikan implementasi budaya Perusahaan telah berjalan dengan baik. Proses tersebut dilaksanakan melalui pembentukan *agent of change* di setiap Unit Kerja (untuk Kantor Pusat), Regional, dan Cabang Pelabuhan. Penyampaian implementasi Budaya Perusahaan tahun berjalan oleh Manajemen Regional dan Cabang Pelabuhan kepada Direksi dilakukan ketika Rapat Kerja Tahunan di tahun berikutnya.

STRATEGI PERUSAHAAN

Perusahaan merumuskan 3 Misi Perusahaan dengan tujuan untuk mencapai Visi Perusahaan; sementara itu, untuk memastikan pencapaian Misi Perusahaan, maka disusun Strategi Perusahaan. Strategi merupakan pola tindakan dan desain alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi terbagi menjadi 3 level yaitu strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional.

STRATEGI KORPORAT

Strategi Korporat mengidentifikasi serangkaian bisnis, pasar, atau industri dimana Perusahaan bersaing, serta distribusi sumber daya di antara bisnis-bisnis tersebut. Berdasarkan analisis strategi formulasi yang telah dijelaskan dalam RJPP 2015-2019, maka terdapat 3 pilihan Perusahaan untuk diterapkan dalam bisnis yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan Perusahaan, yaitu:

1. INOVASI

Inovasi adalah strategi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada Pemangku Kepentingan melalui inovasi berkelanjutan dan kreativitas yang dikembangkan di dalam Organisasi, khususnya di bidang pengembangan bisnis dan *Research and Development* (R&D).

2. OPERASIONAL PRIMA

Operasional Prima adalah strategi Perusahaan dalam melakukan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) secara konsisten pada inisiatif organisasi yang menekankan pada perubahan *people-process technology*.

3. SINERGI

Sinergi adalah strategi Perusahaan dalam meningkatkan pangsa pasar di masing-masing pelabuhan dengan cara meningkatkan hubungan kerja sama baik dengan cabang, mitra, maupun Pemerintah.

STRATEGI BISNIS

Strategi bisnis menentukan tindakan utama dimana Perusahaan membangun dan menguatkan posisi persaingannya di pasar. Penjabaran mengenai 7 strategi bisnis adalah sebagai berikut:

1. Diferensiasi Produk;
2. Kedekatan dengan Pelanggan;
3. Inovasi Proaktif;
4. Peningkatan Kapasitas Pelabuhan dan Pembelajaran Berkelanjutan;
5. *Lean Organization*;
6. Integrasi Horisontal dan Vertikal; dan
7. Kewajiban Pelayanan Publik.

STRATEGI FUNGSIONAL

Strategi fungsional adalah strategi yang diimplementasikan oleh setiap area fungsional untuk mendukung strategi bisnis Perusahaan. Berikut adalah penjabaran strategi fungsional sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di Perusahaan, yaitu:



1. SDM DAN UMUM

- Peningkatan kompetensi pegawai;
- Penerapan organisasi berbasis *Structure Follow Strategy*;
- Penerapan *Talent Management System*;
- Penerapan *Pay for Performance System*; dan
- Optimalisasi budaya perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

2. KEUANGAN

- Investor relation dan investment management;
- Cash Management System*;
- Cost focus*;
- Optimalisasi IT dan implementasi *risk management* dalam bidang keuangan; dan
- Akuntabilitas laporan keuangan.

3. OPERASI DAN PENGEMBANGAN BISNIS

- Operational excellence*;
- Customer focus*;
- Optimalisasi tarif;
- Sinergi operasional;
- Inovasi produk dan layanan jasa;
- Risk intelligent*; dan
- Green port management system*.

4. TEKNIK

- Pengembangan fasilitas pelabuhan;
- Modernisasi alat fasilitas pelabuhan; dan
- Equipment management system*.

5. TEKNOLOGI INFORMASI

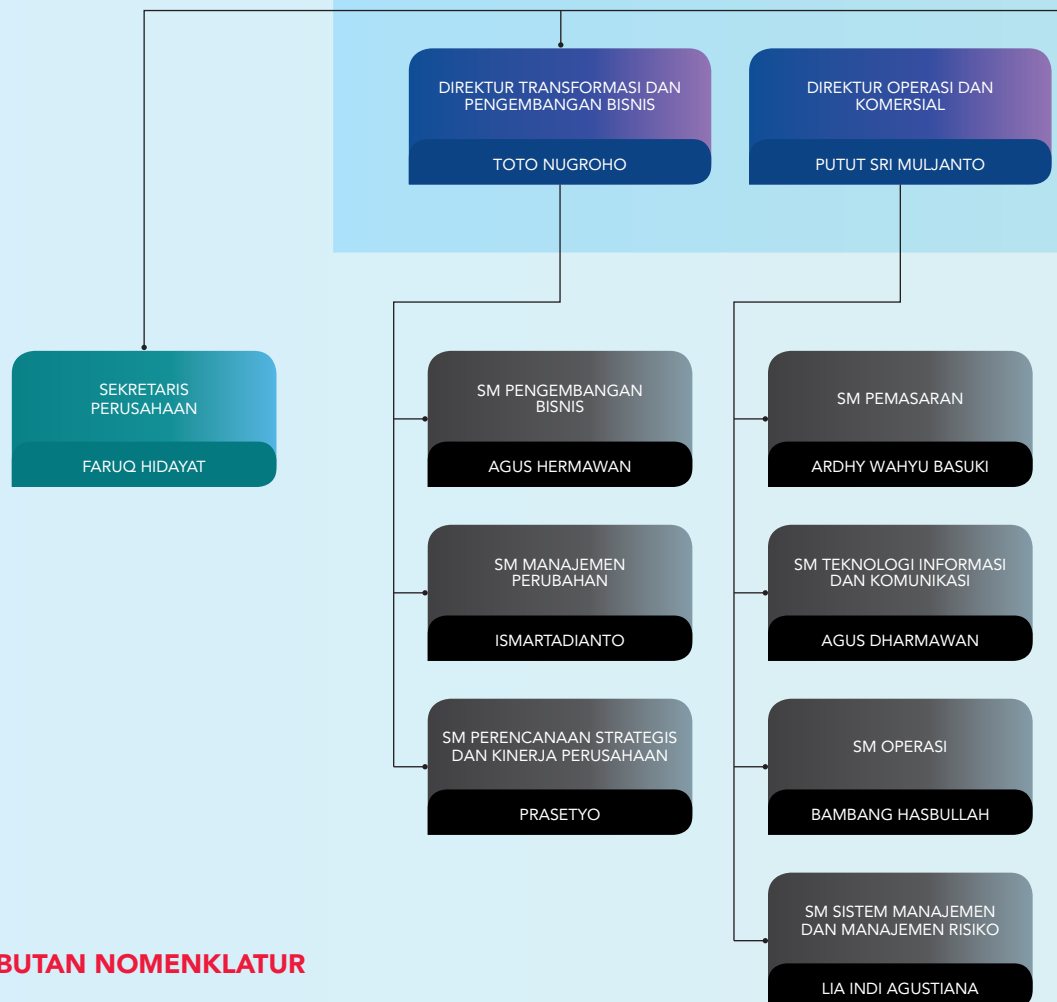
- Full ICT based system*;
- Pengintegrasian sistem informasi di induk dan anak Perusahaan; dan
- IT sebagai pendukung keberlanjutan usaha.





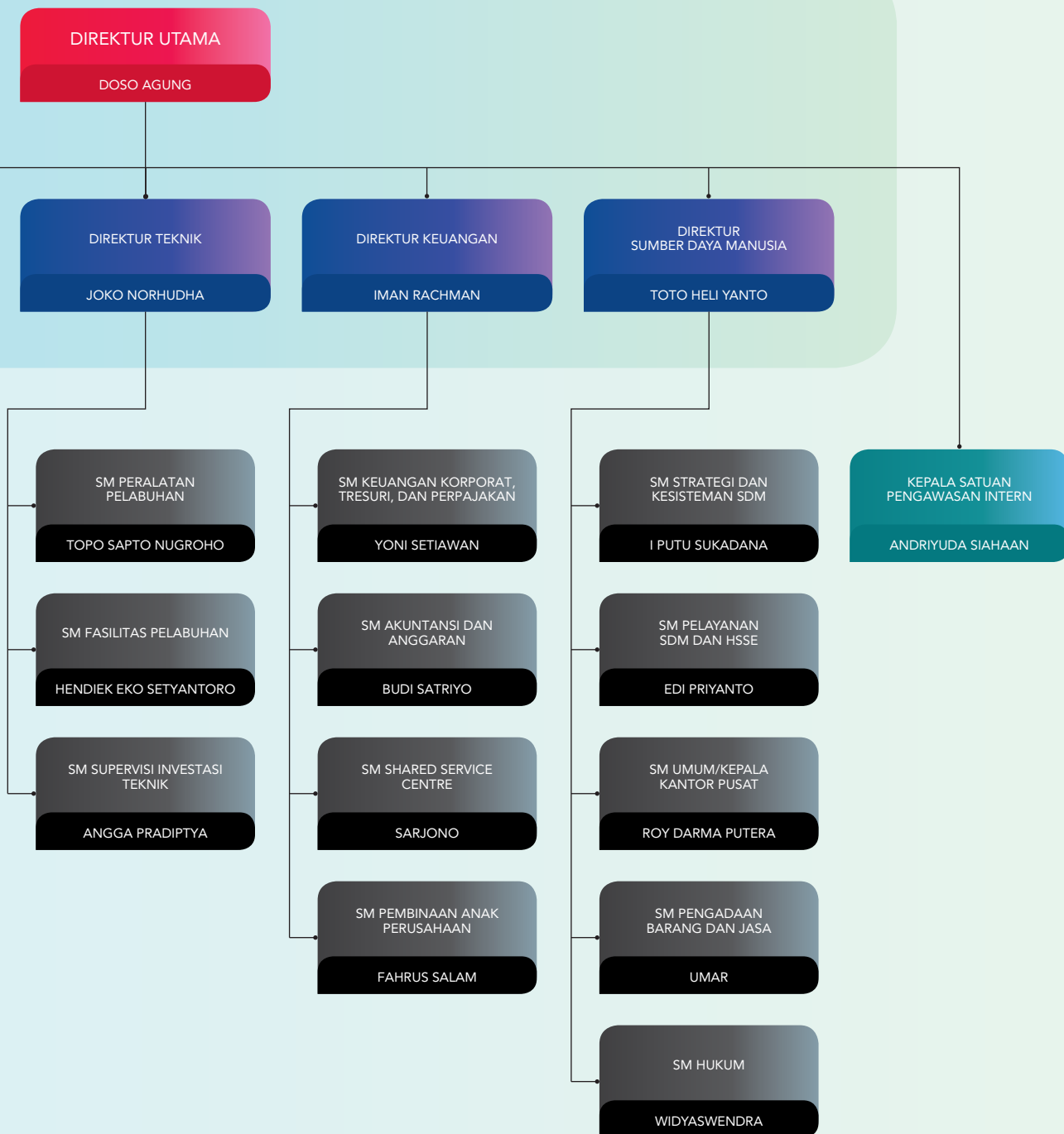
STRUKTUR ORGANISASI

DIREKSI



REGULASI PENYEBUTAN NOMENKLATUR

Peraturan terkait penyebutan nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Pelindo III No. PER.0078/05.0101/HOFC-2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat.





PROFIL DEWAN KOMISARIS



HARI BOWO
KOMISARIS UTAMA

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Surabaya, 11 Juni 1956
Usia	63 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	- Akademi Militer Angkatan Laut (1982) - Sarjana Ekonomi (S1), Universitas WR Supratman (1998) - Magister (S2) Pertahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada (2010)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	- Wakil Kepala Staf Angkatan Laut RI dengan pangkat Laksamana Madya TNI AL (2012-2014) - Gubernur Akademi Angkatan Laut tahun (2010)
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-127/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Pelindo III.
Periode Menjabat	10 Juni 2014 - 9 Juni 2019
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III



TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



ZAINAL ABIDIN
KOMISARIS INDEPENDEN

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 12 Juli 1947
Usia	71 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Akademi Militer Angkatan Darat (1970) • Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (1985) • Sarjana (S1) di Jurusan Ilmu Politik (1995)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• Komisaris Utama PT Smartias Indo Gemilang (2011-2012) • Komisaris Utama PT Kartanegara Energi Perkasa (PLTG Senipah) (2007-sekarang) • Chief of HRD & GA PT Toba Sejahtera (2007-2011) • Kepala Bidang Ideologi Politik dan Keamanan Legiun Veteran Republik Indonesia (2005-2009) • Koordinator Bidang Usaha Yayasan Kartika Ekapaksi Angkatan Darat (YKEP) (2002-2004) • Komisaris Utama PT Wiska (2002-2004) • Komisaris Utama PT International Timber Cooperation Inc. (ITCI) (2002-2004)
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Pelindo III.
Periode Menjabat	14 September 2017 - 13 September 2022
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Komisaris Utama PT Kartanegara Energi Perkasa (PLTG Senipah)

**WAHJU SATRIO UTOMO**
KOMISARIS

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Magelang, 6 September 1959
Usia	59 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (S1) Fakultas Hukum, Universitas Trisakti • Magister (S2) Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Indonesia • Doktor (S3) Fakultas Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (2014-2017) • Staf Ahli Hukum dan reformasi Birokrasi Perhubungan (2014) • Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan (2007-2013) • Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan (2004-2007) • Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Perhubungan (2002-2004) • Kabag TU PIMPINAN Kementerian Perhubungan (1999-2002)
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-30/MBU/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisariss Pelindo III.
Periode Menjabat	9 Februari 2016 - 8 Februari 2021
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN

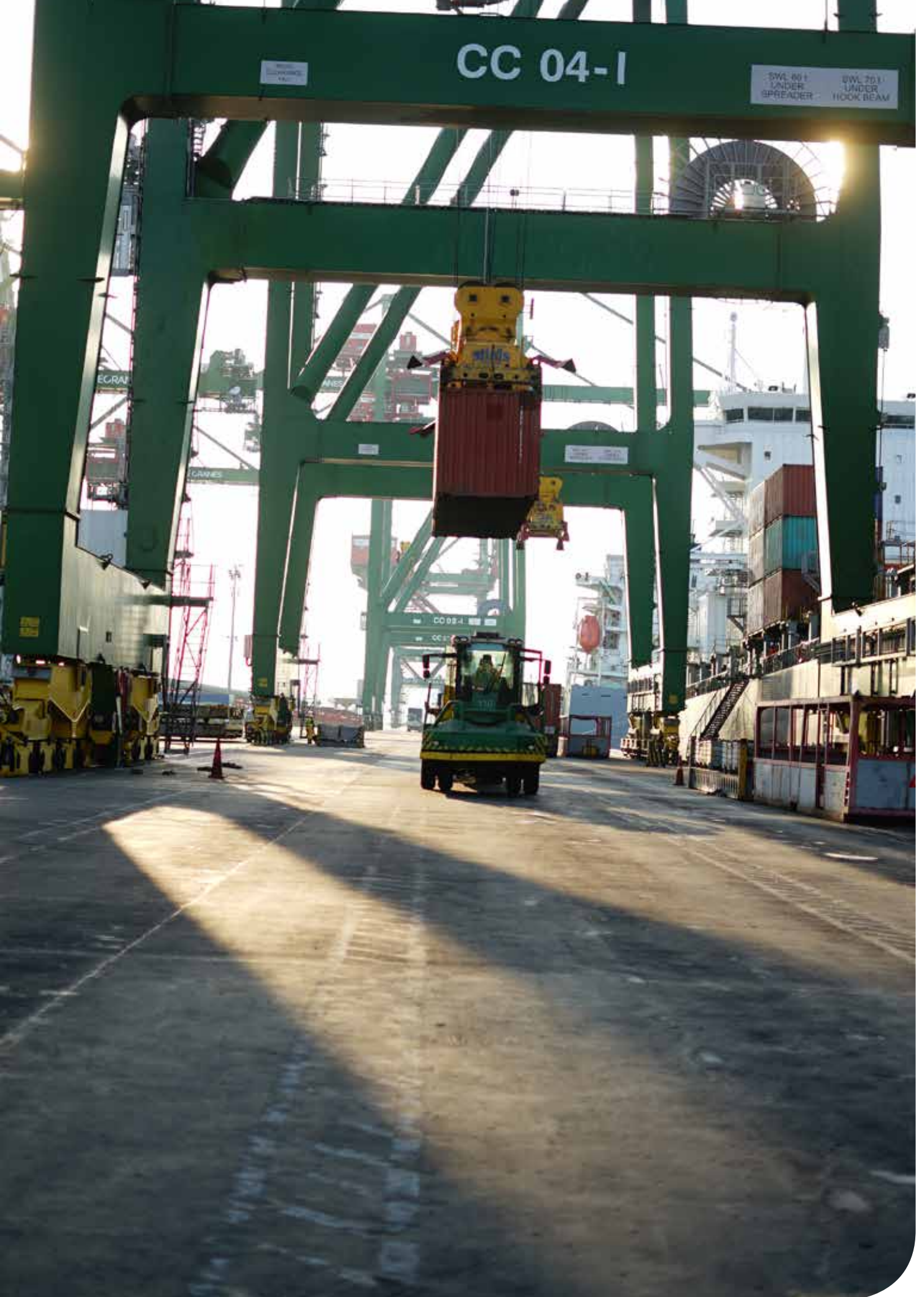


HEDDY LUGITO
KOMISARIS INDEPENDEN

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Boyolali, 5 Juni 1960
Usia	58 tahun
Domisili	Bekasi
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro (1987)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• Komisaris PT Era Media Digital (2013-sekarang) • Pimpinan Redaksi CARS (2012-sekarang) • Pimpinan Redaksi GATRANEWS.COM (2012-sekarang) • Pimpinan Redaksi Majalah Gatra (2010-sekarang) • Wakil Pimpinan Redaksi Majalah Gatra (2003-2006) • Redaktur Eksekutif Majalah Gatra (2003-2006) • Redaktur Kolom Ekonomi Majalah Gatra (2001-2003) • Redaktur Hukum Majalah Gatra (1996-1999) • Kepala Biro Majalah Gatra, Jawa Tengah (1994-1996) • Kepala Biro Majalah Tempo, Jawa Tengah (1990-1994) • Reporter majalah Tempo (1987-1990)
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-241/MBU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Pelindo III.
Periode Menjabat	19 Oktober 2016 - 18 Oktober 2021
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	• Komisaris PT Era Media Digital • Pimpinan Redaksi CARS • Pimpinan Redaksi GATRANEWS.COM • Pimpinan Redaksi Majalah Gatra

**DEDI SYARIF USMAN**
KOMISARIS

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 22 April 1965
Usia	54 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (S1), Universitas Katolik Parahyangan (1991) • Magister (S2), University of Colorado (1998)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN (2013-saat ini) • Direktur Barang Milik Negara DJKN (2012-2013) • Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal DJKN (2011-2012) • Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana DJKN (2007-2011) • Kepala KP2LN Bandung I DJPLN (2005-2007) • Kepala KP2LN Tegal DJPLN (2001-2005) • Kepala Seksi Piutang Negara Perbankan KP3N Jakarta • Staf Biro Piutang Negara Perbankan, BUPLN
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Penetapan Komisaris Independen Pelindo III.
Periode Menjabat	12 Juli 2018 - 11 Juli 2023
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara





PROFIL DIREKSI



DOSO AGUNG
DIREKTUR UTAMA

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Yogyakarta, 5 Januari 1968
Usia	51 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (1991) • Magister (S2) Jurusan Manajemen (2003)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (2018) • Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (2015) • Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2014) • General Manager Cabang Pelabuhan Panjang (2010) • Direktur Utama/General Manager PT TPK Koja (2009) • Senior Manager Administrasi SDM & Umum (2008) • Pj. Senior Manager Umum (2007) • Sekretaris Dewan Pengawas KSOTPK Koja (2006) • As. Corporate secretary Bidang Hubungan Investor & Antar Lembaga (2000) • Pj. As. Corporate Secretary Hubungan Investor & Antar Lembaga (1999) • Staf Analisa & Evaluasi Media Masa & Publikasi (1997) • Staf Analisa & Publikasi Subdit Hukum & Humas (1995) • Staf Junior Subdit Hukum dan Humas (1993)
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota Direksi Pelindo III.
Periode Menjabat	19 September 2018 - 18 September 2023
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III

**PUTUT SRI MULJANTO**
DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Magetan, 11 April 1969
Usia	50 tahun
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (S1) Jurusan Manajemen, Universitas Airlangga (1993) • Magister (S2) Jurusan Manajemen, Universitas Airlangga (2012)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III (November 2018-sekarang) • Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya (Oktober 2018-November 2018) • Senior Vice President Marketing Kantor Pusat Pelindo III (Juni 2018-September 2018) • Direktur Utama PT Pelindo Marine Service (Februari 2018-Juni 2018) • Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (Desember 2013-Februari 2018) • Senior Manajer Pemasaran Kantor Pusat Pelindo III (2011-2013) • Senior Manajer Peningkatan Usaha Kantor Pusat Pelindo III (2010-2011) • Pjs. Senior Manajer Peningkatan Usaha Kantor Pusat Pelindo III (2009-2010) • Asisten Senior Manajer Perencanaan dan Kerjasama Usaha Kantor Pusat Pelindo III (2008-2009) • Asisten Manajer Pemasaran Pelindo III Cabang Tanjung Perak (2007-2008) • Asisten Manajer Analisa dan Evaluasi Pelindo III Cabang Tanjung Perak (2007) • Asisten Manajer Operasi Terminal Konvensional Kantor Cabang Pelindo III Banjarmasin (2004-2007) • Staff Muda IV Kantor Pusat Pelindo III (2004) • Penata Administrasi Kantor Pusat Pelindo III (2002-2004) • Pelaksanan Administrasi I Unit Kerja Kantor Pusat Pelindo III (1999-2001)
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III.
Periode Menjabat	5 November 2018 - 4 November 2023
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III

**JOKO NOERHUDHA**
DIREKTUR TEKNIK

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Surabaya, 17 April 1973
Usia	46 tahun
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (S1) Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh November (1998)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• Direktur Teknik Pelindo III (September 2018-sekarang) • President Director PT Terminal Petikemas Surabaya (Desember 2017-September 2018) • General Manager Cabang Tanjung Perak Surabaya Maret (Maret 2016-Desember 2017) • Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan Kantor Pusat (2013-2016) • Senior Manager Rancang Bangun Kantor Pusat (2012-2013) • Manager Teknik Cabang Tanjung Emas Semarang (2011-2012) • Asisten Senior Manager Rancang Bangun Kantor Pusat (2010-2011) • Manager Teknik Cabang Kotabaru (2009-2010)
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III.
Periode Menjabat	19 September 2018 - 18 September 2023
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III

**TOTO HELI YANTO**
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 21 Juli 1964
Usia	54 tahun
Domisili	Sidoarjo
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (S1) Jurusan Hukum Pidana, Universitas Merdeka Malang (1989) • Magister (S2) Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Airlangga (2000)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• General Manager Pelindo III Cabang Banjarmasin • General Manager of Pelindo III, Banjarmasin Branch • General Manager Pelindo III Cabang Tanjung Perak • General Manager of Pelindo III, Tanjung Perak Branch
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III.
Periode Menjabat	12 Mei 2014 - 11 Mei 2019
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III

**IMAN RACHMAN**
DIREKTUR KEUANGAN

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 31 Mei 1972
Usia	47 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi, Universitas Padjajaran (1995) • Master of Business Administration (MBA) in Finance, Leeds University Business School, Inggris (1997)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-sekarang) • Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018) • Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2003-2016) • Manager PT Danareksa Sekuritas (1998-2003)
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III.
Periode Menjabat	19 September 2018 - 18 September 2023
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III



TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



TOTO NUGROHO PRANATYASTO
DIREKTUR TRANSFORMASI DAN PENGEMBANGAN BISNIS

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Sungei Gerong, 27 Juni 1967
Usia	52 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (S1) di Jurusan Teknik Gas dan Petrokimia, Universitas Indonesia (1992) • Magister (S2) di Jurusan Teknik Kimia, University of Texas - Austin (2000) • Executive MBA, INSEAD Global Leadership, Singapore (2015)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan	• Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-sekarang) • SVP Integrated Supply Chain, Pertamina (2017-2018) • Direktur Utama PT Pertamina Gas (PERTAGAS) (2017-2017) • Strategic Advisor to Finance Director, Pertamina (2016-2017) • Direktur Utama Pertamina Energy Services, Singapore (2015-2016) • Manager New and Renewable Energy Business Development (2012-2015) • Corporate Business Development, Pertamina (2001-2012) • Process Engineering, Kilang RU VI Balongan (1993-2001)
Dasar Pengangkatan	Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Pelindo III.
Periode Menjabat	5 November 2018 - 4 November 2023
Jumlah Periode Menjabat	1 Periode
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III



DAFTAR DAN PROFIL PEJABAT SENIOR

NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
1.		Andriyuda Siahaan	Kepala Satuan Pengawasan Intern Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada bulan Mei 1978. Bergabung di Pelindo III sejak Mei 2018. Pernah menjabat sebagai Auditor pada Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
2.		Faruq Hidayat	Sekretaris Perusahaan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Sumenep pada bulan April tahun 1976. Mendapatkan gelar Magister Manajemen Teknik dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tahun 2012. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999 pada Bidang Teknik. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2017.
3.		Ardhy Wahyu Basuki	Senior Manager Pemasaran Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan September tahun 1978. Mendapatkan gelar <i>Master's Degree</i> . Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2009 pada Bidang Jaminan Mutu dan K3. Pernah menjabat sebagai GM dan CEO Regional Jawa Tengah. Diangkat sebagai Senior Manager Pemasaran Sejak 2018.
4.		Agus Dharmawan	Senior Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Magetan pada bulan Agustus tahun 1976. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2007 pada Bidang Pengembangan dan Penerapan Aplikasi. Menjabat sebagai Senior Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak 2018.
5.		Bambang Hasbullah	Senior Manager Operasi Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Maret tahun 1967. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1996. Menjabat sebagai Senior Manager Operasi sejak 2017



NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
6.		Lia Indi Agustiana	Senior Manager Sistem Manajemen dan Manajemen Resiko Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Agustus tahun 1982. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2006 pada Bidang Analisa dan Evaluasi Keuangan. Menjabat sebagai Senior Manager Sistem Manajemen dan Manajemen Resiko sejak 2018.
7.		Topo Sapto Nugroho	Senior Manager Peralatan Pelabuhan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surakarta pada bulan Maret tahun 1970. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Peralatan Pelabuhan sejak 2017.
8.		Hendiek Eko Setyantoro	Senior Manajer Fasilitas Pelabuhan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Bojonegoro bulan Maret tahun 1972. Memperoleh Sarjana Teknik Sipil dari Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya pada tahun 1997 dan Master's Degree of Port and Coastal Engineering dari UNESCO-IHE Belanda tahun 2014. Bergabung di Pelindo III sejak tahun 1999 pada Bidang Teknik dengan masa kerja 20 tahun. Pernah menjabat sebagai Direksi Cucu Perusahaan Pelindo III Group.
9.		Angga Pradiptya	Senior Manager Supervisi Investasi Teknik Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan April tahun 1977. Mendapatkan gelar Master's Degree di Bidang Teknik. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Supervisi Investasi Teknik sejak 2017.
10.		Budi Satriyo	Senior Manager Akuntansi dan Anggaran Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Jember pada bulan Januari tahun 1974. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Akuntansi dan Anggaran sejak 2017.
11.		Yoni Setiawan	Senior Manager Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Semarang pada bulan Juni tahun 1977. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2006 pada Bidang Perpajakan. Menjabat sebagai Senior Manager Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan sejak 2017.



NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
12.		Sarjono	Senior Manager Shared Service Center Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Juli tahun 1979. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2006 pada Bidang Analisa dan Evaluasi Keuangan. Menjabat sebagai Senior Manager Shared Service Center sejak 2018.
13.		Fahrus Salam	Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Pamekasan pada bulan Februari tahun 1983. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2006 pada Bidang Pengelolaan Lingkungan dan K3. Menjabat sebagai Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan sejak 2016.
14.		I Putu Sukadana	Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Denpasar pada bulan Juli tahun 1976. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1998 pada Bidang Usaha. Menjabat sebagai Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM sejak 2018.
15.		Edi Priyanto	Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Klaten pada bulan Oktober 1976. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE sejak 2016.
16.		Roy Darma Putera	Senior Manager Umum/Kepala Kantor Pusat Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Ujung Pandang pada bulan Desember tahun 1969. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1997 pada Bidang Keuangan dan Personalia. Menjabat sebagai Senior Manager Umum/Kepala Kantor Pusat sejak 2018.



NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
17.		Umar	Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Sidomulyo pada bulan Desember tahun 1972. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa sejak 2017.
18.		Kumara Anindhita Widiaswendra	Senior Manager Hukum Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 1984. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2009 pada Bidang Peraturan Perusahaan dan Bantuan Hukum. Menjabat sebagai Senior Manager Hukum sejak 2017.
19.		Agus Hermawan	Senior Manager Pengembangan Bisnis Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Oktober 1973. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1998 pada Bidang Biro Hukum, Human, dan Hubungan Internasional. Menjabat sebagai Senior Manager Pengembangan Bisnis sejak 2018.
20.		Ismartadianto	Senior Manager Manajemen Perubahan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Juni 1968. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1998. Menjabat sebagai Senior Manager Manajemen Perubahan sejak 2016.
21.		Prasetyo	Senior Manager Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Mojokerto pada bulan Mei 1970. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan sejak 2016.



DAFTAR DAN PROFIL GENERAL MANAGER

NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
1.		Onny Djayus	CEO Regional Jawa Timur Warga Negara Indonesia lahir di Ujung Pandang tanggal 12 Desember 1964. Mendapatkan gelar Master Marine tahun 2008. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1999 sebagai pegawai yang diperbantukan pada PT Pelindo Marine Service. Pernah menjadi General Manager Cabang Kota Baru tahun 2013 dan Kini menjabat sebagai CEO Regional Jawa Timur sejak tahun 2018.
2.		M. Amiroel Koesni	General Manager Terminal Nilam Mirah Warga Negara Indonesia kelahiran Sumenep tanggal 9 Februari 1965. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari STIE Indonesia Malang tahun 2013. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1998 sebagai Pandu Laut di Banjarmasin. Kini menjabat sebagai General Manager Terminal Nilam Mirah mulai tahun 2018.
3.		Imran Rasidi	General Manager Terminal Jamrud Warga Negara Indonesia kelahiran Denpasar tanggal 26 Mei 1976. Mendapatkan gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah tahun 2004. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999 pada Dinas Pelayanan Medis pada PT RS Primasatya Husada Citra. Pada 2000 beralih pada Subdinas Administrasi dan Keuangan pada Cabang Pelabuhan Tenau Kupang. Tahun 2010 menjabat sebagai Manager Pelabuhan Badas. Menjabat sebagai General Manager Terminal Jamrud mulai tahun 2018.
4.		Tri Sugiyatno	General Manager Pelabuhan Kalimas Warga Negara Indonesia kelahiran Sukoharjo tanggal 30 Oktober 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Nusantara Pangkalan Bun pada bidang Ekonomi Manajemen tahun 2005. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2000 sebagai Pelaksana Pembantu Administrasi I pada Cabang Kumai. Pada tahun 2007 Menjabat sebagai Asisten Manager Kawasan Sukamara; tahun 2016 menjabat sebagai Manager Pelabuhan Batulicin; dan kini menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kalimas mulai tahun 2018.
5.		Yanto	General Manager Pelabuhan Gresik Warga Negara Indonesia kelahiran Sumenep tanggal 4 April 1974. Mendapatkan gelar Sarjana Sosial dengan jurusan Administrasi Negara dari Universitas Wiraraja tahun 2006. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2000 sebagai Pelaksana Pembantu Administrasi I di Pelabuhan Gresik, tahun 2010 sebagai Pelaksana Senior pada Sub Divisi Treasury. Mulai tahun 2018 menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Gresik.



NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
6.		Dhany Rachmad Agustian	General Manager Pelabuhan Tanjung Tembaga Warga Negara Indonesia kelahiran Rogo Jampi tanggal 17 Agustus 1974. Mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Dr. Soetomo tahun 1997. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999 pada Subdirektorat Administrasi dan Pembinaan Pers Kantor Pusat. Pada tahun 2010 menjabat sebagai Manager Kantor Perwakilan. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Tembaga mulai tahun 2018.
7.		Bheneka Pria Panca	General Manager Pelabuhan Kalianget Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 14 Desember 1975. Mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari STIAMAK Barunawati Surabaya tahun 2008. Memulai karir di Pelindo III tahun 2008 sebagai Staf Pelaksana Junior pada bidang Pemanduan, Penundaan, dan Pengepilan di Pelabuhan Tanjung Perak. Menjabat sebagai Supervisor Bongkar Muat Peti Kemas tahun 2015 pada Cabang Tenau/Kupang. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kalianget tahun 2018.
8.		Boy Robyanto	CEO Regional Kalimantan Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 28 Desember 1973. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Achmad Yani Banjarmasin tahun 2002. Memulai karir di PT Pelindo III pada tahun 1999 sebagai Pelaksana Administrasi II pada bidang Perencanaan dan Administrasi Teknik Kantor Pusat, tahun 2011 sebagai Asisten Manajer Perencanaan dan Administrasi Teknik Tanjung Perak, tahun 2016 menduduki posisi sebagai General Manager Cabang Tenau/Kupang dan tahun 2018 menjabat sebagai CEO Regional Kalimantan.
9.		I Nyoman Sudiarta	General Manager Terminal Peti Kemas Banjarmasin Warga Negara Indonesia kelahiran Denpasar tanggal 25 Desember 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Dwijendra Denpasar tahun 2003. Memulai Karir di Pelindo III pada tahun 1998 sebagai Pelaksana Pembantu Administrasi I di Pelabuhan Benoa, tahun 2004 menjabat sebagai Teknisi Peralatan Pelabuhan dan Administrasi Teknik, tahun 2014 menjabat sebagai Asisten Manajer Operasi Peti Kemas di Banjarmasin. Menjabat Sebagai General Manager Terminal P/K Banjarmasin sejak tahun 2018.
10.		Jasri	General Manager Pelabuhan Trisakti Warga Negara Indonesia kelahiran Kotabaru tanggal 15 Agustus 1965. Mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik dari STIA Bina Banua tahun 2010. Memulai karir di Pelindo III sebagai Pelaksana Administrasi Keuangan II di tahun 1993, sebagai Kasubdin Pemanduan Kotabaru tahun 2004, Manager Komersial Kotabaru tahun 2014. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Trisakti Sejak tahun 2018.
11.		Marolop Alfred E. T.	General Manager Pelabuhan Kotabaru Warga Negara Indonesia kelahiran Sidikalang Sumatera Utara tanggal 4 November 1969. Mendapatkan gelar Master Marine sebagai Ahli Nautika Tingkat I dari STIP Jakarta tahun 2013. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2002 sebagai Pandu Muda I di Banjarmasin. Tahun 2014 sebagai Asisten Manajer Pelayanan Kapal Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Tahun 2015 sebagai Manager Operasi di Pelabuhan Kotabaru. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kotabaru sejak tahun 2018.



NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
12.		Zainal Abidin	General Manager Pelabuhan Sampit Warga Negara Indonesia kelahiran Kotabaru tanggal 27 Juni 1966. Mendapatkan gelar Magister Sains dari Universitas Darul Ulum tahun 2004. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 1998 pada bidang Keuangan. Tahun 2009 menjadi Manager Keuangan Pelabuhan Tanjung Wangi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Sampit sejak tahun 2018.
13.		Irsyam Bakri	General Manager Pelabuhan Bagendang Warga Negara Indonesia kelahiran Ujung Pandang tanggal 4 Maret 1971. Meraih gelar Ahli Nautika Tingkat I dari BP3IP Jakarta tahun 2002. Mengawali karir di Pelindo III di bidang Pemanduan pada Subdinas Operasi Pemanduan tahun 2016. Tahun 2016 menjabat sebagai Manager Komersial Cabang Kotabaru. Kini Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Bagendang sejak Tahun 2018.
14.		Sayhrial Murjani	General Manager Pelabuhan Kumai Warga Negara Indonesia kelahiran Banjarmasin tanggal 26 April 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat di bidang Ekonomi Manajemen. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2000 sebagai Pelaksana Administrasi II. Tahun 2010 sebagai Supervisor pada Dinas Pendapatan. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kumai Sejak tahun 2018.
15.		Marolop Alfred Edward Tampubolon	General Manager Pelabuhan Bumiharjo Warga Negara Indonesia kelahiran Sidikalang Sumatera Utara tanggal 4 November 1969. Meraih gelar Ahli Nautika Tingkat I dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta tahun 2013. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2002 di bidang Pemanduan pada Subdinas Operasi Pemanduan Banjarmasin. Tahun 2015 menjabat sebagai Manager Operasi pada Divisi Operasi Kotabaru. Kini Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Bumiharjo sejak tahun 2018.
16.		Adji Djoko	General Manager Pelabuhan Batulicin Warga Negara Indonesia kelahiran Tegal tanggal 20 Februari 1974. Mendapatkan gelar Master Marine sebagai Ahli Nautika Tingkat I dari STIP Jakarta tahun 2009. Mengawali karir di Pelindo III pada bidang Pemanduan sejak tahun 2008. Menjabat sebagai Regional Manager Operation and Commercial pada tahun 2018 pada Regional Bali Nusra. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Batulicin sejak tahun 2019.
17.		Agus Mulyansyah	General Manager Pelabuhan Pulang Pisau Warga Negara Indonesia kelahiran Kotabaru tanggal 1 Agustus 1969. Mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Universitas Lambung Mangkurat pada bidang Ilmu Pemerintahan. Mengawali karir di Pelindo III pada Bidang Umum tahun 2000. Menjabat sebagai Supervisor Pemasaran dan Aneka Usaha Cabang Kotabaru tahun 2012. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Pulang Pisau sejak tahun 2018.



NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
18.		Dody Eko Saputro	General Manager Pelabuhan Mekar Putih Warga Negara Indonesia kelahiran Klaten tanggal 14 Desember 1975. Mendapatkan gelar Ahli Nautika Tingkat I (ANT-I) dari STIP Jakarta tahun 2008. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2010 di bidang Pelayanan Kapal. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Mekar Putih sejak tahun 2018.
19.		Arief Prabowo	CEO Regional Jawa Tengah Warga Negara Indonesia kelahiran Yogyakarta tanggal 3 Mei 1971. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Mengawali Karir di Pelindo III sejak tahun 1996 pada bidang Personalia. Menjabat sebagai CEO Regional Jawa Tengah sejak tahun 2018.
20.		Fariz Hariyoso	General Manager Pelabuhan Tanjung Emas Warga Negara Indonesia kelahiran Banyuwangi tanggal 29 Juli 1973. Mendapatkan gelar Master Marine dari STIP Jakarta 2006. Mengawali karir di PT Pelindo III sejak tahun 2004 pada bidang Pemanduan. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Emas sejak tahun 2018.
21.		Recky Julius Uruilal	General Manager Terminal P/K Semarang Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta tanggal 29 Desember 1966. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Wijaya Kusuma tahun 2014. Mengawali karir di Pelindo III pada sebagai Pandu Laut tahun 2000. Menjabat sebagai General Manager Terminal Petikemas Semarang sejak tahun 2018.
22.		Edwardnul Johar	General Manager Pelabuhan Tanjung Intan Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 8 Desember 1971. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 1998 di bidang Biro Data dan Informasi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Intan sejak tahun 2018.
23.		Tri Bagus Digdoyo Putro	General Manager Pelabuhan Tegal Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 8 Oktober 1969. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Merdeka Malang tahun 1996 pada bidang Teknik Sipil. Memulai Karir di Pelindo III sejak tahun 2000 pada bidang Pengembangan SDM. Pernah menjadi Manager Teknik di Pelabuhan Tanjung Wangi tahun 2011. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tegal sejak tahun 2018.



NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
24.		I Wayan Eka Saputra	CEO Regional Bali Nusra Warga Negara Indonesia kelahiran Bangli tanggal 10 Oktober 1974. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari STIE Bank BPD Jawa Tengah tahun 2017. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 1998 pada bidang Tata Usaha Keuangan. Tahun 2016 menjabat sebagai Manager Keuangan di Banjarmasin. Menjabat sebagai CEO Regional Bali Nusra sejak tahun 2018.
25.		AA.Gede Mataram	General Manager Pelabuhan Benoa Warga Negara Indonesia kelahiran Denpasar tanggal 25 Juni 1974. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari UPN Denpasar tahun 1998. Memulai Karir di Pelindo III sejak tahun 2000 pada bidang Pengembangan SDM. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Benoa Sejak tahun 2018.
26.		Baharuddin	General Manager Pelabuhan Tenau Kupang Warga Negara Indonesia kelahiran Tala tanggal 1 Desember 1966. Mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Universitas Samawa pada bidang Administrasi Negara tahun 2002. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 1998 pada bidang Dinas Operasi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tenau Kupang sejak tahun 2018.
27.		Made Rusli Suniajaya	General Manager Pelabuhan Lembar Warga Negara Indonesia kelahiran Bandung tanggal 27 September 1967. Mendapatkan gelar Sarjana Pertanian lulusan Universitas Udayana tahun 1991. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 1997 pada Subdinas Pemanduan Pelabuhan Benoa. Tahun 2012 menjabat sebagai Manager Terminal Pelabuhan Lembar. Kini Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Lembar sejak tahun 2018.
28.		Wahyu Wirawan	General Manager Pelabuhan Bima Warga Negara Indonesia kelahiran Banjarmasin tanggal 8 September 1979. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember tahun 2007. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2009 pada bidang Sub Dinas DUKS dan Usaha Terminal. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Bima sejak akhir tahun 2018.
29.		Moh. Nizar Fauzi	General Manager Pelabuhan Tanjung Wangi Warga Negara Indonesia kelahiran Banyuwangi tanggal 12 Agustus 1971. Lulus dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tahun 2008. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 1997 pada bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga di Tanjung Wangi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Wangi sejak tahun 2018.



NO.	FOTO	NAMA	KETERANGAN
30.		Rio Dwi Santoso	General Manager Pelabuhan Celukan Bawang Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 30 Januari 1976. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Yos Sudarso Surabaya tahun 2005. Mengawali karir di Pelindo III pada bidang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2008. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Celukan Bawang sejak tahun 2018.
31.		Yuvensius Andri Kartiko	General Manager Pelabuhan Maumere Warga Negara Indonesia kelahiran Ngawi tanggal 1 Juni 1972. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Flores tahun 2012. Mengawali karir di Pelindo III pada bagian Umum tahun 1996. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Maumere sejak tahun 2017.
32.		Hadi Sukanto	General Manager Pelabuhan Ende-Ippi Warga Negara Indonesia kelahiran Jombang tanggal 17 Agustus 1971. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Yos Sudarso tahun 2003. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2000 di bagian Aneka Usaha dan Pemasaran. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Ende-Ippi sejak tahun 2018.
33.		Joko Budi Santoso	General Manager Pelabuhan Waingapu Warga Negara Indonesia kelahiran Boyolali tanggal 25 Oktober 1978. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Mengawali karir di Pelindo III pada bidang Keuangan tahun 2009. Menjabat sebagai General manager Pelabuhan Waingapu sejak tahun 2018.
34.		Alief Waliy Akbar	General Manager Pelabuhan Kalabahi Warga Negara Indonesia kelahiran Samarinda tanggal 12 Maret 1975. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2008 pada Subdinas Perbendaharaan Pelabuhan Benoa. Tahun 2016 beralih pada Unit Pengendalian Operasi Kapal. Kini Menjabat sebagai General manager Pelabuhan Kalabahi sejak tahun 2018.
35.		Wahyu Wirawan	General Manager Pelabuhan Badas Warga Negara Indonesia kelahiran Banjarmasin tanggal 8 September 1979. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Teknologi Surabaya tahun 2008. Mengawali karir di Pelindo III pada Subdinas DUKS dan Usaha Terminal Pelabuhan Sampit tahun 2009. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Badas sejak tahun 2018.



STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pelindo III adalah Negara Republik Indonesia sebesar 100% nilai saham Perusahaan. Berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2003 Pasal 14 Ayat 1 tentang BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Negara.



PEMEGANG SAHAM 5 PERSEN ATAU LEBIH

Hingga 31 Desember 2018, kepemilikan saham Perusahaan dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 100% dengan jenis saham Dwiwarna. Dengan persentase tersebut, dapat diinformasikan bahwa Pemegang Saham dengan kepemilikan 5% atau lebih adalah Pemerintah Republik Indonesia.

**KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM (YA/TIDAK)	JUMLAH LEMBAR SAHAM YANG DIMILIKI	JUMLAH NOMINAL YANG DIMILIKI	PERSENTASE
DEWAN KOMISARIS						
1.	Hari Bowo	Komisaris Utama	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Zainal Abidin	Komisaris	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris Independen	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Heddy Lugito	Komisaris	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Dedi Syarif Usman	Komisaris Independen	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
DIREKSI						
1.	Doso Agung	Direktur Utama	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Joko Norhudha	Direktur Teknik	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Toto Heli Yanto	Direktur Sumber Daya Manusia	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Iman Rachman	Direktur Keuangan	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Toto Nugroho Pranatyasto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Tidak	Nihil	Nihil	Nihil

PERNYATAAN

Berdasarkan informasi terkait kepemilikan saham yang telah disampaikan sebelumnya, yang menjelaskan kepemilikan saham mayoritas atau dengan persentase 100% dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, maka informasi terkait:

1. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok Pemegang Saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% dan
2. jumlah kepemilikan saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun dengan klasifikasi kepemilikan institusi lokal dan asing serta kepemilikan individu lokal dan asing tidak disajikan di dalam laporan tahunan ini karena tidak terdapat kondisi dan data tersebut di Perusahaan.



PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Berdasarkan informasi yang disebutkan sebelumnya terkait struktur kepemilikan saham di Perusahaan, Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara langsung adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan komposisi saham sebesar 100%, baik dalam bentuk saham yang dicatatkan maupun portepel.





DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI PELINDO III



PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Status Operasional	: Telah Beroperasi
Bidang Usaha	: Jasa Pelayanan Peti Kemas
Kepemilikan Saham	: Pelindo III (50,50%), P&O Dover (Holdings) Ltd (49,00%), Kopelindo III (0,50%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama	: Endot Endrardono
Wakil Direktur	: Kenneth Law
Direktur Teknik	: Robby Dayoh
Direktur Keuangan	: Nur Syamsiah
Direktur Operasional	: Rodrigo Lepoldo Sanchez-Gil
Komisaris Utama	: Iman Rachman
Komisaris	: Bonar Manurung
Komisaris	: Andrew Rudiger Hoad
Komisaris	: Agus Hermawan
Komisaris	: Ahmad Yousef Ahmad Alhassan Al Simren

PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS) mengoperasikan terminal di bagian barat Tanjung Perak yang bekerja sama dengan Dubai Port World. Dengan berpegang pada nilai Perusahaan *Service Excellence*, Anak Perusahaan yang telah berdiri sejak 1999 ini menyediakan pelayanan terminal pelabuhan untuk kapal-kapal internasional dan domestik.



PT PELINDO HUSADA CITRA

Status Operasional	: Telah Beroperasi
Bidang Usaha	: Jasa Medis dan Kesehatan
Kepemilikan Saham	: Pelindo III (98,73%), Kopelindo III (1,27%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama	: Dr. Agus Akhamdi, MARS
Direktur Administrasi dan Keuangan	: Abdul Rofid Fanany
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	: Purwanti Aminingsih
Komisaris Utama	: Doso Agung
Komisaris	: I Putu Sukadana

Rumah Sakit PHC Surabaya (RS PHC) merupakan *trauma centre* dan rumah sakit rujukan utama untuk penyakit jantung di wilayah timur Indonesia. Setelah berhasil melakukan operasi bedah jantung terbuka untuk pertama kalinya di Surabaya, RS PHC membangun beberapa klinik di kota lain dan mengembangkan asuransi kesehatan PHC Health Care untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Gedung baru PHC Medical Center (PMC) diresmikan pada awal tahun 2015, lalu menyediakan tempat konsultasi baru untuk para dokter spesialis, ruang tunggu yang luas dan nyaman untuk para pasien dan pengantar, serta tambahan kamar operasi dan ICU yang dilengkapi dengan peralatan yang lebih terkini.

Pada tahun 2015, RS PHC berhasil meraih satu prestasi gemilang yaitu sebagai rumah sakit pertama yang berhasil melakukan operasi bedah jantung *hybrid* di Surabaya. Mengikuti pencapaian ini, saat ini RS PHC menjadi rujukan penyakit jantung di Surabaya hingga area timur Indonesia.



PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

Status Operasional	: Telah Beroperasi
Bidang Usaha	: Operator Terminal Peti Kemas untuk Kapal Domestik dan Terminal Curah
Kepemilikan Saham	: Pelindo III (96,84%), Kopelindo III (3,16%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama	: Hot Rudolf Marihot
Direktur Operasi dan Teknik	: Warsilan
Direktur Keuangan, SDM, dan Umum	: Aditya Respati Djatinendra
Komisaris Utama	: Joko Noerhudha
Komisaris	: Umar
Komisaris	: Herudi Kanda Nugroho

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) yang sejak 2015 lalu melakukan *rebranding* menjadi BJTI Port ini tidak hanya melayani kapal-kapal domestik di Terminal Berlian dan sekitarnya, namun juga melayani kapal batu bara di Kalimantan dan mengembangkan kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) di Gresik, Jawa Timur.

PT BJTI melalui Anak Perusahaannya, yaitu PT BMS, membangun pelabuhan Manyar yang selama ini masih belum dikembangkan. Mengingat letak geografisnya yang strategis karena berdekatan dengan area padat UMKM dan industri di Gresik. PT BJTI mengambil kesempatan ini untuk membangun pelabuhan multi guna. Pelabuhan Manyar dibangun berdampingan dengan JIPE yang merupakan multi kompleks dan dikembangkan pula oleh Anak Perusahaan PT BJTI. JIPE digarap di lahan seluas 1.761 ha yang terdiri atas perkantoran, perumahan, gudang, pabrik, dan depo yang semuanya terhubung langsung dengan pelabuhan Manyar.



PT PELINDO MARINE SERVICE

Status Operasional	: Telah Beroperasi
Bidang Usaha	: Penyedia Jasa Pemanduan dan Perkapalan
Kepemilikan Saham	: Pelindo III (97,89%), Kopelindo III (2,11%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama	: Eko Hariyadi Budiyo
Direktur Keuangan, SDM dan Umum	: Sapto Wasono Soebagio
Direktur Komersial, Operasi	: Denny Hermanto
Komisaris Utama	: Toto Nugroho
Komisaris	: Bambang Hasbullah
Komisaris	: M. Rokib

Dengan jenis produk jasa yang beragam, PT Pelindo Marine Service (PT PMS) merupakan salah satu penyedia jasa perkapalan terbaik. Mulai tahun 2016, PT PMS melalui cucu perusahaan PT Pelindo Energi Logistik yang berbasis di Bali, akan menyediakan layanan distribusi gas dan minyak, terutama ke wilayah timur Indonesia.

Pada tahun 2017, PT PMS Group telah berhasil menjalankan beberapa segmen usaha dengan upaya penuh sehingga membuahkan hasil baik secara operasional dan finansial. Segmen usaha tersebut antara lain adalah pelayanan jasa pemanduan yang dilakukan di perairan internasional melalui unit usaha International Marine Service (IMS) yang berkedudukan di Batam. Segmen usaha lain yang telah diusahakan sebelumnya adalah pelayanan distribusi gas oleh PT Pelindo Energi Logistik di Pelabuhan Benoa, pelayaran perdana dilakukan pada bulan April 2016. Segmen usaha lain yang berkontribusi meningkatkan kinerja grup secara keseluruhan adalah dilakukannya jasa *salvage* atas kerangka KM Wihan Sejahtera.



TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



PT TERMINAL TELUK LAMONG

Status Operasional	: Telah Beroperasi
Bidang Usaha	: Jasa Kepelabuhanan
Kepemilikan Saham	: Pelindo III (99,50%), Kopelindo III (0,50%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama	: Dothy
Direktur Operasi dan Teknik	: Rumaji
Direktur Keuangan, SDM, dan Umum	: Wahyu Widodo
Komisaris Utama	: Doso Agung
Komisaris	: Faruq Hidayat
Komisaris	: Sihol Manulang

Terminal Multi Guna Teluk Lamong dibangun dengan kade sedalam -14 LWS dan dilengkapi peralatan-peralatan canggih yang mendukung modernisasi dan otomatisasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Terminal yang pada 2015 lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini mengusung konsep *Go Green* dengan menggunakan bahan bakar gas dan meminimalkan emisi dari keseluruhan proses bisnisnya. Hal ini merupakan bentuk kontribusi Pelindo III Group terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

PT Terminal Teluk Lamong (PT TTL) telah menginisiasi modernisasi operasi kepelabuhanan dalam rangka mengurangi tingkat emisi. Pada saat yang sama, hal ini dapat mengefisienkan biaya operasional melalui otomatisasi fasilitas pelabuhan, sehingga dapat mendatangkan manfaat baik bagi bisnis dan lingkungan. PT TTL bekerja sama dengan Gaussin Manugistique sebagai *key partner* dengan tujuan bersama-sama meningkatkan performa pelabuhan.

PT TTL menggunakan teknologi informasi dalam sebagian besar proses bisnisnya, dimana pelayanan jasa di Terminal Teluk Lamong menggunakan *online platform* sebagai medianya. Pengguna jasa pun dimudahkan dengan proses yang *paperless*, cepat, dan mudah. Metode ini sekaligus yang pertama kali diadakan di lingkungan maritim Indonesia.

Saat ini, PT TTL telah memulai tahap pembangunan II yaitu perluasan area yang dimaksudkan untuk *Container Yard* dengan tambahan 10 ASC dan kawasan industrial. PT TTL saat ini juga mulai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) untuk menyediakan listrik di area PT TTL yang bekerja sama dengan PT Adhi Karya. Pembangkit ini nantinya direncanakan untuk dapat menyediakan listrik di luar area PT TTL juga.



Serve with Safety, Fast, and Quality Excellent

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Status Operasional	: Telah Beroperasi
Bidang Usaha	: Penyedia Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>
Kepemilikan Saham	: Pelindo III (90,00%), Kopelindo III (10,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama	: Ali Sodikin
Direktur	: Sugiono
Komisaris Utama	: Putut Sri Muljanto
Komisaris	: Edi Priyanto

Melalui PT Pelindo Daya Sejahtera (PT PDS), Pelindo III Group berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan 3.176 tenaga kerja alih daya di lingkungan Pelindo III. PT PDS aktif mengadakan pelatihan dan saat ini telah mendirikan Anak Perusahaan yang khusus menyediakan tenaga kerja *tally* di Semarang dengan nama PT Tanjung Emas Daya Sejahtera.

PT PDS merupakan Anak Perusahaan yang menaungi tenaga kerja alih daya di lingkungan Pelindo III. PT PDS didirikan atas dasar komitmen Pelindo III untuk menjamin kesejahteraan pegawainya, organik maupun alih daya. Fokus utama PT PDS adalah memberikan layanan kepada industri kepelabuhanan dan industri pelayaran. Secara bertahap, ruang lingkup dan jenis layanan dikembangkan ke Perusahaan atau institusi bisnis lain.

Saat ini, PT PDS tidak hanya menyediakan tenaga alih daya yang menangani kegiatan industri kepelabuhanan tetapi juga *non-core* yang meliputi *tally*, sekretaris, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, operator alat, maupun *entry data services*. Sebagai penyedia tenaga alih daya, PT PDS aktif mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM yang pada akhirnya dapat mendukung kinerja Pelindo III secara keseluruhan.

Perkembangan yang pesat dari PT PDS diakui oleh kalangan Profesional. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya beberapa penghargaan oleh PT PDS pada tahun 2016, antara lain *The Most Trusted Company in Services Excellent of The Year* oleh *Indonesia Achievement Center* dan penghargaan Anugerah Citra Indonesia sebagai *The Best Improvement Outsourcing Company of The Year* tahun 2016 oleh Majalah Indonesia Inspire.



PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA

PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya
 Kepemilikan Saham : Pelindo Marine Service (90,00%),
 Van Oord Dredging and Marine Contractor BV (5,00%), PT Gerbang Samudra Utama (5,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Wawan Sulistiawan
 Direktur : Faizal Januar Maulana
 Direktur : Rio Rakhmat Bramantio
 Komisaris Utama : Prasetyo
 Komisaris : Mark Alexander Van Der Hoeven

Komisaris : Arief Sugiarto
 Komisaris : Amiruddin

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya didirikan pada tanggal 21 April 2014. Berdasarkan Pasal 3 dalam Anggaran Dasar, perusahaan bergerak dalam bidang konstruksi bangunan pelabuhan dan dermaga, pengerukan, dan penyiapan lahan. Untuk mencapai hal tersebut di atas, perusahaan melaksanakan kegiatan usaha utama, yakni: jasa pengerukan dan jasa pemeliharaan kedalaman alur pelayaran, pengembangan dan pengelolaan alur pelayaran, serta jasa reklamasi.



PT PELINDO ENERGI LOGISTIK

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Jasa Distribusi Gas dan Minyak
 Kepemilikan Saham : Pelindo Marine Service (90,00%),
 PT Pelindo Energi Logistik (buyback saham) (9,00%),
 PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Kokok Susanto
 Direktur : Suroso Wahyu Prihantoro
 Komisaris Utama : Toto Nugroho
 Komisaris : Amir Faisal
 Komisaris : Raja Oloan Saut Gurning

PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL) didirikan di Surabaya pada tahun 2014 sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik baik di bidang Gas, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Pengelolaan Limbah sebagai penopang kinerja di lingkungan Pelindo III Group. PT PEL telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 2 segmen usaha, yaitu Gas dan BBM, serta sedang dalam pengembangan menuju bisnis Pengelolaan Limbah. Kegiatan operasional bisnis PT PEL saat ini terpusat di Benoa untuk Gas (LNG), sedangkan BBM didukung oleh karyawan yang andal di lokasi Surabaya, Semarang, dan Benoa.

**PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA**

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Operator Terminal Curah dan Peti Kemas di Manyar
 Kepemilikan Saham : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (60,00%),
 PT Usaha Era Pratama Nusantara (40,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Daru Wicaksono Julianto
 Direktur Keuangan : Dewi Djunaedi
 Direktur Komersial dan Pengembangan : Kartiko Adi
 Direktur Lainnya : Alex Martua Simanjuntak
 Komisaris Utama : Joko Noerhudha
 Komisaris : Bambang Soetiono Soedijanto
 Komisaris : M. Tohir

PT Berlian Manyar Sejahtera merupakan operator terminal curah dan peti kemas di area Manyar. Layanan atau jasa dari perusahaan antara lain adalah penyediaan dan/atau pelayanan: jasa dermaga untuk bertambat; pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan; jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro; jasa bongkar muat barang; penundaan kapal; serta jasa lainnya yang terkait dengan jasa kepelabuhanan.

**PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA**

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Pengelolaan Kawasan Industri dan Perkantoran
 Kepemilikan Saham : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40,00%),
 PT Usaha Era Pratama Nusantara (60,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Bambang Soetiono Soedijanto
 Direktur SDM dan Logistik : Hendri Handoko
 Direktur Keuangan : Raly Eko Kurniawan
 Direktur Teknik dan Pengembangan Usaha : Naresh Kumar Anchalia
 Komisaris Utama : Jimmy Tandyo
 Komisaris : Budi Susilo
 Komisaris : Budi Satriyo
 Komisaris : Termurti Tiban
 Komisaris : Mery Sofi

PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) bergerak dalam 2 bidang usaha yaitu Bidang Pembangunan dan Bidang Jasa. Di Bidang Pembangunan, BKMS menjalankan usaha-usaha seperti: Pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan konstruksi beserta fasilitasnya, pematangan tanah dll; Pemborongan pada umumnya (*general contractor*) yaitu pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susun, kawasan industri, gedung, perkantoran, dll. Di Bidang Jasa, BKMS menjalankan usaha-usaha seperti: Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi, pengelolaan parkir dan keamanan (*satpam*) serta bidang terkait; Jasa agen properti yang meliputi memberikan jasa informasi dan penjualan di bidang properti serta kegiatan usaha terkait; dan lain-lain.



PT TERMINAL NILAM UTARA

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Operator Terminal Curah Air
 Kepemilikan Saham : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40,00%),
 PT Usaha Era Pratama Nusantara (60,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Bambang Soetiono Soedijanto
 Direktur : Hengki Jajang Herasmana
 Komisaris Utama : Jimmy Tandyo
 Komisaris : Warsilan
 Komisaris : Sri Lestari Rahayu

PT Terminal Nilam Utara (TNU) perusahaan *joint venture* antara PT Andahanesa Abadi dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang didirikan pada tahun 2013. Layanan atau jasa yang disediakan oleh TNU di antaranya seperti penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; dan jasa lainnya yang terkait dengan jasa kepelabuhanan.



PT PELINDO PROPERTI INDONESIA

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Pengembang dan Pengelola Properti
 Kepemilikan Saham : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (99,91%),
 Koperasi Pegawai Pelindo III (0,09%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Budi Siswanto
 Direktur : Agung Prasetyo Guritno
 Komisaris Utama : Yoni Setiawan
 Komisaris : Fahrus Salam

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) menjalankan usaha di bidang pembangunan, perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate*, usaha-usaha di berbagai bidang jasa, kecuali di bidang hukum dan pajak.



PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Penyedia dan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat
 Kepemilikan Saham : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (90,00%),
 Koperasi Pegawai Pelindo III (10,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Tri Suhardi
 Direktur : Vitus Satoto Putro Bakti Widiyanto
 Komisaris Utama : Hot Rudolf Marihot
 Komisaris : Agus Zaini

PT Berkah Industri Mesin Angkat (PT BIMA) merupakan salah satu anak perusahaan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang berdiri pada tahun 2015. Bergerak di bidang pemeliharaan dan peralatan pelabuhan, proyek mekanikal, elektrikal, dan pekerjaan sipil.



PT TANJUNG EMAS DAYA SEJAHTERA

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Outsourcing tenaga *tally* di Semarang
 Kepemilikan Saham : PT Pelindo Daya Sejahtera (99,00%),
 Koperasi Pegawai Pelindo III (1,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur : Sayudi
 Komisaris : RM. Kumara. A. Widyaswendra

PT Tanjung Emas Daya Sejahtera bergerak dalam bidang *tally* pelabuhan dan dermaga yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.

**PT LAMONG ENERGI INDONESIA****PT LAMONG ENERGI INDONESIA**

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Pengelolaan Pembangkit Energi & Penyedia Listrik
 Kepemilikan Saham : PT Terminal Teluk Lamong (99,00%); Koperasi Pegawai Pelindo III (1,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur : Purwanto Wahyu Widodo
 Komisaris : Ismartadianto

PT Lamong Energi Indonesia merupakan Anak Perusahaan PT Terminal Teluk Lamong yang bergerak di bidang energi, utilitas, dan logistik yang menunjang kelancaran usaha kepelabuhanan maupun industri lainnya.

**BMC Logistics**
A multi-modal transport expert**PT BERKAH MULTI CARGO**

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Angkutan Multimoda
 Kepemilikan Saham : PT Pelindo Marine Service (90,00%), Koperasi Pegawai Pelindo III (10,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Johannes Wahyu Hertanto
 Direktur : Gugus Wijanarko
 Komisaris Utama : Putut Sri Muljanto
 Komisaris : Deddy Jevri Sitorus

PT Berkah Multi Cargo (BMC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Multimoda. Pelayanan yang diterapkan oleh perusahaan menggunakan konsep sistem logistik terintegrasi. BMC menyediakan berbagai pelayanan kepelabuhanan, misal penyediaan fasilitas penumpukan dan depo peti kemas termasuk semua kegiatan di dalamnya; penyediaan fasilitas pergudangan; serta penyediaan layanan transportasi darat, laut, maupun udara.

**PT BERLIAN MANYAR STEVEDORE**

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Melakukan Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Manyar
 Kepemilikan Saham : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (60,00%), PT Usaha Era Pratama Nusantara (40,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Hendiek Eko Setiantoro
 Direktur : Dewi Djunaedi
 Komisaris Utama : Hot Rudolf Marihot
 Komisaris : Bambang Soetiono Soedijanto

PT Berlian Manyar Stevedore (BMST) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat di area Pelabuhan Manyar. Pelayanan BMST meliputi *Stevedoring, Cargodoring, Receiving/Delivery*, maupun jasa lainnya yang terkait dengan bongkar muat dari dan ke kapal.

**PT PRIMA CITRA NUTRINDO**

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Jasa Boga dan Nutrisi
 Kepemilikan Saham : PT Pelindo Husada Citra (70,00%), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (30,00%).

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Afifah Ariyani
 Direktur : Ludy Andang Wijaksono
 Komisaris Utama : Angga Pradiptya
 Komisaris : Budi Satriyo

PT Prima Citra Nutrindo menjalankan usaha penyediaan makanan dan minuman; restoran dan penyediaan makanan keliling; melakukan penyajian makanan dan minuman di restoran; melakukan penyajian makanan dan minuman di kedai makanan; jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*); serta penyediaan makanan lainnya.



PT TERMINAL CURAH SEMARANG

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Operator Terminal Curah Cair dan Gas di Semarang
 Kepemilikan Saham : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (51,00%),
 PT Andahanesa Abadi (49,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Hengki Jajang Herasmana
 Direktur : Sri Widjajanti
 Komisaris Utama : Umar
 Komisaris : Bambang Soetiono Soedijanto

PT Terminal Curah Semarang merupakan operator terminal curah cair dan gas di Semarang. Perusahaan menyediakan pelayanan kepelabuhanan, misal jasa terminal curah cair dan gas; jasa gudang dan/atau tempat penyimpanan (*storage tank*), tempat penimbunan barang, pendistribusian dan penjualan curah cair dan gas; jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang, alat bongkar muat dan pemeliharaannya serta peralatan kepelabuhanan pada umumnya akan tetapi tidak terbatas pada jasa pelayanan dari dan/ke kapal, yaitu melakukan *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery*, dan sebagainya.



PT PORTEK INDONESIA

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Pemeliharaan dan Penyewaan Alat-alat Fasilitas Pelabuhan.
 Kepemilikan Saham : PT Pelindo III (Persero) (49,00%),
 Portek System and Equipment Ltd (51,00%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Low Kay Keng
 Direktur : Mochamad Tofik
 Komisaris Utama : Iman Rachman
 Komisaris : Took Son Chong

PT Portek Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa pemeliharaan dan penyewaan alat-alat fasilitas pelabuhan. Penerapan manajemen bisnis dalam hal pemeliharaan dan penyewaan alat-alat bongkar muat dan alat fasilitas pelabuhan lainnya. Layanan PT Portek Indonesia meliputi penyediaan, pemasangan, dan pengoperasian alat bongkar muat batu bara dan alat bongkar muat barang curah lainnya; menyediakan, menyewakan, dan mengoperasikan kapal tunda dan kapal lainnya; menyediakan informasi teknologi untuk pelayanan terminal; pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal serta penyediaan alat apung.



PT AMBANG BARITO NUSAPERSADA

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Pengelolaan Alur Pelayaran Barito
 Kepemilikan Saham : PT Pelindo III (Persero) (40,00%),
 PT Bangun Banua Kalimantan Selatan (60,00%).

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Syaiful Adhar
 Direktur : Didid Handoko
 Komisaris Utama : Toto Heli Yanto
 Komisaris Independen : Muhammad Yani Helmi
 Komisaris Independen : Muhammad Bayu Budjang
 Komisaris Independen : Bambang Gunawan

PT Ambang Barito Nusapersada merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengelolaan alur pelayaran di area Barito. Pelayanan yang disediakan perusahaan meliputi pengerukan alur sungai, muara sungai dan muara laut; pembuatan bendungan berikut pemeliharaan dan perawatannya; serta pengelolaan alur pelayaran.

**PT JASA MARGA BALI TOL**

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Pengelolaan Tol Lau Bali Mandara
 Kepemilikan Saham :
 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (17,58%)
 PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55,00%)
 Pemerintah Provinsi Bali (8,01%)
 Pemerintah Kabupaten Badung (8,01%)
 PT Angkasa Pura I (Persero) (8,00%)
 PT Adhi Karya (Persero) Tbk (1,00%)
 PT Utama Karya (Persero) (1,00%)
 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (1,00%)
 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (0,40%)

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Enkky Sasono Anas Wijaya
 Direktur Keuangan : Sukariyadi Rudi Meidianto
 Komisaris Utama : Subakti Syukur
 Komisaris : Toto Heli Yanto
 Komisaris : Sardjono Jhony Tjitrokusumo
 Komisaris : I Gusti Putu Nuriatha
 Komisaris : Kompyang R. Swandika

PT Jasa Marga Bali Tol (JBT) berkedudukan di Denpasar dan didirikan pada tanggal 22 Agustus 2011. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



PT. TPI
 Terminal Petikemas
 Indonesia

PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA

Status Operasional : Telah Beroperasi
 Bidang Usaha : Operator Terminal Peti Kemas di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar
 Kepemilikan Saham : Pelindo I 25,00%
 Pelindo II 25,00%
 Pelindo III 25,00%
 Pelindo IV 25,00%

SUSUNAN MANAJEMEN

Direktur Utama : Hadi Mohammad Lukmantyo
 Direktur : Abadi Sembiring
 Direktur : Alexander Bonar L. Sitorus
 Komisaris Utama : Prasetyadi
 Komisaris : Syahputera Sembiring
 Komisaris : Iman Rachman
 Komisaris : Farid Padang

PT Terminal Petikemas Indonesia merupakan Anak Perusahaan Pelindo Group yang bergerak di bidang operator terminal peti kemas di kota Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Layanan yang diberikan perusahaan meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang, meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan; penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas; penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; serta penyediaan dan/atau pusat distribusi dan konsolidasi barang.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



AFILIASI



PT PORTEK INDONESIA

Pelindo III : 49.00%
Portek System & Equipment Ltd. : 51.00%
Tanggal Pendirian: 21 September 1998
Bidang Usaha:
Pemeliharaan Peralatan Bongkar Muat



PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA

Pelindo I : 25.00%
Pelindo II : 25.00%
Pelindo III : 25.00%
Pelindo IV : 25.00%
Tanggal Pendirian: 10 April 2013
Bidang Usaha:
Layanan Terminal Peti Kemas



PT AMBANG BARITO NUSAPERSADA

Pelindo III : 40.00%
Bangun Banua : 60.00%
Tanggal Pendirian: 26 Maret 2004
Bidang Usaha:
Pengelolaan Alur Pelayaran Sungai Barito



PT JASA MARGA BALI TOL

Pelindo III : 17.58%
Jasa Marga : 55.00%
PemProv Bali : 08.01%
PemProv Badung : 08.01%
Angkasa Pura I : 08.00%
Adhi Karya : 01.00%
Hutama Karya : 01.00%
Pengembangan Pariwisata Indonesia : 01.00%
Wijaya Karya : 00.40%
Tanggal Pendirian: 23 Agustus 2013
Bidang Usaha:
Pengelolaan Tol Bali

ANAK PERUSAHAAN



PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Pelindo : 50.50%
P&O Dover (Holdings) Ltd : 49.00%
Kopelindo III : 00.50%
Tanggal Pendirian: 29 April 1999
Bidang Usaha:
Layanan Terminal Peti Kemas



PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

Pelindo : 96.84%
Kopelindo III : 03.16%
Tanggal Pendirian: 9 Januari 2002
Bidang Usaha:
Layanan Terminal Peti Kemas



PT PELINDO PROPERTI INDONESIA

BJTI : 99.91%
Kopelindo III : 00.09%
Tanggal Pendirian: 5 Desember 2014
Bidang Usaha:
Pengelolaan Properti



PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA

BJTI : 60.00%
UEPN : 40.00%
Tanggal Pendirian: 12 Juni 2012
Bidang Usaha:
Jasa Kepelabuhan Manyar JIPE



PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

BJTI : 90.00%
Kopelindo III : 10.00%
Tanggal Pendirian: 10 November 2015
Bidang Usaha:
Pemeliharaan Alat Bongkar Muat



PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA

BJTI : 40.00%
UEPN : 60.00%
Tanggal Pendirian: 18 Mei 2012
Bidang Usaha:
Pengelolaan Kawasan Industri JIPE



PT BERLIAN MANYAR STEVEDORE

BJTI : 60.00%
UEPN : 40.00%
Tanggal Pendirian: 23 Januari 2016
Bidang Usaha:
Jasa Bongkar Muat



PT TERMINAL NILAM UTARA

BJTI : 40.00%
Andahanesa Abadi : 60.00%
Tanggal Pendirian: 23 Agustus 2013
Bidang Usaha:
Layanan Terminal Curah Cair



PT TERMINAL CURAH SEMARANG

BJTI : 51.00%
Andahanesa Abadi : 49.00%
Tanggal Pendirian: 18 Desember 2015
Bidang Usaha:
Operator Terminal Curah Cair & Gas di Semarang

PT ENERGI MANYAR SEJAHTERA

BJTI : 30.00%
UEPN : 45.00%
Santiniuwansa : 15.00%
Lestari Amanah : 10.00%
Indo Invest : 10.00%
Tanggal Pendirian: 5 Maret 2015
Bidang Usaha:
Pembangkit Listrik

DANA PENSIUN



DANA PENSIUN PERUSAHAAN
PELABUHAN & PENERUKAN



DANA PENSIUN
PELINDO PURNAKARYA



TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



PT PELINDO HUSADA CITRA

Pelindo : 98.73%
Kopelindo III : 01.27%

Tanggal Pendirian: 1 September 1999
Bidang Usaha:
Layanan Jasa Kesehatan



PT PELINDO MARINE SERVICE

Pelindo : 97.89%
Kopelindo III : 02.11%

Tanggal Pendirian: 31 Desember 2011
Bidang Usaha:
Pengelolaan Alat Apung



PT TERMINAL TELUK LAMONG

Pelindo : 99.50%
Kopelindo III : 00.50%

Tanggal Pendirian: 30 Desember 2013
Bidang Usaha:
Layanan Terminal Peti Kemas dan
Curah Kering



PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Pelindo : 90.00%
Kopelindo III : 10.00%

Tanggal Pendirian: 19 Maret 2014
Bidang Usaha:
Layanan Penyedia Jasa
Tenaga Kerja



PT PRIMA CITRA NUTRINDO

PHC : 98.73%
BJTI : 01.27%

Tanggal Pendirian: 15 Januari 2016
Bidang Usaha:
Layanan Jasa Boga dan Nutrisi



PT BERKAH MULTI CARGO

BJTI : 90.00%
Kopelindo III : 10.00%

Tanggal Pendirian: 21 Desember 2015
Bidang Usaha:
Jasa Angkutan Multi Moda



PT LAMONG ENERGI INDONESIA

TTL : 99.00%
Kopelindo III : 01.00%

Tanggal Pendirian: 8 Desember 2014
Bidang Usaha:
Pengelolaan dan Penyediaan energi



PT TANJUNG EMAS DAYA SEJAHTERA

PDS : 99.00%
Kopelindo III : 01.00%

Tanggal Pendirian: 29 September 2014
Bidang Usaha:
Pengelolaan Tenaga Kerja (Tally)



PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA

PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA

PMS : 90.00%
Van Ord : 05.00%
Gerbang Sarana Utama : 05.00%

Tanggal Pendirian: 21 April 2014
Bidang Usaha:
Pengelolaan Alur Pelayaran Surabaya



PT PELINDO ENERGI LOGISTIK

PMS : 90.00%
PEL (Buyback) : 09.00%
BJTI : 01.00%

Tanggal Pendirian: 9 September 2014
Bidang Usaha:
Layanan Logistik & Pengelolaan energi

CUCU PERUSAHAAN



KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Hingga 31 Desember 2018, saham Perusahaan masih dipegang secara penuh oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan saham 100% baik dalam bentuk saham ditempatkan maupun portepel. Dengan demikian, saham Perusahaan tidak diperdagangkan di bursa efek maupun serta informasi terkait:

1. Kronologi pencatatan saham berupa tanggal penetapan rencana pencatatan saham, korespondensi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka persiapan pencatatan saham, dan hasil penilaian dari pihak pemeringkat;
2. Jumlah saham;
3. Nilai nominal;
4. Harga penawaran di awal pencatatan hingga akhir tahun buku; dan
5. Nama bursa tempat saham dicatatkan

Tidak dapat disajikan karena tidak relevan dengan kondisi yang terjadi di Perusahaan saat ini, di mana statusnya sebagai BUMN yang belum melaksanakan pencatatan saham di Bursa Efek.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Pelindo III menerbitkan obligasi global pada tanggal 1 Oktober 2014 senilai USD 500 juta dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat pengembalian bunga 4,875%. Di tahun 2018, Perusahaan telah membayarkan bunga periode IV dan VII pada tanggal 31 Maret 2018 dan 30 September 2018 sebesar USD 12,187 juta per periode.

Di tahun 2018 Pelindo III kembali menerbitkan obligasi internasional pada tanggal 2 Mei 2018 senilai USD 500 juta dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat pengembalian bunga 4,5%.

Selain itu, Perusahaan juga telah membayar dan melaporkan *withholding tax* sebesar USD 3.046 juta per periode. Dana obligasi internasional tersebut digunakan untuk pelunasan *outstanding* utang, keperluan pendanaan ekspansi Perusahaan, dan keperluan umum korporasi lainnya. Di tahun 2018, Perusahaan bekerja sama dengan 3 lembaga pemeringkatan internasional, yaitu Fitch Ratings, S&P Global Ratings, dan Moody's Investors Service. Sementara itu, untuk lembaga pemeringkat dalam negeri, Perusahaan bekerja sama dengan PEFINDO Credit Rating Agency.

**OBLIGASI GLOBAL I**

URAIAN	OBLIGASI GLOBAL PELINDO III
Jenis Sekuritas	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang	U.S Dollar
Distribusi	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar	USD 500.000.000
Tenor	10 tahun
Tanggal Terbit	1 Oktober 2014
Tanggal Jatuh Tempo	1 Oktober 2024
Tingkat Bunga	4,875% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga	31 Maret dan 30 September
<i>Spread to Benchmark</i>	239,5 bps
<i>Oversubscribed</i>	13x melebihi size yang ditawarkan
<i>Current Yield</i>	4,534%
<i>Rating Senior Unsecured</i>	• Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan pada 10 September 2014 • BB+ (<i>Outlook Stable</i>) oleh S&P Global Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014 • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014

OBLIGASI GLOBAL II

URAIAN	OBLIGASI GLOBAL PELINDO III
Jenis Sekuritas	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang	U.S Dollar
Distribusi	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar	USD 500.000.000
Tenor	5 tahun
Tanggal Terbit	2 Mei 2018
Tanggal Jatuh Tempo	2 Mei 2023
Tingkat Bunga	4,5% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga	2 Mei dan 2 November
<i>Spread to Benchmark</i>	239,5 bps
<i>Oversubscribed</i>	2x melebihi size yang ditawarkan
<i>Current Yield</i>	4,283%
<i>Rating Senior Unsecured</i>	• Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan pada 6 Februari 2018 • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 23 April 2018



INFORMASI LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

LEMBAGA PEMERINGKAT

STANDARD AND POOR'S (S&P)

Alamat	12 Marina Boulevard Level 22, #22-01 MBFC Tower 3 Singapore 018982
Telepon	+65 65 306401/+65 65 306403
Faksimile	-
Surel	annabelle.teo@spglobal.com
Jasa yang Diberikan	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III
Imbalan	USD 70.000/tahun
Surat Penunjukan	Mandate Letter dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014
Periode Penugasan	2014 - sekarang

MOODY'S

Alamat	Moody's Investor Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower, Singapore 048623
Telepon	+65 6398 8300
Faksimile	-
Surel	daryl.soh@moodys.com
Jasa yang Diberikan	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III
Imbalan	USD 64.000/tahun
Surat Penunjukan	Mandate Letter dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014
Periode Penugasan	2014 - sekarang

FITCH RATINGS

Alamat	One Raffles Quay, South Tower #22-11, Singapore 048583
Telepon	+65 6796 7200
Faksimile	-
Surel	louis.pang@fitchratings.com
Jasa yang Diberikan	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III
Imbalan	USD 70.000/tahun
Surat Penunjukan	Mandate Letter dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III Tertanggal 1 Juli 2014
Periode Penugasan	2014 - sekarang

**PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)**

Alamat	Panin Tower Senayan City, 17th Floor, Jl. Asia Afrika Lot. 19, RT. 1/RW.3, Gelora, Jakarta Pusat 12220
Telepon	+62 21 7278 2380
Faksimile	+62 21 7278 2370
Surel	martin.pandiangan@pefindo.co.id
Jasa yang Diberikan	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Dalam Negeri Pelindo III
Imbalan	Rp192.500.000/tahun
Surat Penunjukan	Purchase Order No. 0200000021/2017
Periode Penugasan	2017

KONSULTAN HUKUM**PRAMONO & PARTNERS**

Alamat	Jl. Daruf Aisyah III No. 9 Gresik, Jawa Timur
Telepon	+62 31 395 7678
Faksimile	+62 31 395 7678
Surel	kukuhpramono@yahoo.com
Jasa yang Diberikan	Bantuan Jasa Layanan Hukum Eksekusi PT Timur Nusantara
Imbalan	Rp298.000.000
Surat Penunjukan	Purchase Order No. 420002326
Periode Penugasan	Juli 2017-sekarang

HENY YUNIAN TIN S.H., M.KN.

Alamat	Jl. Melon Tengah No. 16 Jasmine Park, Pondok Candra, Surabaya
Telepon	+62 81331000497
Faksimile	
Surel	heni.yuniantin@gmail.com
Jasa yang Diberikan	Pembuatan Akta Notaris Perubahan Nomenklatur
Imbalan	Rp7.500.000
Surat Penunjukan	Purchase Order No. 4200010615
Periode Penugasan	2018

EMI SUSILOWATI, S.H.

Alamat	Graha Mandiri Lt. 3A Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat
Telepon	+62 21 39832849; 08111882304
Faksimile	+62 21 39832749
Surel	emi_susilowati@yahoo.com
Jasa yang Diberikan	Pembayaran Biaya Jasa Hukum Pembuatan Akta Notaris RUPS
Imbalan	Rp7.500.000
Surat Penunjukan	Purchase Order No. 4200011950
Periode Penugasan	2019



INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Pelindo III memiliki *website* sebagai sumber informasi mengenai kinerja Perusahaan yang disajikan secara transparan bagi investor serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. *Website* Perusahaan dapat diakses melalui www.pelindo.co.id. Pada *website* tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai:

INFORMASI PEMEGANG SAHAM SAMPAI DENGAN PEMILIK TERAKHIR INDIVIDU

Informasi mengenai Pemegang Saham Perusahaan dapat diakses di *website* Perusahaan pada kategori "Info Investor" dan subkategori "Pemegang Saham".

ISI KODE ETIK

Informasi mengenai Kode Etik Perusahaan dapat diakses di *website* Perusahaan pada kategori "Tata Kelola" dan subkategori "Tata Kelola Yang Baik".

INFORMASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diakses di *website* Perusahaan pada kategori "Informasi Publik" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data.

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TERPISAH DAN LAPORAN TAHUNAN

Informasi mengenai Laporan Keuangan Tahunan Terpisah dan Laporan Tahunan dapat diakses di *website* Perusahaan pada kategori "Info Investor" dan subkategori "Laporan" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data.

Data yang dilampirkan dalam informasi Laporan Keuangan selalu kami perbarui setiap per tiga bulan (triwulan) dengan menyediakan sarana pengunduhan yang dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam memperoleh data tersebut.

PROFIL DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Informasi mengenai Profil Dewan Komisaris dan Direksi secara lengkap beserta legalitas pengangkatannya dapat diakses di *website* Perusahaan pada kategori "Profil Perusahaan" dan subkategori "Manajemen".

PIAGAM DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Informasi mengenai piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Unit Audit Internal dapat diakses di *website* Perusahaan pada kategori "Tata Kelola" dan subkategori "Tata Kelola yang Baik".

PENGADAAN

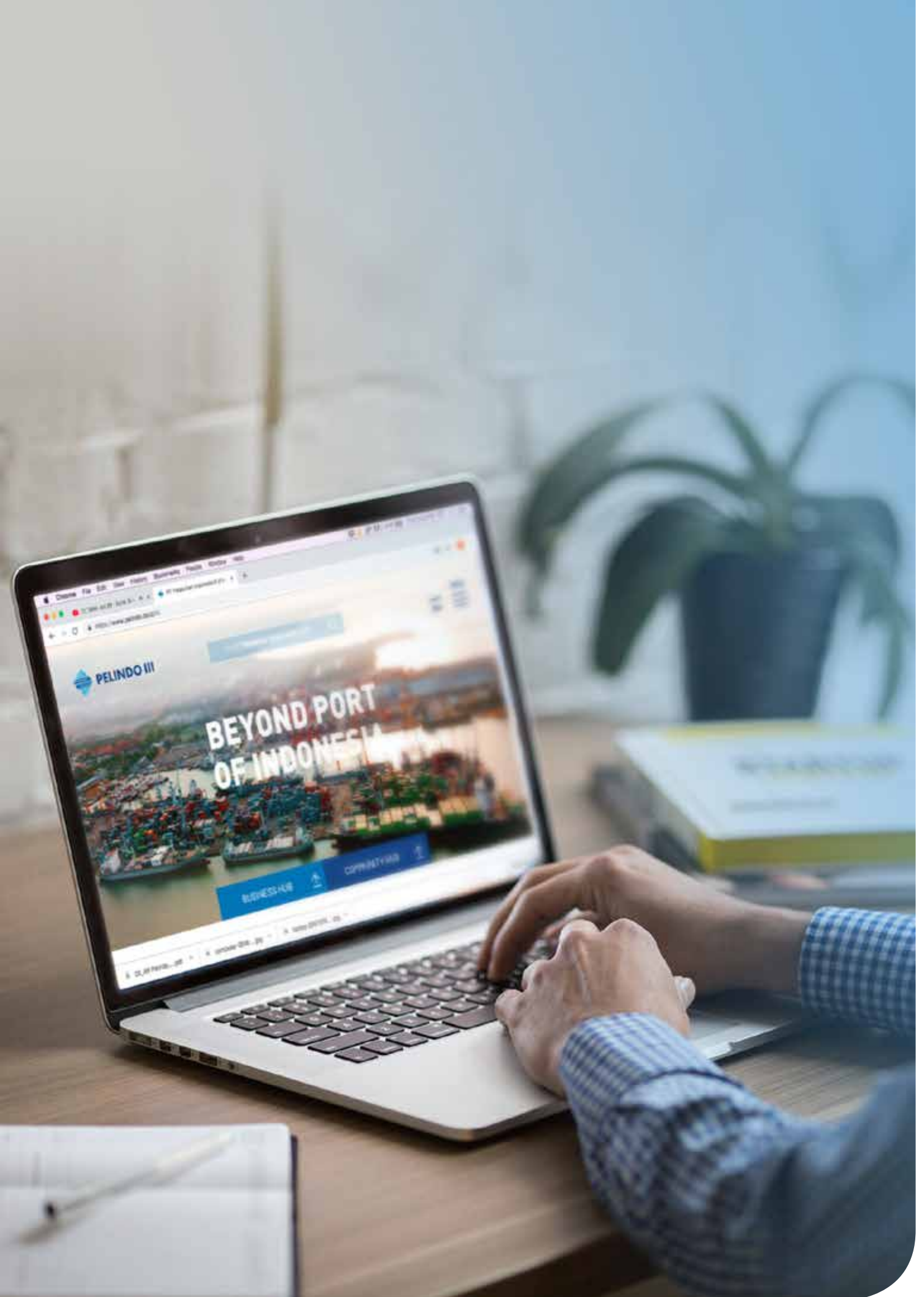
Sebagai media registrasi bagi seluruh mitra dan calon mitra Perusahaan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Selain sebagai media registrasi juga berperan sebagai media informasi terkait dengan pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan baik bagi Perusahaan maupun Anak Perusahaan.

LAPOR

Merupakan media yang disediakan Perusahaan terkait dengan penanganan pengaduan. Media ini tidak hanya dikhususkan bagi karyawan namun juga bagi seluruh masyarakat.

PETA SITUS

Merupakan media informasi bagi masyarakat terkait dengan wilayah kerja, kantor jaringan, dan kantor cabang berikut letak koordinatnya.





ALAMAT KANTOR PUSAT, PERWAKILAN, DAN CABANG PERUSAHAAN

KANTOR PUSAT

Jl. Perak Timur No.610, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60165
Telp. : +62 31 3298631-37
Fax. : +62 31 3295204/3295207
Telex : +62 31 32387
PO BOX 853
Website : www.pelindo.co.id
E-mail : humas@pelindo.co.id; info@pelindo.co.id

KANTOR PERWAKILAN

Tamansari Parama Office Tower, Lantai 7
Jl.K.H Wahid Hasyim No. 84-86 Menteng Jakarta Pusat
Telp. : +62 21 22346068
Fax. : +62 21 22346069

CABANG PELABUHAN

PELABUHAN TANJUNG PERAK

Jl. Perak Timur No.620, Surabaya, Jawa Timur 60165
Telp. : +62 31 3291992-6
Fax. : +62 31 3293994
E-mail : tanjungperak@pelindo.co.id

PELABUHAN GRESIK

Jl. Yos Sudarso No.1 Gresik, Jawa Timur 61114
Telp. : +62 31 3981941/3974542
Fax. : +62 31 3982735
E-mail : gresik@pelindo.co.id

PELABUHAN KALIANGET

Jl. Raya Pelabuhan No. 6 Kalianget, Sumenep, Jawa Timur - 69471
Telp. : +62 328 662447 - 661926
E-mail : tanjungperak@pelindo.co.id

PELABUHAN TANJUNG TEMBAGA

Jl. Tanjung Tembaga Timur No.10, Probolinggo,
Jawa Timur 67201
Telp. : +62 335 421363/421385
Fax. : +62 335 427123
E-mail : tanjungtembaga@pelindo.co.id

PELABUHAN PASURUAN

Jl. Komodor Yos Sudarso No. 150 Pasuruan, Jawa Timur - 67123
Telp. : +62 343 424725
E-mail : tanjungperak@pelindo.co.id

PELABUHAN PANARUKAN

Jl. Pelabuhan Panarukan No. 10 Panarukan, Situbondo,
Jawa Timur - 68351
Telp. : +62 338 672416
E-mail : tanjungperak@pelindo.co.id

PELABUHAN TANJUNG WANGI

Jl.Raya Situbondo, Kecamatan Kalipuro, Desa Ketapang,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Telp. : +62 333 510636
Fax. : +62 333 510484
E-mail : tanjungwangi@pelindo.co.id

PELABUHAN BENOA

Jl. Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali 80222
Telp. : +62 361 720560
Fax. : +62 361 723351
E-mail : benoa@pelindo.co.id

PELABUHAN CELUKAN BAWANG

Jl. Pelabuhan Celukan Bawang No.35, Buleleng, Bali
Telp. : +62 362 92333
Fax. : +62 362 92893
E-mail : celukanbawang@pelindo.co.id

PELABUHAN ENDE DAN IPP1

Jl. Hatta No. 1 Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur - 86361
Telp. : +62 381 21150
E-mail : ende@pelindo.co.id

PELABUHAN WAINGAPU

Jl. Nanga Mesi No. 16 Waingapu, Sumba Timur,
Nusa Tenggara Timur - 87116
Telp. : +62 381 21150
E-mail : waingapu@pelindo.co.id

PELABUHAN KALABAH1

Jl. RE. Martadinata No. 3 Kalabahi, Alor,
Nusa Tenggara Timur - 85813
Telp. : +62 386 21023
E-mail : ende@pelindo.co.id

PELABUHAN TANJUNG EMAS

Jl. Coaster No.10 Semarang, Jawa Tengah - 50116
Telp. : +62 24 3545721-4
Fax. : +62 24 3542649/3576002
E-mail : tanjungemas@pelindo.co.id

TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG (TPKS)

Jl. Coaster No.10 A, Pelabuhan Tanjung Emas,
Semarang, Jawa Tengah 50116
Telp. : +62 24 3586219
Fax. : +62 24 3581242
E-mail : tpks@pelindo.co.id

PELABUHAN TANJUNG INTAN

Jl. Laut Jawa, Cilacap, Jawa Tengah 53213
Telp. : +62 282 534651-2
Fax. : +62 282 534653
E-mail : tanjungintan@pelindo.co.id

PELABUHAN TEGAL

Jl. RE Martadinata No. 9 Tegal, Jawa Tengah - 52111
Telp. : +62 83 351488
Fax. : +62 83 353369
E-mail : tjms-rtgl@pelindo.co.id



PELABUHAN BIMA

Jl. RE Martadinata No.1, Bima, Nusa Tenggara Barat
Telp. : +62 374 43726/42353
Fax. : +62 374 42353
E-mail : bima@pelindo.co.id

PELABUHAN BADAS

Jl. Labuhan Badas No. 11, Sumbawa,
Nusa Tenggara Timur - 84351
Telp. : +62 371 2629120
E-mail : badas@pelindo.co.id

PELABUHAN LEMBAR

Jl. Raya Pelabuhan No.5, Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat 83364
Telp. : +62 370 681260
Fax. : +62 370 681011
E-mail : lembar@pelindo.co.id

PELABUHAN MAUMERE

Jl. Kureng No.2, Maumere, Nusa Tenggara Timur 86111
Telp. : +62 382 21054
Fax. : +62 382 21618
E-mail : maumere@pelindo.co.id

PELABUHAN TENAU KUPANG

Jl. Yos Sudarso No.23, Tenau Kupang, Kupang,
Nusa Tenggara Timur 85351
Telp. : +62 380 890071/890072
Fax. : +62 380 890072
E-mail : tenaukupang@pelindo.co.id

PELABUHAN BANJARMASIN

Jl. Barito Hilir Trisakti No. 6 Banjarmasin,
Kalimantan Selatan - 70119
Telp. : +62 511 3365866
Fax. : +62 511 3352552
E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN BASIRIH

Jl. Teluk Mendung No. 22, RT. 17, RW. 1 Mantuil Raya,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan - 74861
Telp. : +62 511 3365866
E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN PULANG PISAU

Jl. Samudra No. 1 Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan - 74861
Telp. : +62 513 61128
E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN KUALA KAPUAS

Jl. Sudirman No. 3 Selat Hilir, Kapuas, Kalimantan Selatan – 73513
Telp. : +62 513 61128
E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN BAHARU

Desa Tanjung Perawan, Kahayan Kuala, Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah 74872
Telp. : +62 513 61128
E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN KOTABARU

Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru, Stagen,
Kalimantan Selatan - 72151
Telp. : +62 518 21214
Fax. : +62 518 22136
E-mail : kotabaru@pelindo.co.id

PELABUHAN BATULICIN

Jl. Pelabuhan Samudera No. 124, Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan - 72271
Telp. : +62 518 70305
E-mail : batulicin@pelindo.co.id

PELABUHAN STAGEN

Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru,
Kalimantan Selatan - 72151
Telp. : +62 518 21214
E-mail : kotabaru@pelindo.co.id

PELABUHAN MEKAR PUTIH

Jl. Pelabuhan Utama Batubara, Mekar Putih, Kotabaru,
Kalimantan Selatan - 72153
Telp. : +62 518 38866
E-mail : mekarputih@pelindo.co.id

PELABUHAN GUNUNG BATU BESAR

Desa Pa'paan, Sampanahan, Kotabaru,
Kalimantan Selatan - 72166
E-mail : kotabaru@pelindo.co.id

PELABUHAN SATUI

Jl. Pelabuhan Satui No.06 , Satui Barat RT. 05 RW. 03, Satui,
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan - 72275
Telp. : +62 51870305
E-mail : batulicin@pelindo.co.id

PELABUHAN PAGATAN

Jl. Mangkubumi No.36 , Kusan Hilir, Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan – 72273
Telp. : +62 518 70305
E-mail : batulicin@pelindo.co.id

PELABUHAN SAMPIT

Jl. Usman Harun No.2 Sampit, Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah - 74322
Telp. : +62 531 21055
Fax. : +62 531 21123
E-mail : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN BAGENDANG

Jl. HM Arsyad KM. 23 Sampit, Bagendang, Kalimantan Tengah
E-mail : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN KUMAI

Jl. Bendahara No. 248 Kumai, Kotawaringin Barat - 74181
Telp. : +62 532 61468
Fax. : +62 532 61777
E-mail : kumai@pelindo.co.id

PELABUHAN KUALA PEMBUANG

Jl. AS. Nasution, Kompleks Pelabuhan, Seruyan, Kuala Pembuang,
Kalimantan Tengah - 74212
E-mail : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN PAGATAN MENDAWAI

Jl. Merdeka No. 4, RT. 1 RW. 1, Katingan Kuala, Katingan,
Kalimantan Tengah - 74464
E-mail : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN BUMIHARJO

Jl. Pelabuhan CPO RT. 18 Tanjung Kalaf, Kumai, Kotawaringin
Barat, Kalimantan Tengah - 74181
Telp. : +62 532 2074500
E-mail : kumai@pelindo.co.id

PELABUHAN PANGKALAN BUN

Jl. Pangeran Antasari Gg. Kelapa Sawit, Pangkalan Bun,
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah - 74114
Telp. : +62 532 61468
E-mail : kumai@pelindo.co.id

PELABUHAN SUKAMARA

Jl. Pelabuhan No. 124, RT. 01 RW. 03, Mendawai Sukamara,
Sukamara, Kalimantan Tengah - 74172
Telp. : +62 532 26016
E-mail : kumai@pelindo.co.id



LAPORAN
MANAJEMEN



PROFIL
PERUSAHAAN



TINJAUAN
PENDUKUNG BISNIS



ANALISIS DAN
PEMBAHASAN MANAJEMEN

WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN





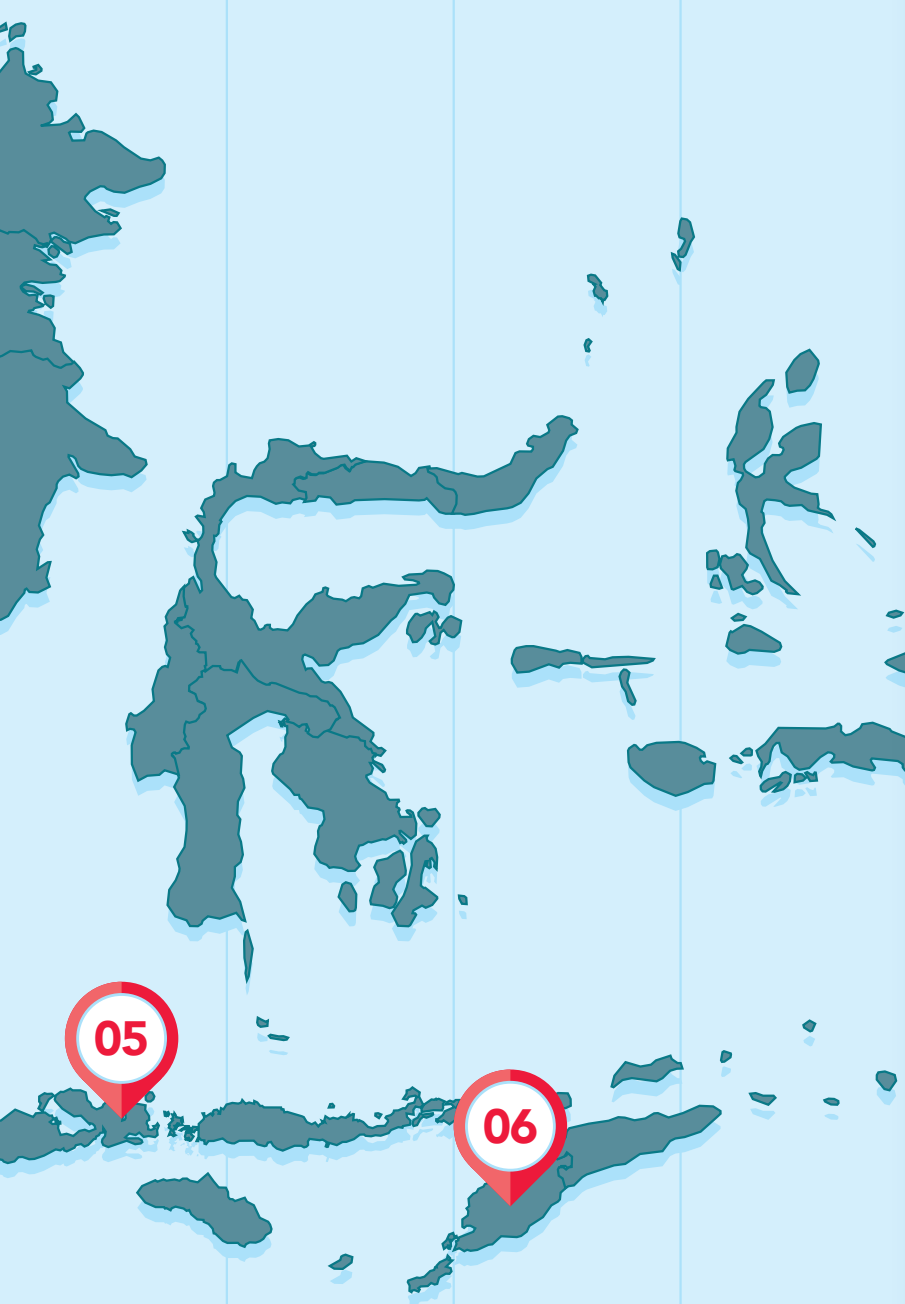
TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN



LAPORAN
KEUANGAN



Wilayah kegiatan operasional
Perusahaan tersebar di 7 wilayah
di seluruh Indonesia, yaitu:

01. KALIMANTAN TENGAH

Kumai, Pangkalan Bun, Sukamara,
Bumi Harjo, Sampit, Kuala
Pembuang, Samuda, Pagatan-
Mendawai, Bagendang, Pulang
Pisau, Kuala Kapuas, dan Bahaur.

02. KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin, Kotabaru, Pagatan,
Gunung Batu Besar, Batulicin,
Satui, Stagen, dan Mekar Putih.

03. JAWA TENGAH

Tanjung Emas, Tanjung Intan,
TPKS, dan Tegal.

04. JAWA TIMUR

Tanjung Perak, Gresik, Kalianget,
Tanjung Wangi, Banyuwangi,
Tanjung Tembaga, Pasuruan, dan
Pamarukan.

05. NUSA TENGGARA BARAT

Lembar, Bima, dan Badas.

06. NUSA TENGGARA TIMUR

Tenau Kupang, Kalabahi,
Waingapu, Maumere, Ende, dan
Ippi.

07. BALI

Benoa dan Celukan Bawang.



03 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS







SUMBER DAYA MANUSIA

Guna memenuhi pencapaian Perusahaan sebagai Emerging Industry Leader, Pelindo III senantiasa meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar siap untuk memenuhi pencapaian tersebut. Perusahaan juga selalu berupaya untuk mengelola dan mengembangkan kreativitas serta inovasi berkelanjutan bagi setiap SDM Pelindo III, agar dapat berintegrasi dengan perkembangan dan perubahan bisnis yang cukup pesat.

Pelindo III juga tak luput untuk selalu menyesuaikan kualitas SDM dengan era bisnis yang semakin modern seperti saat ini, dimana penggabungan antara teknologi dengan SDM menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa mempersiapkan dan melakukan pengadaan teknologi mutakhir bersamaan dengan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Perusahaan.

FOKUS PENGEMBANGAN SDM PELINDO III TAHUN 2018

Perusahaan menyadari bahwa Pegawai merupakan faktor strategis dan salah satu modal yang dimiliki oleh Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis Perusahaan, oleh karena itu strategi pengelolaan dan pengembangan SDM yang tepat dapat menentukan laju kinerja Perusahaan. Melalui kebijakan pengelolaan SDM yang berbasis pengelolaan kinerja pegawai, Perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh pegawai dari berbagai lini akan mengarah pada pencapaian target bisnis. Penerapan Sistem manajemen talenta dipilih sebagai salah satu strategi yang cukup terintegrasi dan berkesinambungan untuk dapat mengelola kinerja pegawai mulai tahap awal hingga tahap akhir, karena pada setiap tahapnya memfokuskan Perusahaan untuk menyiapkan dan menyediakan Pegawai yang unggul dan andal.

Untuk memperoleh pegawai dengan kinerja yang diharapkan maka dibutuhkan strategi pengembangan (Pendidikan dan Pelatihan) SDM yang tepat, dalam hal ini Perusahaan menerapkan kebijakan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Kompetensi yang dikembangkan di sini meliputi soft competency dan hard competency. Setiap Pegawai wajib penerapan Pemetaan Kompetensi dan Desain Pembelajaran (Mapping Competency dan Learning Design), Implementasi Talent Development atas Talent Pool yang dimiliki Perusahaan, Knowledge Management System, SAP HCM Strategic Management, dan SAP Fi Enhancement.

Asesmen dilakukan kepada seluruh Pegawai setiap 2 tahun sekali sebagai salah satu langkah untuk memetakan kompetensi pegawai yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pengembangan terhadap masing-masing pegawai. Dalam hal kebijakan Karir Pegawai, Perusahaan mengaturnya dalam Peraturan Direksi tersendiri. Sama halnya dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Pelindo III, dimana setiap Pegawai di Perusahaan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam beberapa hal, salah satunya kesempatan dalam berkarir. Setiap Pegawai memiliki jalur pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan bidang jabatannya yang dapat memberikan implikasi terhadap pencapaian strategi bisnis Perusahaan dan hal ini masih merupakan rangkaian dalam sistem manajemen kinerja SDM.

Pegawai yang hendak dipromosikan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kebijakan Karir Pegawai, antara lain hasil asesmen yang baik dan pemenuhan kompetensi dari jabatan yang dituju. Apabila ada beberapa kandidat yang memiliki kualifikasi yang sama, maka Dewan Pertimbangan Jabatan bersama dengan Direksi secara panel akan menentukan kandidat yang paling berkompeten dengan jabatan tersebut.

Pada tahun buku 2018, tercatat telah dilakukan mutasi kepada 1.126 pegawai dengan rincian promosi kepada 320 pegawai, rotasi kepada pegawai 804 pegawai, dan demosi kepada 2 pegawai.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Dalam rangka menetapkan strategi pengelolaan SDM baik dalam konteks Rencana Kerja Perusahaan maupun inisiatif strategis yang dibutuhkan selama berjalannya aktivitas usaha, Perusahaan senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dasar aturan di internal Perusahaan, dan beberapa referensi lainnya. Pedoman-pedoman ini merupakan sebuah landasan yang telah disesuaikan dengan dimensi-dimensi pengelolaan SDM yang dibutuhkan.

Landasan kebijakan pengelolaan SDM yang berlaku di Perusahaan meliputi:



PENGELOLAAN SDM MENGACU PADA UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Referensi legal-formal utama dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan, yaitu dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam menetapkan kebijakan yang diperlukan, regulasi tersebut telah mengatur banyak aspek yang diperlukan seperti:

1. Kesetaraan dan pemenuhan hak asasi manusia;
2. Perencanaan dan informasi tenaga kerja;
3. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. Penempatan tenaga kerja;
5. Hubungan kerja;
6. Perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja;
7. Hubungan industrial; dan
8. Pemutusan hubungan kerja.

PENGELOLAAN SDM MENGACU PADA ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA PERUSAHAAN

Dalam tahapan selanjutnya, dasar kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan juga mengacu pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) yang muatannya telah merujuk pada substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan telah dilakukan pengembangan serta penyesuaian kembali dengan kondisi usaha di lingkungan Perusahaan.

PENGELOLAAN SDM MENGACU PADA RENCANA KERJA PERUSAHAAN

Guna menyinergikan arah pengembangan usaha Perusahaan dengan kebijakan dan strategi pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan, Pelindo III melalui Direktorat Sumber Daya Manusia melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan dengan Rencana Kerja Perusahaan. Penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perusahaan diperlukan agar pilar SDM dapat dimaksimalkan untuk mendukung secara penuh atas rencana yang ditetapkan.

PENGELOLAAN SDM MENGACU PADA REFERENSI LAINNYA

Selain melakukan pemenuhan dasar kebijakan utama dalam melakukan pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan, Pelindo III juga mengadopsi beberapa strategi pengelolaan SDM berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti Konsultan Human Capital, baik yang bersifat umum maupun kajian yang dikhususkan kepada Perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan menjadi lebih tepat dan sesuai pada kebutuhan. Selain itu, pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan juga semakin dekat dengan fenomena-fenomena pengelolaan SDM yang terjadi dewasa ini.

Referensi dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan SDM Perusahaan tahun 2018 meliputi:

REFERENSI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM 2018

PERUMUSAN KEBIJAKAN	NAMA VENDOR
Restrukturisasi Organisasi	PT Dunamis
Learning Design	PPM Management
Knowledge Management	PT Knoco
Asesmen Budaya Perusahaan	PT ACT Consulting

PENGELOLAAN SDM

Melihat signifikannya peran SDM bagi kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan, struktur organisasi yang telah ditinjau dan disahkan melalui Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.51/OS.0101/P.III-2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penyempurnaan atas Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.10/OS.0101/P.III-2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.III/OS.0101/P.III-2015. Tanggal 1 September 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Pelindo III.

Dalam menjalankan kegiatan di bidang pengelolaan SDM, Direktur Sumber Daya Manusia dibantu oleh 2 pejabat dengan level jabatan SM Strategi dan Kesisteman SDM serta seorang SM Pelayanan SDM dan HSSE.

PROFIL PEJABAT SDM

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA

*Profil Direktur Sumber Daya Manusia telah disampaikan dalam pembahasan profil Direksi Perusahaan.

**PROFIL SENIOR MANAGER STRATEGI DAN KESISTEMAN SDM**

Nama	I Putu Sukadana
Tempat, Tanggal Lahir	Denpasar, 13 Juli 1976
Pendidikan	Magister Manajemen
Tahun Aktif	1 Mei 1999
Riwayat Jabatan	1. Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM 2. SVP Human Capital System and Strategy 3. General Manager Pelabuhan Kupang 4. Deputi Bidang Operasi 5. Asisten Senior Manager Pelayanan Terminal 6. Manajer Operasi dan Komersial Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap 7. Manajer Operasi dan Komersial Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah 8. Auditor Bidang Operasi 9. Planner di Terminal PKS 10. Pelaksana Pelayanan Kapal, Barang dan Property di Pelabuhan Celukan Bawang
Dasar Hukum Pengangkatan	KEP.37/KP.0403/P.III-2018 tanggal 22 Januari 2018

PROFIL SENIOR MANAGER PELAYANAN SDM DAN HSSE

Nama	Edi Priyanto
Tempat, Tanggal Lahir	Klaten, 23 Oktober 1976
Pendidikan	Magister Manajemen
Tahun Aktif	1 Mei 1999
Riwayat Jabatan	1. SVP Human Capital System and Strategy 2. Vice President Corporate Communications 3. Asisten Manajer Pemasaran 4. Analis Sistem Manajemen 5. Supervisor Keamanan dan K3
Dasar Hukum Pengangkatan	KEP.37/KP.0403/P.III-2018 tanggal 22 Januari 2018



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SDM

Direktur Sumber Daya Manusia	Toto Heli Yanto
Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM	I Putu Sukadana
Asisten Senior Manager Perencanaan SDM dan Manajemen Talenta	Anjar Sulistyorini
Asisten Senior Manager Pengembangan Organisasi dan Sistem SDM	Oscar Yogi Yustiano
Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE	Edi Priyanto
Asisten Senior Manager Administrasi SDM, Kesejahteraan, dan Hubungan Industrial	Riza Rosdiana
Asisten Senior Manager Pengembangan SDM	Baiq Nurul Hikmawati
Asisten Senior Manager Health, Safety, Security, and Environment (HSSE)	Bondan Winarno
Senior Manager Umum/Kepala Kantor Pusat	Roy Dharma Putera
Asisten Senior Manager Administrasi dan Pelayanan Umum	I Nengah Nariasa
Supervisor Keuangan Kantor Pusat	Henny Dwi Rohmata
Supervisor Pemeliharaan Fasilitas Kantor Pusat	Dwi Endriawan Priatna
Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa	Umar
Asisten Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa Regional I	Theresia Rury Setyawati
Asisten Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa Regional II	Andi Mawarta
Asisten Senior Manager Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dan Anak Perusahaan	Andri Kurniawan
Senior Manager Hukum	Raden Mas Kumara Anindhita Widyaswendra
Asisten Senior Manager Perikatan Perusahaan	Umi Syarifah Ambarwati
Asisten Senior Manager Bantuan Hukum dan Peraturan Perusahaan	Muhammad Fitrianto Malik

VISI DAN MISI SDM

Dalam rangka meningkatkan semangat perubahan positif di lingkungan Perusahaan serta meningkatkan standar layanan di bidang jasa kepelabuhanan dan usaha penunjang yang profesional dan berdedikasi oleh setiap Pegawai, Divisi SDM memiliki visi dan misi yaitu:

VISI SDM

“Menjadikan SDM yang berkompeten, berkinerja andal, dan berbudi pekerti luhur dalam menunjang pencapaian Perusahaan sebagai *Emerging Industry Leader*”

MISI SDM

1. Terwujudnya pemetaan kompetensi dan terimplementasinya program pengembangan pegawai berdasarkan strategi bisnis Perusahaan;
2. Pembentukan organisasi yang sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan sebagai terminal operator;
3. Terwujudnya proses promosi pejabat struktural melalui sistem manajemen talenta;
4. Pemberian remunerasi pegawai sesuai dengan kontribusi pegawai terhadap Perusahaan; dan
5. Peningkatan citra Perusahaan melalui pembentukan budaya Perusahaan menuju profesionalisme serta peningkatan peran dalam komunitas masyarakat.

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM PELINDO III

JEJAK LANGKAH SISTEM PENGEMBANGAN SDM



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Board Manual yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual dan Code of Corporate Governance), dinyatakan bahwa ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktorat SDM secara umum adalah melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, dan penilaian kinerja pegawai dengan rincian:

1. Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan pengembangan organisasi, serta pengelolaan jabatan dan pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi;
2. Tersedianya strategi dan kebijakan dalam mengembangkan kesisteman SDM yang terintegrasi;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan Coaching Mentoring Counseling, manajemen talenta terintegrasi, asesmen, dan manajemen karir;
4. Melakukan evaluasi kebutuhan SDM;
5. Merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan rekrutmen pegawai;
6. Merencanakan, menetapkan, melaksanakan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan terkait dengan kesejahteraan SDM sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
7. Melaksanakan penilaian kinerja individu dan administrasi data pegawai melalui pengelolaan sistem informasi SDM;
8. Menyelenggarakan dan membina kegiatan pembuatan surat keputusan pengangkatan pegawai, kenaikan periodik, penyetaraan jabatan anak perusahaan, serta pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan pegawai pensiun termasuk pensiun dini;
9. Melaksanakan kegiatan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



10. Menyusun, menetapkan, dan menyelenggarakan program-program pengembangan SDM (mulai dari pembuatan analisa kebutuhan training, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, terdiri dari kegiatan administrasi, penyediaan fasilitas sampai pengembangan modul, evaluasi dan review kegiatan pelatihan, serta tindak lanjut hasil pendidikan dan pelatihan, terpenuhinya kebutuhan cabang atas pengembangan SDM yang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan); dan
11. Pelaporan di bidang kepegawaian secara korporat.

TARGET PENGELOLAAN SDM BERDASARKAN RKAP 2018

Di tahun 2018, Perusahaan telah menetapkan target dalam hal pengelolaan SDM yang terangkum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018. Target dan anggaran di bidang SDM diperlukan dalam rangka menyelaraskan rencana-rencana Perusahaan di tahun buku, serta mengingat posisi SDM sebagai salah satu bagian dari pilar inti usaha yang perannya signifikan bagi Perusahaan. Target-target yang ditetapkan meliputi:

1. Mendapatkan gambaran pelaksanaan COB yang telah berjalan sehingga dapat meminimalkan kendala pada saat penerapannya;
2. Mengetahui biaya dan manfaat apabila dilakukan penerapan program COB;
3. Pemahaman terkait program pelayanan kesehatan dengan pola COB;
4. Mendapatkan gambaran pelaksanaan SMKI berbasis android di perusahaan lainnya;
5. Mengetahui biaya dan manfaat apabila dilakukan program aplikasi berbasis mobile app;
6. Pengembangan aplikasi dan uji coba pada Subdirektorat yang ditentukan;
7. Terealisasinya aplikasi SMKI berbasis mobile app;
8. Daftar taksonomi pengetahuan strategis Pelindo III;
9. Dokumentasi knowledge captured;
10. Penggunaan aplikasi I know untuk kegiatan diklat;
11. Pilot project COP pada satu Subdirektorat terpilih;
12. Penyusunan hard competency melalui metode RHMS;
13. Review model dan profil kompetensi yang harus disusun;
14. Tersusun Cluster Kompetensi masing-masing jabatan;
15. Tersusun penyempurnaan uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan;
16. Tersedianya daftar critical position;
17. Terlaksananya kegiatan asesmen kompetensi;
18. Tersusun aksi kegiatan pengembangan bagi talenta perusahaan; dan
19. Terlaksananya sistem dan program retensi pegawai.

PROGRAM KERJA DIVISI SDM TAHUN 2018

Guna merealisasikan target-target pengelolaan SDM yang diperlukan, Perusahaan menetapkan beberapa program kerja yang telah disetujui dan termuat di dalam RKAP 2018, meliputi:

1. Banchmarking ke perusahaan yang telah menjalankan program COB;
2. Analisis biaya dan manfaat pelaksanaan COB;
3. Sosialisasi rencana penerapan COB kepada pegawai dan pensiunan;

4. Benchmarking ke Perusahaan yang telah menggunakan mobile app sebagai media penilaian kinerja pegawai;
5. Analisa pelaksanaan SMKI berbasis mobile app;
6. Development dan uji coba SMKI berbasis mobile app;
7. Evaluasi peraturan-peraturan terkait dengan kesejahteraan pegawai;
8. Implementasi SMKI berbasis mobile app;
9. Pelaksanaan program diklat berdasarkan kompetensi inti Perusahaan;
10. Penyempurnaan konsep penilaian sistem manajemen kinerja pegawai;
11. Penyusunan taksonomi;
12. Knowledge Captured;
13. Pembangunan aplikasi I know;
14. Proses Knowledge Management : Community Of Practice (COP);
15. Penyusunan hard competency melalui metode RHMS;
16. Review model dan profile kompetensi yang harus disusun;
17. Clustering kompetensi berdasarkan jabatan;
18. Pembagian peran/tanggung jawab melalui penyempurnaan uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan;
19. Penetapan critical position;
20. Assessment Kompetensi sebagai dasar pemetaan talent;
21. Development Program for Talents; dan
22. Pengembangan sistem retensi pegawai.

DASAR KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Regulasi tata kelola SDM di internal Perusahaan diatur dalam Peraturan Direksi yang secara spesifik mengatur kebijakan mengenai aspek-aspek SDM dalam Perusahaan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Setiap Peraturan Direksi tentang SDM yang disusun sangat memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko hukum yang mungkin muncul dari pengelolaan dan penerapan SDM sehingga dapat membantu Perusahaan untuk lebih fokus pada proses bisnis dan target perusahaan di tahun berjalan maupun jangka panjang. Rujukan atas setiap kebijakan meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang terkait, maupun yang menjadi turunannya.

REKRUTMEN

Dalam rangka pencapaian target kinerja Perusahaan dan berdasarkan analisis kebutuhan SDM tahun 2018, beberapa rekrutmen dilakukan dengan memfokuskan pada perekrutan SDM pada fungsi operasional dan bisnis. Pada tahun 2018 dilakukan perekrutan tenaga IT sebanyak 6 orang pada bulan Januari 2018 dan tenaga Pandu sebanyak 14 orang pada bulan Mei 2018. Dasar kebijakan pelaksanaan perekrutan tenaga pandu dan IT tahun 2018 ini mengacu pada perencanaan SDM. Pelaksanaan teknis perekrutan berpedoman pada Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.0002/KP.0102/P.III-2018 tentang Penerimaan Pegawai dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 57 tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

Pelaksanaan Rekrutmen tenaga Pandu dan tenaga IT tahun buku 2018 dilaksanakan di kota Surabaya dengan metode open recruitment, sehingga memungkinkan bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga Pandu untuk melamar posisi tersebut. Dari open recruitment tersebut, diperoleh sekitar 400 pelamar yang akan diseleksi lebih lanjut mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan seleksi tenaga pandu, Perusahaan bekerja sama dengan konsultan untuk pelaksanaan.

PENGELOLAAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Guna melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai, Perusahaan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) sesuai dengan Peraturan Direksi No. PER.16.1/KP.0302/P.III-2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI). Sejak tahun 2012, penilaian kinerja pegawai dilakukan secara online di situs smki.pelindo.co.id. Hal ini dilakukan agar penilaian kinerja pegawai menjadi lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Penilaian kinerja pegawai terbagi dalam 4 tahap, yaitu perencanaan, pemantauan, penilaian, serta penghargaan dan hukuman.

Penanggung jawab penilaian kinerja pegawai adalah Subdirektorat Human Capital Services, di bawah Vice President Human Capital Administration, Compensation, and Industrial Relations. Hasil dari penilaian kinerja pegawai dapat digunakan dalam proses manajemen SDM di lingkungan Perusahaan, misalnya salah satu data pertimbangan promosi pegawai, usulan peserta ibadah keagamaan, kenaikan periodik, perhitungan bonus pegawai, dan data talent management.

Berdasarkan hasil review dan evaluasi RJPP tahun 2012-2016 tercatat rata-rata pertumbuhan kinerja pegawai setiap tahunnya sebesar 2,6%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan positif antara jumlah pegawai dengan hasil pencapaian produktivitas pegawai dari tahun 2012 hingga 2016. Sementara itu, di 2018 Penilaian Kinerja Pegawai akan dilakukan perhitungan pada Kuartal I tahun 2019 untuk dijadikan dasar perhitungan bonus yang akan dibayarkan kepada Pegawai pada Kuartal II 2019.

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Perusahaan meyakini bahwa agar dapat bertahan di era disruption saat ini, Perusahaan harus memiliki kekuatan bisnis yang andal dan SDM yang kompeten. Di samping itu, SDM dituntut untuk mempunyai semangat penuh dalam melakukan inovasi demi kemajuan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan secara berkelanjutan memberikan program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Pegawai, baik dari level staf hingga manajemen puncak. Dengan diberikannya program pendidikan dan pelatihan Pegawai, diharapkan terdapat peningkatan kecepatan, efektivitas, dan efisiensi kerja dalam organisasi di tengah perkembangan pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat.

DASAR DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Dalam proses pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan SDM, Perusahaan berpedoman pada Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.28.1/KP.0301/P.III-2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai.

JENIS PENGEMBANGAN SDM

Program pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap serta mental pegawai melalui berbagai metode pelatihan seperti pendidikan di sekolah formal, workshop, seminar, simposium, dan studi banding.

Dalam rangka memberikan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan dan memastikan terlaksananya Diklat secara efektif dan efisien, sejak tahun 2017 Perusahaan telah menyusun beberapa tools yang dirancang untuk membantu mendukung pelaksanaan diklat secara profesional, yaitu:

HARD COMPETENCY

Program untuk melakukan identifikasi kemampuan-kemampuan teknis (hard competency) untuk seluruh fungsi di Kantor Pusat Pelindo III meliputi fungsi Operasi dan fungsi Supporting;

LEARNING DESIGN

Rancangan proses pembelajaran bagi pegawai dalam organisasi, termasuk di dalamnya perumusan proses dan content dari proses belajar yang akan dijalani pegawai. Manfaat Learning Design antara lain sebagai berikut:

1. Membantu manajemen mengidentifikasi skill sets dari fungsi-fungsi jabatan yang dapat mendukung terbentuknya kompetensi inti organisasi guna mencapai sasaran bisnis Perusahaan;
2. Menyediakan program pengembangan SDM yang terencana secara sistematis dan mendukung pencapaian sasaran bisnis Perusahaan;
3. Menyediakan grand design program pembelajaran yang berjenjang dan implementatif, baik untuk kelompok jabatan struktural (manajerial) maupun fungsional;
4. Menyediakan Learning Curriculum dan Learning Syllabus yang berorientasi pada peningkatan kompetensi karyawan dan sesuai dengan grand design;
5. Menyediakan pedoman bagi karyawan dalam menentukan pelatihan dan pengembangan yang akan diikutinya; dan
6. Menyediakan informasi bagi Manajemen dalam merancang rencana pengembangan pegawai.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Program untuk melakukan identifikasi dan menyusun fondasi kerangka untuk implementasi proses manajemen ilmu pengetahuan di dalam Perusahaan. Penyusunan Knowledge Management akan dilaksanakan dalam periode waktu 2017-2019.



Pada tahun pertama (2018) Knowledge Management Tahap II, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Workshop Knowledge Capture serta pembentukan Knowledge Community (KONCO) dimana telah ditetapkan tiap 2 bulan sekali untuk dilakukan pertemuan. Penerapan Knowledge Management selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dengan mendatangkan Subject Matter Expert (SME).

KEGIATAN PELATIHAN 2018

Dalam rangka menciptakan sumber daya yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri saat ini, Perusahaan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan secara rutin. Realisasi program Diklat yang telah dilaksanakan di tahun 2018 sebanyak 239 kali pelatihan. Pendidikan dan Pelatihan ini diikuti oleh 1.076 pegawai organik dengan persentase rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 61% dari total pegawai.

KEGIATAN PELATIHAN 2018

NO	KETERANGAN	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI PELATIHAN	PRESENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PELATIHAN
1	Seluruh Pegawai	1753	1076	61%
2	Pegawai Pria	1385	872	63%
3	Pegawai Wanita	368	204	55%

Dengan realisasi 239 pelatihan, rata-rata jam pelatihan per tahun untuk pegawai Pelindo III adalah 28,69 jam/tahun dengan rincian 28,66 jam/tahun untuk pegawai pria dan 28,80 jam/tahun untuk pegawai wanita.

PELATIHAN 2018 BERDASAR JUMLAH JAM DAN GENDER

NO	KETERANGAN	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH JUDUL PELATIHAN	JUMLAH JAM PELATIHAN	RATA RATA JAM PELATIHAN/TAHUN
1	Seluruh Pegawai	1753	239	50297	28.69
2	Pegawai Pria	1385	239	39698	28.66
3	Pegawai Wanita	368	239	10599	28.80

Program Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

PENDIDIKAN FORMAL

Pendidikan formal adalah pendidikan akademik atau pendidikan profesi yang diikuti di lembaga pendidikan. Pada tahun 2018, Manajemen Pelindo III memberikan kesempatan kuliah Pasca Sarjana (S2) kepada pegawai-pegawai terpilih sebanyak 50 pegawai, untuk menuntut ilmu di berbagai Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN FORMAL DAN LIST UNIVERSITAS 2018

NO	UNIVERSITAS	JURUSAN	JUMLAH
1	Institut Teknologi Bandung	Magister Administrasi Bisnis	23
2	Universitas Airlangga	K3	1
3	Universitas Gajah Mada	Magister Manajemen	2
4	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Manajemen Pengembangan Masyarakat	1
5	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Manajemen Proyek	1
6	PPM School of Management	Bisnis Pemasaran	22
JUMLAH			50

DIKLAT MANAGERIAL

Diklat Managerial adalah diklat yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan struktural tertentu, yang terdiri atas Diklat Managerial tingkat Muda, tingkat Madya, dan tingkat Utama. Pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi pejabat struktural yang telah dilaksanakan di tahun 2018 adalah Pelatihan Directorship Program, Training for the Trainer (TOT), dan lain-lain.

Guna mempersiapkan kader-kader pemimpin bidang SDM, telah dilaksanakan pelatihan Rancangan Strategis Program Pembelajaran Bidang SDM yang diikuti oleh 24 peserta. Program ini diharapkan mampu memberikan bekal kompetensi bidang pengelolaan SDM dan mempersiapkannya menjadi pemimpin di masa mendatang.

DIKLAT SUBSTANSIAL

Diklat Substansial terbagi menjadi 2 kelompok yaitu:

DIKLAT DASAR

Program pelatihan yang menekankan pada soft competency, pembentukan sikap, kepribadian dan etika perusahaan, serta pengenalan bisnis perusahaan. Diklat Delivering Service Excellence, budaya perusahaan (change champion), Speak to Change, dan lain-lain diberikan untuk meningkatkan soft competency Pegawai.

DIKLAT TEKNIS

Program yang menekankan pada pencapaian kompetensi teknis untuk bidang operasional, keuangan, teknik, SDM, hukum, kehumasan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sesuai jabatannya.

Diklat mandatory meliputi pelatihan-pelatihan teknis yang dipersyaratkan dalam peraturan baik Nasional maupun Internasional yang telah dilaksanakan di tahun 2018 yaitu: Sertifikasi SIO alat angkat dan angkut, pelatihan SMK3, ISO 31000:2018, pelatihan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, pelatihan Surveyor Hidrografi, Oracle database, dan pelatihan lain-lain sebagaimana terlampir di bawah.

DIKLAT FUNGSIONAL

Program yang menekankan pada persyaratan kompetensi yang diperlukan dalam jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional seperti Tenaga Pandu, bidang Information and Technology, dan Auditor diberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi bidangnya.

REALISASI DIKLAT MANAGERIAL DAN SUBSTANSIAL 2018

Secara keseluruhan jumlah peserta Diklat Managerial dan Substansial adalah sebanyak 2.377 orang yang terdiri dari beragam jabatan, yaitu Manager Utama, Manager Madya, Manager Dasar, Pelaksana Utama, Pelaksana Madya, dan Pelaksana Muda. Uraian mengenai kegiatan Diklat Managerial dan Substansial di tahun 2018 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:



REKAPITULASI PELAKSANAAN DIKLAT MANAGERIAL DAN SUBSTANSIAL 2018

NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PESERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
1	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch II	Risk Manajemen			2	3	6	4		5	20
2	Pelatihan dan Sertifikasi SIO Fixed Crane Cabang Lembar	Operator			1		3	2			6
3	Pelatihan Pengurangan Risiko pada Kecelakaan Kerja	K3		8	17		1			12	38
4	Rancangan Stratejik Program Pembelajaran Bidang SDM dan Umum Level Intermediate	SDM			1	7	10	1		5	24
5	Pelatihan dan Sertifikasi SIO Operator Alat Fixed Crane, Reach Stacker dan Forklift	Operator					4	1		3	8
6	On The Job Training STS dan RTGC	Operator			22	18	45	12	12	37	146
7	Pelatihan Advance BIM Aecosim	Teknik					4	2		2	8
8	Pelatihan Bahasa Mandarin	SDM				6	5	1		2	14
9	Pelatihan Coaching Skill	SDM		2	13	8				4	27
10	Pengembangan Kompetensi Personil dan Unit Kerja SPI PELINDO III dan Anak Perusahaan	SPI		1	12	1				3	17
11	Forum HSSE Regional	K3	1	12	15	13	11	5	2	7	66
12	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris	SDM	2	2						1	5
13	Bimbingan Teknis Tentang Keterbukaan Informasi Publik	HUMAS		3	13					1	17
14	Diklat Foreman Batch VI Banjarmasin	Foreman					1			14	15
15	Diklat Pandu Laut Dalam (Deep Sea Pilot) Tahun 2018	Pandu			15						15
16	Perpanjangan SIO Operator Alat Angkat dan Angkut	Operator			17	2	2	9		4	34
17	Pelatihan Bahasa Inggris Foreman TPKS	SDM					3		2	14	19
18	Diklat Pengenalan Bisnis Perusahaan dan Ujian	Oprasional								14	14
19	Workshop Safety Sign	K3		2	4	2	6	5		15	34
20	Pelatihan Interpretasi KPKU BUMN	HUMAS		1	1	11	10			2	25
21	Pelatihan dan Sertifikasi CRMO dan CRMP Juli 2018 Batch 1	Risk Manajemen		1	11	10	9	2	4	6	43
22	Pelatihan Evaluator KPKU BUMN	HUMAS		1		7	8				16
23	Pelatihan Infografis Batch 1	SDM		3	1	10	7	1		3	25
24	Pelatihan dan Sertifikasi SIO HPC dan Sertifikasi SIO Forklift	Operator							10	4	14
25	Workshop Awareness Keamanan Informasi Batch 1	SDM		1	3	6	6			3	19
26	Workshop Awareness Keamanan Informasi Batch 2	SDM			1	6	10	1		1	19



NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PESERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
27	Workshop Awareness Keamanan Informasi Batch 3	SDM	1			12	4	2	1		20
28	Pelatihan Penyusunan Feasibility Study	SDM	1	4	13	8	3	1			30
29	Pelatihan HTS (Home Terminal Service) dan Pelatihan Gateway CRM	Operasional				6	1		3		10
30	Workshop Legal Training "Legal Audit Sebagai Sarana Pencegahan Permasalahan Aset dan Aksi Korporasi di BUMN "	Hukum	5	4	2	1	4			18	34
31	Pelatihan Infografis Batch 2	SDM		1	1	6	6	1			15
32	Pelatihan Asset dan Financial Accounting (Module SAP)	Keuangan		1		2	4	3			10
33	Knowledge Capture batch I tahun 2018	SDM			2	6	6	10	1		25
34	Pelatihan Infografis Batch 3	SDM		1	1	3	4	1			10
35	Training Motivation and Safety Leaders Batch I	K3			15	9					24
36	Training Motivation and Safety Leaders Batch II	K3			7	6					13
37	Diklat Foreman Non Peti Kemas	Foreman			1		3	4	1		9
38	Pelatihan Penyusunan Feasibility Study Batch 2	SDM		2	4	9	8	5	1		29
39	Workshop Penyusunan Survey Kepuasan dan Engagement Pegawai Pelindo III	SDM		4	4	5	5	2			20
40	Bagaimana Proses Survey Risiko dan Penutupan Asuransi dan Bagaimana Membuat Laporan Survey Klaim	Risk Manajemen		2	4	1	4				11
41	workshop Knowledge Community (KONCO)/ Community of Practice	SDM		5	3	6	10	2	1		27
42	Training K3 Investigasi Kecelakaan Kerja Sertifikasi BNSP Batch I	K3		1	6	4	3	2		9	25
43	Training K3 Investigasi Kecelakaan Kerja Sertifikasi BNSP Batch II	K3		1	9	11	5	2		7	35
44	Pelatihan Enhanching Your Business Acumen Batch 1	Manajerial		16	2					5	23
45	Marketing for Port	Marketing		2	6	20					28
46	Pelatihan Mental Agility : Peer Empowerment	SDM			4	14	1			1	20
47	Pelatihan Enhanching Your Business Acumen Batch 2	Manajerial	4	12	6					4	26
48	Pelatihan Enhanching Your Business Acumen Batch 3	Manajerial	4	11	7					2	24
49	Pelatihan Enhanching Your Business Acumen Batch 4	Manajerial	3	13	3		1			5	25
50	Pelatihan Enhanching Your Business Acumen Batch 5	Manajerial	2	9	5	1					17
51	Pelatihan Enhanching Your Business Acumen Batch 6	Manajerial	5	5	7	1	1				19



NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PESERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
52	Training SQL Tunning for Developer Advance	IT					1				1
53	Change Agent on Board Batch I	SDM			2	4	13	7	4		30
54	Pelatihan Penyusunan Feasibility Study	SDM					7	3	1		11
55	Change Agent on Board Batch II	SDM				5	11	5	4	3	28
56	Knowledge Capture Batch II	SDM				2	11	4	1	6	24
57	Pelatihan "Towards Better IT Governance Using COBIT 5"	IT					1			16	17
58	Workshop dan Pelantikan Satgas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan PT Pelindo III (Persero)	SDM			1	1	1		1	26	30
59	Pelatihan Trend Micro Deep Security	IT		1			1				2
60	Pelatihan BIM Tekla	Teknik					2	1		3	6
61	Diklat Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)	Operator								1	1
62	To Be Great Secretary	SDM					2				2
63	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar	PBJ				1	2				3
64	Seminar "Bussiness Transformation in Digital Era"	SDM			1		1				2
65	MUKERWIL Ke- XXX Tahun 2018 dan Seminar/Workshop Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Jawa Timur	SPI	1		2						3
66	Publick Training Finance for Non Finance oleh PPM Manajemen	Keuangan	1	2		3	1				7
67	Workshop Pertanahan Tata Cara Pendaftaran Tanah dan Penetapan Hak Atas Tanah	Hukum				1	1				2
68	Seminar Behaviour Based Safety	SDM	1		1	2	3			1	8
69	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Gelombang I	PBJ					3	1			4
70	Pelatihan Veeam	IT					2				2
71	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Gelombang II	PBJ				2	3				5
72	Sertifikasi Uji Kompetensi Humas	Humas	1				1				2
73	Seminar ISO / Final Draft International Standard (FDIS) 45001	Risk Manajemen			1	2	1				4
74	Seatrade Cruise Global 2018	Marketing		1					1		2
75	Pelatihan Dasar-Dasar Audit	SPI			3						3



NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PESERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
76	Effective Business Communication	SDM					3				3
77	Workshop "Bimtek Mekanisme Pengurusan dan Pengelolaan Lahan (HPL)", Hak Guna Bangunan (HGB) di Pelabuhan	Hukum				1	2		1	6	10
78	Powerful Social Media & Content Marketing	Marketing					1				1
79	Pelatihan Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)	SDM				12	7	1			20
80	Pelatihan International Certified Software Testing: Foundation Level - Mastering Series (CFTL)	IT								2	2
81	Modern Port Management Modul 7-8	Operasional		2							2
82	Pelatihan dan Sertifikasi NEBOSH International General Certificate Operational Safety	K3		1							1
83	Sertifikasi Kompetensi Public Relations 2018	Humas				1					1
84	Developing Digital Social Media Strategis for Business	Humas				1	1			1	3
85	Pelatihan Roles of Control System, Robotics and Automation in Industry	IT						2			2
86	Competitor Inteligence	Marketing				1				2	3
87	Diklat Ahli Kepelabuhanan	Operasional		1	1					1	3
88	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Gelombang III	PBJ			1	2	1	1			5
89	Applied Marketing Research	Marketing								1	1
90	Optimizing The Future Role of Corporate Secretary	Humas	1		1					1	3
91	Pelatihan Marketing Management	Marketing				1	1				2
92	Pelatihan Trend Micro OfficeScan	IT						1		1	2
93	Integrated Cyber Journalism Training	Humas				2	1				3
94	Finnon: Understanding Financial Statement	Keuangan				2					2
95	Seminar Nasional "Tantangan Independen BUMN Menghadapi Tahun Politik" Dan Kegiatan Konsolidasi Pembahasan Musyawarah Nasional Konfederasi SP BUMN	Humas		4						3	7
96	Financial Projection & Valuating	Keuangan				1	1				2
97	Community of Practice Masterclass Public Training	Humas				1	1				2
98	Pelatihan dan Sertifikasi Chief Information Security Officer	IT				1					1
99	Evaluasi Pelatihan	SDM				2					2



NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PEERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
100	Practical Problem Solving	SDM				1	2				3
101	Industrial Relations Conflict Resolution	Hukum		1		1				1	3
102	Pelatihan Dasar-Dasar Audit	SPI				1					1
103	Praktik Mengelola SDM dalam Penerapan Budaya Organisasi Adaptif	SDM	1		2						3
104	Sosialisai Perpres No.16 Tahun 2018 Sebagai Pengganti Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Hukum	1	1							2
105	Owner Estimate	Teknik					1				1
106	Seminar "Quo Vadis BUMN?"	Humas	1	1							2
107	CIR Certified Investor Relations	Teknik				1	1				2
108	Pelatihan dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XXV	Hukum								3	3
109	Indonesia Marketeers Festival 2018	Marketing				2	1			3	6
110	Pelatihan ISEB - ISTQ International Certified Software Testing : Foundation Level - Mastering Series (CTFL)	IT								2	2
111	Pelatihan Transformasi Enterprise Risk Management ISO 31000:2018	Risk Manajemen					2				2
112	Culture Specialist Certified Program	SDM					1			1	2
113	Warehouse Management	Operasional				1	2				3
114	Feasibility Study	SDM					1	1			2
115	Seminar Nasional	SDM				1	1				2
116	Understanding Financial Statement	Keuangan		1			1				2
117	Specialist Workshop Logistic and Supply Chain Management	Operasional		1						1	2
118	Profit Planning & Capital Budgeting	Keuangan		1			1				2
119	Pelatihan Port Facility Security Officer (PFSO)	K3		1	7	2	1			1	12
120	Pelatihan MOC 2014 dan Installing and Configuring Win Server 2012	IT						1			1
121	Finnon : Profit Planning & Capital Budgeting	Keuangan				1	1				2
122	Pricing Strategy	Keuangan					1				1
123	Workshop Continuing Professional Professional Development (CPD) Penerapan Teknologi Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat K3 Konstruksi	K3				1		1			2



NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PESERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
124	Workshop Profesional Accident & Accident Investigation Profesional Management Lost Control SHE Course dan Manajemen limbah B3 Industri dan Manajemen Air Limbah Industri	Risk Manajemen				1	1			2	4
125	Pelatihan Java with Spring	IT				1	2	1		2	6
126	Diskusi Panel “Efektivitas Penilaian Kinerja Perusahaan Berdasarkan Penilaian BUMN Bersih, GCG, dan KPKU”	Humas				2					2
127	Developing Digital & Social Media Strategies for Business	Humas					1				1
128	Workshop Dua Hari Kepabeaan “Dwelling Time, Logistik & Kepelabuhanan”	Operasional				1	1				2
129	Training Lead Auditor ISO 27001:2013	Risk Manajemen			1		1				2
130	Corporate University	SDM	2								2
131	Safari Ramadhan 2018 Leadership Jaman Now	Manajerial	3								3
132	Seminar Auditor's Talk Ramadhan "Sinergi Internal Auditor -Dan Eksternal Dalam Rangka Penguatan Kapabilitas Pengawasan Keuangan Negara"	SPI	1	1							2
133	Pelatihan dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XXVI	Hukum			1	1	1				3
134	Analisa Perencanaan & Pengembangan SDM	SDM				3					3
135	Pelatihan Lead Implementor ISO 20000	Risk Manajemen					3				3
136	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	SDM				1		1			2
137	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Inaktif (PNBP)	SDM						2			2
138	Penyusunan rencana operasi latihan dan skenario Marine Pollution Exercise (MARPOLEX) 2018	K3		2							2
139	Diklat Teknis Penyusutan Arsip	SDM						2			2
140	Diklat Surveyor Hidrografi Kategori "B" IHO	Risk Manajemen				1	1				2
141	Pendidfikan dan Pelatihan Dasar-Dasar Audit	SPI		2		4					6
142	Pelatihan dan Ujian PBJP Berbasis Komputer	IT				1	2				3
143	Company Strategic Planning	Manajerial					1				1
144	Human Resources Management	SDM					1				1
145	Pelatihan dan Sertifikasi Mastering IT Project Management - Include Exam	IT				1		1			2
146	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch I	Pandu			3	2					5



NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PESERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
147	Workshop Sinergi BUMN "Anti Persaingan Usaha?"	SDM		2							2
148	Pelatihan Developing Mobile Application with React Native	IT		1	1	4				1	7
149	Pelatihan Lead Auditor ISO 27001:2013	Risk Manajemen		1			1				2
150	Bimbingan Teknis Program Arsip Vital	SDM						2			2
151	Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Properti	Hukum					2				2
152	Business Model Canvas	Manajerial				1	1				2
153	Seleksi Program Beasiswa S2 (Pasca Sarjana) Dalam Negeri (Psikotest dan TOEFL)	SDM						1			1
154	Diklat Sertifikasi Ahli Keselamatan & Kesehatan Kerja Umum	K3			1	1					2
155	Seminar Dampak dan Antisipasi: Land Subsidence dan Settlement Tanah	Hukum	3	2	6	4	5			4	24
156	The New B to B Selling	Manajerial		2							2
157	Applied Marketing Research	Marketing					1				1
158	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch II	Pandu			12	3					15
159	Pelatihan Nasional Sekretaris dengan Tema "A Secret Success Forgood Performance Secretary"	SDM					1			2	3
160	Pelatihan Aplikasi Service Now Modul Change Management	SDM			1	4		2			7
161	Pelatihan Financial Modeling for Accounting	Keuangan		1		1	3	2			7
162	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch III	Pandu			10	5					15
163	Supervisor Development Program	Manajerial				2					2
164	Pelatihan dan Sertifikasi Software Testing (CTFL)	IT					1				1
165	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch IV	Manajerial		1	14						15
166	Warehouse Management	Operasional				1					1
167	Pelatihan dan Sertifikasi Project Manajement Certification (PMBOK v6)	Teknik					1				1
168	Pelatihan Project Risk Management	Risk Manajemen					2				2
169	Seminar International Maritime Leadership	Manajerial			3	12	17		34	1	67
170	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch V PT. PUJ	Pandu		1	8						9
171	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch V PT. PMLI	Pandu			8	1				2	11
172	Seminar HCNC 2018 "How Millenials are Reshaping Corporate Culture?"	SDM			1		1				2



NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PESERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
173	The International Visitor Leadership Program "Sustainable Connectivity: Port Infrastructure"	Manajerial			2						2
174	Kunjungan Kerja ke Perum Jasa Tirta I Malang FKSPI	SDM		1							1
175	Seminar Risk Management Maturity Model	Risk Manajemen			1		1				2
176	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch VI PT. PUJ	Pandu	1		6				1		8
177	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch VI PT. PMLI	Pandu	2		10						12
178	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch VII PT. PMLI	Pandu	1	1	7	1					10
179	Pelatihan Integrated Marketing Communication	Marketing		1			1				2
180	Pelatihan IFRS Pengembangan PSAK Terkini Sesuai Konvergensi IFRS Per 1 Januari 2018	SDM		1		2					3
181	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch VIII PT. PUJ	Pandu			13	1					14
182	Pelatihan Port Facility Security Officer (PFSO) – ISPS Code	K3			4	3					7
183	Pelatihan International Certified Software Testing Foundation Level Mastering Series (CTFL)	IT								2	2
184	Certified Training On Sustainability Reporting Batch 49	SDM				3	1				4
185	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Data Centre Facilities Operation Manager (CDFOM)	IT					1	1			2
186	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch IX PT. PUJ	Pandu	1		10		1			1	13
187	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Tingkat Dasar	PBJ					1	1			2
188	Diklat Pandu Penyegaran (Refreshing) Batch X PT. PUJ	Pandu	1	1	8						10
189	Workshop Desain Beton Bertulang Terbaru	Teknik				1	2	1		1	5
190	Pelatihan dan Sertikasi ABAP Object	IT					3				3
191	Diklat Ahli Kepelabuhan Angkatan ke-25	Foreman		2	1						3
192	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun	SDM	1	2	2			1			6
193	Business Model Canvas	Manajerial					2				2
194	Pelatihan Procurement Fraud	Kuangan				3	2				5
195	Pelatihan Akuntansi Keuangan Pajak & Peraturan Pajak Terkini	Kuangan					1	2			3
196	Pelatihan Building Disruptive Innovation	SDM			1						1



NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PESERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
197	Pelatihan Corporate Culture and Leadership Journey	Manajerial	1				1				2
198	Pelatihan Oracle Solaris Cluster (Sun Cluster)	IT				2		1		1	4
199	Seminar Dengan Tema " Vision and Best Practice Toward Safety Culture "	Manajerial	1								1
200	8 Test of Organisation Structure Effectiveness	Manajerial	1	4	1	2	1				9
201	Training Port Master Planning in Indonesian	Operasional				1	3				4
202	Pelatihan Comprehensive Job Analysis	SDM					3	1			4
203	Workshop Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa	PBJ			1	1					2
204	Change Management for Professionals	Manajerial			1	1					2
205	Workshop Expand Leadership Program	Manajerial								1	1
206	Diklat IFRS Pengembangan PSAK Terkini Sesuai Konvergensi IFRS Per 1 Januari 2018	SDM				1			1		2
207	Pelatihan Budgeting Planning & Finance Risk Management	Keuangan				1	1	2			4
208	Capturing Millennial Travelers Seminar MarkPlus Center for Tourism & Hospitality	Marketing			1	1		1			3
209	Pelatihan PRP Certified Professional Management Accountant	Keuangan		1							1
210	Presentasi Disertasi Modern Port Management Cycle 4	SDM		2							2
211	Mentor dan Penguji Presentasi Disertasi Modern Port Management Cycle 4	SDM	1	1	1						3
212	PESERTA AWARENESS SISTEM MANAJEMEN LAYANAN BERDASARKAN ISO 2000 BATCH I	Risk Manajemen	5	2	6	2	4				19
213	Undangan Bimtek Manajemen Arsip Inaktif dan Pengelolaan Pusat Arsip	SDM				1		1			2
214	Diklat Perpajakan	Keuangan				1	1	3			5
215	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Profesional (CRMP)	Risk Manajemen	1							10	11
216	Administrator SAP HANA (SAP System).	IT					1				1
217	TOGAF 9 Foundation With International Exam Preparation (version 9.2).	IT			1						1
218	Workshop Finnon: "Understanding Financial Statement"	Keuangan					1				1
219	Pelatihan Pendidikan dan Latihan Komunikasi dan Psikologi Audit.	SPI			1	2					3



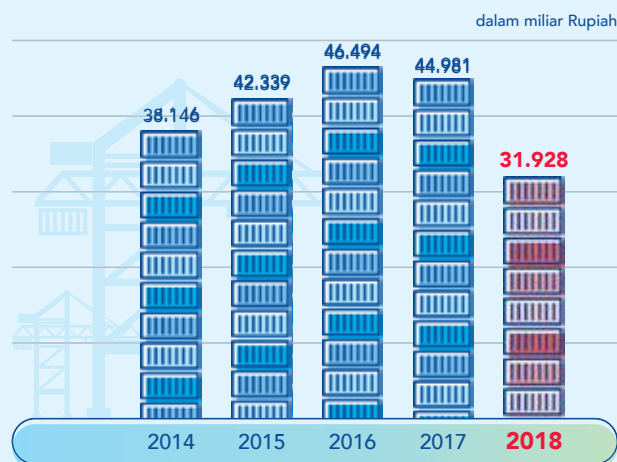
NO	NAMA PELATIHAN	KETE- RANGAN	KELAS JABATAN								JUMLAH PESERTA
			MANAGER UTAMA	MANAGER MADYA	MANAGER MUDA	MANAGER DASAR	PELAKSANA UTAMA	PELAKSANA MADYA	PELAKSANA MUDA	PDS/ ANNPERS	
			(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
220	Pelatihan Reporting: QuickViewer, InfoSet Query and SAP Query (module SAP)	IT				1	2				3
221	Pelatihan Business process management, Analysis, dan Improvement Batch II	Manajerial		2	4	6	7			1	20
222	Undangan Training JBOSS Redhat Administration I (JB248)	IT					1			1	2
223	Pelatihan Strategic Marketing Plan	Marketing				4	1				5
224	Pelatihan Laporan Keuangan Konsolidasi	Kuangan		2		1	4				7
225	HR Expo 2018	SDM		1			1				2
226	Pelatihan Strategic Marketing Plan	Marketing			1	1					2
227	Seminar Nasional, Sarasehan, dan Pelatihan Perpajakan BUMN	Perpajakan			1	1		1			3
228	Pelatihan Building Competency of Port Operation Command Center Batch 1 kelompok 1	Marketing			1	4	3		6	6	20
229	Pelatihan Building Competency of Port Operation Command Center Batch 1 Kelompok 2.	Marketing			2	4	1		5	7	19
230	Pelatihan Building Competency of Port Operation Command Center Batch 2 Kelompok 3.	Marketing			3	5	1		6	15	30
231	Pelatihan Building Competency of Port Operation Command Center Batch 2 Kelompok 4.	Marketing			1	2	5		5	13	13
232	Pelatihan Developing Profissional Leader Batch 1	Manajerial		1	5	12	6	3	1		28
233	Pelatihan Developing Professional Leader Batch 2	Manajerial			5	14	6	2	2	1	30
234	Pelatihan Developing Professional Leader Batch 3	Manajerial			3	17	5	1	3	2	31
235	Pelatihan Developing Professional Leader Batch 4	Manajerial			1	14	11	5	1		32
236	Port Engineering Forum Pelindo III Tahun 2018	Teknik	7	12	10	13	14	6		9	71
237	Pelatihan Aerial Mapping dengan Multirotor Drone.	Teknik						1		3	4
238	Seminar International Dredging Technology & Regulation For Port Business 2018	Teknik	3	1	2	3	3	1		2	15
239	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi	Teknik					3				3
JUMLAH PESERTA			72	204	471	494	485	159	116	389	2377



BIAYA PENGEMBANGAN SDM

Hingga penghujung tahun 2018, Perusahaan telah menggunakan anggaran sebesar Rp31,928 miliar untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM. Nilai ini lebih kecil Rp13,05 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Salah satu penyebab lebih rendahnya nilai serapan anggaran adalah karena program efisiensi.

REALISASI BIAYA DIKLAT



RENCANA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 2019

Rencana program kerja pengembangan SDM di tahun 2019 yaitu:

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan memberikan beasiswa pendidikan untuk pegawai berupa beasiswa peningkatan ijazah pegawai dari Diploma III (D-III) menjadi Strata 1 (S-1), Program Pasca Sarjana, baik di dalam maupun luar negeri.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUBSTANSIAL

Perusahaan berusaha terus meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan terbaik kepada pelanggan. Untuk itu, Perusahaan berfokus untuk memberikan Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan pada masing-masing fungsi organisasi, pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan mandatory, serta memperbanyak pelatihan bersertifikasi.

Peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada tahun 2019 akan berpedoman pada Learning Design yang telah dimiliki, dengan target bahwa pelatihan didasarkan pada standar kompetensi Perusahaan dimana setiap Pegawai memperoleh minimal masing-masing 1 kali pelatihan Soft Competency dan Hard Competency. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan Gap Kompetensi masing-masing. Selain itu, pada tahun depan akan ditambahkan beberapa kegiatan peningkatan pengetahuan melalui kegiatan Sharing Session dan Ask The Expert yang juga merupakan bagian dari Knowledge Management, serta sertifikasi keahlian di berbagai bidang.

TALENT MANAGEMENT

Talent Management merupakan suatu rangkaian proses, sistem, dan pengimplementasian strategi yang dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja. Hal tersebut dilakukan melalui perekrutan, pengembangan, dan mempertahankan individu-individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. Sebagai salah satu strategi yang diterapkan oleh Perusahaan, segala sesuatu mengenai Talent Management System diatur dalam Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.07/KP.0302/P.III-2015. Dalam hal ini, pelaksanaan Talent Management berada di bawah Subdirektorat Human Capital System and Strategy dengan pengawasan dan pengendalian langsung dari Vice President Human Capital Planning and Talent Management.



Sebagai suatu rangkaian proses sistem, Talent Management memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang berkesinambungan. Pada tahapan awal, dilakukan asesmen pemetaan kompetensi kepada seluruh Pegawai untuk memperoleh gambaran awal kompetensi dan potensi yang dimiliki masing-masing Pegawai. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Pegawai dikelompokkan ke dalam kategori talent pool yang berbeda. Kategori dari talent pool tersebut akan menentukan pengembangan individu pegawai lebih lanjut dan juga mengarahkan jalur karir yang sesuai dengan Pegawai tersebut. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ saja, proses tahapan ini akan terus berlanjut sebagai siklus untuk mencari dan menemukan potensi-potensi unggul Pegawai dalam Perusahaan maupun potensi unggul yang ditemukan melalui perekrutan calon Pegawai baru.

Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program kaderisasi tanpa membedakan gender ataupun faktor-faktor lain seperti suku, agama, maupun golongan. Aspek yang dinilai dalam program pengembangan karier karyawan adalah potensi, kompetensi, dan keterampilan individual karyawan, dengan mempertimbangkan kesesuaian profil jabatan.

DEMOGRAFI SDM PELINDO III

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Hingga 31 Desember 2018, jumlah Pegawai Pelindo III Group tercatat sebanyak 4.855 orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,69% dibandingkan dengan jumlah Pegawai pada tahun 2017. Kenaikan jumlah Pegawai ini terjadi pada Induk dan Anak Perusahaan di lingkungan Pelindo III karena pemenuhan kebutuhan Pandu yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, komitmen Manajemen dalam melaksanakan seleksi Pegawai bagi pegawai anak perusahaan, serta proses pengembangan bisnis pada Anak Perusahaan. Sementara itu, penyebab berkurangnya jumlah Pegawai pada induk perusahaan antara lain karena pensiun, pensiun dini, pengunduran diri, dan meninggal dunia.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

URAIAN	2018	2017	HASIL PERBANDINGAN	
			PERUBAHAN	%
Organik	3.999	3.650	349	9,56%
Non-Organik (Diperbantukan, PKWT, dan Pemagang)	761	524	237	45,23%
Calon Pegawai	95	293	(198)	(67,58%)
JUMLAH	4.855	4.467	388	8,69

Di tahun 2018, jumlah Pegawai Organik mengalami peningkatan 9,56%. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan Pandu yang telah direkrut di tahun 2017 sebanyak 32 orang dan pengangkatan sebagai pegawai organik atas 118 pegawai Anak Perusahaan.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS JABATAN

URAIAN	2018	2017	HASIL PERBANDINGAN	
			PERUBAHAN	%
Struktural	302	457	(155)	(33,92%)
Fungsional	450	366	84	22,95%
Staf	1.382	1.224	158	12,91%
JUMLAH	2.134	2.047	87	4,25%



Perusahaan memiliki 3 kelompok jabatan dalam menjalankan organisasi yaitu pada jenjang struktural, fungsional, dan staf. Pada tahun 2018, terjadi penurunan jumlah jabatan struktural sebanyak 155 orang. Hal ini sejalan dengan perubahan organisasi yang terjadi di Perusahaan.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG MANAJEMEN

URAIAN	KELAS JABATAN	2018	2017	HASIL PERBANDINGAN	
				PERUBAHAN	%
Manager Utama	1-3	45	36	9	25,00%
Manager Madya	4-6	90	84	6	7,14%
Manager Muda	7-9	120	163	(43)	(26,38%)
Manager Dasar	10-11	46	173	(127)	(73,41%)
JUMLAH		301	456	(155)	(33,99%)

Perubahan organisasi yang terjadi pada tahun 2018 berdampak pada penurunan jumlah Manager Dasar (Pejabat Struktural Kelas Jabatan 10-11) sebanyak 155 orang atau sebesar 73%.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER

URAIAN	2018	2017	HASIL PERBANDINGAN	
			PERUBAHAN	%
Laki-laki	3.872	3.314	558	16,84%
Perempuan	983	1.153	(170)	(14,75%)
JUMLAH	4.855	4.467	388	8,69%

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, komposisi Pegawai Perusahaan di tahun 2018 didominasi oleh laki-laki, yang mana tercatat komposisi laki-laki sebesar 79% dan komposisi perempuan sebesar 21%. Dalam proses pengadaannya, Perusahaan tidak memiliki aturan yang membatasi suatu gender. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan perbedaan komposisi ini antara lain adalah ketersediaan sumber daya manusia saat proses perekrutan, keberhasilan mengikuti tahapan seleksi, masa pensiun, dan pengunduran diri pegawai.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

URAIAN	2018	2017	HASIL PERBANDINGAN	
			PERUBAHAN	%
SLTA	1.443	1.214	229	18,86%
Sarjana Muda/DIII	935	985	(50)	(5,08%)
Sarjana (S1)	2.178	1.949	229	11,75%
Magister (S2)	296	315	(19)	(6,03%)
Doktor (S3)	3	4	(1)	(25,00%)
JUMLAH	4.855	4.467	388	8,69%

Untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing, Perusahaan senantiasa memberikan peningkatan kompetensi bagi para Pegawai. Perusahaan memiliki program beasiswa strata-1 untuk rekrutmen khusus dan beasiswa strata-2 bagi seluruh Pegawai perusahaan yang dinyatakan lulus melalui serangkaian tahapan seleksi. Beasiswa pada jenjang strata-2 ini, dilakukan di dalam dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

URAIAN	2018	2017	HASIL PERBANDINGAN	
			PERUBAHAN	%
Di bawah 30 tahun	1.578	1.541	37	2,40%
Usia 31-35	1.054	910	144	15,82%
Usia 36-40	820	732	88	12,02%
Usia 41-45	679	595	84	14,12%
Usia 46-50	423	385	38	9,87%
Usia di atas 50	301	304	(3)	(0,99%)
JUMLAH	4.855	4.467	388	8,69%

Selanjutnya dari segi komposisi usia pegawai, Perusahaan didominasi oleh pegawai usia produktif terutama di bawah 30 tahun (generasi milenial) yaitu sebesar 54,21% dan rentang usia 31-35 tahun sebesar 45,21%. Terdapat 301 Pegawai yang ada pada kelompok usia di atas 50 tahun yang nantinya akan menjalani masa pensiun dalam 0-4 tahun ke depan.

**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN UNIT KERJA**

URAIAN	2018	2017	HASIL PERBANDINGAN	
			PERUBAHAN	%
Kantor Pusat	468	405	63	0,13
Tanjung Perak	436	448	-12	0,03
Banjarmasin	190	209	-19	0,10
Tanjung Emas	126	100	26	0,21
TPKS	150	185	-35	0,23
Gresik	51	50	1	0,02
Kotabaru	53	53	0	0,00
Tanjung Intan	48	54	-6	0,13
Benoa	63	42	21	0,33
Sampit	41	45	-4	0,10
Tenau Kupang	32	38	-6	0,19
Kumai	23	23	0	0,00
Lembar	27	20	7	0,26
Tanjung Wangi	20	26	-6	0,30
Bima	10	11	-1	0,10
Celukan Bawang	7	11	-4	0,57
Maumere	10	8	2	0,20
Tanjung Tembaga	6	4	2	0,33
Anak Perusahaan	322	327	-5	0,02
JUMLAH	2083	2.059	24	0,01

Jumlah formasi yang ada pada masing-masing Cabang dan Anak Perusahaan di lingkungan Perusahaan didasarkan pada perencanaan SDM dan disesuaikan dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing Cabang dan Anak Perusahaan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Jumlah tenaga kerja atau pegawai yang tepat dalam masing-masing Cabang atau Anak Perusahaan membantu Perusahaan untuk bekerja lebih efisien dan efektif.

KESEJAHTERAAN SDM**KEPUASAN KERJA PEGAWAI**

Perusahaan tentunya tidak hanya melihat faktor remunerasi dan manfaat sebagai indikator kepuasan kerja pegawai. Lebih dari itu, Perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas transportasi di Indonesia harus mampu memberikan iklim dan suasana kerja yang positif serta tempat yang aman

bagi Pegawai Perusahaan. Hal tersebut dicanangkan dalam rangka menciptakan tempat yang tepat bagi seluruh Pegawai dalam mengembangkan talenta dan bakat yang dimiliki demi kemajuan bersama dan tentunya kemajuan bagi usaha Perusahaan.

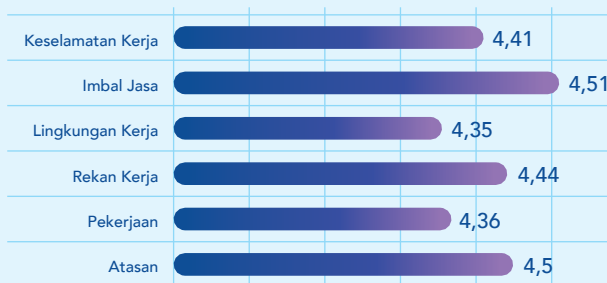
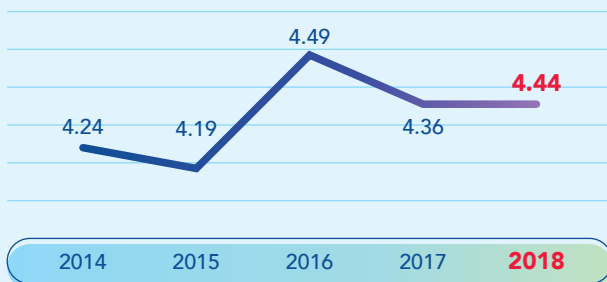
Perusahaan secara konsisten melakukan survei kepuasan karyawan untuk mengukur kepuasan pegawai terhadap kebijakan yang diambil oleh Perusahaan. Survei kepuasan pegawai dilakukan secara online untuk mempermudah perhitungan dan akurasi data. Indikator yang dinilai dalam survei kepuasan pegawai yaitu:

1. Strategi dan Organisasi
2. Manajemen Karir
3. Pelatihan dan Pengembangan
4. Manajemen Kinerja
5. Remunerasi dan Kesejahteraan
6. Hubungan Industrial
7. Lingkungan Kerja dan Budaya Perusahaan
8. Disiplin Kerja

HASIL SURVEI KORPORAT

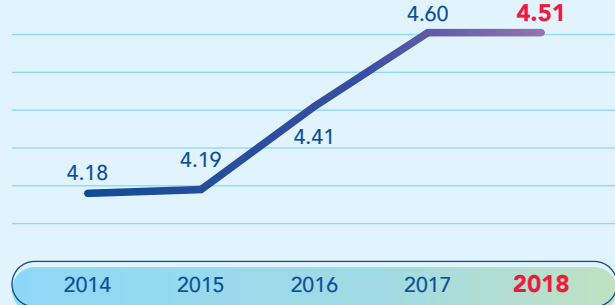
KEPUASAN

4.44



ENGAGEMENT

4.51



Hasil dari survei kepuasan pegawai tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan pembenahan dan pengambilan keputusan, khususnya di bidang kepegawaian.

FASILITAS DAN MANFAAT

Untuk memotivasi Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerjanya, Perusahaan memberikan berbagai fasilitas dan manfaat yang diatur melalui peraturan Direksi, antara lain:

ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI

Selain menggunakan BPJS kesehatan yang merupakan syarat wajib dari Pemerintah bagi pengusaha untuk memproteksi pekerjaannya, Perusahaan memberikan asuransi tambahan bagi pegawai serta keluarganya (mencakup suami/istri serta dua anak) dan pensiunan pegawai (mencakup istri/suami) yang bekerja sama dengan Jasindo.

BANTUAN PULANG KAMPUNG

Perusahaan memfasilitasi tiket perjalanan Pegawai dengan menggunakan transportasi darat dan udara untuk dapat mengunjungi keluarga intinya (suami/Istri dan anak apabila berstatus Janda/Duda) apabila tinggal terpisah untuk bertemu sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

FLEXY TIME

Pegawai Perusahaan dapat menentukan jadwal pulang kerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni dengan prinsip datang lebih awal dapat pulang lebih cepat.

BANTUAN IBADAH KEAGAMAAN

Diberikan bagi Pegawai (suami dan istri) terpilih yang memenuhi kriteria (Assessment, Masa Kerja, serta Nilai Prestasi Pegawai) untuk mengikuti perjalanan rohani sesuai dengan masing-masing keyakinannya (Mekkah, India, Thailand, atau Yerusalem).

CUTI BERSALIN ANAK PERTAMA

Tambahan 2 (dua) bulan cuti bersalin bagi Pegawai yang melahirkan anak pertamanya untuk menikmati ASI eksklusif.

CUTI MENDAMPINGI ISTRI MELAHIRKAN

Pegawai laki-laki mendapat cuti khusus 5 (lima) hari kerja untuk mendampingi istri yang melahirkan.

CUTI PEGAWAI

Perusahaan menambah cuti tahunan sebanyak 14 hari kerja dengan ketentuan 12 hari kerja full dan 2 (dua) hari kerja yang diambil masing-masing ½ hari untuk kepentingan mendesak Pegawai.

PENGHARGAAN PURNABHAKTI

Selain pesangon yang diamanatkan dalam ketentuan ketenagakerjaan, Perusahaan juga memberikan penghargaan yang besarnya atas masa kerja Pegawai selama bertugas di Perusahaan.



PENGANGKATAN KEMBALI

Khusus untuk Pegawai yang ditugaskan sebagai Direksi BUMN oleh Kementerian, diberikan kesempatan kembali untuk bergabung di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

USIA PENSIUN

Usia pensiun Pegawai yang semula 56 tahun, diperpanjang menjadi 58 tahun.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan Pegawai, salah satunya melalui imbal jasa yang diterima setiap bulannya. Kebijakan penetapan remunerasi Perusahaan bagi Pegawai disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah tentang ketenagakerjaan, survei penghasilan, serta kemampuan Perusahaan dan pencapaian Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan menggunakan konsep 3P (People, Performance, Position) dalam pemberian imbal jasa pegawai. Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.0023/KP.0602/HOFC-2018 tanggal 24 Juli 2018 mengatur komponen imbal jasa pegawai sebagaimana tabel di bawah ini:

KOMPONEN REMUNERASI BAGI PEGAWAI

STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA
Penghasilan merit	Penghasilan merit	Penghasilan merit
Tunjangan prestasi pegawai	Tunjangan prestasi pegawai	Tunjangan prestasi pegawai
Tunjangan jabatan	Tunjangan jabatan	Bantuan transportasi
Tunjangan mobilitas	Tunjangan mobilitas	Bantuan hidup minimum
Bantuan hidup minimum	Bantuan hidup minimum	Tunjangan hari raya
Tunjangan hari raya	Tunjangan hari raya	Bonus tahunan
Bonus tahunan	Bonus tahunan	Fasilitas kesehatan
Fasilitas kesehatan	Fasilitas kesehatan	Tunjangan cuti
Tunjangan cuti	Tunjangan cuti	Bantuan pendidikan
Bantuan pendidikan	Bantuan pendidikan	-

Pada tahun 2018, terdapat komponen baru imbal jasa pegawai (Tunjangan Kinerja) yang besarnya berdasarkan penilaian langsung dari masing-masing atasan. Selain hal tersebut, secara konsisten Perusahaan juga memberikan komponen imbal jasa lainnya seperti Bantuan Hidup Minimum, Bantuan Pulang Kampung, Bantuan Pendidikan, Tunjangan Hari Raya, serta Insentif Kinerja yang besarnya didiskusikan bersama-sama oleh Manajemen dan Serikat Pegawai Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) untuk kemudian disepakati dan diusulkan kepada jajaran Direksi.

REWARD DAN PUNISHMENT

REWARD

Perusahaan memberikan penghargaan berupa tunjangan pembinaan bagi Pegawai yang memberikan usulan inovasi yang berguna bagi kemajuan proses bisnis Perusahaan. Tunjangan pembinaan ini diberikan 2 (dua) kali dalam setahun.

PUNISHMENT

Perusahaan mengenakan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan tindakan indisipliner sesuai Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.50.1/KP.0303/P.III-2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Peraturan Disiplin Pegawai.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Serikat pekerja Perusahaan resmi terdaftar pada tahun 1999 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP.327/M/BW/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang pendaftaran Serikat Pegawai Pelindo III (SPPI) tingkat nasional. Kemudian tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya tanggal 28 Desember 2004.

Serikat Pegawai Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) memiliki kepengurusan pusat (Dewan Pengurus Pusat) di Surabaya dan kepengurusan cabang (Dewan Pengurus Cabang) di seluruh wilayah kerja Perusahaan guna menjangkau aspirasi para pegawai. Kegiatan rutin yang dilaksanakan SPPI III adalah pembahasan perjanjian kerja bersama (PKB) yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali bersama Manajemen untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan baru antara Pegawai dan Manajemen sebagai perwakilan Pengusaha untuk kemudian diusulkan pada Direksi dan didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan.



TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dewasa ini terus dimanfaatkan oleh segenap masyarakat dan entitas bisnis di seluruh belahan dunia. Pemanfaatan TIK semakin gencar dilakukan dalam rangka mendukung aktivitas individu maupun organisasi yang lebih efisien serta memiliki keterhubungan secara real-time tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dengan manfaat serta potensi yang besar dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan, Pelindo III mengambil langkah dengan mempersiapkan pengelolaan bisnis berbasis TIK yang digagas secara resmi di tahun 2014. Pemanfaatan TIK sebetulnya bukan hal baru bagi Perusahaan, pemanfaatan TIK dalam mendukung aktivitas di bidang jasa kepelabuhanan telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan semakin berkembangnya pemanfaatan TIK bagi kegiatan bisnis, Perusahaan menempatkan aspek tersebut sebagai bagian dari rencana bisnis Perusahaan yang perlu dikelola secara baik dan ditata secara berkelanjutan.

Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 penerapan Master Plan TI 2015-2019. Tidak hanya sekadar memenuhi target maupun program yang ada, Perusahaan juga melakukan evaluasi dan pembenahan yang diperlukan agar realisasi atas rencana di bidang TIK dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan keselarasan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

KEBIJAKAN TIK PERUSAHAAN

Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan serta pengembangan TIK di lingkungan Perusahaan, Direksi menetapkan kebijakan terkait penerapan TIK melalui:

1. PER.59/OS/0202/P.III-2017 tentang Kebijakan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pelindo III.
2. PER.60/OS/0102/P.III-2017 tentang Kebijakan Keamanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pelindo III.
3. PER.61/OS/0102/P.III-2017 tentang Kebijakan Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pelindo III.

Ruang lingkup disahkannya kebijakan tersebut adalah agar Perusahaan dapat melakukan pengaturan terhadap aspek-aspek terkait pengelolaan TIK seperti pengembangan, inovasi, maupun pengelolaan risiko yang mungkin ditimbulkan dari penerapan TIK di Perusahaan.

TATA KELOLA TIK PERUSAHAAN

REGULASI RUJUKAN TERKAIT TATA KELOLA TIK PERUSAHAAN

Selain regulasi yang berlaku di internal Perusahaan, pengelolaan TIK tidak hanya didasarkan pada regulasi internal namun juga disesuaikan dengan regulasi Pemerintah. Regulasi Pemerintah yang digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan TIK adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PER-09/MBU/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
4. PER-02/MBU/2013 Peraturan Menteri BUMN tentang Panduan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN

ORGAN TATA KELOLA

Pengelolaan TIK di Pelindo III dijalankan oleh Subdirektorat TIK yang dikepalai oleh seorang Senior Manager (SM) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi dan Komersial.

PROFIL PEJABAT SUBDIREKTORAT TIK AGUS DHARMAWAN

SM Teknologi Informasi dan Komunikasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Magetan pada tanggal 25 Agustus 1976. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2007 dengan masa kerja kurang lebih 11 tahun. Jejak karir selama di Pelindo III hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai SM TIK sejak tahun 2018.
2. Menjabat sebagai Asisten Senior Manager (ASM) Solusi dan Pengembangan TIK pada tahun 2014.
3. Menjabat sebagai Asisten Manajer Sistem Manajemen dan Informasi di Pelabuhan Cabang Banjarmasin pada tahun 2012.
4. Tahun 2010 menjabat sebagai Asisten Manajer Sistem Informasi di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, yang merupakan salah satu Anak Perusahaan Pelindo III.

**AGUS MAY SURYANTO**

ASM Pengembangan dan Solusi TIK Front-End

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Lamongan tanggal 20 Mei 1980. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2007 dengan masa kerja kurang lebih 11 tahun. Jejak karir selama di Pelindo III hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai ASM Pengembangan dan Solusi TIK Front-End di tahun 2018.
2. Menjabat sebagai Pimpinan Proyek Integrasi ERP dan Aplikasi Korporat pada tahun 2016.
3. Menjabat sebagai Asisten Manajer TIK di Pelabuhan Cabang Tanjung Perak pada tahun 2015.
4. Menjabat sebagai Asisten Manager Sistem Manajemen dan Informasi Cabang Terminal Peti Kemas Semarang pada tahun 2011.

AGUNG EKA WARDHANA

ASM Pengembangan dan Solusi TIK Back-End

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya tanggal 5 Agustus 1981. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2009 dengan masa kerja kurang lebih 9 tahun. Jejak karir selama di Pelindo III hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai ASM Pengembangan dan Solusi TIK Back-End di tahun 2018.
2. Menjabat sebagai Manager TIK di Cabang Terminal Petikemas Semarang pada tahun 2015.
3. Menjabat sebagai Asisten Manager TIK di Cabang Terminal Petikemas Semarang pada tahun 2015.
4. Menjabat sebagai Asisten Manager TIK di Cabang Pelabuhan Banjarmasin pada tahun 2014.
5. Menjabat sebagai Asisten Manager TIK di Cabang Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2012.
6. Menjabat sebagai Supervisor di Cabang Gresik pada tahun 2012.

LUTHMAYANNA FRISTIKAWANSYAH

ASM Pelayanan dan Operasi TIK

Warga Negara Indonesia, lahir di Malang pada tanggal 9 Agustus 1980. Mulai berkarir di Pelindo III sejak tahun 2006 dengan masa kerja kurang lebih 12 tahun. Jejak karir di Pelindo III adalah sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai ASM Pelayanan dan Operasi di tahun 2018.
2. Menjabat sebagai Asisten Manager TIK di Cabang Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2016.
3. Menjabat sebagai Asisten Manager Perangkat Keras dan Jaringan pada Cabang Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2012.
4. Menjabat sebagai Supervisor Sistem Informasi di Cabang Pelabuhan Gresik di tahun 2011.

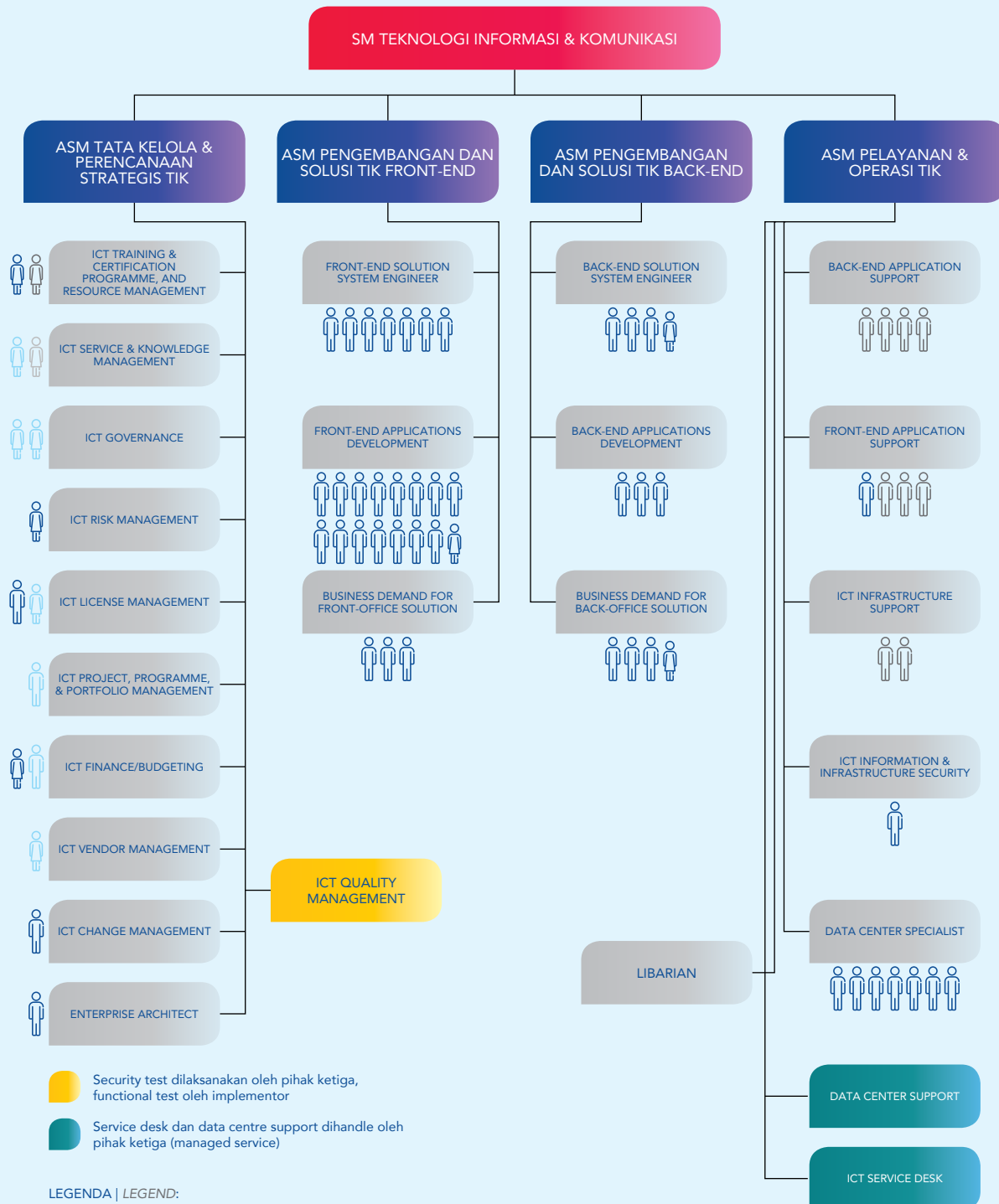
RAHMI IKA NOVIA

ASM Tata Kelola dan Perencanaan Strategis TIK

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 14 November 1982. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2006 dengan masa kerja kurang lebih 12 tahun. Jejak karir selama di Pelindo III hingga saat ini sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai ASM Tata Kelola dan Perencanaan Strategis TIK di tahun 2018.
2. Wakil Pengembangan Pusat Layanan Bersama dan Tata Kelola di akhir 2017.
3. Menjabat sebagai Asisten Manager Sistem Manajemen dan Informasi di Cabang Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2012.

STRUKTUR ORGANISASI SUBDIREKTORAT TIK





TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PENGELOLAAN TIK

Subdirektorat TIK dipimpin oleh seorang Senior Manager yang membawahi 4 Kepala Bidang, yaitu:

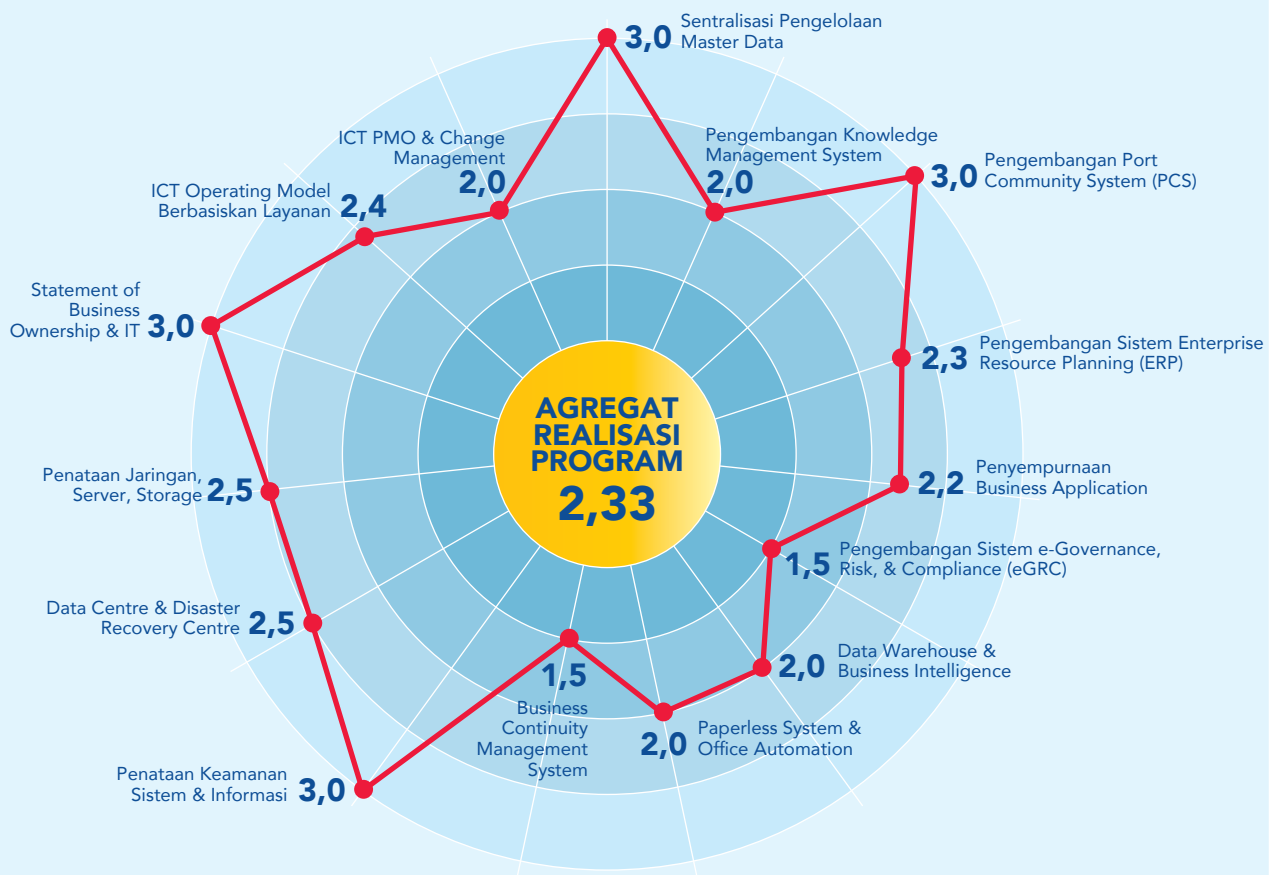
1. ASM Pengembangan dan Solusi TIK Front-End, bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan keselarasan dan kesinambungan proses pengembangan baru dan/atau penyempurnaan solusi TIK front-end dengan kebutuhan bisnis unit fungsional terkait berdasarkan analisis biaya dan ketercapaian manfaat.
 - b. Memastikan agar proses perencanaan, akuisisi, dan pengembangan solusi TIK front-end sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.
 - c. Memastikan dilakukannya riset dan pengembangan TIK front-end dengan mempertimbangkan tren teknologi di industri kepelabuhanan untuk memberi solusi yang inovatif bagi bisnis.
 - d. Memastikan bahwa investasi TIK front-end seimbang sesuai dengan nilai strategis yang diberikan bagi Perusahaan.
 - e. Memastikan adanya dukungan dan keterlibatan Business Process Owner atas penerapan inisiatif-inisiatif TIK front-end.
 - f. Memastikan terwujudnya transformasi solusi TIK front-end ke aktivitas operasional Business Process Owner melalui proses manajemen perubahan.
2. ASM Pengembangan dan Solusi TIK Back-End, bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan keselarasan dan kesinambungan proses pengembangan baru dan/atau penyempurnaan solusi TIK back-end dengan kebutuhan bisnis unit fungsional terkait berdasarkan analisis biaya dan ketercapaian manfaat.
 - b. Memastikan agar proses perencanaan, akuisisi, dan pengembangan solusi TIK back-end sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.
 - c. Memastikan dilakukannya riset dan pengembangan TIK back-end dengan mempertimbangkan tren teknologi di industri kepelabuhanan untuk memberi solusi yang inovatif bagi bisnis.
 - d. Memastikan bahwa investasi TIK back-end seimbang sesuai dengan nilai strategis yang diberikan bagi Perusahaan.
 - e. Memastikan adanya dukungan dan keterlibatan Business Process Owner atas penerapan inisiatif-inisiatif TIK back-end.
 - f. Memastikan terwujudnya transformasi solusi TIK back-end ke aktivitas operasional Business Process Owner melalui proses manajemen perubahan.
3. ASM Tata Kelola dan Perencanaan Strategis TIK, bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan tersedianya rencana kerja dan portfolio TIK yang sesuai dengan target, strategi, dan kebutuhan bisnis Perusahaan.
 - b. Memastikan agar rencana kerja dan portfolio TIK diterjemahkan, dikembangkan, dan dilaksanakan di dalam koridor yang telah disepakati bersama.
 - c. Memastikan adanya pengelolaan dan pemeliharaan arsitektur Perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola TIK serta sesuai dengan Master Plan TI Perusahaan.
 - d. Memastikan adanya pengelolaan SDM TIK yang meliputi proses perencanaan, pembinaan, dan pengembangan SDM sebagai salah satu aset penting Perusahaan.
 - e. Memastikan tersedianya proses pengelolaan risiko TIK dalam pelaksanaan program kerja dan operasional TIK.
 - f. Memastikan adanya kebijakan, standar, dan prosedur TIK yang sesuai dengan kondisi Perusahaan dan menjamin adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya.
 - g. Memastikan adanya *Service Level Agreement* (SLA) termasuk proses pengelolaannya yang telah disepakati dengan unit fungsional terkait.
 - h. Memastikan adanya proses pemantauan SLA, termasuk hasil analisis dan evaluasi kinerja SLA, serta penyusunan laporan konsolidasi mengenai kinerja dan pencapaian layanan secara berkala.
 - i. Menjamin adanya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan memastikan tersedianya dokumentasi proyek sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
 - j. Memastikan adanya pengelolaan change management dalam penyediaan layanan TIK.
 - k. Memastikan adanya pengelolaan quality assurance dalam penyediaan layanan TIK.
 - l. Memastikan adanya analisis profil vendor, penilaian risiko, dan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perusahaan.
 - m. Memastikan adanya inventarisasi atas aset dan kajian terhadap efektivitas aset dalam memenuhi kebutuhan bisnis.
 - n. Menjamin adanya tindak lanjut dan perbaikan atas setiap rekomendasi yang telah disepakati bersama dengan auditor internal dan eksternal.
4. ASM Pelayanan dan Operasi TIK, bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh sumber daya yang mendukung jalannya operasional dan pelayanan TIK Perusahaan secara berkesinambungan.
 - b. Memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas operasional dan pelayanan TIK, sekaligus memastikan adanya langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan pengembangan kualitas pelayanan berdasarkan standar dan target kerja Perusahaan.
 - c. Memastikan ketersediaan, kapasitas, keamanan, dan keandalan layanan TIK.
 - d. Memastikan terlaksananya operasional infrastruktur jaringan dan pusat data dengan optimal sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
 - e. Memastikan beroperasinya help desk dalam memenuhi kebutuhan dan menjawab keluhan pengguna sesuai dengan SLA yang telah disepakati.

- f. Melakukan investigasi, analisis, dan menyelesaikan permasalahan pada layanan TIK dan kegagalan komponennya.
- g. Memastikan penyelesaian permintaan perubahan/penyempurnaan layanan TIK dilakukan dengan tepat waktu, terkendali, dan terdokumentasikan sesuai aturan yang berlaku.

TINJAUAN MASTER PLAN TI 2015-2019 BESERTA PENYELARASANNYA

Dalam rangka memastikan keselarasan strategi TIK dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2015-2019, serta sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian BUMN, maka disusunlah Master Plan TI 2015-2019 dan dilakukan peninjauan atas penerapannya oleh tim konsultan internasional (*big four*). Berikut hasil penilaian tingkat realisasi program Master Plan TI dengan skala 3:

HASIL PENILAIAN TINGKAT REALISASI MASTER PLAN TI



Keterangan:

2,51 - 3,00

Program telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Master Plan TI

1,51 - 2,50

Program telah dilaksanakan namun memerlukan tindak lanjut

0 - 1,50

Program belum terlaksana atau terlambat dilaksanakan



ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP TIK

APLIKASI

1. Aplikasi yang terintegrasi dan menyeluruh.
2. Data *analytics*, *realtime dashboard*, dan pelaporan terkonsolidasi.
3. Penerapan teknologi digital dan *mobile*.

TEKNOLOGI

1. Jaringan data yang andal dengan cakupan luas.
2. Sistem informasi yang responsif dan tersedia.
3. Single sign-on dan provisi terintegrasi.

SDM DAN ORGANISASI

1. Struktur organisasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis.
2. Sumber daya manusia yang cekatan serta tingkat layanan bersama yang responsif, efektif, dan extended.

TATA KELOLA

1. Tata kelola TIK dan *cyber security* yang baik dan bijak.
2. Penerapan dan penetapan kebijakan proses bisnis secara konsisten.

TREN TIK DI INDUSTRI KEPELABUHANAN

1. Penerapan aplikasi *mobile* di industri kepelabuhanan.
2. Penerapan *Internet of Things* (IoT) dan *big data* untuk data *analytics*.
3. Pengembangan IoT ke depan terkait pemeliharaan alat.
4. Penerapan sistem robotika atau *artificial intelligence* pada TOS pelayanan peti kemas.

BUSINESS BUILDING BLOCK HINGGA AKHIR TAHUN 2018

Business Building Block menggambarkan unit bisnis mana saja yang telah didukung oleh TIK, dalam proses pengembangan, maupun yang belum. Informasi mengenai realisasi *Business Building Block* hingga akhir tahun 2018 tersaji dalam bagan di bawah.





BUSINESS BUILDING BLOCK 2018

■ Kapabilitas sudah selesai dikembangkan

■ Kapabilitas rencana dikembangkan tahun 2019

■ Kapabilitas sedang dalam tahap pengembangan di 2018

■ Kapabilitas tidak menjadi fokus pengembangan Master Plan TI periode ini





PROGRAM KERJA TIK 2018-2019

Mengacu pada Master Plan TI yang telah disusun, Subdirektorat TIK telah melakukan pembagian atas rencana-rencana pengembangan dan pengelolaan yang ada menjadi sebuah rencana kegiatan yang diterapkan dalam program tahunan Subdirektorat TIK. Program ini tentunya telah diselaraskan dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan serta memiliki fleksibilitas terhadap inisiatif strategis yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Terdapat 15 program kerja tahun 2018-2019 yang tertuang di dalam Dokumen Penyelarasan Master Plan TI:

1. Pengembangan *identity and access management*
2. Pengembangan manajemen proses bisnis
3. Pengembangan IoT bisnis di pelabuhan
4. Pengembangan analytics dan dashboard
5. Pengembangan *customer portal*
6. Penyempurnaan aplikasi *core*
7. Penyempurnaan aplikasi *non-core*
8. Penyempurnaan aplikasi pendukung korporasi dan operasional
9. Pengembangan manajemen hubungan dengan pelanggan
10. Pengembangan manajemen pengetahuan
11. Peningkatan infrastruktur TIK
12. Peningkatan keamanan TIK dan siber
13. Pengembangan dan pengelolaan kebijakan dan prosedur TIK
14. Pengembangan dan implementasi sistem eGRC
15. Peningkatan organisasi TIK

SERTIFIKASI BIDANG TIK

Upaya Perusahaan dalam meningkatkan standar pengelolaan dan aktivitas di bidang TIK dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi, yaitu:

1. ISO 27001:2013 (*Information Security Management*) dengan ruang lingkup aplikasi e-procurement dan fisik data center.
2. Surat Pencatatan Ciptaan atas 4 aplikasi:
 - a. Spiner
 - b. Monic
 - c. Home Terminal System
 - d. Gen-C

PENGHARGAAN TAHUN 2018

1. IT Governance Award oleh TI BUMN 2018
2. IT Governance Outstanding Award oleh TI BUMN 2018, dengan skor IT Maturity Level 3,63

KESIAPAN PERUSAHAAN DI BIDANG TIK

KESIAPAN DARI ASPEK REGULASI

Dukungan atas penerapan dan pengembangan TIK dalam rangka menunjang kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan direalisasikan oleh manajemen Pelindo III, dalam hal ini Direksi Perusahaan melalui Peraturan Direksi Pelindo III No. 22-1/05.0102/P-III-2015 tentang Kebijakan Operasional Teknologi Informasi di Lingkungan Pelindo III. Dalam regulasi tersebut, Perusahaan berusaha memenuhi aspek infrastruktur maupun *soft-structure* yang diperlukan

guna memberikan aturan main yang jelas serta kewenangan-kewenangan yang diperlukan terkait pengelolaan aspek TIK di lingkungan Perusahaan.

Muatan yang terkandung dalam regulasi tersebut yaitu:

1. Pengelolaan Layanan TIK
2. Pengelolaan Keamanan TIK
3. Pengelolaan Layanan TIK Pihak Ketiga
4. Pengelolaan Operasional TIK
5. Pengelolaan Mutu Layanan TIK
6. Knowledge Transfer layanan TIK
7. Pengelolaan data pemantauan dan evaluasi kinerja TIK
8. Pemantauan dan evaluasi pengendalian internal
9. Pengelolaan kepatuhan terhadap kebijakan eksternal

KESIAPAN DARI ASPEK ANGGARAN

Guna mendukung daya saing usaha yang tinggi serta kemajuan atas penerapan TIK di lingkungan Perusahaan sehingga mampu sejajar dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa kepelabuhan lainnya di regional Asia bahkan dunia, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dukungan secara menyeluruh dari beragam aspek termasuk dalam aspek anggaran.

Dengan melakukan riset yang terukur serta mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, dan kewajaran, Perusahaan telah melakukan pemetaan dan pengembangan rencana TIK yang dituangkan dalam Master Plan TI 2015-2019. Dalam Rencana Jangka Panjang tersebut, telah dilakukan penaksiran atas kebutuhan investasi di bidang TIK yang diperlukan selama berjalannya program kerja yang ada.

Dalam RKAP 2018, Perusahaan menetapkan basis anggaran investasi di bidang TIK sebesar Rp234,6 miliar. Di akhir tahun 2018, Subdirektorat TIK melalui program-program yang diselenggarakan berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 17%. Kecilnya angka penyerapan tersebut dikarenakan oleh penggunaan mata anggaran Master Plan TI 2015-2017 serta adanya efisiensi melalui pemberdayaan tenaga internal dalam pengembangan aplikasi.

KESIAPAN DARI ASPEK SDM

Faktor kesiapan penyelenggaraan dan pengembangan TIK tidak hanya diukur dari seberapa banyak Perusahaan melakukan investasi dari segi perangkat lunak, perangkat keras, maupun besaran biaya pemeliharaan yang direalisasikan. Faktor kesiapan SDM khususnya SDM pengelola TIK itu sendiri juga berperan penting dalam mengukur sejauh mana penerapan atas program-program yang ada dapat berjalan dengan baik. Untuk menyeimbangkannya, Perusahaan juga melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola TIK secara berkala dan intensif agar dapat meminimalisasi kendala-kendala dari aspek tersebut.

Berikut adalah pelatihan dan sertifikasi SDM bidang TIK yang dilakukan Perusahaan sepanjang 2018:

1. Towards Better IT Governance using COBIT 5
2. Mastering IT Project Management
3. Mobile Application with React Native
4. SAP ABAP Object

5. SAP Reporting Query
6. SAP Finance Accounting and Asset
7. Chief Information Security Officer
8. Lead Auditor ISO 20000
9. Lead Implementor ISO 27001

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TIK 2018

Terdapat 53 fokus pekerjaan TIK tahun 2018 yang terdiri dari 24 inisiatif ad-hoc, 14 inisiatif Master Plan TI, dan 15 *carry over* dari 2017. Penjabaran informasi tersebut tersaji pada tabel di bawah:

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TIK 2018

KODE INISIATIF	INISIATIF AD-HOC	KODE INISIATIF	INISIATIF MASTER PLAN TI	KODE INISIATIF	INISIATIF CARRY OVER 2017
Ad-Hoc 01	Sistem Pemantauan Bahan Bakar	New 01	Integrated Billing System	Carry Over 01	Enterprise Service Bus
Ad-Hoc 02	Pengarsipan Digital	New 02	Operational Dashboard	Carry Over 02	SPINER Reengineering
Ad-Hoc 03	My Intan (Internet Attendance)	New 03	Truck Data Master	Carry Over 03	Implementasi Aplikasi RORO
Ad-Hoc 04	BBS	New 04	Procure2Pay Phase 2	Carry Over 04	Pengembangan Aplikasi Pembiayaan Operasional
Ad-Hoc 05	E-Dermaga	New 05	Remote Enhancement	Carry Over 05	Implementasi e-Bidding dan e-Procurement
Ad-Hoc 06	Mobile SI Hukum	New 06	Upgrade Oracle Database Production and Clustering	Carry Over 06	e-Procurement Perusahaan
Ad-Hoc 07	E-Pantau	New 07	Core Switch Data Centre dan Disaster Recovery Centre	Carry Over 07	Peremajaan Perangkat AIS
Ad-Hoc 08	Notifikasi Laporan Neraca	New 08	CCTV Kawasan CCTV Areas	Carry Over 08	Redundancy Core Switch DC
Ad-Hoc 09	Gen-C untuk Anak Perusahaan	New 09	Procurement of Software Security Information and Log Management	Carry Over 09	Pengadaan PC Penumpang WM
Ad-Hoc 10	Peninjauan Layanan Pemanduan	New 10	Consolidation of Back-Up System using Big Data Platform	Carry Over 10	Pengadaan Perangkat Server Optimalisasi OpenText
Ad-Hoc 11	Kemilau (Bantuan Sosial)	New 11	Data Base Cleansing and Arrangement of Landscape Development and QA	Carry Over 11	Pengadaan Perangkat Server untuk Enterprise Service Bus
Ad-Hoc 12	HTS	New 12	Procurement of Monitoring Software of Data Flow between IT Services (IT Service Catalogue)	Carry Over 12	Pengadaan Perangkat Server untuk Anak Perusahaan
Ad-Hoc 13	Sistem APBS APBS System	New 13	Corporate CRM Phase 2	Carry Over 13	Pengadaan Laptop Penunjang BIM
Ad-Hoc 14	Sistem Bima Bima System	New 14	Addition Point Acces for Branch	Carry Over 14	Perangkat PC Penunjang BIM & SPINER
Ad-Hoc 15	INAPORNET 2,0			Carry Over 15	Implementasi Aplikasi Pelayaran Rakyat
Ad-Hoc 16	EXCYS (PLP)				
Ad-Hoc 17	Paperless System - Milea (Penomoran Surat Online)				
Ad-Hoc 18	Paperless System - Dilan (E-Letter)				
Ad-Hoc 19	OASIS (BBS)				
Ad-Hoc 20	Sinergi - Pelindo IV				



KODE INISIATIF	INISIATIF AD-HOC	KODE INISIATIF	INISIATIF MASTER PLAN TI	KODE INISIATIF	INISIATIF CARRY OVER 2017
Ad-Hoc 21	Penyediaan Aplikasi Anak Perusahaan				
Ad-Hoc 22	D'ECO				
Ad-Hoc 23	Penjadwalan Kapal Pesiar				
Ad-Hoc 24	TNA Helper Applications				

PENCAPAIAN TIK TAHUN 2018

Terdapat beberapa *key achievement* yang dicapai di bidang TIK di tahun 2018, di antaranya adalah:

1. Penyesuaian aplikasi SAP dengan struktur organisasi regional
2. Host to Host PPN dengan Dirjen Pajak
3. Penerapan aplikasi SPINER di Pelindo IV
4. Penyempurnaan SPINER
5. Pengembangan *Office Automation* (25 Modul)
6. Pengembangan dan implementasi *Integrated Billing System*
7. Penerapan *Information Security Management System* (ISMS)
8. Pengembangan manajemen hubungan pelanggan
9. Pengembangan *truck management system*
10. Implementasi aplikasi kementerian
11. *Roll out* aplikasi Pelra dan Ro-Ro
12. Ditugaskan sebagai pemimpin proyek dalam implementasi IBS untuk semua pelabuhan di Indonesia

PROGRAM KERJA SUBDIREKTORAT TIK 2019

Di tahun 2019, program kerja Sub Direktorat TIK terdiri dari:

1. Pengembangan sistem eGRC
2. Pembangunan *shared information system* (Public API)
3. Pengembangan sistem manajemen pergudangan
4. Pembangunan *high availability application server and middleware*
5. Penyempurnaan TOS
6. Sistem fundamental untuk Anak dan Cucu Perusahaan
7. Sistem manajemen talenta terintegrasi
8. Penyusunan *Master Plan TI* 2020-2024





04 ANALISIS DAN DISKUSI MANAJEMEN





TINJAUAN UMUM

TINJAUAN EKONOMI GLOBAL

Dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk *Global Economic Prospects*, tercatat pertumbuhan ekonomi global sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 3,0%. Angka pertumbuhan tersebut melambat 3% bila dibandingkan dengan nilai pertumbuhan tahun 2017 sebesar 3,1%. Perlambatan ekonomi global merupakan dampak dari aktivitas perdagangan dan manufaktur internasional yang melambat.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Amerika tetap solid yang didukung oleh stimulus fiskal, pertumbuhan ekonomi negara maju secara keseluruhan tercatat melambat menjadi 2,2% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 2,3%. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh melambatnya ekspor neto di kawasan Euro.

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

URAIAN	2016	2017	2018
Ekonomi Global	2,4%	3,1%	3,0%
Ekonomi Negara Maju	1,7%	2,3%	2,2%
Ekonomi Negara Berkembang	3,7%	4,3%	4,2%
Volume Perdagangan Dunia	2,6%	5,4%	3,8%
Harga Minyak Dunia	(15,6%)	23,3%	30,7%

(Sumber: Bank Dunia)

Di sisi lain, negara-negara berkembang juga mencatatkan perlambatan ekonomi menjadi 4,2% dari tahun 2017 yang tercapai 4,3%. Perlambatan perekonomian negara-negara berkembang tersebut merupakan imbas dari defisit transaksi berjalan yang dialami oleh sejumlah negara berkembang dan menurunnya aktivitas perekonomian umum. Kondisi ini menyebabkan negara-negara tersebut mengalami tekanan substansial di pasar keuangan. Selain itu, kombinasi dari menurunnya volume perdagangan dunia dan semakin ketatnya kondisi finansial juga menjadi faktor utama dari semakin menantang iklim perdagangan global bagi negara berkembang.

Senada dengan kondisi tersebut, International Monetary Fund (IMF) mengestimasi laju pertumbuhan ekonomi global akan berada pada level 3,5% pada 2019 dan 3,6% di 2020. Proyeksi ini telah direvisi ke bawah (menurun) mengingat beberapa faktor, antara lain: efek negatif dari kenaikan tarif yang diberlakukan di Amerika Serikat dan China pada awal tahun 2018, diterapkannya standar baru emisi bahan bakar mobil di Jerman, risiko kedaulatan dan krisis keuangan yang terjadi di Italia, melemahnya sentimen pasar keuangan, serta kontraksi di Turki yang diperkirakan akan semakin tajam.

TINJAUAN EKONOMI NASIONAL

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 tercatat sebesar 5,17% atau naik 1,97% dari tahun 2017 yang tercatat 5,07%. Meski demikian, pertumbuhan tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 (APBN) yang ditargetkan sebesar 5,4%. Tidak tercapainya target pertumbuhan tersebut disebabkan oleh gejolak perekonomian yang terjadi terutama di level global dan fluktuasi harga komoditas.

Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah defisit transaksi berjalan yang cukup tinggi di tahun 2018, yaitu USD 31,1 miliar atau 2,98% dari PDB. Senada dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan (ekspor-impor) juga tercatat mengalami defisit sebanyak USD 8,57 miliar. Dua hal tersebut merupakan beberapa faktor utama dari tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi 2018.



Ditinjau dari segi pengeluaran, perekonomian Indonesia tahun 2018 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 55,74%, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,29%, komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,97%, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,98%, komponen Perubahan Inventori sebesar 2,28%, dan Komponen Pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,22%. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 22,06%.

Di tahun 2018, Bank Indonesia (BI) melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan meningkatkan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate (7DRRR). Selama tahun 2018, BI tercatat telah melakukan revisi sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. 4,50% per 17 Mei 2018
2. 4,75% per 30 Mei 2018
3. 5,25% per 29 Juni 2018
4. 5,50% per 15 Agustus 2018
5. 5,75% per 27 September 2018
6. 6,00% per 15 November 2018

Kebijakan ini merupakan upaya BI untuk menurunkan tingkat defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

EKONOMI WILAYAH OPERASIONAL

Ditinjau dari wilayahnya, kegiatan operasional Pelindo III tersebar di 7 provinsi yang terletak di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur; yang terdiri dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data BPS, ekonomi Bali mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah operasional lainnya, yaitu mencapai 6,35% atau naik 14,00% dari tahun 2017 yang tercatat 5,57%. Dari sisi produksi, penyumbang tertinggi berasal dari kategori konstruksi, yaitu sebesar 10,44%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi disumbang oleh komponen pengeluaran rumah tangga sebesar 47,15%.

Sebaliknya, ekonomi NTB mengalami pertumbuhan terendah dibanding wilayah operasional lainnya, dengan mengalami kontraksi menjadi -4,56% atau turun 3.900,00% dari 2017 yang tercatat 0,12%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi NTB dikarenakan adanya penurunan kinerja pada subkategori pertambangan bijih logam dibanding 2017, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti pada kategori pertambangan dan penggalian. Sementara itu, 5 wilayah operasional lainnya tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,34%.

PROSPEK EKONOMI INDONESIA

Dalam jangka pendek, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dengan laju yang lambat. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai tukar Rupiah, aliran modal, serta defisit transaksi berjalan negara yang semakin besar. Keadaan tersebut juga ditambah dengan posisi investor yang diperkirakan akan mengambil langkah *wait and see* untuk melihat perkembangan negara yang akan menyambut pemilihan umum (pemilu) di 2019. Sebab, para investor akan melakukan penyesuaian dengan kebijakan yang akan diambil oleh kubu yang memenangkan pemilu.

Pemerintah sendiri mengambil langkah untuk meningkatkan investasi domestik serta belanja rumah tangga untuk menggerakkan perekonomian negara pada 2019. Kementerian Sosial menyiapkan dana bantuan sosial sebesar Rp381 triliun untuk 2019. Dana tersebut diharapkan dapat mendorong pengeluaran belanja rakyat sehingga ekonomi dapat terstimulus.

Berbeda dengan prospek jangka pendek, prospek jangka panjang Indonesia terlihat lebih baik. Dengan nilai saham dan sekuritas Indonesia berada pada posisi undervalue karena kondisi penurunan nilai Rupiah, momen ini dirasa sebagai momen yang tepat untuk melakukan investasi finansial di Indonesia. Indonesia memberikan opsi menarik untuk investor melakukan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Walaupun demikian, opsi tersebut hanya untuk investor yang berani menghadapi ketidakpastian jangka pendek.

TINJAUAN INDUSTRI PELABUHAN

Guna menyediakan informasi mengenai transportasi laut nasional, BPS telah menghimpun data mengenai aktivitas transportasi laut di 5 pelabuhan utama di Indonesia yang terdiri dari Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Balikpapan, dan Makassar. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

TOTAL BARANG DALAM NEGERI YANG DIBONGKAR

Di tahun 2018, total barang dalam negeri yang dibongkar di 5 pelabuhan utama nasional mencapai 35.068.864 ton, menurun 3.557.008 ton atau 9% bila dibandingkan pencapaian tahun 2017 yang tercatat 38.625.872 ton. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya capaian di Pelabuhan Belawan sebesar 44% dan Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 23% dari tahun lalu.

TOTAL BARANG DALAM NEGERI YANG DIMUAT

Di tahun 2018, total barang dalam negeri yang dimuat di 5 pelabuhan utama nasional mencapai 31.709.388 ton, menurun 2.094.779 ton atau 6% dibanding capaian tahun 2017 yang tercatat 33.804.167 ton. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya capaian di Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 28% dan Balikpapan sebesar 12% dari tahun 2017.



TOTAL KEBERANGKATAN PENUMPANG DARI PELAYARAN DALAM NEGERI

Di tahun 2018, total keberangkatan penumpang dari pelayaran dalam negeri di 5 pelabuhan utama nasional mencapai 956.020 orang, meningkat 38.390 orang atau 4% dari tahun 2017 yang tercatat mencapai 917.629 orang. Peningkatan ini didukung dari naiknya capaian di Pelabuhan Balikpapan sebesar 25% dan Tanjung Priok sebesar 11% dari tahun 2017.

TOTAL KEDATANGAN PENUMPANG DARI PELAYARAN DALAM NEGERI

Di tahun 2018, total kedatangan penumpang dari pelayaran dalam negeri di 5 pelabuhan utama nasional mencapai 937.465 orang, naik 26.700 orang atau 3% dari tahun 2017 yang tercapai 910.765 orang. Peningkatan terbesar terjadi pada Pelabuhan Balikpapan yang mencapai 18% dari tahun 2017.

Di sisi Pemerintah, sejumlah kebijakan dalam meningkatkan peran investasi untuk pengembangan infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman terus mengalami peningkatan. Pemerintah juga terus menunjukkan komitmennya untuk merealisasikan visi agar Indonesia dapat menjadi Negara Poros Maritim dengan membangun pelabuhan-pelabuhan baru. Hingga akhir tahun 2018, sebanyak 19 pelabuhan baru telah berhasil dibangun, sementara pelabuhan masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan selesai pada tahun 2019.

Guna memperlancar aktivitas ekspor dan impor, pada bulan Maret 2018 Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mempercepat arus keluar masuk barang-barang di pelabuhan. Salah satunya dengan menggeser proses pemeriksaan barang-barang impor yang masuk daftar larangan dan pembatasan (lartas) ke luar pelabuhan atau di gudang importir (*post border*).

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengurangi kode *Harmonised System* (HS) yang sebelumnya berjumlah 3.451 menjadi sekitar 2.600 kode HS. Selain itu, sejak 1 Februari 2018, pengawasan di *border* hanya tertinggal 809 kode HS. Sementara pengawasan 2.600 kode HS dilakukan pada *post border*.

Pemerintah juga melakukan upaya peningkatan kualitas pelabuhan-pelabuhan potensial guna menunjang kegiatan ekspor yang lebih besar. Misalnya pada *Newport* Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan modernisasi Pelabuhan Teluk Lamong.

PROSPEK INDUSTRI KEPELABUHANAN

Walaupun kondisi perekonomian global dan nasional di masa mendatang diperkirakan akan berjalan melambat, industri kepelabuhanan nasional diproyeksikan akan mampu tumbuh dengan baik dan menjanjikan. Hal ini seiring dengan optimisme dan antusiasme Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub berkelas internasional. Guna merealisasikan hal tersebut, Pemerintah berencana untuk mengembangkan 7 pelabuhan untuk hub berkelas internasional. Dalam rencananya, pelabuhan tersebut akan diintegrasikan dengan kawasan industri dalam negeri.

Tujuh pelabuhan yang akan dikembangkan untuk menjadi hub berkelas internasional antara lain adalah Tanjung Priok, Kuala Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Perak, Makassar, serta Sorong. Seluruh pelabuhan tersebut akan dibentuk sebagai jaringan pelabuhan terpadu. Jaringan pelabuhan terpadu ini akan menghubungkan sisi paling barat Indonesia di Pelabuhan Kuala Tanjung Sumatra Utara dengan sisi paling timur Indonesia di Pelabuhan Sorong.

Pemerintah memperkirakan hub ini kelak dapat menyaingi dominasi Singapura dalam sektor hub internasional serta memindahkan kebutuhan penggunaan hub menuju hub dalam negeri. Selain itu, proyek pengembangan pelabuhan ini juga dapat menjadi salah satu penyempurnaan dari program tol laut yang sudah berjalan.



TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL

Sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan terpenting di Indonesia, Pelindo III memiliki peranan kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Perusahaan mampu memberikan stimulasi positif terhadap kegiatan ekonomi nasional dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan, dan lingkungan maritim. Status Pelindo III yang bukan lagi sebagai regulator melainkan operator secara otomatis mengubah bisnis Perusahaan dari *port operator* menjadi *terminal operator*.

Perusahaan melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Bidang usaha kepelabuhanan yang saat ini diselenggarakan oleh Pelindo III antara lain:

BIDANG USAHA PELAYANAN KAPAL, YANG MELIPUTI:

1. Pelayanan Labuh, yaitu pelayanan penyediaan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
2. Pelayanan Pemanduan, yaitu kegiatan pelayanan membantu Nakhoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar;
3. Pelayanan Penundaan, yaitu kegiatan pelayanan menarik mendorong atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk tambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestel*, *pier*, pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya menggunakan kapal tunda;
4. Pelayanan Penambatan, yaitu kegiatan pelayanan kapal melakukan ikat tali di tambatan/dermaga untuk melakukan bongkar muat barang atau kegiatan lainnya.
5. Pelayanan Alur, yaitu pelayanan penyediaan perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman bagi keluar masuknya kapal di pelabuhan;
6. Pelayanan Kepil, yaitu pelayanan untuk menarik dan mengikat tali kapal ke *bolder* yang ada di tambatan/dermaga.

BIDANG USAHA PELAYANAN PETI KEMAS, YANG MELIPUTI:

1. Pelayanan Operasi Kapal, yaitu pelayanan pembongkaran atau pemuatan peti kemas dari atau ke kapal;
2. Pelayanan Operasi Lapangan, yaitu pelayanan penumpukan sementara muatan setelah dibongkar atau akan dimuat dari atau ke kapal pada lapangan penumpukan terbuka;
3. Pelayanan CFS, yaitu pelayanan penimbunan sementara muatan setelah dibongkar atau dimuat dari atau ke kapal pada ruangan tertutup;
4. Pelayanan Peti Kemas Transshipment, yaitu pelayanan membongkar peti kemas dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan mengapalkannya ke kapal pengangkut kedua;
5. Pelayanan Peti Kemas Lainnya, yaitu pelayanan yang diberikan kepada para pengguna jasa berupa *behandle*, tempat pemeriksaan terpadu, fumigasi, batal muat, pindah kapal/alih kapal, *closing*, batal dokumen, *labelling* dan *overbrenge*.

BIDANG USAHA PELAYANAN NONPETI KEMAS, YANG MELIPUTI:

1. Pelayanan Nonpeti Kemas *General Cargo*, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk barang kemas *general cargo* termasuk *bag cargo* dan *unitised/pallet* berupa fasilitas dermaga, gudang dan lapangan penumpukan serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
2. Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Kering, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk barang kemas curah kering berupa fasilitas dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan silo penyimpanan serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
3. Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Cair, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk barang kemas curah cair berupa fasilitas dermaga, fasilitas penyimpanan (*Storage Tank*), serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
4. Pelayanan Nonpeti Kemas Gas, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas gas berupa fasilitas dermaga, fasilitas penyimpanan (*Pipa*) serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
5. Pelayanan Nonpeti Kemas *Car Terminal*, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk segmen *car terminal* berupa fasilitas dermaga, fasilitas lapangan penumpukan serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;

6. Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas hewan berupa fasilitas dermaga, fasilitas lapangan penumpukan, serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal.

BIDANG USAHA PENUNJANG, YANG MELIPUTI:

1. Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang, yaitu pelayanan yang diberikan berupa area khusus di luar terminal yang dapat digunakan oleh pengguna jasa untuk melakukan kegiatan pelayanan barang baik peti kemas maupun nonpeti kemas, yang meliputi kegiatan *receiving/delivery, stuffing/stripping, unitasi/paletisasi, packing, labeling, sortasi*, serta kegiatan penumpukan peti kemas maupun barang nonpeti kemas dan kegiatan fumigasi;
2. Pelayanan Pelra, yaitu pelayanan yang diberikan bagi kapal-kapal pelayaran rakyat yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan berupa fasilitas penambatan, kepil, dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan bongkar muat barang;
3. Pengusahaan alat, yaitu kegiatan pelayanan pengusahaan alat-alat penunjang kegiatan kepelabuhanan baik berupa alat angkat, alat angkut, alat bantu B/M serta alat apung;
4. Pengusahaan Properti, terdapat 24.061.005 m² tanah yang tersebar di seluruh wilayah operasi Perusahaan. Lahan HPL tersebut diusahakan dengan diklasifikasikan sebagai usaha jasa kepelabuhanan, usaha industri, usaha konsolidasi dan distribusi, usaha pariwisata, industri perkapalan, usaha perkantoran dan pusat bisnis, dan non usaha (misal instansi pemerintahan, rumah tangga, dan tempat ibadah). Selain pengelolaan lahan, Perusahaan juga melakukan pengusahaan bangunan, yang pengelolaannya dilakukan di masing-masing Cabang Pelabuhan. Sebagai langkah untuk mengoptimalkan lahan milik Perusahaan, maka dibentuk anak perusahaan PT Pelindo Properti Indonesia (PT PPI) yang bergerak dalam usaha marina pelabuhan;
5. Pengusahaan Air dan Listrik, dalam memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dan penduduk di lingkungan pelabuhan, Pelindo III bekerja sama dengan PDAM menyediakan air bersih bagi kapal-kapal laut yang sedang berlabuh dan bertambat di perairan pelabuhan, serta berkerjasama dengan PLN menyediakan suplai listrik untuk perkantoran dan rumah tangga di lingkungan sekitar pelabuhan;
6. Pelayanan Terminal Penumpang dan Usaha Lainnya, yaitu pelayanan yang diberikan kepada penumpang angkutan laut untuk debarkasi/embarkasi termasuk pelayanan pas terminal penumpang serta pelayanan pas masuk pelabuhan;
7. Pelayanan Fowarding, yaitu kerjasama dengan pihak ketiga terkait penyediaan fasilitas untuk kegiatan pengangkutan barang dari lapangan penumpukan ke depo Kereta Api ataupun ke area penumpukan lainnya (transit);
8. Pelayanan TUKS, yaitu pelayanan kapal dan barang yang diberikan oleh Pelindo III di area TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) meliputi pelayanan pemanduan dan penundaan serta kerjasama pelayanan bongkar muat barang dari dan ke kapal;

9. Marine Services, dalam upaya meningkatkan kelancaran kinerja pemanduan dan penundaan, Perusahaan membentuk anak perusahaan PT Pelindo Marine Service (PT PMS). Selain bergerak dalam usaha penyediaan SBPP (Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan) untuk mendukung kelancaran pelayanan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan, PT PMS juga bergerak dalam usaha pelayanan wisata bahari, perbaikan kapal, penyewaan kapal, dan penyediaan tenaga Anak Buah Kapal.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

SEGMENT USAHA PELAYANAN KAPAL

Segment usaha pelayanan kapal terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan Labuh,
2. Pelayanan Pemanduan,
3. Pelayanan Penundaan,
4. Pelayanan Penambatan,
5. Pelayanan Alur, dan
6. Pelayanan Kepil.

Berikut adalah penjelasan mengenai tingkat produksi dan pendapatan segment usaha Pelayanan Kapal pada tahun 2018.

PRODUKSI PELAYANAN KAPAL TAHUN 2018

PELAYANAN PEMANDUAN

Pada tahun 2018, produksi pelayanan pemanduan terealisasi sebesar 517.151.509 GT.Kpl.GrK, produksi ini meningkat sebanyak 132.771.447 GT.Kpl.GrK atau 35% bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 384.380.062 GT.Kpl.GrK. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan kunjungan kapal terutama dengan ukuran GT kapal yang lebih besar di beberapa pelabuhan cabang diantaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Banjarmasin, Tanjung Emas, dan Mekarputih serta adanya pelimpahan pemanduan kepada PT Pelindo III (Persero) untuk melaksanakan pemanduan di perairan Sungai Danau Satu dan Bunati yang pada tahun sebelumnya tidak direncanakan.

PELAYANAN PENUNDAAN

Pelayanan Penundaan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 677.665.053 GT.Kpl.Jam, produksi ini meningkat sebanyak 23.074.081 GT.Kpl.Jam atau 4% dari tahun sebelumnya sebesar 654.590.972 GT.Kpl.Jam. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan produksi pemanduan dengan kenaikan kunjungan kapal dengan ukuran GT yang lebih besar.

PELAYANAN PENAMBATAN

Pada tahun 2018 produksi pelayanan penambatan terealisasi sebesar 315.978.423 GT.Kpl.GrK. Produksi ini meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 300.918.331 GT.Kpl.GrK. Hal ini juga seiring dengan peningkatan arus kunjungan kapal dengan ukuran GT yang lebih besar serta dengan muatan yang lebih banyak.

**PELAYANAN ALUR**

Di tahun 2018, produksi Pelayanan Alur berhasil terealisasi sebesar 24.272.827 ton, sedangkan pada tahun 2017 nilai tersebut tercatat nihil. Tercapainya realisasi produksi Pelayanan Alur di tahun 2018 didukung oleh adanya peningkatan kegiatan kapal-kapal luar negeri yang melewati Alur Pelayanan Barat Surabaya, khususnya jenis kapal Peti Kemas, Curah Cair, dan Curah Kering dengan muatan yang

cukup besar di mana tarif alur untuk kapal luar negeri lebih tinggi 233% dibandingkan tarif untuk kapal domestik.

PELAYANAN KEPIL

Produksi Pelayanan Kepil pada tahun 2018 terealisasi sebesar 26.006 Grk, hasil ini relatif sama dengan tahun lalu yang mencapai 26.181 Grk.

PRODUKSI PELAYANAN KAPAL 2018

URAIAN	SATUAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
				NOMINAL	%
Pelayanan Labuh	GT Masa	-	-	-	-
Pelayanan Pemanduan	Kpl.Grak	87.552	61.060	26.492	43
	GT.Kpl.Grak	517.151.509	384.380.062	132.771.447	35
Pelayanan Penundaan	Kpl.Jam	83.859	87.131	(3.272)	(4%)
	GT.Kpl.Jam	677.665.053	654.590.972	23.074.081	4
Pelayanan Penambatan	GT.Etm	315.978.423	300.918.331	15.060.092	5
Pelayanan Alur	GT	-	-	-	0
	Ton	24.272.827	-	24.272.827	0
	M ³	-	-	-	0
	Box	2.125.712	-	2.125.712	0
Pelayanan Kepil	Grk	26.006	26.181	(175)	(1%)
	GT	15.844.599	23.305.176	(7.460.577)	(32%)

PENDAPATAN PELAYANAN KAPAL TAHUN 2018

Secara Keseluruhan, segmen usaha Pelayanan Kapal Perusahaan di tahun 2018 mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,49 triliun, naik Rp538 miliar atau 56% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2017 sebesar Rp955 miliar. Faktor utama peningkatan pendapatan segmen usaha Pelayanan Kapal di 2018 adalah meningkatnya pendapatan di semua pelayanan dengan peningkatan rata-rata sebesar 60%.

PENDAPATAN PELAYANAN KAPAL 2018

(dalam ribu Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pelayanan Labuh	-	-	0	0
Pelayanan Pemanduan	350.874.960	127.077.110	223.797.850	176
Pelayanan Penundaan	528.636.079	373.765.904	154.870.175	41
Pelayanan Penambatan	341.461.672	206.318.564	135.143.108	66
Pelayanan Alur	268.927.135	244.577.966	24.349.169	10
Pelayanan Kepil	4.494.999	4.160.761	334.238	8
JUMLAH PENDAPATAN	1.494.394.845	955.900.305	538.494.540	56

PELAYANAN PEMANDUAN

Pendapatan Pelayanan Pemanduan tahun 2018 tercatat sebesar Rp350 miliar, naik Rp223 miliar atau 176% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp127 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi pelayanan pemanduan pada kapal pelayaran luar negeri dengan tarif US Dollar maupun pelayaran domestik di beberapa pelabuhan.

PELAYANAN PENUNDAAN

Pendapatan Pelayanan Penundaan tahun 2018 tercatat sebesar Rp529 miliar, naik Rp155 miliar atau 41% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp373 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan produksi pelayanan penundaan untuk kapal-kapal luar negeri dengan ukuran GT kapal yang lebih besar, dan juga karena adanya kenaikan tarif jasa kapal pada beberapa pelabuhan serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US Dolar.

PELAYANAN PENAMBATAN

Pendapatan Pelayanan Penambatan tahun 2018 tercatat sebesar Rp341 miliar, naik Rp135 miliar atau 66% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar Rp206 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan trafik kapal yang masuk ke Pelindo III.

PELAYANAN ALUR

Pendapatan Pelayanan Alur tahun 2018 tercatat sebesar Rp269 miliar, naik Rp24 miliar atau 10% dibanding 2017 yang terealisasi sebesar Rp244 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan kapal-kapal luar negeri yang melewati Alur Pelayaran Barat Surabaya khususnya jenis kapal Peti Kemas, Curah Cair dan Curah Kering dengan muatan yang cukup besar dimana tarif alur untuk kapal luar negeri lebih tinggi 233% dibandingkan tarif untuk kapal domestik.

PELAYANAN KEPIL

Pendapatan Pelayanan Kepil tahun 2018 tercatat sebesar Rp4,49 miliar, naik Rp334 juta atau 8% dibandingkan realisasi 2017 sebesar Rp4,16 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kegiatan sandar ulang pada terminal-terminal di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak; serta adanya realisasi kegiatan pelayanan jasa kepil di Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Celukan Bawang yang tidak dianggarkan pada tahun 2018.

SEGMENT USAHA PELAYANAN PETI KEMAS

Segment usaha Pelayanan Peti Kemas terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan Operasi Kapal,
2. Pelayanan Operasi Lapangan,
3. Pelayanan CFS,
4. Pelayanan Peti Kemas *Transshipment*, dan
5. Pelayanan Peti Kemas Lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan membagi segmen usaha Pelayanan Peti Kemas menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Pelayanan Peti Kemas Internasional dan Pelayanan Peti Kemas Domestik. Berikut adalah penjelasan mengenai tingkat produksi, dan pendapatan Pelayanan Peti Kemas tersebut pada tahun 2018.

PRODUKSI PELAYANAN PETI KEMAS TAHUN 2018

PELAYANAN PETI KEMAS INTERNASIONAL

1. Produksi dermaga peti kemas internasional tahun 2018 tercatat sebesar 623.193 box, meningkat sebesar 92.134 box atau 17% dari tahun 2017 yang tercatat 531.059 box. Peningkatan produksi dermaga yang ini dipicu oleh Peningkatan produksi dermaga ini dipengaruhi adanya penambahan kunjungan kapal di luar window schedule seperti dari Evergreen, SITC, dan KMTC, CMA serta COSCO di Terminal Teluk Lamong serta penambahan 2 pelanggan baru yakni Emirate Shipping Line dan Mariana Express Line di Terminal Petikemas Surabaya.
2. Produksi penumpukan peti kemas internasional pada tahun 2018 terealisasi sebesar 23.186.938 Box. Hari, sedangkan pada tahun 2017 terealisasi sebesar 16.429.545 Box.Hari. Peningkatan produksi penumpukan peti kemas sebesar 6.757.393 Box.Hari atau 41% ini antara lain sejalan dengan peningkatan volume arus peti kemas dengan adanya penambahan kunjungan kapal di luar window maupun adanya customer baru. Selain itu peningkatan produksi penumpukan juga terjadi lamanya proses pengeluaran peti kemas akibat menunggu proses pengurusan dokumen yang diperlukan untuk memindahkan peti kemas ke area PLP Lini II.
3. Produksi bongkar muat untuk pelayanan peti kemas internasional tahun 2018 terealisasi sebesar 1.553.472 box, meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun 2017 yang terealisasi sebesar 1.418.236 box. Hal ini disebabkan kecenderungan perubahan pola pengiriman barang melalui peti kemas serta sejalan dengan peningkatan volume arus peti kemas dengan adanya penambahan kunjungan kapal di luar window di Terminal Teluk Lamong maupun adanya pelanggan baru di Terminal Petikemas Surabaya.
4. Untuk realisasi kinerja bongkar muat peti kemas internasional, angka tertinggi diperoleh dari Terminal Teluk Lamong dengan rata-rata 52,14 Box/Ship/Hour serta 24,15 Box/Crane/Hour pada tahun 2018.

**PRODUKSI PELAYANAN PETI KEMAS INTERNASIONAL 2018**

URAIAN	SATUAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
				NOMINAL	%
Dermaga	Box	623.193	531.059	92.134	17
Penumpukan Peti Kemas	Box.Hari	23.186.938	16.429.545	6.757.393	41
Bongkar Muat	Box	1.553.472	1.418.236	135.236	10

PELAYANAN PETI KEMAS DOMESTIK

- Produksi dermaga peti kemas domestik tahun 2018 tercatat sebesar 2.747.592 Box meningkat sebesar 197.071 Box atau 8% dari tahun 2017 yang tercatat 2.550.521 Box. Peningkatan produksi dermaga peti kemas domestik ini sejalan dengan peningkatan trafik peti kemas domestik hampir di seluruh pelabuhan utamanya di Anak Perusahaan yakni PT BJTI Port, serta pelabuhan - pelabuhan di wilayah Kalimantan seperti Terminal Peti Kemas Banjarmasin, Pelabuhan Bagendang dan Pelabuhan Bumiharjo sebagai dampak dari kecenderungan perubahan pola pengiriman barang dari general cargo ke peti kemas. Selain itu terdapat beberapa penambahan kapal baru seperti kapal-kapal tujuan wini melalui Terminal Teluk Lamong dan kapal tujuan Pontianak melalui Terminal Peti Kemas Semarang.
- Produksi penumpukan peti kemas domestik pada tahun 2018 terealisasi sebesar 4.308.223 Box.Hari, meningkat 1.335.573 Box.Hari atau 45% dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 2.972.650 Box.Hari. Peningkatan ini didukung oleh Hal ini dipengaruhi antara lain adanya kebijakan minimum wajib stack antara lain di Terminal Berlian yang semula 65% menjadi 75% sehingga lebih banyak peti kemas yang ditumpuk. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pada saat bongkar muat karena tidak perlu menunggu armada truck dari luar apabila *truck lossing*.
- Produksi bongkar muat untuk pelayanan peti kemas domestik tahun 2018 terealisasi sebesar 2.703.112 Box, meningkat sebesar 7% dibandingkan tahun 2017 yang terealisasi sebesar 2.536.761 Box. Peningkatan kegiatan bongkar muat domestik sejalan dengan peningkatan trafik peti kemas dan produksi jasa dermaga. Untuk realisasi kinerja bongkar muat peti kemas domestik, angka tertinggi diperoleh dari Terminal Nilam, Pelabuhan Tanjung Perak dengan rata-rata 38.92 Box/Ship/Hour serta 24.91 Box/Crane/Hour pada tahun 2018.
- Kapasitas dermaga peti kemas secara total di lingkungan Pelindo III pada akhir tahun 2018 adalah sebesar 10.321.185 TEU's, sedangkan kapasitas lapangan penumpukan pada akhir tahun 2018 adalah sebesar 4.140.053 TEU's.

PRODUKSI PELAYANAN PETI KEMAS DOMESTIK 2018

URAIAN	SATUAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
				NOMINAL	%
Dermaga	Box	2.747.592	2.550.521	197.071	8
Penumpukan Peti Kemas	Box.Hari	4.308.223	2.972.650	1.335.573	45
Bongkar Muat (Operasi Kapal)	Box	2.703.112	2.536.761	166.351	7

PENDAPATAN PELAYANAN PETI KEMAS TAHUN 2018

Secara Keseluruhan, segmen usaha Pelayanan Peti Kemas Pelindo III di tahun 2018 mencatatkan pendapatan sebesar Rp6,03 triliun, naik Rp797 miliar atau 15% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2017 sebesar Rp5,22 triliun. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan pendapatan pelayanan Peti Kemas internasional maupun domestik dengan kenaikan rata-rata sebanyak 14,5%.

PENDAPATAN PELAYANAN PETI KEMAS 2018

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pelayanan Peti Kemas Internasional	4.066.043.064	3.488.212.365	577.830.699	17
Pelayanan Peti Kemas Domestik	1.960.349.576	1.741.284.796	219.064.780	13
JUMLAH	6.026.392.640	5.229.497.161	796.895.479	15

SEGMENT USAHA PELAYANAN NONPETI KEMAS

Segment usaha Pelayanan Nonpeti Kemas terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan *General Cargo*,
2. Pelayanan Curah Kering,
3. Pelayanan Curah Cair,
4. Pelayanan Gas,
5. Pelayanan *Car Terminal*, dan
6. Pelayanan Hewan.

Berikut adalah penjelasan mengenai tingkat produksi, pendapatan, dan laba dari segment Pelayanan Nonpeti Kemas tersebut pada tahun 2018.

PRODUKSI PELAYANAN NONPETI KEMAS TAHUN 2018

PELAYANAN NONPETI KEMAS GENERAL CARGO

1. Produksi dermaga *general cargo* tahun 2018 untuk satuan ton sebesar 9.305.891 ton, meningkat sebesar 7% dari tahun 2017 sebesar 8.695.810 ton, sedangkan untuk satuan M3 terealisasi sebesar 3.226.751 M3, meningkat sebesar 33% dari tahun 2017 sebesar 2.419.959 M3. Peningkatan produksi *general cargo* baik dalam satuan ton maupun M3 mayoritas didominasi oleh barang-barang *project cargo* serta *heavy cargo* dan barang kebutuhan logistik yang tidak dapat diangkut menggunakan peti kemas. Peningkatan kegiatan barang-barang proyek tersebut untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur serta pembangunan pabrik seperti halnya proyek PLTU Tanjung Jati, PLTU Batang, PLTMG Sumbawa dan PLTGU Lombok Peaker serta Pabrik PT Gulf Mangan di Tenau Kupang dan PT Muria Sumba Manis di Waingapu

2. Produksi gudang penumpukan *general cargo* tahun 2018 untuk satuan Ton.Hari tercatat sebesar 359.050 Ton.Hari, menurun sebesar 35% dari tahun 2017 sebesar 549.815 Ton.Hari. Sedangkan untuk satuan M3.Hari terealisasi sebesar 442.364 M3.Hari, meningkat sebesar 17% dari tahun 2017 sebesar 379.639 M3.Hari. Penurunan produksi gudang untuk satuan Ton.Hari disebabkan adanya beberapa gudang penumpukan yang diusahakan dengan skema lumpsum bukan menggunakan masa penumpukan harian, sedangkan untuk satuan M3.Hari terjadi peningkatan sejalan dengan peningkatan volume pelayanan bongkar muat sepeda motor yang ditumpuk di gudang dengan satuan M3.Hari.
3. Produksi lapangan penumpukan *general cargo* tahun 2018 untuk satuan Ton.Hari tercatat sebesar 5.052.835 Ton.Hari, relatif sama dengan tahun 2017 sebelumnya sebesar 5.127.014 Ton.Hari, sedangkan untuk satuan M3.Hari terealisasi sebesar 2.631.262 M3.Hari, menurun sebesar 7% dari tahun 2017 sebesar 2.818.231 M3.Hari. Kecenderungan penurunan produksi lapangan penumpukan dalam satuan Ton.Hari maupun satuan M3.Hari terutama terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak karena penurunan komoditi besi konstruksi dan besi beton yang ditumpuk di lapangan serta penurunan kegiatan penumpukan komoditi kayu log di Pelabuhan Gresik akibat adanya perbaikan Dermaga Talud Tegak.
4. Produksi bongkar muat *general cargo* tahun 2018 untuk satuan ton sebesar 9.349.888 ton, meningkat sebesar 10% dari tahun 2017 sebesar 8.537.328 ton, sedangkan untuk satuan M3 terealisasi sebesar 3.175.665 M3, meningkat sebesar 52% dari tahun 2017 sebesar 2.086.861 M3. Peningkatan produksi bongkar muat *general cargo* baik untuk satuan ton dan m3 sejalan dengan peningkatan trafik barang dan produksi jasa dermaga *general cargo* khususnya *project cargo* serta peningkatan kegiatan B/M yang dilaksanakan PBM Pelindo. Untuk realisasi kinerja bongkar muat *general cargo* di Terminal Jamrud rata-rata 179,19 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan internasional serta 113.14 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan domestik pada tahun 2018.

**PRODUKSI PELAYANAN BARANG NONPETI KEMAS GENERAL CARGO 2018**

URAIAN	SATUAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
				NOMINAL	%
Dermaga	Ton	9.305.891	8.695.810	610.081	7
	M ³	3.226.751	2.419.959	806.792	33
Gudang Penumpukan	Ton.Hari	359.050	549.815	(190.765)	(35)
	M ³ .Hari	442.364	379.639	62.726	17
Lapangan Penumpukan	Ton.Hari	5.052.835	5.127.014	(74.180)	(1)
	M ³ .Hari	2.631.262	2.818.231	(186.969)	(7)
Bongkar Muat	Ton	9.349.888	8.537.328	812.560	10
	M ³	3.175.665	2.086.861	1.088.804	52

PELAYANAN NONPETI KEMAS CURAH KERING

1. Produksi dermaga Curah Kering tahun 2018 terealisasi sebesar 19.837.450 ton, meningkat 2% dari tahun lalu yang tercatat 19.388.660 ton. Produksi dermaga curah kering tidak mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan antara lain terjadi pada komoditi batubara di Pelabuhan Tanjung Intan dan komoditi food grain di Terminal Teluk Lamong.
2. Produksi lapangan penumpukan Curah Kering tahun 2018 terealisasi sebesar 294.285 Ton.Hari, menurun 52.303 Ton.Hari atau 15% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 346.588 Ton.Hari. Penurunan produksi penumpukan curah kering dipengaruhi karena banyaknya kegiatan bongkar muat yang dilakukan secara truck losing jadi tidak ditumpuk lebih dulu untuk menghindari kerusakan barang.
3. Produksi bongkar muat curah kering tahun 2018 tercatat sebesar 23.568.436 ton, dibandingkan tahun sebelumnya 2016 tercatat sebesar 25.091.982 ton terjadi penurunan 6%. Penurunan produksi bongkar muat ini dipengaruhi adanya kegiatan kapal-kapal tongkang dari Pelabuhan Gresik serta kapal pengangkut pupuk dari Terminal Manyar yang beralih sandar ke TUKS Maspion.
4. Untuk realisasi kinerja bongkar muat curah kering di Terminal Nilam dengan rata-rata 498.24 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan internasional serta 164.13 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan domestik pada tahun 2018.

PRODUKSI PELAYANAN NONPETI KEMAS CURAH KERING

URAIAN	SATUAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
				NOMINAL	%
Dermaga	Ton	19.837.450	19.388.660	448.790	2
Lapangan Penumpukan Diusahakan	Ton.Hari	294.285	346.588	(52.303)	(15)
Bongkar Muat	Ton	23.568.436	25.091.982	(1.523.546)	(6)

PELAYANAN NONPETI KEMAS CURAH CAIR

1. Produksi dermaga Curah Cair tahun 2018 sebesar 12.564.291 ton, meningkat sebesar 1.879.593 ton atau 18% dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 10.684.698 ton. Hal ini antara lain disebabkan adanya peningkatan kegiatan bongkar muat komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) di Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Pelabuhan Bagendang. Selain itu adanya kegiatan bongkar muat bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina yang dilakukan di dermaga umum Pelabuhan Tanjung Wangi.
2. Produksi bongkar muat curah cair tahun 2018 tercatat sebesar 12.564.291 ton, dibandingkan tahun sebelumnya 2017 tercatat sebesar 15.027.282 ton terjadi penurunan 16%. Penurunan produksi bongkar muat ini dikarenakan pada tahun sebelumnya untuk curah cair pada kerjasama tertentu di Pelabuhan Kotabaru dicatatkan dalam satuan kiloliter dengan konversi ke satuan ton yang lebih tinggi sehingga produksinya lebih besar, sedangkan pada tahun ini pencatatan produksi curah cair telah distandarkan menggunakan satuan ton sehingga antara produksi dermaga dengan produksi bongkar muat nilainya sama dan seolah-olah turun dari tahun sebelumnya.
3. Untuk realisasi kinerja bongkar muat curah cair terminal nilam rata-rata 491.16 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan internasional serta 116.09 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan domestik pada tahun 2018.

PRODUKSI PELAYANAN NONPETI KEMAS CURAH CAIR

NO.	URAIAN	SATUAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
					NOMINAL	%
1.	Dermaga	Ton	12.564.291	10.684.698	1.879.593	18
2.	Bongkar Muat	Ton	12.564.291	15.027.282	(2.462.991)	16

PELAYANAN NONPETI KEMAS HEWAN

Di 2018, pelayanan nonpeti kemas hewan masing-masing menunjukkan peningkatan kecuali pada lapangan penumpukan diusahakan. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Dibukanya kembali keran impor hewan dari Australia ke Indonesia.
2. Penyesuaian tarif bongkar muat barang dan hewan pada pelabuhan-pelabuhan yang menangani bongkar muat hewan seperti Tanjung Intan dan Tenau Kupang.

PRODUKSI PELAYANAN NONPETI KEMAS HEWAN

NO.	URAIAN	SATUAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
					NOMINAL	%
1.	Dermaga	Ekor	134.831	125.750	9.081	7
2.	Lapangan Penumpukan Diusahakan	Ekor	10.108	14.302	(4.194)	(39)
3.	Bongkar Muat					
	Per Mata Rantai					
	• Stevedoring	Ekor	20.645	10.205	10.440	102
	• Cargodoring	Ekor	-	-	0	0
	• Receiving/Delivery	Ekor	-	-	0	0
	Kerjasama Pelayanan B/M	Ekor	109.304	108.629	675	1

PENDAPATAN BIDANG USAHA NONPETI KEMAS TAHUN 2018

Secara keseluruhan, di tahun 2018 bidang usaha Nonpeti Kemas mencatatkan pendapatan sebesar Rp961 miliar, naik Rp188 miliar atau 24% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp722 miliar. Peningkatan pendapatan bidang usaha Nonpeti Kemas didukung dari meningkatnya semua sub-bidang usaha dengan rata-rata peningkatan sebesar 29,5%.

PENDAPATAN BIDANG USAHA NONPETI KEMAS TAHUN 2017 - 2018

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pelayanan Nonpeti Kemas General Cargo	251.137.592	215.654.959	35.482.633	16
Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Kering	516.296.818	408.265.094	108.031.724	26
Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Cair	192.022.747	147.455.952	44.566.795	30
Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan	1.543.418	1.057.347	486.071	46
JUMLAH	961.000.575	772.433.352	188.567.223	24

**PELAYANAN NONPETI KEMAS GENERAL CARGO**

Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas *General Cargo* tahun 2018 tercatat sebesar Rp251 miliar, naik Rp35 miliar atau 16% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp215 miliar. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh meningkatnya aktivitas bongkar muat dan penumpukan barang di berbagai pelabuhan, serta kenaikan tarif.

PELAYANAN NONPETI KEMAS CURAH KERING

Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Kering tahun 2018 tercatat sebesar Rp516 miliar, naik Rp108 miliar atau 26% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp408 miliar. Hal ini didukung dari adanya pendapatan silo di Terminal Teluk Lamong serta peningkatan bongkar muat *stevedoring* diberbagai pelabuhan.

PELAYANAN NONPETI KEMAS CURAH CAIR

Pendapatan Nonpeti Kemas Curah Cair tahun 2018 tercatat sebesar Rp192 miliar, naik Rp44 miliar atau 30% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp147 miliar. Hal tersebut didukung oleh peningkatan kegiatan bongkar muat curah cair di Pelabuhan Tanjung Perak, tercapainya produksi dan target pendapatan jasa dermaga di Pelabuhan Tanjung Emas, peningkatan kegiatan muat CPO melalui Pelabuhan Bagendang, dan lain-lain.

PELAYANAN NONPETI KEMAS GENERAL CARGO

Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas *General Cargo* tahun 2018 tercatat sebesar Rp251 miliar, naik Rp35 miliar atau 16% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp215 miliar. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh meningkatnya aktivitas bongkar muat dan penumpukan barang di berbagai pelabuhan, serta kenaikan tarif.

PELAYANAN NONPETI KEMAS HEWAN

Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,54 miliar, naik Rp486 juta atau 46% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,05 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi arus hewan di Dermaga dan naiknya produksi Kerjasama Bongkar Muat di beberapa cabang pelabuhan.

BIDANG USAHA PENUNJANG

Bidang usaha penunjang terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang,
2. Pelayanan Pelra,
3. Pengusahaan Alat,
4. Pengusahaan Properti,
5. Pengusahaan Air dan Listrik,
6. Pelayanan Terminal Penumpang dan Usaha Lainnya,
7. Pelayanan *Forwarding*,
8. Pelayanan TUKS dan *Marine Service*.

Berikut merupakan informasi mengenai produksi dan pendapatan dari bidang Pengusahaan Properti di tahun 2018.

PRODUKSI PENGUSAHAAN PROPERTI TAHUN 2018

1. Realisasi Pengusahaan Lahan Sewa tahun 2018 tercatat sebesar 10.161.519 M2, naik 636.711 M2 atau 7% bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 9.524.808 M2. Kondisi ini didukung dari adanya peningkatan sewa lahan oleh PT Samudera Aparatus.
2. Kapasitas produksi berdasarkan *Throughput Fee/Kontribusi* di tahun 2018 tercatat sebesar 2.631.151 ton, turun 3.688.502 ton atau 58% bila dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 6.319.653 ton. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penambahan luas lahan yang disewakan atau dikerjasamakan pada tahun 2018 seperti di pelabuhan Gresik dan Tanjung Emas.
3. Realisasi kapasitas produksi Pengusahaan Perairan di tahun 2018 tercatat sebesar 858.860 M2, relatif sama dengan tahun 2017 yang tercatat 866.048 M2.
4. Realisasi Pengusahaan Bangunan pada tahun 2018 tercatat sebesar 199.608 M2, naik 146.361 M2 atau 275% bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 53.247 M2. Hal tersebut didukung oleh penambahan jumlah kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan sewa bangunan khususnya gudang yang ada di wilayah kerja Pelindo III.
5. Realisasi kapasitas produksi Konsolidasi dan Distribusi Barang tahun 2018 tercatat sebesar 250.757 paket, naik sebesar 47.110 paket atau 23% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 203.647 paket. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penambahan luasan lahan konsolidasi atas lahan ex PT Japfa Comfeed yang digunakan oleh PT SPIL.

PRODUKSI PENGUSAHAAN PROPERTI 2018

NO.	URAIAN	SATUAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
					NOMINAL	%
1.	Pengusahaan Lahan					
	Sewa	M ²	10.161.519	9.524.808	636.711	7
	Throughput Fee/Kontribusi	Ton	2.631.151	6.319.653	(3.688.502)	(58)
		Unit	28	-	28	-
2.	Pengusahaan Perairan	M ²	858.860	866.048	(7.188)	(1)
3.	Pengusahaan Bangunan	M ²	199.608	53.247	146.361	275
		M ³	-	-	-	-
4.	Konsolidasi dan Distribusi Barang	Paket	250.757	203.647	47.110	23

PENDAPATAN PENGUSAHAAN PROPERTI TAHUN 2018

Secara keseluruhan, Pengusahaan Properti mencatatkan pendapatan tahun 2018 sebesar Rp362 miliar, turun Rp137 miliar atau 27% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2017 sebesar Rp499 miliar. Penurunan ini dikarenakan jumlah kontrak yang diperbarui dan kontrak baru terkait dengan pengusahaan properti yang tidak sesuai target.

PENDAPATAN PENGUSAHAAN PROPERTI 2018

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pengusahaan Lahan	268.216.237	417.627.761	(149.411.524)	(36)
Pengusahaan Perairan	96.102	198.882	(102.780)	(52)
Pengusahaan Bangunan	19.169.055	15.780.287	3.388.768	21
Paket Pengusahaan Properti	104.203.591	66.292.367	37.911.224	57
JUMLAH	391.684.984	499.899.297	(108.214.313)	(22)



KINERJA ENTITAS ANAK

Pelindo III memiliki sejumlah Anak Perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Kinerja Anak Perusahaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS) mengoperasikan Terminal di bagian barat Tanjung Perak yang bekerja sama dengan Dubai Port World. Dengan berpegang pada nilai Perusahaan *Service Excellence*, Anak Perusahaan yang telah berdiri sejak 1999 ini menyediakan pelayanan terminal pelabuhan untuk kapal-kapal Internasional dan domestik.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan PT TPS ialah berusaha di bidang jasa terminal peti kemas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT TPS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pelaksanaan pengusahaan jasa pelayanan operasi kapal, operasi lapangan dan operasi gudang serta penyediaan dan pengusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan petikemas, dan air bagi kapal-kapal petikemas yang bertambat di terminal peti kemas.
2. Perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, pengusahaan dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gudang, pas, dan parkir), serta usaha jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal peti kemas.
3. Pelaksanaan penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan bongkar muat peti kemas.
4. Perencanaan dan pengelolaan keuangan logistik untuk terminal peti kemas.
5. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan terminal peti kemas.

AKTIVITAS USAHA PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA TAHUN 2018

Berbagai upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas sepanjang tahun 2018 dilakukan oleh PT TPS, mulai dari sistem pelayanan yang telah berbasis online seperti Fastpay dan Qlique247, klasterisasi pandu, dan elektrifikasi alat bongkar muat.

Online booking system untuk peti kemas impor telah diimplementasikan sejak Juli 2018, dimana sistem ini mempermudah pelanggan dalam mencetak *Job Order Delivery* secara online. Sementara itu, *online booking export* sudah diimplementasikan sejak November 2018.

Berbagai penghargaan diterima oleh TPS di 2018, misalnya Penghargaan Kecelakaan Nihil dan Penghargaan Implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) dengan kategori memuaskan yang diadakan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Penghargaan Pelayanan Prima pada Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi tahun 2018 dengan predikat Prima Utama oleh Kementerian Perhubungan, dan SNI Award tahun 2018.

KINERJA PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA TAHUN 2018

Pada tahun 2018, PT TPS mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp2.708 miliar, naik Rp290 miliar atau 112% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2.419 miliar. Peningkatan pada Pendapatan tersebut menyebabkan laba bersih meningkat sebesar Rp146 miliar atau 114%, menjadi Rp1.202 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp1.056 miliar. Perubahan pada laba bersih terutama disebabkan oleh peningkatan arus kapal dan barang.

Dengan produksi yang ada sekarang, PT TPS memimpin dalam hal produksi yaitu 1.203.009 TEUs selama tahun 2018. Sedangkan jumlah aset PT TPS tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.885 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp441 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp 1.443 miliar.

KINERJA PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha	2.708.645	2.419.892	288.753	12%
Beban Usaha	(1.095.750)	(1.011.112)	(84.638)	8%
Laba Usaha	1.612.895	1.408.780	204.115	14%
Beban Pajak	(424.566)	(36.324)	(388.242)	1069%
Laba Bersih	1.202.275	1.056.217	146.058	14%
Jumlah Aset	1.885.321	1.937.882	(52.561)	(3%)
Jumlah Liabilitas	441.712	387.040	54.672	14%
Jumlah Ekuitas	1.443.608	1.550.841	(107.233)	7%

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PT TPS pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp487.719 miliar atau 80% dari jumlah laba bersih PT TPS tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 10% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan pendanaan investasi PT TPS di tahun 2019.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Laba Bersih	1.202.275	1.056.217	146.058	14%
Dividen	485.719	480.050	5.669	1%
Payout Ratio	40,40%	45,45%	(0,05)	(11%)

PT PELINDO HUSADA CITRA (PHC)

PT Pelindo Husada Citra (PT PHC) merupakan *trauma centre* dan rumah sakit rujukan utama untuk penyakit jantung di wilayah timur Indonesia. Setelah berhasil melakukan operasi bedah jantung terbuka untuk pertama kalinya di Surabaya, PT PHC membangun beberapa klinik di kota lain dan mengembangkan asuransi kesehatan PHC Health Care untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama dalam bidang jasa pelayanan kesehatan. Bidang jasa pelayanan kesehatan tersebut dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan.
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesehatan.
3. Melaksanakan pelayanan jasa konsultan manajemen kesehatan.
4. Melaksanakan pelayanan farmasi dan peralatan kesehatan.
5. Melaksanakan pelayanan gizi masyarakat.
6. Melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan lainnya.

AKTIVITAS USAHA PT PELINDO HUSADA CITRA TAHUN 2018

Memulai bisnis di tahun 1999 dengan 1 rumah sakit tipe C di Surabaya, saat ini PT PHC telah berkembang dengan mengelola dan mengoperasikan 1 rumah sakit tipe B Pendidikan, 1 klinik utama, 5 klinik pratama, 24 klinik *first aid & K3* Perusahaan, serta 1 unit bisnis yang bergerak di bidang *food and beverages*, yakni PT Prima Citra Nutrindo.

Untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan dari pelanggan terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, PT Pelindo Husada Citra melalui RS PHC Surabaya dan Klinik PHC terus melakukan peningkatan pelayanan dengan melakukan pengembangan kompetensi tenaga medis secara kontinyu serta penambahan fasilitas alat medis berteknologi tinggi guna memperoleh hasil pemeriksaan dan penanganan medis yang lebih akurat, efektif, dan efisien dengan tetap mengedepankan keselamatan pasien.

Sebagai bagian dari komitmen PT PHC untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas terbaik, saat ini PT PHC telah menetapkan RS PHC Surabaya sebagai Pusat



Pelayanan Jantung. Dengan adanya pusat pelayanan ini, PT PHC berkomitmen menyediakan pelayanan komprehensif terkait jantung, mulai dari rangkaian perawatan, penyediaan alat penunjang medis terkini, *screening*, diagnosis, manajemen klinis, rehabilitasi dan pendidikan, hingga manajemen gizi sebagai sebuah “one stop service” kepada pasien.

Sebagai bagian yang integral dari Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, PT PHC pada tahun 2018 juga telah berinvestasi dengan melakukan pembelian alat medis berteknologi tinggi seperti MRI 1.5 Tesla generasi terbaru dengan teknologi *silent scan* serta alat *fixed cathlab* IGS 530 sebagai penunjang tindakan operasi pada kasus kardiologi, bedah saraf, dan radiologi.

Tak hanya fokus pada aspek kuratif dan rehabilitatif, PT PHC juga berfokus pada aspek preventif dengan melakukan redesign sistem dan layanan *medical check up* menjadi “one stop service”. Dimana dalam semua layanan *medical check up* terbaru, mulai dari pemeriksaan dan penunjang, telah

terintegrasi menjadi satu serta terpisah dengan pasien sakit. Sehingga, pemeriksaan *medical check up* menjadi semakin nyaman, efektif, dan efisien.

KINERJA PT PELINDO HUSADA CITRA TAHUN 2018

Pada tahun 2018, PT PHC mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp363 miliar, naik Rp33 miliar atau 10% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp330 miliar. Peningkatan yang tidak signifikan pada pendapatan tersebut menyebabkan laba bersih PT PHC pada tahun 2018 turun sebesar Rp3 miliar atau 22%, menjadi Rp11 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp14 miliar. Perubahan pada laba bersih terutama disebabkan oleh adanya beban usaha yang melampaui anggaran.

Sedangkan jumlah aset PT PHC tahun 2018 tercatat sebesar Rp307 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp89 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp217 miliar.

KINERJA PT PELINDO HUSADA CITRA

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha	363.331	330.181	33.150	10%
Beban Usaha	(346.506)	(312.052)	(34.454)	11%
Laba Usaha	16.825	18.129	(1.304)	(7%)
Beban Pajak	(5.184)	(5.687)	503	(9%)
Laba Bersih	11.062	14.209	(3.147)	(22%)
Jumlah Aset	307.165	293.575	13.590	5%
Jumlah Liabilitas	89.282	82.363	6.919	8%
Jumlah Ekuitas	217.883	211.212	6.671	3%

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PT PHC pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp3,7 miliar atau 34,03% dari jumlah laba bersih PT PHC tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 10% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan laba bersih Perusahaan di tahun 2018.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT PELINDO HUSADA CITRA

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Laba Bersih	11.062	14.208	(3.146)	(22%)
Dividen	3.765	4.205	(440)	(10%)
Payout Ratio	34,03%	29,59%	0,04	15%

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA (BJTI)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) yang sejak 2015 lalu melakukan *re-branding* menjadi "BJTI Port" ini tidak hanya melayani kapal-kapal domestik di Terminal Berlian dan sekitarnya, namun juga melayani kapal batu bara di Kalimantan dan mengembangkan kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) di Gresik, Jawa Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BJTI, maksud dan tujuan BJTI ialah:

1. Pengembangan usaha dalam bidang pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan peti kemas serta kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan distribusi barang, untuk menunjang kelancaran arus barang di pelabuhan serta mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Pengembangan usaha dalam bidang pelayanan jasa pengoperasian dan pemeliharaan alat bongkar muat peti kemas dan pengembangan kegiatan terminal lainnya untuk menunjang kelancaran arus barang di pelabuhan serta mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BJTI dapat menyediakan fasilitas serta melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Jasa terminal bongkar muat barang (curah cair, curah kering, dan *general cargo*) dan peti kemas;
2. Konsolidasi, distribusi, dan pengangkutan barang (*trucking*), serta transportasi multimoda;
3. Jasa terminal kapal *roll on-roll off* (Ro-Ro);
4. Jasa terminal bahan bakar minyak kapal dan suplai bahan bakar minyak kapal;
5. Jasa terminal kapal ikan dan kegiatan pendukungnya.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas BJTI dapat melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan Perusahaan antara lain:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar-muat, serta peralatan pelabuhan;
2. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi terminal dan/atau kepelabuhanan;
3. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, *cleaning*, fumigasi, serta pelayanan logistik;
4. Jasa timbangan;
5. Jasa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat bongkar muat peti kemas;
6. Usaha-usaha penunjang untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

AKTIVITAS USAHA PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA TAHUN 2018

Sejak didirikan dan menjadi bagian dari Pelindo III Grup, PT BJTI terus bertransformasi menjadi perusahaan jasa kepelabuhanan yang andal dan tepercaya. Berbagai inovasi dan peningkatan kinerja juga terus digenjut, bahkan untuk memperkuat kinerja operasi Terminal Berlian yang sekaligus bagian dari *continuous improvement* perusahaan, pada tahun 2018 PT BJTI menambah alat angkat baru berupa Harbour Mobile Crane (HMC) sebanyak 8 unit dengan 4 unit masing-masing berkapasitas 100 T dan 125 T serta Rubber Tyred Gantry (RTG) sejumlah 4 unit. Selain itu dalam upaya meningkatkan kinerja dari lapangan penumpukan yang dikuasai, PT BJTI juga menambah fasilitas pelayanan referer dimana sebelumnya PT BJTI telah memiliki 82 plug dan kini menjadi 112 plug dengan total kapasitas 1600KvA.

Tentunya dengan penambahan alat dan fasilitas yang telah dilakukan dapat meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan maksimal dan dapat menjadi andalan para pengguna jasa.

Tidak hanya itu, pada tahun 2018 PT BJTI berhasil menerima penghargaan predikat Prima Madya dari Kementerian Perhubungan atas penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi tahun 2018.

KINERJA PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA (BJTI)

Pada tahun 2018 PT BJTI mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp1.062 miliar, naik Rp130 miliar atau 14% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp931 miliar. Namun, secara konsolidasian laba bersih PT BJTI pada tahun 2018 menurun sebesar Rp106miliar atau 49%, menjadi Rp111 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp217 miliar. Perubahan pada laba bersih terutama disebabkan oleh bagian laba (rugi) entitas asosiasi.

Jumlah aset PT BJTI tahun 2018 tercatat sebesar Rp3.614 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp1.444 miliar dan jumlah ekuitas sebesar Rp2.170 miliar.

**KINERJA PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA**

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha	1.062.142	931.231	130.911	14%
Beban Usaha	(811.482)	(712.985)	(98.498)	14%
Laba Usaha	250.660	218.247	32.413	15%
Beban Pajak	(44.316)	(42.440)	(1.876)	4%
Laba Bersih	111.385	217.656	(106.271)	(49%)
Jumlah Aset	3.614.561	3.506.118	108.443	3%
Jumlah Liabilitas	1.444.332	1.346.444	97.887	7%
Jumlah Ekuitas	2.170.229	2.159.674	10.555	0,5%

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Perusahaan dari PT BJTI pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp41 miliar atau 36,94% dari jumlah laba bersih PT BJTI tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 67% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan penurunan laba bersih PT BJTI.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Laba Bersih	111.385	217.656	(106.271)	(49%)
Dividen	41.151	61.807	(20.656)	(33%)
Payout Ratio	36,94%	28.40%	0.09	30%

PT PELINDO MARINE SERVICE (PMS)

Dengan jenis produk jasa yang beragam, PT Pelindo Marine Service (PT PMS) merupakan salah satu penyedia jasa perkapalan terbaik. Mulai 2016, PT PMS melalui Cucu Perusahaan PT Pelindo Energi Logistik yang berbasis di Bali, akan menyediakan layanan distribusi gas dan minyak, terutama ke wilayah Indonesia bagian timur.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar PT PMS, maksud dan tujuan PMS adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman, baik nasional maupun internasional, dengan memberikan pelayanan prima yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PMS dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Jasa angkutan di perairan;
2. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan/atau jasa penundaan kapal;
3. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa mendorong dan/atau menarik kapal;
4. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa berbagai jenis kapal dan tongkang untuk kegiatan spesifik;
5. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa galangan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal;
6. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemenuhan kebutuhan logistik kapal dan/atau kru kapal;
7. Penyediaan kru kapal;
8. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal.

Selain kegiatan utama tersebut di atas, PMS dapat melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan PMS, antara lain:

1. Penyediaan pengelolaan jasa konsultasi, surveyor, dan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi perkapalan;
2. Penyediaan peralatan dan/atau perawatan peralatan di bidang perkapalan;
3. Jasa penyelamatan dan penyelaman (*salvage*).

AKTIVITAS USAHA PT PELINDO MARINE SERVICE TAHUN 2018

Pada tahun 2018, PT PMS memulai transformasi Perusahaan dari *paper-based administration* ke *paperless administration* dimana perubahan ini mendorong efisiensi beban Perusahaan dalam penggunaan kertas dan mendukung terciptanya *green company*.

Pada induk korporasi yakni PT PMS, pengembangan bisnis dilakukan melalui penambahan 12 Kapal Tunda Jayanegara Series (serah operasi dari Pelindo III) dan 9 Kapal Pandu Srikandi Series yang mulai beroperasi di tahun 2018. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Perusahaan dan pelayanan Perusahaan kepada pelanggan, terutama ke Induk Perusahaan yakni Pelindo III.

Sejalan dengan pengembangan bisnis yang dilakukan oleh PT PMS, Anak Perusahaan juga melakukan berbagai pengembangan bisnis guna mencapai target kinerja tahun 2018.

Sejak 2018, tarif alur di PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) telah berlaku penuh 100% dimana pada tahun 2017 tarif yang diberlakukan adalah tarif dengan diskon 50%. Berlakunya tarif penuh di tahun ini turut mendorong kinerja Perusahaan, sehingga laba dapat tercapai cukup baik.

Di tahun ini, tantangan cukup berat dirasakan oleh PT PE Logistik, dimana di tahun ini terjadi penurunan tarif distribusi gas. Hal ini berdampak cukup signifikan bagi kinerja Perusahaan, meskipun begitu Perusahaan terus berupaya guna mencapai kinerja laba positif.

Tahun ini merupakan tahun ke dua bagi PT Berkah Multi Cargo (PT BMC) beroperasi secara penuh. Pengembangan bisnis dilaksanakan melalui kerjasama relokasi CC dengan pihak afiliasi dan *set-up* depo-depo baru. Tahun ini merupakan titik balik PT BMC dimana di tahun ini berhasil mencatatkan hasil positif dengan terciptanya laba.

KINERJA PT PELINDO MARINE SERVICE TAHUN 2018

Pada tahun 2018, PT PMS secara konsolidasi mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp1.690 miliar, naik Rp511 miliar atau 43% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.179 miliar. Peningkatan pada pendapatan tersebut menyebabkan laba bersih PT PMS pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp85 miliar, menjadi Rp204 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp118 miliar. Perubahan pada laba bersih terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pelayanan kapal yang berasal dari pengenaan tarif 100% di PT APBS.

Sedangkan jumlah aset PT PMS tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.515 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp883 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp632 miliar. Perubahan terbesar dapat dilihat dari jumlah aset pada tahun 2018 disebabkan oleh penambahan unit kapal sebagai aset tetap.

KINERJA PT PELINDO MARINE SERVICE

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha	1.690.959	1.179.141	511.818	43%
Beban Usaha	(1.422.910)	(1.006.223)	(416.687)	41%
Laba Usaha	268.049	172.918	95.131	55%
Beban Pajak	(45.782)	(44.315)	(1.467)	3%
Laba Bersih	204.629	118.901	85.728	72%
Jumlah Aset	1.515.961	1.328.498	187.463	14%
Jumlah Liabilitas	883.941	762.705	121.236	16%
Jumlah Ekuitas	632.020	565.793	66.227	12%



DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PT PMS pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp76,2 miliar atau 40% dari jumlah laba bersih PT PMS tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 263% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bersih serta keputusan Pemegang Saham untuk meningkatkan *payout ratio* di tahun 2018.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT PELINDO MARINE SERVICE

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Laba Bersih	204.629	118.901	85.728	72%
Dividen	76.247	29.033	47.214	163%
Payout Ratio	37,26%	24,42%	0,13	53%

PT TERMINAL TELUK LAMONG

Multi-Purpose Terminal di Teluk Lamong dibangun dengan kade sedalam 13 LWS dan dilengkapi peralatan-peralatan canggih yang mendukung modernisasi dan otomatisasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Terminal yang pada 2015 lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini mengusung konsep *Go Green* dengan menggunakan bahan bakar gas dan meminimalkan emisi dari keseluruhan proses bisnisnya. Hal ini merupakan bentuk kontribusi Pelindo III Group terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

PT Terminal Teluk Lamong (PT TTL) telah menginisiasi modernisasi operasi kepelabuhan dalam rangka mengurangi tingkat emisi dan mengoptimalkan biaya operasional melalui otomatisasi fasilitas pelabuhan yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat baik bagi bisnis dan lingkungan.

PT TTL menggunakan teknologi informasi dalam sebagian besar proses bisnisnya, dimana pelayanan jasa di PT TTL menggunakan *online platform* sebagai medianya. Pengguna jasa pun dimudahkan dengan proses yang *paperless*, cepat, dan mudah. Metode ini sekaligus yang pertama kali diadakan di lingkungan maritim Indonesia.

Berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, SH, MH, No. 309 tanggal 30 Desember 2013 pasal 3, maksud dan tujuan TTL adalah melakukan usaha dalam bidang jasa usaha kepelabuhanan yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, TTL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa pelaksanaan perusahaan jasa-jasa operasi kapal (bongkar muat), operasi lapangan dan operasi gudang, serta penyediaan

- dan perusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan peti kemas, barang curah, *general cargo* (termasuk hewan), dan kendaraan (ro-ro), barang curah dan *multi-purpose*, serta fasilitas naik turunnya penumpang;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa peti kemas, barang curah, *multi-purpose*, penumpang, dan ro-ro;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang termasuk curah, angkutan bandar, alat bongkar-muat, peralatan pelabuhan, serta peralatan penunjang lainnya;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri, dan gedung-gedung/ bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan multimoda;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan utilitas pelabuhan termasuk tetapi tidak terbatas pada telekomunikasi, listrik, air minum/air kapal, instalasi limbah, serta pengelolaan sampah;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal dan kendaraan di lingkungan Pelabuhan;
9. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan serta pelayanan logistik;
10. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
11. Perusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, *cleaning fumigasi*;
12. Perusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara;
13. Perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, perusahaan dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gedung, pas, dan parkir), serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal peti kemas, barang curah, dan *multi purpose*;
14. Pelaksanaan penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan bongkar muat peti kemas, barang curah, dan *multi-purpose*;

15. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan logistic untuk terminal peti kemas, barang curah, dan multi-purpose.

AKTIVITAS USAHA PT TERMINAL TELUK LAMONG TAHUN 2018

Arus peti kemas domestik dan internasional PT TTL mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018. Pada arus peti kemas domestik terjadi peningkatan 144.350 TEUs atau 29.307%. Pada peti kemas internasional angka arus meningkat 112.400 TEUs atau 53.626%. Hal yang sama terjadi pada operasional curah kering meningkat 1.324.746 ton atau 109.370%.

Atas kinerja dan pelayanan tahun 2018, PT TTL berhasil mendapatkan penghargaan pelayanan prima kategori Prima Utama dari Kementerian Perhubungan, *the Most Creative Company* versi majalah SWA, SNI Awards kategori Perusahaan Besar Jasa dari Badan Standardisasi Nasional, dan TOP CSR 2018

KINERJA PT TERMINAL TELUK LAMONG TAHUN 2018

Pada tahun 2018, PT TTL mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp697 miliar, naik Rp284 miliar atau 69% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp412 miliar. Peningkatan pada pendapatan tersebut menyebabkan laba bersih PT TTL pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp112 miliar, menjadi Rp203 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp90 miliar. Perubahan pada laba bersih terutama disebabkan oleh meningkatnya arus peti kemas, kapal, dan juga curah kering yang dilayani oleh PT TTL.

Sedangkan jumlah aset PT TTL tahun 2018 tercatat sebesar Rp566 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp266 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp299 miliar. Peningkatan terbesar dapat dilihat dari jumlah ekuitas pada tahun 2018 disebabkan oleh laba usaha tahun berjalan menjadi sebesar Rp203 miliar yang sebelumnya Rp90 miliar pada tahun 2017 karena membaiknya performa bisnis PT TTL.

KINERJA PT TERMINAL TELUK LAMONG

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha	697.095	412.483	284.612	69%
Beban Usaha	(436.935)	(290.302)	(146.633)	51%
Laba Usaha	260.160	122.181	137.979	113%
Beban Pajak	(65.496)	(31.333)	(34.163)	109%
Laba Bersih	203.589	90.627	112.962	125%
Jumlah Aset	566.119	368.018	198.101	54%
Jumlah Liabilitas	266.474	232.651	33.823	15%
Jumlah Ekuitas	299.645	135.366	164.279	121%

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PT TTL pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp77 miliar atau 37,88% dari jumlah laba bersih PT TTL tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017, dimana PT TTL belum dapat memberikan kontribusi dividen dikarenakan saldo laba Perusahaan yang masing negatif di akhir tahun 2017.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT TERMINAL TELUK LAMONG

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Laba Bersih	203.589	90.627	112.962	125%
Dividen	77.112	-	77.112	0%
Payout Ratio	37,88%	0,00%	0,38	0%



PT PELINDO DAYA SEJAHTERA (PDS)

Melalui PT Pelindo Daya Sejahtera (PT PDS), Pelindo III Group berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja alih daya di lingkungan Pelindo III Group. PT PDS aktif mengadakan pelatihan dan pengembangan dan saat ini telah mendirikan anak perusahaan yang khusus menyediakan tenaga kerja *tally* di Semarang dengan nama PT Tanjung Emas Daya Sejahtera.

PT PDS merupakan Anak Perusahaan yang menaungi tenaga kerja alih daya di lingkungan Perusahaan. PT PDS didirikan atas dasar komitmen Perusahaan untuk menjamin kesejahteraan pegawainya baik organik maupun alih daya. Fokus utama PT PDS adalah memberikan layanan kepada industri kepelabuhanan dan industri pelayaran. Secara bertahap cakupan dan jenis layanan dikembangkan ke Perusahaan atau institusi bisnis lain.

Saat ini, PT PDS tidak hanya menyediakan tenaga alih daya yang menangani kegiatan industri kepelabuhanan tetapi juga *non-core* yang meliputi tetapi juga *tally*, sekretaris, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, operator alat hingga ke *entry data services*. Sebagai penyedia tenaga alih daya, PT PDS aktif mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM PT PDS sehingga dapat mendukung kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, PT PDS bergerak dalam jasa penyediaan tenaga kerja. Untuk mencapai hal tersebut Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kebersihan;
2. Menjalankan usaha dalam bidang jasa ekspedisi, pengepakan, dan pergudangan;
3. Menjalankan usaha dalam bidang jasa keamanan;
4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penerimaan dan penyaluran tenaga kerja;
5. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penjahitan pakaian;
6. Menjalankan usaha dalam bidang jasa fotokopi;
7. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penjualan tiket dan tour;
8. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyewaan kendaraan roda empat; dan
9. Menjalankan jasa pendidikan dan pelatihan.

AKTIVITAS USAHA PT PELINDO DAYA SEJAHTERA TAHUN 2018

Di tahun 2018, PT PDS melanjutkan langkah besar dari tahun sebelumnya dengan melakukan ekspansi usaha di luar lingkungan Pelindo III Group. Pada pertengahan 2018, PT PDS telah memulai kerja sama dengan Bank BTN Cabang Banjarmasin dalam penyediaan tenaga alih daya. Kerja sama ini menandai langkah PT PDS menjajaki pasar *non-captive*. Selain itu, PT PDS melalui Pelindo Development Center juga turut menyumbangkan catatan positif melalui kerjasama dengan Jawa Pos dan PT Swabina Gatra (anak perusahaan PT Semen Indonesia) dalam kegiatan asesmen dan rekrutmen (psikotes). Sejumlah pelatihan juga telah diselenggarakan PT PDS melalui Pelindo Development Center di tahun 2018, misalnya penyelenggaraan Diklat Pandu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dan *basic safety training* bekerja sama dengan Politeknik Perkapalan Surabaya dan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

KINERJA PT PELINDO DAYA SEJAHTERA TAHUN 2018

Pada tahun 2018, PT PDS mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp354 miliar, naik Rp79 miliar atau 29% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp275 miliar. Namun, karena adanya peningkatan pada beban usaha, laba bersih PT PDS pada tahun 2018 menurun sebesar Rp4,3 miliar, menjadi Rp11 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp15 miliar. Peningkatan beban usaha utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pegawai dan asuransi, megikuti pertumbuhan positif jumlah pegawai PT PDS.

Sedangkan jumlah aset PT PDS tahun 2018 tercatat sebesar Rp110 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp59 miliar dan jumlah ekuitas sebesar Rp51 miliar. Perubahan terbesar dapat dilihat dari jumlah aset pada tahun 2018 disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang masih akan diterima dari pihak berelasi dan pihak ketiga.

KINERJA PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha	354.339	275.217	79.122	29%
Beban Usaha	(337.222)	(254.696)	(82.526)	32%
Laba Usaha	17.118	20.521	(3.404)	(17%)
Beban Pajak	(5.766)	(5.903)	137	(2%)
Laba Bersih	11.411	15.808	(4.396)	(28%)
Jumlah Aset	110.815	85.777	25.038	29%
Jumlah Liabilitas	59.322	38.665	20.657	53%
Jumlah Ekuitas	51.493	47.112	4.381	9%

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Perusahaan dari PT PDS pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau 31,40% dari jumlah laba bersih PT PDS tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 17% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2017.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Laba Bersih	11.411	15.808	(4.396)	(28%)
Dividen	3.583	4.261	(677)	(16%)
Payout Ratio	31,40%	26,95%	0,04	17%



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Pelindo III yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian Pelindo III dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan, disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Sampai dengan akhir tahun 2018, Pelindo III berhasil mencatatkan kenaikan aset sebesar Rp4,7 triliun atau 18% menjadi Rp30,5 triliun. Liabilitas per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp20,1 triliun, naik Rp3,7 triliun atau 23% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp16,4 triliun.

Kenaikan aset ini, utamanya dipicu oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 68% dibandingkan tahun 2017 seiring dengan kenaikan pendapatan usaha Perusahaan di tahun 2018. Sedangkan kenaikan liabilitas disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang yang berasal dari utang global bond.

LAPORAN POSISI KEUANGAN 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Aset	30.505.715	25.751.099	4.754.616	18%
• Aset Lancar	6.462.869	4.194.078	2.268.791	54%
• Aset Tidak Lancar	24.042.847	21.557.021	2.485.826	12%
Liabilitas	20.150.402	16.385.484	3.764.918	23%
• Liabilitas Jangka Pendek	3.574.313	3.308.624	265.689	8%
• Liabilitas Jangka Panjang	16.576.088	13.076.860	3.499.228	27%
Ekuitas	10.355.314	9.365.615	989.699	11%

Perubahan pada nilai aset dan liabilitas per tanggal 31 Desember 2018 tersebut menyebabkan nilai ekuitas meningkat sebesar Rp989 miliar atau 11% menjadi Rp10,3 triliun di akhir tahun 2018 bila dibandingkan dengan Rp9,3 triliun di tahun 2017.

ASET

Pada akhir tahun 2018, jumlah aset Perusahaan tercatat sebesar Rp30,5 triliun yang terdiri dari 21% aset lancar dan 79% aset tidak lancar. Nilai jumlah aset ini meningkat Rp4,7 triliun atau 18% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp25,7 triliun. Peningkatan aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset lancar sebesar 54% dari tahun sebelumnya.

ASET LANCAR

Per 31 Desember 2018, Pelindo III berhasil mencatatkan jumlah aset lancar sebesar Rp6,46 triliun, naik Rp2,26 triliun atau 54% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp4,19 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan posisi kas yang terjadi akibat penerbitan Global Bond.

ASET LANCAR 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Kas dan Setara Kas	4.612.047	2.750.527	1.861.520	68%
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	5.149	-	-
Investasi Jangka Pendek	57.920	10.988	46.932	427%
Piutang Usaha	856.737	616.093	240.644	39%
Piutang Lain-Lain	298.768	225.621	73.147	32%
Persediaan	52.115	25.023	27.092	108%
Pendapatan Masih akan Diterima	317.663	210.411	107.252	51%
Beban Dibayar Dimuka	98.388	34.243	64.145	187%
Pajak Dibayar Dimuka	146.710	291.446	(144.736)	(50%)
Aset Lancar Lainnya	22.519	24.575	(2.056)	(8%)
JUMLAH	6.462.869	4.194.078	2.268.791	54%

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp4,61 triliun, naik Rp1,86 triliun atau 68% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp2,75 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan hutang pinjaman sindikasi (Bank BRI, BNI, dan Mandiri), penerimaan hutang obligasi, serta sejalan dengan capaian serapan progres fisik investasi.

KAS DAN SETARA KAS 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Kas	2.107	2.815	(708)	(25%)
Bank	657.440	715.356	(57.916)	(8%)
Deposito Berjangka	3.952.500	2.032.355	1.920.145	94%
JUMLAH	4.612.047	2.750.527	1.861.520	68%

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Kas yang dibatasi penggunaannya sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat nihil, sementara di 2017 tercatat Rp5,15 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan oleh berakhirnya jangka waktu kas yang dibatasi penggunaannya dari pihak berelasi yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek tercatat meningkat sebesar Rp46,9 miliar atau 427% menjadi Rp57,9 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp10,9 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penempatan deposito berjangka di 5 bank,

yaitu PT Bank BNI Syariah sebesar Rp10,7 miliar; PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp8 miliar; PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp8 miliar; PT Bank Muamalat Tbk sebesar Rp9.917 miliar; dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp36,2 miliar.

PIUTANG USAHA

Piutang usaha tercatat meningkat sebesar Rp241 miliar atau 39% menjadi Rp857 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp616 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pelayanan peti kemas di akhir tahun 2018.

**PIUTANG USAHA 2017-2018**

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pihak Berelas	340.360	219.579	120.781	55%
Pihak Ketiga	516.377	396.513	119.864	30%
JUMLAH	856.737	616.093	240.644	39%

PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain tercatat meningkat sebesar Rp73 miliar atau 32% menjadi Rp299 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp226 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang bunga pinjaman PT BKMS di BJTI dari Rp137.931.727 menjadi Rp208.881.831.

PIUTANG LAIN-LAIN 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pihak Berelasi	262.531	194.736	67.795	35%
Pihak Ketiga	36.237	27.384	8.853	32%
JUMLAH	298.768	225.621	73.147	32%

PERSEDIAAN

Persediaan tercatat meningkat sebesar Rp27 miliar atau 108% menjadi Rp52 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp25 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan suku cadang sebesar 173%.

Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan tingkat perputaran persediaan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 persediaan tidak dijamin.

PERSEDIAAN 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Suku Cadang	39.183	14.361	24.822	173%
Obat Medis	3.234	3.591	(357)	(10%)
Bahan Bakar dan Pelumas	7.726	5.610	2.116	38%
Lain-lain	3.113	2.306	807	35%
Subtotal	53.256	25.959	27.297	105%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1.141	936	205	22%
JUMLAH	52.115	25.023	27.092	108%

PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan masih akan diterima merupakan pendapatan yang belum difakturkan. Jumlah pendapatan masih akan diterima tercatat meningkat sebesar Rp107 miliar atau 51% menjadi Rp318 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp210 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan yang akan diterima baik dari pihak ketiga maupun pihak berelasi masing-masing sebesar 51% dibanding 2017.

BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Beban dibayar dimuka tercatat meningkat sebesar Rp64 miliar atau 187% menjadi Rp98 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp34 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban dibayar di muka pada pos pegawai sebesar 2199%.

BEBAN DIBAYAR DI MUKA 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pegawai	58.296	2.536	55.760	2199%
Asuransi	19.685	27.086	(7.401)	(27%)
Sewa	20.408	4.621	15.787	342%
JUMLAH	98.388	34.243	64.145	187%

PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Pajak dibayar di muka tercatat menurun sebesar Rp145 miliar atau 50% menjadi Rp147 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp291 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pos PPN - Masukan Perusahaan sebesar 66% dan pos PPN - Masukan Entitas Anak sebesar 50%.

ASET TIDAK LANCAR

Per 31 Desember 2018, Perusahaan mencatatkan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp24 triliun, naik Rp2,5 triliun atau 12% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp21,5 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada aset tidak lancar lainnya, yaitu sebesar 241%.

ASET TIDAK LANCAR 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Investasi pada Entitas Asosiasi	1.090.566	1.182.361	(91.795)	(8%)
Properti Investasi	103.268	103.247	21	0%
Aset Tetap	16.231.547	14.096.408	2.135.139	15%
Aset Pajak Tangguhan	263.407	350.196	(86.789)	(25%)
Aset Tak Berwujud	5.147.470	5.152.884	(5.414)	0%
Estimasi Tagihan Pajak	430.661	444.237	(13.576)	(3%)
Aset Tidak Lancar Lainnya	775.928	227.687	548.241	241%
JUMLAH	24.042.847	21.557.021	2.485.826	12%

INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Investasi pada entitas asosiasi sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,09 triliun, turun Rp91 miliar atau 8% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,18 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan investasi pada 4 (empat) entitas asosiasi yaitu PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, PT Terminal Nilam Utara, PT Jasamarga Bali Tol (JBT), PT Terminal Peti Kemas Indonesia dengan penurunan rata-rata 4%.

**INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 2017-2018**

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	909.525	972.185	(62.660)	(6%)
PT Terminal Nilam Utara	68.786	69.289	(503)	(1%)
PT Jasamarga Bali Tol (JBT)	60.549	69.550	(9.001)	(13%)
PT Terminal Peti Kemas Indonesia	32.588	33.779	(1.191)	(4%)
PT Ambang Barito Nusapersada	18.797	15.988	2.809	18
PT Energi Manyar Sejahtera	321	313	8	3
PT Portek Indonesia	-	21.257	-	-
JUMLAH	1.090.567	1.182.361	(91.794)	(8%)

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp103 miliar. Angka tersebut relatif sama dengan kondisi di tahun 2017.

ASET TETAP

Aset tetap tercatat meningkat sebesar Rp2,13 triliun atau 15% menjadi Rp16,23 triliun per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp14,09 triliun. Di tahun 2018, terdapat reklasifikasi serta revaluasi pada aset tetap yang mencakup pemindahan aset alat fasilitas pelabuhan ke aset tidak lancar lainnya.

ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset pajak tangguhan tercatat turun sebesar Rp87 miliar atau 25% menjadi Rp263 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp350 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh amortisasi fiskal yang lebih besar dibandingkan amortisasi secara komersial dimana masa manfaat aktiva tidak berwujud yang ditetapkan secara komersial mengikuti masa konsesi, sedangkan masa manfaat yang ditetapkan secara fiskal mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.

ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud pada 2018 tercatat sebesar Rp5,14 triliun. Nilai ini relatif sama dengan kondisi pada 2017. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

ESTIMASI TAGIHAN PAJAK

Estimasi Tagihan Pajak tercatat menurun sebesar Rp13,5 miliar atau 3% menjadi Rp431 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp444 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena Perusahaan pada tahun 2018 telah menerima pengembalian tagihan pajak atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp137,8 miliar. Sedangkan permohonan restitusi pajak untuk tahun 2018 nilainya lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tagihan pajak yang telah dikembalikan.

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya tercatat meningkat sebesar Rp548 miliar atau 241% menjadi Rp776 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp228 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya nilai uang muka pembelian aset tetap sebesar 242% dan nilai aset tetap lainnya sebesar 230%.

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Piutang dalam Kepengurusan Negara	17.636	17.636	-	-
Penyisihan Piutang dalam Kepengurusan Negara	(17.636)	(17.636)	-	-
Subtotal	0	0	-	-
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	676.634	197.628	479.006	242
Aset Lain-Lain – Neto	99.293	30.059	69.234	230
JUMLAH	775.928	227.687	548.241	241

LIABILITAS

Pada akhir tahun 2018, jumlah liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp20 triliun yang terdiri dari 18% liabilitas jangka pendek dan 82% liabilitas jangka panjang. Nilai jumlah liabilitas ini meningkat Rp3,8 triliun atau 23% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp16,4 triliun. Peningkatan liabilitas tersebut terutama berasal naiknya nilai liabilitas jangka panjang sebesar 27%. Selain itu, liabilitas jangka pendek juga turut meningkat sebesar 8% sampai dengan akhir tahun 2018.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Per 31 Desember 2018, Perusahaan mencatatkan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp3,57 triliun, naik Rp266 miliar atau 8% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp3,30 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya utang pajak sebanyak 106%.

LIABILITAS JANGKA PENDEK 2018

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pinjaman Bank Jangka Pendek	-	677.400	-	-
Utang Usaha	606.560	705.805	(99.245)	(14%)
Utang Lain-Lain	698.913	397.198	301.715	76
Utang Pajak	260.741	126.440	134.301	106
Beban Akrual	1.287.510	824.294	463.216	56
Pendapatan Diterima di Muka Jangka Pendek	306.552	241.568	64.984	27
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang	413.954	328.517	85.437	26
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	82	7.401	7.319	99
JUMLAH	3.574.313	3.308.624	265.689	8

UTANG USAHA

Utang usaha sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp606 miliar, turun Rp99 miliar atau 14% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp706 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya utang usaha pada pihak berelasi sebesar 25%.

UTANG USAHA 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pihak Berelasi	527.416	700.197	(172.781)	(25%)
Pihak Ketiga	79.144	5.607	73.537	1312%
JUMLAH	606.560	705.805	(99.245)	(14%)

UTANG PAJAK

Utang pajak sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp261 miliar, naik Rp134 miliar atau 106% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp126 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan laba usaha di Anak Perusahaan yang menyebabkan jumlah kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan pada Anak Perusahaan juga meningkat.

BEBAN AKRUAL

Beban akrual tercatat meningkat sebesar Rp463 miliar atau 56% menjadi Rp1,28 triliun per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp824 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya nilai beban akrual pada pos kerja sama mitra usaha dan juga pada pos bunga dengan kenaikan masing-masing sebesar 123%.

**PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK**

Pendapatan diterima di muka jangka pendek tercatat meningkat sebesar Rp65 miliar atau 27% menjadi Rp306 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp241 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada uang untuk diperhitungkan pihak ketiga sebesar 208% dan pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik sebesar 292%.

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK 2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Uang untuk Diperhitungkan:	226.439	181.280	45.159	25%
Pihak Ketiga	191.086	62.106	128.980	208%
Pihak Berelasi	35.352	119.174	(83.822)	(70%)
Pelayanan Jasa Perusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik	26.699	6.805	19.894	292%
Lain-lain	650	1.244	(594)	(48%)
Bagian Lancar Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang	52.764	52.240	524	1%
JUMLAH	306.552	241.568	64.984	27%

BAGIAN LANCAR ATAS LIABILITAS JANGKA PANJANG

Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang tercatat meningkat sebesar Rp85 miliar atau 26% menjadi Rp414 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp328 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan dari meningkatnya jumlah utang bank sebesar 7% dan juga meningkatnya utang sewa pembiayaan menjadi Rp63 miliar dimana pada tahun 2017 tercatat nihil.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Per 31 Desember 2018, Perusahaan mencatatkan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp16,58 triliun, naik Rp3,5 triliun atau 27% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp13,07 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos surat berharga yang diterbitkan sebesar 113%.

LIABILITAS JANGKA PANJANG 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Liabilitas Pajak Tangguhan	63.213	62.588	625	1%
Liabilitas Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian lancar:				
Utang Bank	256.387	3.582.376	(3.325.989)	(93%)
Utang Sewa Pembiayaan	-	63.257	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan	14.329.613	6.714.419	7.615.194	113%
Liabilitas Imbalan Kerja	1.572.168	2.318.610	(746.442)	(32%)
Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang	353.005	330.999	22.006	7%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	1.702	4.610	(2.908)	(63%)
JUMLAH	16.576.088	13.076.860	3.499.228	27%

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp63 miliar, naik Rp625 juta dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp62 miliar.

SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Surat berharga yang diterbitkan tercatat meningkat sebesar Rp7,6 triliun atau 113% menjadi Rp14,3 triliun per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp6,7 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perusahaan kembali menerbitkan obligasi global (senior notes) USD 500.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 24 April 2018.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja tercatat menurun sebesar Rp746 miliar atau 32% menjadi Rp1,6 triliun per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp2,3 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya angka pada akun program kesehatan pensiunan sebesar 40% dibandingkan tahun 2017.

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

Pendapatan diterima di muka jangka panjang merupakan sewa tanah HGB dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang jatuh tempo lebih dari setahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat naik sebesar Rp22 miliar atau 7% menjadi Rp353 miliar dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp331 miliar.

EKUITAS

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2018 tercapai Rp10,3 triliun, naik Rp989,7 miliar atau 11% bila dibandingkan dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp9,36 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya jumlah penghasilan komprehensif lain sebanyak 102%.

EKUITAS 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Modal Saham	1.018.953	1.018.953	-	-
Selisih Atas Perubahan Ekuitas Entitas Anak dan Dampak Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali	38.741	56.420	(17.679)	(31%)
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaanya	7.048.818	6.022.038	1.026.780	17%
Belum Ditentukan Penggunaanya	(481.116)	219.744	(700.860)	(319%)
Penghasilan Komprehensif Lain	1.453.840	718.347	735.493	102%
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	9.079.236	8.035.503	1.043.733	13%
Kepentingan Non Pengendali	1.276.078	1.330.112	(54.034)	(4%)
JUMLAH	10.355.313	9.365.615	989.698	11%

LAPORAN LABA (RUGI)

Kinerja Perusahaan pada tahun 2018 dapat dilihat dari nilai Pendapatan Operasi Perusahaan yang tercatat sebesar Rp10,17 triliun, naik Rp1,32 triliun atau 15% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp8,85 triliun.

Kenaikan pendapatan operasi ini utamanya dipicu oleh naiknya pendapatan dari pelayanan jasa kapal sebesar 37%. Selain itu, pendapatan pada kegiatan operasional lainnya juga menunjukkan peningkatan dengan rata-rata kenaikan 9%.

Secara keseluruhan, laba tahun berjalan Perusahaan di tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar Rp520 miliar atau 27% menjadi Rp1,38 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,90 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan realisasi pendapatan usaha tercapai sebesar 101% dari RKAP 2018 dan realisasi beban usaha sebesar 99% dari target.

**LAPORAN LABA (RUGI) 2017-2018**

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pendapatan Operasi	10.174.932	8.849.406	1.325.526	15%
Pendapatan Konstruksi	603.841	126.677	477.164	377%
Beban Operasi	(6.879.590)	(5.883.266)	(996.324)	17%
Beban Konstruksi	(597.017)	(115.900)	(481.117)	415%
Beban Operasi Lainnya – Neto	(733.924)	(67.105)	(666.819)	994%
Laba usaha	2.568.243	2.909.812	(341.569)	(12%)
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan	1.872.050	2.518.606	(646.556)	(26%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan	1.823.505	2.472.800	(649.295)	(26%)
Laba Tahun Berjalan	1.385.402	1.905.077	(519.675)	(27%)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.125.075	1.496.150	628.925	42%

PENDAPATAN OPERASI

Selama tahun 2018, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan operasi sebesar Rp10,17 triliun, meningkat Rp1,32 triliun atau 15% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp8,85 triliun. 3 (tiga) sumber pendapatan yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2018, antara lain adalah Pelayanan Jasa Kapal 37%, Pelayanan Terminal Peti Kemas 15%, dan Pelayanan Jasa Barang 9,11%.

Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh penurunan reduksi pendapatan sebesar 83% menjadi Rp15,79 miliar. Selain itu juga dipicu oleh adanya realisasi pendapatan non usaha tahun 2018 sebesar Rp143 miliar.

PENDAPATAN OPERASI 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Pelayanan Terminal Peti Kemas	6.026.393	5.229.494	796.899	15%
Pelayanan Jasa Kapal	1.494.395	1.089.851	404.544	37%
Pelayanan Jasa Terminal	837.081	769.600	67.481	9%
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik	598.533	583.164	15.369	3%
Pelayanan Jasa Barang	503.652	461.561	42.091	9%
Lain-lain	714.878	715.736	(858)	0%
JUMLAH	10.174.932	8.849.407	1.325.525	15%

PENDAPATAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Multipurpose Teluk Lamong dan APBS. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset. Pada tahun 2018, pendapatan konstruksi meningkat sebesar Rp477 miliar atau 377% sehingga menjadi Rp604 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp127 miliar.

BEBAN OPERASI

Beban operasi di tahun 2018 tercatat meningkat sebesar Rp996 miliar atau 17% sehingga menjadi Rp6,87 triliun di tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya beban imbalan kerja, beban penyusutan dan amortisasi, beban sumber daya pihak ketiga dari beban sharing operasi, dan beban umum dari anggaran atas pembayaran konsesi dan penyisihan piutang.

BEBAN OPERASI 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Umum	3.013.393	2.735.451	277.942	10
Kerja Sama Mitra Usaha	1.921.119	1.576.335	344.784	22
Pemeliharaan, Penyusutan, dan Amortisasi	1.674.254	1.336.914	337.340	25
Asuransi	187.353	169.948	17.405	10
Administrasi Kantor	30.007	24.345	5.662	23
Lain-lain	53.464	40.272	13.192	33
Jumlah	6.879.590	5.883.266	996.324	17

BEBAN KONSTRUKSI

Beban konstruksi tercatat meningkat sebesar Rp481 miliar atau 415% menjadi Rp597 miliar di tahun 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp115,90 miliar.

LABA USAHA

Labanya usaha tercatat menurun sebesar Rp341 miliar atau 12% menjadi Rp2,57 triliun di tahun 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp2,90 triliun. Penurunan tersebut disebabkan pendapatan usaha yang tercapai 101% dari anggaran sedangkan beban usaha tercapai 99% dari anggaran.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Labanya sebelum pajak penghasilan tercatat menurun sebesar Rp649 miliar atau 26% menjadi Rp1,82 triliun pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp2,47 triliun. Penurunan tersebut seiring dengan turunnya nilai labanya usaha Perusahaan dan naiknya beban keuangan sebesar 35%.

LABA TAHUN BERJALAN

Labanya tahun berjalan tercatat menurun sebesar Rp520 miliar atau 37% menjadi Rp1,38 triliun di tahun 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp1,90 triliun. Penurunan tersebut seiring dengan turunnya nilai labanya usaha Perusahaan.

LAPORAN ARUS KAS

Arus kas Perusahaan dapat ditinjau pada pos kenaikan kas bersih dan setara kas. Pada tahun 2018 jumlah kenaikan kas bersih dan setara kas mengalami kenaikan sebesar Rp861 miliar atau 93% sehingga menjadi Rp1,79 triliun. Bila dibandingkan dengan 2017, nilai kenaikan kas bersih dan setara kas tersebut tercatat sebesar Rp930 miliar. Kondisi ini seiring dengan peningkatan pendapatan operasi tahun 2018.

ARUS KAS 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.169.985	2.695.782	1.474.203	55%
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi	(3.457.846)	(1.930.606)	(1.527.240)	79%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.078.078	163.791	914.287	558%
Kenaikan Kas Bersih dan Setara Kas	1.790.218	928.967	861.251	93%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.750.527	1.815.987	934.540	51%
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	71.301	5.573	65.728	1179%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	4.612.047	2.750.527	1.861.520	68%



Perubahan tersebut terutama berasal dari peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan yang naik sebesar Rp914 miliar atau 558% di tahun 2018 sehingga menjadi Rp1,07 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp164 miliar. Besarnya peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pinjaman sebesar 217% yang berasal dari obligasi global (securities notes).

Disamping itu, arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas untuk aktivitas investasi juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif di tahun 2018 dengan kenaikan masing-masing sebesar Rp1,47 triliun atau 55% dan Rp1,52 triliun atau 79% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi tahun 2018 tercatat sebesar Rp4,16 triliun, naik Rp1,47 triliun atau 55% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2,69 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya penghasilan bunga sebesar 28% dan turunnya pos pembayaran-pembayaran sebesar 26%.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Penerimaan Kas dari Pelanggan dan Non Pelanggan	10.113.238	10.804.578	(691.340)	(6%)
Pembayaran kepada Kontraktor, Pemasok, dan Lainnya	(4.395.947)	(6.330.750)	1.934.803	(31%)
Pembayaran kepada Karyawan	(1.212.050)	(906.988)	(305.062)	34%
Pembayaran Pajak Penghasilan	(478.448)	(982.629)	504.181	(51%)
Penghasilan Bunga	143.194	111.572	31.622	28%
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	4.169.985	2.695.782	1.474.203	55%

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2018 tercatat sebesar Rp3,45 triliun, naik Rp1,52 triliun atau 79% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,93 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya perolehan aset tetap dan aset takberwujud sebesar 77% dan naiknya nilai penempatan investasi jangka pendek sebesar 673%.

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Penerimaan Dividen	6.387	5.729	658	11%
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud	(3.417.301)	(1.933.856)	(1.483.445)	77%
Penempatan Investasi Jangka Pendek	(46.932)	(6.070)	(40.862)	673%
Pencairan Deposito Jangka Panjang	-	3.500	-	-
Investasi pada Penyertaan Saham	-	91	-	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.457.846)	(1.930.606)	(1.527.240)	79%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan naik sebesar Rp914 miliar atau 558% di tahun 2018 sehingga menjadi Rp1,07 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp164 miliar. Besarnya peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pinjaman sebesar 217% yang berasal dari obligasi global (securities notes).

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			NOMINAL	%
Penerimaan Pinjaman	6.901.500	2.176.350	4.725.150	217%
Pembayaran Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	(4.040.118)	(837.556)	(3.202.562)	382%
Pembayaran Beban Bunga	(677.007)	(534.860)	(142.147)	27%
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	(444)	(4.032)	3.588	(89%)
Pembayaran Dividen	(1.105.853)	(636.111)	(469.742)	74%
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.078.078	163.791	914.287	558%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan membayar utang pada Pelindo III secara umum dapat ditinjau melalui laporan rasio keuangan Perusahaan. Laporan rasio keuangan Pelindo III tersaji melalui tabel berikut:

RASIO KEUANGAN 2017-2018

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018	2017
Rasio Laba terhadap Ekuitas	11,31%	19,72%
Rasio Laba terhadap Investasi	16,08%	17,48%
Rasio Laba terhadap Modal Kerja	4,36%	8,70%
Margin Laba Bersih	13,62%	22,74%
Rasio Lancar	168,72%	132,31%
Rasio Cepat	179,35%	131,24%
Rasio Kas	105,60%	82,16%
Periode Pengumpulan Piutang (hari)	49,86	34,09
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	66,05%	56,77%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	143,14%	131,33%
Perputaran Persediaan (hari)	2,28	1,47
Rasio Perputaran Total Aset	43,35%	39,92%
Rasio Ekuitas terhadap Aset	28,79%	35,98%
EBITDA (Rp1000)	4.610.024.797	4.095.652.874
EBITDA Margin	45,14%	46,28%
Rasio Utang Neto terhadap EBITDA	2,22	2,19
Rasio Utang Bruto terhadap EBITDA	3,24	2,86



RASIO RENTABILITAS

Kemampuan Perusahaan dalam mencetak laba dapat diukur dari besaran rasio rentabilitasnya. Rasio profitabilitas adalah perbandingan yang dihitung untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu.

Pada tahun 2018, rasio laba terhadap jumlah aset (ROA) tercatat sebesar 4,54% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 7,4%. Hal ini terjadi karena penambahan utang obligasi global untuk pembayaran capital expenditure tahun 2018 yang mana posisinya per 31 Desember 2018 sebagian besar masih dalam aset dalam konstruksi, sehingga belum memberikan kontribusi ke pendapatan usaha.

Rasio laba terhadap ekuitas (ROE) sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar 11,31% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 19,72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dengan menggunakan ekuitas yang tersedia mengalami penurunan di tahun 2018.

Margin laba bersih atau net profit margin pada tahun 2018 tercatat sebesar 13,62%, lebih rendah bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 22,74%. Hal ini terjadi karena pengaruh rugi selisih kurs unrealised atas utang dalam bentuk valuta asing dimana nilai tukar Rupiah terhadap USD terdepresiasi sebesar Rp933 (tutup buku 2018 Rp14.481 sedangkan kurs tutup buku 2017 Rp13.548). Di satu sisi, kinerja usaha real tahun 2018 naik 11% dari tahun lalu.

RASIO LIKUIDITAS

Dalam mengukur kemampuan Perusahaan untuk membayar utang usahanya, Perusahaan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Besaran rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.

Pada tahun 2018, rasio lancar tercatat sebesar 168,72% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 132,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia mengalami peningkatan.

Rasio cepat sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar 179,35% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 131,24%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban atau utang lancarnya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio kas tahun 2018 tercatat sebesar 116,87% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 82,16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas yang tersedia semakin meningkat.

RASIO SOLVABILITAS

Perusahaan juga memakai rasio solvabilitas untuk mengukur besarnya jumlah aset Perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio solvabilitas yang dipakai Perusahaan adalah rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset (DAR).

Rasio liabilitas terhadap jumlah aset (DAR) tahun 2018 tercatat sebesar 66,05% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 56,77%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah aset yang dimiliki Perusahaan sebagian besar dibiayai oleh utang, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sumber pendanaan investasi Perusahaan terutama dari utang obligasi global sebagai upaya menjaga pertumbuhan organik maupun menangkap peluang pertumbuhan anorganik.

Rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar 143,14% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 131,33%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aset Perusahaan sebagian besar bersumber dari dana utang. Namun rasio ini masih dalam rentang aman bagi Perusahaan. Pencairan utang dilakukan dengan prudent, mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dan tingkat kesehatan Perusahaan.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan tahun 2018 adalah 49,86 hari dan kolektibilitas piutang usaha tahun 2017 adalah 34,09 hari (Laporan Manajemen tahun 2018). Untuk mempercepat kolektibilitas piutang, Perusahaan menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan penagihan langsung ke pelanggan/pengguna jasa yang memiliki piutang jatuh tempo;
2. Melakukan rekonsiliasi saldo piutang dengan pelanggan/pengguna jasa untuk penentuan jadwal pembayaran piutang;
3. Menerapkan UPER (uang pertanggungan/uang muka) di atas 100% dari estimasi tagihan pelayanan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan/pengguna jasa pada saat pengguna jasa mengajukan permohonan pelayanan jasa kepelabuhanan;
4. Menerapkan peraturan locking system secara korporat dimana pelanggan yang memiliki piutang jatuh tempo tidak akan mendapat pelayanan jasa kepelabuhanan di seluruh Cabang Pelabuhan sampai pengguna jasa tersebut telah membayar seluruh piutang yang telah jatuh tempo;
5. Bekerja sama dengan pihak Kejaksaan untuk menagih piutang-piutang lama Perusahaan yang telah jatuh tempo;
6. Penerapan Integrated Billing System untuk mempercepat perputaran piutang usaha.



STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR

STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal Pelindo III di tahun 2018 tersaji melalui tabel berikut:

KOMPOSISI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN TAHUN 2018

(dalam jutaRupiah)

URAIAN	2018	2017	KETERANGAN
Hutang Jangka Pendek	-	677.400	
Hutang Jangka Panjang	14.940.707	10.603.211	
Hutang Kotor	14.940.707	11.280.611	Hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang
Kas	4.612.047	2.750.527	
Hutang Bersih	10.328.660	8.530.084	Hutang kotor dikurangi dengan kas
Ekuitas	10.355.314	10.983.868	
Jumlah Struktur Modal	25.296.021	22.264.479	

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Total struktur modal Pelindo III pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan utang jangka panjang dalam bentuk obligasi global.



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

POTRET PROGRAM INVESTASI 2018

Di tahun 2018, Pelindo III telah melaksanakan program-program investasi berikut:

PROYEK FLYOVER TERMINAL TELUK LAMONG

Proyek *flyover* Terminal Teluk Lamong dimulai sejak 9 Maret 2018 dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,3 triliun dan diharapkan dapat selesai pada Maret 2020. Hingga 31 Desember 2018, progres perkembangan fisik *flyover* mencapai 30%.

PENAMBAHAN CONTAINER YARD TERMINAL TELUK LAMONG

Proyek ini telah dimulai sejak 18 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp400 miliar dan ditargetkan untuk selesai pada April 2020. Hingga akhir tahun 2018, progres pembangunan fisik *container yard* telah mencapai 51,31%.

DERMAGA UNTUK KAPAL PESIAR DAN PETI KEMAS DI TERMINAL GILIMAS

Pembangunan dermaga untuk kapal pesiar dan peti kemas di Terminal Gilimas telah dilaksanakan sejak 20 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp270 miliar dan ditargetkan selesai pada April 2019. Hingga 31 Desember 2018, progres fisik pembangunan telah tercapai sebesar 71,11%.

PELINDO PLACE

Pembangunan dimulai sejak 9 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp500 miliar dan ditargetkan untuk selesai pada Desember 2019. Hingga 31 Desember 2018, progres fisik pembangunan Pelindo Place telah mencapai 25,01%.

PENGEMBANGAN PELABUHAN BENOA

Pengembangan Pelabuhan Benoa mencakup perluasan terminal penumpang, *beautification* pelabuhan, pengerukan alur dan kolam pelabuhan.

PENGEMBANGAN PELABUHAN KUPANG

Pengembangan Pelabuhan Kupang meliputi pembangunan *gate* utama, rehabilitasi terminal penumpang, pembangunan jembatan penghubung *container yard* bongkar muat, perbaikan struktur dermaga lokal dan nusantara, pengerasan *container yard* CCC-CDC, dan *optimalisasi existing land* yang dimiliki Pelabuhan Kupang.

Tidak ada ikatan yang material atas pengadaan investasi tersebut di atas.

SUMBER DANA

Sumber dana yang digunakan untuk program investasi adalah berasal dari dana internal Perusahaan serta dana hasil penawaran obligasi internasional (*global bond*).

MATA UANG YANG MENJADI DENOMINASI

Mata uang yang menjadi denominasi ikatan material untuk investasi barang modal adalah mata uang Republik Indonesia Rupiah dan mata uang asing USD.

MITIGASI RISIKO TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG ASING

Pelindo III memiliki risiko pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing USD karena adanya transaksi-transaksi dalam program investasi yang didenominasi dalam mata uang asing. Sementara itu, Perusahaan belum menggunakan mekanisme *hedging* (lindung nilai). Risiko terhadap penggunaan mata uang asing di Pelindo III berada di bawah *risk tolerance* sehingga bukan merupakan risiko mayor. Namun,antisipasi mitigasi risiko tetap dilakukan oleh Perusahaan.



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI

Di tahun 2018, tidak terdapat informasi mengenai kejadian penting maupun fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntansi.

PROSPEK USAHA

Perusahaan menilai prospek bisnis kepelabuhanan di masa mendatang akan cukup menjanjikan. Hal ini didukung dari beberapa faktor seperti membaiknya beberapa fundamental makro ekonomi nasional dan atensi Pemerintah dalam mendorong kemajuan sistem konektivitas laut nasional.

Perusahaan telah merumuskan prospek bisnis di tahun 2019. Penentuan prospek tersebut didasarkan pada beberapa faktor seperti kebijakan Pemerintah terkait jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, pungutan terhadap jasa kepelabuhanan; kegiatan atas perusahaan pelayanan pemanduan, pelayanan labuh, serta penyediaan dan perusahaan tanah yang mendapatkan pelimpahan dari pemerintah; dan juga estimasi perekonomian (*economic outlook*) di tahun 2019 yang diproyeksikan oleh Pemerintah akan tumbuh menguat dari 2018. Pemerintah melalui dokumen nota keuangan APBN 2019 memproyeksikan ekonomi nasional akan melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3%.

Perusahaan juga telah menyusun RKAP 2019 dimana dasar penyusunannya menggunakan asumsi makro ekonomi sebagai berikut:

1. Kurs USD terhadap Rupiah: Rp15.000/USD
2. Harga BBM nonsubsidi: Rp11.000/liter
3. Pertumbuhan ekonomi: 5,3%
4. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (3 bulan): 5,3%
5. Inflasi: 3,5%

Untuk konteks jangka panjang, Perusahaan juga telah menentukan arah pengembangan Perusahaan untuk 5 tahun kedepan guna mendukung terlaksananya visi dan misi. Arah pengembangan Perusahaan tersebut bertujuan Arah pengembangan Perusahaan tersebut bertujuan untuk:

1. Melampaui standard kinerja pelayanan pelabuhan yang dipersyaratkan pemerintah;
2. Mendominasi penguasaan pangsa pasar curah dan kargo di wilayah Pelindo III;
3. Mengembangkan bisnis perusahaan dalam rantai nilai bisnis kepelabuhanan;
4. Meningkatkan sinergi antar Cabang, Anak, dan Cucu Perusahaan dalam pelayanan dan pengembangan bisnis;
5. Memanfaatkan peluang bisnis strategis diluar jasa kepelabuhanan



PROYEKSI TAHUN 2019

Pelindo III telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 sebagai acuan pokok Perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pencapaian target finansial untuk tahun 2019 tersebut didasarkan oleh berbagai asumsi kondisi eksternal dan internal yang dapat memengaruhi aktivitas Perusahaan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, berikut adalah target finansial Perusahaan untuk tahun buku 2019:

PROYEKSI TAHUN 2019

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2018	PROYEKSI 2019	PENINGKATAN (%)
Aset	30.505.715	34.974.014	15%
Liabilitas	20.150.402	21.633.680	7%
Ekuitas	10.355.314	6.123.043	(41%)
Pendapatan Usaha	10.174.932	11.205.109	10%
Laba Usaha	2.568.243	3.813.266	48%
Laba sebelum Pajak	1.872.050	2.775.201	48%
Laba Tahun Berjalan	1.385.402	2.079.181	50%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.125.075	2.079.181	(2%)



ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN

Pelindo III menyadari bahwa pelanggan merupakan salah satu aset Perusahaan yang penting. Untuk itu, upaya perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh Perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan yang antara lain:

1. Kesiapan dan ketersediaan fasilitas pelabuhan yang andal;
2. Ketepatan waktu pelayanan, sistem informasi yang *real time*, dan tarif jasa pelabuhan yang kompetitif; dan
3. Berkualitas dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan melebihi standar yang ditetapkan.

Dalam menjalankan usahanya, segmen usaha Pelindo III diidentifikasi dengan 4 pelayanan utama, yaitu Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, Pelayanan Bongkar/Muat (B/M), dan Pelayanan Penumpang.

Untuk mengantisipasi perkembangan bisnis kepelabuhanan yang semakin kompleks, Perusahaan melakukan transformasi atas perencanaan bisnis Perusahaan. Transformasi perencanaan bisnis dilakukan untuk lebih mengarahkan fokus Perusahaan pada segmentasi *core business* yang merupakan inti dari jasa pelayanan yang disediakan Pelindo III.

Untuk tetap mengembangkan segmen usaha Perusahaan yang bukan merupakan *core business*, maka manajemen mengklasifikasikan sebagaimana penjelasan berikut:

1. *Non-Core Business* Strategis, meliputi:
 - a. Cargo Konsolidasi/Distribusi dan Depo
 - b. *Forwarding*
 - c. Properti
 - d. Pariwisata Maritim (Cruise dan Marina)
2. *Non-Core Business* Lainnya, meliputi:
 - a. Maintenance
 - b. *Supply Energy* dan *Labor*
 - c. Sarana dan Prasarana Transportasi
 - d. Rupa-Rupa Usaha

Terkait dengan strategi pemasaran, Pelindo III memiliki 3 pilihan strategi yang dapat diterapkan, yaitu:

MARKET PENETRATION

Strategi Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar terhadap produk atau jasa pada pasar yang dimiliki selama ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih agresif.

MARKET DEVELOPMENT

Market Development adalah strategi Perusahaan dalam memperkenalkan produk barang atau jasa pada lingkungan pasar yang baru.

PRODUCT DEVELOPMENT

Product Development adalah strategi Perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui pengembangan produk barang atau jasa yang sudah ada atau pengembangan produk-produk baru.

Kelompok/segmen pasar dibagi berdasarkan tujuan (domestik atau internasional). Sementara itu, dalam menentukan pelanggan, kelompok pelanggan, dan segmen pasar yang akan dijadikan target untuk pelayanan saat ini dan di masa mendatang didasarkan pada peningkatan realisasi produksi setiap tahun dari kegiatan bongkar muat sesuai dengan jenis komoditas. Ke depan, Perusahaan akan menentukan prioritas pelayanan kapal dan barang untuk jenis peti kemas, curah cair, dan curah kering dengan melakukan prioritas pelayanan kepada beberapa pengguna jasa. Pembagian pasar Perusahaan adalah sebagai berikut:



PEMBAGIAN PASAR PERUSAHAAN



PANGSA PASAR

Pangsa pasar Pelindo III dibedakan berdasarkan komoditasnya, yaitu yaitu peti kemas, curah kering, curah cair, dan general cargo. Pada laporan ini Perusahaan melaporkan gambaran pangsa pasar Perusahaan dalam bentuk persentase. Perhitungan persentase tersebut didapat dari perbandingan jumlah produksi bongkar muat barang dengan arus operasional yang melalui dermaga.

Untuk komoditas peti kemas, persentase pangsa pasar yang tercatat oleh Perusahaan di tahun 2018 sebesar 98,43% atau menurun dibandingkan tahun 2017 yakni 99,37%. Untuk komoditas curah kering, volume komoditas curah kering secara total menurun dibandingkan tahun lalu, namun penguasaan pangsa pasar yang diperoleh Perusahaan di tahun 2018 meningkat menjadi 77%, dibandingkan tahun 2017 sebesar 74,90%. Untuk komoditas curah cair, pangsa pasar yang diperoleh Perusahaan di tahun 2018 sebesar 90%, menurun jika dibandingkan perolehan pada tahun 2017 sebesar 94,21%. Untuk pangsa pasar general cargo capaian pangsa pasar Perusahaan pada tahun 2018 meningkat menjadi 25,01%.

Secara keseluruhan, pangsa pasar Perusahaan di semua komoditas di tahun 2018 meningkat dibanding di tahun 2017. Hal ini merupakan dampak positif pelaksanaan program Bina Pelanggan dan Customer Visit. Sejak 2016, Perusahaan membuat *Customer Relationship Management* (CRM) serta memaksimalkan peran *Customer Relationship Officer* (CRO), dimana tim pemasaran yang bertugas sebagai CRO melakukan kunjungan kepada mitra bisnis, tak hanya pada *prime/key customer* tetapi juga mitra bisnis yang belum memanfaatkan jasa bongkar muat dari Perusahaan.

PERBANDINGAN PANGSA PASAR BERDASAKAN KOMODITAS 2014 - 2018

NO.	JENIS CARGO	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Peti Kemas	97%	99%	99%	99,79%	98,43%
2.	Curah Kering	69%	53%	60%	72,17%	77%
3.	Curah Cair	84%	89%	92%	96,97%	90%
4.	General Cargo	14%	33%	24%	25,64%	25,01%
5.	Bag Cargo	8%	18%	22%	16,09%	-

*keterangan: Pada tahun 2018, pelaporan General Cargo dan Bag Cargo dijadikan dalam satu tipe jenis cargo, yaitu General Cargo.

DIVIDEN

Pelindo III memberikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan keputusan RUPS. Perkembangan dividen yang disalurkan Perusahaan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

PEMBAGIAN DIVIDEN PADA TAHUN BUKU 2012 - 2018

(dalam ribu Rupiah)

TAHUN BUKU	RISALAH RUPS	TANGGAL PENGUMUMAN	TANGGAL PEMBAYARAN	DIVIDEN	LABA PERUSAHAAN	DIVIDEND PAYOUT RATIO
2014	KU.04/24.1/P. III-2015	12 Mei 2015	Pembayaran dividen dibayar secara angsuran dengan masing-masing tanggal: 12 Juni 2015, 10 Juli 2015, 12 Agustus 2015, 11 September 2015, 12 Oktober 2015.	238.803.153	1.194.015.768	20,00%
2015	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 14.-	17 Mei 2016	Pembayaran dividen dibayar secara angsuran dengan masing-masing tanggal: 17 Juni 2016, 15 Juli 2016, 15 Agustus 2016.	196.709.330	702.533.323	28,00%
2016	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 05.-	8 Mei 2017	Pembayaran dividen dibayar secara angsuran dengan masing-masing tanggal: 8 Juni 2017, 7 Juli 2017, 8 Agustus 2017, 8 September 2017, 6 Oktober 2017, 8 November 2017.	311.198.916	1.037.329.721	30,00%
2017	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 2.-	8 Mei 2017	8 November 2017	311.198.916	1.037.329.721	30,00%
2018	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 2.-	3 April 2018	3 Mei 2018	441.147.068	1.470.490.226	30,00%

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berikut adalah kebijakan pembagian dividen tunai dan cadangan Pelindo III untuk tahun buku 2016 dan 2017:

- Berdasarkan RUPS Perusahaan yang telah diaktakan dalam berita acara RUPS Perusahaan No. 2 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Emy Susilowati, S.H., Pemegang Saham Perusahaan menyetujui antara lain: Penggunaan laba netto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba netto atau sebesar Rp441.147.068 ribu.
 - Penetapan cadangan sebesar 70% dari laba netto atau sebesar Rp1.029.343.158 ribu.
 Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 3 Mei 2018.

- Berdasarkan RUPS Perusahaan yang telah diaktakan dalam berita acara RUPS Perusahaan No. 2 tanggal 8 Mei 2017 dari Notaris Emy Susilowati, S.H., Pemegang Saham Perusahaan menyetujui antara lain: Penggunaan laba netto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba netto atau sebesar Rp311.198.916 ribu.
 - Penetapan cadangan sebesar 70% dari laba netto atau sebesar Rp726.130.805 ribu.
 Dividen tersebut di atas telah sepenuhnya dibayar pada tanggal 8 November 2017.



PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Sesuai dengan karakteristik Pelindo III yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah, maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) di Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan tidak menyajikan informasi yang terkait program tersebut seperti jumlah saham ESOP/MSOP, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga *exercise*.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Di tahun 2018, Pelindo III melakukan penawaran umum dengan menerbitkan obligasi global sebesar USD 500 juta. Dana obligasi global tersebut digunakan untuk mendanai program-program investasi seperti:

1. Pembangunan Terminal Gili Mas.
2. Pembangunan *Flyover* Terminal Teluk Lamong.
3. Perluasan *Container Yard* Terminal Teluk Lamong.
4. Pembangunan Pelindo Place.

Rincian penggunaan dana hasil penawaran umum dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

PENGGUNAAN DANA OBLIGASI GLOBAL YANG DIPEROLEH PADA TAHUN 2018

dalam USD

KETERANGAN	JUMLAH
Penerbitan Obligasi Global	500.000.000
Biaya Penerbitan Obligasi Global	(5.989.426)
Penerimaan Dana Obligasi Global	494.010.574
PENGGUNAAN	
Pembiayaan Program Investasi	(221.742.260)
Pelunasan Utang Jangka Pendek	(272.360.456)
Sisa Saldo Dana Obligasi Global	-

Nilai Kurs Rp14.621



INFORMASI REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

JENIS DAN TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Pelindo III melakukan investasi barang modal berupa bangunan fasilitas pelabuhan, kapal, alat-alat fasilitas pelabuhan, instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan, peralatan, alat transportasi, emplasemen, properti investasi, serta aktiva tidak berwujud. Tujuan investasi tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas produksi, meningkatkan optimalisasi kuantitas dan kualitas hasil produksi, serta untuk keberlanjutan Perusahaan.

NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Realisasi investasi tahun 2018 pada Induk dan Anak Perusahaan tercapai sebesar Rp3,47 triliun. Sementara realisasi investasi pada Induk Perusahaan saja tercatat sebesar Rp3,03 triliun. Rincian mengenai investasi tersaji pada tabel berikut.

REKAPITULASI REALISASI INVESTASI INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN JENIS

dalam ribu Rupiah

NO.	JENIS INVESTASI	REALISASI PENYERAPAN
1.	Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1.650.904.248
2.	Kapal	159.572.774
3.	Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan	505.975.214
4.	Instalasi Fasilitas Pelabuhan	51.525.653
5.	Tanah	42.559.765
6.	Jalan dan Bangunan	752.499.871
7.	Peralatan	139.181.593
8.	Kendaraan	2.708.800
9.	Emplasemen	18.739.712
10.	Properti Investasi	18.685.400
11.	Aktiva Tidak Berwujud	133.625.966
JUMLAH INVESTASI		3.475.978.996



REKAPITULASI REALISASI INVESTASI INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN CABANG

dalam ribu Rupiah

NO.	NAMA CABANG	REALISASI PENYERAPAN
INDUK PERUSAHAAN		
1.	Tanjung Perak	304.465.960
2.	Tanjung Emas	47.121.664
3.	TPKS	264.026.329
4.	Tanjung Intan	19.080.122
5.	Banjarmasin	16.044.323
6.	Gresik	16.955.897
7.	Tanjung Tembaga	1.030.648
8.	Tanjung Wangi	36.313.607
9.	Benoa	483.250.556
10.	Tenau Kupang	113.465.050
11.	Kotabaru	19.093.402
12.	Sampit	79.382.848
13.	Kumai	80.272.123
14.	Lembar	244.678.354
15.	Celukan Bawang	900.658
16.	Maumere	4.636.451
17.	Bima	16.842.131
18.	Kantor Pusat	1.287.004.145
	Sub-Direktorat Umum pada Kantor Pusat	-
	Sub-Direktorat Fasilitas Pelabuhan	1.072.210.642
	Sub-Direktorat Peralatan	138.191.316
	Sub-Direktorat TIK	76.602.187
	Jumlah Investasi Induk Perusahaan	3.034.564.267
ANAK PERUSAHAAN		
	PT TPS	40.492.066
	PT BJTI	171.366.109
	PT PHC	41.511.501
	PT PMS	168.153.371
	PT TTL	19.242.464
	PT PDS	649.220
	Jumlah Investasi Anak Perusahaan	441.414.730
JUMLAH INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN		3.475.978.996

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pelindo III telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai bagian dari Kebijakan Akuntansi Penting terkait Hubungan Afiliasi (Pihak Berelasi), yang dapat dilihat pada Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2018.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - h. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah, dan Badan yang serupa baik lokal, nasional, maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Dalam kegiatan usaha normal, Pelindo III melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Pelindo III dan Anak Perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Alasan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah untuk kepentingan dan keberlanjutan bisnis Pelindo III.

SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DI 2018**

SIFAT RELASI	NAMA PIHAK BERELASI	JENIS TRANSAKSI
Pemegang Saham	Negara Republik Indonesia	Jasa Konsesi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa Perbankan dan Pinjaman
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa Perbankan dan Pinjaman
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa Perbankan dan Pinjaman
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa Perbankan dan Pinjaman
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa Perbankan dan Pinjaman
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan
	PT Virama Karya (Persero)	Jasa Pembangunan
	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Pembangunan
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan
	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa Pembangunan
	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	Pinjaman Dana dan Biaya Pengerukan
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan Jasa
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan Jasa
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan Jasa
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan Jasa
	PT Bahtera Adhiguna	Penjualan Jasa
	PT Dharma Lautan Nusantara (Persero)	Penjualan Jasa
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Penjualan Jasa
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan Jasa
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan Jasa
	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan Jasa
	PT Semen Tonasa	Penjualan Jasa
	BPJS Kesehatan	Penjualan Jasa
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Penjualan Jasa
	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3)	Jasa Pensiun
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Jasa Pensiun
Entitas Asosiasi	PT Portek Indonesia	Jasa Pemeliharaan Alat Fasilitas Pelabuhan
	PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Investasi Saham dan Pemberian Pinjaman Dana
	PT Ambang Barito Nusapersada	Pemberian Pinjaman Dana
	PT Jasa Marga Bali Tol	Investasi Saham
	PT Lamin Aspalindo Tiga	Investasi Saham
	PT Terminal Nilam Utara	Investasi Saham
	PT Energi Manyar Sejahtera	Investasi Saham
	PT Terminal Peti Kemas Indonesia	Investasi Saham
Memiliki Manajemen Kunci yang Sama	Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia III	Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat

REALISASI TRANSAKSI

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (Pemerintah, Entitas Pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN KAS DAN SETARA KAS

dalam ribu Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI	2018	2017
BANK Transaksi dilakukan dengan Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	289.028.344	177.755.429
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	153.492.846	211.178.824
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	56.113.723	82.142.228
PT Bank Tabungan Negara Tbk	346.914	15.451.654
JUMLAH	498.981.827	486.528.135
BANK Transaksi dilakukan dengan Dolar AS		
PT Bank Syariah Mandiri	6.731.895	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.165.998	42.724.603
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.265.913	3.685.372
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.930.493	2.100.533
PT Bank Tabungan Negara Tbk	99.602	-
JUMLAH	17.193.901	48.510.508
BANK Transaksi dilakukan dengan Dolar Singapura		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	100.124
JUMLAH	-	100.124
DEPOSITO Transaksi dilakukan dengan Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	186.750.000	128.250.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	172.945.000	161.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	124.000.000	89.000.000
PT Bank Tabungan Negara Tbk	45.000.000	39.000.000
JUMLAH	528.695.000	417.250.000
DEPOSITO Transaksi dilakukan dengan Dolar AS		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.787.880.374	440.310.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	543.037.500	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	515.929.068	158.511.600
JUMLAH	2.846.846.942	598.821.600

**REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA**

dalam ribu Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI	2018	2017
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	5.149.595
JUMLAH	-	5.149.595

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN PIUTANG USAHA

dalam ribu Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI	2018	2017
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	72.149.140	70.640.405
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	68.247.983	68.086.390
PT Pertamina (Persero)	39.527.408	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	28.953.310	28.816.042
PT Petrokimia Gresik	27.463.487	27.430.705
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)	11.543.521	36.991.132
PT Bahtera Adhiguna	10.859.277	-
PT Perikanan Nusantara (Persero)	6.920.612	-
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	6.311.709	-
Lain-lain di bawah Rp5 miliar	70.121.318	2.714.486
Subtotal	342.097.765	234.679.160
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(1.737.260)	(15.100.071)
JUMLAH	340.360.505	219.579.089

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN PIUTANG LAIN-LAIN

dalam ribu Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI	2018	2017
PT BKMS	208.881.837	137.931.727
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	52.267.802	52.267.802
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	29.330.404	30.267.150
PT Ambapers	-	7.000.000
Lain-lain di bawah Rp5 miliar	7.556.110	6.274.449
Subtotal	298.036.153	233.741.128
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(35.504.794)	(35.504.794)
JUMLAH	262.531.359	198.236.334

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN UTANG USAHA

dalam ribu Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI	2018	2017
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	34.392.785	-
Koperasi Pegawai Pelindo III	15.878.580	256.721
PT Portek Indonesia	6.935.879	4.047.083
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4.898.774	66.903
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.557.701	83.000
Lain-lain di bawah Rp4 miliar	12.480.467	1.153.618
Jumlah	79.144.186	5.607.325

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN UTANG LAIN-LAIN

dalam ribu Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI	2018	2017
PT Nindya Karya (Persero)	108.231.555	38.301.996
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	79.163.886	45.152.684
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	42.476.420	12.742.730
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	19.108.606	12.437.522
Dana Pensiun Pelindo Purnakarya	-	16.635.634
Lain-lain di bawah Rp5 miliar	10.550.846	3.534.760
Jumlah	259.531.313	128.805.326

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN UTANG BANK JANGKA PANJANG

dalam ribu Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI	2018	2017
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	3.009.873.779
Jumlah	-	3.009.873.779

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK

dalam ribu Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI	2018	2017
Uang persekot/panjar Lain-lain di bawah Rp5 miliar	12.784.828	5.519.703
Uang titipan Lain-lain di bawah Rp5 miliar	22.567.368	113.654.290
Jumlah	35.352.196	119.173.993



REALISASI REMUNERASI PERSONEL MANAJEMEN KUNCI

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp21.460.340 dan Rp17.806.448, masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017.

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Penjelasan mengenai kewajaran transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI

Kebijakan Perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi adalah melalui proses audit, baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal.

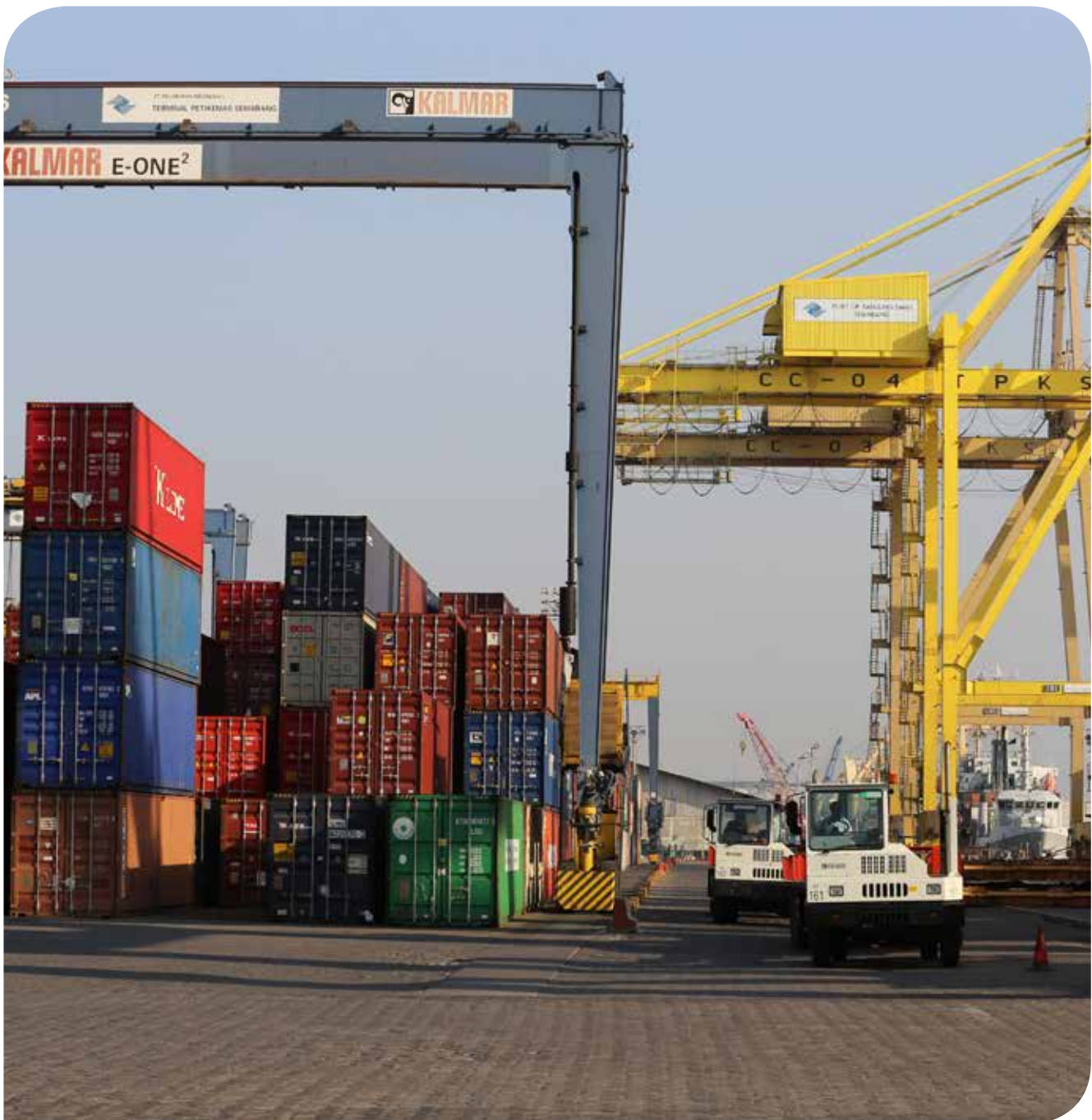
PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.



PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Selama tahun 2018, tidak terdapat perubahan peraturan Perundang-Undangan maupun kebijakan Pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja maupun proses bisnis Pelindo III.





PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2018, perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan Perusahaan sesuai Catatan atas Laporan Keuangan poin (z) yang merupakan penerapan dari amandemen dan penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018. Perubahan kebijakan tidak memberikan dampak besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Beberapa standar akuntansi baru tersebut antara lain adalah:

1. PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.
2. Amandemen PSAK 13 - Properti Investasi: Pengalihan Properti Investasi.
3. Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.
4. PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
5. PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Pelindo III bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

1. PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis Perusahaan; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan, dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko Perusahaan lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan Manajemen.

2. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara International Accounting Standards Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB), mengatur model pengakuan pendapatan

dari kontrak dengan pelanggan sehingga Perusahaan diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

3. PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk Perusahaan yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

4. ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban, atau penghasilan terkait pada saat Perusahaan telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

5. ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Interpretasi ini merupakan interpretasi atas PSAK 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

6. Amendemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini mengatur bahwa Perusahaan juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama di mana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto Perusahaan pada entitas asosiasi atau ventura bersama.



7. Amendemen PSAK 71 – Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

8. Amendemen PSAK 24 (2018) – Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini memberikan panduan yang lebih jelas bagi Perusahaan dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat memengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

9. Penyesuaian 2018 PSAK 22 – Kombinasi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66) dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap.

10. Penyesuaian 2018 PSAK 26 - Biaya Pinjaman, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode namun Perusahaan mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasi sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai.

11. Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika Perusahaan mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

12. Penyesuaian 2018 PSAK 66 - Pengaturan Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama dalam hal aktivitas operasi bersama merupakan suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis). Dalam kasus demikian, kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tidak diukur kembali.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Sampai dengan akhir tahun 2018, Pelindo III tidak memiliki hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

ASUMSI DASAR KELANGSUNGAN USAHA

Asumsi tersebut didasarkan oleh posisi Perusahaan dilihat dari analisis kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) sebagai berikut:

STRENGTH

1. Kualitas pelayanan yang memenuhi standar dan harapan pelanggan (DJPL dan *encyt* 2014).
2. Penguasaan pangsa pasar peti kemas dan curah cair yang dominan.
3. Kinerja keuangan yang stabil.
4. Penguasaan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis.
5. Citra Perusahaan yang positif (PKBL yang baik, terminal penumpang modern).
6. Pengalaman di bidang kepelabuhanan selama 40 tahun.
7. Memiliki pelanggan yang loyal.
8. Budaya perusahaan mendorong kinerja Pelindo III menuju terminal operator.
9. Kekuatan alat produksi yang menunjang bisnis pelabuhan

OPPORTUNITIES

1. Lokasi pelabuhan yang strategis.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
3. Tingkat inflasi yang terkendali.
4. Kondisi politik yang stabil mendukung kegiatan bisnis.
5. Potensi *hinterland* yang memacu pertumbuhan arus barang di pelabuhan.
6. Pertumbuhan pasar yang stabil.
7. Kondisi alam yang mendukung kegiatan kepelabuhanan.
8. Kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali.

Di sisi lain, menurut catatan atas laporan keuangan auditan 2018, manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki level sumber daya yang memadai dan kinerja pendapatan yang tinggi untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.



05 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK







TATA KELOLA PERUSAHAAN

Peran Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi setiap entitas usaha mutlak dibutuhkan dalam rangka menjamin kepentingan seluruh pihak, baik Pemangku Kepentingan maupun Pemegang Saham melalui aktivitas pengelolaan usaha yang bertanggung jawab, serta jauh dari aspek-aspek yang merugikan. Penerapan GCG pada Perusahaan tidak berkedudukan sebagai suatu dimensi yang terpisah, namun terintegrasi dalam setiap aktivitas inti perusahaan seperti pada aktivitas operasional dan pengelolaan keuangan. Tata kelola usaha yang baik jika dipraktikkan dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan tentunya mampu mendorong perbaikan kinerja usaha di tengah berbagai kondisi. Implementasi GCG yang baik setidaknya mampu membangun kepercayaan seluruh Pemangku Kepentingan serta memberikan *output* terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan usaha yang ada.

Sebagai sebuah entitas usaha yang memiliki visi ke depan di sektor jasa kepelabuhanan, Pelindo III tentunya memiliki keinginan untuk menciptakan tata kelola usaha yang baik dengan memenuhi serta menginternalisasi seluruh prinsip-prinsip yang terkandung. Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk menjadikan GCG sebagai budaya yang diterapkan secara menyeluruh di setiap tingkatan organisasi maupun jabatan.

PRINSIP DAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Prinsip tata kelola yang diterapkan oleh Perusahaan mengacu kepada peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *juncto* No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, yakni:

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. *Kemandirian (independency)*, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan

5. *Kewajaran (fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dari kelima prinsip GCG yang disebutkan, Pelindo III senantiasa berkomitmen untuk melakukan internalisasi dengan menyusun *roadmap* pengembangan GCG dengan memperhatikan tujuan bisnis yang ingin dicapai serta tantangan terkait pengelolaan usaha di masa mendatang. Perusahaan tentunya berupaya menyusun *roadmap* GCG yang mampu mengikuti perkembangan usaha di sektor jasa kepelabuhanan baik perkembangan yang ada di internal Perusahaan maupun dari eksternal.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Perusahaan, penerapan GCG menjadi suatu keharusan yang diterapkan di lingkungan Pelindo III. Penerapan ini sangat penting dalam menghadapi persaingan usaha serta iklim bisnis yang semakin kompetitif, guna meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan. Sebagai BUMN, Perusahaan memiliki acuan dasar penerapan GCG yang termuat dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Peraturan tersebut tentunya menjadi landasan utama Perusahaan dalam mengembangkan *best practice* pengelolaan usaha serta sebagai landasan atas komitmen pelaksanaan GCG di lingkungan Pelindo III.

Perusahaan berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan dan mengimplementasikan GCG serta wajib diketahui dan dijalankan oleh seluruh insan Pelindo III mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Pegawai. Hal ini menjadi substansial guna memenuhi tuntutan Pemangku Kepentingan dalam mencapai target Perusahaan yang diharapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN GCG

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, Pelindo III senantiasa berkomitmen dan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang terukur dan akuntabel. Perusahaan meyakini bahwa dengan mengimplementasikan GCG, Perusahaan akan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan bisnis dan kemudian mampu memberi warna pada kinerja Perusahaan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Filosofi dalam menjalankan bisnis ini menjadi latar belakang yang kuat bagi Pelindo III untuk menetapkan tujuan dalam menerapkan GCG.



TUJUAN PENERAPAN GCG BAGI PERUSAHAAN

NO.	TUJUAN	SASARAN TUJUAN
1.	Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.	- Melakukan pemenuhan <i>best practice</i> GCG pada organ-organ Perusahaan termasuk organ utama. - Pemenuhan standar yang berlaku pada proses bisnis Perusahaan. - Pemenuhan hak-hak Pemangku Kepentingan sesuai pada ketentuan yang berlaku. - Meminimalkan penyimpangan dalam kegiatan usaha. - Pengambilan keputusan yang mandiri yang berlandaskan penelaahan yang komprehensif.
2.	Membangun mekanisme <i>Check and Balances</i> antar organ Perusahaan serta Pemangku Kepentingan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan dan komunikasi antar organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya.	- Pelaksanaan asesmen dan/atau asesmen mandiri implementasi penerapan GCG pada Perusahaan. - Tindak lanjut <i>area of improvement</i> atas hasil asesmen dan/atau asesmen mandiri yang telah dilaksanakan.
3.	Meningkatkan kepercayaan Pemangku Kepentingan serta citra dan reputasi Perusahaan, sehingga mampu mendorong peningkatan hubungan bisnis dan kinerja Perusahaan.	- Tercapainya target skor implementasi GCG pada Perusahaan. - Mendapatkan penghargaan khususnya dalam bidang Implementasi GCG. - Publikasi informasi publik tepat waktu guna memenuhi prinsip transparansi.
4.	Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat.	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan GCG pada Perusahaan.
5.	Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien; serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan.	Pelaksanaan <i>review</i> terhadap sistem operasi dan prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan guna mengikuti perkembangan jaman dan menyesuaikan pada perubahan regulasi yang ada.
6.	Mendorong agar organ Perusahaan dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan khususnya di sekitar Perusahaan.	- Penandatanganan pakta integritas sebagai bagian dari komitmen Insan Pelindo III dalam implementasi GCG. - Penandatanganan surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

Komitmen kuat Perusahaan untuk mengimplementasikan prinsip dan nilai yang terkandung dalam GCG tentunya selaras dengan maksud dan tujuan keberadaan Perusahaan sebagai sebuah entitas usaha yang berbentuk BUMN. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 19 tahun 2003, pendirian BUMN haruslah memiliki tujuan seperti memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Ini tentunya sesuai dengan dimensi penerapan GCG yang berlaku umum yang terakomodasi dalam aspek *People, Profit, dan Planet*.

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perusahaan senantiasa mengedepankan pemenuhan aspek legal-formal dalam melaksanakan kegiatan tata kelola usahanya. Pemenuhan aspek tersebut direalisasikan dalam bentuk pengadopsian aturan yang berlaku di dunia usaha secara umum maupun regulasi yang berlaku di lingkungan BUMN atau di sektor perhubungan dan kemaritiman secara khusus di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

Selain mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang tata kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Jo. Peraturan menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan juga melakukan beberapa penyesuaian regulasi yang berlaku guna menyempurnakan pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan. Selain memenuhi ketentuan

yang berlaku, hal tersebut juga berfungsi untuk menciptakan interpretasi teknis terhadap mekanisme GCG yang terpadu di luar tujuan-tujuan kepatuhan. Dari regulasi yang berlaku, Perusahaan melakukan tafsiran atas muatan yang terkandung dari tiap-tiap regulasi yang bersinggungan dengan kegiatan usaha Perusahaan untuk kemudian diinternalisasi dalam bentuk aturan-aturan yang berlaku di lingkup internal.

Beberapa aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan usaha dan tata kelola Perusahaan yaitu:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 5 ayat 3).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 35 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No. 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5208).

KEPUTUSAN MENTERI

1. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-104/MBU/2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN.
2. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJPP.
3. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP.
4. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
5. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Direksi BUMN.
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 juncto PER-02/MBU/06/2016 juncto PER-01/MBU/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-16/MBU/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
8. Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN.
10. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
11. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

PERATURAN LAINNYA

1. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).
2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III.
3. Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006.
4. Anggaran Dasar Pelindo III.
5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam risalah RUPS.

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (COCG)

LATAR BELAKANG

Dalam rangka Impelementasi GCG di lingkungan Perusahaan, Pelindo III secara sistematis membentuk pedoman tata kelola Perusahaan yang disebut sebagai *Code of Corporate Governance* (CoCG) sebagai manual yang menjadi rujukan seluruh Insan Pelindo III dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Perusahaan menekankan



bahwa prinsip GCG merupakan kaidah, norma, ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja Perusahaan sehingga pelaksanaannya perlu dioptimalkan.

Penyusunan CoCG adalah upaya penjabaran lebih lanjut Perusahaan dalam mengimplementasikan praktik GCG. Dengan adanya CoCG, diharapkan akan tercipta suatu pola kerja tata kelola Perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

KEDUDUKAN DAN SIFAT PENGEMBANGAN COCG

Mengingat CoCG merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan.

Dengan karakteristik CoCG yang bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya sangat tergantung pada perubahan yang terjadi di Perusahaan. Untuk itu, secara berkala Perusahaan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan agar pelaksanaan CoCG Perusahaan relevan dengan kondisi Perusahaan dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di dunia bisnis secara umum dan sektor jasa kepelabuhanan secara khusus.

MUATAN COCG PERUSAHAAN

Dalam buku pedoman GCG Perusahaan, terangkum beberapa aspek pembahasan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. PENDAHULUAN

Pada bagian ini diterangkan mengenai apa yang menjadi latar belakang dibentuknya pedoman GCG (CoCG) di Perusahaan, maksud dan tujuan dikeluarkannya pedoman tersebut, serta ruang lingkup dan sistematika pengkajian pedoman.

2. POKOK-POKOK GCG

Dalam pembahasan pokok-pokok GCG, termuat informasi mengenai *soft structure* dalam penerapan GCG seperti tujuan penerapan GCG, prinsip-prinsip GCG, Visi dan Misi Perusahaan, dan Tata Nilai.

3. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Setelah memuat informasi mengenai *soft structure*, pembahasan selanjutnya adalah perangkat pelaksana (infrastruktur) GCG di lingkungan Perusahaan seperti organ utama pelaksana GCG, organ pendukung, serta struktur tata kelola dengan pihak eksternal.

4. PROSES GCG

Muatan proses GCG menerangkan petunjuk teknis atas ruang lingkup implementasi GCG pada organ utama, organ pendukung, dan struktur GCG lainnya seperti pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris,

penetapan kontrak manajemen (KPI), pendelegasian wewenang, penetapan anggaran dan kerja Perusahaan, mekanisme rapat, dan lain sebagainya.

5. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pada bab ini memuat pembahasan mengenai dimensi serta pola hubungan antara Perusahaan dengan berbagai Pemangku Kepentingan terkait dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG yang ada.

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG

Seiring dengan perkembangan dinamika dunia usaha baik global maupun nasional, penyempurnaan atas pelaksanaan teknis implementasi GCG senantiasa dilaksanakan Perusahaan. Peningkatan kualitas penerapan GCG dilakukan dengan merujuk pada standar penerapan tata kelola usaha yang berlaku di Indonesia serta rekomendasi dari hasil asesmen tata kelola yang dilakukan secara berkala. Dari rekomendasi tersebut, Perusahaan akan menindaklanjuti temuan-temuan dengan melakukan perbaikan dan mengupayakan meminimalisasi potensi risiko tata kelola yang timbul.

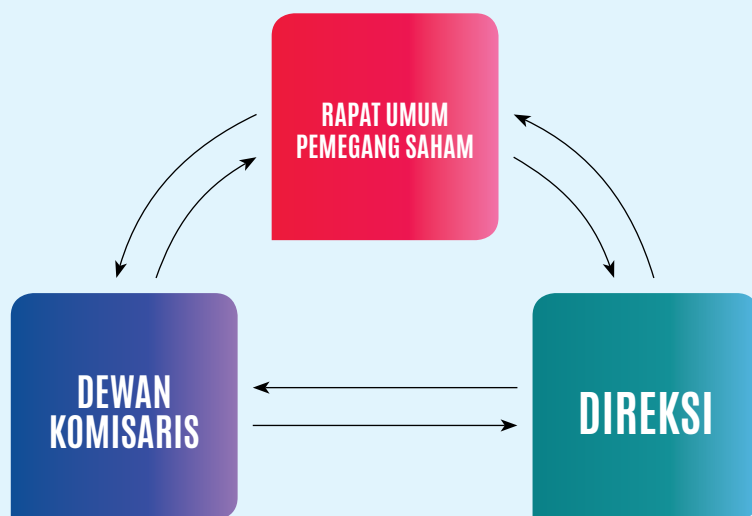
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUKTUR TATA KELOLA

Mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, struktur umum tata kelola perusahaan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi yang berkedudukan sebagai organ utama dalam melakukan tugas-tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha. Keseluruhan organ utama tersebut berperan dalam melaksanakan proses *check and balances* kegiatan usaha agar dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan secara sehat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, organ Perusahaan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

1. RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.



Organ Perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar.

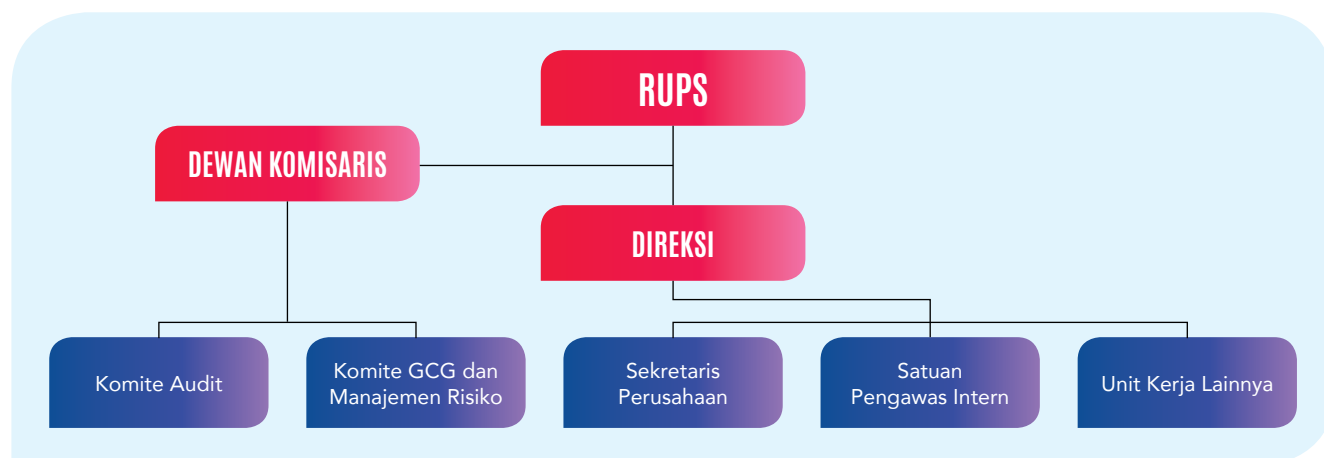
PENANGGUNG JAWAB TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direktur Sumber Daya Manusia ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan berdasarkan Peraturan Direksi No. 307.1/0503/P.III-2014 yang melaksanakan penerapan dan pemantauan terhadap tata kelola perusahaan yang sesuai dengan *Good Governance*.

KOORDINATOR PELAKSANA TATA KELOLA

Pelaksana Tata kelola Perusahaan di lingkungan Pelindo III berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan, pada sub-unit Investor Relation and Corporate Governance, sesuai Peraturan Direksi No. PER.0078/05.0101/HOFC-2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN





MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme implementasi GCG Perusahaan tecermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. *Governance mechanism* dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Perusahaan memiliki *Board Manual* yang disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).

Perusahaan telah memiliki *Board Manual*, *Code of Conduct*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Komite Audit *Charter*, Internal Audit *Charter*, dan berbagai kebijakan serta prosedur dalam mendukung terlaksananya tata kelola yang baik. Semua kebijakan dan prosedur tersebut dimaksudkan untuk mendorong Perusahaan agar mampu melakukan *check and balance* pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku.

SOSIALISASI, INTERNALISASI, DAN EVALUASI GCG

1. SOSIALISASI

Kesamaan persepsi atas implementasi GCG bagi seluruh Insan Pelindo III di setiap jenjang harus senantiasa tercipta. Hal ini berguna untuk menciptakan efektivitas pengelolaan serta menempatkan seluruh organ menuju pada satu visi yang sama terkait pemenuhan prinsip-prinsip yang ada. Untuk itu, diperlukan sarana yang tepat berupa sosialisasi atas implementasi GCG.

Kegiatan sosialisasi GCG ditujukan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai perkembangan aturan yang berlaku serta manfaat yang diciptakan terkait pemenuhan *best practice* GCG di lingkungan Perusahaan. Pemahaman tersebut harus disosialisasikan secara baik terhadap subjek-subjek pelaksananya, khususnya dalam lingkup internal Perusahaan/internalisasi. Hal tersebut disebabkan penerapan GCG banyak menitikberatkan pada kegiatan operasional Perusahaan yang banyak melibatkan pihak-pihak terkait di dalamnya.

BENTUK SOSIALISASI

Salah satu bentuk dilaksanakannya kegiatan sosialisasi penerapan GCG adalah kegiatan publikasi internal Perusahaan terkait kerangka kerja dan petunjuk implementasi GCG yang tertuang dalam *Code of*

Conduct Perusahaan. Publikasi atas *Code of Conduct* dilakukan kepada organ utama Perusahaan, organ pendukung dan pihak-pihak terkait lainnya. Di tahun 2018, Perusahaan juga melaksanakan sosialisasi GCG selain sosialisasi terhadap CoCG Perusahaan yaitu Pencegahan Gratifikasi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. INTERNALISASI

Salah satu bentuk kegiatan internalisasi GCG di Pelindo III adalah dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan GCG (*Code of Conduct*) yang telah disahkan melalui keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. *Code of Conduct* Pelaksanaan GCG yang tertuang dalam buku pedoman CoCG Perusahaan menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atas implementasi GCG di Perusahaan.

3. PENGUKURAN PENERAPAN GCG

Untuk memberikan gambaran serta evaluasi atas efektivitas pelaksanaan GCG di Perusahaan. Setiap tahunnya, Perusahaan melakukan kegiatan evaluasi dan pengukuran penerapan GCG melalui kegiatan asesmen dan/atau asesmen mandiri. Pelaksanaan asesmen GCG yang dilakukan oleh Perusahaan dilaksanakan dengan menggandeng pihak eksternal. Hasil dari pengukuran GCG menjadi masukan atas pengembangan GCG di Perusahaan (*area of improvement*) untuk ditindaklanjuti agar implementasi GCG yang diterapkan berkembang secara berkelanjutan.

4. PROSEDUR PELAKSANAAN ASESMEN GCG

Landasan yuridis dan prosedur pelaksanaan asesmen GCG di Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang tata kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Jo. Peraturan menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

ROADMAP PENERAPAN GCG

Pelindo III menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk *Roadmap* GCG yang diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan implementasi GCG di seluruh tingkatan. *Roadmap* GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai acuan dalam setiap aktivitas operasional. Sasaran akhir *Roadmap* GCG adalah terwujudnya Perusahaan sebagai *Most Trusted Company*. Diharapkan dengan dicapainya sasaran akhir tersebut, Perusahaan optimis dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja secara berkesinambungan.



ROADMAP PENERAPAN GCG





PENILAIAN PENERAPAN GCG

Peran penting penerapan GCG dalam mendukung serta menjaga kinerja usaha yang baik yang mampu mengakomodasi tidak hanya tujuan bisnis perusahaan namun juga ikut menjaga kepentingan Pemangku Kepentingan senantiasa perlu terus ditingkatkan dan terus diawasi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, secara berkala Perusahaan diwajibkan melakukan kegiatan evaluasi penerapan GCG guna mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan. Selain untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan GCG, adanya kegiatan evaluasi atau asesmen GCG dilakukan setiap entitas usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku serta penyesuaian atas kebutuhan sistem tata kelola terkini di dunia usaha.

STANDAR DAN TIPOLOGI PENILAIAN ATAS HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

STANDAR

Terkait pelaksanaan atas kegiatan asesmen GCG yang dilakukan oleh Perusahaan, pihak otoritas terkait dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai instansi induk Pelindo

III menerbitkan pedoman asesmen yang menjadi standar rujukan penilaian implementasi GCG pada BUMN. Standar tersebut termuat dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN. Dengan demikian, evaluasi atas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan akan merujuk pada regulasi tersebut untuk kemudian dipublikasikan pada sarana-sarana yang dibenarkan dalam aturan yang ada di eksternal maupun internal Perusahaan.

TIPOLOGI

Perbedaan jenis asesmen GCG terletak pada pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Terdapat 2 jenis asesmen GCG yang dilakukan diantaranya kegiatan asesmen yang melibatkan pihak, institusi, atau lembaga di luar Perusahaan (eksternal) dan kegiatan asesmen yang melibatkan pihak internal Perusahaan (*self-assessment*). Dalam melakukan kegiatan asesmen, Perusahaan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan periode asesmen 2 tahun sekali.

JENIS-JENIS METODE ASESMEN GCG DI PELINDO III

ASESMEN MANDIRI	ASESMEN EKSTERNAL
Menggunakan Standar Asesmen Keputusan No. SK-16/S.MBU/2012.	Menggunakan Standar Asesmen Keputusan No.SK-16/S.MBU/2012.
Tim penilai dilakukan oleh fungsi yang dibentuk khusus.	Tim penilai dilakukan oleh profesional dari masing-masing lembaga yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan asesmen di Perusahaan.
Dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.	Dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.

ASESMEN GCG 2018

Tujuan dari pelaksanaan asesmen GCG yang dilakukan Perusahaan adalah untuk mengukur, memberi gambaran, serta evaluasi bagi seluruh pihak mengenai sudah sejauh mana Perusahaan mampu menginternalisasi prinsip-prinsip GCG yang ada dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan. Asesmen GCG sendiri melakukan pengukuran pada 6 aspek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Hasil asesmen GCG disajikan dalam bentuk skor dengan indikator bobot yang berbeda, persentase capaian, serta kualifikasi kualitas penerapan GCG.

TAHAPAN PELAKSANAAN ASESMEN

Pada tahun 2018, Perusahaan telah melakukan asesmen yang dilakukan secara mandiri oleh internal Perusahaan (*self-assessment*). Rincian pra, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan asesmen GCG di tahun 2018 adalah sebagai berikut:



RINCIAN KEGIATAN ASESMEN GCG

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pembentukan Tim Internal	25 Juli 2018
2.	Entry Meeting	30 Juli 2018
3.	Penelaahan Dokumen	31 Juli - 31 Agustus 2018
4.	Pembahasan hasil asesmen	3 - 13 September 2018
5.	Exit Meeting	14 September 2018
6.	Pengumuman skor dan hasil asesmen	17 September 2018

HASIL PENILAIAN GCG 2018

Berdasarkan hasil *self-assessment*, di tahun 2018 penerapan GCG mengalami kemajuan yang cukup berarti, baik dalam lingkup penerapan maupun kedalaman masing-masing aspek. Perusahaan telah melaksanakan komitmen untuk menerapkan GCG di setiap lini organisasi. Dalam 5 tahun terakhir ini, skor penilaian GCG Perusahaan terus meningkat, hal ini menandai keinginan kuat perusahaan dalam penerapan GCG. Berikut hasil asesmen GCG Pelindo III (per aspek) di tahun 2018:

HASIL PENILAIAN GCG 2018

NO.	INDIKATOR	BOBOT	CAPAIAN		
			2018	2017	2016
1.	Komitmen terhadap penerapan tata kelola berkelanjutan	7	5,922	5,725	5,566
2.	Pemegang Saham dan RUPS	9	8,222	8,222	7,430
3.	Dewan Komisaris	35	32,524	32,524	31,064
4.	Direksi	35	32,652	32,458	32,508
5.	Pengungkapan informasi dan transparansi	9	8,268	8,268	8,262
6.	Aspek lainnya	5	5	1,750	0
JUMLAH		100	92,587	88,946	84,831
ASESOR			Self-Assessment	BPKP	Self-Assessment

Berdasarkan hasil *self-assessment*, penerapan GCG Pelindo III pada 2018 memperoleh skor sebesar 92,587 dengan kategori "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan hasil asesmen yang dilakukan pada 2016, Perusahaan memperoleh skor 84,831 atau mengalami kenaikan sebesar 7,756 poin atau 8.37%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan hasil asesmen tahun 2017 yang dilaksanakan oleh BPKP, Perusahaan memperoleh skor 88,946 atau mengalami kenaikan 3,641 poin atau 3,93%.



REKOMENDASI

Dalam upaya untuk terus memperbaiki kinerja, terdapat beberapa rekomendasi berdasarkan hasil *self-assessment* GCG di tahun 2018, sebagai berikut:

REKOMENDASI, TINDAK LANJUT, DAN ALASAN BELUM DITINDAKLANJUTINYA HASIL ASESMEN GCG TAHUN 2017

NO.	ASPEK	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENJELASAN/ ALASAN
1.	Pemegang Saham/RUPS	- Dalam keputusan Menteri sebagai Pemegang Saham terhadap pemberhentian anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris mencantumkan alasan pemberhentiannya. - Segera melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan atau revisi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan/persetujuan RJPP dan dilaksanakan tepat waktu. - Semua usulan Direksi mendapatkan persetujuan/keputusan Pemegang Saham/RUPS, baik itu disetujui maupun tidak setelah melalui pembahasan dan dilaksanakan <i>timely manner</i>. - Menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individu, kontrak manajemen individu Direksi, serta belum adanya penilaian kinerja Anggota Direksi secara individu.	Keputusan Menteri hingga saat ini belum mencantumkan alasan pemberhentian. Belum tepat waktunya melakukan pengesahan/persetujuan atas RJPP secara tepat waktu. Semua usulan Direksi baik yang disetujui maupun tidak telah melalui mekanisme pembahasan, namun belum tepat waktu. Belum menerapkan pedoman kinerja Direksi secara individu.	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Telah terdapat peningkatan Belum ditindaklanjuti
2.	Dewan Komisaris	- Menyusun program pelatihan Dewan Komisaris guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki. - Memberikan tanggapan terhadap rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan RKAP kepada Direksi secara <i>timely manner</i>. - Melakukan telaah secara tertulis terhadap kebijakan sistem TI dan kesesuaiannya dengan RKAP dan memberikan arahan dari hasil telaah terhadap kebijakan sistem TI kepada Direksi. - Melibatkan organ pendukung yang dimiliki (komite) untuk melakukan telaah secara tertulis terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. - Melakukan telaah atas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. - Dalam memberikan rekomendasi/persetujuan tertulis terhadap calon Direksi/Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan tidak melebihi 15 hari kalender. - Melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon yang diusulkan Direksi sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham dan mengusulkan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS/Pemegang Saham. - Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam kontrak manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. - Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara individu kepada RUPS/Pemegang Saham dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan. - Melampirkan pakta integritas dalam setiap usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemegang Saham. - Melakukan peninjauan dan revisi pedoman/tata tertib rapat Dewan Komisaris untuk memasukkan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.	Tanggapan tersebut telah diberikan secara tepat waktu. Dewan Komisaris melalui organ pendukungnya telah melakukan telaah tertulis terhadap kebijakan TI. Dewan Komisaris melalui organ pendukungnya telah melakukan telaah tertulis terhadap kebijakan pengadaan. Dewan Komisaris melalui organ pendukungnya telah melakukan telaah atas kepatuhan terhadap perundangan. Sebagaimana tercantum dalam <i>Code of Corporate Governance</i>. Melalui mekanisme rapat, Dewan Komisaris telah melakukan penelitian/pemeriksaan atas calon-calon yang disampaikan oleh Direksi. Penilaian kinerja Direksi dilakukan sesuai dengan capaian KPI yang telah ditentukan dan tercantum dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris.	Belum ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam <i>Code of Corporate Governance</i>. Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti



NO.	ASPEK	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENJELASAN/ ALASAN
3.	Direksi	- Mengeluarkan Keputusan Direksi tentang penunjukan pejabat perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan. - Meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di Perusahaan, membuat laporan berkala tentang pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK serta memberikan teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai pertauran perundang-undangan. - Melaksanakan kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada para Pemangku Kepentingan. - Melakukan peninjauan/evaluasi secara berkala terhadap Tim UPG. - Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan WBS serta melaksanakan sosialisasi WBS kepada karyawan. - Membuat kebijakan dan rencana kerja tentang pelatihan bagi anggota Direksi. - Membuat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengomunikasikan keputusan Direksi kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi maksimal 7 hari sejak keputusan disahkan. - Penyampaian rancangan atau revisi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan RKAP kepada RUPS/Menteri dan/atau Dewan Komisaris secara tepat waktu. Penyampaian RJPP kepada Dewan Komisaris sebelum 30 September dan kepada Pemegang Saham sebelum 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun yang direncanakan. Sementara itu, penyampaian RKAP ke Dewan Komisaris dilaksanakan sebelum 15 September tahun berjalan. - Membuat capaian target kinerja anggota Direksi secara individu. - Menerapkan sistem pengendalian mutu secara konsisten sehingga keluhan pelanggan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. - Membuat internal control report yang mencakup pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur keuangan yang memadai dan penilaian efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan. - Secara intensif mengusahakan penyelesaian permasalahan/ sengketa yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain. - Melakukan asesmen pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (<i>quality, cost, delivery, service</i>) secara berkala. - Menandatangani pakta integritas yang dilampirkan dalam setiap usulan tindakan direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS. - Membuat perencanaan rapat Direksi dan agenda yang dibahas dalam RKAP. - Pemanggilan RUPS belum dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. - RUPS pengesahan/persetujuan RJPP belum dilaksanakan.	Menerbitkan keputusan Direksi untuk berkoordinasi dengan KPK terkait dengan LHKPN. Terdapat penanggung jawab yang bertugas untuk memantau pelaporan LHKPN bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pelindo III. Workshop dan sosialisasi melalui e-mail blast dan banner telah dilakukan. Evaluasi dilakukan setiap tahun seiring dengan diterbitkannya laporan pengendalian gratifikasi oleh UPG. Dalam tahap peninjauan kebijakan WBS. Penerapan SLA dan SLG yang didukung oleh sertifikasi ISO menjadi dasar penerapan mutu Perusahaan. Unit hukum senantiasa mengusahakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dengan upaya maksimal. Telah dilampirkan	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah dilakukan sebagian Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
4.	Internal Audit	Menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern.	Telah dibuat <i>Internal Audit Charter</i> sebagai pedoman bagi internal audit.	Telah ditindaklanjuti
5.	Sekretaris Perusahaan	- Lebih selektif dalam pemilihan mitra untuk mencegah tambahan tanggakan pengembalian dana kemitraan. - Menyusun Laporan Tahunan sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga dapat menang dalam Annual Report Award (ARA).	Proses pemilihan mitra binaan telah dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan pedoman PKBL. Penyempurnaan Laporan Tahunan terus dilakukan.	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti



ASESMEN GCG 5 TAHUN TERAKHIR

Berikut adalah hasil asesmen GCG dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

SKOR GCG PELINDO III 2014-2018

TAHUN	SKOR	COMPANY CORPORATE GOVERNANCE SCOREBOARD (CCGS)	ASSESSOR
2018	92,587	Menggunakan indikator parameter asesmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	Self-Assessment (Internal)
2017	88,946	Menggunakan indikator parameter asesmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Provinsi Jawa Timur
2016	84,831	Menggunakan indikator parameter asesmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	Self-Assessment (Internal)
2015	82,956	Menggunakan indikator parameter asesmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Provinsi Jawa Timur
2014	82,409	Menggunakan indikator parameter asesmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	Self-Assessment (Internal)

PENILAIAN GCG DALAM 4 TAHUN KE BELAKANG

ASSESSOR	TAHUN	SKOR					
		KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN GCG	PS DAN RUPS	DEWAN KOMISARIS	DIREKSI	PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI	ASPEK LAINNYA
BPKP	2017	5,725	8,222	32,524	32,458	8,268	1,750
	2015	5,535	7,401	30,645	32,301	7,074	0
Self-Assessment	2018	5,922	8,222	32,524	32,652	8,268	5
	2016	5,566	7,430	31,064	32,508	8,262	0

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Komitmen peningkatan *best practice* tata kelola perusahaan yang baik tertuang dalam RKAP dan KPI Perusahaan dimana target perolehan skor asesmen GCG yang ditetapkan di tahun 2018 adalah sebesar 89 dan realisasinya sebesar 92,587. Terkait perbandingan dan realisasinya, Perusahaan telah menunjukkan komitmen nyata dalam hal meningkatkan implementasi seluruh prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas usahanya sehari-hari.

Pada dasarnya, dalam hal penetapan target skor asesmen GCG Perusahaan tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas nilai yang diperoleh namun juga melakukan kajian strategis dengan berbagai pihak di internal Perusahaan dalam hal ini *Internal Audit, Management System and Risk Management*, dan *Strategic Planning and Corporate Performance Bureau* untuk mengukur sejauh mana kapabilitas Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG serta keterpenuhan berbagai aspek yang disyaratkan dalam mendukung implementasi tata kelola usaha yang baik dan sehat.



INDIKATOR DALAM MENENTUKAN TARGET SKOR GCG

INDIKATOR

Dalam menentukan target perolehan skor GCG, Perusahaan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada yaitu:

1. Skor GCG di tahun sebelumnya (*self-assessment* dan/atau asesmen pihak eksternal);
2. Tingkat pemenuhan dan tindak lanjut atas rekomendasi GCG di tahun sebelumnya;
3. Implementasi atas *area of improvement* GCG;
4. *Shareholder Aspirations*.

VERIFIKASI

Selain melihat beberapa indikator yang ada, Perusahaan juga melakukan verifikasi implementasi GCG untuk melakukan penilaian apakah aspek keterpenuhan infrastruktur dan *soft structure* GCG di Perusahaan terkorelasi dengan praktik-praktik yang ada seperti tingkat pemenuhan kepatuhan, laporan pelanggaran, teguran dan sanksi administrasi, laporan tingkat penyimpangan, laporan pelanggaran kode etik, serta laporan dari whistleblowing system sepanjang tahun buku.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelaahan atas indikator serta verifikasi atas kondisi aktivitas tata kelola Perusahaan yang disebutkan sebelumnya, disimpulkan bahwa pengelolaan Perusahaan telah mengacu dan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian BUMN selaku Pemegang Saham.





KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Selain menggunakan media asesmen GCG dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tata kelola usaha yang baik di Perusahaan, Pelindo III juga memiliki sarana pengukuran lainnya salah satunya adalah *Key Performance Indicator* (KPI). Sarana pengukuran ini digunakan sebagai indikator untuk melakukan pengukuran capaian kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran maupun rencana kerja dalam RKAP 2018 guna memberikan target kerja lebih yang terukur kepada organ maupun unit kerja yang ada, serta menjadi alat ukur bagi Perusahaan dalam melakukan evaluasi di tahun-tahun ke depan. Dasar pelaksanaan pengukuran kinerja melalui KPI disahkan Perusahaan melalui RUPS dengan terlebih dahulu dilaporkan dan disetujui Kementerian BUMN.

METODE PENYUSUNAN KPI

Penerapan KPI Perusahaan berbasis pada metode Malcolm-Baldrige dan mengacu pada Pedoman Penentuan KPI pada BUMN sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN. Penentuan indikator pengukuran berdasarkan pada aspirasi Pemegang Saham melalui Surat dari Kementerian BUMN No. S-564/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan RKAP tahun 2019 dan kesepakatan pada Rakortas PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).

DASAR PENENTUAN KPI TAHUN 2018

1. Surat Kementerian BUMN No.S-08/S.MBU/2013 Tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI Dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul Pada Badan Usaha Milik Negara

2. Surat Kementerian BUMN No.S-513/S.MBU/2016 Tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal Untuk Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017

3. Sebagian Indikator KPI Tahun 2015 dan 2016

4. Per DJPL No. HK.103/2/18/DJPL-16 Tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial

Ayat H Butir 4
Jumlah Indikator KPI Minimal 13 dan Maksimal 21 Indikator

Ayat G Butir 2
Selisih bobot antar Indikator dalam 1 perspektif tidak boleh > 20% Paragraph G Point 2

Lampiran II Ayat 7 Butir D
11Parameter Kinerja Operasional Sektor Infrastruktur Bidang Pelabuhan

Point 2 Ayat 2 Butir B
Maksimum 3-5 Parameter pada Lampiran II dapat dijadikan KPI 2018



INDIKATOR DALAM MENENTUKAN TARGET KPI

Dalam menentukan target KPI, Perusahaan mengacu pada persyaratan yang tertuang di Pedoman Penentuan KPI pada BUMN sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN, dokumen RKAP Perusahaan tahun 2018, serta Per. DJPL No. HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial.

TARGET DAN PENCAPAIAN KPI KORPORAT

Di tahun 2018, hasil pencapaian KPI Korporat adalah sebesar 104,15 atau naik 1,20% dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercapai sebesar 102,92.

INDIKATOR PENENTUAN KPI 2018

NO.	INDIKATOR	DASAR PENENTUAN	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI PRESTASI	KETERANGAN
I. KEUANGAN DAN PASAR				24,00			26,37	Tercapai
1.	EBITDA MARGIN	Th 2016	%	8,00	41,25	45,14	8,76	Tercapai
2.	Capaian Pangsa Pasar Peti Kemas	Th 2016	%	8,00	99,50	99,52	8,01	Tercapai
3.	EBITDA	SHA 2017	Kali	8,00	4,19	5,73	9,60	Tercapai
II. FOKUS PELANGGAN				22,00			22,22	Tercapai
4.	Indeks Kepuasan Pelanggan	Th 2016	Skala Likert	7,00	4,00	4,00	7,00	Tercapai
5.	Indeks Keterikatan Pelanggan	Th 2015	%	7,00	75,00	77,28	7,22	Tercapai
6.	Tindak Lanjut Komplain Pelanggan	Th 2016	%	8,00	100,00	100,00	8,00	Tercapai
III. EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES				20,00			20,92	Tercapai
7.	Waiting Time for Pilot	SK DJPL 2016	Jam	4,00	0,22	0,08	4,20	Tercapai
8.	Produktivitas Bongkar Muat Terminal Peti Kemas	SK DJPL 2016	B/S/H	4,00	39,00	43,61	4,20	Tercapai
9.	Seaport Capacity Utilisation Rate (SCUR)	SHA 2017	%	4,00	62,00	50,66	4,20	Tercapai
10.	Tingkat Efektivitas Tambahan Peti Kemas	SK DJPL 2016	%	4,00	74,96	77,17	4,12	Tercapai
11.	Number of Ship/Customer Served	SHA 2017	GT	4,00	163.699.182	180.586.159	4,20	Tercapai
IV. FOKUS TENAGA KERJA				17,00			17,85	Tercapai
12.	Indeks Kepuasan Pegawai	Th 2016	Skala Likert	9,00	4,00	4,44	9,45	Tercapai
13.	Produktivitas Pegawai	Th 2016	Rp/Orang	8,00	631.650.334	718.336.690	8,40	Tercapai



NO.	INDIKATOR	DASAR PENENTUAN	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI PRESTASI	KETERANGAN
V. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN				17,00			16,83	Tidak Tercapai
14.	Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala BUMN	Th 2016	%	5,00	100,00	116,67	5,25	Tercapai
15.	Skor GCG	Th 2016	Skor	4,00	89,00	92,00	4,14	Tercapai
16.	Skor KPKU	Th 2016	Skor	4,00	650,00	631,25	3,88	Tidak Tercapai
17.	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Th 2016	%	4,00	87,50	77,68	3,56	Tidak Tercapai
JUMLAH A				100			104,15	Tercapai
B.	AGEN PEMBANGUNAN							
1.	Sinergi Antar BUMN	Th 2018	%	20,00	100,00	660,00	21,00	Tercapai
2.	Kandungan Lokal	Th 2018	%	20,00	40,00	86,71	21,00	Tercapai
3.	Pembangunan Ekonomi Daerah/ Penugasan Pemerintah	Th 2018	%	20,00	100,00	280,00	31,50	Tercapai
4.	Penciptaan Nilai Secara Mandiri	Th 2018	%	20,00	100,00	67,31	20,20	Tidak Tercapai
JUMLAH B				100			93,70	Tidak Tercapai
RATA RATA TERTIMBANG (90% X A) + (10% X B)				100			103,14	Tercapai

PENCAPAIAN KPI KORPORAT 3 TAHUN TERAKHIR

Dalam 3 tahun terakhir, pencapaian KPI Korporat adalah sebagai berikut:

PENCAPAIAN KPI KORPORAT 2016-2018

NO.	TAHUN	PENCAPAIAN KPI
1.	2018	104,15
2.	2017	102,92
3.	2016	97,19

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Asesmen implementasi KPKU tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pembahasan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) tahun 2018 No. SEKTAP. 02/17/10/PI, II, III, & IV/2018 tanggal 17 Oktober 2018 terkait Pelaksanaan Asesmen KPKU tahun 2018, Pelindo I, II, III dan IV sepakat melaksanakan asesmen KPKU di tahun 2018 melalui metode *Self-Assessment*. Kriteria yang digunakan mengacu pada Buku KPKU BUMN tahun 2017 yang didasarkan pada 2 dimensi penilaian yaitu dimensi proses dan hasil.

Pada tahun 2017 Pelindo III mencapai skor 620,25 dan mendapatkan predikat "*Emerging Industry Leader*". Tahun 2018 Pelindo III menargetkan tercapainya peningkatan skor untuk persiapan menuju tahapan selanjutnya yaitu menjadi "*Industry Leader*" dengan terus melakukan *continuous improvement*. Asesmen implementasi KPKU Pelindo III tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 25-30 Januari 2019. Hingga Laporan Tahunan ini disusun, Perusahaan sedang menunggu hasil *Quality Assurance* dari Tim Forum Ekselen BUMN (FEB) untuk Laporan Umpan Balik (*Feedback Report*) Asesmen Implementasi KPKU BUMN PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2018.



FAKTOR PENILAIAN PROSES

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/ Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI.

1. Metode/Sistem (*Approach*) adalah metode/sistem yang di desain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada:
 - a. Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi Perusahaan.
 - b. Efektivitas dari penggunaan metode/sistem tersebut.
 - c. Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang (*repeatable*) dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematis).
2. Penerapan (*Deployment*) mengacu pada sejauh mana:
 - a. Metode/Sistem diterapkan sesuai dengan desainnya.
 - b. Metode/Sistem diterapkan secara konsisten.
 - c. Metode/Sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang terkait sesuai dengan desainnya.
3. Pembelajaran (*Learning*) mengacu pada:
 - a. Penyempurnaan Metode/Sistem dengan cara siklus evaluasi dan perbaikan (*improvement*).
 - b. Inovasi Metode/Sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan (*breakthrough*).
 - c. Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap Metode/Sistem, kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang terkait dalam Perusahaan.
4. Integrasi (*Integration*) mengacu pada:
 - a. Keselarasan Metode/Sistem dengan kebutuhan Perusahaan yang dijelaskan pada Profil Perusahaan dan pada subkategori proses lainnya.
 - b. Ukuran, informasi, dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses.
 - c. Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmoniskan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran Perusahaan.

Subkategori pada dimensi Proses yang terdiri dari ADLI tersebut, dilakukan klarifikasi, saling dihubungkan untuk menekankan bahwa deskripsi *Approach* harus selalu menunjukkan penerapan yang konsisten dengan persyaratan spesifik suatu subkategori dan Perusahaan. Seiring dengan semakin matangnya proses, maka deskripsinya juga harus menunjukkan bagaimana siklus pembelajaran (termasuk inovasi) dan juga integrasi dengan proses kerja lainnya dan dengan unit kerja lainnya.

FAKTOR PENILAIAN HASIL

Faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level*, *Trend*, *Comparison* dan *Integration* (LeTCI).

1. Level mengacu pada: tingkat pencapaian kinerja saat ini;
2. Trend mengacu pada:
 - a. Tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik (yakni, kecuraman data trend) dari waktu ke waktu (minimum dalam 3 tahun terakhir).
 - b. Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil-hasil kinerja.
3. *Comparison* mengacu pada:
 - a. Perbandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap pembanding yang sesuai misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis.
 - b. Perbandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia;
4. *Integration* mengacu pada:
 - a. Ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam Profil Perusahaan dan dalam sub-sub kategori pada kategori 1 s.d 6.
 - b. Hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang;
 - c. Hasil-hasil diharmoniskan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran Perusahaan.

Subkategori pada dimensi hasil tersebut diklarifikasi dengan meminta data yang menunjukkan level kinerja, trend dan perbandingan yang terkait untuk ukuran dan indikator utama kinerja Perusahaan serta terintegrasi dengan persyaratan utama Perusahaan. Subkategori pada dimensi hasil juga meminta data tentang luasnya cakupan hasil-hasil kinerja yang dilaporkan. Secara langsung hal ini terkait dengan penerapan dan pembelajaran Perusahaan; jika proses perbaikan disebarkan secara luas maka harusnya ada hasilnya yang sesuai.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola Perusahaan yang menjadi medium pengambilan keputusan antara para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam menentukan fondasi pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun buku yang ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. RUPS juga merupakan organ Perusahaan yang memegang otoritas tertinggi dalam Perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi. RUPS adalah representasi dari Pemegang Saham dalam berinteraksi dengan Perusahaan.

JENIS RUPS

Jenis RUPS Pelindo III terdiri dari:

1. RUPS Tahunan untuk mengesahkan RKAP yang diselenggarakan paling lambat 1 bulan setelah periode tahun yang baru dimulai;
2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan yang diselenggarakan paling lambat dalam 6 bulan setelah tahun buku berakhir;
3. RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

WEWENANG RUPS

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Perseroan terbatas No. 40 tahun 2007, RUPS memiliki kewenangan selain dari pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Komisaris. Pada BUMN, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, RUPS diwakili oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan, karena aset/kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri

Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Dengan kewajiban Menteri BUMN untuk melaporkan kepada Menteri Keuangan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan antara lain untuk:
 - a. Dividen kepada Pemegang Saham.
 - b. Cadangan.
 - c. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun individu atas Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan.
7. Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Dewan Komisaris.
9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris.
10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.
11. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.
12. Membubarkan atau melikuidasi Perusahaan.
13. Mengalihkan kepemilikan saham perusahaan.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

Pemegang Saham yang bertindak sebagai Pemegang Saham Utama dan Pengendali adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebesar 100% atau mewakili sebanyak 3.200.000 lembar saham dalam bentuk saham Seri A Dwiwarna. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 14 ayat 1 tentang BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara.



PEMEGANG SAHAM PELINDO III



HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Ruang lingkup hak dan tanggung jawab Pemegang Saham Perusahaan tercantum dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, terdiri dari:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan.
3. Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen).
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu sesuai dengan Anggaran Dasar.
5. Mengalihkan kepemilikan saham Perusahaan.

KESETARAAN DI ANTARA PEMEGANG SAHAM

Dengan status Perusahaan sebagai BUMN yang kepemilikan saham 100% di pegang oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN, cakupan atas pemenuhan aspek kesetaraan (*fairness*) Pemegang Saham di lingkungan Perusahaan tidak terlalu luas seperti pada Perusahaan publik. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban Perusahaan serta pemenuhan atas hak Pemegang Saham hanya dilakukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti standar pelaporan yang berlaku di bawah Kementerian BUMN. Meski demikian, sebagai bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas terutama bagi masyarakat yang memegang obligasi Perusahaan, Perusahaan tetap mempublikasikan beberapa informasi dalam bentuk Laporan Keuangan (triwulan, semesteran, tahunan baik yang belum dilakukan audit maupun yang telah diaudit), Laporan Tahunan Perusahaan, Laporan Manajemen, Laporan PKBL dan bentuk-bentuk pengungkapan lainnya yang dibenarkan dari segi regulasi yang berlaku.

AKSES INFORMASI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perusahaan membagi saluran akses informasinya dengan melakukan klasifikasi sesuai pada kebutuhan masing-masing pihak. Sehubungan dengan kepemilikan tunggal saham Perusahaan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, Perusahaan senantiasa memenuhi ketentuan pemberian akses informasi melalui ketentuan yang berlaku di Kementerian BUMN. Selain itu, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya terkait masyarakat pemegang obligasi Perusahaan, Perusahaan juga memberikan akses informasi dengan materi-materi informasi yang dibenarkan secara regulasi.

AKSES INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perusahaan memberikan akses informasi terkait kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham melalui *announcement*, paparan publik dan pertemuan dengan analis, *press release*, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Penelitian yang terkait dengan kinerja Perusahaan. Perusahaan juga memberikan informasi atas permintaan data langsung yang diminta oleh Pemegang Saham.

AKSES INFORMASI KEPADA MASYARAKAT (PEMEGANG EFEK LAINNYA)

Perusahaan memberikan akses informasi terkait kinerja Perusahaan kepada seluruh Pemegang Saham melalui *announcement*, paparan publik dan pertemuan dengan analis, *press release*, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Penelitian yang terkait dengan kinerja Perusahaan.



LAPORAN REALISASI RUPS TAHUN SEBELUMNYA

AGENDA, KEPUTUSAN, DAN REALISASI RUPS TAHUN 2017

Sepanjang tahun 2017, Pelindo III telah melaksanakan RUPS Laporan Tahunan tahun buku 2016, Laporan Pengesahaan RKAP tahun 2017, serta RUPS berupa Surat Keputusan.

REALISASI RUPS TAHUN 2017

NO.	TANGGAL & TEMPAT RUPS	NAMA & AKTA PELAKSANAAN RUPS	AGENDA & HASIL RUPS	STATUS REALISASI
1.	19 Januari 2017, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.	RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Berita Acara RUPS RKAP No. 02 Persetujuan RKAP Tahun Buku 2017	1. Persetujuan/Pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2017; 2. Persetujuan dan Pengesahan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017; 3. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2017.	Terhadap agenda RUPS RKAP Tahun 2017 telah diambil keputusan seluruhnya.
2.	4 Mei 2017, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.	RUPS berupa Surat Keputusan SK No. SK-89/MBU/05/2017	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.	
3.	08 Mei 2017, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.	RUPS Laporan Tahunan 2016 Berita Acara RUPS Tahunan No. 05 Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2016; 3. Penetapan Besaran dan Sumber Dana PKBL Tahun Buku 2017; 4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2016; 5. Penetapan Penghasilan, Honorarium, dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2017 6. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;	Terhadap agenda RUPS Laporan tahunan 2016 telah diambil keputusan seluruhnya
4.	14 September 2017, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.	RUPS berupa Surat Keputusan SK No. SK-198/MBU/09/2017	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	

PERNYATAAN PEMENUHAN KEPUTUSAN RUPS RKAP 2017

Seluruh keputusan atau arahan Pemegang Saham tahun 2017 dalam RUPS Kinerja tahun buku 2017 dan RUPS RKAP 2016 telah selesai ditindaklanjuti.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS SERTA PEMBAHASAN TENTANG RUPS 2018

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

1. PERSIAPAN RAPAT:

- Pemanggilan untuk RUPS Tahunan disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 14 hari kerja sebelum acara RUPS dilaksanakan. Surat atau media pemanggilan harus mencakup informasi mengenai:
 - Agenda RUPS.
 - Materi usulan dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara RUPS.



- Hari, tanggal, dan jam diadakannya RUPS.
- Tempat pelaksanaan RUPS.

- Tempat pelaksanaan RUPS adalah di lokasi tempat beroperasinya Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia;
- Tidak perlu dilakukan pemanggilan tertulis untuk RUPS Luar Biasa jika semua peserta RUPSLB sudah mengetahui, menyetujui, dan menyatakan dapat hadir.

2. PELAKSANAAN RAPAT:

- RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemegang Saham.
- RUPS diawali dengan pembacaan tata tertib RUPS.
- RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS.
- Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS.

3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

- Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan adil.
- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah.

4. PENDOKUMENTASIAN HASIL RUPS:

- Sekretaris Perusahaan atau Notaris membuat risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS.
- Risalah RUPS harus ditandatangani Ketua Rapat dan Pemegang Saham.
- Penandatanganan risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan berita acara notaris.
- Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.
- Pemegang Saham berhak memperoleh risalah RUPS.

5. RUPS Sirkuler:

- Pemegang Saham dapat melaksanakan RUPS secara sirkuler.
- Syarat dan ketentuan pelaksanaan RUPS sirkuler ditetapkan oleh Pemegang Saham.

RENCANA DAN REALISASI PENYELENGGARAAN RUPS 2018

Sesuai dengan agenda dan perencanaan yang ditetapkan oleh Perusahaan serta memperhatikan secara seksama aturan-aturan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta memperhatikan arahan yang diberikan oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Utama Perusahaan, maka:

- Penyelenggaraan RUPS RKAP 2018 diselenggarakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dan bertempat di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.
- Penyelenggaraan RUPS Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan 2018 diselenggarakan pada hari Selasa 3 April 2018 dan bertempat di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.

PUBLIKASI RUPS KEPADA PEMEGANG SAHAM

Sebelum Perusahaan melaksanakan kegiatan RUPS baik RKAP maupun Laporan Tahunan bersama Pemegang Saham, Perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham untuk kemudian disepakati dan diagendakan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Proses Penyampaian Informasi RUPS kepada Pemegang Saham melalui mekanisme surat menyurat sebagaimana diatur dalam *Code of Corporate Governance* (CoCG).

KETENTUAN KUORUM DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI DALAM RUPS

Dikarenakan status Perusahaan sebagai BUMN yang bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, dalam melaksanakan agenda kegiatan RUPS, Perusahaan memiliki ketentuan kuorum sebagai berikut:

- RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 51% dari jumlah seluruh saham.
- Dalam hal kuorum tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat Kedua.
- Dalam pemanggilan kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling sedikit 50% dari jumlah seluruh saham.
- Jika pada RUPS kedua masih belum tercapai kuorum, maka Perusahaan melakukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk ditetapkan kuorum RUPS ketiga.
- Dalam pemanggilan RUPS ketiga, harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan.
- RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

AGENDA, KEPUTUSAN, DAN REALISASI RUPS 2018

Sepanjang tahun 2018, Pelindo III telah melaksanakan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017, Laporan pengesahaan RKAP tahun 2018, serta RUPS berupa Surat Keputusan.



REALISASI RUPS TAHUN 2018

NO.	TANGGAL & TEMPAT RUPS	NAMA & AKTA PELAKSANAAN RUPS	AGENDA & HASIL RUPS	STATUS REALISASI
1	22 Januari 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.	RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Berita Acara RUPS RKAP No. 08 Persetujuan RKAP Tahun Buku 2018	1. Persetujuan/Pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018; 2. Persetujuan dan Pengesahan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018; 3. Penetapan Indikator Aspek Operational untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018. 4. Persetujuan penyesuaian penetapan nilai dan jangka waktu kerja sama yang menjadi kewenangan Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. 5. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% dari masing-masing item investasi.	Terhadap agenda RUPS RKAP Tahun 2018 telah diambil keputusan seluruhnya.
2	3 April 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat	RUPS Laporan Tahunan 2018 Berita Acara RUPS Tahunan No. 02 Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2017; 3. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018. 4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018.	Terhadap agenda RUPS Laporan tahunan 2017 telah diambil keputusan seluruhnya.
3	12 Juli 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.	RUPS berupa Surat Keputusan SK No. SK-207/MBU/07/2018	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPSPerusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	
4	19 September 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.	RUPS berupa Surat Keputusan SK No. SK-244/MBU/09/2018	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPSPerusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	
5	5 November 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.	RUPS berupa Surat Keputusan SK No. SK-289/MBU/11/2018	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPSPerusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	



DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPS

Dalam pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan pada 3 April 2018, Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir antara lain:

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RUPS 2018

NAMA		JABATAN
DEWAN KOMISARIS		
1.	Hari Bowo	Komisaris Utama
2.	Zainal Abidin	Komisaris
3.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris
4.	Heddy Lugito	Komisaris
DIREKSI		
1.	I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra	Direktur Utama
2.	U. Saefudin Noer	Direktur Keuangan
3.	Husein Latief	Direktur Teknik dan Teknologi Informasi
4.	M. Iqbal	Direktur Komersial dan Operasional
5.	Toto Heli Yanto	Direktur SDM dan Umum

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DAN PEMUNGUTAN SUARA

Pengambilan keputusan RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dikarenakan kepemilikan saham Perusahaan dipegang penuh oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN.

RUPS LUAR BIASA

Selain RUPS Pembahasan RKAP dan RUPS Laporan Tahunan, Perusahaan juga memiliki organ RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Ketentuan pelaksanaan RUPS LB Perusahaan, dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

MEKANISME PELAKSANAAN RUPS LB

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak menutup kemungkinan Perusahaan melaksanakan kegiatan RUPS LB. Dengan mengacu pada UU No. 40 tahun 2007 Pasal 79 Ayat 1, Direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPS LB dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPS LB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. Pemegang Saham yang dimaksud dapat terdiri dari 1 orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permintaan tersebut diajukan oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Tembusan dari surat tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN RUPS LB 2018

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, Perusahaan tidak pernah menyelenggarakan RUPS LB baik dalam bentuk agenda kegiatan maupun pengambilan keputusan yang bersifat sirkuler.



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris, adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Pengawasan, nasihat dan arahan yang diberikan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam forum resmi dan diberikan secara tertulis. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada beberapa dasar aturan yaitu UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, *Code of Conduct* pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan yang tertuang dalam *Code of CG* untuk kemudian diuraikan dalam secara lengkap dalam *Board Manual* sesuai Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Dengan mengacu pada dasar aturan tersebut, Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi, dengan prinsip-prinsip:

1. Selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.
3. Pengawasan, nasihat, dan arahan yang diberikan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam forum resmi dan diberikan secara tertulis.
4. Dewan komisaris bertindak sebagai majelis (bersifat kolegial) dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri.
5. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak memiliki Direksi.
6. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui dan tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara proaktif, mencakup semua aspek bisnis.

7. Dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Secara umum tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan target kinerja Dewan Komisaris secara periodik serta menyusun pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan Direksi, termasuk pelaksanaan rencana pengembangan Perusahaan, RJPP, dan RKAP serta perubahannya.
3. Menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
4. Menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan.
5. Memantau kepatuhan Direksi atas peraturan perundangan yang berlaku.
6. Mengawasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian intern.
7. Mengkaji pemanfaatan teknologi informasi.
8. Memantau dan mengevaluasi kinerja Perusahaan.
9. Mengadakan rapat secara berkala membahas hasil pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan Direksi.
10. Jika oleh sebab apapun juga Perusahaan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi kekosongan Direksi tersebut.
11. Selama jabatan anggota Direksi kosong dan RUPS belum mengangkat anggota Direksi baru, Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong.
12. Melaksanakan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham.
13. Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.

14. Menginformasikan kepada RUPS perihal kepemilikan saham dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain untuk dicantumkan dalam Laporan Tahunan.
15. Memantau efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas, merencanakan dan melaksanakan evaluasi atas implementasi GCG.
16. Mengkaji komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, proses nominasi Direksi serta kebijakan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
17. Mengkaji kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta kesesuaian remunerasi dengan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
18. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

HAK DEWAN KOMISARIS

Hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.
2. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas biaya Perusahaan, atau membentuk komite-komite sesuai kebutuhan.
3. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan.
4. Menerima gaji dan tunjangan lain termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
5. Mendapatkan fasilitas Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.
6. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan.
7. Melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku.

KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
 - a. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/ BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/ BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/ BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
 - b. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

- c. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
- d. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- e. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- f. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Mengajukan usulan calon Direksi yang baru kepada RUPS.
3. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jikalau Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menunjuk anggota Direksi yang ada untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya.
5. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
7. Mengadakan pengawasan atas pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.

PENDELEGASIAN WEWENANG

Ketentuan terkait pendelegasian wewenang Dewan Komisaris di Perusahaan yaitu Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*)

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD CHARTER)

Pengungkapan *Board Charter* dilakukan melalui website Perusahaan www.pelindo.co.id pada sub menu Tata Kelola. Disamping itu, *Board Charter* juga menjadi materi pada program orientasi/pengenalan bagi Anggota Baru Komisaris baru.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP

Dalam rangka menginternalisasikan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan aktivitas pengawasan di Perusahaan, Pelindo III pada tanggal 3 September 2018 menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi



Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*), menggantikan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 dan KEP.745.1/HK.04/P.III-2015 mengenai review dan revisi panduan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Pelindo III sebagai acuan bagi tata laksana kerja bagi organ Dewan Komisaris Perusahaan yang meliputi:

1. Persyaratan, keanggotaan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewenangan Dewan Komisaris
5. Hak Dewan Komisaris
6. Hubungan Kerja dengan Direksi
7. Mekanisme Pengawasan Dewan Komisaris
8. Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris
9. Komite-Komite Dewan Komisaris
10. Sekretariat Dewan Komisaris
11. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

DASAR HUKUM PENYUSUNAN BOARD MANUAL

Tata aturan kerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang berisi teknis tugas pengawasan dan pemberian saran atas pengelolaan perusahaan kepada Direksi. *Board Manual* merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari Pemegang Saham, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris. *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan pemberlakuan *Board Manual* ini adalah:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas.
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN.
5. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan.
6. Peraturan Menteri BUMN No. Per- 01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN.
7. Peraturan Menteri BUMN No. Per- 03/MBU/2012 tentang pedoman pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN.
8. Peraturan Menteri BUMN No. Per- 09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN.

9. Peraturan Menteri BUMN No. Per- 12/MBU/2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
10. Peraturan Menteri BUMN No. Per- 02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
11. Peraturan Menteri BUMN No. Per- 03/MBU/02/2015 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
12. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE- 01/MBU/2009 tentang Pengaturan Cuti bagi Direksi serta Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE- 08/MBU/12/2015 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
14. Surat Menteri Negara BUMN No. S- 375/MBU.Wk/2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN Dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN.
15. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
16. Anggaran Dasar Pelindo III.

TUJUAN PEMBENTUKAN BOARD MANUAL

Board Manual menjelaskan tentang tanggung jawab, tugas kewenangan, dan hak organ utama Perusahaan, terutama Dewan Komisaris dan Direksi, untuk mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien. Maksud penyusunan dan pelaksanaan *Board Manual* adalah wujud nyata pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan.

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan *Board Manual* adalah menguraikan dan menjabarkan tanggung jawab, tugas, kewenangan serta hak Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung berjalannya proses atau hubungan kerja di antara kedua organ utama Perusahaan tersebut, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Selain itu, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian Perusahaan secara maksimal, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota. Pembagian tugas bagi tiap-tiap anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Surat Keputusan Komisaris Utama Pelindo III No. SK-146/08/KEP/DK.P.III/2018 tentang Penetapan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Pelindo III yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 2018. Adapun penjelasan pembagian tugas mengacu pada regulasi tersebut disampaikan dalam tabel berikut:



PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN
01.	Hari Bowo	Komisaris Utama	Mengkoordinasikan semua bidang tugas organ Dewan Komisaris.
02.	Zainal Abidin	Komisaris Independen	Mempunyai ruang lingkup tugas meliputi: • Audit • Optimalisasi Aset • Sistem Pelaporan • Kinerja Operasional
03.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris	Mempunyai ruang lingkup tugas meliputi: • Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi • Pembinaan Anak Perusahaan • Hukum dan Litigasi • Restrukturisasi
04.	Heddy Lugito	Komisaris Independen	Mempunyai ruang lingkup tugas meliputi: • GCG dan Manajemen Risiko • Pengadaan Barang dan Jasa • Organisasi, SDM, Umum, Remunerasi, dan Nominasi • Pemasaran dan Pengembangan Usaha
05.	Dedi Syarif Usman	Komisaris	Mempunyai ruang lingkup tugas meliputi: • Perencanaan jangka pendek Perusahaan • Akuntansi, Keuangan, PKBL, dan Perpajakan • Investasi dan Sumber Pendanaan • Perencanaan Strategis Perusahaan

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan dalam RUPS oleh Pemegang Saham. Susunan dan perubahan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS I

NO.	NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
1.	Hari Bowo	Komisaris Utama	Surat Keputusan No. SK-127/MBU/2014 Tanggal 10 Juni 2014
2.	Soritaon Siregar	Komisaris	Surat keputusan No. SK-413/MBU/2012 Tanggal 21 November 2012
3.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris	Surat Keputusan No. SK-30/MBU/02/2016 Tanggal 9 Februari 2016
4.	Heddy Lugito	Komisaris Independen	Surat keputusan No. SK-241/MBU/10/2016 Tanggal 19 Oktober 2016
5.	Zainal Abidin	Komisaris Independen	Surat Keputusan No. SK-198/MBU/09/2017 Tanggal 14 September 2017
6.	Dedi Syarif Usman *)	Komisaris	Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018 Tanggal 12 Juli 2018

*) Dedi Syarif Usman menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak tanggal 12 Juli 2018 menggantikan Soritaon Siregar dengan Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018.



Setelah Dedi Syarif Usman diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan Soritaon Siregar yang diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018, maka komposisi Dewan Komisaris menjadi:

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS II

NO.	NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
1.	Hari Bowo	Komisaris Utama	Surat Keputusan No. SK-127/MBU/2014 Tanggal 10 Juni 2014
2.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris	Surat Keputusan No. SK-30/MBU/02/2016 Tanggal 9 Februari 2016
3.	Heddy Lugito	Komisaris Independen	Surat keputusan No. SK-241/MBU/10/2016 Tanggal 19 Oktober 2016
4.	Zainal Abidin	Komisaris Independen	Surat Keputusan No. SK-198/MBU/09/2017 Tanggal 14 September 2017
5.	Dedi Syarif Usman	Komisaris	Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018 Tanggal 12 Juli 2018

PROSEDUR PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PEMILIHAN ULANG DEWAN KOMISARIS (SUKSESI DEWAN KOMISARIS)

Dengan status Pelindo III sebagai BUMN yang kinerjanya diawasi oleh Kementerian BUMN, dinamika pengangkatan dan pemberhentian di tataran organ utama Perusahaan termasuk Dewan Komisaris menjadi dinamika yang selalu dilalui. Selain menciptakan regenerasi, hal ini juga bertujuan untuk menjaga independensi dan kredibilitas fungsi pengawasan perusahaan agar tetap bersandar pada prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Regenerasi pejabat Perusahaan juga ditujukan untuk mendekatkan Perusahaan pada perspektif baru di dalam dunia bisnis terutama di sektor jasa kepelabuhan yang dibawa oleh para profesional terbaik yang dimiliki bangsa.

Terkait dengan menempatkan konsep *right man on the right place* dalam struktur Dewan Komisaris Perusahaan, Kecakapan dan kemampuan Dewan Komisaris dibutuhkan Perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan strategis. Melalui kompetensi yang dimiliki, Perusahaan dapat memperoleh pandangan profesional maupun pertimbangan dari setiap anggota Dewan Komisaris dari sudut pandang yang beragam agar kebijakan yang dirumuskan oleh Perusahaan jauh lebih efektif, tepat dan tentunya mengedepankan aspek-aspek independensi. Dengan begitu, jalannya operasional Perusahaan diharapkan sesuai dengan visi maupun target yang telah dicanangkan.

Dalam melaksanakan pengangkatan, pemberhentian dan pemilihan ulang Dewan Komisaris, Pedoman pelaksanaannya mengikuti petunjuk yang tercantum dalam *Code of Corporate Governance* (CoCG) Perusahaan. Dalam hal pedoman petunjuk teknis, Perusahaan menggunakan rujukan beberapa kebijakan terkait diantaranya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Usaha yang Baik (GCG) pada BUMN serta Anggaran Dasar Pelindo III. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Perusahaan juga merujuk pada regulasi tersebut dan mekanisme penilaiannya mengacu dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-09A/MBU/2002 Tentang Penilaian Kelayakan dan Kepadatan Calon Anggota Direksi BUMN.

MEKANISME PENGANGKATAN

1. SUMBER BAKAL CALON

Pengajuan nama-nama calon Dewan Komisaris didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris, pejabat struktural dan fungsional pemerintah dari sumber lain.

2. PENJARINGAN

Penjaringan nama-nama Dewan Komisaris dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

3. PENILAIAN

Merujuk pada PER-02/MBU/02/2015, secara umum penilaian yang dilakukan terhadap calon meliputi pemenuhan persyaratan baik formal, materiil dan lain; evaluasi terhadap persyaratan; diajukan dengan memberikan rekomendasi "Disarankan".

4. USULAN PENGANGKATAN

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi "Disarankan" oleh tim penilai dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris Perusahaan. Untuk penetapan, karena status Perusahaan sebagai BUMN yang kepemilikan seluruh saham dimiliki negara maka penetapan dilakukan melalui Keputusan Menteri.

PEMBERHENTIAN

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian sebagaimana tercantum dalam PER-02/MBU/02/2015 yaitu:

1. ALASAN PEMBERHENTIAN

Alasan pemberhentian Dewan Komisaris meliputi ketidakmampuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan, terlibat tindakan merugikan



bagi Perusahaan dan negara, melakukan tindakan yang melanggar etika, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan serta mengundurkan diri.

2. TATA CARA PEMBERHENTIAN

Tata cara pemberhentian dilakukan dengan evaluasi oleh Deputi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengajukan usulan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN. Sebelum ditetapkan dan dievaluasi, Perusahaan terlebih dahulu memberikan informasi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan agar Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan diri dengan ketentuan pembelaan diri disampaikan dalam bentuk tertulis dan isan (untuk lisan dibuatkan berita cara penyampaian pembelaan) maksimal disampaikan 14 hari terhitung setelah Dewan Komisaris yang bersangkutan memperoleh informasi pemberhentian kepada Deputi. Setelah disampaikan pembelaan diri, notulen pembelaan diajukan ke dalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan. Proses pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Dewan Komisaris pengganti dan pemberhentian berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau RUPS.

PEMILIHAN ULANG

Prosedur pemilihan ulang Dewan Komisaris mengikuti prosedur pengangkatan di mana usulan yang diajukan akan dievaluasi oleh Menteri, Sekretaris Menteri atau Deputi. Apabila calon yang bersangkutan memenuhi persyaratan maka akan diberikan kriteria "Disarankan" dan diajukan untuk ditetapkan dalam RUPS ataupun Keputusan Menteri BUMN yang bersifat sirkuler.

Dengan statusnya sebagai BUMN yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, Perusahaan senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana

yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dalam hal pengangkatan, pemilihan ulang dan pemberhentian Dewan Komisaris. Karena hal-hal tersebut bersifat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku wakil Pemerintah di dalam Perusahaan, maka fungsi Nominasi dan Remunerasi yang Perusahaan diadakan.

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Program orientasi bagi Dewan Komisaris dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi pemahaman serta gambaran atas aktivitas bisnis, rencana usaha ke depan, panduan kerja (*board manual*) dan lainnya yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Dewan Komisaris. Program pengenalan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dengan melakukan kajian dokumen Agenda dan Publikasi Rencana Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari dokumen Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, *Code of Corporate Governance* (CoCG), Pedoman Etika dan Prilaku (CoC), Program Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan.

Pada tahun 2018 Kementerian BUMN memberhentikan dan mengangkat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Pelindo III. Program orientasi atau di Perusahaan disebut dengan pengenalan perusahaan terhadap Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program ini berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN, kemudian diturunkan menjadi CoCG. Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018 kepada Dedi Syarif Usman.

MATERI PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN	REALISASI MATERI	KETERANGAN
Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.	- Sejarah perusahaan - Wilayah kerja perusahaan - Visi, Misi dan Budaya perusahaan - Laporan keuangan perusahaan - Rencana jangka pendek dan panjang perusahaan	Terpenuhi
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan	Tata kelola Perusahaan	Terpenuhi
Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta tugas dan peran Komite Audit dan komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Struktur organisasi perusahaan, SDM dan entitas anak perusahaan.	Terpenuhi
Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi		
Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi. Pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan di mana program tersebut dilaksanakan.	Kunjungan ke fasilitas pelabuhan, anak perusahaan dan afiliasi dilakukan secara bertahap setelah presentasi pengenalan perusahaan oleh Corporate Secretary	Terpenuhi

**RINGKASAN KEGIATAN ORIENTASI**

NO.	NAMA PESERTA	TOPIK	PENYELENGGARA	WAKTU	TEMPAT	LAMA HARI	BIAYA
1.	Dedi Syarif U.	Pengenalan Perusahaan	Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat No. KP.0301/42/HOFC-2018 tanggal 17 Juli 2018	30 Juli 2018	Kantor Pusat	1 hari	-

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS 2018

Guna meningkatkan wawasan dan kompetensi Dewan Komisaris, Perusahaan telah menyelenggarakan program pengembangan Dewan Komisaris baik melalui program internal maupun dari pihak eksternal. Berikut rincian informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris pada 2018.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

NAMA	TANGGAL	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN	TEMPAT	PENYELENGGARA
1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Zainal Abidin	5 November 2018	Workshop dengan tema "Global Ekonomi, Volatilitas Nilai Tukar Rupiah, Manajemen Risiko bagi Perusahaan, dan Aspek Hukum menuju Good Corporate Governance".	Kantor Perwakilan Pelindo III di Jakarta	PT Sacha Mandiri Sekawan berafiliasi dengan kantor hukum Prof. Jimly Asshiddiqie & Associate
1. Hari Bowo 2. Wahyu Satrio U 3. Zainal Abidin 4. Heddy Lugito	10 Desember 2018	Workshop dengan tema "Enterprise Risk Management, Role of BOD & BOC, dan Financial Issues untuk Dewan Komisaris".	Lembaga Pendidikan Manajemen, Jakarta	Lembaga Pendidikan Manajemen
1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio U	13 Desember 2018	Workshop penyegaran dan penguatan kapasitas Dewan Komisaris dan Direksi BUMN dengan tema "Tindak Pidana Korupsi Korporasi dan BUMN: Seluk Beluk dan Upaya Pencegahannya".	The Bimasena Private Club, Jakarta	BUMN Executive Club
1. Hari Bowo 2. Zainal Abidin 3. Wahyu Satrio U 4. Heddy Lugito	20 Desember 2018	Studi banding untuk sharing knowledge tentang progres pengelolaan Makassar Newport.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT

Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi serta Komite. Rapat Dewan Komisaris umumnya diagendakan secara berkala dalam satu tahun buku untuk menindaklanjuti berbagai keperluan pengawasan dan pemberian saran atas aktivitas operasional yang dijalankan Direksi beserta jajarannya. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan di luar agenda yang telah ditetapkan jika terdapat hal-hal yang mendesak yang membutuhkan peran dan tugas-tugas Dewan Komisaris di dalamnya.

Sepanjang 2018, Dewan Komisaris mengadakan 13 kali rapat internal yang uraiannya adalah sebagai berikut:

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT

NAMA	JABATAN	RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS		
		JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	%
Hari Bowo	Komisaris Utama	13 kali	13 kali	100%
Zainal Abidin	Komisaris Independen	13 kali	13 kali	100%
Wahju Satrio U.	Komisaris	13 kali	9 kali	69,20%
Heddy Lugito	Komisaris Independen	13 kali	13 kali	100%
Dedi Syarif Usman	Komisaris	9 kali	8 kali	88,90%

AGENDA DAN PUBLIKASI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Secara umum agenda rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris membahas tentang:

1. Evaluasi kinerja Perusahaan
2. Pembangunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan & RKAP
3. Menindaklanjuti temuan SPI
4. Melakukan pembahasan tindak lanjut temuan BPK RI
5. Melakukan koordinasi dengan komite-komite di bawah; dan
6. Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan Organ Dewan Komisaris

PUBLIKASI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN AGENDA RAPAT 2018

Selain agenda umum yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam *Board Manual*, Dewan Komisaris juga melaksanakan penyusunan rencana pembahasan dalam rapat (internal, internal melibatkan komite, maupun rapat gabungan) dengan agenda khusus. Rencana awal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang tertuang dalam Jadwal Tahunan Perusahaan (*calendar event*).

Informasinya rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Dewan Komisaris, *Corporate Secretary*, serta organ-organ lainnya seperti Internal Audit dan Divisi-Divisi yang ada. Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat.

Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara). Kegiatan tersebut telah tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 36.1/III/SK/DK.P.III/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Tata Kelola, Prosedur dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Pelindo III.

DOKUMENTASI HASIL RAPAT

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat Dewan Komisaris) didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.



MEKANSIME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada mekanisme rapat yang tertera dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dijabarkan ketentuan-ketentuan yaitu:

1. Semua keputusan dalam Rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Kenyataan tersebut harus dicatat dalam risalah rapat.
4. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan voting secara tertutup.
5. Setiap Anggota Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara Anggota Komisaris yang diwakilinya.
6. Suara blanko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.

7. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan Rapat Komisaris, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisaris.
9. Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Komisaris atau dalam bentuk keputusan yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisaris. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis Komisaris.

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah risalah dan daftar Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2018:

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS

NO.	TANGGAL	AGENDA RAPAT	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR
1.	18 Januari 2018	1. Pembahasan revisi usulan RKAP 2018 terkait dengan Perubahan Usulan Investasi RKAP 2018. 2. Update progres rekomendasi Dewan Komisaris tentang obligasi global dan perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Cabang.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin
2.	26 Maret 2018	1. Pembahasan kinerja Manajemen hingga Februari 2018 termasuk tindak lanjut rapat bulan Februari 2018. 2. Persiapan RUPS tentang Laporan Keuangan <i>Audited</i> tahun buku 2017.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin
3.	25 April 2018	1. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Maret 2018. 2. Evaluasi progres dan rencana peruntukan investasi dan perubahannya terkait dengan persetujuan obligasi global tahun 2018 termasuk <i>rolling forecast</i> sampai akhir tahun 2018. 3. Evaluasi Laporan triwulan I 2018 termasuk <i>rolling forecast</i> akhir tahun 2018 (termasuk PKBL).	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin
4.	21 Juni 2018	1. Progres pra-angkutan lebaran 1439 H/2018 M (kendala dan permasalahan). 2. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Mei 2018. 3. Laporan kinerja Manajemen, penyerapan investasi dan PKBL sampai akhir Mei 2018, serta <i>rolling forecast</i> sampai akhir tahun 2018.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Zainal Abidin
5.	30 Juli 2018	1. Laporan kinerja Manajemen semester I 2018 dan <i>rolling forecast</i> sampai dengan Desember 2018. 2. Realisasi, rencana, dan anggaran investasi sampai semester I 2018, dan <i>rolling forecast</i> sampai dengan Desember 2018. 3. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Juni 2018. 4. Rencana tindak lanjut persetujuan Menteri BUMN terkait pembelian saham Dubai Port World di TPS. 5. Laporan investigasi kebakaran kapal ikan Indonesia di Pelabuhan Tanjung Benoa. 6. Laporan pelaksanaan Struktur Organisasi baru per Juli 2018.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Zainal Abidin 4. Dedi Syarif Usman



NO.	TANGGAL	AGENDA RAPAT	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR
6.	16 Agustus 2018	Pembahasan tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan investasi dan RKAP tahun 2018.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin 5. Dedi Syarif Usman
7.	23 Agustus 2018	Pembahasan finalisasi tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Manajemen semester I dan pembahasan rekomendasi atas perubahan investasi dan RKAP tahun 2018.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin 5. Dedi Syarif Usman
8.	13 September 2018	1. Pembahasan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan pengisian jabatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan Pelindo III. 2. Finalisasi <i>Board Manual</i> dan <i>Code of Corporate Governance</i> . 3. <i>Standard Operational Procedure</i> Pedoman Kerja Sama.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin
9.	26 September 2018	1. Laporan kinerja Manajemen sampai Agustus 2018. 2. Progres realisasi dan anggaran investasi hingga Agustus 2018 dan <i>rolling forecast</i> sampai Desember 2018. 3. Progres revisi investasi tahun 2018. 4. Laporan penggunaan dana obligasi global tahun 2018. 5. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2018. 6. Progres penyusunan RKAP tahun 2019 dan laporan persiapan seminar IMF di Bali. 7. Progres pengadaan KAP dan Laporan Pengelolaan Risiko semester I tahun 2018. 8. Progres implimentasi Struktur Organisasi baru, hasil kunjungan kerja ke PT TPS, PT BJTl, PT TTL dan Cabang Gresik.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin 5. Dedi Syarif Usman
10.	1 Oktober 2018	Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan revisi investasi dan RKAP tahun 2018.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Zainal Abidin 4. Dedi Syarif Usman
11.	17 Oktober 2018	1. Laporan kinerja Manajemen hingga September 2018. 2. Progres realisasi dan anggaran investasi hingga September 2018 dan <i>rolling forecast</i> sampai Desember 2018. 3. Usulan RKAP tahun 2019. 4. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi September 2018 5. Tindak lanjut arahan RUPS atas Surat No. S.-1007/MBU/D2/09/2018 tanggal 25 September 2018. 6. Hasil kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan Tanjung Perak, PT PMS, PT PHC, dan PT PDS.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin 5. Dedi Syarif Usman
12.	26 November 2018	1. Evaluasi laporan kinerja Manajemen hingga Oktober 2018. 2. Evaluasi progres realisasi dan anggaran investasi hingga Oktober 2018 dan <i>rolling forecast</i> hingga Desember 2018. 3. Progres tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin 5. Dedi Syarif Usman
13.	27 Desember 2018	1. Laporan kinerja Manajemen hingga November 2018 dan perkiraan sampai akhir Desember 2018. 2. Progres realisasi dan anggaran investasi sampai November 2018 serta <i>rolling forecast</i> sampai Desember 2018. 3. Laporan evaluasi kinerja masing-masing Terminal dan Anak Perusahaan tahun 2018. 4. Pemaparan TIK Pelindo III. 5. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi November 2018. 6. Progres audit KAP tahun 2018. 7. Progres angkutan NATARU dan tanggapan usulan RKAP tahun 2019.	1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Zainal Abidin 4. Dedi Syarif Usman



HUBUNGAN KERJA DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang baik merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perusahaan, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

PRINSIP-PRINSIP DASAR

1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
5. Hubungan kerja antara organ-organ pendukung Dewan Komisaris dengan organ-organ pendukung Direksi harus disepakati terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

CHECK AND BALANCES

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:

1. Merealisasikan tujuan Perusahaan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:
 - a. Tercapainya nilai perusahaan (*value of the firm*) sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham.
 - b. Terlaksananya dengan baik pengendalian intern dan manajemen risiko.
 - c. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham.
 - d. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
 - e. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh jajaran organisasi Perusahaan.
 - f. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.
2. Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta strategi Perusahaan:
 - a. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perusahaan, unit-unit dalam organisasi Perusahaan dan pegawai.

- d. Struktur organisasi Perusahaan di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Perusahaan.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 2018

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Pelindo III Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH, No. 5 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Notaris Yatiningsih, SH., MH. No. 136 tanggal 25 September 2017 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN serta sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Pelindo III.

1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara RI No. 106);
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106);
- c. Peraturan Menteri BUMN (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
- d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-21/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN;
- f. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN;
- g. Keputusan Bersama Dewan Komisaris Pelindo III, Direksi Pelindo III dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III (Persero), dengan surat Dewan Komisaris Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.202/09/DK.P.III/2017, surat Direksi Pelindo III No. HK.03/14/P.III/2017, dan surat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III (Persero), No. 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Pelindo III;
- h. Surat Keputusan Komisaris Utama Pelindo III No. SK.-205/10/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 04 Oktober 2017 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab anggota Dewan Komisaris;
- i. *Board Manual* Pelindo III Tahun 2018

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris Tahun 2018 adalah sebagai pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Pelindo III pada tahun 2018 sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris Pelindo III yang telah disetujui oleh Pemegang Saham.

Tujuan laporan pengawasan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

REKOMENDASI DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS 2018

1. Dalam rangka menegakkan GCG di lingkungan Pelindo III, anggota Dewan Komisaris turut mendukung dengan membuat Pakta Integritas dan Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan di Pelindo III.
2. Mengenai peraturan Direksi Pelindo III No. TR.-0102/4/PJ11-2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Perubahan Logo Pelindo III, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi melalui surat No. UM.-29/02/DK.P.111/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Tanggapan atas Perubahan Logo Pelindo III. Selain itu Menteri BUMN telah memberikan persetujuan atas permohonan perubahan logo Perusahaan melalui surat No. S-124/MBU/02/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Persetujuan Perubahan Logo Perusahaan.
3. Atas permohonan Direksi Pelindo III No. PJ.-06/40/P. III-2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Tanah Berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pelabuhan Tanjung Perak oleh Yayasan Masjid Mujahidin, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya melalui surat Dewan Komisaris No. UM.-30/02/DK.P.11/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal Rekomendasi atas Pemanfaatan Tanah HPL Pelabuhan Tanjung Perak oleh Yayasan Masjid Mujahidin. Direksi melalui surat No. PJ.06/19/HOFC-2018 tanggal 15 Maret 2018 mengajukan permohonan kepada Menteri BUMN berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dengan melengkapi dokumen pendukung lainnya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Perak Barat No. 275 Surabaya digunakan untuk tempat ibadah (masjid) dan akan berakhir perjanjiannya pada tanggal 31 Desember 2017. Direksi memohon kepada RUPS agar perjanjian dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun atau sampai dengan 31 Desember 2027, namun sampai dengan saat ini dari Pemegang Saham belum memberikan persetujuannya.
4. Atas permohonan Direksi Pelindo III melalui surat No. LG.05/3/HOFC-2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan Kendaraan Dinas Direksi Pelindo III, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/persetujuan melalui surat No. UM.95/06/DK.P.111/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penghapusbukuan dan Pengadaan Kendaraan Dinas Direksi Pelindo III. Dalam surat rekomendasi juga disebutkan agar Direksi mengajukan persetujuan kepada Pemegang Saham terkait dengan permohonan kendaraan dinas baru/pengganti menggunakan mekanisme *Car Ownership Programme* (COP) dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan cicilan per bulan maksimal sebesar tunjangan transportasi sesuai surat Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan atas nama Menteri BUMN No. S-548/MBU/D4/06/2018 tanggal 5 Juni 2018.
5. Berkaitan dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Pelindo III No. SK.207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Penetapan Komisaris Independen Pelindo III, serta berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, telah dilaksanakan pengenalan/orientasi kepada Anggota Komisaris baru pada saat rapat bulanan Direksi dan Dewan Komisaris di bulan Juli 2018.
6. Direksi Pelindo III melalui surat No. LG.05/2/HOFC-2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Permohonan Persetujuan dan Rekomendasi Penghapusbukuan Aset Tetap Tahap 1 Tahun 2018 milik Pelindo III, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan rekomendasi melalui surat No. UM.128/08/DK.P.111/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Persetujuan dan Rekomendasi atas Permohonan Penghapusbukuan Aset Tetap milik Pelindo III Tahap 1 Tahun 2018, dan merekomendasikan usulan penghapusbukuan aktiva tetap dengan kategori selain aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis di atas 5 (lima) tahun kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.
7. Pakta Integritas Dewan Komisaris Pelindo III No. HK-129/08/DK.P.1/1/2018 tentang Pemberian Persetujuan Permohonan Penghapusbukuan Aset Tetap milik Pelindo III Tahap 1 Tahun 2018.
8. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan penghapusbukuan aktiva tetap sesuai permohonan Direksi Pelindo III melalui surat No. UM.128/08/DK.P.111/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Persetujuan dan Rekomendasi atas Permohonan Penghapusbukuan Aset Tetap Milik Pelindo III Periode Tahun 2018.
9. Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK-146/08/KEP/DK.P.111/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Pelindo III.
10. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE.-06/MBU/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Kepesertaan BUMN dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan No. SE.-06/MBU/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Kepesertaan BUMN dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dewan Komisaris mendaftarkan kepesertaan anggota Dewan Komisaris dan Organ Pendukung melalui surat No. UM.147/08/DK.P.1/1/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.



11. Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.-154/09/KEP/DK.P.1/1/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama serta Direktur Operasional dan Komersial Pelindo III. Penunjukan Plt Direktur Utama dan Plt Direktur Operasional dan Komersial Pelindo III tersebut mulai berlaku sejak tanggal penetapan, sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama serta Direktur Operasional dan Komersial Pelindo III secara definitif oleh RUPS.
12. Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.-164/09/KEP/DK.P.1/1/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Operasional dan Komersial Pelindo III. Penunjukan Plt Direktur Operasional dan Komersial Pelindo III tersebut mulai berlaku sejak tanggal penetapan, sampai dengan ditetapkannya Direktur Operasional dan Komersial Pelindo III secara definitif oleh RUPS.
13. Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK-204/11/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko Pelindo III.
14. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atas usulan Direksi Pelindo III tentang permohonan pengisian dan penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Pelindo III, yaitu PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Terminal Teluk Lamong, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, PT Pelindo Marine Service, PT Pelindo Husada Citra, PT Pelindo Daya Sejahtera, dan PT Terminal Petikemas Indonesia melalui surat Dewan Komisaris Pelindo III No. RH.56/03/DK.P.1/1/2018 tanggal 19 Maret 2018.
15. Dewan Komisaris memberikan persetujuan penggantian Ketua Satuan Pengawasan Intern Pelindo III melalui surat No. RH.68/04/DK.P.111/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Persetujuan Penetapan Ketua Satuan Pengawasan Intern Pelindo III.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

INDEPENDENSI DARI ASPEK KEPEMILIKAN SAHAM

Hingga akhir Tahun Buku 2018, saham Pelindo III dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN sebesar 100%. Untuk itu dapat diinformasikan bahwa Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki saham di Pelindo III.

INDEPENDENSI DARI ASPEK KOMPOSISI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan anggota Dewan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris.

Kebijakan mengenai benturan kepentingan juga telah diatur dalam *Code of Conduct* yang memuat antara lain:

1. Insan Pelindo III dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
2. Insan Pelindo III wajib menghindari setiap aktivitas diluar kedinasan yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam mengambil keputusan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS DARI ASPEK RANGKAP JABATAN

Informasi mengenai rangkap jabatan telah disajikan dalam bagian profil perusahaan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris. Berdasarkan informasi tersebut, Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki jabatan lain di luar Perusahaan namun memiliki jabatan lain di dalam struktur Perusahaan yaitu Ketua Komite-Komite yang ada di Perusahaan.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa dengan tidak adanya jabatan lain yang diemban di luar Perusahaan, Dewan Komisaris Perusahaan dapat dinyatakan independen dan bebas dari benturan kepentingan terkait adanya faktor rangkap jabatan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Perusahaan telah mengatur tugas dan tanggung jawab dari Komisaris Independen dimana tertuang dalam *Board Manual* yaitu Pedoman Tata Kerja Kegiatan Dewan komisaris yang ditetapkan bersama direksi melalui surat keputusan bersama No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual dan Code of Corporate Governance*). Di tahun 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan penetapan Komisaris Independen Pelindo III, Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan Pelindo III, menetapkan Zainal Abidin dan Heddy Lugito sebagai Komisaris Independen Pelindo III dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Independen, selain harus memenuhi persyaratan formal dan material serta persyaratan lain, juga harus memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain di perusahaan yang bersangkutan.
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk kementerian, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Tidak bekerja di perusahaan yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.



5. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada perusahaan yang bersangkutan dan afiliasinya.
6. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup perusahaan.
7. Memiliki kompetensi dalam bidang audit, keuangan dan akuntansi.

INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Dewan Komisaris memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan Perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris dipastikan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun ikatan perkawinan dengan satu sama lain hingga derajat ketiga baik secara vertikal maupun horizontal.

Dewan Komisaris Independen tidak memiliki benturan kepentingan secara pribadi terhadap hal-hal yang termaktub dalam RKAP 2018 dan Dewan Komisaris Independen berkomitmen tidak akan memanfaatkan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang termaktub dalam Pakta Integritas, Surat Pernyataan tidak Memiliki Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen, serta *Board Manual* dan CoCG sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).

PENILAIAN ATAS KINERJA ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa organ penunjang Dewan Komisaris baik Komite Audit, Komite GCG dan Manajemen Risiko, maupun Sekretaris Dewan Komisaris memiliki kinerja yang baik. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh organ penunjang Dewan Komisaris telah membantu pencapaian kinerja Dewan Komisaris di tahun 2018.

Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2018. Pelaksanaan tugas tersebut secara umum telah terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja komite penunjang Dewan Komisaris juga dapat ditinjau dari skor KPI pada indikator rapat Komite bersama Dewan Komisaris yang terealisasi sebesar 125% dan dengan nilai 5,77.



KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Guna menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan No. SK-86/04/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris yang dijabat oleh Edy Widyya.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS



Edy Widyya

Sekretaris Dewan Komisaris

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, kelahiran Jakarta, 21 Januari 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen Perusahaan dari Universitas Kristen Indonesia (1997) dan Master dari Universitas Jayabaya (2016). Saat ini Beliau menjabat Kepala Subbidang Energi, Logistik dan Kawasan Pariwisata Ia (2015-Sekarang). Beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan strategis di Perusahaan antara lain sebagai Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ia (2014-2015), Kasubbid Usaha Industri Primer Ia1 (2012-2014), Kasubbid Ia1 (2012-2014), Kasubbid Inventarisasi dan Mutasi Kekayaan BUMN II (2010-2012) dan Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendayagunaan Aset (2006-2010).

FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun konsep laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;

TUGAS LAIN

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundangan serta menerapkan prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota-anggota komite Dewan Komisaris, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.



KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Dewan Komisaris memiliki 2 komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, yakni Komite Audit dan Komite GCG dan Manajemen Risiko. Masing-masing komite tersebut diketuai oleh anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit dan Komite GCG dan Manajemen Risiko diisi oleh para profesional yang memiliki kompetensi, pengalaman dan integritas di bidangnya masing-masing. Komite Audit merupakan organ yang berada di bawah Dewan Komisaris dan memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris mengawasi beberapa aspek seperti informasi keuangan, Sistem Pengendalian Internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, dan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

SUSUNAN KOMITE AUDIT

Sesuai Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.142/02/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Pelindo III; No. SK.145/08/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Komite Audit Pelindo III; No. SK.46/03/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 01 Maret 2017 Jo. No. SK.41/II/KEP/DK.P.III/2014 tanggal 28 Februari 2014; serta No. SK.133/06/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelindo III (Persero), maka susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KOMITE AUDIT

JABATAN	NAMA	PERIODE JABATAN	KETERANGAN
Komisaris merangkap Ketua Komite Audit	Zainal Abidin	Periode I: 2018-2019	Anggota Dewan Komisaris
Komisaris merangkap Wakil Ketua Komite Audit	Dedi Syarif Usman	Periode I: 2018-2019	Anggota Dewan Komisaris
Anggota Komite Audit	Amilin	Periode I 2014-2017 Periode II 2017-2019	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan kepelabuhanan.
Anggota Komite Audit	Andi Sudhana	2017-2020	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan kepelabuhanan.

PROFIL KOMITE AUDIT

KETUA KOMITE AUDIT

Zainal Abidin

Profil Ketua Komite Audit telah dicantumkan dalam profil Dewan Komisaris Perusahaan.

WAKIL KETUA KOMITE AUDIT

Dedi Syarif Usman

Profil Wakil Ketua Komite Audit telah dicantumkan dalam profil Dewan Komisaris Perusahaan.

ANGGOTA KOMITE

Amilin



Warga Negara Indonesia, 44 tahun, kelahiran Indramayu 15 Juni 1973. Saat ini berdomisili di Tangerang Selatan. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1998), Magister Sains bidang Ilmu Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2003), dan Memperoleh Gelar Doktor Program Ilmu Ekonomi Bidang Kajian Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung (2010). Selain itu memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntansi Indonesia



(2014) dan Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (2014). Memiliki pengalaman kerja sebagai Tenaga Ahli Konsultan Pajak (2005-Sekarang), Peneliti (2005-Sekarang), UIN Syarif Hidayatullah (2005-2009), staf pengajar di beberapa perguruan tinggi yaitu STIE Bhakti Pembangunan (1999-2004) dan Auditor Eksternal (1998-2000).

Andi Sudhana



Warga Negara Indonesia, 56 tahun, kelahiran Medan 16 Oktober 1961. Saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1991), Magister di Bidang Manajemen dari Universitas Bhayangkara (2012), dan Gelar Doktor dari Universitas Brawijaya di bidang Manajemen. Selain itu memiliki sertifikasi Akuntan, Register Negara dari Kementerian Keuangan Indonesia (2015), Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (2015), Wakil Perantara Perdagangan Efek dari Panitia Standar Profesi Pasar Modal (2013) dan Ahli Syariah Pasar Modal (2016). Saat ini Beliau menjabat sebagai Komisaris di Dwidana Sakti Sekuritas (2017-sekarang), dan memiliki pengalaman kerja sebagai Inspektur (1990-1996), Pengajar di beberapa Universitas (1986-sekarang) dan Staf Akuntan (1986-1988).

PERSYARATAN KOMITE AUDIT

Persyaratan Komite Audit telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Dalam ketentuan tersebut disebutkan persyaratan Komite Audit terdiri dari:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri atau bisnis Perusahaan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Masa jabatan Komite Audit sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 yang menyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit paling lama 3 tahun. Masa jabatan Komite Audit dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris, sedangkan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 tahun diangkat untuk 1 periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali pada masa jabatan berikutnya.

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT (KOMITE AUDIT CHARTER)

Komite Audit Perusahaan telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja yang dituangkan dalam Komite Audit *Charter* guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 3 September 2018 dalam *Board Manual* Perusahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya, agar pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Sebagaimana yang tercantum dalam *Board Manual* dan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tugas dan tanggung jawab Komite Audit terdiri atas:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Internal Audit.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam pemilihan dan pengusulan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS.
3. Mengevaluasi Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan dan Laporan Tahunan, serta laporan-laporan lainnya yang memerlukan rekomendasi Dewan Komisaris.



4. Mengevaluasi Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan.
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal dan Internal Audit.
6. Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Eksternal pada periode sebelumnya.
7. Memberikan rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
8. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
9. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
10. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
11. Menelaah laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik.
12. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dan melakukan penelaahan atas adanya tuntutan hukum yang dihadapi Perusahaan.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan dan membuat Pedoman Kerja Komite Audit.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit Perusahaan terdiri dari seorang ketua yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris, serta 2 orang anggota yang berasal dari pihak independen. Tabel independensi Komite Audit dapat dijelaskan sebagai berikut:

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

ASPEK INDEPENDENSI	ZAINAL ABIDIN	DEDI SYARIF U.	AMILIN	ANDI SUDHANA
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Pelindo III, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	✓	✓	✓	✓

Selama 2018, seluruh anggota Komite Audit Pelindo III tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan sesama anggota Komite lain serta tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain atau afiliasi.

FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT

Mengacu pada Pedoman Kerja, Komite Audit wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama fungsi keuangan dan Internal Audit dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sesuai kondisi yang diperlukan. Berikut tingkat kehadiran anggota Komite Audit selama tahun 2018:

FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE KEHADIRAN
Zainal Abidin	13 kali	13 kali	100%
Dedi Syarif Usman	9 kali	9 kali	100%
Amilin	13 kali	13 kali	100%
Andi Sudhana	13 kali	13 kali	100%

**RISALAH RAPAT KOMITE AUDIT**

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite Audit selama 2018 adalah sebagai berikut:

RISALAH RAPAT KOMITE AUDIT

NO.	TANGGAL	AGENDA RAPAT	KOMITE AUDIT YANG HADIR
1.	18 Januari 2018	1. Pembahasan revisi usulan RKAP 2018 terkait dengan Perubahan Usulan Investasi RKAP 2018. 2. Update progres rekomendasi Dewan Komisaris tentang obligasi global dan perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Cabang.	1. Zainal Abidin 2. Amilin 3. Andi Sudhana
2.	26 Maret 2018	1. Pembahasan kinerja Manajemen hingga Februari 2018 termasuk tindak lanjut rapat bulan Februari 2018. 2. Persiapan RUPS tentang Laporan Keuangan Audited tahun buku 2017.	1. Zainal Abidin 2. Amilin 3. Andi Sudhana
3.	25 April 2018	1. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Maret 2018. 2. Evaluasi progres dan rencana peruntukan investasi dan perubahannya terkait dengan persetujuan obligasi global tahun 2018 termasuk <i>rolling forecast</i> sampai akhir tahun 2018. 3. Evaluasi Laporan triwulan I 2018 termasuk <i>rolling forecast</i> akhir tahun 2018 (termasuk PKBL).	1. Zainal Abidin 2. Amilin 3. Andi Sudhana
4.	21 Juni 2018	1. Progres pra-angkutan lebaran 1439 H/2018 M (kendala dan permasalahan). 2. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Mei 2018. 3. Laporan kinerja Manajemen, penyerapan investasi dan PKBL sampai akhir Mei 2018, serta <i>rolling forecast</i> sampai akhir tahun 2018.	1. Zainal Abidin 2. Amilin 3. Andi Sudhana
5.	30 Juli 2018	1. Laporan kinerja Manajemen semester I 2018 dan <i>rolling forecast</i> sampai dengan Desember 2018. 2. Realisasi, rencana, dan anggaran investasi sampai semester I 2018, dan <i>rolling forecast</i> sampai dengan Desember 2018. 3. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Juni 2018. 4. Rencana tindak lanjut persetujuan Menteri BUMN terkait pembelian saham Dubai Port World di TPS. 5. Laporan investigasi kebakaran kapal ikan Indonesia di Pelabuhan Tanjung Benoa. 6. Laporan pelaksanaan Struktur Organisasi baru per Juli 2018.	1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana
6.	16 Agustus 2018	Pembahasan tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan investasi dan RKAP tahun 2018.	1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana
7.	23 Agustus 2018	Pembahasan finalisasi tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Manajemen semester I dan pembahasan rekomendasi atas perubahan investasi dan RKAP tahun 2018.	1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana
8.	13 September 2018	1. Pembahasan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan pengisian jabatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan Pelindo III. 2. Finalisasi <i>Board Manual</i> dan <i>Code of Corporate Governance</i> . 3. <i>Standard Operational Procedure</i> Pedoman Kerja Sama.	1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana



NO.	TANGGAL	AGENDA RAPAT	KOMITE AUDIT YANG HADIR
9.	26 September 2018	1. Laporan kinerja Manajemen sampai Agustus 2018. 2. Progres realisasi dan anggaran investasi hingga Agustus 2018 dan <i>rolling forecast</i> sampai Desember 2018. 3. Progres revisi investasi tahun 2018. 4. Laporan penggunaan dana obligasi global tahun 2018. 5. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2018. 6. Progres penyusunan RKAP tahun 2019 dan laporan persiapan seminar IMF di Bali. 7. Progres pengadaan KAP dan Laporan Pengelolaan Risiko semester I tahun 2018. 8. Progres implimentasi Struktur Organisasi baru, hasil kunjungan kerja ke PT TPS, PT BJTI, PT TTL dan Cabang Gresik.	1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana
10.	1 Oktober 2018	Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan revisi investasi dan RKAP tahun 2018.	1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana
11.	17 Oktober 2018	1. Laporan kinerja Manajemen hingga September 2018. 2. Progres realisasi dan anggaran investasi hingga September 2018 dan <i>rolling forecast</i> sampai Desember 2018. 3. Usulan RKAP tahun 2019. 4. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi September 2018 5. Tindak lanjut arahan RUPS atas Surat No. S.-1007/MBU/D2/09/2018 tanggal 25 September 2018. 6. Hasil kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan Tanjung Perak, PT PMS, PT PHC, dan PT PDS.	1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana
12.	26 November 2018	1. Evaluasi laporan kinerja Manajemen hingga Oktober 2018. 2. Evaluasi progres realisasi dan anggaran investasi hingga Oktober 2018 dan <i>rolling forecast</i> hingga Desember 2018. 3. Progres tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.	1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana
13.	27 Desember 2018	1. Laporan kinerja Manajemen hingga November 2018 dan perkiraan sampai akhir Desember 2018. 2. Progres realisasi dan anggaran investasi sampai November 2018 serta <i>rolling forecast</i> sampai Desember 2018. 3. Laporan evaluasi kinerja masing-masing Terminal dan Anak Perusahaan tahun 2018. 4. Pemaparan TIK Pelindo III. 5. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi November 2018. 6. Progres audit KAP tahun 2018. 7. Progres angkutan NATARU dan tanggapan usulan RKAP tahun 2019.	1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana

REKOMENDASI KOMITE AUDIT

Dari hasil evaluasi terhadap kegiatan Pengawasan Internal selama 2018, Komite Audit merekomendasikan beberapa hal penting yang perlu ditindak lanjuti di antaranya adalah rekomendasi penerbitan obligasi bond, *rolling plan* RJPP dan revisi investasi, penunjukan KAP, serta kerja sama usaha.

KEBIJAKAN REMUNERASI KOMITE AUDIT

Remunerasi bagi Anggota Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, dimana penghasilan anggota Komite Audit Perusahaan diberikan honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp29.200.000, dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris



STRUKTUR REMUNERASI KOMITE AUDIT

NAMA	JABATAN	HONORARIUM	KETERANGAN
Zainal Abidin	Ketua	-	Anggota Dewan Komisaris (Honorarium dapat dilihat di tabel Honorarium Dewan Komisaris)
Dedi Syarif Usman	Wakil Ketua	-	
Amilin	Anggota	Rp29.200.000	
Andi Sudhana	Anggota	Rp29.200.000	

RENCANA KERJA DAN REALISASI DI TAHUN 2018

Sepanjang 2018, Komite Audit telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

RENCANA KERJA DAN REALISASI DI TAHUN 2018

NO.	RENCANA KERJA	KETERANGAN
1.	Pembahasan <i>Terms of Reference</i> Kantor Akuntan Publik (KAP)	Terlaksana
2.	Pembahasan secara lebih mendalam mengenai temuan-temuan audit Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang perlu masuk dalam cakupan Laporan Keuangan Audited;	Terlaksana
3.	Evaluasi mengenai lingkup audit yang telah dan sedang dilaksanakan, termasuk perluasan dan pendalaman audit pada beberapa objek tertentu;	Terlaksana
4.	Evaluasi atas hasil audit KAP;	Terlaksana
5.	Pembahasan hasil temuan SPI;	Terlaksana
6.	Pembahasan masukan mengenai berbagai kendala dalam pemeriksaan;	Terlaksana
7.	Pembahasan mengenai berbagai kebutuhan perluasan lingkup dan perbaikan teknik pemeriksaan;	Terlaksana
8.	Penilaian terhadap informasi hasil audit bersama-sama KAP, SPI, dan jajaran manajemen;	Terlaksana
9.	Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;	Terlaksana
10.	Komite Audit melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan hasil keputusan RUPS.	Terlaksana

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMITE AUDIT TAHUN 2018

Guna meningkatkan wawasan dan kompetensi Komite Audit, Perusahaan telah menyelenggarakan program pengembangan Komite Audit baik melalui program internal maupun dari pihak eksternal. Berikut rincian informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Audit pada 2018.



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

NAMA	TANGGAL	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN	TEMPAT	PENYELENGGARA
1. Amilin	11-12 Januari 2018	Ujian Tulis dan Wawancara Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) bersama Senior Manager.	Grand Varuna Convex, Surabaya	Pelindo III
1. Zainal Abidin 2. Amilin 3. Andi Sudhana	5 November 2018	Workshop dengan tema "Global Ekonomi, Volatilitas Nilai Tukar Rupiah, Manajemen Risiko bagi Perusahaan, dan Aspek Hukum menuju Good Corporate Governance".	Kantor Perwakilan Pelindo III di Jakarta	PT Sacha Mandiri Sekawan berafiliasi dengan kantor hukum Prof. Jimly Asshiddiqie & Associate
1. Zainal Abidin 2. Amilin 3. Andi Sudhana	10 Desember 2018	Workshop dengan tema "Enterprise Risk Management, Role of BOD & BOC, dan Financial Issues untuk Dewan Komisaris".	Lembaga Pendidikan Manajemen, Jakarta	Lembaga Pendidikan Manajemen
1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U	13 Desember 2018	Workshop penyegaran dan penguatan kapasitas Dewan Komisaris dan Direksi BUMN dengan tema "Tindak Pidana Korupsi Korporasi dan BUMN: Seluk Beluk dan Upaya Pencegahannya".	The Bimasena Private Club, Jakarta	BUMN Executive Club
1. Zainal Abidin 2. Andi Sudhana	20 Desember 2018	Studi banding untuk sharing knowledge tentang progres pengelolaan Makassar Newport.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-

KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Demikian halnya Komite Audit, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Dewan Komisaris memiliki 2 (dua) komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi, yakni Komite Audit dan Komite GCG dan Manajemen Risiko. Masing-masing komite tersebut diketuai oleh anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit dan Komite GCG dan Manajemen Risiko diisi oleh para profesional yang memiliki kompetensi, pengalaman dan integritas di bidangnya masing-masing.

Komite GCG dan Manajemen Risiko merupakan organ yang di dalam struktur Perusahaan berada di bawah Dewan Komisaris yang memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penilaian atas efektivitas pelaksanaan GCG dan manajemen risiko.

SUSUNAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Sesuai Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.134/06/KEP/DK.P.III/2017 dan SK. 135/06/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko Pelindo III dan Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.-65/03/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko, maka susunan Ketua dan Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

**SUSUNAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO**

JABATAN	NAMA	PERIODE JABATAN	KETERANGAN
Ketua	Heddy Lugito	Periode I: 2018-2019	Anggota Dewan Komisaris
Wakil Ketua	Wahju Satrio Utomo	Periode I: 2018-2019	Anggota Dewan Komisaris
Anggota	Ivan Malik	3 tahun	Pihak Independen, yang memiliki keahlian manajemen risiko kepelabuhanan.
Anggota	Pandu Fajar Wisudha	3 tahun	Pihak Independen, yang memiliki keahlian manajemen risiko kepelabuhanan.
Anggota	Tubagus Arief Fahmi*)	3 tahun	Pihak Independen, yang memiliki keahlian manajemen risiko kepelabuhanan.

*)Per 1 November 2018, Tubagus Arief Fahmi diangkat menjadi anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko

Heddy Lugito

Profil Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko telah disajikan di dalam profil Dewan Komisaris Perusahaan.

DASAR PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.65/03/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko.

Wahju Satrio Utomo

Profil Wakil Komite GCG dan Manajemen Risiko telah disajikan di dalam profil Dewan Komisaris Perusahaan.

DASAR PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.-145/08/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Komite Audit dan Wakil Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Ivan Malik

Anggota Komite Komite GCG dan Manajemen Risiko



Warga Negara Indonesia, 55 tahun, kelahiran Jakarta 27 Agustus 1962. Saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Insinyur di bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987), memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2001) dan gelar Doktor untuk bidang Manajemen Keuangan. Selain itu memiliki sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) yang diberikan oleh BNSP (2017) dan Ajun Ahli Asuransi Indonesia-Kerugian dari Asosiasi hli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) pada tahun 1997. Memiliki riwayat karir sebagai Direktur di PT Aero Hotel Management (2016), Direktur Administrasi dan Keuangan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) pada tahun (2013-2015), Manager Internal Audit PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2003-2013), Manager Keuangan dan Akuntansi PT Asuransi Intra Asia (2001-2003), Asisten Wakil Direktur PT Bank Duta (1991-2000), dan Structure Analyst di PT IPTN, Bandung (1988-1989).

**Pandu Fajar Wisudha**

Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko



Warga Negara Indonesia, 34 Tahun, Kelahiran Banyuwangi, 29 Agustus 1983. Saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2006), Program Profesi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2008) dan Master of Science (M.Si) dari STIE YKPN (2008). Selain itu juga memiliki sertifikasi Akuntan (Ak) dari Kementerian Keuangan (2008), Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (2014). Memiliki riwayat karir sebagai Staf Ahli Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2016-Sekarang), Vice President Financial Accounting PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016), Anggota Komite Audit dan GCG PT GMF Aerowisata (2015-2016), Komisaris PT Aerotrans Service Indonesia (2015-2016), Senior Manager Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2015), Manager Laporan Keuangan Finansial PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015), Analis Akuntansi Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015), dan Memulai karir sebagai Auditor (2008-2010).

Tubagus Arief Fahmi

Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko



Warga Negara Indonesia, 31 tahun, kelahiran Bandung, 21 Januari 1981 dan saat ini berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan jenjang Sarjana jurusan Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2005 dan Magister Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2015. Memiliki kualifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) yang diperoleh di tahun 2018. Memiliki riwayat karir sebagai Manajer Channel Digital Enterprise di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2018), serta menjadi Tim Asistensi Deputy

Menteri Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan pada Kementerian BUMN (2016-2017).

PERSYARATAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Persyaratan Komite GCG dan Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual dan Code of Corporate Governance*). Dalam ketentuan tersebut disebutkan persyaratan Komite GCG dan Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tata kelola Perusahaan dan manajemen.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Masa jabatan Komite GCG dan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 yang menyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko paling lama 3 (tiga) tahun. Masa jabatan Komite GCG dan Manajemen Risiko dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris, sedangkan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 (dua) tahun diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali pada masa jabatan berikutnya.

PEDOMAN KERJA KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO (KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO CHARTER)

Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja yang dituangkan dalam bentuk Charter guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 3 September 2018 melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan kewenangan Komite GCG dan Manajemen Risiko dituangkan dalam Piagam Komite GCG dan Manajemen Risiko. Komite GCG dan Manajemen Risiko bertugas untuk:

1. Memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil asesmen berkala atas penerapan GCG untuk memastikan efektivitas implementasi GCG yang dilaksanakan oleh organ-organ utama (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) serta organ-organ pendukung (Komite-komite Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Corporate Secretary dan Internal Audit).
2. Memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan infrastruktur GCG Perusahaan serta memantau pelaksanaannya, mencakup:
 - a. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).
 - b. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CoCG).
 - c. Pedoman Etika dan Perilaku (CoCG).
3. Mereviu rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan.
4. Melaksanakan kajian tentang praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG untuk dapat diimplementasikan di Perusahaan.

5. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa manajemen risiko Perusahaan dijalankan secara efektif dan efisien.
6. Memantau kebijakan pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Direksi, untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi dapat dikelola dengan baik.
7. Mengevaluasi kesesuaian realisasi capaian kinerja Perusahaan dengan rencana bisnis.
8. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan manajemen risiko serta pelaksanaannya.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan dan menyusun Pedoman Kerja Komite GCG dan Manajemen Risiko.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

INDEPENDENSI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Manajemen Risiko terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris, serta 2 (dua) anggota komite yang berasal dari pihak independen. Tabel independensi Komite GCG dan Manajemen Risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

ASPEK INDEPENDENSI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

ASPEK INDEPENDENSI	HEDDY LUGITO	WAHJU SATRIO U.	IVAN MALIK	PANDU FAJAR WISUDHA	TUBAGUS ARIEF FAHMI
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Pelindo III, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko.	✓	✓	✓	✓	✓

FREKUENSI RAPAT KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Mengacu pada Pedoman Kerja, Komite GCG dan Manajemen Risiko wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama unit kerja GCG dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan, baik secara berkala maupun sesuai kondisi yang diperlukan. Berikut tingkat kehadiran anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko selama tahun 2018:

KEHADIRAN RAPAT KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE KEHADIRAN
Heddy Lugito	13 kali	13 kali	100%
Wahju Satrio U.	13 kali	13 kali	100%
Ivan Malik	13 kali	13 kali	100%
Pandu Fajar W.	13 kali	13 kali	100%
Tubagus Arief Fahmi	2 kali	2 kali	100%

**RISALAH RAPAT KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO**

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko selama 2018 adalah sebagai berikut:

RISALAH RAPAT KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

NO.	TANGGAL	AGENDA RAPAT	DAFTAR KEHADIRAN
1.	18 Januari 2018	1. Pembahasan revisi usulan RKAP 2018 terkait dengan Perubahan Usulan Investasi RKAP 2018. 2. Update progres rekomendasi Dewan Komisaris tentang obligasi global dan perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Cabang.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
2.	26 Maret 2018	1. Pembahasan kinerja Manajemen hingga Februari 2018 termasuk tindak lanjut rapat bulan Februari 2018. 2. Persiapan RUPS tentang Laporan Keuangan Audited tahun buku 2017.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
3.	25 April 2018	1. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Maret 2018. 2. Evaluasi progres dan rencana peruntukan investasi dan perubahannya terkait dengan persetujuan obligasi global tahun 2018 termasuk rolling forecast sampai akhir tahun 2018. 3. Evaluasi Laporan triwulan I 2018 termasuk rolling forecast akhir tahun 2018 (termasuk PKBL).	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
4.	21 Juni 2018	1. Progres pra-angkutan lebaran 1439 H/2018 M (kendala dan permasalahan). 2. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Mei 2018. 3. Laporan kinerja Manajemen, penyerapan investasi dan PKBL sampai akhir Mei 2018, serta rolling forecast sampai akhir tahun 2018.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
5.	30 Juli 2018	1. Laporan kinerja Manajemen semester I 2018 dan rolling forecast sampai dengan Desember 2018. 2. Realisasi, rencana, dan anggaran investasi sampai semester I 2018, dan rolling forecast sampai dengan Desember 2018. 3. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Juni 2018. 4. Rencana tindak lanjut persetujuan Menteri BUMN terkait pembelian saham Dubai Port World di TPS. 5. Laporan investigasi kebakaran kapal ikan Indonesia di Pelabuhan Tanjung Benoa. 6. Laporan pelaksanaan Struktur Organisasi baru per Juli 2018.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
6.	16 Agustus 2018	Pembahasan tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan investasi dan RKAP tahun 2018.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
7.	23 Agustus 2018	Pembahasan finalisasi tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Manajemen semester I dan pembahasan rekomendasi atas perubahan investasi dan RKAP tahun 2018.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
8.	13 September 2018	1. Pembahasan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan pengisian jabatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan Pelindo III. 2. Finalisasi Board Manual dan Code of Corporate Governance. 3. Standard Operational Procedure Pedoman Kerja Sama.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
9.	26 September 2018	1. Laporan kinerja Manajemen sampai Agustus 2018. 2. Progres realisasi dan anggaran investasi hingga Agustus 2018 dan rolling forecast sampai Desember 2018. 3. Progres revisi investasi tahun 2018. 4. Laporan penggunaan dana obligasi global tahun 2018. 5. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2018. 6. Progres penyusunan RKAP tahun 2019 dan laporan persiapan seminar IMF di Bali. 7. Progres pengadaan KAP dan Laporan Pengelolaan Risiko semester I tahun 2018. 8. Progres implimentasi Struktur Organisasi baru, hasil kunjungan kerja ke PT TPS, PT BJT, PT TTL dan Cabang Gresik.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.



NO.	TANGGAL	AGENDA RAPAT	DAFTAR KEHADIRAN
10.	1 Oktober 2018	Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan revisi investasi dan RKAP tahun 2018.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
11.	17 Oktober 2018	1. Laporan kinerja Manajemen hingga September 2018. 2. Progres realisasi dan anggaran investasi hingga September 2018 dan rolling forecast sampai Desember 2018. 3. Usulan RKAP tahun 2019. 4. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi September 2018 5. Tindak lanjut arahan RUPS atas Surat No. S.-1007/MBU/D2/09/2018 tanggal 25 September 2018. 6. Hasil kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan Tanjung Perak, PT PMS, PT PHC, dan PT PDS.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Ivan Malik 4. Pandu Fajar W.
12.	26 November 2018	1. Evaluasi laporan kinerja Manajemen hingga Oktober 2018. 2. Evaluasi progres realisasi dan anggaran investasi hingga Oktober 2018 dan rolling forecast hingga Desember 2018. 3. Progres tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Pandu Fajar W. 4. Tubagus Arief Fahmi
13.	27 Desember 2018	1. Laporan kinerja Manajemen hingga November 2018 dan perkiraan sampai akhir Desember 2018. 2. Progres realisasi dan anggaran investasi sampai November 2018 serta rolling forecast sampai Desember 2018. 3. Laporan evaluasi kinerja masing-masing Terminal dan Anak Perusahaan tahun 2018. 4. Pemaparan TIK Pelindo III. 5. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi November 2018. 6. Progres audit KAP tahun 2018. 7. Progres angkutan NATARU dan tanggapan usulan RKAP tahun 2019.	1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio U. 3. Pandu Fajar W. 4. Tubagus Arief Fahmi

REKOMENDASI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Dari hasil evaluasi terhadap kegiatan Pengawasan Internal selama 2018, Komite GCG dan Manajemen Risiko merekomendasikan beberapa hal penting yang perlu ditindak lanjuti di antaranya adalah: perubahan Struktur Organisasi; tata kelola hubungan Induk dan Anak Perusahaan; meninjau Board Manual dan Code of Conduct, Manajemen Risiko, kerja sama usaha, serta penerbitan obligasi global.

KEBIJAKAN REMUNERASI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Remunerasi bagi Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Menteri No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dimana penghasilan anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan diberikan honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp29.200.000 dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.



STRUKTUR REMUNERASI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

NAMA	JABATAN	HONORARIUM	KETERANGAN
Heddy Lugito	Ketua	-	Anggota Dewan Komisaris (Honorarium dapat dilihat di tabel Honorarium Dewan Komisaris)
Wahju Satrio U.	Wakil Ketua	-	
Pandu Fajar Wisudha	Anggota	Rp29.200.000	
Ivan Malik	Anggota	Rp29.200.000	

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Manajemen Risiko wajib menyampaikan laporan tertulis aktivitasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 bulan sekali sebagaimana diamanatkan dalam Code of Corporate Governance. Ruang lingkup Laporan Kegiatan Komite GCG dan Manajemen Risiko mencakup tugas, tanggung jawab dan wewenang, rapat, kegiatan, program kerja dan realisasi program kerja. Berikut merupakan program kerja Komite GCG dan Manajemen Risiko di tahun 2018.

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

NO.	RENCANA KERJA	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kapasitas	Terlaksana
2.	Evaluasi Pelaksanaan RKAP 2018	Terlaksana
3.	Kunjungan Kerja ke Cabang dan Anak Perusahaan	Terlaksana
4.	Pemantauan Penerapan Prinsip-prinsip Tata kelola yang baik	Terlaksana
5.	Pembahasan Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	Terlaksana
6.	Penelaahan Kerja Sama dengan pihak ketiga	Terlaksana
7.	Penelaahan Pengaduan yang diterima Dewan Komisaris	Terlaksana
8.	Penelaahan Rancangan RKAP 2019	Terlaksana
9.	Pengawasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan	Terlaksana
10.	Pengawasan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksana
11.	Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko	Terlaksana
12.	Pengawasan Penerapan Teknologi Informasi	Terlaksana
13.	Pengawasan Kinerja Operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Anak Perusahaan	Terlaksana
14.	Penyusunan RKA Dewan Komisaris 2019	Terlaksana
15.	Perhitungan KPI Dewan Komisaris	Terlaksana

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2018

Guna meningkatkan wawasan dan kompetensi Komite GCG dan Manajemen Risiko, Perusahaan telah menyelenggarakan program pengembangan Komite GCG dan Manajemen Risiko baik melalui program internal maupun dari pihak eksternal. Berikut rincian informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite GCG dan Manajemen Risiko pada 2018.

**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO**

NAMA	TANGGAL	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN	TEMPAT	PENYELENGGARA
1. Heddy Lugito 2. Pandu Fajar W. 3. Tubagus Arief Fahmi	8-9 November 2018	Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI) bersama asesor CGPI dan Sekretaris Perusahaan Pelindo III.	Kantor Pusat	Pelindo III
1. Pandu Fajar W	26-29 November 2018	Ujian Tulis dan Wawancara Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) bersama Senior Manager.	Grand Varuna Convex, Surabaya	Pelindo III
1. Heddy Lugito 2. Pandu Fajar W. 3. Tubagus Arief Fahmi	5 November 2018	Workshop dengan tema "Global Ekonomi, Volatilitas Nilai Tukar Rupiah, Manajemen Risiko bagi Perusahaan, dan Aspek Hukum menuju Good Corporate Governance".	Kantor Perwakilan Pelindo III di Jakarta	PT Sacha Mandiri Sekawan berafiliasi dengan kantor hukum Prof. Jimly Asshiddiqie & Associate
1. Wahyu Satrio U 2. Heddy Lugito 3. Pandu Fajar W 4. Tubagus Arief Fahmi	10 Desember 2018	Workshop dengan tema "Enterprise Risk Management, Role of BOD & BOC, dan Financial Issues untuk Dewan Komisaris".	Lembaga Pendidikan Manajemen, Jakarta	Lembaga Pendidikan Manajemen
1. Wahyu Satrio U 2. Heddy Lugito 3. Pandu Fajar W 4. Tubagus Arief Fahmi	20 Desember 2018	Studi banding untuk <i>sharing knowledge</i> tentang progres pengelolaan Makassar Newport.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Perusahaan tidak memiliki organ yang secara khusus memiliki fungsi dalam memberikan saran atau rekomendasi terkait nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal-hal terkait nominasi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi kewenangan Kementerian BUMN dan diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Perusahaan tidak memiliki organ yang secara khusus memiliki fungsi dalam memberikan saran atau rekomendasi terkait Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Hal-hal terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN dan diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2018

Dikarenakan Perusahaan tidak memiliki organ yang secara khusus memiliki fungsi dalam memberikan saran atau rekomendasi terkait nominasi dan remunerasi, maka informasi mengenai pelatihan dan pengembangan pada fungsi nominasi dan remunerasi tidak tersedia.



DIREKSI

Direksi adalah organ tata kelola Perusahaan yang bertanggungjawab secara kolegal atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit 2 orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, HAK, DAN WEWENANG DIREKSI

DASAR PERATURAN DAN PRINSIP

Dalam rangka merumuskan tugas dan tanggung jawab Direksi, Perusahaan senantiasa mengacu pada sumber hukum yang berlaku antara lain UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, *Code of Conduct* Perusahaan yang tercantum dalam CoCG Perusahaan untuk kemudian dijabarkan secara lengkap dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual dan Code of Corporate Governance) yang menggantikan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 dan KEP.745.1/HK.04/P.III-2015 tentang Review dan revisi Panduan Dewan Komisaris dan Direksi (board manual) Perusahaan tanggal 16 Desember 2015. Dalam keputusan tersebut, ruang lingkup tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang Direksi adalah:

TUGAS DAN KEWAJIBAN

A. TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan target kinerja Perusahaan. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng hingga harta pribadi Direksi yang bersangkutan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan.

B. TUGAS DIREKSI UMUM

Penetapan pembagian tugas anggota Direksi merupakan kewenangan RUPS. Secara umum tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan-ketentuan serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
2. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan;
3. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
4. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun pemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan tertentu;
5. Menyiapkan susunan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan;
6. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memberikan informasi dan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan Dewan Komisaris;
8. 8)Menerapkan GCG secara konsisten.

RINCIAN TUGAS DIREKSI

Secara rinci tugas-tugas Direksi mencakup:

1. Tugas Terkait dengan RUPS

- a. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
- c. Menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan.
- d. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
- e. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham.
- f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk Laporan Keuangan baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan kepada RUPS.



- g. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.
- h. Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.

2. Tugas yang Terkait dengan Strategi dan Rencana Perusahaan

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- b. Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS.
- c. Melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perusahaan.

3. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan RJPP

- a. Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.
 - Posisi Perusahaan saat ini.
 - Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.
- b. Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang.
- c. Bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani RJPP yang telah disepakati dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham.
- d. Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perusahaan dikarenakan terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku.
- e. Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS.

4. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan RKAP

- a. Direksi menyusun RKAP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Kinerja Perusahaan tahun berjalan.
 - Rencana kerja Perusahaan.
 - Anggaran Perusahaan.
 - Proyeksi keuangan Perusahaan.
 - Proyeksi keuangan anak Perusahaan.
 - Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- b. Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

5. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan Laporan Tahunan

- a. Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud.

- b. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham.

6. Tugas yang Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko

Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi.
- b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besar dampak dan probabilitas untuk setiap risiko yang telah teridentifikasi.
- c. Evaluasi Risiko, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan.
- d. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial.
- e. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko.
- f. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Tugas yang Terkait dengan Pengendalian Intern

Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan.

Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian internal.
- b. Penetapan rencana kerja dan target-target perusahaan.
- c. Identifikasi risiko.
- d. Penilaian risiko.
- e. Mitigasi risiko.
- f. Aktivitas pengendalian.
- g. Informasi dan komunikasi.
- h. Monitoring.

8. Keterbukaan Informasi

- a. Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif.
- b. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh stakeholders.
- c. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi Perusahaan.



9. Hubungan dengan Stakeholders

- Menghormati hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan stakeholders.
- Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial.
- Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan.
- Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.

10. Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KEWENANGAN DIREKSI

KEWENANGAN UMUM

- Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
- Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan kebijakan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Intern.
- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilihan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta

mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS

- Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
- Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/ BOWT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/ BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
- Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
- Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 tahun.
- Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 tingkat di bawah Direksi.

KEWENANGAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DARI RUPS DAN PERSETUJUAN TERSEBUT DIBERIKAN SETELAH MENDAPAT TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS

- Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
- Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.
- Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
- Melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan.
- Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
- Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist).
- Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/ BOWT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate / BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS.
- Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
- Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 tahun.



10. Menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
11. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan.
12. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan.
14. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.
15. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS

D. HAK-HAK DIREKSI

1. Menerima gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
2. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan.

E. PRINSIP PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN OLEH DIREKSI

UMUM

1. Setiap kebijakan pengelolaan Perusahaan harus ditetapkan dalam suatu kebijakan tertulis.
2. Kebijakan tertulis tersebut ditetapkan oleh Direksi, baik dengan keputusan Direksi atau keputusan Direktur terkait.

PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak serta kewajiban pengelolaan Perusahaan sehari-hari, Direksi wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secara kolegal merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi kinerja Perusahaan, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan rapat Direksi.
2. Apabila anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan rapat Direksi, namun harus mengambil keputusan yang akan mempengaruhi kinerja Perusahaan, dapat ditetapkan sebuah kebijakan yang bersifat sementara sampai diputuskan dalam rapat Direksi selanjutnya.

3. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Itikad baik.
 - b. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup.
 - c. Pendalaman terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan.
 - d. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
 - e. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perusahaan.
 - f. Pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada karyawan atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan wajib dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama.
 - g. Bentuk-bentuk kebijakan pengurusan perusahaan seperti surat keputusan dan lain-lain, diatur dalam dokumen Perusahaan tersendiri.

F. PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas secara kolegal, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembidangan tugas di antara anggota Direksi. Pembidangan tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegal dalam pengurusan Perusahaan.

Pembidangan tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS. Penjabaran lebih rinci dari pembidangan tugas tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui persetujuan penetapan dan penyesuaian struktur organisasi.

Di tahun 2018, Perusahaan melakukan penyesuaian terkait nomenklatur Direksi yang disahkan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Pelindo III; Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Pelindo III. Informasi atas tugas masing-masing Direksi sekaligus penyempurnaan atas nomenklatur penamaan Direktur Perusahaan adalah:



PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

NAMA	JABATAN	TUGAS	BIDANG YANG DIBAWAHI
Doso Agung	Direktur Utama	Pembuat kebijakan umum Perusahaan, pengambil keputusan strategis Perusahaan, dan sebagai koordinator Direksi.	- Satuan Pengawasan Intern - Sekretaris Perusahaan
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pelayanan jasa kapal, barang, terminal, miscellaneous service; manajemen risiko dan mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, ISPS (International Ship and Port Security) Code, peningkatan dan kerja sama usaha, serta manajemen properti.	- Subdit Pemasaran - Subdit Teknologi Informasi dan Komunikasi - Subdit Operasi - Subdit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko
Joko Noerhudha	Direktur Teknik	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kolam pelabuhan, investasi, studi kelayakan, bangunan pelabuhan, serta bangunan sipil.	- Subdit Peralatan Pelabuhan - Subdit Fasilitas Pelabuhan - Subdit Supervisi Investasi Teknik
Toto Heli Yanto	Direktur Sumber Daya Manusia	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, proses pengadaan barang dan jasa, bidang umum dan rumah tangga, serta pengelolaan Kantor Pusat.	- Subdit Strategi dan Kesisteman SDM - Subdit Pelayanan SDM dan HSSE - Subdit Umum/Kepala Kantor Pusat - Subdit Pengadaan Barang dan Jasa - Subdit Hukum
Iman Rachman	Direktur Keuangan	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan keuangan Perusahaan, meliputi akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, hutang piutang, aset Perusahaan, dan pembinaan Anak Perusahaan.	- Subdit Akuntansi dan Anggaran - Subdit Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan - Subdit Shared Service Center - Subdit Pembinaan Anak Perusahaan
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pengembangan bisnis Perusahaan; mulai dari perencanaan, pelaksanaan kerja sama, pemantauan kerja sama, manajemen perubahan dan perencanaan strategis, dan kinerja perusahaan.	- Subdit Pengembangan Bisnis - Subdit Manajemen Perubahan - Subdit Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, Direksi Perusahaan berpedoman kepada Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) GCG.

Perusahaan memiliki pedoman GCG yang disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual dan Code of Corporate Governance). Secara rinci, pedoman kerja Direksi diatur dalam Bab 3 Board Manual yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan, keanggotaan, dan masa jabatan Direksi
2. Tanggung jawab Direksi
3. Tugas Direksi
4. Rincian tugas Direksi
5. Kewenangan Direksi
6. Hak-hak Direksi
7. Prinsip penetapan kebijakan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi
8. Pembidangan tugas Direksi
9. Organ pendukung Direksi dalam implementasi GCG
10. Penilaian kinerja Direksi



SUSUNAN DIREKSI

Direksi Pelindo III diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Susunan Direksi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN DIREKSI I

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
IG. N. Ashkara Danadiputra	Direktur Utama	Surat Keputusan No. SK.89/MBU/05/2017 tanggal 4 Mei 2017
Mohammad Iqbal	Direktur Komersial & Operasional	Surat Keputusan No. SK.248/MBU/11/2016 tanggal 2 November 2016
Husein Latief	Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Surat Keputusan No. SK.103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014
Toto Heli Yanto	Direktur SDM dan Umum	Surat Keputusan No. SK.103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014
U. Saefudin Noer	Direktur Keuangan	Surat Keputusan No. SK.28/MBU/03/2015 tanggal 16 Maret 2015
Doso Agung *)	Direktur Utama	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018
Putut Sri Muljanto **)	Direktur Operasi dan Komersial	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018
Joko Noerhudha*)	Direktur Teknik	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018
Iman Rachman*)	Direktur Keuangan	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018
Toto Nugroho***)	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018

*) Doso Agung, Joko Noerhudha dan Iman Rachman menjabat sebagai Direksi sejak tanggal 19 September 2018 menggantikan IG. N. Ashkara Danadiputra, Husein Latief dan U. Saefudin Noer dengan Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018.

**) Putut Sri Muljanto menjabat sebagai Direksi sejak tanggal 5 November 2018 menggantikan posisi Direktur Mohammad Iqbal dengan Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018.

***) Toto Nugroho menjabat sebagai Direktur dengan Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018, yang merupakan perubahan struktur dan nomenklatur Direksi.

Setelah mengalami perubahan susunan dan penyebutan nomenklatur sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN sebagaimana tersebut di atas, susunan Direksi Pelindo III tahun 2018 menjadi:

SUSUNAN DIREKSI II

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
Doso Agung	Direktur Utama	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018
Joko Noerhudha	Direktur Teknik	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018
Toto Heli Yanto	Direktur Sumber Daya Manusia	Surat Keputusan No. SK.103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014
Iman Rachman	Direktur Keuangan	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018



PROSEDUR PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMILIHAN ULANG DIREKSI (KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI)

Sebagai entitas usaha berstatus BUMN, Pelindo III memiliki mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan pemilihan ulang Direksi sebagaimana yang menjadi kewenangan Pemegang Saham. Mekanisme ini hadir sebagai bentuk pemenuhan atas prinsip keadilan (fairness) dalam GCG bagi individu-individu yang berkompeten baik bagi pegawai Perusahaan atau para profesional yang memenuhi persyaratan untuk diberikan kepercayaan dalam melakukan pengelolaan usaha Perusahaan. Regenerasi perlu dilakukan pada tataran manajemen terutama di jajaran Direksi mengingat Perusahaan memiliki mekanisme penetapan batas masa jabatan Direksi hanya selama 5 tahun untuk kemudian digantikan oleh kandidat lain atau diangkat kembali melalui pertimbangan dan keputusan Pemegang Saham.

DASAR KEBIJAKAN

Terkait mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan ulang Direksi, Perusahaan telah memuat petunjuk pelaksanaan dan teknis yang tercantum dalam Pedoman CoCG Perusahaan. Pedoman tersebut dibuat dengan mengacu pada regulasi terkait seperti:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN (pasal 5)
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
5. Keputusan Menteri Negara No. Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN

MEKANISME

Dalam pedoman yang berlaku dinyatakan bahwa mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan ulang Direksi terdiri dari:

A. PERSYARATAN

PERSYARATAN FORMAL

Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

PERSYARATAN MATERIIL

Persyaratan materiil Direksi BUMN, yaitu:

1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;
4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

B. SUMBER BAKAL CALON

Pengajuan nama-nama calon Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris, Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN dan sumber lain.

C. PENJARINGAN

Penjaringan nama-nama Direksi dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputy Teknis, dan/atau Deputy mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputy.

D. UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.

E. USULAN PENGANGKATAN

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi "Disarankan" oleh tim penilai dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan. Untuk penetapan, karena status Perusahaan sebagai BUMN yang kepemilikan seluruh saham dimiliki negara maka penetapan dilakukan melalui Keputusan Menteri.

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi adalah:

1. Persyaratan, susunan dan masa jabatan Anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pengangkatan anggota Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan Pemegang Saham. Kewenangan tersebut mencakup:
 - a. Menentukan kriteria penilaian umum calon anggota Direksi;
 - b. Membentuk tim seleksi calon anggota Direksi;
 - c. Mengangkat anggota Direksi, termasuk mengangkat Direktur Utama;
3. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola Perusahaan.
4. Calon-calun anggota Direksi merupakan pejabat internal Perusahaan dapat diusulkan oleh Dewan Komisaris.



5. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
6. Anggota Direksi diangkat melalui RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya pengangkatan.
7. Pengangkatan calon anggota Direksi dilakukan dengan keputusan Menteri.
8. Pengangkatan anggota Direksi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
9. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada.

F. PEMBERHENTIAN

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian sebagaimana tercantum dalam PER-03/MBU/02/2015 yaitu:

ALASAN PEMBERHENTIAN

Alasan pemberhentian Direksi meliputi ketidakmampuan Direksi dalam menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan, terlibat tindakan merugikan bagi Perusahaan dan negara, melakukan tindakan yang melanggar etika, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan serta mengundurkan diri.

TATA CARA PEMBERHENTIAN

Tata cara pemberhentian dilakukan dengan evaluasi oleh Deputi kepada Direksi yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengajukan usulan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN. Sebelum ditetapkan dan dievaluasi, Perusahaan terlebih dahulu memberikan informasi kepada Direksi yang bersangkutan agar yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan diri dengan ketentuan pembelaan diri disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan (untuk lisan dibuatkan berita cara penyampaian pembelaan) maksimal disampaikan 14 hari terhitung setelah Direksi yang bersangkutan memperoleh informasi pemberhentian kepada Deputi. Setelah disampaikan pembelaan diri, notulen pembelaan diajukan ke dalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan.

Proses pemberhentian Direksi dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Direksi pengganti dan pemberhentian berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau RUPS.

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi adalah:

1. Persyaratan pemberhentian anggota Direksi dari jabatan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu, dengan prosedur:

- a. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dalam butir (a) harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- c. Dalam waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara, Komisaris diwajibkan untuk meminta diadakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara untuk hadir dan membela diri.
- d. Jika RUPS Luar Biasa tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal demi hukum.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan, dengan pertimbangan:
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya.
 - b. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara.
 - f. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN.
 - g. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Rencana pemberhentian anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri Negara BUMN atau Deputi Teknis Kementerian BUMN.
5. Keputusan pemberhentian anggota Direksi sebelum masa jabatan berakhir diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



7. Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya.
8. Anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya pemberhentian.
9. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawaban dalam RUPS, atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal penetapan pengunduran diri.
10. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan.
11. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
12. Selama jabatan anggota Direksi lowong dan penggantinya belum ada, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya.
13. Jika oleh suatu sebab Perusahaan tidak mempunyai Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan, Dewan Komisaris berkewajiban untuk meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi lowongan tersebut.

G. PEMILIHAN ULANG

Pengangkatan kembali anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN, dapat dilakukan tanpa UKK, apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya yang antara lain didasarkan pada pencapaian target kinerja Perusahaan, kekompakan Tim, Integritas, dan rekam jejak. Penyajian hasil penilaian dapat dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

Dengan statusnya sebagai BUMN yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, Perusahaan senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dalam hal pengangkatan, pemilihan ulang dan pemberhentian Direksi. Karena hal-hal tersebut bersifat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku wakil Pemerintah di dalam Perusahaan, maka fungsi Nominasi dan Remunerasi yang Perusahaan ditiadakan.

PEMENUHAN ATAS MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PENGANGKATAN

Pada tahun 2018, Perusahaan mengalami pergantian Direksi. Proses pengangkatan Direksi Perusahaan telah sesuai dengan RUPS, sebagaimana tabel di bawah:

KESESUAIAN PENGANGKATAN DIREKSI DENGAN RUPS

KETENTUAN	PEMENUHAN	KETERANGAN
Kewenangan Pemegang Saham dalam Pengangkatan Direksi		
Menentukan kriteria penilaian umum calon anggota Direksi;	Terpenuhi	
Membentuk tim seleksi calon anggota Direksi;	Terpenuhi	
Mengangkat anggota Direksi, termasuk mengangkat Direktur Utama;	Terpenuhi	
Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola Perusahaan;	Terpenuhi	Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham bekerja sama dengan pihak ke-3 untuk melakukan asesmen terhadap calon Direksi.
Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai anggota Direksi;	Terpenuhi	
Anggota Direksi diangkat melalui RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya pengangkatan;	Terpenuhi	
Pengangkatan calon anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri.	Terpenuhi	Pengangkatan Direktur Utama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 dan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018.

**PEMBERHENTIAN**

Pada tahun 2018, Perusahaan mengalami pergantian Direksi. Proses pemberhentian Direksi Perusahaan telah sesuai dengan RUPS, sebagaimana tabel di bawah:

KESESUAIAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DENGAN RUPS

KETENTUAN	PEMENUHAN	KETERANGAN
Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya;	Terpenuhi	
Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan;	Terpenuhi	Masa jabatan Direktur Utama yang baru melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Utama sebelumnya.
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.	Terpenuhi	

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Pada tahun 2018 Kementerian BUMN memberhentikan 4 dan mengangkat 5 orang anggota Direksi Pelindo III. Program orientasi atau di Perusahaan disebut dengan pengenalan perusahaan terhadap Direksi yang baru diangkat. Program ini berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN, kemudian diturunkan menjadi Code of Corporate Governance.

Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018 dan 15-16 November 2018 kepada Direksi baru.

Materi Program pengenalan perusahaan, mencakup:

1. Sejarah Perusahaan
2. Wilayah kerja Perusahaan
3. Struktur organisasi Perusahaan, SDM, dan entitas Anak Perusahaan
4. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
5. Laporan keuangan Perusahaan
6. Tata kelola Perusahaan
7. Rencana jangka pendek dan panjang Perusahaan

MATERI PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN	REALISASI MATERI	PEMENUHAN
Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.	• Sejarah Perusahaan • Wilayah kerja Perusahaan • Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan • Laporan keuangan Perusahaan • Rencana jangka pendek dan panjang Perusahaan	Terpenuhi
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan.	Tata kelola Perusahaan	Terpenuhi
Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem, dan kebijakan pengendalian intern serta tugas dan peran Komite Audit dan komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Struktur organisasi perusahaan, SDM dan entitas anak perusahaan.	Terpenuhi
Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.		
Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi. Pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan di mana program tersebut dilaksanakan.	Direksi mendapatkan pengenalan Perusahaan di Kantor Pusat dan juga melakukan kunjungan ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan	Terpenuhi



RINGKASAN KEGIATAN ORIENTASI

DIREKSI YANG MENGIKUTI KEGIATAN	TOPIK	PENYELENGGARA	WAKTU	TEMPAT	BIAYA
Doso Agung	Pengenalan Perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Kamis, 27 September 2018	Kantor Pusat	-
Joko Noerhudha	Pengenalan Perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Kamis, 27 September 2018	Kantor Pusat	-
Iman Rachman	Pengenalan Perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Kamis, 27 September 2018	Kantor Pusat	-
Putut Sri Muljanto	Pengenalan Perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Jumat, 16 November 2018	Kantor Pusat	-
Toto Nugroho	Pengenalan Perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Jumat, 16 November 2018	Kantor Pusat	-

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DIREKSI 2018

Di tahun 2018 jajaran Direksi tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal Pelindo III maupun dari pihak eksternal. Sehingga data mengenai pendidikan dan pelatihan Direksi tidak dapat disajikan karena tidak terdapat kondisi dan data tersebut.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT

Direksi mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Direksi maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris serta Komite-Komite. Rapat Direksi umumnya diagendakan secara berkala dalam 1 tahun buku untuk menindaklanjuti berbagai keperluan operasional yang dijalankan Direksi. Sedangkan rapat gabungan ditujukan untuk memberikan laporan dan penerimaan masukan kepada Dewan Komisaris dalam mendukung aktivitas pengawasan atas jalannya kegiatan operasional Perusahaan. Rapat Direksi juga dapat diselenggarakan di luar agenda yang telah ditetapkan jika terdapat hal-hal yang mendesak yang membutuhkan peran dan tugas-tugas Direksi di dalamnya.

Jumlah rapat internal Direksi sepanjang tahun buku dilaksanakan sebanyak 25 kali.

FREKUENSI RAPAT DIREKSI

NAMA	JABATAN	RAPAT INTERNAL DIREKSI		
		JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	%
I G. N. Ashkara Danadiputra	Direktur Utama	17	16	94%
Doso Agung *)		8	8	100%
Mohammad Iqbal	Direktur Operasi dan Komersial	17	16	94%
Putut Sri Mulianto**)		3	3	100%
Husein Latief	Direktur Teknik, Teknologi Informasi & Komunikasi	17	17	100%
Joko Noerhudha*)	Direktur Teknik	8	8	100%
Toto Heli Yanto	Direktur Sumber Daya Manusia	25	24	96%
U. Saefudin Noer	Direktur Keuangan	17	14	82%
Iman Rachman*)		8	8	100%
Toto Nugroho***)	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	3	3	100%

*) Doso Agung, Joko Noerhudha, dan Iman Rachman menjabat sebagai Direksi sejak tanggal 19 September 2018 menggantikan IG. N. Ashkara Danadiputra, Husein Latief dan U. Saefudin Noer dengan Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018.

**) Putut Sri Mulianto menjabat sebagai Direksi sejak tanggal 5 November 2018 menggantikan posisi Direktur Mohammad Iqbal dengan Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018.

***) Toto Nugroho menjabat sebagai Direktur dengan Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018, yang merupakan perubahan struktur dan nomenklatur Direksi.



AGENDA DAN PUBLIKASI RAPAT DIREKSI

PUBLIKASI RAPAT DIREKSI DAN AGENDA RAPAT 2018

Berdasarkan dokumen Code of Corporate Governance pada BAB VI Proses-Proses Corporate Governance, disebutkan bahwa rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan. Kemudian, berdasarkan Surat Edaran Direksi No. SE.31/TR.0101/P.III-2017 tanggal 16 Agustus 2017, Pelaksanaan Rapat Direksi dilaksanakan setiap hari Senin setiap minggunya, sedangkan rapat Manajemen/Manajemen terbatas yang melibatkan pejabat 1 tingkat di bawah Direksi, sebagai berikut:

RAPAT MANAJEMEN PERUSAHAAN

A. RAPAT MANAJEMEN TERBATAS KANTOR PUSAT	
Frekuensi	2 minggu sekali tiap bulan (minggu pertama dan minggu ketiga), maksimal 2 jam untuk 1 topik pembahasan.
Hari Rapat	Diutamakan, Senin s.d Selasa
Dipimpin	Direktur Utama Pelindo III
Peserta	Direksi, Senior Vice President terkait, General Manager terkait, Direksi Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi, dan Dana Pensiun terkait.
Tempat	Kantor Pusat Pelindo III
Media	Pertemuan langsung dan/atau Tele/Video
Notulis	Sekretaris Perusahaan
B. RAPAT MANAJEMEN KANTOR PUSAT	
Frekuensi	2 minggu sekali tiap bulan (minggu kedua dan minggu keempat), maksimal 1 jam untuk 1 topik pembahasan.
Hari Rapat	Diutamakan, Senin
Dipimpin	Direktur Utama/Direksi Pelindo III
Peserta	Direksi, Seluruh Senior Vice President, General Manager terkait, Direksi Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dan Dana Pensiun terkait.
Tempat	Kantor Pusat Pelindo III
Media	Pertemuan langsung dan/atau Tele/Video Conference
Notulis	Sekretaris Perusahaan

MEKANISME PUBLIKASI RAPAT DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual dan Code of Corporate Governance), mekanisme publikasi rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 hari sebelum rapat diadakan.
2. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
3. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengusulkan agenda-agenda bagi rapat yang akan dilaksanakan.
4. Panggilan rapat Direksi tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

5. Pemanggilan untuk rapat Direksi yang dilakukan sewaktu-waktu dibuat oleh pihak yang meminta diadakannya rapat dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dan ditujukan kepada semua anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat rapat.

MEKANISME RAPAT DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual dan Code of Corporate Governance), mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Direksi adalah sebagai berikut:



- Rapat diawali dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya.
- Semua keputusan dalam rapat Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Direksi.
- Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 suara dan ditambah 1 suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila jumlah suara setuju atau tidak setuju sama, maka Pimpinan Rapat yang menentukannya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.
- Suara blangko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Direksi.
- Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- Keputusan hasil rapat yang diambil diterima sebagai keputusan bersama (kolegial).
- Jika terdapat anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.
- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai hasil keputusan yang dimaksud dan seluruh anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.

RISALAH RAPAT DIREKSI

Berikut adalah risalah dan daftar Direksi yang hadir dalam rapat internal Direksi yang dilaksanakan sepanjang Tahun Buku 2018:

RISALAH RAPAT DIREKSI

NO.	TANGGAL	AGENDA	DIREKSI YANG HADIR
1.	2 Januari 2018	- Updating pemberian tunjangan fungsional PBJ. - Updating struktur organisasi. - Pembahasan Konsep marketing di lingkungan Pelindo III	- IG.N Askhara Danadiputra: President Director, - Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, - Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, U. Saefudin Noer: Finance Director
2.	22 Januari 2018	- Update bisnis PT LEGI dan PT PEL - Concall dengan GM Benoa terkait PT IP - Presentasi PWC tentang IT	- IG.N Askhara Danadiputra: President Director, - Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, - Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, - Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director U. Saefudin Noer: Finance Director
3.	22 Januari 2018	Pembahasan Pengisian Jabatan Struktural dalam rangka restrukturisasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).	- IG.N Askhara Danadiputra: President Director, - Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, - Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, - Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director U. Saefudin Noer: Finance Director
4.	29 Januari 2018	- Road Map PKBL. - Rencana pengelolaan lapangan sepak bola depan Rumah Sakit PHC. - Pembahasan pengerukan kolam TPKS.	- IG.N Askhara Danadiputra: President Director, - Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, - Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, - Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director



NO.	TANGGAL	AGENDA	DIREKSI YANG HADIR
5.	31 Januari 2018	1. Pembahasan ICT 2. Pembahasan iChange. 3. Koordinasi dengan all SVP dibawah A1	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director
6.	12 Februari 2018	1. Permasalahan Hukum di Pelindo III. 2. Pembahasan Pembangunan Jl. H. Thohir Gresik. 3. Pembahasan Dermaga Maumere. 4. Paparan Perdir Kerja Sama.	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
7.	19 Maret 2018	1. Pembahasan PT PEL dengan PT PLN. 2. Pembahasan masalah Tanah HPL Badas. 3. Shared Service untuk Anak Perusahaan. 4. Crane Simulator. 5. Project Rebound. 6. Pembahasan Rencana Port Visit di Hongkong.	1. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 2. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 3. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 4. U. Saefudin Noer: Finance Director
8.	20 Maret 2018	Pembahasan Biaya Pelaksanaan Studi banding ke Hongkong	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
9.	23 Maret 2018	Pembahasan Kendaraan Dinas Direksi	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
10.	7 April 2018	1. Pengelolaan air bersih (SWRO) di Cabang Benoa. 2. Pelaksanaan Centralize Procurement Pelindo III Group. 3. Pembahasan Pengadaan tidak melalui distributor.	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
11.	23 April 2018	Pembahasan dukungan pengembangan Radioterapi Rumah Sakit pelindo Husada Citra (RS PHC) Surabaya	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director



NO.	TANGGAL	AGENDA	DIREKSI YANG HADIR
12.	7 Mei 2018	Pembahasan Penataan lahan Parkir Organda dan Peralatan di PT Terminal Peti Kemas Surabaya	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
13.	6 Juni 2018	1. Hasil placement health insurance pegawai dan pensiunan. 2. Pemaparan evaluasi awal pengelolaan property di lingkungan Pelindo III. 3. Paparan pengembangan bisnis PT PMS. 4. Pembahasan anggaran subdit Strategic Planning and Corp. Performance. 5. Pendayagunaan aset HPL PT Krakatau Steel di pelabuhan Warnasari Cilegon. 6. Pembahasan tentang perkembangan status TBM dan BMU. 7. Presentasi hasil rapat antara Komite Investasi dan PT LEGI. 8. Pembahasan rencana peninggian dermaga TPKS.	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
14.	6 Juni 2018	Pembahasan kegiatan promosi Asian Games XVIII tahun 2018 di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
15.	25 Juni 2018	1. Pembahasan rencana pembelian lahan TLMI. 2. Pembahasan konsep pengelolaan properti oleh PT PPI. 3. Skenario laba Perusahaan bila kurs anggaran dirubah menjadi Rp.14.000,- 4. Update progres program Change Managemnt (paperless, COP, dll). 5. Update bisnis PT PEL (aset ex AKR, SWRO, Wwaste management) termasuk rencana penyatuan PT LEGI ke dalam PT PEL. 6. Pembahasan penyesuaian Gaji Direksi Anak Perusahaan. 7. Program bantuan kepemilikan rumah bagi pegawai (Pelindo III Group) yang belum memiliki rumah. 8. Pembahasan penyesuaian gaji Vice President, CEO Regional s.d Staf. 9. Pembahasan Kelas Jabatan Pejabat Struktural Kantor Pusat dan Regional.	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
16.	2 Juli 2018	1. Pembahasan Rebound Project. 2. Project PT Terminal Peti Kemas Surabaya. 3. Revaluasi Aset dan selisih kurs valas. 4. Pembahasan aset properti oleh PT pelindo Properti Indonesia. 5. Paparan performance anak usaha : BIMA, BMC dan LEGI. 6. Review atas penilaian aset bisnis PT Indonesia Bulk Terminal.	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director



NO.	TANGGAL	AGENDA	DIREKSI YANG HADIR
17.	16 Juli 2018	Sponsorship penayangan film layar lebar BUMN	1. IG.N Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
18.	27-28 Juli 2018	Pemaparan permasalahan masing-masing subdit dan direktorat	1. Doso Agung: Direktur Utama 2. Joko Noerhudha: Direktur Teknik dan Teknologi Informasi 3. Toto Heli Yanto: Direktur SDM dan Umum 4. Iman Rachman: Direktur Keuangan
19.	2 Oktober 2018	Pembahasan Penyelesaian Permasalahan antara PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan PT pelabuhan Indonesia III (Persero)	1. Doso Agung: Direktur Utama 2. Joko Noerhudha: Direktur Teknik dan Teknologi Informasi 3. Toto Heli Yanto: Direktur SDM dan Umum 4. Iman Rachman: Direktur Keuangan
20.	4 Oktober 2018	Pembahasan pemaparan Anak Perusahaan	1. Doso Agung: Direktur Utama 2. Joko Noerhudha: Direktur Teknik dan Teknologi Informasi 3. Toto Heli Yanto: Direktur SDM dan Umum 4. Iman Rachman: Direktur Keuangan
21.	10 Oktober 2018	Pembahasan Perijinan Terminal di lingkungan Pelindo III dan pengembangan Terminal Tegal dan Maumere	1. Doso Agung: Direktur Utama 2. Joko Noerhudha: Direktur Teknik dan Teknologi Informasi 3. Toto Heli Yanto: Direktur SDM dan Umum 4. Iman Rachman: Direktur Keuangan
22.	15 Oktober 2018	1. Perkembangan PT TPS. 2. RKAP 2019. 3. Proses Bisnis di Pelindo III Group	1. Doso Agung: Direktur Utama 2. Joko Noerhudha: Direktur Teknik dan Teknologi Informasi 3. Toto Heli Yanto: Direktur SDM dan Umum 4. Iman Rachman: Direktur Keuangan
23.	7 November 2018	Pembahasan rencana investasi Pelindo III Group dengan Komite Investasi dan Kerja sama	1. Doso Agung: Direktur Utama 2. Putut Sri Muljanto: Direktur Operasi dan Komersial 3. Joko Noerhudha: Direktur Teknik 4. Toto Heli Yanto: Direktur SDM 5. Iman Rachman: Direktur Keuangan 6. Toto Nugroho: Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis
24.	14 November 2018	Bantuan Act and Pray for Palu	1. Doso Agung: Direktur Utama 2. Putut Sri Muljanto: Direktur Operasi dan Komersial 3. Joko Noerhudha: Direktur Teknik 4. Toto Heli Yanto: Direktur SDM 5. Iman Rachman: Direktur Keuangan 6. Toto Nugroho: Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis
25.	3 Desember 2018	1. Rencana peninggian dermaga Tanjung Emas. 2. Peraturan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama. 3. Shared Service Center untuk Anak dan Cucu perusahaan bersama Konsultan PWC. 4. Lain-lain.	1. Doso Agung: Direktur Utama 2. Putut Sri Muljanto: Direktur Operasi dan Komersial 3. Joko Noerhudha: Direktur Teknik 4. Toto Heli Yanto: Direktur SDM 5. Iman Rachman: Direktur Keuangan 6. Toto Nugroho: Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

FOKUS PENGELOLAAN BISNIS DIREKSI 2018

Mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 serta memperhatikan dinamika yang terjadi secara makro maupun khusus di sektor jasa kepelabuhan, Direksi telah merancang fokus pengelolaan usaha Perusahaan yang terdiri dari:

FOKUS PENGELOLAAN BISNIS

ASPEK	FOKUS PENGELOLAAN
Aspek Keuangan	Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan keuangan Perusahaan, meliputi akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, hutang piutang, aset Perusahaan dan pembinaan Anak Perusahaan.
Aspek Operasi dan Komersial	Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pelayanan jasa kapal, barang, terminal, miscellaneous service, manajemen risiko dan mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, ISPS (International Ship and Port Security) Code, peningkatan dan kerja sama usaha, serta manajemen property.
Aspek SDM	Tugas dan tanggung jawab Direktur SDM adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, proses pengadaan barang dan jasa, bidang umum dan rumah tangga serta pengelolaan Kantor Pusat.
Aspek Teknik	Tugas dan tanggung jawab Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kolam pelabuhan, investasi, studi kelayakan, bangunan pelabuhan, bangunan sipil, aplikasi perangkat lunak, perangkat keras serta pengembangan teknologi informasi & Komunikasi.
Aspek Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Tugas dan tanggung jawab Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis adalah melakukan pengawasan dan pembinaan atas potensi pengembangan bisnis Perusahaan serta memantau dan evaluasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Selain itu, juga melakukan pembinaan atas manajemen perubahan Perusahaan.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI 2018

URAIAN TUGAS	REALISASI
TERKAIT DENGAN RUPS	
Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen- dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat: 1. Nama dan alamat Pemegang Saham. 2. Jumlah, No. dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, apabila dikeluarkan lebih dari 1 klasifikasi saham. 3. Nama dan alamat dari orang/perseorangan/badan hukum yang mempunyai hak gadai tersebut. 4. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.	Terpenuhi
Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.	Terpenuhi
Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa	Terpenuhi
Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham.	Terpenuhi
Memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan kepada RUPS.	Terpenuhi
Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.	Terpenuhi
Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.	Terpenuhi



URAIAN TUGAS	REALISASI
TERKAIT STRATEGI DAN RENCANA PERUSAHAAN	
Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.	Terpenuhi
Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS.	Terpenuhi
Melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perusahaan.	Terpenuhi
TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RJPP	
Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya 2. Posisi Perusahaan saat ini 3. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP	Terpenuhi
Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang.	Terpenuhi
Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perusahaan dikarenakan terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku.	Terpenuhi
Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS.	Terpenuhi
TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RKAP	
Direksi menyusun RKAP yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Kinerja Perusahaan tahun berjalan 2. Rencana kerja Perusahaan 3. Anggaran Perusahaan 4. Proyeksi keuangan perusahaan 5. Proyeksi keuangan anak Perusahaan 6. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS	Terpenuhi
Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan	Terpenuhi
TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN	
Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud.	Terpenuhi
Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham.	Terpenuhi
TERKAIT MANAJEMEN RISIKO	
Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi 2. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko 3. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan 4. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial 5. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko 6. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku	Terpenuhi



URAIAN TUGAS	REALISASI
TERKAIT PENGENDALIAN INTERN	
Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan.	Terpenuhi
Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian internal 2. Penetapan rencana kerja dan target-target perusahaan 3. Identifikasi risiko 4. Penilaian risiko 5. Mitigasi risiko 6. Aktivitas pengendalian 7. Informasi dan komunikasi 8. Monitoring.	Terpenuhi
KETERBUKAAN INFORMASI	
Mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.	Terpenuhi
Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh stakeholders.	Terpenuhi
Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi.	Terpenuhi
HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
Menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan.	Terpenuhi
Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial.	Terpenuhi
Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.	Terpenuhi
Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan.	Terpenuhi
Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.	Terpenuhi
TUGAS DAN KEWAJIBAN LAIN	
Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Terpenuhi



LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS ARAHAN DEWAN KOMISARIS

Tindak lanjut atas arahan yang disampaikan kepada Direksi sepanjang 2018 meliputi:

ARAHAN DEWAN KOMISARIS

ARAHAN	TINDAK LANJUT
Agar menyampaikan usulan perubahan logo perusahaan tertulis kepada Dewan Komisaris, dan kemudian Dewan komisaris akan memberikan tanggapan secara tertulis pula.	Terpenuhi
Agenda tambahan dalam RUPS RKAP 2018, Dewan Komisaris menyepakati tambahan 2 agenda RUPS, yaitu : 1. Perubahan batasan pendelegasian kewenangan 2. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris apabila terjadi eskalasi investasi sampai dengan 10%.	Terpenuhi
Terkait dengan usulan penetapan Kepala SPI, Dewan Komisaris sudah membuat rekomendasi agar terhadap calon yang diusulkan dilakukan asesmen kembali. Selanjutnya, Direksi agar menyampaikan hasil asesmen ulang tersebut kepada Dewan Komisaris guna proses lebih lanjut.	Terpenuhi
Dalam pelaksanaan kegiatan di Pelindo III, Dewan Komisaris menghimbau agar prinsip GCG, Etika bisnis, Pedoman dari stakeholder juga harus diperhatikan dan aturan main agar ditaati.	Terpenuhi
Direksi perlu meninjau lagi standar SPI, agar SPI dapat mendukung langkah-langkah dan upaya-upaya Direksi dalam mencapai target dan meningkatkan quality assurance.	Terpenuhi
Sehubungan dengan telah disetujuinya logo baru Pelindo III, Direksi harus melakukan sosialisasi logo baru tersebut dan me-launching-nya juga di cabang-cabang.	Terpenuhi
Dalam implementasi IT, Direksi agar memperhatikan back up system di bidang pelayanan yang dimiliki perusahaan sehingga tidak menimbulkan permasalahan operasional apabila system utama tidak berfungsi.	Terpenuhi
Mengingat investasi Pelindo III tahun 2018 cukup besar, maka peran dan fungsi Manajemen Risiko agar ditingkatkan lagi.	Terpenuhi
Diperlukan kerja sama untuk saling interaksi mengelola risiko, sehingga setiap 3 bulan perlu rapat antara unit Manajemen Risiko dengan Komite Manajemen Risiko.	Terpenuhi
Dewan Komisaris meminta agar Direksi bisa semakin prudent dalam membelanjakan dana perusahaan sehingga memberikan hasil yang baik. Direksi agar dapat menilai proyek yang benar-benar strategis ke depan dan menguntungkan bagi perusahaan.	Terpenuhi
Progress persiapan Angkutan Lebaran 1439H/2018M 1. Dalam rangka mengantisipasi ancaman bom/teror khususnya di pelabuhan Surabaya, agar dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait khususnya BNPT. 2. Sosialisasi Program Mudik Gratis perlu disampaikan ke masyarakat luas, untuk itu perlu juga dilakukan sosialisasi melalui media radio atau bila dimungkinkan melalui media televisi. 3. Dalam rangka memudahkan bagi pengguna jasa, ke depan agar nomor contact center dicari yang lebih cantik sehingga mudah diingat. 4. Pengaturan kedatangan penumpang yang akan ikut Program Mudik Gratis agar dilakukan dengan komprehensif sehingga tidak ada bus yang over supply. Di samping itu, perlu diperhatikan juga bagaimana transportasi lokal peserta mudik yang bukan dari Program Mudik Gratis dan mereka harus terakomodir dengan baik.	Terpenuhi
Memperhatikan fluktuasi nilai tukar USD yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, Direksi agar menyusun langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak fluktuasi tersebut terhadap menurunnya kinerja keuangan perusahaan.	Terpenuhi
Pelaksanaan kegiatan mudik gratis dalam rangka Angkutan Lebaran 1439H sudah cukup baik dan perusahaan juga sudah menyediakan fasilitas-fasilitas tambahan bagi kenyamanan penumpang seperti capsule hotel yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak. Namun demikian untuk peningkatan pelayanan ke depan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Agar diperhatikan juga penanganan dari arus balik penumpang ke daerah masing-masing. 2. Sosialisasi program Mudik Gratis secara online perlu dilakukan secara menarik lagi sehingga dampaknya lebih besar. 3. Terkait dengan manifest penumpang, manajemen perlu berkordinasi dengan PT Pelni atau perusahaan pelayaran lainnya. Sebaiknya Pelindo III juga memiliki data penumpang, karena apabila terjadi sesuatu maka pelabuhan yang akan ditanyakan informasi mengenai data-data tentang penumpang, dan kita harus bisa menjawabnya.	Terpenuhi



ARAHAN	TINDAK LANJUT
Terkait dengan rencana pengembangan Pelabuhan Kendal, Direksi agar melakukan kajian lebih lanjut terkait rencana tersebut. Untuk saat ini, Direksi diminta untuk fokus mengamati pangsa pasar di Tanjung Emas.	Terpenuhi
Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja bulan Juli 2018, yang secara umum semuanya meningkat. Namun demikian, Dewan Komisaris meminta Direksi agar mengupayakan perbaikan kinerja baik di regional maupun di anak Perusahaan yang masih belum mencapai targetnya. Untuk itu, Direksi perlu me-maintain laba positif dan mengupayakan beban harus selalu lebih rendah daripada pendapatan.	Terpenuhi
Direksi perlu mencantumkan target inisiasi dalam paparan laporan manajemen bulanan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi karyawan baik di Kantor Pusat, Cabang, maupun di Anak Perusahaan untuk mencapai targetnya. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment bagi karyawan. Disamping itu, juga perlu disajikan data arus kas perusahaan dalam paparan tersebut.	Terpenuhi
Investasi agar direncanakan secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat guna.	Terpenuhi
Menyusunan RKAP tahun 2019 harus memperhatikan dan mengakomodir Aspirasi Pemegang Saham dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.	Terpenuhi
Memperhatikan kinerja Perusahaan hingga akhir Oktober ini, Direksi agar mengupayakan perbaikan kinerja agar tercapai target dan juga inisiasi serta perlu diupayakan langkah strategis sehubungan investasi agar realisasi item pekerjaan mencapai target.	Terpenuhi
Terkait kinerja Manajemen sampai akhir November 2018, Direksi agar menjadikan perhatian terkait dengan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD yang akan berdampak kepada capaian laba bersih perusahaan tahun 2018.	Terpenuhi
Direksi agar diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk Cabang, Anak Perusahaan dan Cucu dalam rangka pengembangan dan berinovasi.	Terpenuhi
Direksi agar memperhatikan kehandalan sistem ICT perusahaan, guna mendukung rencana perusahaan untuk menjadikan Pelabuhan Mirah sebagai pelabuhan transshipment domestik dan penerapan single billing di Pelindo.	Terpenuhi
Realisasi Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 1. Pos Komando Taktis (Poskotis) dalam kegiatan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 agar betul-betul ditingkatkan, bukan hanya fokus di Idul Fitri saja. 2. Petugas on duty agar diadakan di setiap terminal. 3. Mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini yang ekstrim, Direksi diminta untuk mewaspadai hal tersebut dan mengantisipasinya dengan baik.	Terpenuhi

INFORMASI RANGKAP JABATAN DIREKSI

Informasi terkait rangkap jabatan Direksi telah disajikan di bagian profil Direksi.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Hingga 31 Desember 2018, saham Pelindo III dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Untuk itu dapat diinformasikan bahwa Direksi Perusahaan tidak memiliki saham di Perusahaan dan pembahasannya telah dijabarkan dalam informasi Struktur Pemegang Saham dalam bagian profil Perusahaan.



RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

AGENDA DAN PUBLIKASI RENCANA RAPAT GABUNGAN

AGENDA UMUM

Secara umum agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi membahas tentang:

1. Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.
2. Pembahasan dan Perumusan RKAP.
3. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Pembahasan perkembangan kinerja operasional.
5. Pembahasan dan review RJPP.
6. Pembahasan terkait penetapan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit Laporan Tahunan.
7. Pembahasan terkait kinerja dan rencana pengembangan Anak Perusahaan.

PUBLIKASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Komite-Komite Perusahaan dilakukan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan dengan bentuk surat menyurat. Dalam publikasi tersebut termuat mengenai informasi dan materi rapat yang terdiri dari:

1. Tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
2. Agenda rapat;
3. Nama peserta; dan
4. Undangan rapat.

Guna membentuk perencanaan yang disiplin, di awal tahun 2018, Perusahaan telah menyusun rencana awal pelaksanaan rapat gabungan tersebut yang tertuang dalam Jadwal Tahunan Perusahaan. Informasi rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti Internal Audit dan Departemen-departemen yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

FREKUENSI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN

Sepanjang 2018, Perusahaan telah mengadakan 12 kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT GABUNGAN

NAMA	JABATAN	RAPAT GABUNGAN		
		JUMLAH	KEHADIRAN	%
DEWAN KOMISARIS				
Hari Bowo	Komisaris Utama	12	12	100
Zainal Abidin	Anggota Komisaris	12	12	100
Wahju Satrio Utomo	Anggota Komisaris	12	9	75
Heddy Lugito	Anggota Komisaris	12	11	92
Dedi Syarif Usman	Anggota Komisaris	12	6	50
Soritaon Siregar	Anggota Komisaris	12	1	8



NAMA	JABATAN	RAPAT GABUNGAN		
		JUMLAH	KEHADIRAN	%
DIREKSI				
IG. N. Askhara Danadiputra	Direktur Utama	12	8	67
Husein Latief	Direktur Teknik, Teknologi Informasi Dan Komunikasi	12	8	67
M. Iqbal	Direktur Komersial & Operasional	12	8	67
U. Saefudin Noer	Direktur Keuangan	12	8	67
Toto Heli Yanto	Direktur Sumber Daya Manusia	12	12	100
Doso Agung	Direktur Utama	12	3	25
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial	12	2	17
Joko Noerhudha	Direktur Teknik	12	3	25
Iman Rachman	Direktur Keuangan	12	4	33
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	12	1	8

RISALAH RAPAT GABUNGAN

Berikut adalah risalah dan daftar Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat gabungan yang dilaksanakan sepanjang Tahun Buku 2018:

RISALAH RAPAT GABUNGAN 2018

NO.	TANGGAL	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR	DIREKSI YANG HADIR
1.	18 Januari 2018	1. Pembahasan perubahan rencana investasi tahun 2018 dalam rangka persiapan RUPS RKAP tahun 2018; 2. Lain-Lain: a. Update progress persiapan penerbitan global bond. b. Update progress rencana perubahan struktur organisasi Perusahaan.	1. Hari Bowo: Komisaris Utama, 2. Heddy Lugito: Anggota Komisaris, 3. Zainal Abidin: Anggota Komisaris, 4. Wahyu Satrio Utomo: Anggota Komisaris, 5. Soritaon Siregar: Anggota Komisaris	1. IG.N. Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. U. Saefudin Noer: Finance Director
2.	28 Februari 2018	1. Laporan kinerja Manajemen bulan Januari 2018 dan tindak lanjut rapat koordinasi bulan Januari 2018. 2. Progress general audit Pelindo III tahun buku 2017. 3. Lain-lain	1. Hari Bowo: Komisaris Utama, 2. Heddy Lugito: Anggota Komisaris, 3. Zainal Abidin: Anggota Komisaris, 4. Wahyu Satrio Utomo: Anggota Komisaris,	1. IG.N. Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director



NO.	TANGGAL	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR	DIREKSI YANG HADIR
3.	26 Maret 2018	1. Laporan kinerja Manajemen sampai bulan Februari 2018 dan tindak lanjut rapat koordniasi bulan Februari 2018. 2. Persiapan RUPS tentang laporan audited tahun buku 2017. 3. Lain-lain.	1. Hari Bowo: Komisaris Utama, 2. Heddy Lugito: Anggota Komisaris, 3. Zainal Abidin: Anggota Komisaris, 4. Wahyu Satrio Utomo: Anggota Komisaris,	1. IG.N. Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
4.	25 April 2018	1. Laporan kinerja triwulan I tahun 2018 dan rolling forecast akhir tahun 2018 (termasuk PKBL). 2. Pemaparan realisasi/penyerapan investasi sampai dengan triwulan I tahun 2018 dan perubahan rencana investasi (jika ada) serta rolling forecast akhir tahun 2018. 3. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya. 4. Lain-Lain.	1. Hari Bowo: Komisaris Utama, 2. Heddy Lugito: Anggota Komisaris, 3. Zainal Abidin: Anggota Komisaris, 4. Wahyu Satrio Utomo: Anggota Komisaris,	1. IG.N. Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
5.	28 Mei 2018	1. Progress persiapan angkutan lebaran 1439H/2018M. 2. Laporan kinerja Manajemen, penyerapan investasi dan PKBL sampai April 2018 serta rolling forecast akhir tahun 2018. 3. Revisi program investasi yang dibiayai global bond dan revisi proyeksi laporan keuangan (laba/rugi, arus kas dan negara). 4. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi April 2018. 5. Lain-lain: Progress PT TPS.	1. Hari Bowo: Komisaris Utama, 2. Heddy Lugito: Anggota Komisaris, 3. Zainal Abidin: Anggota Komisaris, 4. Wahyu Satrio Utomo: Anggota Komisaris,	1. IG.N. Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director
6.	21 Juni 2018	1. Laporan progress pre-angkutan lebaran 1439 (kendala dan permasalahan). 2. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan lalu. 3. Laporan kinerja Manajemen, penyerapan investasi dan PKBL sampai akhir Mei 2018, serta rolling forecast akhir tahun 2018. 4. Lain-lain.	1. Hari Bowo: Komisaris Utama, 2. Heddy Lugito: Anggota Komisaris, 3. Zainal Abidin: Anggota Komisaris,	1. IG.N. Askhara Danadiputra: President Director, 2. Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, 3. Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, 4. Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director 5. U. Saefudin Noer: Finance Director



NO.	TANGGAL	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR	DIREKSI YANG HADIR
7.	30 Juli 2018	- Pengenalan anggota Komisaris baru kepada Perusahaan. - Laporan rencana dan anggaran investasi semester I tahun 2018 dan rolling forecast s.d. Desember 2018. - Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Juni 2018. - Lain-lain: - Rencana tindak lanjut persetujuan Menteri BUMN terkait pembelian saham DP World di PT TPS. - Laporan investasi kebakaran Kapal Ikan Indonesia di Tanjung Benoa pada tanggal 3 Juli 2018 serta upaya pencegahannya. - Laporan pelaksanaan struktur organisasi baru per 1 Juli 2018	- Hari Bowo: Komisaris Utama, - Heddy Lugito: Anggota Komisaris, - Zainal Abidin: Anggota Komisaris, - Dedi Syarif Usman: Anggota Komisaris,	- IG.N. Askhara Danadiputra: President Director, - Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, - Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, - Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director U. Saefudin Noer: Finance Director
8.	27 Agustus 2018	- Laporan kinerja Manajemen sampai akhir Juli 2018 - Progress realisasi dan anggaran investasi sampai akhir Juli 2018 dan rolling forecast s.d. Desember 2018 - Usulan revisi investasi dan RKAP tahun 2018 - Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan 2018 - Lain-lain: - Pengaduan pensiun Pelindo III terkait dengan penyesuaian pensiun dan fasilitas kesehatan - Hasil kunjungan kerja di NTT	- Hari Bowo: Komisaris Utama, - Wahju Satrio Utomo: Anggota Komisaris, - Heddy Lugito: Anggota Komisaris, - Zainal Abidin: Anggota Komisaris, - Dedi Syarif Usman: Anggota Komisaris,	- IG.N. Askhara Danadiputra: President Director, - Mohammad Iqbal: Commercial and Operational Director, - Husein Latief: Engineering, Information and Communication Technology Director, - Toto Heli Yanto: Human Capital and General Affair Director U. Saefudin Noer: Finance Director
9.	26 September 2018	- Laporan kinerja manajemen sampai akhir Agustus 2018 - Progress realisasi dan anggaran investasi sampai akhir Agustus 2018 dan rolling forecast s.d. Desember 2018 - Progress revisi investasi tahun 2018 - Laporan penggunaan dana Global Bond 2018 - Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2018 - Lain-lain: (progress penyusunan RKAP tahun 2019, laporan persiapan IMF di Bali, proses pengadaan KAP, laporan pengelolaan risiko triwulan II 2018, progress implementasi STO baru, hasil kunjungan kerja ke Anak Perusahaan PT TPS, PT BJT, PT TTL dan Cabang Gresik).	- Hari Bowo: Komisaris Utama, - Wahju Satrio Utomo: Anggota Komisaris, - Heddy Lugito: Anggota Komisaris, - Zainal Abidin: Anggota Komisaris, - Dedi Syarif Usman: Anggota Komisaris,	- Doso Agung: Direktur Utama - Joko Noerhudha: Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi - Iman Rachman: Direktur Keuangan - Toto Heli Yanto: Direktur SDM dan Umum
10.	17 Oktober 2018	- Laporan kinerja Manajemen sampai akhir September 2018 - Progress realisasi dan anggaran investasi sampai akhir September 2018 dan rolling forecast s.d. Desember 2018 - Usulan RKAP tahun 2019 - Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan September 2018 - Tindak lanjut arahan RUPS atas surat No. S-1007/MBU/D2/09/2018 tanggal 25 September 2018 - Lain-lain: (hasil kunker ke Cabang Tanjung Perak, PT PMS, PT PDS dan PT PHC).	- Hari Bowo: Komisaris Utama - Zainal Abidin: Anggota Komisaris - Heddy Lugito: Anggota Komisaris - Wahju Satrio U: Anggota Komisaris - Dedi Syarif Usman: Anggota Komisaris	- Doso Agung: Direktur Utama - Joko Noerhudha: Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi - Iman Rachman: Direktur Keuangan - Toto Heli Yanto: Direktur SDM dan Umum



NO.	TANGGAL	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR	DIREKSI YANG HADIR
11.	30 November 2018	1. Laporan kinerja Manajemen sampai akhir Oktober 2018 2. <i>Progress</i> realisasi dan anggaran investasi sampai akhir Oktober 2018 dan <i>rolling forecast</i> s.d. Desember 2018 3. <i>Progress</i> pengakhiran kerja sama dengan DP World atas investasi di TPS. 4. <i>Progress</i> tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI 5. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulan Oktober 2018 6. Lain-lain (<i>progress</i> pelaksanaan audit KAP, tata pelaksanaan administrasi surat menyurat Direksi), Lain-lain khusus (terbatas Dewan Komisaris dan Direksi)	1. Hari Bowo: Komisaris Utama 2. Zainal Abidin: Anggota Komisaris 3. Heddy Lugito: Anggota Komisaris 4. Dedi Syarif Usman: Anggota Komisaris	1. Joko Noerhudha: Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Iman Rachman: Direktur Keuangan 3. Toto Heli Yanto: Direktur SDM dan Umum 4. Toto Nugroho: Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis 5. Putut Sri Muljanto: Direktur Operasi dan Komersial
12.	28 Desember 2018	1. <i>Progress</i> audit KAP tahun 2018. 2. Laporan kinerja Manajemen sampai akhir November 2018 dan perkiraan sampai akhir Desember 2018. 3. <i>Progress</i> realisasi dan anggaran investasi sampai akhir November 2018 dan <i>rolling forecast</i> s.d. Desember 2018. 4. Laporan evaluasi kinerja masing-masing Terminal dan Anak Perusahaan tahun 2018 dan tahun sebelumnya. 5. Pemaparan ICT Pelindo III. 6. Tindak lanjut Dewan Komisaris dan Direksi bulan November 2018. 7. Lain-lain: a. <i>Progress</i> angkutan Natal dan Tahun Baru 2018. b. Penjelasan indikator aspek operasional tahun 2019	1. Hari Bowo: Komisaris Utama 2. Zainal Abidin: Anggota Komisaris 3. Heddy Lugito: Anggota Komisaris 4. Dedi Syarif Usman: Anggota Komisaris	1. Doso Agung: Direktur Utama 2. Iman Rachman: Direktur Keuangan 3. Toto Heli Yanto: Direktur SDM dan Umum 4. Putut Sri Muljanto: Direktur Operasi dan Komersial

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT GABUNGAN

Rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi beserta jajarannya dalam kegiatan Rapat Gabungan antara lain:

1. Memberikan arahan terkait rumusan RKAP.
2. Memberikan arahan terkait perkembangan Satgas Pungli, Temuan BPK, Audit oleh KAP dan SAP, serta Kajian Risiko Investasi 2018.
3. Memberikan arahan terkait persiapan RUPS Laporan Tahunan Tahun buku 2017.
4. Usulan mengenai Calon Auditor KAP Tahun buku 2018.
5. Menindaklanjuti *Memorandum of Collaboration* (MoC) dan perjanjian dengan 16 BUMN dan Swasta.
6. Pembahasan kerja sama jasa pandu di selat malaka antara Pelindo I dan Pelindo III dikaitkan dengan rencana investasi Perusahaan.
7. Memberikan arahan terkait langkah-langkah antisipasi direksi menghadapi tahun politik 2018.



ASESMEN TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROSEDUR PELAKSANAAN ASESMEN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan hasil asesmen atas pengawasan dan penasihatian serta pengurusan pengelolaan Perusahaan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian terhadap anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala berdasarkan target pencapaian dan KPI (*Key Performance Indicator*) yang sudah disepakati bersama pada saat awal tahun sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN ASESMEN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris berpegang pada aturan Anggaran Dasar, Kementerian BUMN, serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris atas penerapan GCG tahun 2018 dilakukan secara mandiri dan bersifat kolegial yang dituangkan dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP. Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menyusun Laporan Tugas Pengawasan yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan. Sesuai ketentuan Permen BUMN No. PER 01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN, pada saat RUPS RKAP tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris Pelindo III dalam bentuk kontrak manajemen kepada Menteri BUMN.

Direksi dalam menjalankan tugas operasionalnya mengacu pada Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola, peraturan yang diterbitkan Pemegang Saham serta komitmennya terhadap KPI yang tertuang dalam kontrak manajemen. Dewan Komisaris sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja Direksi baik secara individual maupun kolegial serta melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham dan akan menjadi salah satu pertimbangan Pemegang Saham dalam keputusan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan PKBL Pelindo III tahun 2018.

Penilaian kinerja Direksi tahun 2018 berdasarkan kriteria, capaian target, dan indikator kinerja utama (KPI) yang telah diaudit oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young). Secara umum, hasil *self-assessment* GCG menunjukkan bahwa kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sudah "Baik". Hal ini tercermin dari hasil *self-assessment* GCG Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018 masing-masing sebesar 92,92% dan 93,29%.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup 12 indikator, yang terdiri dari:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan, terdiri dari 6 Indikator
2. Aspek Laporan, terdiri dari 3 indikator
3. Aspek Dinamis, terdiri dari 3 indikator

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup 13 indikator, yang terdiri dari:

1. Aspek Keuangan, terdiri dari 7 indikator
2. Aspek Operasional, terdiri dari 2 indikator
3. Aspek Administrasi terdiri dari 4 indikator



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan memiliki peranan yang sangat penting terhadap roda bisnis Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang memberikan motivasi kepada Direksi maupun Dewan Komisaris atas kontribusinya terhadap Perusahaan.

DASAR KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Hal ini berdasarkan kepada Keputusan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 *juncto* PER-02/MBU/2016 *juncto* PER-01/MBU/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan Perusahaan

PROSES PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, Jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*); bahwa penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Dalam melakukan kajian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta kinerja Perusahaan. Namun terdapat pula faktor pengaruh lainnya yaitu KPI, kontrak manajemen dan tingkat kesehatan perusahaan.

Hasil kajian tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham berdasarkan lampiran dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017. Rumusan untuk menghitung penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham.



STRUKTUR REMUNERASI

NO.	JENIS PENGHASILAN	BESARAN MAKSIMUM SESUAI KEPUTUSAN RUPS DAN PERATURAN MENTERI BUMN	DASAR PENETAPAN
KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS			
1.	Honorarium	- Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama - Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 kali honorarium	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium per bulan	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost).	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Fasilitas Bantuan Hukum/ Legal	Sebesar pemakaian (at cost)	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI			
1.	Honorarium	- Direktur Utama: 100% - Direktur: 90% dari Direktur Utama	
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 kali gaji	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Tunjangan Perumahan	Rp25.000.000,00 per Bulan	Sesuai PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017 apabila perusahaan telah menyediakan rumah jabatan maka wajib dipergunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kendaraan	1 unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan	Spesifikasi dan jenis endaraan diatur oleh dewan komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc
	Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost)	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Fasilitas Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian (at cost)	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017

**JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

NO.	JABATAN	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1.	Direktur Utama	Rp180.000.000	Perbandingan gaji Direktur Utama dengan Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:85%:45%:90%
2.	Direktur	Rp153.400.000	
3.	Komisaris Utama	Rp81.000.000	
4.	Komisaris	Rp72.900.000	

Dengan demikian, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

NO.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS	TAKE-HOME PAY PER BULAN
1.	Hari Bowo	Komisaris Utama	Rp81.000.000	Rp16.200.000	Rp97.200.000
2.	Zainal Abidin	Komisaris Independen	Rp72.900.000	Rp14.580.000	Rp87.480.000
3.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris	Rp72.900.000	Rp14.580.000	Rp87.480.000
4.	Heddy Lugito	Komisaris Independen	Rp72.900.000	Rp14.580.000	Rp87.480.000
5.	Dedi Syarif Usaman	Komisaris	Rp72.900.000	Rp14.580.000	Rp87.480.000

REMUNERASI DIREKSI

NO.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1.	Doso Agung	Direktur Utama	Rp180.000.000
2.	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial	Rp153.000.000
3.	Joko Norhudha	Direktur Teknik	Rp153.000.000
4.	Toto Heli Yanto	Direktur Sumber Daya Manusia	Rp153.000.000
5.	Iman Rachman	Direktur Keuangan	Rp153.000.000
6.	Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Rp153.000.000

**TANTIEM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2018**

NO.	JABATAN	TANTIEM	KETERANGAN
1.	Direktur Utama	Rp5.800.328.592	Perbandingan tantiem Direktur Utama dengan Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:90%:45%:90%
2.	Direktur	Rp5.293.821.025	
3.	Komisaris Utama	Rp2.646.910.513	
4.	Komisaris	Rp2.382.219.461	

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 2016-2018

NO.	JABATAN	2016*)		2017*)		2018*)	
		HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS **)	HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS **)	HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS **)
1.	Direktur Utama	Rp118.000.000	Rp75.000.000	Rp146.000.000	Rp25.000.000	Rp180.000.000	Rp25.000.000
2.	Direktur	Rp106.200.000	Rp70.000.000	Rp131.400.000	Rp25.000.000	Rp153.000.000	Rp25.000.000
3.	Komisaris Utama	Rp53.100.000	Rp10.620.000	Rp65.700.000	Rp13.140.000	Rp65.700.000	Rp13.140.000
4.	Komisaris	Rp47.790.000	Rp9.558.000	Rp59.130.000	Rp11.826.000	Rp59.130.000	Rp11.826.000

*) Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan setiap bulan

**) Tunjangan/Fasilitas Direksi: Penjumlahan mobilitas dan perumahan, sedangkan pada tahun 2018 hanya tunjangan perumahan. Tunjangan/Fasilitas Komisaris: Tunjangan mobilitas.





INFORMASI HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesama anggota Dewan Komisaris serta, antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Pelindo III tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan juga tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan Pemegang Saham tentang Pelaksanaan GCG.

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM

NAMA	HUBUNGAN DENGAN ORGAN PELINDO III						HUBUNGAN KEPENGURUSAN DI PERUSAHAAN LAIN					
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM		SEBAGAI DEWAN KOMISARIS		SEBAGAI DIREKSI		SEBAGAI PEMEGANG SAHAM	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Hari Bowo	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Zainal Abidin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Wahju Satrio Utomo	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Heddy Lugito	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dedi Syarif Usman	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM

NAMA	HUBUNGAN DENGAN ORGAN PELINDO III						HUBUNGAN KEPENGURUSAN DI PERUSAHAAN LAIN					
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM		SEBAGAI DEWAN KOMISARIS		SEBAGAI DIREKSI		SEBAGAI PEMEGANG SAHAM	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Doso Agung	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Putut Sri Muljanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Joko Noerhudha	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Toto Heli Yanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Iman Rachman	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Toto Nugroho	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ditujukan untuk memberikan sudut pandang dan paradigma pengelolaan yang luas sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan latar belakang kepakaran pada masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi selain pada aspek kompetensi juga memenuhi aspek-aspek lainnya sebagai wujud pembudayaan prinsip GCG melalui prinsip keadilan (*fairness*) seperti kelompok usia yang mewakili sudut pandang di tiap-tiap generasi, latar belakang kesukuan sebagai implementasi kebhinekaan, gender sebagai wujud pemenuhan *affirmative action* dan aspek-aspek lainnya yang bersifat non-kepentingan.

DASAR HUKUM

Komposisi dan penentuan penunjukan Dewan Komisaris merupakan hak Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, dipilih berdasarkan integritas, berdedikasi, memahami permasalahan manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai sesuai PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*)

DASAR KEBIJAKAN INTERNAL

Internalisasi atas regulasi yang mengatur tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam Dasar kebijakan internal Perusahaan yang tercantum dalam Board Manual.

LAPORAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Secara prinsip Dewan Komisaris telah memiliki komposisi yang beragam yang dapat dilihat dari beragamnya pengalaman kerja, usia, dan pendidikan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris. Perpaduan ini menjadi pijakan yang baik bagi Direksi secara kolektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2018, sebagai berikut:

**KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

NAMA	USIA	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	KEAHLIAN
DEWAN KOMISARIS			
Hari Bowo	63 tahun	Akademi Angkatan Laut	Pertahanan dan Kemaritiman
Zainal Abidin	71 tahun	Akademi Angkatan Darat	Pertahanan dan Politik
Wahju Satrio Utomo	59 tahun	Hukum, Politik dan Manajemen Pendidikan	Hukum, Politik dan Manajemen Pendidikan
Heddy Lugito	58 tahun	Ilmu Budaya	Humaniora
Dedi Syarif Usaman	54 tahun	Ekonomi dan Akuntansi	Ekonomi dan Keuangan Negara
DEWAN DIREKSI			
Doso Agung	51 tahun	Manajemen	Hubungan Masyarakat dan Hukum
Putut Sri Muljanto	50 tahun	Manajemen	Pemasaran
Joko Norhudha	46 tahun	Teknik Sipil	Teknik
Toto Heli Yanto	54 tahun	Hukum Bisnis	Ekonomi dan Administrasi Bisnis
Iman Rachman	47 tahun	Ekonomi dan Keuangan	Ekonomi dan Keuangan
Toto Nugroho	52 tahun	Teknik Gas dan Kimia	Teknik Kimia dan Pengembangan Bisnis

PERNYATAAN PEMENUHAN ASPEK KEBERAGAMAN GENDER

Pada saat laporan tahunan ini dipublikasikan, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan terdiri dari 5 orang Dewan Komisaris dan 6 orang Direksi yang seluruhnya bergender laki-laki. Meski demikian, komposisi Dewan Komisaris pernah diduduki oleh orang-perorangan yang bergender Perempuan.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Dalam rangka membantu tugas Direksi, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama, yaitu sebagai *liaison officer (public relation/corporate communication), institution relations, GCG implementation, monitoring pencapaian Key Performance Indicator (KPI), monitoring pelaksanaan kegiatan PKBL, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi.*

KEDUDUKAN DAN KUALIFIKASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



FARUQ HIDAYAT
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 41 Tahun, Kelahiran Sumenep, 22 April 1976. Saat ini berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Muda Teknik Sipil (1996), Sarjana Teknik di bidang Teknik Sipil (2002) dan Magister Manajemen Teknologi (2012) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Memiliki riwayat karir sebagai Kepala Biro Perencanaan Strategi dan Kinerja Perusahaan (2016-2017), Senior Manager Bangunan Pelabuhan (2015-2016), Senior Manager Rancang Bangun (2013-2014), Senior Manajer Supervisi Investasi (2012-2013), Asisten Senior Manajer Supervisi Konstruksi Sipil (2011-2012), Asisten Senior Manajer Bangunan Sipil (2009), Senior Auditor Bidang Teknik, TI, Umum, CS dan Logistik (2009), Junior Auditor Bidang Teknik, TI, Umum, CS dan Logistik (2007-2009), Asisten Manajer Umum dan Teknik (2005-2007), Supervisor Bangunan Pelabuhan (2004-2005), dan sebagai Pelaksana Administrasi II (1999-2000)

DASAR PENGANGKATAN

Beliau diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pelindo III No. KEP.172/KP.0403/P.III-2017, 1 Mei 2017.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

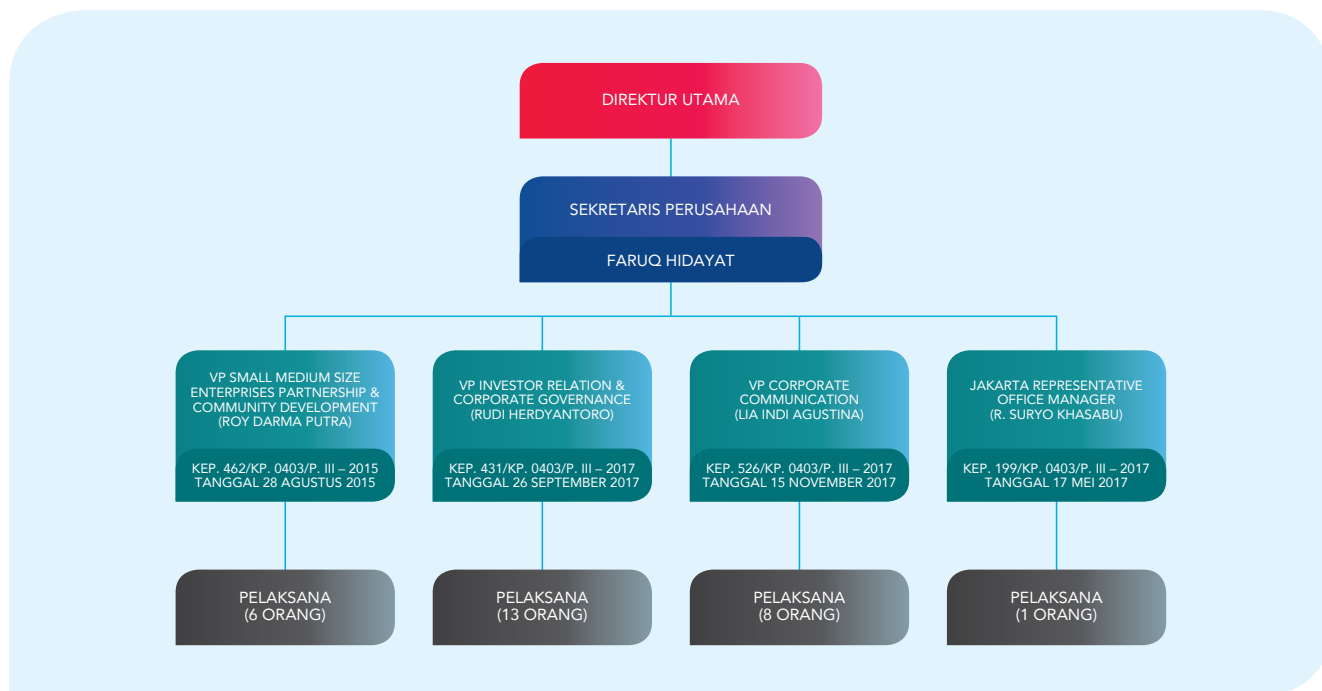
Organ Sekretaris Perusahaan dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi dengan No. PER.0078/OS.0101/HOFC-2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelindo III. Sekretaris Perusahaan memiliki misi untuk "Memastikan Meningkatnya Citra Perusahaan dan Terimplementasinya GCG melalui Pengelolaan Kegiatan Hubungan Masyarakat, Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta fungsi umum lainnya".

Sekretaris Perusahaan dikepalai oleh satu orang dengan didukung oleh 34 Personel dengan kualitas dan kompetensi yang telah memenuhi persyaratan dalam Job Profile Sekretaris Perusahaan dan terdiri dari fungsi-fungsi berikut:

1. Hubungan Masyarakat.
2. Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan.
3. Kemitraan dan Bina Lingkungan.
4. Fungsi Umum.



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian Kegiatan Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.
2. Penyusunan kegiatan dan evaluasi program fungsi Hubungan Masyarakat secara korporasi, termasuk publikasi dan pembentukan citra perusahaan antara lain melalui pengelolaan website, media sosial, Company Profile, penyelenggaraan hubungan investor, serta pembinaan administrasi kesekretariatan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk keprotokoliran Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penyusunan sistem dan prosedur kegiatan serta pembinaan teknis fungsi kehumasan secara korporasi termasuk publikasi dan pembentukan citra perusahaan, penerbitan annual report, penyelenggaraan hubungan investor dan tata kelola perusahaan.
4. Penyusunan rencana kebutuhan karyawan fungsi kehumasan secara korporasi pada setiap pelabuhan di setiap wilayah kerja Perusahaan termasuk rancangan pemenuhan standar kualifikasi karyawan sesuai peraturan yang berlaku untuk menunjang kegiatan Hubungan Masyarakat di wilayah kerja Perusahaan.
5. Pemantauan dan pengajuan usulan kepada manajemen maupun unit-unit lain terkait pelaksanaan fungsi kehumasan, hubungan kelembagaan dan kemitraan Bina Lingkungan di wilayah Perusahaan.
6. Sebagai juru bicara Perusahaan, memantau pelaksanaan Board Manual dan memantau kepatuhan korporat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

PROGRAM KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN 2018

Selama 2018, Sekretaris Perusahaan telah melakukan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan pembagian bidang dalam struktur organisasi meliputi:

FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT

Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penanganan dan pembinaan hubungan masyarakat (public relation), penanganan kegiatan yang berhubungan dengan Pemangku Kepentingan, hubungan kelembagaan, serta pencitraan Perusahaan.

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR DAN TATA KELOLA KORPORASI

Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, dan analisis tentang berbagai aspek terkait dengan kinerja Perusahaan, serta memastikan proses administrasi di Perusahaan sesuai dengan ketentuan GCG.

**FUNGSI KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

1. Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan penyusunan strategi dan program kemitraan dan bina lingkungan.
2. Analisis kelayakan untuk peminjaman kepada pihak masyarakat sekitar.
3. Penyaluran dana.
4. Memastikan pengembalian dan laporan kegiatan peminjaman tepat waktu.

FUNGSI UMUM

Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan kerumahtangaan dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, serta membantu fungsi hubungan investor khusus di Kantor Perwakilan.

KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN KOMUNIKASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Aktivitas komunikasi dan hubungan dengan para Pemangku Kepentingan yang dijalankan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

AKTIVITAS KOMUNIKASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

AKTIVITAS	FREKUENSI PELAKSANAAN
<i>Press Conference</i>	Empat kali pelaksanaan dengan rincian: • Pengenalan Home Terminal. • Pelaksanaan kegiatan program CSR operasi tumor mata, bekerja sama dengan Anak Perusahaan PT Pelindo Husada Citra. • Kinerja Triwulan III Perusahaan. • Pelaksanaan Charity Run dan Single Billing.
<i>Media Gathering</i>	Mengadakan Pertemuan dan Site Visit dengan Media Elektronik dan Cetak di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
<i>Media Visit</i>	• Kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia. • Kunjungan ke Kantor Harian Kompas.
RUPS	• 1 Kali RUPS RKAP • 1 Kali RUPS Tahunan
Pertemuan Serikat Pekerja	• 3 bulan sekali audiensi dengan manajemen. • 1 kali pembasahan tentang PKB.
<i>Analyst Meeting</i>	-

PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka menciptakan kualitas kinerja unggul, Sekretaris Perusahaan memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai media dalam melakukan pengukuran efektivitas dan ketercapaian target kinerja. Selain KPI, Sekretaris Perusahaan juga menjadi salah satu objek dalam asesmen GCG Perusahaan. Dengan adanya media pengukuran tersebut, kinerja Sekretaris Perusahaan akan senantiasa terpantau dan terevaluasi sehingga menciptakan kinerja keberlanjutan di masa depan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Di tahun 2018 Sekretaris Perusahaan tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal Pelindo III maupun dari pihak eksternal, sehingga data mengenai pendidikan dan pelatihan Sekretaris Perusahaan tidak dapat disajikan karena tidak terdapat kondisi dan data tersebut.



SATUAN PENGAWASAN INTERN

Keberadaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) berperan dalam memastikan seluruh proses bisnis, sistem, dan kinerja yang dijalankan Perusahaan baik organ, unit kerja, atau fungsi yang berada di dalamnya berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku yang berimplikasi bagi dukungan keberlanjutan usaha Perusahaan. Selain itu, keberadaan SPI juga berperan untuk mendukung peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola melalui evaluasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG.

SPI memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi, setia kepada Perusahaan, dan tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum, jujur, obyektif, dipercaya, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, bersikap independen, serta terus melakukan aktivitas pengawasan melalui kegiatan audit operasional yang dilakukan terhadap unit kerja di lingkungan Perusahaan. Aktivitas pengawasan meliputi proyek yang sedang dilaksanakan dengan memberikan rekomendasi perbaikan untuk tercapainya tujuan Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Perusahaan dilengkapi dengan organ SPI yang dilengkapi dengan Piagam Internal Audit dengan No. HK.04/18.1/P.III-2014, sebagai dasar dalam pelaksanaan tugasnya.

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Struktur Satuan Pengawasan Intern berada di bawah Direktur Utama dan sejajar dengan Sekretaris Perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERN

SPI Pelindo III dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern yang membawahi 4 orang Pengawas Bidang, dan masing-masing membawahi bagian-bagian berbeda seperti Pengawas Audit Bidang SDM, Umum dan Hukum, Pengawas Audit Bidang Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengawas Audit Bidang Operasi dan Pengembangan Bisnis, serta Pengawas Bidang Keuangan. Berikut adalah struktur dari organisasi SPI:

STRUKTUR ORGANISASI SPI





PENUNJUKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Sesuai dengan Piagam Internal Audit Perusahaan, kewenangan penunjukan Kepala SPI dilakukan oleh Direksi Perusahaan. Di tahun 2018, SPI Pelindo III di kepalai oleh Andriyuda Siahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal melalui Surat Keputusan Direksi Pelindo III No. 156/KP.0403/P.III-2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN



ANDRIYUDA SIAHAAN
Kepala Satuan Pengawasan
Intern

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, kelahiran Jakarta 3 September 1978. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang (2000) dan memperoleh banyak sertifikasi dari berbagai pendidikan non formal di bidang pemeriksaan keuangan. Berkarir di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan riwayat jabatan fungsional sebagai Pemeriksa Muda, Auditorat Utama Keuangan Negara VII (2012); Pemeriksa Pertama Auditorat Utama Keuangan Negara VII (2011) dan Auditor Ahli Pertama Perwakilan BPK-RI Jayapura (2007).

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SPI mengacu pada beberapa aturan yang berlaku antara lain:

PERATURAN DIREKSI

1. PER.78/HK.03/P.III-2017 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).
2. Piagam Kerja Unit Audit Internal No. HK.04/18.1/P.III-2014
3. PER.76/PW.08/P.III-2014 tentang Pedoman berbasis Risiko
4. PER.01.1/PW.01/P.III-2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Pelindo III
5. PER.30/HK.03/P.III-2015 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern.
6. Piagam Unit Audit Internal No. HK.04/18.1/P.III-2014.

PEDOMAN KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pola Organisasi dan Pedoman Kerja bagi SPI diatur dalam Piagam Internal Audit yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.04/18.1/P.III-2014 pada tanggal 8 Oktober 2014. Piagam Internal Audit berisi ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin hasil pemeriksaan yang bermutu agar SPI dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik. Piagam Internal Audit dipublikasikan ke seluruh Unit Kerja guna menjalin kerja sama yang baik dalam mewujudkan tujuan Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan SPI yaitu memberikan layanan jasa penjaminan dan konsultasi yang objektif melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas proses manajemen risiko dan memberikan masukan efektivitas pengendalian intern dalam rangka membantu Direksi untuk mencapai tujuan Perusahaan antara lain melalui:

1. Audit secara berkala pada setiap obyek pengawasan di bidang Pemasaran, dan Pengembangan Usaha, Operasi, Teknik, Keuangan, Personalia dan Umum, maupun bidang lainnya;
2. Pengujian dan penilaian atas hasil laporan rutin maupun laporan tidak rutin setiap obyek pengawasan;
3. Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh obyek pengawasan;
4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan Sistem Pengendalian Intern.

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALIFIKASI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Hingga 31 Desember 2018, jumlah SDM SPI adalah 25 orang dengan komposisi sebagai berikut:



JUMLAH DAN KUALIFIKASI SPI

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	Andriyudha Siahaan	Kepala Satuan Pengawasan Intern	1
2.	M. Taufik Hardjanto	Pengawas Audit Bidang Operasional dan Pengembangan Bisnis	6
	a. Rachmanto	Auditor Madya	
	b. Donny Simon MH	Auditor Madya	
	c. Abdis Shaumi	Auditor Muda	
	d. Krisnawan Eko Arani	Auditor Muda	
	e. Saimin	Auditor Muda	
3.	Heka Pambudi	Pengawas Audit Bidang Keuangan	5
	a. Dedy Agoes S	Auditor Utama	
	b. Taufiq Arif Fauzi	Auditor Utama	
	c. Rony Hendra S	Auditor Muda	
	d. Doddy Irawan	Auditor Muda	
4.	Anton Laksmi	Pengawas Audit	5
	a. Agus Purnomo	Auditor Utama	
	b. Dian Irawati	Auditor Utama	
	c. Triana Usman	Auditor Madya	
	d. Arendra P	Auditor Muda	
5.	Fernandes A. Ginting	Pengawas Audit Bidang SDM, Hukum, dan Umum	6
	a. Pramudito	Auditor Utama	
	b. Firmansyah NQ	Auditor Madya	
	c. Syaiful Anam	Auditor Muda	
	d. Henny Nur Aini	Auditor Pertama	
	e. Jufrianto Siahaan	Auditor Pertama	
5.	Purwani T	Supervisor Administrasi dan Evaluasi SPI	1
6.	Nugroho	Staf Administrasi	1



SERTIFIKASI DAN PELATIHAN PROFESI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada SPI Perusahaan, selama tahun buku 2018 SPI telah memberikan kesempatan kepada seluruh pegawainya untuk mengikuti kegiatan sertifikasi maupun pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh SDM SPI di tahun 2018, yaitu:

PELATIHAN SPI

NO.	NAMA PROGRAM	TANGGAL	TEMPAT	PENYELENGGARA	PESERTA
1.	Seminar FKSPI Jatim	31 Januari - 2 Februari 2018	Malang	FKSPI Jatim	1. Andriyuda S. 2. Firmansyah NQ 3. Purwani T.
2.	Dasar-dasar Audit	5 - 15 Maret 2018	Sukabumi	PPA&K	1. Donny Simon M.H. 2. Arendra H. Prabowo 3. Rony Hendra Siagian
		15 - 25 April 2018	Malang	PPA&K	1. Syaiful Anam
		9 - 19 Juli 2018	Sukabumi	PPA&K	1. Anton Laksmi 2. F. Ginting 3. Krisnawan 4. Saimin 5. Doddy Irawan 6. Henny Nur Aini 7. Jufrianto Siahaan
3.	Kompetensi SPI (Inhouse Training)	12 - 13 April 2018	Surabaya	Bpk. Randy	Seluruh SPI
4.	Seminar Auditor Talk Ramadhan	7 Juni 2018	Jakarta	IAI	1. Andriyuda Siahaan 2. Anton Laksmi
5.	Konferensi FKSPI	8 - 10 Agustus 2018	Solo	FKSPI	1. Andriyuda Siahaan 2. Anton Laksmi 3. Fernandes A. Ginting
6.	Penyusunan Feasibility Study (Inhouse Training)	29 - 31 Agustus 2018	Surabaya	Unair	Seluruh SPI
7.	Workshop FKSPI (Probity Audit Pengadaan Barang & Jasa)	31 Oktober 2018	Surabaya	FKSPI	1. Dian Irawati 2. Syaiful Anam
8.	Komunikasi dan Psikologi Audit	2 - 10 Desember 2018	Malang	FKSPI	1. Rony Hendra Siagian 2. Syaiful Anam 3. Doddy Irawan
9.	Seminar Fraud Diamond	20 Desember 2018	Jakarta	Awesome Consulting (Lim Kurniawan)	1. Taufiq Arif F. 2. Firmansyah NQ



REALISASI PROGRAM KERJA AUDIT 2018

Program kerja Audit Tahunan SPI tahun 2018 meliputi:

1. Audit Terpadu
2. Audit Tematik
3. Review

Di tahun 2018, SPI telah melaksanakan program Audit meliputi Audit Terpadu, Audit Tematik Properti, Investasi dan Pemeliharaan, serta Audit terpadu Kantor Pusat serta review pengelolaan investasi waktu yang diperlukan adalah selama 192 hari. Sisa hari kerja digunakan untuk pembuatan laporan kegiatan pengembangan kompetensi serta sebagai counterpart/pendampingan pemeriksaan BPK dan KAP selama bulan Januari-Februari dan November-Desember.

PELAKSANAAN AUDIT SPI 2018

NO	UNIT KERJA	PROGRAM KERJA 2018			REALISASI		
		JUMLAH AUDITOR	HARI AUDIT	LAPORAN	JUMLAH AUDITOR	HARI AUDIT	LAPORAN REPORT
1.	Maumere	4	12	1	4	12	1
2.	Celukan Bawang	4	7	1	4	6	1
3.	Bima Badas	7	10	1	7	12	1
4.	Probolinggo	5	10	1	4	6	1
5.	Banjarmasin	6	17	1	6	17	1
6.	TPKS	5	20	1	5	19	1
7.	Tanjung Emas	6	20	1	6	20	1
8.	Kantor Pusat - Teknik	17	60		17	59	
9.	Kantor Pusat - Properti	10	60		10	63	
10.	Kantor Pusat - Human Capital	9	60		9	77	



AKUNTAN PUBLIK

Auditor Eksternal adalah pihak independen dan profesional yang melakukan audit keuangan dan audit lainnya seperti audit operasional, audit khusus, audit mutu, audit investigasi dan audit teknologi informasi. Untuk menjaga independensinya, maka:

1. Auditor Eksternal melaporkan hasil auditnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemangku Kepentingan Perusahaan.
3. Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit.

4. Auditor Eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang materil baik langsung maupun tidak langsung dan hubungan bisnis dengan Perusahaan.

Pada tahun 2018, Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro & Surja) ditunjuk untuk melakukan audit untuk Laporan Keuangan dan PKBL periode 1 Januari hingga 31 Desember 2018. Tugas yang diberikan mencakup ruang lingkup audit laporan keuangan, kepatuhan, penilaian kinerja usaha dan PKBL, serta evaluasi status tindak lanjut atas keputusan dan arahan RUPS. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit berikut nilai jasa, ruang lingkup pekerjaan audit dan hasilnya pada tahun 2013-2018.

AKUNTAN PUBLIK 2014-2018

TAHUN	KAP	AUDITOR	NILAI JASA	RUANG LINGKUP JASA	OPINI AUDITOR
2018	Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro & Surja)	Muhammad Kurniawan	Rp3.060.000.000	a. Melaksanakan pemeriksaan Umum/General Audit (dengan pelaksanaan interim dan akhir tahun) atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pelindo III Per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada pengujian efektivitas atas sistem pengendalian internal dan sistem teknologi informasi yang berdampak terhadap laporan keuangan. b. Melaksanakan audit atas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). c. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Laporan Penilaian KPI. d. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. e. Melaksanakan penugasan prosedur yang disepakati atas pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian, dalam pengelolaan hutang luar negeri sebagaimana diatur dalam PBI No. 16/22/PBI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.	Wajar dalam semua hal yang material
2017	RSM AAJ (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	Benny Andria	Rp1.248.500.000	Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan PKBL, serta peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.	Wajar dalam semua hal yang material
2016	RSM AAJ (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	Endang Pramuwati	Rp1.349.975.000	Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan PKBL.	Wajar dalam semua hal yang material
2015	RSM AAJ (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	Endang Pramuwati	Rp1.298.000.000	Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan PKBL.	Wajar dalam semua hal yang material
2014	RSM AAJ (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	Leknor Joni	Rp850.000.000	Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan PKBL.	Wajar dalam semua hal yang material



SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang terintegrasi dan melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi/Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin adanya keamanan atas pengelolaan harta Perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pelindo III mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.30/HK.03/P.III-2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pelindo III.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasi keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat:

1. Menjaga dan mengamankan aset Perusahaan;
2. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan;
3. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu;
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dalam kegiatan operasional Perusahaan;
6. Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada Organisasi secara menyeluruh.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL (COSO)

Infrastruktur dan soft structure Sistem Pengendalian Intern di Perusahaan juga disesuaikan pada kerangka pengendalian yang berlaku secara internasional atau mengikuti kerangka yang dipublikasikan oleh COSO (Committee of Sponsoring Organization The Treadway Commission). Penyesuaian ini ditujukan untuk memberikan peningkatan kualitas pengendalian di internal Perusahaan serta terbentuknya pengakuan secara luas terhadap sistem pengendalian yang diterapkan Perusahaan.

Sistem Pengendalian Intern yang dirancang, ditetapkan dan diterapkan pada Perusahaan terdiri dari 5 unsur pengendalian yaitu:

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Pembentukan lingkungan organisasi serta memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian intern bagi Perusahaan. Perlunya hirarki pengendalian internal yang terstruktur sehingga tercipta integritas, komitmen, dan partisipasi seluruh organ Perusahaan.

PENILAIAN RISIKO

Kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat Perusahaan dalam mencapai tujuannya.

KEGIATAN PENGENDALIAN

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan berupa kebijakan dan sistem operasi dan prosedur guna meyakinkan stakeholder bahwa Perusahaan telah menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan sebagaimana mestinya.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam proses pengambilan keputusan penyampaian Laporan Keuangan dan Annual Report Perusahaan telah berupaya untuk menciptakan sistem informasi yang didasarkan pada kebijakan yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Proses informasi dan komunikasi tersebut meliputi: memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi suatu entitas di Perusahaan serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait.

PEMANTAUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Perusahaan terus berupaya untuk melakukan penilaian yang berkelanjutan dan periodik dalam pelaksanaan pengendalian internal serta melakukan reviu dan perubahan sesuai dengan kondisi atau hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern yang ada.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menggunakan metode review berkala setiap 2 tahun sekali dan/atau terdapat perubahan perundangan yang berlaku.



PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2018

LAPORAN PENGENDALIAN PERUSAHAAN

Berdasarkan hasil pengawasan SPI atas bisnis proses yang berlangsung di Pelindo III melalui Audit Terpadu yang rutin dilakukan pada seluruh Region dan Audit Tematik atas Pengelolaan Properti dan Pengelolaan Investasi Tahap awal menunjukkan bahwa Manajemen telah melakukan langkah-langkah Pengendalian Internal secara baik namun belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam Evaluasi Tahunan SPI atas Pengendalian Perusahaan Tahun 2018 dengan pendekatan COSO yang ditunjukkan sebagai berikut:

1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Internal Control (IC) di seluruh organisasi.

2. PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola

3. AKTIVITAS PENGENDALIAN

Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab IC nya dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan IC sehari-hari.

5. AKTIVITAS PENGAWASAN

Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen IC ada dan berfungsi.





MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.11/PS.0503/P.III-2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Kebijakan dan Sistem Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan Pelindo III. Penerapan Manajemen Risiko setelah tahun 2007 terus dikembangkan untuk dapat melingkupi dan dilaksanakan di seluruh area kerja yang berada di Perusahaan dengan landasan penerapannya mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN;
2. Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.15.1/PM.02/P.III-2010 Tanggal 3 Desember 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan Pelindo III;
3. Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.21.1/IS.02/P.III-2013 Tanggal 6 Mei 2013 tentang Pedoman Perencanaan Proyek Investasi di Lingkungan Pelindo III.

KERANGKA DAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Mulai tahun 2017, Perusahaan melakukan pembenahan dan perubahan besar dalam hal penerapan sistem Manajemen Risiko. Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko dan GCG serta Komite Audit secara aktif mendorong dan mendukung jajaran Direksi Perusahaan untuk meningkatkan peran dan fungsi Manajemen Risiko dalam mendukung tercapainya tujuan Perusahaan. Hal ini menjadi perhatian Direksi Perusahaan untuk terus berupaya meningkatkan implementasi proses Manajemen Risiko sehingga budaya sadar risiko dapat dilaksanakan oleh seluruh Insan Pelindo III di setiap aktivitas yang ada dalam rencana kerja maupun proses bisnis Perusahaan. Perusahaan telah melakukan pembaruan kebijakan dan pedoman teknis Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan melalui:

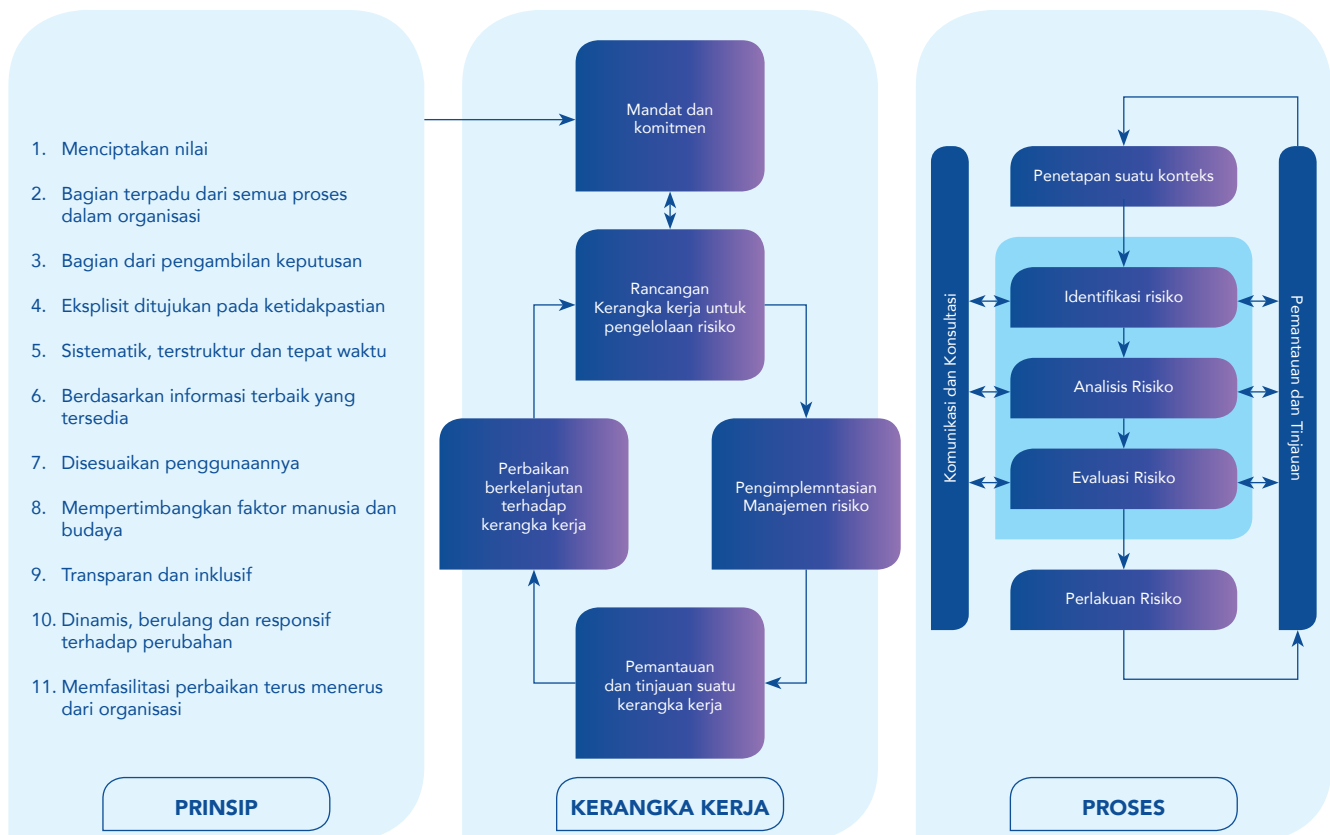
1. Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.71/PM.02/P.III-2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan. Peraturan dimaksud menggantikan Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.11/PS.0503/P.III-2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Kebijakan dan Sistem Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan Pelindo III;
2. Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.89/PR.02/P.III-2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko di Lingkungan Pelindo III. Peraturan dimaksud menggantikan Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.15.1/PM.02/P.III-2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan Pelindo III.

Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis Manajemen Risiko pada tahun 2018 telah menggunakan pendekatan/acuan ISO 31000:2009 atau dalam Standar Nasional Indonesia yaitu SNI ISO 31000:2011 Manajemen Risiko - Prinsip dan pedoman. Seri 3 standar lainnya terkait SNI ISO 31000:2011 yang juga digunakan sebagai pendekatan/acuan yaitu:

1. ISO Guide 73:2009 (diadopsi menjadi SNI ISO 73:2016 Manajemen Risiko - Kosakata);
2. ISO/TR 31004:2013 (diadopsi menjadi SNI ISO/TR 31004:2016 Manajemen Risiko - Panduan untuk implementasi SNI ISO 31000);
3. ISO/IEC 31010:2009 (diadopsi menjadi SNI ISO 31010:2016 Manajemen Risiko - Teknik penilaian risiko). Gambaran prinsip, kerangka kerja, dan proses Manajemen Risiko yang digunakan oleh Perusahaan berdasarkan standar praktik terbaik (best practice) Manajemen Risiko ISO 31000 adalah sebagai berikut:



KERANGKA DAN PROSES MANAJEMEN RISIKO



Manajemen Risiko yang dikembangkan harus senantiasa sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Perusahaan. Seluruh pegawai berkewajiban menerapkan standar perilaku yang sesuai dalam pengembangan strategi dan pencapaian target. Oleh karena itu, diberlakukan prinsip-prinsip Manajemen Risiko Perusahaan sebagai berikut:

1. MANAJEMEN RISIKO MEMBERIKAN NILAI TAMBAH DAN MELINDUNGI NILAI PERUSAHAAN

Manajemen Risiko harus dapat meningkatkan kapabilitas Perusahaan dalam menyerap risiko agar Perusahaan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada di masa sekarang dan yang dapat muncul di masa depan (memberikan nilai tambah bagi Perusahaan). Selain itu, Manajemen Risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko berdampak buruk yang dapat membahayakan pencapaian sasaran Perusahaan (melindungi nilai Perusahaan);

2. MANAJEMEN RISIKO ADALAH BAGIAN TERPADU DARI SELURUH PROSES

Manajemen Risiko harus melekat pada seluruh proses Perusahaan karena setiap proses Perusahaan menghadapi risiko yang dapat menyebabkan sasaran proses tersebut tidak tercapai. Prinsip ini juga secara implisit menyatakan bahwa Manajemen Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab top management dari perusahaan, tetapi seluruh bagian dari Perusahaan;

3. MANAJEMEN RISIKO ADALAH BAGIAN DARI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Harus diingat bahwa setiap alternatif keputusan mengandung risiko tersendiri. Untuk itu dalam memilih alternatif keputusan, Perusahaan harus mempertimbangkan unsur risiko dari setiap alternatif, ketersediaan sumber daya perusahaan, serta kapabilitas dan toleransi Perusahaan dalam menyerap risiko;

4. MANAJEMEN RISIKO SECARA KHUSUS MENANGANI KETIDAKPASTIAN

Setiap perusahaan tentu menghadapi ketidakpastian dalam perjalanannya mencapai sasaran mereka. Manajemen Risiko membantu mengurangi aspek ketidakpastian dengan memberi ukuran (parameter) terhadap konsekuensi dari risiko. Parameter ini menunjukkan eksposur Perusahaan terhadap risiko tersebut, yang nantinya akan menentukan penanganan risiko. Penanganan risiko diharapkan dapat membantu Perusahaan mereduksi eksposur risiko dan ketidakpastian yang dihadapi Perusahaan;

5. MANAJEMEN RISIKO BERSIFAT SISTEMATIK, TERSTRUKTUR DAN TEPAT WAKTU

Manajemen Risiko harus dijalankan secara konsisten dan terintegrasi pada seluruh perusahaan. Pembentukan risk governance yang memperjelas kewenangan, peran, dan tanggung jawab dari setiap unit Perusahaan berkaitan dengan Manajemen Risiko juga diperlukan untuk mendukung efektivitas Manajemen Risiko;

**6. MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN PADA INFORMASI TERBAIK YANG TERSEDIA**

Penerapan Manajemen Risiko harus didukung dengan informasi terbaik yang dapat diperoleh Perusahaan. Informasi terbaik terdiri dari 3 aspek, yaitu relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Untuk mendukung perolehan informasi terbaik, perusahaan dapat melakukan proses dokumentasi dan membentuk database informasi (misalnya membuat risk register). Tanpa adanya informasi terbaik, penerapan Manajemen Risiko dapat menjadi tidak tepat sasaran;

7. MANAJEMEN RISIKO DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PERUSAHAAN

Setiap individu, unit kerja, dan Perusahaan tentu memiliki karakteristik tersendiri dan menghadapi risiko yang berbeda-beda. Setiap pemangku risiko tidak dapat hanya mengikuti sistem Manajemen Risiko yang dibentuk oleh unit atau perusahaan lain, tapi harus menyesuaikan dengan keadaan dan risiko yang dihadapinya;

8. MANAJEMEN RISIKO MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR MANUSIA DAN BUDAYA

Penerapan Manajemen Risiko harus mempertimbangkan kultur, persepsi, dan kapabilitas manusia, termasuk memperhitungkan perselisihan kepentingan antara Perusahaan dengan individu di dalamnya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh sumber daya insani dari Perusahaan;

9. MANAJEMEN RISIKO BERSIFAT TRANSPARAN DAN INKLUSIF

Penerapan dan informasi mengenai Manajemen Risiko harus melibatkan seluruh bagian Perusahaan. Keberadaan suatu risiko juga tidak boleh disembunyikan atau dilebih-lebihkan;

10. MANAJEMEN RISIKO BERSIFAT DINAMIS, BERULANG DAN RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN

Manajemen Risiko harus diimplementasikan secara konsisten dan berulang, serta harus dapat memfasilitasi perubahan pada sisi internal dan eksternal perusahaan. Proses monitoring dan review menjadi aktivitas kunci dalam mendeteksi perubahan dan memfasilitasi penyesuaian pada Manajemen Risiko;

11. MANAJEMEN RISIKO HARUS MEMFASILITASI PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN DAN PENINGKATAN PERUSAHAAN

Keberadaan Manajemen Risiko harus diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan konteks internal dan eksternal Perusahaan. Perbaikan berkelanjutan ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang signifikan pada Perusahaan.

Kerangka kerja Manajemen Risiko bertujuan untuk memastikan bahwa informasi risiko telah lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses Manajemen Risiko serta dilaporkan dan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Kerangka kerja Manajemen Risiko di Perusahaan terdiri dari:

1. MANDAT DAN KOMITMEN

Untuk melaksanakan Manajemen Risiko yang efektif, maka manajemen melakukan hal sebagai berikut:

- Mensosialisasikan akan pentingnya Manajemen Risiko bagi Perusahaan;
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan;
- Memastikan bahwa sasaran Manajemen Risiko selaras dengan strategi dan sasaran Perusahaan;
- Menetapkan indikator kinerja Manajemen Risiko yang selaras dengan indikator kinerja Perusahaan;
- Menugaskan secara jelas;
- Memastikan bahwa alokasi sumber daya telah tersedia dan cukup untuk penerapan Manajemen Risiko Perusahaan;
- Mengkomunikasikan manfaat penerapan Manajemen Risiko ke seluruh stakeholder terkait;
- Memastikan bahwa kerangka kerja Manajemen Risiko tetap sesuai dengan perkembangan Perusahaan.

2. PERENCANAAN KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Dalam merencanakan kerangka kerja Manajemen Risiko, manajemen memperhatikan hal sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap kondisi dan sifat Perusahaan serta bagaimana konteks internal maupun eksternalnya. Hal ini sangat penting karena bertujuan untuk menentukan bentuk rencana dari kerangka kerja tersebut;
- Menyusun kebijakan Manajemen Risiko yang secara jelas menyatakan komitmen Direksi terhadap penerapan Manajemen Risiko;
- Mengintegrasikan proses Manajemen Risiko menjadi bagian dari seluruh aktivitas bisnis Perusahaan. Proses Manajemen Risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis dan proses manajemen perubahan;
- Direksi harus menetapkan secara jelas akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaan Manajemen Risiko. Termasuk dalam tugas ini adalah penerapan, pemeliharaan, pengembangan proses Manajemen Risiko dan memastikan kecukupan tingkat pengendalian risiko;
- Pemenuhan sumber daya yang memadai untuk penerapan Manajemen Risiko baik secara sumber daya manusia (SDM), proses, prosedur, sistem dan sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan Manajemen Risiko;
- Penyusunan mekanisme pelaporan dan komunikasi internal yang diperlukan untuk memastikan berjalannya komunikasi antara pihak terkait, tersedianya laporan efektivitas kerangka Manajemen Risiko dan hasilnya, kecukupan informasi hasil penerapan Manajemen Risiko dan berjalannya proses konsultasi dengan para Pemangku Kepentingan internal;



- g. Penyusunan mekanisme pelaporan dan komunikasi eksternal stakeholder yang diperlukan untuk memastikan adanya proses komunikasi yang efektif, pelaporan sesuai dengan kepatuhan hukum dan tata kelola Perusahaan, informasi yang disajikan sesuai dengan perundangan yang berlaku, adanya umpan balik terhadap proses komunikasi dan konsultasi, adanya peningkatan kepercayaan kepada Perusahaan dan adanya komunikasi dengan seluruh Pemangku Kepentingan terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat.

3. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam menerapkan Manajemen Risiko, manajemen memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan kebijakan Manajemen Risiko dan proses Manajemen Risiko pada aktivitas bisnis Perusahaan;
- b. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses Manajemen Risiko;
- d. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Manajemen Risiko;
- e. Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para stakeholder untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

4. PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN ULANG

Untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko diterapkan dengan efektif dan menunjang kinerja Perusahaan, maka manajemen:

- a. Menetapkan ukuran kinerja;
- b. Mengukur tingkat penerapan Manajemen Risiko secara berkala;
- c. Melakukan tinjauan ulang atas kesesuaian antara kerangka kerja Manajemen Risiko, kebijakan Manajemen Risiko, rencana penerapan Manajemen Risiko dengan konteks internal dan eksternal;
- d. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko;
- e. Melakukan tindak lanjut atas laporan dan hasil kaji ulang;
- f. Memantau efektivitas kerangka kerja Manajemen Risiko.

5. PERBAIKAN KERANGKA KERJA SECARA BERKELANJUTAN

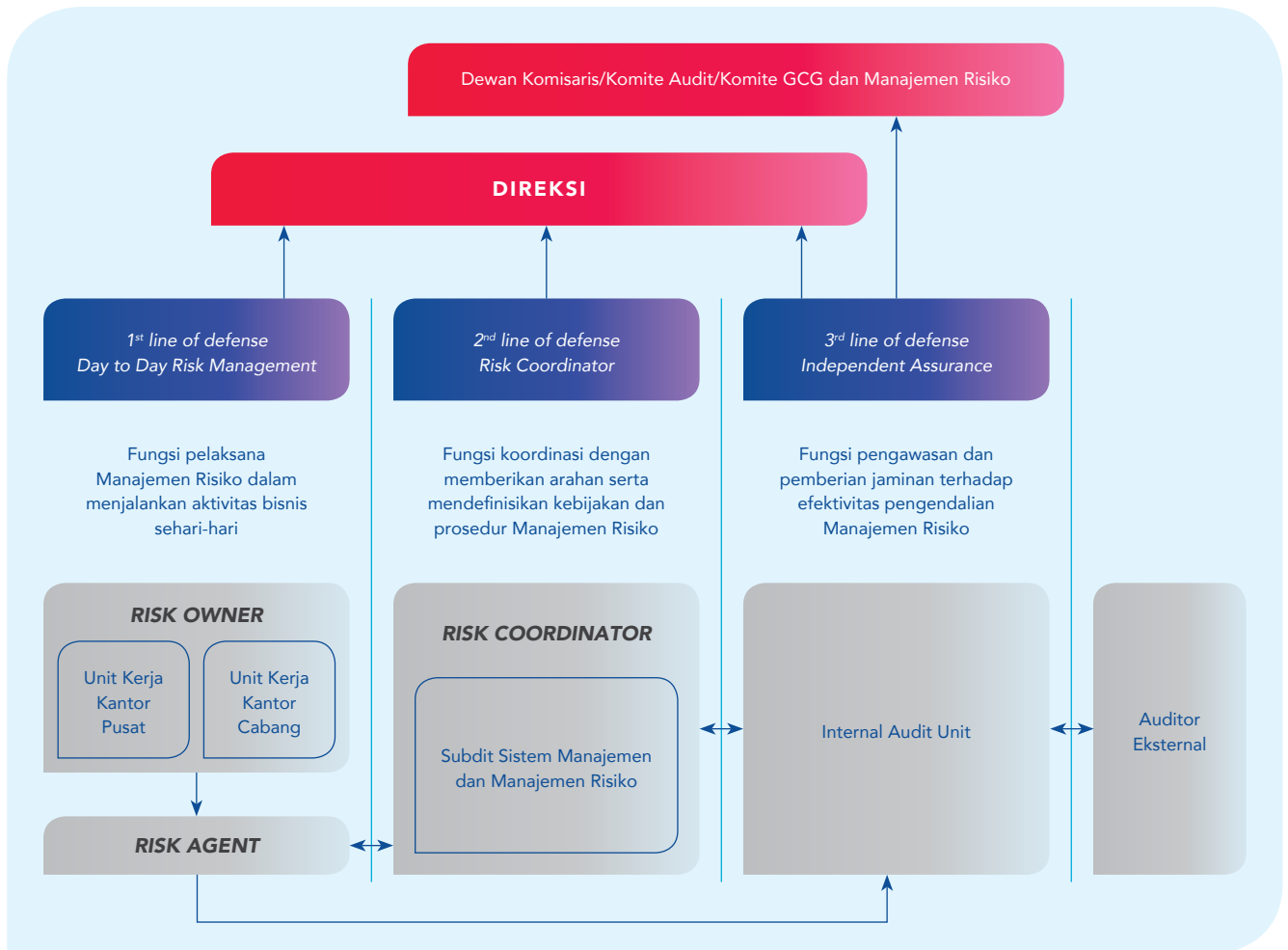
Perbaikan atas kerangka kerja secara berkelanjutan sangat diperlukan sebagai bagian dari proses peningkatan kerangka kerja Manajemen Risiko, kebijakan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko. Peninjauan ulang dan perbaikan kerangka kerja harus 2 tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Perusahaan menggunakan model pertahanan 3 lapis untuk membangun akuntabilitas Manajemen Risiko di seluruh jajaran organisasi. Model pertahanan 3 lapis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pertahanan lapis pertama berperan sebagai fungsi pelaksana dilaksanakan oleh setiap unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang sebagai pemilik proses bisnis sekaligus sebagai pemilik risiko (risk owner) dan dibantu oleh agen risiko (risk agent) yang melakukan pengelolaan risiko dalam menjalankan aktivitas operasional bisnis sehari-hari;
2. Pertahanan lapis kedua berperan sebagai fungsi koordinasi dilaksanakan oleh Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko sebagai koordinator risiko yang memberikan fungsi koordinatif dan konsultatif dengan menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh di lingkungan Perusahaan. Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko, Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko harus independen terhadap unit kerja struktural selaku pemilik risiko (risk owner) dan Internal Audit yang melaksanakan fungsi pengawas internal;
3. Pertahanan lapis ketiga berperan sebagai fungsi pengawas dilaksanakan oleh Internal Audit yang memberikan fungsi jaminan terhadap control Manajemen Risiko serta melakukan fungsi pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko.



STRUKTUR AKUNTABILITAS MANAJEMEN RISIKO



Pembaruan kebijakan dan pedoman teknis berlanjut dengan dilakukannya perbaikan terhadap proses Manajemen Risiko. Perbaikan prosedur dan detail aktivitas yang dilakukan pada tahun 2017 menjadi tantangan bagi manajemen untuk merealisasikannya secara terintegrasi pada tahun-tahun selanjutnya. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis dalam mengelola risiko, baik secara rutin/berkala maupun sewaktu-waktu sehingga dapat disesuaikan dan diperbaharui apabila diperlukan. Proses Manajemen Risiko menggunakan metode Risk & Control Self-Assessment/RCSA) dimana bentuknya dapat terlihat dari adanya peran aktif Risk Owner yang menjalankan proses Manajemen Risiko. Serangkaian kegiatan yang dilakukan di Perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

Input proses dapat berupa arahan kebijakan Manajemen Risiko. Output proses dapat berupa dokumentasi komunikasi dan konsultasi (salah satunya dalam bentuk Minute of Meeting) dan rangkuman kendala dalam implementasi Manajemen Risiko beserta rencana tindak lanjutnya. Rincian Prosedur:

A. MENGAWASI DAN MEMBERI INSTRUKSI TERKAIT MANAJEMEN RISIKO

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko memberikan fasilitas dan konsultasi terhadap semua elemen organisasi bila terdapat kendala didalam implementasi Manajemen Risiko di lingkungan kerjanya. Dalam praktiknya, Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko akan berkoordinasi dengan Risk Agent sebagai pihak yang membantu Risk Owner dalam menerapkan Manajemen Risiko;

B. MEMFASILITASI DAN MEMBANTU MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO HINGGA PROSES MITIGASI

Risk Agent merupakan koordinator antara Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko dengan Risk Owner dan bertugas untuk membantu Risk Owner melaksanakan proses Manajemen Risiko, mulai dari penetapan sasaran proses bisnis hingga perlakuan risiko. Risk Agent akan berkoordinasi langsung dengan Unit Kerja Manajemen pada setiap proses Manajemen Risiko yang menjadi tanggung jawab Risk Owner. Oleh karena itu, Risk Agent wajib



memahami metodologi dan proses bisnis Manajemen Risiko, serta memiliki pemahaman dan pengetahuan terkini atas kondisi dan proses bisnis Risk Owner;

C. MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO

Hingga proses mitigasi Risk Owner dibantu oleh Risk Agent melakukan penilaian risiko, dimulai dengan menetapkan sasaran proses bisnis agar sesuai dengan sasaran/strategi korporat hingga tindakan mitigasi risiko;

D. MENGUNGKAPKAN KENDALA PROSES MANAJEMEN RISIKO

Risk Owner secara proaktif mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi pada setiap tahapan proses Manajemen Risiko dan menyampaikan perkembangan lanjutannya kepada Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko melalui Risk Agent;

E. MEMBERI SOLUSI DAN MELAPORKAN KONDISI TERKINI PROSES MANAJEMEN RISIKO

Peran Risk Agent sangat penting dalam mengidentifikasi solusi atas kendala terkait teknik dan proses Manajemen Risiko yang dihadapi Risk Owner, serta menjaga alur koordinasi dengan Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko bila diperlukan eskalasi atas penanganan kendala tersebut. Selain itu Risk Agent juga bertugas melaporkan kelemahan dalam teknik dan proses Manajemen Risiko yang mungkin diidentifikasi Risk Agent kepada Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko ;

F. MENERIMA LAPORAN DAN KONSULTASI BILA DIPERLUKAN

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan yang dilaporkan oleh Risk Owner dan Risk Agent serta memberikan pemahaman dan solusi atas kendala terkait teknik dan proses Manajemen Risiko. Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko juga dapat memanfaatkan pihak internal Perusahaan seperti Komite GCG dan Manajemen Risiko dan eksternal perusahaan seperti Subject Matter Expert sesuai bidang permasalahan yang dikuasainya dalam memecahkan permasalahan terkait risiko. Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk melaporkan profil risiko utama dan status penanganan risiko secara berkala kepada Direksi.

G. MEMBERI REKOMENDASI PERBAIKAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Manajemen Risiko melakukan pengawasan dan memberi rekomendasi perbaikan proses Manajemen Risiko kepada Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko agar proses lebih efektif dan efisien;

H. MELAPORKAN ISU-ISU PROSES MANAJEMEN RISIKO

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk melaporkan kendala dalam implementasi Manajemen Risiko, termasuk rencana tindak lanjutnya, kepada Direksi yang terkait. Contohnya kendala terkait pemahaman atas metodologi Manajemen Risiko serta konsistensi kualitas pengisian Risk Register;

I. MEMBAHAS ISU PROSES MANAJEMEN RISIKO

Direksi akan membahas kendala dalam implementasi Manajemen Risiko yang dilaporkan oleh Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko , termasuk tindak lanjut yang akan diambil. Hasil pembahasan akan disosialisasikan kepada seluruh elemen Manajemen Risiko yang terkait.

2. PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Input proses dapat berupa Visi dan Misi Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan dokumen analisis kondisi lingkungan. Output proses dapat berupa kriteria risiko. Rincian Prosedur:

A. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko melakukan koordinasi mengenai usulan konteks dalam proses Manajemen Risiko;

B. MEMBAHAS USULAN PENETAPAN KONTEKS

Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan, Keuangan dan Tresuri Perusahaan, dan Sekretaris Perusahaan melakukan diskusi dengan Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko mengenai usulan konteks;

C. MENETAPKAN KONTEKS

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko melakukan penetapan konteks internal, konteks eksternal, konteks Manajemen Risiko, kriteria risiko berdasarkan data-data pendukung yang telah diperoleh dari hasil diskusi dengan pihak terkait yang terdiri dari:

- Konteks internal meliputi people, process, teknologi;
- Konteks eksternal meliputi lingkungan makro (ekonomi, politik, alam dan lingkungan, serta human threat) dan lingkungan industri (kompetitor, konsumen/pengguna jasa, dan mitra kerja/vendor);
- Konteks Manajemen Risiko untuk mendefinisikan bagaimana Manajemen Risiko diberlakukan dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan di masa yang akan datang yang mana mencakup tujuan dan sasaran dari kegiatan Manajemen Risiko, tanggung jawab untuk dan dalam



proses Manajemen Risiko, ruang lingkup serta kedalaman dan keluasan dari aktivitas Manajemen Risiko yang akan diselenggarakan termasuk penyertaan dan pengecualian yang spesifik, kegiatan-proses-fungsi-proyek atau aktivitas tertentu dengan proyek-proses atau aktivitas lain dari Perusahaan, metodologi penilaian risiko, cara kinerja dan efektivitas Manajemen Risiko dievaluasi, keputusan-keputusan yang sebaiknya diambil, pengidentifikasian, pelingkupan ataupun pengerangkaan studi yang diperlukan, cakupan dan sasarannya, serta sumber daya yang diperlukan untuk melakukan studi tersebut;

- Kriteria risiko untuk mengevaluasi signifikansi risiko yang terdiri dari sifat, jenis penyebab, konsekuensi yang dapat terjadi dan bagaimana hal tersebut akan diukur, kerangka waktu dari kemungkinan-kejadian dan/atau konsekuensinya, serta tingkat risiko yang dapat diterima atau dapat ditolerir.

D. MEMBERI SARAN DAN MENETAPKAN KONTEKS

Direksi memberi masukan terhadap konteks yang telah dirumuskan oleh Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko agar sesuai dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai.

3. PENETAPAN RISK APPETITE DAN RISK TOLERANCE

Input proses dapat berupa visi dan misi Perusahaan, dan data histori mengenai keterlibatan para Pemegang Saham, pelanggan, mitra kerja, pegawai, dan masyarakat. Output proses dapat berupa Risk Appetite dan Risk Tolerance yang telah ditetapkan. Rincian Prosedur:

A. MENGANALISIS DATA UNTUK RISK APPETITE STATEMENT DAN RISK TOLERANCE

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko menganalisis data historis pada risk/loss event database untuk mengetahui besarnya konsekuensi atas risiko-risiko yang telah terjadi. Dalam penentuan risk appetite dan risk tolerance Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko harus menyeimbangkan antara tujuan strategis Perusahaan dengan masukan dari setiap Direktur Bidang.

B. MEMBAHAS DAN MEMBERI MASUKAN TERKAIT RISK APPETITE STATEMENT DAN RISK TOLERANCE

Direksi melakukan pembahasan risk appetite dan risk tolerance dengan Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko. Dalam menentukan risk appetite dan risk tolerance harus menimbang kajian yang dilakukan setiap tahun, penyesuaian dengan RJPP, dan ekspektasi Pemangku Kepentingan.

C. MENYETUJUI RISK APPETITE STATEMENT DAN RISK TOLERANCE UNTUK PERUSAHAAN

Direksi menyetujui risk appetite dan risk tolerance yang telah diusulkan bersamaan dengan penetapan konteks. Pernyataan Direksi atas risk appetite dan risk tolerance akan didokumentasikan secara formal.

4. PENILAIAN RISIKO-IDENTIFIKASI RISIKO

Input proses dapat berupa data proses bisnis Perusahaan, hasil observasi kondisi internal dan eksternal Perusahaan, serta pertimbangan pihak eksternal (konsultan atau tenaga ahli). Output proses dapat berupa risk register (bagian identifikasi risiko). Rincian Prosedur:

A. MENGIDENTIFIKASI SEMUA JENIS RISIKO

Setiap akhir tahun, sejalan dengan jadwal persiapan perencanaan anggaran tahunan (RKAP), Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko akan mendistribusikan konteks Manajemen Risiko tahunan. Berdasarkan konteks tersebut, Risk Owner dan Risk Agent mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap sasaran yang mencakup risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko kepatuhan dan hukum/peraturan, dan risiko proyek.

B. IDENTIFIKASI LANJUT PADA SEMUA SUMBER RISIKO

Risk Owner dan Risk Agent menelaah lebih lanjut mengenai sumber dan penyebab risikonya yang mencakup faktor manusia, faktor proses, faktor teknologi, dan faktor eksternal.

C. MENGIDENTIFIKASI SEMUA POTENSI PENYEBAB RISIKO

Risk Owner dan Risk Agent mendeskripsikan penyebab dari sumber risiko yang telah diidentifikasi. Penyebab ini merupakan uraian lebih rinci dari sumber risiko yang telah ditentukan.

D. MELAPORKAN HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Risk Owner dibantu oleh Risk Agent menyampaikan Risk Register yang berisi seluruh risiko yang telah diidentifikasi kepada Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko.

E. MENYEMPURNAKAN HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko melakukan review atas Risk Register yang disampaikan oleh seluruh Risk Owner. Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko dapat melakukan koreksi terhadap Pernyataan Risiko jika dipandang perlu, contohnya jika terdapat risiko yang tidak sesuai dengan sasaran, atau jika penyebab risiko tidak terkait dengan risk statement, atau pertimbangan lain-lainnya.

5. PENILAIAN RISIKO-ANALISIS RISIKO

Input proses dapat berupa risk register (hasil identifikasi risiko) dan kriteria risiko. Output proses dapat berupa updated risk register (bagian analisis risiko). Rincian Prosedur:

A. MENGANALISIS KONSEKUENSI RISIKO (KUANTITATIF DAN KUALITATIF)

Risk Owner dibantu oleh Risk Agent menentukan risiko dilihat dari tingkat konsekuensi yang diukur secara kuantitatif maupun kualitatif yang tertuang dalam Lampiran IV tentang Kriteria Risiko yang telah ditetapkan oleh Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko. Konsekuensi risiko yang bersifat kuantitatif antara lain: konsekuensi finansial,



realisasi proyek, operasional, kepuasan pengguna jasa, kepuasan pegawai Perusahaan, produktivitas pegawai, dan teknologi informasi. Sedangkan konsekuensi risiko yang bersifat kualitatif antara lain: konsekuensi regulatory compliance, health and safety, reputasi, keamanan dan ketertiban, lingkungan dan masyarakat dan legal. Sebuah risiko dapat memiliki lebih dari satu konsekuensi, namun konsekuensi yang digunakan adalah konsekuensi dengan nilai tertinggi.

B. MENGANALISIS KEMUNGKINAN RISIKO

Risk Owner dibantu oleh Risk Agent dapat menentukan tingkat kemungkinan berdasarkan sifat dari kegiatan tersebut, yaitu: rutin, non rutin, dan mungkin dapat terjadi di masa mendatang. Tingkat kemungkinan risiko tertuang dalam Lampiran IV tentang Kriteria Risiko yang telah ditetapkan oleh Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko. Dalam menyusun tingkat kemungkinan risiko pada Lampiran IV tentang Kriteria Risiko, Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko dapat menggunakan data historis dalam risk/loss event database.

C. MENGANALISIS EXISTING CONTROL

Risk Owner dibantu Risk Agent mengidentifikasi existing control dari sebuah risiko untuk menentukan tingkat konsekuensi risiko.

D. MELAPORKAN HASIL ANALISIS RISIKO

Risk Owner dibantu Risk Agent menentukan tingkat risiko berdasarkan matriks antara tingkat konsekuensi risiko dengan tingkat kemungkinan risiko yang dipetakan menjadi tingkat konsekuensi risiko (malapetaka, sangat berat, berat, agak berat, tidak berat) dan tingkat kemungkinan risiko (sangat besar, besar, sedang, kecil, sangat kecil).

E. MEMVALIDASI DAN MEMBERI MASUKAN TERHADAP ANALISIS RISIKO

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan bila dibutuhkan memberi masukan atas analisis risiko dilakukan oleh Risk Owner.

6. PENILAIAN RISIKO-EVALUASI RISIKO

Input proses dapat berupa updated risk register (bagian analisis risiko), dan risk appetite dan risk tolerance. Output proses dapat berupa updated risk register (bagian evaluasi risiko), dan peta risiko. Rincian Prosedur:

A. MEMBANDINGKAN HASIL ANALISIS RISIKO DENGAN TOLERANSI RISIKO

Risk Owner dibantu Risk Agent melakukan evaluasi risiko dan menentukan apakah suatu risiko masih berada dalam batas toleransi risiko. Bila tingkat risiko berada di atas batas toleransi maka Risk Owner wajib menetapkan rencana perlakuan risiko.

B. MEMBUAT PETA RISIKO MASING-MASING RISK OWNER

Risk Owner dibantu Risk Agent memetakan hasil analisis risiko ke dalam peta risiko. Peta risiko menggambarkan posisi tingkat risiko secara visual berdasarkan tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan risiko.

C. MENETAPKAN KEY RISK INDICATOR

Risk Owner dibantu Risk Agent menetapkan Key Risk Indicator (KRI) untuk setiap risiko yang berada di atas batasan toleransi risiko. KRI ini diambil dari risiko-risiko yang telah dianalisis dan akan dijelaskan pada Lampiran I huruf G tentang Penetapan Key Risk Indicator.

D. MELAPORKAN HASIL EVALUASI RISIKO

Risk Owner dibantu Risk Agent melaporkan hasil evaluasi risiko kepada Unit Kerja Management System and Risk Management.

E. MENGEVALUASI PETA RISIKO

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko melakukan review peta risiko yang dilaporkan oleh Risk Owner.

7. PENETAPAN KEY RISK INDICATOR

Input proses dapat berupa updated risk register (bagian evaluasi risiko), dan peta risiko. Output proses dapat berupa pengisian Tabel Key Risk Indicator. Rincian Prosedur:

A. MENETAPKAN KEY RISK INDICATOR (KRI)

Risk Owner dibantu Risk Agent mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat dijadikan peringatan dini atas terjadinya risiko di masa mendatang (leading indicator).

B. MENETAPKAN BATASAN/THRESHOLD KRI

Risk Owner dibantu Risk Agent menetapkan batasan/threshold untuk setiap parameter KRI. Nilai batasan/threshold perlu dikaji setidaknya setiap tahun sekali untuk memastikan kesesuaiannya dengan tingkat risiko dalam batas toleransi.

C. MENGUMPULKAN DATA-DATA PENDUKUNG KEY RISK INDICATOR

Risk Owner dibantu Risk Agent mengumpulkan data pendukung KRI yang antara lain bersumber pada data risk/loss event, masukan dari Internal Audit, Biro Legal, Sekretaris Perusahaan, dan unit kerja lainnya; serta benchmark pada perusahaan lain yang menghadapi risiko yang serupa.

D. MEMANTAU TINGKAT REALISASI KEY RISK INDICATOR SECARA BERKALA

Risk Owner dibantu Risk Agent memantau tingkat realisasi KRI secara berkala dan segera menyusun rencana tindak lanjut untuk setiap parameter risiko yang menyentuh nilai batasan/threshold KRI.

**E. MELAPORKAN STATUS KEY RISK INDICATOR**

Risk Owner dibantu Risk Agent wajib segera melaporkan setiap parameter risiko yang menyentuh nilai batasan/threshold KRI kepada Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko. Selain itu, setiap 3 bulan Risk Owner dibantu Risk Agent juga melaporkan realisasi KRI termasuk status tindak lanjutnya kepada Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko.

F. MONITORING KEY RISK INDICATOR

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko memonitor realisasi KRI termasuk status tindak lanjutnya sesuai laporan dari Risk Owner dan Risk Agent. Bila terdapat rencana tindak lanjut yang belum diselesaikan sesuai target waktu, maka Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko perlu meminta keterangan dari Risk Owner terkait penyebab keterlambatan tersebut dan meminta target waktu yang baru ataupun perubahan atas rencana tindak lanjut.

8. PERLAKUAN RISIKO

Input proses dapat berupa updated risk register (bagian evaluasi risiko), dan peta risiko. Output proses dapat berupa updated risk register (bagian perlakuan risiko), dan risk mitigation plan. Rincian Prosedur:

A. MENYUSUN RENCANA PERLAKUAN RISIKO DAN BIAYA MITIGASI

Risk Owner dibantu Risk Agent menyusun rencana perlakuan risiko serta mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk memitigasi risiko tersebut. Biaya mitigasi risiko tidak boleh melebihi keuntungan yang mungkin didapatkan Perusahaan setelah perlakuan risiko dilakukan. Opsi perlakuan risiko yang dapat dipilih antara lain penghindaran Risiko/ menghindari (Risk Avoidance), mitigasi Risiko/ mengurangi besarnya konsekuensi/ kemungkinan (Risk Mitigation), berbagi Risiko/mentransfer risiko (Risk Transfer).

Risk Transfer dapat dilakukan dengan memindahkan risiko kepada pihak asuransi maupun reasuransi yang telah bekerja sama dengan Perusahaan. Dalam melakukan pengalihan risiko kepada pihak asuransi harus terlebih dahulu melakukan survei dan penilaian risiko serta mempertimbangkan beberapa pertimbangan antara lain risiko yang dihadapi tidak dapat ditanggung oleh perusahaan itu sendiri, risiko yang dihadapi memiliki tingkat kemungkinan risiko yang sangat tinggi, risiko yang dihadapi memiliki kecenderungan akan berdampak atau memiliki kerugian yang cukup besar, besarnya kerugian yang dihadapi dikhawatirkan akan lebih besar bila ditanggung sendiri, menggunakan pihak asuransi dipercaya dapat menambah nilai dari segi keselamatan, penyesuaian kerugian, dan lain sebagainya, serta biaya pengalihan risiko diperkirakan seimbang dengan manfaat yang didapat oleh Perusahaan nanti.

B. MENGEVALUASI RENCANA DAN BIAYA PERLAKUAN RISIKO

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko mengevaluasi rencana dan biaya perlakuan risiko yang diajukan oleh Risk Owner. Evaluasi setidaknya mencakup kesesuaian antara rencana tindak lanjut dengan risk statement dan perlu dipastikan rencana tidak lanjut dapat mengurangi tingkat risiko, manfaat yang didapatkan dari perlakuan risiko melebihi biaya mitigasi risiko, penanggung jawab atas rencana tindak lanjut perlakuan risiko telah memiliki pengetahuan dan kewenangan yang sesuai, target penyelesaian rencana tidak lanjut perlakuan risiko dapat tercapai, status tidak lanjut perlakuan risiko dapat dimonitor secara berkala, dan biaya mitigasi risiko telah masuk ke dalam rencana anggaran Perusahaan.

C. MENYETUJUI RENCANA DAN BIAYA PERLAKUAN RISIKO

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko melaporkan rencana perlakuan risiko dan biaya mitigasi kepada Direktur terkait. Rencana perlakuan risiko baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait.

D. MELAKUKAN TINDAKAN PERLAKUAN RISIKO

Risk Owner dibantu Risk Agent melakukan tindakan perlakuan risiko sesuai dengan rencana dan biaya perlakuan risiko yang telah disetujui Direktur terkait.

E. MEMONITOR REALISASI PERLAKUAN DAN BIAYA PERLAKUAN RISIKO

Risk Owner dibantu Risk Agent secara berkala melaporkan status realisasi perlakuan dan biaya risiko kepada Unit Kerja Management System and Risk Management. Bila terdapat rencana perlakuan risiko yang belum diselesaikan sesuai target waktu, maka Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko perlu meminta keterangan dari Risk Owner terkait penyebab keterlambatan tersebut dan meminta target waktu yang baru ataupun perubahan atas rencana perlakuan risiko tersebut.

9. PEMANTAUAN DAN TINJAUAN

Input proses dapat berupa berupa risk register, risk mitigation plan, Laporan Manajemen Risiko Unit Kerja Kantor Pusat/Cabang, serta jadwal unit kerja dan Direksi/ General Manager. Output proses dapat berupa laporan Manajemen Risiko Korporat. Rincian Prosedur:

A. MERENCANAKAN RAPAT TINJAUAN TINGKAT CABANG DAN PUSAT

Risk Owner dibantu Risk Agent berkoordinasi dengan Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko dalam menyusun agenda, materi, dan waktu rapat tinjauan tingkat kantor cabang dan kantor pusat setiap 3 bulan untuk membahas tingkat risiko dan peta risiko pada kantor cabang dan kantor pusat, termasuk status perlakuan risiko. Rapat akan diikuti oleh Risk Owner, Risk Agent, Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko, Direktur terkait (kantor pusat) atau General Manager (kantor cabang).

**B. MELAKSANAKAN RAPAT TINJAUAN TINGKAT CABANG/DIREKTORAT PADA KANTOR PUSAT**

Risk Owner, Risk Agent, Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko, Direktur terkait (Kantor Pusat) atau General Manager (Kantor Cabang) melakukan rapat tinjauan cabang/unit kerja kantor pusat. Rapat membahas tingkat risiko dan peta risiko yang merupakan kompilasi dari risiko RKM, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Hukum/Kepatuhan pada Kantor Cabang/Kantor Pusat sesuai dengan daftar risiko pada Risk Register dan Risk Mitigation Plan, Key Risk Indicator yang telah dibuat oleh masing-masing unit kerja Kantor Pusat/Cabang. Hasil rapat didokumentasikan pada Laporan Manajemen Risiko Unit Kerja/Cabang. Bila diperlukan, Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko dapat melakukan kunjungan ke unit kerja terkait untuk melakukan observasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko.

C. MENYUSUN LAPORAN MANAJEMEN RISIKO KORPORAT

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko melakukan konsolidasi Laporan Manajemen Risiko Unit Kerja/Cabang ke dalam Laporan Manajemen Risiko Korporat. Konsolidasi dilakukan atas risiko-risiko utama pada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Pusat yang perlu mendapat perhatian dari Direksi dan Komite GCG dan Manajemen Risiko.

D. MELAKSANAKAN RAPAT TINJAUAN TINGKAT KORPORAT

Risk Owner (Unit Kerja Kantor Pusat dan Cabang), Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko, dan Direksi melaksanakan rapat tinjauan tingkat korporat untuk membahas risiko utama yang dihadapi Perusahaan, termasuk status perlakuan risiko utama. Unit Kerja Kantor Pusat diwakili oleh Supervisor masing-masing sedangkan Kantor Cabang diwakili oleh General Manager masing-masing Cabang.

E. MENYAMPAIKAN LAPORAN MANAJEMEN RISIKO KORPORAT

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Manajemen Risiko Korporat kepada Internal Audit, Dewan Komisaris (termasuk Komite GCG dan Manajemen Risiko), dan pihak terkait lainnya jika dibutuhkan.

10. PENCATATAN RISK/LOSS EVENT

Input proses dapat berupa laporan kronologis kejadian di lapangan, dan hasil wawancara dengan pihak terkait di lapangan. Output proses dapat berupa Risk/Loss Event Database. Rincian Prosedur:

A. MENCATAT KRONOLOGIS KEJADIAN DAN TINDAK LANJUTNYA

Risk Owner dibantu Risk Agent mencatat kronologis seluruh nearmiss event dan risk event beserta tindak lanjutnya pada Risk/Loss Event Database. Tindak lanjut dapat bersifat represif maupun preventif.

B. MENGANALISIS TINGKAT KERUGIAN

Risk Owner dibantu Risk Agent menganalisis tingkat potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan dari masing-masing kejadian pada Risk/Loss Event Database.

C. MELAPORKAN DATA RISK/LOSS EVENT

Risk Owner dibantu Risk Agent melaporkan data Risk/Loss Event kepada Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko.

D. MELAKUKAN KOMPILASI DATA RISK/LOSS EVENT DARI SELURUH UNIT KERJA KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko melakukan kompilasi (pengumpulan) data Risk/Loss Event dari seluruh Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang nantinya digunakan sebagai salah satu informasi untuk mengidentifikasi risiko.

Jenis-jenis risiko yang melekat pada lingkungan bisnis Pelindo III dapat dikategorikan menjadi 5 kategori besar yaitu:

1. RISIKO STRATEGIS

Risiko Strategis yang dimaksud adalah risiko yang terkait dengan ketidaktepatan pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, menangkap peluang bisnis baru maupun memelihara reputasi Perusahaan. Cakupan identifikasi risiko yang masuk dalam kategori risiko strategis adalah:

- Risiko pada transaksi strategis seperti kerja sama usaha, pengembangan usaha dan/atau aktivitas baru, investasi dan/atau penempatan dana, pembuatan anak perusahaan, merger, akuisisi, divestasi, privatisasi, go public, aliansi strategis, likuidasi, dan penerbitan obligasi.
- Persaingan usaha.
- Perubahan peraturan perundang-undangan.
- Perubahan kondisi dan situasi politik.
- Faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
- Publikasi negatif.
- Hubungan yang kurang harmonis dengan para Pemangku Kepentingan kunci.

2. RISIKO KEUANGAN

Risiko Keuangan yang dimaksud adalah risiko yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari:

- Transaksi dan instrumen keuangan seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas keuangan, dan ekuitas.
- Pengelolaan keuangan Perusahaan seperti likuiditas, akuntansi, kredit, pinjaman, permodalan, piutang, dan pajak.



3. RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional yang dimaksud adalah risiko yang terkait dengan ketidakcukupan proses internal, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, keandalan sistem, aspek teknis infrastruktur dan/atau suprastruktur, serta kejadian lainnya yang mengganggu jalannya kegiatan operasional Perusahaan. Cakupan identifikasi risiko yang masuk dalam kategori risiko operasional adalah:

- a. Kebijakan operasional
- b. Prosedur operasional
- c. Struktur organisasi
- d. Jumlah sumber daya manusia
- e. Kompetensi sumber daya manusia
- f. Keselamatan kerja
- g. Kesehatan pegawai
- h. Keamanan fisik
- i. Lingkungan kerja
- j. Kerja sama pelayanan
- k. Kesalahan pengoperasian
- l. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan
- m. Kecurangan
- n. Aset berwujud maupun tidak berwujud
- o. Properti
- p. Keberlangsungan bisnis (continuity)
- q. Keamanan informasi dan teknologi.

4. RISIKO KEPATUHAN DAN HUKUM/PERATURAN

Risiko Kepatuhan dan Hukum/Peraturan yang dimaksud adalah risiko yang terkait dengan:

- a. Ketidakpatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- b. Tuntutan hukum
- c. Kelemahan aspek yuridis karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, dan kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perikatan.

5. RISIKO PROYEK

Risiko Proyek yang dimaksud adalah risiko yang terkait dengan kegagalan pengelolaan tujuan proyek baik berupa:

- a. Biaya proyek
- b. Waktu pengerjaan proyek
- c. Kualitas proyek
- d. Ruang lingkup proyek.

Upaya pengelolaan atau perlakuan terhadap jenis risiko yang melekat pada Perusahaan senantiasa ditanggapi secara berkesinambungan dalam rangka untuk mempertahankan batas-batas risiko yang dapat ditoleransi oleh manajemen dan sejalan dengan tujuan Perusahaan baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selera risiko (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) telah disusun bersamaan dengan pembaruan kebijakan dan pedoman teknis Manajemen Risiko pada tahun 2017.

Risk Appetite dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan, Pelindo III berkomitmen untuk:

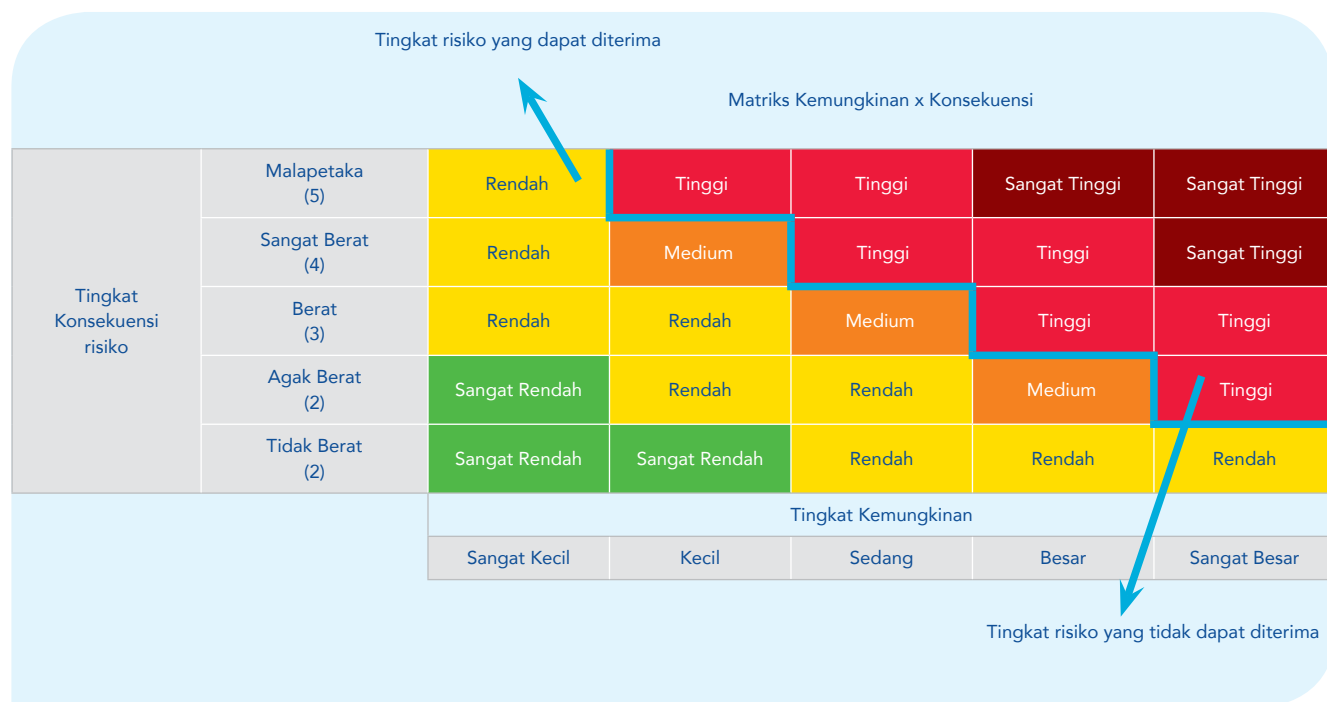
1. Mengurangi risiko terkait people, process, technology dan lingkungan eksternal yang mungkin timbul terutama terkait diversifikasi usaha lain yang ada di pelabuhan selama realisasi pendapatan atas investasi melebihi biaya yang dikeluarkan.
2. Mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan dengan memitigasi risiko.

Risk Tolerance (Toleransi Risiko) yang digunakan oleh Perusahaan dilihat dari tingkat risiko pada matriks risiko:

1. Tingkat risiko yang dapat diterima Perusahaan adalah risiko pada tingkat medium dan lebih rendah sehingga existing control perlu dipertahankan.
2. Tingkat risiko yang tidak dapat diterima Perusahaan adalah risiko pada tingkat tinggi dan sangat tinggi sehingga perlu segera ditangani (risk treatment).
3. Ilustrasi toleransi risiko pada matriks risiko adalah sebagai berikut:



PENETAPAN RISK APPETITE DAN RISK TOLERANCE



Melihat salah satu prinsip Manajemen Risiko yaitu bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan, maka pengelolaan risiko selalu diperbarui sejalan dengan perubahan tujuan atau sasaran Perusahaan. Gambaran deskripsi risiko dan mitigasinya secara generik dan dalam lingkup korporasi Perusahaan dapat ditunjukkan pada tabel sederhana sebagai berikut:

RISIKO DAN UPAYA MITIGASI

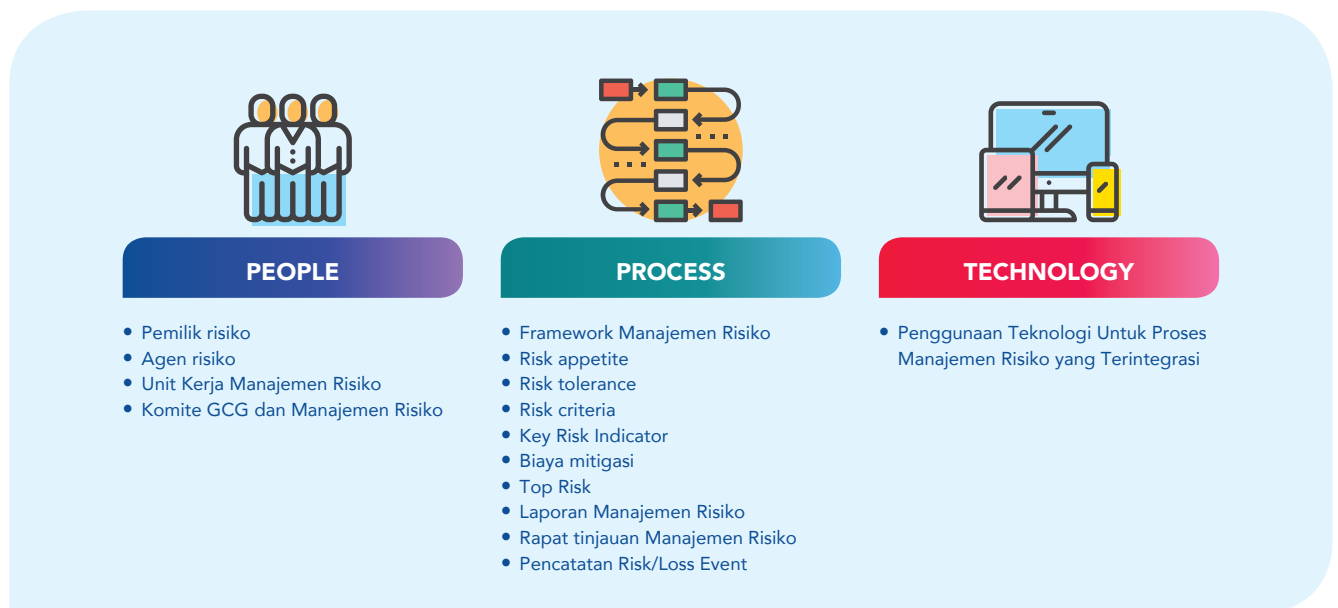
NO.	PERTANYAAN	ACTION PLAN
1.	Risiko kegagalan dalam melaksanakan pengembangan bisnis/kerja sama.	1. Pemetaan kompetensi SDM sampai dengan pelatihannya, infrastruktur lainnya, dan prioritas dalam penentuan bisnis baru yang akan dijalankan; 2. Memastikan penyusunan business plan yang telah dilengkapi dengan business process mapping dan keseluruhan prosedur; 3. Pembahasan berkala pada setiap tahap inisiasi, perencanaan, realisasi, dan evaluasinya
2.	Risiko tidak berjalannya dan termankaftkannya fasilitas yang telah dibangun secara optimal.	1. Pemetaan kompetensi SDM sampai dengan pelatihannya, infrastruktur lainnya, dan prioritas dalam penentuan bisnis baru yang akan dijalankan; 2. Memastikan penyusunan kajian dan business plan yang telah dilengkapi dengan business process mapping dan keseluruhan prosedur; 3. Pembahasan berkala pada setiap tahap inisiasi, perencanaan, realisasi, dan evaluasinya.
3.	Risiko kesalahan dalam pemilihan dan penetapan jenis fasilitas/ peralatan atau teknologi informasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan operasional Perusahaan.	1. Memastikan penyusunan kajian kebutuhan dan kelayakan telah disusun secara komprehensif; 2. Memastikan penyusunan kajian teknis dalam melakukan pengadaan alat atau fasilitas telah menerapkan analisis dalam project risk management dan dibahas secara berkala pada setiap tahap inisiasi, perencanaan, realisasi, pemantauan, dan evaluasi.



NO.	PERTANYAAN	ACTION PLAN
4.	Risiko kegagalan dalam menghasilkan SDM yang andal serta belum berhasilnya penerapan budaya Perusahaan.	1. Memastikan penyusunan pemetaan kompetensi untuk seluruh unit bisnis dan pemenuhan gap dalam melakukan pengalokasian/perpindahan SDM agar sesuai dengan standar kompetensi yang diminta; 2. Melakukan pembahasan berkala melalui rapat tinjauan manajemen dalam mengevaluasi keefektifan organisasi yang sedang berjalan termasuk profesionalisme dan produktivitas SDM; 3. Melakukan penyusunan program pengembangan SDM dengan memperhatikan desain organisasi, jalur komando, dan koordinasi yang telah ditetapkan modelnya dan dibahas secara berkala melalui rapat tinjauan manajemen untuk rencana kelola lebih lanjut.
5.	Risiko tidak meningkatnya relasi strategis yang lebih luas antara Pelindo III dan pengguna jasa.	1. Menyusun program pengembangan SDM untuk meningkatkan keahlian intrapreneurship; 2. Melakukan penyusunan konsolidasi data dan pemetaan seluruh pengguna jasa existing dan yang berpotensi di seluruh lingkungan Pelindo III Group. Langkah ini sekaligus merupakan program evaluasi yang akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen secara berkala untuk rencana kelola lebih lanjut.

Keberhasilan dalam mengimplementasikan Manajemen Risiko sangat ditentukan oleh 3 aspek yaitu people, process, dan technology yang dengan kata lain dapat disebut sebagai infrastruktur Manajemen Risiko. Gambaran people, process, dan technology yang dimaksud adalah sebagai berikut:

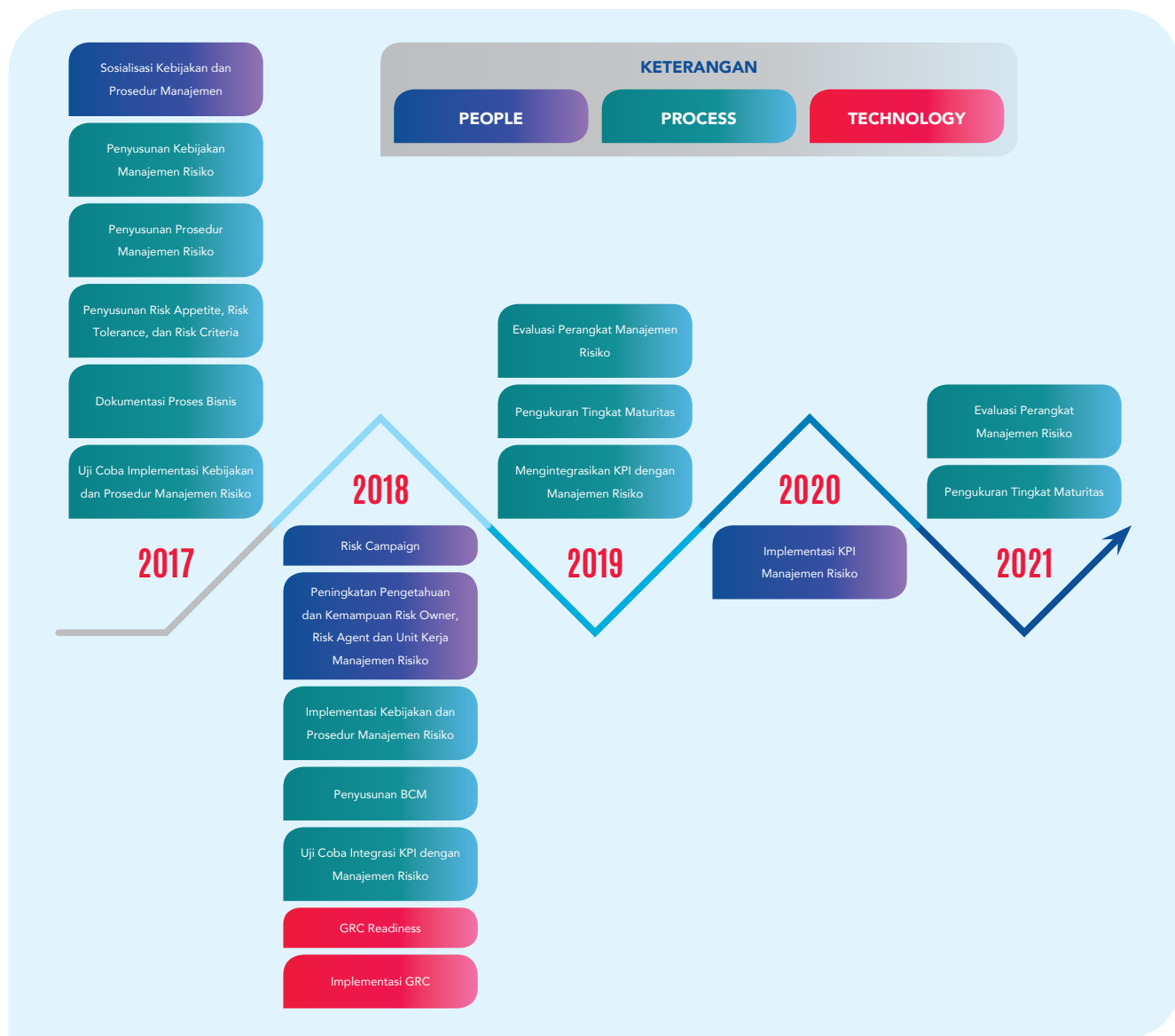
PEOPLE, PROCESS, DAN TECHNOLOGY DALAM MANAJEMEN RISIKO



Kebijakan dan pedoman teknis Manajemen Risiko yang telah diperbarui oleh Perusahaan merupakan upaya dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya terhadap keseluruhan upaya manajemen untuk terus melakukan peningkatan, maka dilakukan penyusunan roadmap Manajemen Risiko Perusahaan selama 5 tahun sebagai berikut:



ROADMAP MANAJEMEN RISIKO



PEMBUDAYAAN MANAJEMEN RISIKO

Budaya sadar risiko dapat dicapai dengan upaya implementasi kegiatan Manajemen Risiko yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaannya secara bertahap. Salah satu kunci dalam upaya mencapai budaya sadar risiko adalah dengan pengembangan SDM secara berkala dan konsisten di lingkungan Pelindo III, serta menekankan pentingnya pelaksanaan Manajemen Risiko melalui metode *Risk and Control Self-Assessment (RCSA)* yang dapat menunjukkan peran aktif pemilik risiko dalam menjalankan proses manajemen risiko sesuai ruang lingkup pekerjaan. Peran aktif SDM dalam mengemban tanggung jawab dalam Sistem Manajemen Risiko antara lain:



PERAN SDM DALAM SISTEM MANAJEMEN RISIKO

NO.	TAHAP PROSES MANAJEMEN RISIKO	DEWAN KOMISARIS	KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO	DIREKSI	UNIT KERJA MANAJEMEN RISIKO	PEMILIK RISIKO	SPI
1.	Komunikasi dan Konsultasi	I/C	C	A	R	C	-
2.	Penentuan Konteks	I	C	A	R	C	-
3.	Identifikasi Risiko	I	C	C	R	A/R	-
4.	Analisis Risiko	I	C	C	R	A/R	-
5.	Evaluasi Risiko	I	C	A	R	R/C	I
6.	Perlakuan Risiko	I	C	A	C	R	-
7.	Pemantauan dan Peninjauan	I	R	A	R	C	I

Kegiatan pengembangan atau peningkatan yang dilakukan selama tahun 2018 dalam rangka pembudayaan manajemen risiko antara lain:

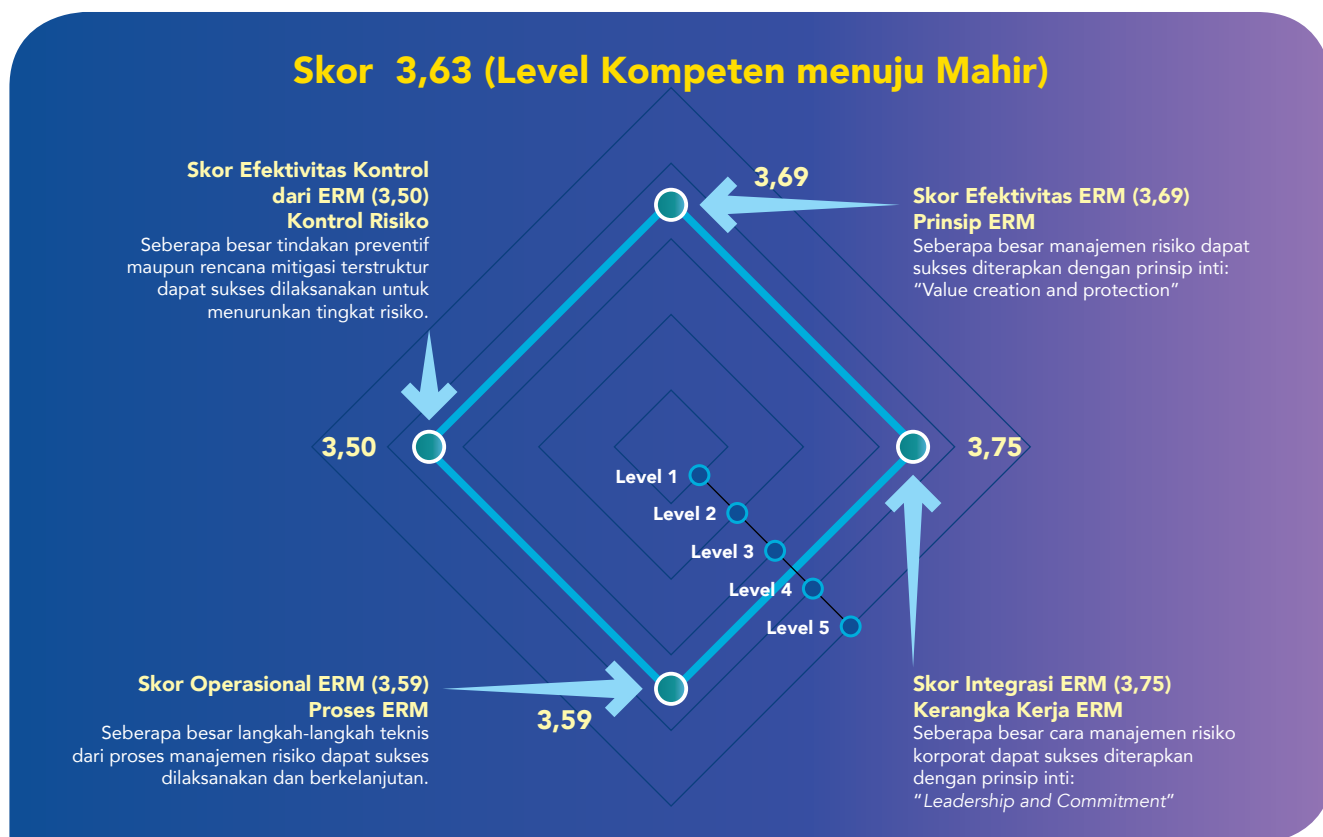
1. Pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko khususnya setara Certified Risk Management Officer (CRMO) sebanyak 42 orang yang diikuti oleh SDM Kantor Pusat, Regional, Pelabuhan, Terminal dan Anak Perusahaan lintas bidang;
2. Pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko khususnya setara Certified Risk Management Professional (CRMP) sebanyak 8 orang yang diikuti oleh Senior Manager Kantor Pusat dan Direktur Anak Perusahaan;
3. Sosialisasi penerapan Manajemen Risiko di Anak Perusahaan dalam mengadopsi kebijakan dan pedoman teknis Manajemen Risiko Induk Perusahaan;
4. Pemenuhan Risk and Control Self-Assessment (RCSA) melalui penyampaian risk register oleh para pemilik pekerjaan (unit kerja) yang mengajukan pekerjaan strategis proyek investasi maupun non investasi. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh unit Manajemen Risiko sebelum dilakukan pengadaan barang dan jasa.

REVIEW SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Review atas penerapan Sistem Manajemen Risiko /penilaian terhadap maturitas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pelindo III pada tahun 2018 dilakukan secara self-assessment dengan pendekatan berbasis ISO 31000 yang dikoordinasikan oleh Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko selaku Risk Coordinator. Review dilakukan melalui analisis hasil pengisian kuesioner online dan hard copy dengan responden yang berasal dari para pemimpin unit kerja di kantor pusat serta regional antara lain setingkat Senior Manager, Asisten Senior Manager, CEO Regional, Regional Manager, dan Deputy Manager. Hasil penilaian maturitas penerapan manajemen risiko dari kuesioner yang telah diisi oleh 101 responden menghasilkan skor sebesar 3,63 (skala 1 sampai dengan 5) yang berada pada tingkat "Kompeten" menuju "Mahir" sebagaimana gambar berikut:



SKOR-TINGKAT MATURITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2018



Level Kompeten (skala 3) menggambarkan penerapan Sistem Manajemen Risiko di Pelindo III mulai menunjukkan terbangunnya budaya organisasi terkait manajemen risiko, dan kepemimpinan yang konsisten dalam pengelolaan risiko. Level Mahir (skala 4) yang belum dapat dicapai, menggambarkan implementasi Manajemen Risiko pada setiap proses bisnis di organisasi, budaya sadar risiko telah ada pada setiap pelaksanaan strategi organisasi, dan kepemimpinan yang proaktif dalam pengelolaan Manajemen Risiko. Berdasarkan hasil review yang dilakukan untuk tahun 2018, terdapat poin-poin perbaikan yang harus dilakukan yaitu:

1. Kesadaran unit kerja dalam pengelolaan risiko dan pelaporannya;
2. Pengisian dan pembaruan risk register per triwulan oleh unit kerja;
3. Dokumentasi dan pembelajaran pengelolaan risiko unit kerja;
4. Konsistensi tertib pelaporan ke Unit Manajemen Risiko;
5. Pengetahuan menyusun penilaian risiko beserta rencana mitigasi;
6. Evaluasi internal terhadap rencana mitigasi dan biaya mitigasi;
7. Realisasi pelaksanaan mitigasi dari para penanggung jawab;
8. Pencatatan insiden yang ditembuskan ke unit Manajemen Risiko;
9. Ketepatan dalam mengidentifikasi risiko dan sumber-penyebabnya;
10. Pemahaman dan penentuan Key Risk Indicator.

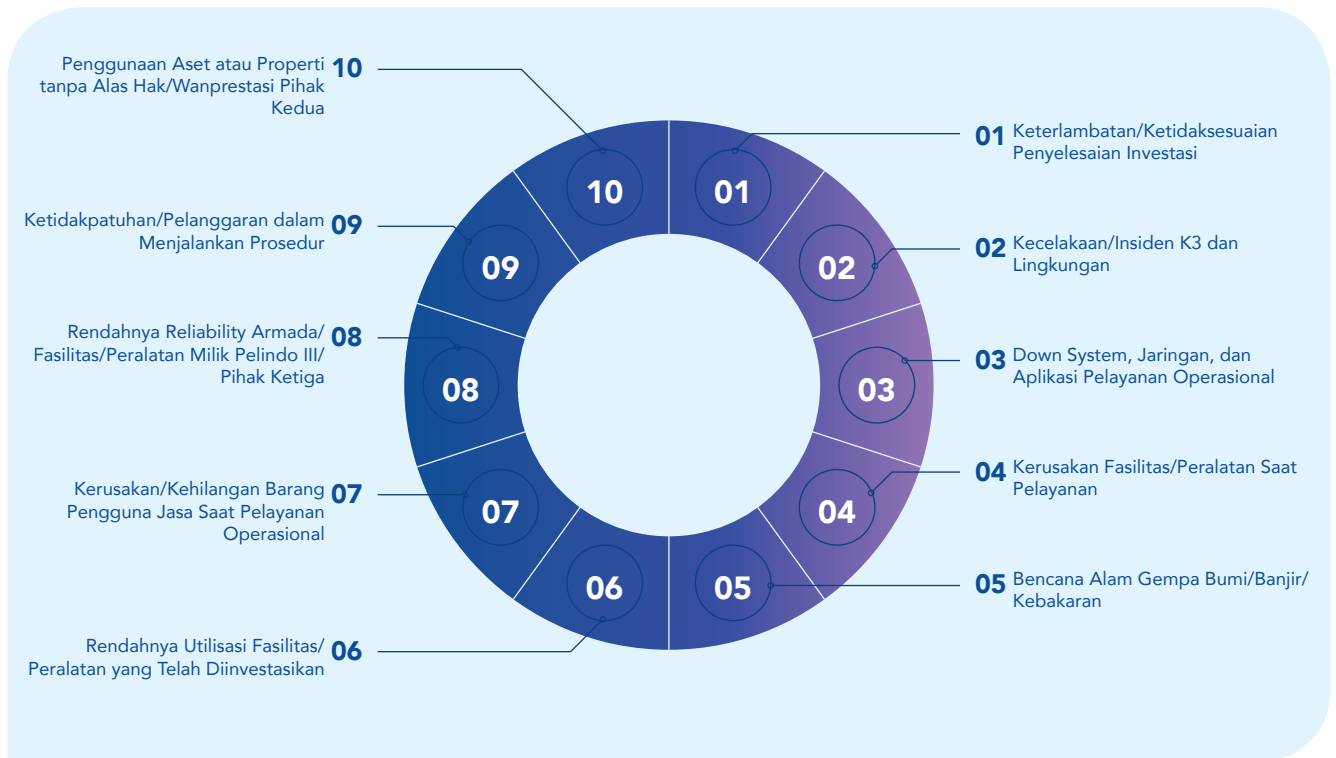
RISIKO TAHUN 2018

Risiko yang dihadapi oleh Pelindo III sepanjang tahun 2018 didasarkan pada risiko-risiko yang diidentifikasi dari berbagai konteks yang terkait dengan Perusahaan. Konteks eksternal dan internal yang dipertimbangkan antara lain dengan melihat faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Selanjutnya, Perusahaan juga mempertimbangkan faktor blindspot seperti adanya ancaman pendatang baru, ancaman jasa substitusi, daya tawar konsumen/pelanggan, daya tawar penyuplai/mitra, pesaing existing dalam industri yang sama, organisasi internal Perusahaan, regulator pelabuhan, dan lingkungan sekitar pelabuhan.

Konteks Manajemen Risiko diselaraskan dengan sasaran atau target Perusahaan di seluruh jenis proses bisnis maupun aktivitas lainnya. Dalam proses penentuan sasaran atau target, Perusahaan mempertimbangkan jenis-jenis risiko antara lain terkait jenis risiko strategis, keuangan, operasional, kepatuhan dan hukum/peraturan, serta risiko proyek. Daftar risiko yang telah melalui penilaian dan penentuan perlakuan untuk selanjutnya menjadi perhatian di lingkungan Pelindo III sepanjang tahun 2018 yaitu sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



DAFTAR RISIKO PERUSAHAAN 2018



UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Daftar risiko yang tercatat dalam risk register, termasuk rencana penanganan atau perlakuan risiko yang disusun oleh para pemilik risiko dan dibantu/dikonsultasikan bersama risk agent pada masing-masing unit kerja baik di Kantor Pusat maupun Regional, secara berkala (triwulanan) disampaikan pembaruannya kepada Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko.

Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko sebagai risk coordinator dapat melakukan pembahasan lebih lanjut maupun evaluasi terhadap perlakuan risiko yang diambil agar dapat mendukung upaya pengelolaan risiko yang lebih optimal guna mendukung tercapainya target Perusahaan. Upaya untuk menurunkan tingkat kemungkinan-kejadian dan/atau konsekuensi dari risiko yang dihadapi Perusahaan sepanjang tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut:



UPAYA MITIGASI RISIKO

NO.	RISIKO	UPAYA MITIGASI
1.	Keterlambatan/ketidaksesuaian penyelesaian investasi	Perbaikan penentuan prioritas dan penjadwalan, peningkatan peran manajemen proyek
2.	Kecelakaan/insiden K3 dan lingkungan	Peningkatan budaya HSSE secara berkelanjutan, safety patrol gabungan secara konsisten
3.	Down system, jaringan dan aplikasi pelayanan operasional	Pengecekan dan pengujian dukungan TIK, evaluasi kecukupan backup secara berkala dengan berbagai skenario
4.	Kerusakan fasilitas/peralatan saat pelayanan	Melakukan uji berkala terhadap kinerja operasional dan pemeliharaan
5.	Bencana alam gempa bumi/banjir/kebakaran	Mengoptimalkan fungsi dan tugas tim tanggap darurat, membangun dan membentuk model Business Continuity
6.	Rendahnya utilisasi fasilitas/peralatan yang telah diinvestasikan	Mengevaluasi efektivitas hasil investasi, pemetaan dan penyusunan rencana alternatif yang potensial dan terukur
7.	Kerusakan/kehilangan barang pengguna jasa saat pelayanan operasional	Pengawasan grup kerja secara konsisten, memastikan kepatuhan instruksi kerja dan kelayakan fasilitas/peralatan
8.	Rendahnya reliability armada/fasilitas/peralatan milik Pelindo III/ pihak ke-3	Melakukan uji laik alat operasional dan pemeliharaan yang dipantau konsistensinya, evaluasi berkala kondisi di lapangan (darat dan perairan/ alur) untuk rencana perbaikan
9.	Ketidakpatuhan/pelanggaran dalam menjalankan prosedur	Pengawasan di lapangan yang terdokumentasi, briefing dan induksi kepatuhan pada setiap pergantian tugas/jam kerja
10.	Penggunaan aset atau properti tanpa alas hak/ wanprestasi pihak ke-2	Mengoptimalkan fungsi patroli keamanan dan ketertiban, perlindungan pengamanan fisik properti, intensif melakukan evaluasi dokumen perjanjian

SERTIFIKASI LINGKUNGAN YANG DIMILIKI

Pelindo III telah memperoleh sertifikat penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 mengacu pada SNI ISO 14001:2015 sesuai dengan SK penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 282/KEP/BSN/12/2015, saat ini ISO 14001: 2015 telah diterapkan pada 10 lokasi di wilayah Pelindo III yaitu:

NO.	CABANG PELABUHAN	VERSI	NO. SERTIFIKAT	BADAN SERTIFIKASI	MASA BERLAKU
1.	Kantor Pusat	2015	01 104 1535145/01	TUV Rheinland	28 Januari 2018 hingga 29 Februari 2019
2.	Tanjung Perak	2015	01 104 1535145/02	TUV Rheinland	
3.	Banjarmasin	2015	01 104 1535145/03	TUV Rheinland	
4.	Tanjung Emas	2015	01 104 1535145/04	TUV Rheinland	
5.	TPKS	2015	01 104 1535145/05	TUV Rheinland	
6.	Tanjung Intan	2015	01 104 1535145/06	TUV Rheinland	
7.	Kotabaru	2015	01 104 1535145/07	TUV Rheinland	
8.	Gresik	2015	01 104 1535145/08	TUV Rheinland	
9.	Benoa	2015	01 104 1535145/09	TUV Rheinland	
10.	Kupang	2015	01 104 1535145/10	TUV Rheinland	



KODE ETIK

DASAR PELAKSANAAN DAN RUANG LINGKUP

Pedoman etika dan perilaku Pelindo III mengalami penyempurnaan pada tahun 2017 dan telah disahkan melalui Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III yang merupakan penyempurnaan dari pedoman etika dan perilaku sebelumnya. Pedoman ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan Kewajaran) yakni:

1. Komitmen dan tata nilai Perusahaan.
2. Komitmen Perusahaan dan etika bisnis.
3. Perlindungan aset Perusahaan, benturan kepentingan, gratifikasi, diskriminasi, *benchmark*, media sosial, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.
4. Kerahasiaan dan keterbukaan informasi.
5. Pelanggaran etika dan penanganannya.
6. Penerapan dan penegakan.

PERNYATAAN PEMBERLAKUAN KODE ETIK SECARA MENYELURU

Kode etik Perusahaan disusun secara bersama-sama oleh Insan Pelindo III ; muatannya menjamin terwujudnya penyelenggaraan usaha yang harmonis dan terpenuhinya hak asasi bagi setiap elemen tanpa meninggalkan aspek bisnis. Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III berlaku secara luas bagi setiap Insan Pelindo III tanpa terkecuali.

MUATAN KODE ETIK

Code of Conduct berlaku bagi seluruh Insan Pelindo III , mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perusahaan. Selain itu, pihak eksternal yang berhubungan dengan Perusahaan pun diwajibkan untuk mengikuti berbagai ketentuan yang ada di dalam *Code of Conduct*.

Code of Conduct mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Pelindo III. Pedoman ini berlaku dan ditanda tangani oleh seluruh Insan Pelindo III setelah ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pegawai Pelindo III dengan No. 146/VII/KEP/DK.P.III/2014, HK.01/13/P.III-2014, SK 02/DPP.SPPI-III/VIII-2014 tanggal 4 Agustus 2014.

Pedoman tersebut dapat diunduh di *website* Pelindo III oleh para Pemangku Kepentingan. Jika terjadi pelanggaran terhadap komitmen etika dan perilaku dapat diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Pegawai juga dapat mengakses ke *Whistleblowing System* (WBS) untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran pedoman etika dan perilaku, perjanjian kerja bersama, maupun ketentuan lain yang ditetapkan Perusahaan sehingga dapat bersama-sama mengawasi dan memantau kinerja SDM.

Berikut adalah uraian mengenai ruang lingkup kode etik di lingkungan Perusahaan:

HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

1. Perusahaan akan memperlakukan Pemegang Saham sesuai Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Perusahaan akan memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham, dan selalu berusaha agar terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Pengusulan penetapan dividen oleh Perusahaan didasarkan pada kepentingan Perusahaan dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan, serta rencana investasi.

HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA JASA

Perusahaan akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pengguna jasa pelabuhan yang diwujudkan dalam program Pelayanan Prima. Perusahaan juga berusaha melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan penataan berbagai fasilitas pelabuhan secara bertahap sesuai skala prioritas, agar ketersediaan fasilitas maupun peralatan tetap terjamin dengan kualitas memadai.

Untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pengguna jasa pelabuhan, Perusahaan secara rutin mengadakan pertemuan dengan pengguna jasa pelabuhan serta melakukan *monitoring* atas hasil pertemuan sehingga dapat diketahui kebutuhan pengguna jasa pelabuhan tersebut dan dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan keinginannya.



Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa, Perusahaan melakukan berbagai pendekatan seperti:

1. Perusahaan melakukan sertifikasi ISO 9001 sebagai bentuk komitmen dalam hal standardisasi mutu dan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan.
2. Perusahaan melakukan sosialisasi kebijakan pelayanan, aturan, dan fasilitas pelabuhan bagi pengguna jasa pelabuhan.
3. Perusahaan memberikan jaminan layanan secara umum yang dinyatakan dalam *service level guarantee* di setiap unit usaha atau layanan.
4. Perusahaan memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna jasa tertentu yang dituangkan dalam bentuk perjanjian layanan kegiatan (*service level agreement*) dengan masing-masing pengguna jasa.
5. Perusahaan menjadikan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (*regulator*) sebagai pedoman minimal terhadap pencapaian kinerja operasional pelabuhan.
6. Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik berkaitan dengan pelayanan jasa dan fasilitas sebagai wujud dari pelayanan prima untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada pengguna jasa.
7. Perusahaan melakukan pelayanan dan menindaklanjuti setiap keluhan pengguna jasa dengan cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi.
8. Perusahaan melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pelabuhan dan fasilitas umum yang ada di pelabuhan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
9. Perusahaan melakukan peningkatan keamanan di pelabuhan dengan mengimplementasikan ISPS Code (*International Ship and Port Facility Security*) bagi pelabuhan tertentu secara bertahap.

HUBUNGAN DENGAN PEMASOK

Perusahaan senantiasa menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pemasok atas dasar kesetaraan dan keadilan berdasarkan penilaian secara wajar dengan menggunakan ukuran-ukuran kompetensi, kualifikasi, mutu produk, harga, manfaat, waktu pengiriman, serta pelayanan selama proses pengadaan maupun purna jual. Pengelolaan hubungan yang baik dengan pemasok antara lain diwujudkan melalui:

1. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, jelas, dan objektif guna menjamin kualitas, kuantitas, maupun harga barang dan jasa yang diperoleh dari pemasok.
2. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melakukan kendali terhadap independensi dari Pemangku Fungsi atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan sehingga dapat menjamin persaingan yang sehat dan proses pengadaan barang dan jasa yang baik tanpa intervensi.
3. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa membuat kontrak kerja atau perjanjian atas semua pesanan barang/pekerjaan dengan mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi untuk menghindari terjadinya konflik.

4. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mempertahankan pemasok yang dapat menyediakan barang dan jasa sesuai kewajiban masing-masing sebagai mitra bisnis dan menghormati hak-hak pemasok dengan selalu berkomitmen terhadap perjanjian yang disepakati.

HUBUNGAN DENGAN KREDITUR

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, Perusahaan memanfaatkan sumber dana eksternal, baik perbankan maupun sumber pembiayaan lainnya. Dalam hal tersebut, Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa melindungi hak dan kepentingan kreditur, melalui:

1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian.
2. Pengungkapan informasi yang diperlukan secara transparan, akurat, dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman sesuai isi perjanjian.

HUBUNGAN DENGAN APARATUR PEMERINTAH

Kebijakan Perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap Aparatur yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perusahaan dilakukan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap kontak dengan Aparatur Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat kemitraan.

Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparatur di luar kapasitas resmi, dan segala hal yang bertentangan dengan hukum maupun praktik bisnis yang sehat dilarang oleh Perusahaan. Pembayaran tidak langsung meliputi penggunaan sarana milik Perusahaan, layanan Perusahaan, ataupun pemanfaatan Pekerja Perusahaan. Larangan ini berlaku tidak hanya terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, tetapi juga dilakukan atas nama Perusahaan oleh agen atau wakil-wakil Perusahaan lainnya. Perusahaan juga tidak akan membiayai keperluan pengeluaran Kementerian dan Instansi Pemerintah.

HUBUNGAN DENGAN PEKERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perusahaan akan selalu berusaha mengembangkan kualitas SDM, sesuai dengan kebutuhan visi, misi, serta program jangka panjang Perusahaan. Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa terdapat perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, untuk itu segenap Insan Pelindo III akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan memiliki komitmen untuk:

1. Memperlakukan Pekerja secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja.
2. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Pekerja.
3. Memberikan kesempatan yang setara/adil kepada seluruh Pekerja dalam pengembangan karir dan promosi. (Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 16/2012).



4. Melindungi Pekerja dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
5. Memberikan hak kepada Pekerja untuk berserikat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
6. Memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.
7. Mengusahakan agar skema renumerasi yang diterima pekerja, secara umum mengikuti peraturan yang berlaku.
8. Menghargai Pekerja sebagai aset utama Perusahaan.
9. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang mendorong semangat kerja para Pekerja.
10. Memberikan kebebasan kepada Pekerja untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan.

Perusahaan menyadari bahwa Pegawai adalah tulang punggung sekaligus mitra Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk itu Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja setiap Tenaga Kerja. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja, serta selalu mengusahakan agar Pegawai memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan selalu memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Demi tercapainya tujuan kesehatan dan keselamatan kerja, maka Perusahaan memiliki komitmen untuk:

1. Membangun Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagai landasan kepatuhan yang sejalan dengan hukum dan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
2. Menetapkan dan mengkaji sasaran, melakukan penilaian dan pelaporan kinerja SMK3.
3. Memberikan dukungan penuh terhadap penerapan SMK3 di lingkungan Perusahaan dalam upaya memberikan perlindungan optimal kepada Pegawai dari gangguan dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan.
4. Memastikan pemahaman yang lebih baik oleh Pegawai dan mitra kerja mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan aktivitas Perusahaan.
5. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan SMK3.
6. Menempatkan SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP dan Laporan Tahunan.
7. Menyertakan partisipasi Pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan SMK3.

HUBUNGAN DENGAN PESAING

Perusahaan menjunjung tinggi hubungan dengan industri sejenis guna menciptakan iklim usaha yang sehat:

1. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha; (Undang-Undang No. 5/1999)
2. Menghindari dan mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Undang-Undang No. 5/1999)
3. Saling menghormati dan menghargai hubungan dengan pesaing.

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Perusahaan sangat memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal dalam wilayah sekitar pelabuhan. Hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.

Dalam berinteraksi dan membantu pembangunan serta pengembangan masyarakat sekitar, cara yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan sejauh mungkin meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjalin kemitraan secara efektif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan.
3. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.
4. Perusahaan tetap berpartisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat khususnya yang berdekatan dengan pelabuhan. Pelaksanaannya melibatkan seluruh unsur mulai dari warga masyarakat, Pemerintah, serta lembaga terkait lainnya.
5. Perusahaan senantiasa memperhitungkan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perusahaan, serta melakukan pencegahan atas dampak negatif lingkungan akibat aktivitas operasional Perusahaan. (Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 16/2012).
6. Perusahaan senantiasa berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal bagi tercapainya keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Prinsip kemitraan secara aktif mengharuskan Perusahaan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, Pemerintah Pusat dan Daerah Setempat, serta pihak-pihak yang terkait lainnya guna mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya dan keterbukaan. Perusahaan bekerja sama secara erat dengan organisasi dan lembaga masyarakat lain dalam memformulasikan kebijakan kemitraan dengan masyarakat, misalnya berpartisipasi dalam dialog dengan lembaga-lembaga tersebut; dengan harapan kebijakan yang lebih rasional dan efektif dapat diformulasikan dengan baik. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai Perusahaan bagi masyarakat.



HUBUNGAN ATASAN TERHADAP BAWAHAN

1. Memiliki dedikasi, semangat, dan disiplin yang tinggi dalam bekerja;
2. Menunjukkan tingkah laku dan sikap yang baik terhadap atasan;
3. Melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh atasan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab;
4. Memberikan saran dan pendapat positif kepada atasan; dan
5. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik.

HUBUNGAN DENGAN MEDIA

Dalam hubungan dengan media, Perusahaan secara aktif melakukan publikasi kegiatan seremonial maupun operasional di media masa (cetak dan elektronik) serta media sosial. Prinsip penyampaian informasi Perusahaan dilakukan dengan asas transparansi dan keterbukaan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan yang berlaku. Praktek penyelenggaraan penyampaian informasi tersebut berupa:

1. Penyampaian informasi dilakukan secara relevan dan berimbang kepada media masa (cetak dan elektronik) maupun media sosial dengan memperhatikan *platform* yang telah ditetapkan oleh manajemen.
2. Pemeliharaan hubungan baik dengan media masa (cetak dan elektronik) sehingga tercipta kerja sama yang kondusif dan bermanfaat bagi pembentukan citra positif Perusahaan.
3. Penanganan keluhan dan kritik konstruktif yang disampaikan pada seluruh kanal informasi, yakni media masa (cetak dan elektronik) dan media sosial, dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
4. Melibatkan jurnalis media masa (cetak dan elektronik) untuk meliput kegiatan maupun proses bisnis Perusahaan.

HUBUNGAN DENGAN SERIKAT PEKERJA

Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.

HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Anak Perusahaan merupakan entitas tersendiri yang kepemilikan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pelindo III. Hubungan dengan Anak Perusahaan tersebut dilandasi dengan:

1. Peraturan yang berlaku di Perusahaan,
2. Dukungan dan kepercayaan terhadap Anak Perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan aktivitas Perusahaan secara mandiri.

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR

Perusahaan dalam menjalankan roda kegiatan usaha senantiasa mengedepankan Peraturan yang berlaku serta taat terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Regulator agar dapat membangun dan memajukan perekonomian bangsa. Hubungan tersebut dijalankan dengan prinsip kewajaran, transparan, dan profesional baik dalam hal penyampaian laporan-laporan maupun perkembangan Perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG.

HUBUNGAN DENGAN LEGISLATIF

Perusahaan melakukan hubungan komunikasi yang baik dengan legislatif, dengan menerima masukan dan informasi yang berguna bagi kepentingan Perusahaan maupun lingkungan, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

HUBUNGAN DENGAN YUDIKATIF

Perusahaan patuh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan di bidang hukum dengan menjalin kerja sama dengan pihak Penegak Hukum dalam rangka melindungi Perusahaan agar dalam menjalankan roda operasional tidak menyimpang dari standar operasional. Hubungan tersebut dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN LEMBAGA KEUANGAN

Kerja sama Perusahaan dengan pihak investor dan lembaga keuangan dilandasi dengan tujuan membangun serta mengembangkan Perusahaan lebih maju dan berkembang. Perusahaan memberikan informasi tentang keadaan Perusahaan secara terbuka kepada pihak investor dan Lembaga Keuangan yang telah di seleksi secara baik dan resmi serta sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Perusahaan juga memiliki itikad baik dalam pengembalian pinjaman atau bantuan yang telah diberikan demi keuntungan bersama baik Perusahaan, Investor, maupun Lembaga Keuangan tanpa adanya benturan kepentingan dan sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.

HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PERGURUAN TINGGI

Perusahaan menjaga mutu dan kualitas dunia pendidikan dengan melakukan kerja sama perguruan tinggi guna meningkatkan mutu siswa. Peningkatan mutu siswa ditempuh dengan memberikan informasi tentang perkembangan Perusahaan serta membantu kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan yang diselenggarakan.



HUBUNGAN DENGAN KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN (K3) SERTA LINGKUNGAN KERJA

Komitmen Perusahaan yang tinggi terhadap salah satu aset yang dimiliki, yakni SDM, menjadikan K3 sebagai prioritas Perusahaan untuk meyakinkan bahwa lingkungan kerja dalam kondisi aman, sehat, dan bersih serta penggunaan peralatan dan perlengkapan kerja dalam kondisi terstandar. Perusahaan juga turut memperhatikan ekosistem di lingkungan sekitar sebagai bagian tujuan Perusahaan.

HUBUNGAN DENGAN DEBITUR

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, adakalanya Perusahaan memberikan sumber dana kepada mitra kerja di lingkungan Perusahaan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah, melalui:

1. Bantuan Modal Usaha untuk memajukan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah setelah proses evaluasi proposal pengajuan.
2. Meminta imbal jasa (bunga) atas bantuan modal yang telah diberikan dengan besaran sesuai perjanjian.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK

Jika terjadi pelanggaran terhadap komitmen etika dan perilaku dapat diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK

Hingga 31 Desember 2018, tercatat sebanyak 206 pelanggaran kode etik dengan detail pelanggaran dan proses penindakan sebagai berikut:

LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK 2018

NO.	KETERANGAN	DALAM PROSES	SELESAI 2018
1.	PHK	-	-
2.	Disiplin Ringan	-	193
3.	Disiplin Sedang	-	-
4.	Disiplin Berat	-	13



PERKARA PENTING PERUSAHAAN DAN GRUP 2018

Di tahun 2018, Perusahaan menghadapi 5 perkara hukum dengan rincian sebagai berikut:

PERKARA PENTING 2018

NO.	POKOK PERKARA	INFORMASI PERKARA	STATUS PENYELESAIAN PERKARA
1.	Perkara Tata Usaha Negara No. Register 273/G/201/2017PTUN-JKT dengan Sinar Centra Cipta (PT SCC) di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan sengketa Kegiatan reklamasi lahan 22.0198 hektar.	Perusahaan sebagai Turut Tergugat	PT SCC mengajukan upaya hukum banding.
2.	Perkara Perdata No. Register 865/PDT.G/2017/ PN.SBY oleh Wawan Syarwani bahwa Perusahaan sebagai tergugat tidak memiliki wewenang untuk melakukan pungutan pemasukan tanah HPL.	Perusahaan sebagai Tergugat	Perusahaan mengajukan upaya hukum banding.
3.	Perkara Perdata No. Register 315/PDT.G/2018/ PM.SBY oleh Ardiansyah dkk, bahwa Perusahaan sebagai tergugat tidak memberikan hak milik atau tidak memberikan rekomendasi peralihan tanah HPL menjadi hak milik.	Perusahaan sebagai Tergugat	Pihak Penggugat mengajukan banding.
4.	Perkara Perdata No. Register 553/PDT.G/2018/ PN.SBY oleh Ir. H. Irmain bahwa Perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pungutan pemasukan tanah HPL.	Perusahaan sebagai Tergugat	Proses persidangan sedang berlangsung di tahap Pemeriksaan Ahli.
5.	Perkara perdata No. Register 599/PDT.G/2018/ PN.SBY oleh PT Surya Segara Safety Marine, bahwa Perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pungutan pemasukan tanah HPL.	Perusahaan sebagai Tergugat	Proses persidangan sedang berlangsung di tahap Pembuktian.

RISIKO ATAS PERKARA YANG DI HADAPI

Perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Perusahaan di tahun 2018 secara umum tidak berdampak/memberikan risiko kepada kondisi kelangsungan Perusahaan.

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN ENTITAS

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana, sehingga data mengenai sanksi administrasi terhadap Dewan Komisaris, Direksi, dan Entitas tidak dapat disajikan karena tidak terdapat kondisi dan data tersebut.



PEMENUHAN ASPEK KEPATUHAN

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dalam meminimalkan potensi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan telah melakukan beberapa upaya pencegahan meliputi:

1. Informasi ketentuan Etika Kerja dan Etika bisnis seluruh Insan Pelindo III agar terhindar dari perilaku penyimpangan, khususnya tindak pidana korupsi, dalam Kode Etik Perusahaan yang disahkan melalui Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan Pelindo III.
2. Ketentuan mengenai kebijakan gratifikasi yang menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang disahkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan.
3. Pengawasan tindak pidana korupsi pejabat di lingkungan Perusahaan melalui mekanisme Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Instruksi Perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tanggal 9 September 2009 juncto Peraturan Direksi No. PER.28/HK.03/P.III-2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pelindo III.

Dengan diberlakukannya 3 mekanisme pencegahan tersebut, sepanjang 2018 Perusahaan telah mampu mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi di lingkungan Pelindo III. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan perkara hukum yang melibatkan Perusahaan untuk jenis kasus tindak pidana korupsi yang tercatat nihil.

PAKTA INTEGRITAS

Seluruh Insan Pelindo III senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada Kode Etik Perusahaan dan regulasi yang berlaku. Sebagai wujud komitmen penerapan Kode Etik Perusahaan, Insan Pelindo III diwajibkan menandatangani Pakta Integritas di setiap tahunnya.

PENCEGAHAN PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Dengan menempatkan komitmen yang besar dalam pemenuhan seluruh prinsip-prinsip GCG, Perusahaan berupaya sebaik mungkin melakukan pencegahan dan meminimalisasi terjadinya praktik Bad Corporate Governance dengan membentuk kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, Perusahaan mengadopsi dan melakukan internalisasi terhadap beberapa regulasi yang berlaku secara umum.

KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN STATEMENT OF CORPORATE INTENT

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Perusahaan juga diimplementasikan Perusahaan dalam bentuk pemaparan rencana dan target Perusahaan di masa depan (RKAP dan publikasi Statement of Corporate Intent) dengan melibatkan atau tidak melibatkan analisis dalam pelaksanaannya. Kegiatan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau publikasi Statement of Corporate Intent kepada Pemegang Saham dilaksanakan melalui sarana RUPS maupun dalam kesempatan lainnya.

Di tahun 2018, Perusahaan melaksanakan kegiatan komunikasi kepada Pemegang Saham mengenai analisis kinerja usaha sepanjang tahun buku dan rencana bisnis serta publikasi Statement of Corporate Intent pada tanggal 23 Januari 2018.

PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP PAJAK

Perusahaan senantiasa memenuhi aturan Perundang-Undangan dalam hal kontribusi pajak penghasilan atas kegiatan jasa usaha kepelabuhanan. Acuan kepatuhan Perusahaan terhadap pajak yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Kepatuhan Perusahaan terhadap pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi Perusahaan dalam membangun negara.

INFORMASI KEPATUHAN PAJAK 2018

Sepanjang 2018, tidak terdapat teguran yang bersifat ketidakpatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak yang ditujukan kepada Perusahaan.



LAPORAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Perusahaan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan berpedoman pada Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL). Perusahaan selaku pemberi kerja melakukan pemantauan terhadap kontraktor pelaksana yang dipekerjakan untuk mematuhi standar lingkungan yang berlaku guna meminimalisasi terjadinya aktivitas pencemaran. Terkait dengan laporan pencemaran lingkungan, pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap hal tersebut adalah dari pihak kontraktor pelaksana. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki laporan terkait pencemaran lingkungan.

LAPORAN PERKARA PENTING YANG TIDAK DIJABARKAN

Informasi terkait perkara penting Perusahaan telah dijabarkan secara lengkap dalam pembahasan Perkara Penting dalam bab ini. Informasi yang disajikan menampilkan seluruh rangkuman atas perkara maupun gugatan yang dihadapi Perusahaan sepanjang 2018.

KASUS TERKAIT BURUH DAN KARYAWAN

Sepanjang 2018, tidak tercatat adanya kasus yang melibatkan Perusahaan dengan buruh atau karyawan Perusahaan. Rekapitulasi perkara dan gugatan baik yang dilakukan dan/atau ditujukan kepada Perusahaan telah dijabarkan dalam pembahasan Informasi Perkara Penting dalam bab ini.

INFORMASI KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Penyajian materi dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah merujuk pada parameter yang berlaku seperti kriteria Annual Report Award (ARA), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 20/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

KESESUAIAN LAPORAN TAHUNAN HARDCOPY DAN SOFTCOPY

Perusahaan menjamin bahwa isi Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy dan softcopy telah sesuai dan tidak terdapat adanya perbedaan.





MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

PRINSIP DAN KEBIJAKAN

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) melalui Peraturan Direksi No. PER.69/LG.0202/P.III-2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan diperbarui oleh Perubahan Sispro No. PER.001/LG.0202/HOFC-2018 tanggal 17 April 2018 turut serta mendukung implementasi GCG (Good Corporate Governance) dengan menerapkan prinsip:

1. Efisien, menggunakan dana dan sumber daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2. Efektif, sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi Perusahaan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.
3. Terbuka dan Bersaing, harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan memberikan persaingan yang sehat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi penyedia serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil tidak diskriminatif, memberikan perlakuan dan ketentuan yang sama bagi semua calon penyedia.
6. Akuntabel, mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas Perusahaan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Selain hal-hal tersebut di atas, Perusahaan juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh prinsip kehati-hatian (asas prudensial), yakni memperhitungkan dampak risiko yang terkecil bagi Perusahaan.

UKPBJ Perusahaan sudah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan proses bisnis pengadaan barang/jasa yang berlaku melalui situs eproc.pelindo.co.id.

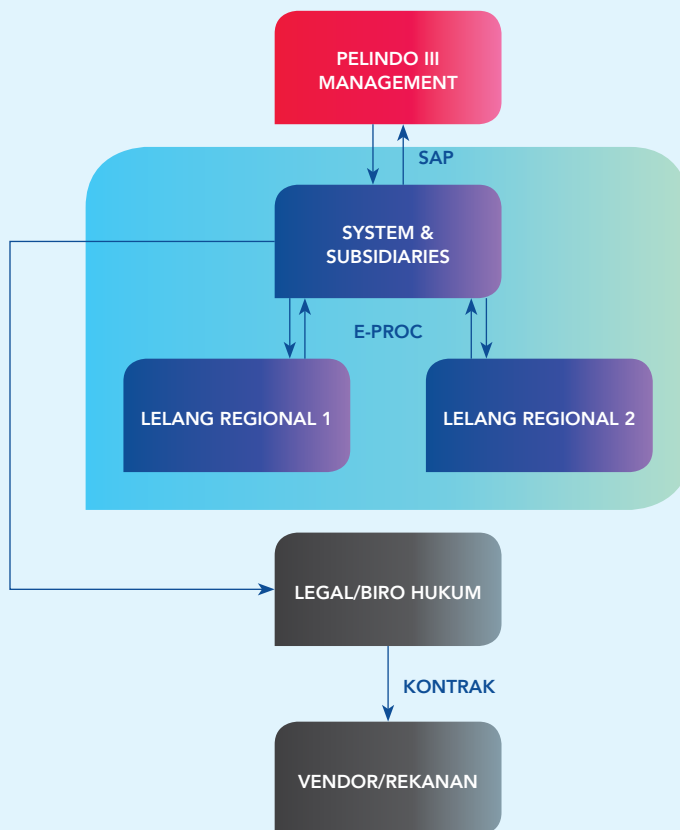
E-procurement memfasilitasi semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada database eproc, serta membuka kesempatan mendaftar yang seluas-luasnya kepada seluruh penyedia yang belum terdapat pada Daftar Rekanan Perusahaan (DRP) dengan syarat dan ketentuan yang sama. Aplikasi ini juga telah lulus sertifikasi ISO 27001 semenjak tahun 2018.

PROSEDUR DAN TATA CARA

Panitia Pengadaan/UKPBJ mempunyai ruang lingkup, wewenang, dan tanggung jawab, seperti gambar di bawah ini:



PROSEDUR PENGADAAN



PEMILIHAN VENDOR

Vendor yang diikutsertakan dalam pelelangan harus terdaftar dan tervalidasi dalam aplikasi E-Procurement Perusahaan, yang otomatis tersimpan dalam database sehingga mempermudah dalam pemilihan vendor sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Dalam proses pelelangan, penawaran vendor dievaluasi dan dinegoisasi secara elektronik sebagai upaya efisiensi waktu dan biaya.

EVALUASI KEGIATAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENGADAAN

Evaluasi kegiatan dilakukan berkala setiap bulan sekali dengan membahas hasil kinerja, tata cara, dan sispro pelelangan itu sendiri; dengan melihat data pada bulan sebelumnya sebagai acuan tren proses pelelangan.

Dari hasil kinerja tahun 2017 UKPBJ telah melelangkan 1.751 pekerjaan dan berhasil melakukan efisiensi sebesar 13% budget atau Rp584.631.915.367. Pada tahun 2018 UKPBJ telah melelangkan 2.029 pekerjaan dan berhasil melakukan efisiensi sebesar 8% budget atau Rp115.503.132.109. Penurunan saving ini karena Pelindo III semakin baik dalam penyusunan budget.

Aplikasi E-Procurement mengalami pengembangan berkelanjutan. Untuk tahun 2019 akan dirilis 2 modul baru, yaitu e-Gateway dan m-Procurement. Modul e-Gateway yang merupakan aplikasi berbasis website sebagai interface antara SAP modul MM dan e-Procurement sehingga aplikasi SAP dapat dibuka di mana saja. Sedangkan m-Procurement merupakan aplikasi berbasis mobile yang merupakan e-Commerce DRP Pelindo III dimana user pegawai dapat melakukan pembelian langsung di merchant/toko daring dan secara otomatis menghasilkan Purchase Request (PR) dan Purchase Order (PO).

Rencana pengembangan SDM Unit Pengadaan diisi dengan sertifikasi dan pelatihan untuk staf pengadaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat pemahaman tentang pengadaan.



KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Perusahaan, Pelindo III bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan pedoman Gratifikasi. Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi oleh Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Ketua Umum SPPI III yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK pada tanggal 12 Maret 2014. Tindak lanjut dari penandatanganan komitmen tersebut adalah dilakukannya workshop penyusunan aturan gratifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 November 2014 bekerja sama dengan KPK serta dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pelindo III.

Agar pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pelindo III dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka terdapat pedoman Peraturan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan.

Mengacu pada peraturan Direksi tersebut maka dibentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan, ditetapkan bahwa Sekretaris Perusahaan menjadi koordinator pelaksanaan pelaporan Pegawai Perusahaan yang menerima gratifikasi.

Tugas dan Tanggung Jawab terkait pelaksanaan pelaporan gratifikasi adalah:

1. Menyosialisasikan dan memublikasikan program pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi dari Insan Pelindo III yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
3. Menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk penetapannya;
4. Meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan KPK untuk mendapat penetapan status dari penerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan oleh KPK;
5. Menindaklanjuti rekomendasi KPK atas penetapan status gratifikasi;
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari Insan Pelindo III;
7. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi; dan
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi dengan KPK.

KATEGORI GRATIFIKASI

1. GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

Adalah penerimaan gratifikasi sehubungan dengan jabatan sebagai Insan Pelindo III dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

2. GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Adalah penerimaan gratifikasi dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan Pelindo III meraih prestasi tertentu.

3. GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Adalah penerimaan gratifikasi yang diterima Insan Pelindo III dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai wakil Perusahaan.

MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI

Penyampaian laporan dapat melalui:

Sekretaris Perusahaan

Up. Unit Pengendalian Gratifikasi

Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya, 60165

Website: gratifikasi.pelindo.co.id

Surel: lapor.gratifikasi@pelindo.co.id

Telepon/WA: 08113484333

PENANGANAN PENGADUAN GRATIFIKASI

Segala bentuk penerimaan atau penolakan gratifikasi oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dicatat dalam laporan dan diserahkan kepada KPK. Dalam tahun 2018 terdapat penerimaan sebanyak 5 laporan.

LAPORAN GRATIFIKASI 2018

Sepanjang 2018, tercatat sebanyak 5 pemberian gratifikasi yang diterima pegawai Perusahaan baik dalam jajaran Dewan Komisaris, Direksi, General Manajer hingga staf. Uraian mengenai gratifikasi yang diterima disajikan dalam tabel di bawah ini:

**PENERIMAAN GRATIFIKASI 2018**

NO.	NAMA PENERIMA	PEMBERI	TEMPAT & WAKTU PENERIMAAN	BENTUK GRATIFIKASI	JUMLAH	ESTIMASI HARGA SATUAN	NILAI GRATIFIKASI	KETERANGAN
1.	Widyaswendra, SM Hukum	Ibrahim Sjarief Assegaf, Lawyers	Tempat: Perwakilan Pelindo III di Jakarta Tanggal: 8 Juni 2018 Waktu: 08.30 WIB	Kue Tart Tart Cake	1 Buah	Rp500.000	Rp500.000	Diserahkan ke Masjid Tarihuniyyah Jakarta 8 Juni 2018
2.	Karina Rindang Trapsilasiwi, Pegawai Pelindo III Pelindo III Employee	PT SMC	Tempat: Rumah Tanggal : - Waktu: -	Parcel	1 Paket	Rp500.000	Rp500.000	Diserahkan ke keluarga yang membutuhkan
3.	Husninalul Ghassani, Sekretaris Perusahaan PT PHC (Anak Perusahaan Pelindo III)	AM & Partner	Tempat: PT PHC Tanggal: 1 Juni 2018 Waktu : -	Parcel	1 Paket	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Diserahkan ke Panti Asuhan ABA MUCHSIN Surabaya 11 Juni 2018
4.	Husein Latief, Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dr. Jamin Basuki, Direktur Utama PT Tesco Indomaritim	Tempat: Rumah Tanggal: 8 Juni 2018 Waktu: 13.00 WIB	Parcel	1 Paket	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Diserahkan ke Masjid Jami' Tarihuniyyah Jakarta 22 Juni 2018
5.	Doso Agung, Direktur Utama President Director	Herman Djuhar, PT Indofood Sukses Makmur	Tempat: Kantor Tanggal: 23 Oktober 2018 Waktu: 13.00 WIB	Roti Gandum	2 Bungkus	Rp20.000	Rp40.000	Diserahkan ke Masjid Baitul Hakam Surabaya 23 Oktober 2018



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta untuk memperkuat penerapan praktik GCG, Perusahaan menerapkan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System-WBS). WBS adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri. WBS digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Pelindo III dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai penguatan perangkat WBS yang sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk terus menyempurnakan implementasi GCG, Perusahaan telah memiliki Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) di Lingkungan Pelindo III yang telah disahkan dalam melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. PER.78/HK.03/P.III-2015.

PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pelaporan pelanggaran ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP) sesuai Surat Keputusan Direksi No. PER.78/HK.03/P.III-2015 tanggal 1 Oktober 2015.

RUANG LINGKUP PENGADUAN

Ruang lingkup pengaduan yang dapat disampaikan pada WBS meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran Peraturan Perusahaan;
2. Pelanggaran Kode Etik Perusahaan;
3. Penyalahgunaan kewenangan jabatan;
4. Tindakan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan Perusahaan;
5. Kecurangan/penggelapan/pencurian aset-aset Perusahaan;
6. Pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Perusahaan memberikan perlindungan terhadap pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme WBS. Kebijakan perlindungan terhadap pelapor, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan;

2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun;
3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

Selain perlindungan di atas, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum. Diharapkan, dengan adanya jaminan perlindungan ini, akan mendorong setiap Insan Pelindo III dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor dan keluarganya.

MEDIA PELAPORAN

Media Pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan meliputi berbagai media sebagai berikut:

Surat dengan alamat: PO BOX 1128

Fax: 031-3291291

Surel: timwbs@pelindo.co.id

MEKANISME PENGADUAN

Mekanisme pengaduan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan pelapor diterima melalui media sebagaimana dalam Pasal 4 dan dicatat dalam buku pengaduan oleh TTPP.
2. Dalam hal pelaporan dilakukan melalui surel atau faksimile, bukti-bukti pengaduan disampaikan setelah dinyatakan perlu ditindaklanjuti.
3. Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas Pelapor yaitu nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk memudahkan tindak lanjut.
4. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap diproses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan.
5. TTPP mengadministrasikan dokumen pengaduan yang diatur berdasarkan klasifikasi jenis masalah, unit kerja terlapor, serta urutan waktu pengaduan yang disesuaikan dengan prosedur pengarsipan yang berlaku.
6. TTPP selanjutnya melakukan verifikasi/penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor untuk menentukan apakah pengaduan yang disampaikan pelapor sudah sesuai atau memenuhi syarat/kriteria pengaduan.

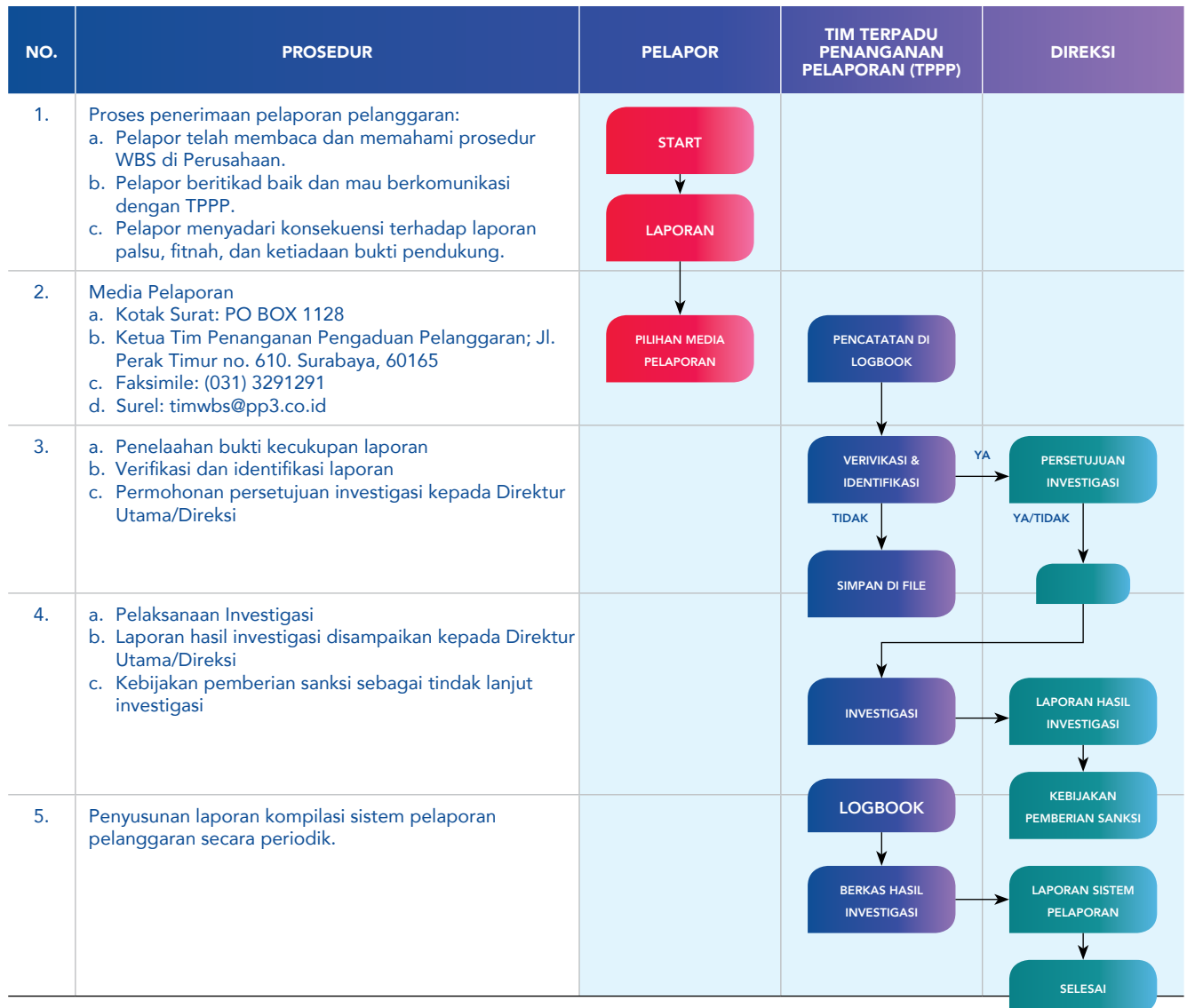


7. TTPP selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi/ penelitian dan identifikasi dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Merumuskan inti masalah yang diajukan;
 - b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang berkaitan dengan materi pengaduan yang diterima;
 - d. Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan.
8. Apabila pengaduan telah memenuhi syarat, maka TTPP melaporkan ke Direktur Utama atau Direktur lainnya untuk mendapatkan persetujuan dilakukannya investigasi.
9. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka TTPP tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam file berkas pengaduan.
10. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dilakukan tindak lanjut terhadap laporan pengaduan adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama, apabila yang menjadi terlapor adalah Pegawai/Direktur lainnya/Komisaris Perusahaan dan/ atau Pegawai Perusahaan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi, serta Personil lainnya yang bekerja untuk dan atas nama Pelindo III;
 - b. Direktur lainnya, apabila yang menjadi terlapor adalah Direktur Utama.
11. Terhadap pengaduan yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Utama atau Direktur lainnya, TTPP melakukan tindak lanjut sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
12. Teknik investigasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan tim TTPP dengan prinsip-prinsip proposional dan sebanding atas materi yang dilaporkan.
13. Selama proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran, terlapor memiliki hak-hak yang meliputi:
 - a. Mendapatkan pemberitahuan dengan jelas tentang maksud pemanggilan;
 - b. Memberikan keterangan secara bebas;
 - c. Mengajukan saksi dan bukti-bukti guna memberikan keterangan.
14. Hasil investigasi dituangkan dalam laporan hasil investigasi yang disusun secara sistematis, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan yang dilengkapi dengan data pendukung dan saran tindak lanjut.
15. Hasil investigasi yang telah dibahas dan disepakati bersama tim TTPP disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi investigasi.





FLOWCHART SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN



SOSIALISASI DAN EVALUASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan melaksanakan sosialisasi Whistleblowing System secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Pelindo III dan secara berkala akan melaksanakan pemutakhiran serta penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Sosialisasi ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi penerapan GCG, publikasi melalui intranet, dan media komunikasi lainnya.

PELAPORAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT

Di tahun 2018, tidak terdapat laporan pelanggaran yang diterima WBS atau tercatat nihil.



LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pelindo III mewajibkan pejabat sampai satu tingkat di bawah Direksi untuk membuat dan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Koordinator pelaksana untuk menangani Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Perusahaan yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia. Penentuan tugas ini mengacu pada Keputusan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tanggal 9 September 2009 juncto Peraturan Direksi No. PER.28/HK.03/P.III-2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN di lingkungan Pelindo III.

DASAR HUKUM

Dasar aturan pengaturan LHKPN di lingkungan Pelindo III terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

MEKANISME PELAPORAN

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 28 tahun 1999 dimana penyelenggara berkewajiban untuk:

1. Diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat.
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
3. Mengumumkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
4. Mengumumkan harta kekayaannya.

LHKPN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NO.	NAMA	JABATAN	PELAPORAN TERAKHIR	
			PERIODE LAPOR	TANGGAL KIRIM
1.	IG. N. Ashkara Danadiputra	Direktur Utama	2017	28 Maret 2018
2.	Mohammad Iqbal	Direktur Operasional dan Komersial	2017	20 Maret 2018
3.	Husein Latief	Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	2017	29 Maret 2018
4.	Toto Heli Yanto	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	2017	27 Maret 2018
5.	U. Saefudin Noer	Direktur Keuangan	2017	29 Maret 2018

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LHKPN 2018

NO.	TAHUN	WAJIB LAPOR LHKPN	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR
1.	2014	497	392	105
2.	2015	518	439	79
3.	2016	292	213	79
4.	2017	188	170	18



AKSES DAN INFORMASI PERUSAHAAN

MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

Dalam rangka mendukung komitmen penerapan keterbukaan informasi, Pelindo III menyediakan berbagai akses informasi melalui sarana dan media sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Situs web:
www.pelindo.co.id | 5. YouTube:
pelindo III |
| 2. Twitter:
@pelindo3 | 6. Contact Center:
(031) 3298631-37 |
| 3. Facebook:
pelindo III | 7. Majalah Internal:
Majalah Dermaga
(www.majalahdermaga.com) |
| 4. Instagram:
@pelindo3 | |





06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN







TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai Perusahaan yang tumbuh di tengah publik, Pelindo III menyadari bahwa kesejahteraan masyarakat dan lingkungan terutama yang berada di sekitar kegiatan operasional merupakan tanggung jawab yang harus diemban bersama. Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berlandaskan pada 3 aspek utama, yakni masyarakat (people), lingkungan (planet), dan keuntungan (profit). Keseluruhan aspek tersebut dijalankan sebagai bagian dari proses bisnis Perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat konkrit bagi Pemangku Kepentingan Perusahaan.

Komitmen Pelindo III dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya diwujudkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan pihak masyarakat di sekitar Perusahaan. Program yang dijalankan di antaranya berbentuk bantuan permodalan bagi pengusaha kecil dengan pinjaman berbunga rendah, pembiayaan seperti pelatihan dan mengikutsertakan Mitra Binaan pada pameran berskala nasional maupun internasional yang bertujuan untuk memajukan usaha Mitra Binaan, sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh publik maupun penyempurnaan infrastruktur yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.

PKBL yang dijalankan oleh Perusahaan pada praktiknya lebih menekankan pada pembangunan sosial dan mengembangkan potensi masyarakat yang kemudian diarahkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan. Perusahaan berpandangan hal ini dapat menciptakan peluang-peluang usaha, menyerap tenaga kerja, serta menata lingkungan dengan lebih baik, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya dan dukungan masyarakat atas kehadiran Perusahaan.

KEBIJAKAN PROGRAM CSR DAN PKBL

Pedoman pelaksanaan program CSR dan PKBL telah disusun dan ditetapkan guna mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kebijakan Perusahaan tersebut tertuang dalam Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.01/ML.01/P.III-2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Lingkungan Pelindo III.

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM

Komitmen Perusahaan tersebut sejalan dan mengacu pada ketentuan Pemerintah terkait tanggung jawab sosial Perusahaan dan PKBL, yaitu:

1. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. UU No. 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang BUMN.
3. PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/ MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.
6. Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, maka Pelindo III sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan sebagai acuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap kegiatan operasional Perusahaan.

Untuk memastikan Perusahaan selalu menjalankan kegiatan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, Perusahaan melakukan sertifikasi dan audit Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015). Kegiatan audit yang dilakukan oleh Perusahaan terdiri dari audit eksternal dan internal yang dilakukan setiap tahun. Audit eksternal dilakukan oleh Badan Sertifikasi selaku perusahaan yang mengeluarkan sertifikat ISO 14001:2015 bagi Perusahaan, sedangkan audit internal dilakukan oleh pihak manajemen Perusahaan.

Pelindo III juga telah memperoleh Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 sesuai dengan SNI 19-14001-2005 dengan Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 54/KEP/BSN/05/2002 dan ISO 14001:2015 yang mengacu pada Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 282/KEP/BSN/12/2015. Saat ini ISO 14001:2015 telah diterapkan pada 9 Cabang Pelabuhan dan 1 Unit Kantor Pusat.

SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (ISO 14001:2015)

NO.	CABANG	VERSI	NO. SERTIFIKAT	BADAN SERTIFIKASI	MASA BERLAKU
1.	Kantor Pusat	2015	01 104 1535145/01	TUV Rheinland	28 Januari 2018 s.d 29 Februari 2019
2.	Tanjung Perak	2015	01 104 1535145/02	TUV Rheinland	
3.	Banjarmasin	2015	01 104 1535145/03	TUV Rheinland	
4.	Tanjung Emas	2015	01 104 1535145/04	TUV Rheinland	
5.	TPKS	2015	01 104 1535145/05	TUV Rheinland	
6.	Tanjung Intan	2015	01 104 1535145/06	TUV Rheinland	
7.	Kotabaru	2015	01 104 1535145/07	TUV Rheinland	
8.	Gresik	2015	01 104 1535145/08	TUV Rheinland	
9.	Benoa	2015	01 104 1535145/09	TUV Rheinland	
10.	Tenau Kupang	2015	01 104 1535145/10	TUV Rheinland	

PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP DALAM INTERNAL PERUSAHAAN

Komitmen Perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup diwujudkan melalui banyak program, di antaranya program paperless and green port. Paperless merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Perusahaan untuk mengurangi penggunaan kertas, melalui optimalisasi implementasi teknologi informasi. Seiring dengan upaya untuk menerapkan dan mendukung program green port, Perusahaan telah menggunakan mesin dan peralatan bongkar muat yang lebih ramah lingkungan (elektrifikasi) di beberapa Cabang Pelabuhan.

Salah satu upaya lain untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam kegiatan operasional, Perusahaan melakukan upaya pengurangan emisi gas buang dari kapal dan peralatan apung lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil. Sebagai alternatif daya, Perusahaan menyediakan supply listrik darat atau yang dikenal dengan shore plug connection pada saat kapal standby di tambatan. Pelindo III melalui program bina lingkungan juga berkomitmen untuk turut berpartisipasi mengurangi dampak pemanasan global yang lebih buruk terhadap bumi. Upaya ini ditempuh dengan melakukan kegiatan berupa program penghijauan di sekitar pelabuhan dan pesisir pantai.

KEGIATAN CSR BIDANG LINGKUNGAN 2018

TARGET

Di tahun 2018, Pelindo III telah menyusun target/rencana kegiatan CSR di bidang lingkungan. Target tersebut antara lain adalah:

1. Kegiatan pelestarian alam berupa pembangunan ruang terbuka hijau;
2. Kegiatan bersih sungai Lamong;
3. Pembangunan Bank Sampah.

REALISASI DAN DAMPAK KUANTITATIF

Pelindo III telah berhasil merealisasikan setiap target/rencana kegiatan CSR di bidang lingkungan yang telah ditetapkan manajemen Perusahaan di tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan telah direalisasikannya ruang terbuka hijau di daerah Kumai pada tanggal 14 Agustus 2018; dilaksanakannya kegiatan bersih sungai Lamong tanggal 12 Februari 2018; serta dibangunnya beberapa Bank Sampah di Gresik dan Kampung Hidroponik Simokalangan yang merupakan kampung binaan pada tanggal 1 Juli 2018. Beberapa program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup di sekitar Perusahaan.

PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN

Komitmen Perusahaan untuk terus mampu menjadi warga korporat yang baik ditunjukkan melalui berbagai penghargaan di bidang lingkungan yang diterima sepanjang 3 tahun terakhir:

PENGHARGAAN BIDANG LINGKUNGAN DI TIGA TAHUN TERAKHIR

NO.	PENGHARGAAN	TAHUN
1.	Pelindo III - Kategori BUMN Perhubungan Laut Pelaksana PKBL/CSR Pengembang UMKM Terbaik dari Universitas Sebelas Maret.	2016
2.	Pelindo III - Kategori BUMN Perhubungan Laut Pelaksana PKBL/CSR Pengembang UMKM Terbaik dari Universitas Sebelas Maret.	2017
3.	Penghargaan Pemerintah Kota Mojokerto atas Program CSR di Kota Mojokerto Tahun 2018	2018

MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

1. Apabila masyarakat menemukan keluhan yang terkait dengan Perusahaan, maka dapat menyampaikan keluhan tersebut melalui Humas Perusahaan.
2. Jika terkait dengan pelanggan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. User Internal atau user eksternal menyampaikan suara melalui salah satu media komunikasi.
 - b. Bagi user internal dan petugas gateway akan menerima dan mencatat suara pelanggan ke dalam Customer Portal.

- c. TIM CRO melakukan pengklasifikasian suara pelanggan untuk kemudian di distribusikan kepada unit kerja terkait.
- d. Unit kerja terkait segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas suara pelanggan.
- e. Cabang segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas suara pelanggan.
- f. Kantor pusat segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas suara pelanggan.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

KETENAGAKERJAAN

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.03/Men/1982 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
14. Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

PRINSIP-PRINSIP K3 PERUSAHAAN

Prinsip penerapan K3 di Perusahaan adalah "Zero Tolerance For Accident" yang bermakna bahwa Pelindo III berkomitmen untuk tidak menerima terjadinya insiden dengan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja sesuai kaidah-kaidah K3; serta dalam pengelolaan K3 di unit kerja diberlakukan sistem reward dan punishment ke seluruh Insan Pelindo III.

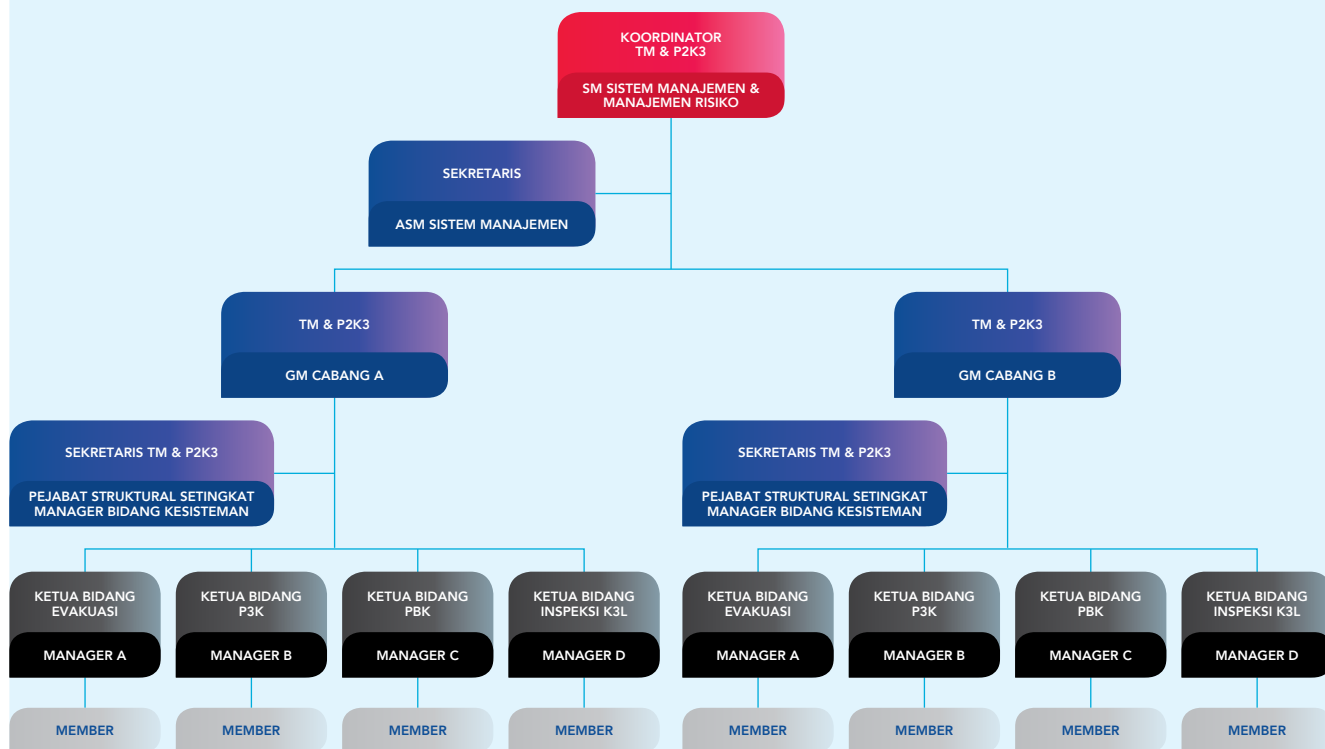
ORGAN PENGELOLA K3 PERUSAHAAN

Sebagai persyaratan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) maka wajib dibentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang menjadi wadah antara Perusahaan dan pegawai untuk bersama-sama menerapkan K3. Penanggung jawab penerapan SMK3 adalah pimpinan puncak Perusahaan, yaitu SM Umum/ Kepala Kantor Pusat untuk unit Kantor Pusat, dan General Manager untuk Pelabuhan Cabang/UPP. P2K3 merupakan gugus tugas fungsional yang tugas pokoknya memberikan saran dan pertimbangan terkait permasalahan K3 kepada manajemen Perusahaan, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai bentuk integrasi, seluruh sistem manajemen telah diterapkan di Perusahaan, yaitu meliputi Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Keamanan dan Lingkungan (Sistem Manajemen MK4L). Struktur P2K3 digabungkan dengan struktur Top Management sebagai penanggung jawab penerapan sistem yang dimaksud.

Penerapan Sistem Manajemen MK4L di Kantor Pusat menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja Kantor Pusat yang dikoordinir oleh unit Sistem Manajemen dibawah pimpinan koordinator Top Management dan Panitia Pembina Kesehatan dan Kesehatan Kerja (TM dan P2K3) yang melekat pada jabatan SM Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko. Pada Cabang/UPP Penerapan Sistem Manajemen MK4L menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja Cabang yang dikoordinir oleh Unit Kesisteman dibawah pimpinan TM dan P2K3 yang melekat pada General Manager Cabang terkait. Struktur TM dan P2K3 dapat digambarkan sesuai dengan bagan berikut:



STRUKTUR TM DAN P2K3 PADA CABANG PELABUHAN



STANDAR YANG DIMILIKI

Pelindo III berkomitmen untuk melaksanakan secara konsisten pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan efisien dengan cara:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Minimalisasi terjadinya penyakit akibat kerja dan nihilnya ancaman keamanan dan kecelakaan kerja;
3. Menumbuhkan kesadaran kerja yang mengutamakan kaidah-kaidah K3;
4. Melibatkan seluruh komponen Perusahaan ikut bertanggung jawab atas terlaksananya program K3 agar tercapainya kinerja usaha yang optimal;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dalam bidang Jasa Kepelabuhanan, terutama yang berkaitan dengan aspek K3.

Dalam rangka pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku, Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan secara aman dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Pelindo III No. PER.91/PM.02/P.III-2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Perusahaan juga menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di 17 Cabang Pelabuhan dan 1 Unit Kantor Pusat di lingkungan Perusahaan. Berikut ini adalah daftar Pelabuhan yang telah menerapkan SMK3 beserta nomor sertifikat dan masa berlakunya:

**SERTIFIKAT SMK3**

NO.	CABANG PELABUHAN	AUDITOR SMK3	NO. SERTIFIKAT	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1.	Tanjung Perak	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
2.	Tanjung Emas	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
3.	Tanjung Intan	Pt Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
4.	Banjarmasin	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
5.	Benoa	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
6.	Tenau Kupang	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
7.	Kotabaru	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
8.	TPKS	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
9.	Gresik	PT Sucofindo Indonesia	No. 168 tahun 2014	14 Mei 2014 s.d. 13 Mei 2017	Dalam Proses Pembaruan
10.	Sampit	PT TUV Rheinland	No. 168 tahun 2014	15 Mei 2014 s.d. 13 Mei 2017	Dalam Proses Pembaruan
11.	Lembar	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
12.	Tanjung Wangi	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 tahun 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018	Dalam Proses Pembaruan
13.	Celukan Bawang	PT TUV Rheinland	No. 143 tahun 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019	
14.	Kumai	PT TUV Rheinland	No. 143 tahun 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019	
15.	Kantor Pusat	PT TUV Rheinland	No. 143 tahun 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019	
16.	Bima	PT TUV Rheinland	No. 201 tahun 2017	14 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020	
17.	Maumere	PT TUV Rheinland	No. 201 tahun 2018	15 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020	
18.	Tanjung Tembaga	PT TUV Rheinland	No. 201 tahun 2019	16 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020	



FASILITAS K3 YANG DIMILIKI

NO.	DATA SARANA DAN PRASARANA K3 (JENIS/KLASIFIKASI, JUMLAH, DAN MASA BERLAKU)	JUMLAH	MASA BERLAKU
A. Peralatan/Mesin/Pesawat/Instalasi Peralatan			
1.	Instalasi Penyalur Petir Gedung A		
	Jenis/Klasifikasi: Instalasi penyalur petir elektrostatis LPI, jumlah arde dan penerima 1, tahanan sebaran R=0.9 Ohm.	1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/148/I/436.6.12/2012 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan uji berkala setiap 2 tahun sekali. Uji berkala terakhir tanggal 7 April 2017 (berlaku hingga 7 April 2019)
2.	Instalasi Penyalur Petir Gedung B		
	Jenis/Klasifikasi: Instalasi penyalur petir air terminal viking V-6, jumlah arde dan penerima 1, tahanan sebaran R=0.65 Ohm.	1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/0134/I/436.6.12/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan uji berkala setiap 2 tahun sekali. Uji berkala terakhir tanggal 7 April 2017 (berlaku hingga 7 April 2019)
3.	Pesawat Angkat Gedung A		
	Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2010, kapasitas 900 Kg, 13 penumpang, tenaga listrik AC.11 KW; 380 V; 21 A.	2 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/1031/III/436.6.12/2011 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 6 April 2018 (berlaku hingga 6 April 2019)
4.	Pesawat Angkat Gedung B		
	Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2013, kapasitas 900 Kg, 13 penumpang, tenaga listrik 5.5 KW/380 V.	2 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/6745/436.6.12/2016 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 6 September 2018 (berlaku hingga 6 September 2019)
5.	Motor Diesel Pembangkit Listrik		
	Jenis/Klasifikasi: Stasioner tahun 2010, daya 1029 KVA, frekuensi 50 Hz, jenis 4 tak, jumlah silinder 12 buah.	1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/4551/436.6.12/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 7 April 2018 (berlaku hingga 7 April 2019)
6.	Penanggulangan kebakaran		
	Box Hydrant di gedung A dan gedung B	11 Unit	
	Tabung APAR di gedung A dan gedung B	61 Unit	
7.	Alat pelindung diri dan perlengkapan K3		
	Rompi paramedik/tanggap darurat, helm paramedik/tanggap darurat		
	Lampu senter, alat bantu pernafasan, kotak P3K, police line, respirator.		
B. Pelayanan Kesehatan Kerja			
	Pemeriksaan kesehatan medical checkup Pejabat Struktural Kantor Pusat No. KP.0606/102/P.III-2015.		



NO.	DATA SARANA DAN PRASARANA K3 (JENIS/KLASIFIKASI, JUMLAH, DAN MASA BERLAKU)	JUMLAH	MASA BERLAKU
C. Fasilitas Kesejahteraan (Kantin/Ruang Makan, Tempat Ibadah, Rekreasi, dan lain-lain).			
1.	Disediakan fasilitas kantin/ruang makan di gedung B.		
2.	Disediakan fasilitas tempat ibadah di gedung A lantai 4.		
D. SOP (Standard Operasional Prosedur)			
	Permit/Ijin bekerja bagi mitra kerja di Kantor Pusat berkaitan dengan (bekerja di ketinggian, akses tegangan tinggi, menggali membongkar, by pass sistem dll) masih dalam proses penyelesaian.		
E. Rambu			
	Rambu-rambu sudah dibuat dan ditempatkan baik gedung A dan gedung B.		

KESEMPATAN KERJA YANG SAMA

Pola karir pegawai Pelindo III telah diatur dalam Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.19/KP.0403/P.III-2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penyempurnaan Peraturan Direksi No. PER.88/KP.0403/P.III-2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.26/KP.0403/P.III-2014 tentang Karier Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan. Keberadaan pola karir tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kesempatan pengembangan karir yang sama kepada masing-masing pegawai Pelindo III. Dalam Peraturan Direksi tersebut dijelaskan mengenai penjenjangan karir pegawai Perusahaan berdasarkan pendidikan pegawai dan keahlian pegawai. Selain itu juga dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dalam jabatan untuk kepentingan promosi dan mutasi pegawai.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja K3, Perusahaan telah melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap para karyawan yang dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2018, Perusahaan mengadakan pelatihan K3 dengan rincian sebagai berikut:

TURNOVER KARYAWAN

Turnover karyawan dalam suatu perusahaan dijadikan indikator baik buruknya lingkungan kerja di perusahaan tersebut, semakin kondusif dan nyaman lingkungan kerjanya akan membuat tingkat turnover karyawan cenderung rendah. Pelindo III senantiasa melakukan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terkait remunerasi dan paket benefit bagi karyawan sebagai upaya mengelola tingkat turnover karyawan. Selain hal-hal bersifat materi, membangun budaya kerja Perusahaan juga senantiasa dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi karyawan.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 81 karyawan dengan perincian 13 orang mengundurkan diri, 7 orang meninggal dunia, 50 orang pensiun normal, 2 orang pensiun dini, dan 9 orang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Komitmen Perusahaan dalam menjaga hubungan industrial telah dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017, HK.03/14/P.III-2014, 36/DP.SPPI/IX-2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan Pelindo III.

Pelindo III akan selalu berusaha mengembangkan kualitas SDM, sesuai dengan kebutuhan Visi dan Misi serta program kerja jangka panjang Perusahaan. Perusahaan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, untuk itu segenap Insan Pelindo III akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Perusahaan memiliki komitmen untuk:

1. Memperlakukan Pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja.
2. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Pegawai.
3. Memberikan kesempatan yang setara/adil kepada seluruh Pegawai dalam pengembangan karir dan promosi. (Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 16/2012).
4. Melindungi Pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
5. Memberikan hak kepada Pegawai untuk berserikat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.



6. Memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.
7. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pekerja, secara umum mengikuti peraturan yang berlaku.
8. Menghargai Pegawai sebagai aset utama Perusahaan.
9. Menerapkan sistem reward dan punishment yang mendorong semangat kerja Pegawai.
10. Memberikan kebebasan kepada Pegawai untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan menyadari bahwa Pegawai adalah mitra Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk itu, Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja setiap Tenaga Kerja. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja, serta selalu mengusahakan agar Pekerja memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan selalu memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Komitmen Perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja Pegawai telah dituangkan dalam Peraturan Direksi No. PER.91/PM.02/P.III-2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Melalui keputusan tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Membangun Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagai landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3.
2. Menetapkan dan mengkaji sasaran, melakukan penilaian dan pelaporan kinerja SMK3.
3. Memberikan dukungan penuh terhadap penerapan SMK3 di lingkungan Perusahaan dalam upaya memberikan perlindungan optimal kepada Pegawai dari gangguan dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan.
4. Memastikan pemahaman yang lebih baik oleh Pekerja dan mitra kerja mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan aktivitas Perusahaan.
5. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan SMK3.
6. Menempatkan SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP dan Laporan Tahunan.
7. Menyertakan partisipasi Pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan SMK3.

SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH

Pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 yang dihasilkan Perusahaan dikelola oleh pihak ketiga.

TINGKAT KECELAKAAN KERJA 2018

Informasi mengenai tingkat kecelakaan kerja di Pelindo III selama tahun buku 2018 tersaji dalam tabel berikut:

TINGKAT KECELAKAAN KERJA

KATEGORI KECELAKAAN	2018	2017	UPAYA UNTUK MENGURANGI KECELAKAAN
Ringan	16	7	1. Pelatihan K3
Sedang	0	-	2. Teknik Investigasi Kecelakaan
Berat	0	-	3. Penilaian Risiko dan Perbaikan Berkelanjutan
Meninggal	2	1	4. Perbaikan Sistem dan Prosedur



INSIDEN K3 CABANG PELABUHAN 2018

NO.	CABANG	2018			2017		
		BODILY	FATALITY	PROPERTY	BODILY	FATALITY	PROPERTY
1.	Tanjung Perak	4	0	9	1	0	17
2.	Banjarmasin	0	1	21	0	0	12
3.	Tanjung Emas	0	1	6	0	0	12
4.	TPKS	0	0	17	0	1	9
5.	Gresik	0	0	3	0	0	8
6.	Kotabaru	1	0	0	0	0	0
7.	Tanjung Intan	1	0	3	0	0	5
8.	Tenau Kupang	0	0	0	0	0	2
9.	Benoa	0	0	2	0	0	1
10.	Sampit	0	0	1	0	0	1
11.	Tanjung Wangi	0	0	0	0	0	0
12.	Kumai	0	0	4	0	0	1
13.	Lembar	0	0	1	0	0	0
14.	Tanjung Tembaga	0	0	0	0	0	0
15.	Bima	0	0	1	0	0	0
16.	Celukan Bawang	0	0	0	0	0	0
17.	Maumere	0	0	0	0	0	0
18.	Kantor Pusat	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		6	2	68	1	1	68

Perusahaan telah berupaya untuk mendukung terciptanya Budaya K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan melalui berbagai program, di antaranya:

- Kegiatan yang bersifat, antara lain:
 - Pencanangan Budaya K3 di lingkungan kerja;
 - Pemberian penghargaan K3;
 - Konvensi/Seminar/Lokakarya/Semiloka;
 - Pembentukan tim investigasi kecelakaan kerja;
 - Melaksanakan kegiatan Bulan K3 dengan tema yang sudah ditentukan oleh Pemerintah setiap tahunnya.
- Kegiatan yang bersifat promotif, antara lain:
 - Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul, dan baliho K3;
 - Pameran K3;
 - Sosialisasi dan publikasi K3;
 - Aksi Sosial K3;
 - Cerdas Cermat K3.

- Kegiatan yang bersifat implementatif, antara lain:

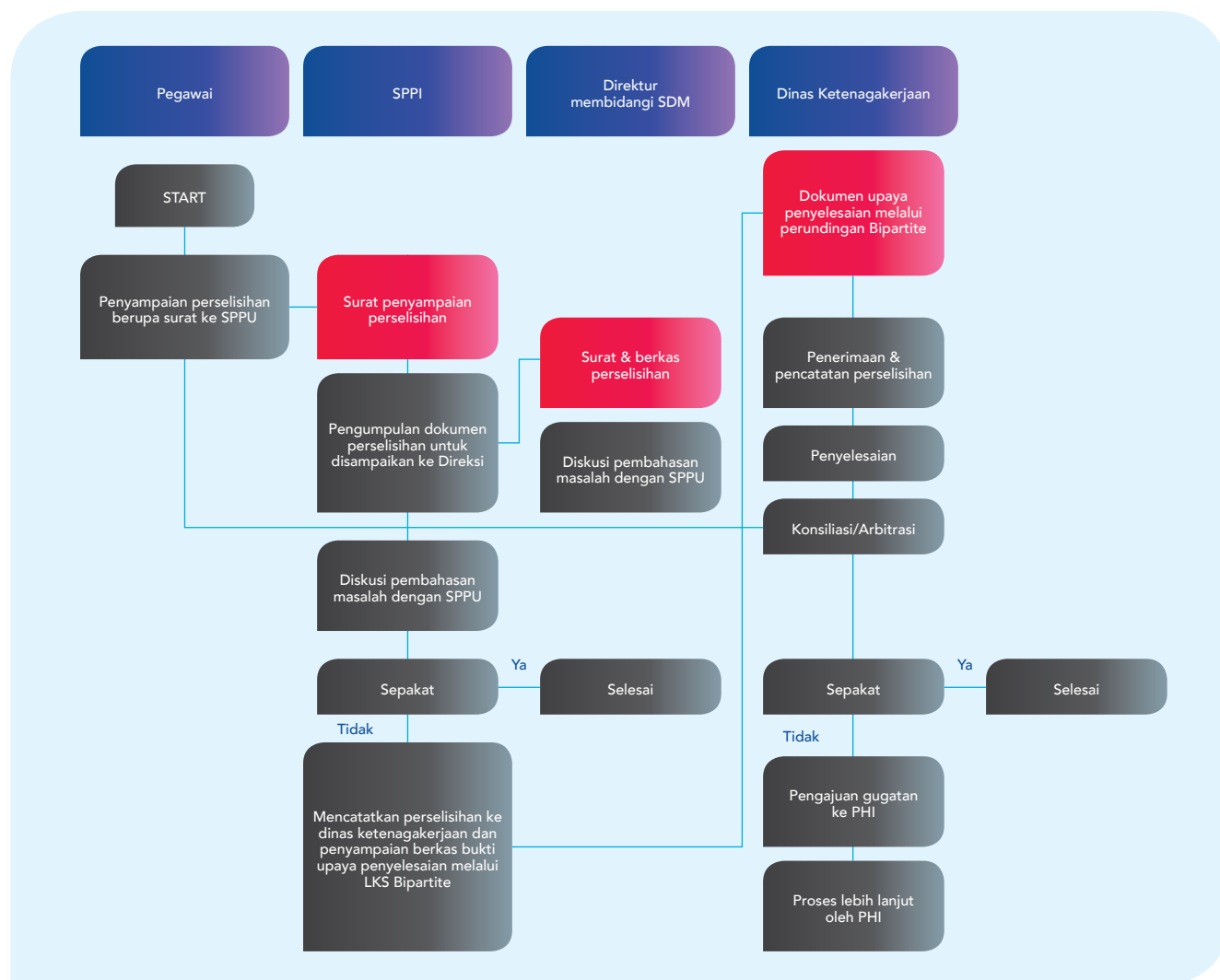
- Penilaian penghargaan K3;
- Pembinaan dan pengujian lisensi;
- Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3;
- Penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja;
- Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
- Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja;
- Operasi tertib di bidang K3.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

Dalam menangani permasalahan di bidang ketenagakerjaan, Pelindo III memiliki mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Alur penyelesaian masalah tersaji melalui bagan di bawah.



ALUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



Pegawai yang hendak melaporkan perselisihan dapat langsung melaporkan ke SPPI dengan membawa surat dan dokumen pendukung lainnya yang nantinya akan dibahas di internal SPPI. Setelah itu hasil pembahasan internal akan diteruskan ke Direktur yang membidangi SDM dan didiskusikan untuk pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartite, setelah Direktur maka segera dilakukan perundingan bipartite dengan pegawai, SPPI dan Direksi/Manajemen. Jika ditemukan kesepakatan maka perselisihan selesai, namun jika tidak maka SPPI/dua belah pihak wajib mencatatkan perselisihan ke instansi yang membidangi ketenagakerjaan beserta dokumen-dokumen lain yang membuktikan bahwa perundingan bipartite telah dilaksanakan.

Langkah selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan konsiliasi atau arbitrase, yang dapat ditentukan oleh pihak terkait (Pegawai/SPPI/Manajemen sebagai wakil Direksi) atau disesuaikan dengan jenis perselisihan yang diperkarakan. Jika diperoleh kesepakatan maka perselisihan dianggap selesai. Namun jika tidak, maka langkah selanjutnya dapat diajukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sebagai BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa kepelabuhanan, Perusahaan memiliki kewajiban untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat sebagaimana maksud dan tujuan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 Ayat 1 Huruf e.

Program Kemitraan adalah program yang dicanangkan pemerintah sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab BUMN terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi tangguh dan mandiri. Penyaluran Program Kemitraan diharapkan dapat membantu Mitra Binaan untuk meningkatkan omzetnya (pro growth), membuka peluang kerja (pro job) bagi masyarakat sekitar sehingga dapat mengentaskan kemiskinan (pro poor), serta mengembangkan wilayah pemasaran produknya hingga ke luar negeri.

Program Bina Lingkungan (BL) dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Pelindo III terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar Perusahaan. Melalui program Bina Lingkungan tersebut, diharapkan masyarakat di sekitar Perusahaan dapat diberdayakan dan dikembangkan menuju kemandirian. Pelindo III juga berharap agar pelaksanaan program tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan corporate image dan opini masyarakat terhadap eksistensi Perusahaan, sehingga dalam jangka panjang dapat tercipta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha dan pengamanan aset Perusahaan.

Komitmen Pelindo III dalam menjalankan PKBL sejalan dan mengacu pada ketentuan Pemerintah terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang BUMN.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

STRUKTUR PENGELOLAAN PKBL

Mengacu pada Peraturan Direksi No. PER.02/OS0101/P.III-2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.111/OS.0101/P.III-2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelindo III Kantor Pusat, unit kerja PKBL melekat pada Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Sumber Daya Manusia.

Hingga tahun 2018, pelaksana kegiatan PKBL di Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

1. Direktur SDM: Toto Heli Yanto
2. Sekretaris Perusahaan: Faruq Hidayat
3. ASP KBL: Soegeng Prayitno
4. Staf: Tjatur Rahman Salfatah, Erfan Aspriandi, Diah Utari, Eka Cahyani, Sugeng Riyadi, dan Luqman Firmansyah

Struktur organisasi untuk cabang-cabang penyalur PKBL telah terlaksana di Cabang Tanjung Intan, sedangkan untuk cabang-cabang penyalur lain masih berbentuk satuan tugas PKBL, dengan penanggungjawab melekat pada struktural unit Keuangan/Umum cabang.

Program Kemitraan, memiliki 9 Cabang Pembina, yaitu:

1. Cabang Kelas Utama: Tanjung Perak.
2. Cabang Kelas Satu: Tanjung Emas, Banjarmasin.
3. Cabang Kelas Dua: Tanjung Intan, Benoa, Tenau Kupang, Sampit.
4. Cabang Kelas Tiga: Lembar, Tanjung Wangi.

Program Bina Lingkungan dilakukan secara tersentralisasi di Kantor Pusat dan pelaksanaan penyalurannya mengutamakan wilayah sekitar Perusahaan termasuk Cabang Pelabuhan.

ROADMAP PKBL 2017-2021

Agar PKBL dapat terlaksana dengan efektif, tepat guna, serta tepat sasaran, Pelindo III menyusun roadmap PKBL untuk tahun 2017-2021 yang tertuang dalam visi dan misi berikut:

VISI:

Mendukung Pembangunan Kawasan Kepentingan Pelabuhan.

MISI:

1. Menciptakan Kawasan Kepentingan Pelabuhan Pelindo III yang Aman, Nyaman dan Tentram.
2. Mendukung Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Pesisir di Sekitar Pelabuhan.
3. Mendukung Pengembangan Pariwisata Pesisir di Sekitar Kawasan Pelabuhan.
4. Mendukung Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Kepentingan Pelabuhan Guna Menjadi Masyarakat yang Sejahtera.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN TAHUN 2018

Kegiatan PKBL yang telah dilaksanakan oleh Pelindo III selama tahun 2018 adalah:

1. Pelaksanaan penyaluran pinjaman Program Kemitraan kepada 240 mitra binaan di 7 terminal penyalur;
2. Mengikutsertakan 66 mitra binaan pada 12 pameran untuk membantu pemasaran produk-produk mitra binaan;
3. Bantuan kepada korban bencana alam di Banyuwangi, Banjarnegara, Gunung Lio Brebes, Klaten, Lombok; serta korban bencana tsunami di Palu dan Banten;
4. Pelatihan vokasi las sebanyak 100 orang di 7 Provinsi, sertifikasi Tenaga Kerja Bongkar Muat sebanyak 500 orang di Terminal Tanjung Perak dan Tanjung Emas, Bantuan Taman Baca Masyarakat di 37 titik di seluruh wilayah kerja Perusahaan;

5. Ambulans gratis di Terminal Tanjung Intan dan Kumai, bantuan kesehatan bagi warga kurang mampu, bantuan alat bantu dengar bagi warga kurang mampu, khitanan massal di beberapa Cabang, pemeriksaan gigi gratis di Terminal Banjarmasin;
6. Program pemberdayaan masyarakat Kampung Hidroponik Simokalangan, Kampung Markisa Gresik, dan Kampung Kefir Surabaya;
7. Bantuan pembangunan sarana ibadah di seluruh Cabang; dan
8. Bantuan sembako gratis di seluruh Cabang, elektrifikasi dan bedah rumah bagi warga kurang mampu.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN

Beberapa dampak yang dirasakan masyarakat atas seluruh kegiatan PKBL di atas antara lain:

1. Akses permodalan bagi UKM binaan Pelindo III yang belum bankable;
2. Perluasan pangsa pasar produk-produk mitra binaan;
3. Peningkatan minat baca masyarakat;
4. Kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas ambulans gratis;
5. Peningkatan perekonomian masyarakat pada program kampung binaan Perusahaan;
6. Sarana dan prasarana ibadah masyarakat yang layak; dan
7. Membantu Pemerintah untuk menekan harga kebutuhan pokok serta meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu.

BIAYA/DANA TERSALUR

PENYALURAN PINJAMAN MODAL

Sampai dengan tahun 2018, Pelindo III telah menyalurkan pinjaman kepada 6.615 UMKM senilai Rp272,49 miliar dan tersebar di 7 Provinsi di wilayah kerja Perusahaan.

PENYALURAN PINJAMAN KE MITRA BINAAN 2017-2018

NO.	SEKTOR USAHA MITRA BINAAN	REALISASI S.D 2017		REALISASI S.D 2018	
		JUMLAH MITRA BINAAN	JUMLAH RUPIAH	JUMLAH MITRA BINAAN	JUMLAH RUPIAH
1.	Sektor Usaha Industri	1.284	54.204.416.095	1.404	61.554.416.095
2.	Sektor Usaha Perdagangan	3.393	106.750.582.650	3.557	115.369.582.650
3.	Sektor Usaha Pertanian	78	19.677.500.000	84	19.997.500.000
4.	Sektor Usaha Peternakan	206	5.719.000.000	324	11.099.000.000
5.	Sektor Usaha Perkebunan	20	3.560.000.000	20	3.560.000.000
6.	Sektor Usaha Perikanan	120	2.409.500.000	122	2.449.500.000
7.	Sektor Usaha Jasa	1.243	47.424.900.000	1.313	51.374.900.000
8.	Sektor Lain-lain	31	19.910.039.408	31	19.910.039.408
JUMLAH		6.375	259.655.938.153	6.855	285.314.938.153



BANTUAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Bantuan Program Bina Lingkungan yang mengacu No. PER-02/MBU/7/2017 yang meliputi 7 objek bantuan, yaitu:

1. Bantuan korban bencana alam
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
3. Bantuan peningkatan kesehatan
4. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum
5. Bantuan sarana ibadah
6. Bantuan pelestarian alam
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

Realisasi biaya yang tersalurkan untuk Program Bina Lingkungan di tahun 2018 dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

REALISASI AKUMULASI PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN HINGGA 2017 DAN 2018

dalam Rupiah

NO.	URAIAN	HINGGA 2017	HINGGA 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Korban Bencana Alam	4.878.683.400	6.760.159.800
2.	Pendidikan dan Pelatihan	30.914.122.054	56.142.426.310
3.	Peningkatan Kesehatan	7.400.579.836	11.814.888.420
4.	Sarana dan Prasarana Umum	36.087.717.950	54.664.083.950
5.	Sarana Ibadah	43.748.320.045	54.132.129.407
6.	Ketahanan Pangan	1.199.325.525	1.199.325.525
7.	Pelestarian Alam	3.659.835.700	3.980.835.700
8.	Pengentasan Kemiskinan	30.170.659.993	52.157.974.895
9.	Bantuan Pendidikan, Pelatihan Mitra Binaan	2.302.243.267	2.302.243.267
	Sub Jumlah	160.361.487.770	243.154.067.274
	BL BUMN Peduli	11.233.348.787	11.233.348.787
JUMLAH		171.594.836.557	254.387.416.061



**REALISASI AKUMULASI PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN TRIWULAN IV**

dalam Rupiah

NO.	URAIAN	TRIWULAN IV TAHUN			TREND (%)	
		2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5:4)	(7=5:3)
1.	Korban Bencana Alam	277.323.500	671.350.850	940.738.200	140	339
2.	Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.559.673.626	7.074.261.935	12.614.152.128	178	354
3.	Peningkatan Kesehatan	949.992.500	1.458.213.216	2.207.154.292	151	232
4.	Sarana dan Prasarana Umum	2.615.594.280	5.484.686.520	9.288.183.000	169	355
5.	Sarana Ibadah	3.756.548.000	4.540.876.681	5.191.904.681	114	138
6.	Pelestarian Alam	456.498.200	442.700.000	160.500.000	36	35
7.	Pengentasan Kemiskinan	8.085.480.000	15.628.531.091	10.993.657.451	70	136
8.	Bantuan Pendidikan, Pelatihan MB	1.698.218.467	106.915.000	-	-	-
JUMLAH		21.399.328.573	35.407.535.293	41.396.289.752	117	193

TOTAL PENYALURAN BANTUAN TRIWULAN IV

dalam Rupiah

NO.	URAIAN	TRIWULAN IV TAHUN			TREND (%)	
		2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5:4)	(7=5:3)
1.	Jumlah Objek	656	701	589	84	90
2.	Jumlah Bantuan	21.401.030.573	35.407.535.293	41.396.289.752	117	193
3.	Rata-rata penyaluran bantuan per objek	32.623.522	50.510.036	70.282.326	139	215

Di tahun 2018, realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan mencapai sebesar Rp41,40 miliar atau naik 17% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp35,41 miliar, sedangkan rata-rata bantuan yang disalurkan adalah sebesar Rp70,28 juta atau naik 39% dari rata-rata bantuan tahun 2017 sebesar Rp50,51 juta. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan menjadi bantuan terbanyak yaitu sebesar Rp12,61 miliar atau naik 78% dari realisasi triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp7,07 miliar. Realisasi bantuan ini meliputi bantuan 37 titik Taman Baca di 7 Provinsi; Pelatihan Basic Safety Training untuk 500 Tenaga Kerja Bongkar Muat; serta Pelatihan Vokasi Las sebanyak 100 orang.

KEGIATAN PENGEMBANGAN MITRA BINAAN

Selain menyalurkan pinjaman berupa modal kerja, Pelindo III juga melakukan upaya untuk meningkatkan wawasan dan mengembangkan jaringan Mitra Binaan. Hal ini ditempuh dengan mengikutsertakan Mitra Binaan ke event pameran. Di tahun 2018, Pelindo III telah mengikutsertakan 66 Mitra Binaan pada 12 event pameran berskala nasional maupun internasional yaitu:

**PENGIRIMAN MITRA BINAAN DALAM EVENT 2018**

NO.	URAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI	JUMLAH MITRA BINAAN
1.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar)	6 Januari 2018	Surabaya	5
2.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar)	9 Januari 2018	Surabaya	6
3.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar)	17 Januari 2018	Surabaya	10
4.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar)	23 Januari 2018	Surabaya	5
5.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar)	7 Maret 2018	Surabaya	6
6.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar)	16 Maret 2018	Surabaya	8
7.	Inacraft 2018	25-29 April 2018	Jakarta	9
8.	Pameran UKM & Bazaar	14-16 Mei 2018	Jakarta	1
9.	Expo Sail Indonesia Moyo Tambora	9-12 September 2018	Sumbawa	1
10.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar)	20 November 2018	Surabaya	5
11.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar)	28 November 2018	Surabaya	5
12.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar)	30 November 2018	Surabaya	5
Jumlah Mitra Binaan				66

CAPAIAN PROGRAM PKBL

Beberapa capaian keberhasilan PKBL yang dilaksanakan Pelindo III dapat digambarkan sebagai berikut:

KAMPOENG LAWAS MASPATI

Semenjak menjadi "bapak angkat" di tahun 2015, Pelindo III telah mengucurkan bantuan kepada Kampoeng Lawas Maspasi sebesar Rp601.039.579 meliputi bantuan perbaikan infrastruktur, pelatihan kewirausahaan, maupun event promosi sebagai kampung wisata. Hasil dari upaya-upaya tersebut nampak pada tahun 2016 dimana Kampoeng Lawas Maspasi menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Surabaya. Gaung Kampoeng Lawas Maspasi sebagai kampung yang memiliki sejarah dan kearifan lokal yang terjaga dengan baik telah sampai ke luar negeri, terbukti dengan jumlah kunjungan turis mancanegara yang mencapai 75 kunjungan dengan total 500 orang turis. Perputaran uang di kawasan Kampoeng Lawas Maspasi telah mencapai kurang lebih Rp3.000.000/hari, yang berasal dari penjualan souvenir, makanan, minuman, tour guide, serta homestay. Jumlah UKM juga terus meningkat dari yang semula hanya berjumlah 20 UKM, kini telah menjadi 50 UKM.

KAMPUNG HIDROPONIK SIMOKALANGAN

Semenjak menjadi kampung binaan pada bulan Juli 2018, kampung yang berada di daerah Simokalangan ini telah memperoleh beberapa penghargaan seperti:

1. Kampung Penghijauan Terbaik 2018 Kota Surabaya
2. Juara I Kampung Hidroponik Kota Surabaya
3. Lingkungan Paling Berbunga 2018 Kota Surabaya.

Semenjak meraih beberapa penghargaan tersebut, kampung hidroponik mulai dikenal masyarakat baik domestik maupun mancanegara. Hal ini terbukti dari adanya kunjungan mahasiswa asing serta liputan TV dan media massa setempat. Kampung yang dihuni oleh kurang lebih 115 KK dan mayoritas buruh ini, kini telah memiliki 12 media tanam dimana setiap media tanamnya dapat menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp180.000 hingga Rp200.000. Di masa yang akan datang, Pelindo III menargetkan kampung ini dapat menjadi plasma produk hidroponik.

KAMPUNG KEFIR

Kampung Kefir binaan Pelindo III ini merupakan sebuah kampung yang memiliki potensi di industri susu kefir dan berlokasi di Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan. Pelindo III telah memberikan pelatihan hingga membentuk 5 kader warga yang juga dapat memproduksi susu kefir. Selain memproduksi susu kefir, masyarakat di Kampung Kefir juga concern pada pengolahan sampah melalui bank sampah serta pemanfaatannya. Dari aktivitas tersebut, kampung ini memiliki produk andalan berupa souvenir yang terbuat dari pemanfaatan limbah sampah plastik.



TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Pemenuhan Service Level Agreement/Service Level Guarantee (SLA/SLG)

Sebagai salah satu sarana dan prasarana transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antar daerah atau negara serta menjadi tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Dengan demikian penting bagi sebuah pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akumulasi komoditi perdagangan hinterland. Umumnya terdapat 3 tolok ukur utama yang digunakan dalam pemberian pelayanan di pelabuhan, yaitu:

1. Quality of services (kepastian, keamanan, keselamatan, dan kelancaran)
2. Cost (Tarif yang wajar)
3. Delivery (kecepatan, produktivitas)

Komponen lain yang tak kalah penting dalam rangka memberikan servis terbaik bagi pengguna pelabuhan ialah penerapan Services Level Guarantee (SLG). SLG adalah standar jaminan pelayanan minimal dari suatu jasa kepelabuhanan pada pelabuhan tertentu yang diumumkan secara terbuka untuk seluruh pemakaian jasa kepelabuhanan. Sementara itu, Services Level Agreement/SLA adalah perjanjian antara General Manager cabang tertentu dengan pengguna jasa tertentu yang berisi tentang kondisi SLG dan kompensasi yang diberikan.

Kepuasan pelanggan yang menjadi fokus dan prioritas Perusahaan membuat penerapan SLG dan SLA menjadi hal penting yang senantiasa diperhatikan. Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas, biaya, dan pengiriman untuk memperoleh loyal customer yang semakin besar, terutama mengingat setiap wilayah kerja Cabang Pelabuhan diperkenankan untuk memiliki SLA/SLG tersendiri yang mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2008. Dalam pelaksanaan SLG/SLA, Perusahaan mengacu pada beberapa referensi yakni:

1. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Kinerja Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
2. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan tahun 2015-2019.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018.
4. Kontrak manajemen direksi dan pemegang saham dalam bentuk KPI tahun 2018.

Penyesuaian tarif pelayanan Jasa Kepelabuhanan dilakukan setiap dua tahun sekali, yang persetujuannya diberikan setelah Perusahaan memenuhi standar kinerja yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, perhitungan tarif kerja sama perusahaan properti ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pasar (NJOP) atau harga pasar yang berlaku pada setiap daerah. Setiap pengguna jasa yang membutuhkan informasi terhadap tarif pelayanan Perusahaan, ataupun keberatan terhadap tarif yang diberikan dapat menghubungi setiap Dinas Komersial di Pelabuhan Cabang untuk mendapatkan penjelasan terbaik.

PENYEDIAAN MEDIA KELUHAN PELANGGAN

Perusahaan menyediakan sarana untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan mengenai mutu produk, dukungan pelanggan, dan transaksi, melalui media sebagai berikut:

1. Surat, Kotak Saran, Kartu Saran, Telepon dan Faksimile, Email, serta SMS;
2. Face to Face/Rapat/Customer Gathering/Focus Group Discussion (FGD)/Customer Relationship Officer (CRO).

Survei Analisis Kebutuhan Pengguna Jasa Layanan, Survei Kepuasan Pelanggan, dan alur penanganan keluhan pelanggan dalam Perusahaan dilakukan melalui Surat, Kotak Saran dan Kartu Saran, Telepon dan Faksimile, Surel, dan SMS dengan langkah sebagai berikut:

1. Pelanggan mengajukan keluhan melalui media keluhan;
2. Tim keluhan pelanggan menerima dan mencatat semua keluhan pelanggan kedalam logbook;
3. Tim keluhan pelanggan melakukan verifikasi keluhan pelanggan;
4. Tim keluhan pelanggan memberikan jawaban atas keluhan pelanggan apabila penyelesaiannya kurang dari 1x24 jam;
5. Apabila penyelesaian keluhan pelanggan memerlukan koordinasi dengan Kantor Pusat Perusahaan/Instansi terkait, tim keluhan pelanggan tetap memberikan tanggapan dalam waktu 1x24 jam, sebelum mengundang pelanggan untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut;
6. Tim keluhan pelanggan melakukan monitoring pelaksanaan perbaikan yang tertuang dalam logbook keluhan sesuai dengan jadwal perbaikan yang ditetapkan; dan
7. Tim keluhan pelanggan melakukan pencatatan keluhan pelanggan, rekapitulasi, dan melakukan monitoring penyelesaian keluhan pelanggan melalui aplikasi www.crm.pelindo.co.id



KEPUASAN PELANGGAN

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan setiap tahunnya dilakukan dengan melakukan survei yang dilakukan terhadap jenis pelayanan pelabuhan:

1. Pelayanan Jasa Kapal
2. Pelayanan Barang
3. Pelayanan Bongkar Muat
4. Pelayanan Terminal Penumpang
5. Vendor

Analisis yang dilakukan terhadap Survei Kepuasan Pelanggan Perusahaan tahun 2018 antara lain untuk mengetahui nilai kepuasan pelanggan, nilai ketidakpuasan pelanggan, nilai loyalitas pelanggan, dan mengetahui engagement pelanggan.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan yang telah dilakukan, selanjutnya diperoleh indikator kepuasan pelanggan yang meliputi rata-rata harapan (Importance), rata-rata pelayanan yang dirasakan pelanggan (Performance), nilai GAP, Customer Satisfaction Index (CSI) serta keterangan dari nilai CSI.

Tabel berikut merupakan hasil data kumulatif kualitas pelayanan di 16 cabang Perusahaan, 1 (satu) Unit Perusahaan Perusahaan (TPKS) dan Kantor Pusat.

SKOR CUSTOMER SATISFACTION INDEX

JENIS PELAYANAN & KATEGORI PELANGGAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN RESPONDEN	KETERANGAN
A. Pelayanan Kapal	4	4,03	80,79	Puas
1. Nahkoda	4	4,02	80,57	Puas
2. Pemilik Kapal/Agen Pelayanan	4	4,04	81,01	Puas
B. Pelayanan Barang	4	3,97	79,42	Puas
1. Pemilik Barang/EMKL	4	3,95	78,93	Puas
2. PBM Non-Pelindo III	4	3,96	79,20	Puas
3. Operator Truk/Trailer Khusus PBM Non Pelindo III	4	4,01	80,14	Puas
C. Pelayanan Bongkar Muat Non Peti Kemas	4	3,94	78,76	Puas
1. Pelayanan Bongkar Muat	4	3,91	78,13	Puas
2. Pemilik Barang/Freight	4	4,03	80,54	Puas
3. Operator Truk/Trailer	4	3,88	77,62	Puas
D. Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas	4	3,90	77,91	Puas
1. Pemilik Baranf/Freight Forwarder/EMKL	4	3,91	78,28	Puas
2. Pemilik Kapal/Agen Pelayanan/Nahkoda	4	3,88	77,63	Puas
3. Operator Truk/Trailer	4	3,89	77,81	Puas
E. Pelayanan Terminal Penumpang				
1. Penumpang Naik/Transit	4	4,01	80,12	Puas
F. Pelayanan Vendor				
1. Rekanan/Kontraktor/Vendor yang Bekerja di Pelindo III Cabang Pelabuhan Tanjung Perak	4	4,21	84,20	Puas
NILAI TOTAL		4,00	79,40	Puas

**SKOR CUSTOMER SATISFACTION INDEX PER PELABUHAN**

NO.	CABANG PELABUHAN	NILAI CSI		KATEGORI CSI
		CSI SKALA 5	CSI SKALA 100	
1.	Pelabuhan Tanjung Intan - Cilacap (TGI)	3,86	77,19	Puas
2.	Pelabuhan Bima (BMA)	4,15	82,96	Puas
3.	Pelabuhan Kotabaru (KTU)	4,05	80,91	Puas
4.	Pelabuhan Tanjung Perak (TGP)	3,96	79,52	Puas
5.	Pelabuhan Celukan Bawang (CLB)	4,51	89,96	Sangat Puas
6.	Pelabuhan Gresik (GSK)	4,56	91,22	Sangat Puas
7.	Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo (TGT)	4,17	83,44	Puas
8.	Kantor Pusat Pelindo III Surabaya (KANPUS)	4,13	82,61	Puas
9.	Pelabuhan Banjarmasin (BJN)	3,65	72,93	Puas
10.	Pelabuhan Tenau - Kupang (TNU)	3,86	77,21	Puas
11.	Pelabuhan Benoa - Bali (BNA)	3,91	78,23	Puas
12.	Pelabuhan Tanjung Emas-Semarang	4,05	80,98	Puas
13.	Pelabuhan Lembar (LMR)	3,61	72,18	Puas
14.	UPP Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS)	3,91	78,11	Puas
15.	Pelabuhan Maumere (MME)	3,90	78,07	Puas
16.	Pelabuhan Sampit (SMT)	3,94	78,84	Puas
17.	Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi (TGW)	3,74	74,74	Puas
18.	Pelabuhan Kumai (KMI)	4,14	82,82	Puas



SKOR CUSTOMER LOYALTY INDEX

JENIS PELAYANAN & KATEGORI PELANGGAN	NILAI CLI		KETERANGAN
	CLI SKALA 5	CSI SKALA 100	
Indeks Loyalitas Pelanggan	4,14	82,89	Loyal
A. Pelayanan Kapal	4,25	85,09	Sangat Loyal
1. Nahkoda	4,33	86,65	Sangat Loyal
2. Pemilik Kapal/Agen Pelayaran	4,18	83,53	Loyal
B. Pelayanan Barang	4,08	81,51	Loyal
1. Pemilik Barang/EMKL	4,10	82,07	Loyal
2. PBM Non-Pelindo III	4,04	80,72	Loyal
3. Operator Truk/Trailer Khusus PBM Non Pelindo III	4,09	81,73	Loyal
C. Pelayanan Bongkar Muat Non Peti Kemas	4,11	82,18	Loyal
1. Pemilik Barang/Freight Forwarder/EMKL	4,06	81,18	Loyal
2. Pemilik Kapal/Agen Pelayaran/Nahkoda	4,13	82,63	Loyal
3. Operator Truk/Trailer	4,14	82,73	Loyal
D. Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas	4,23	84,53	Sangat Loyal
1. Pemilik Baranf/Freight Forwarder/EMKL	4,26	85,10	Sangat Loyal
2. Pemilik Kapal/Agen Pelayaran/Nahkoda	4,21	84,20	Sangat Loyal
3. Operator Truk/Trailer	4,21	84,20	Sangat Loyal
E. Pelayanan Terminal Penumpang	3,99	79,88	Loyal
Indeks Pelayanan Vendor	4,31	86,15	Sangat Loyal

**SKOR CUSTOMER LOYALTY INDEX PER PELABUHAN**

NO.	CABANG PELABUHAN	NILAI CLI		KATEGORI CLI
		CLI SKALA 5	CLI SKALA 100	
1.	Pelabuhan Tanjung Intan - Cilacap (TGI)	4,12	82,32	Loyal
2.	Pelabuhan Bima (BMA)	4,45	89,08	Sangat Loyal
3.	Pelabuhan Kotabaru (KTU)	4,24	84,90	Sangat Loyal
4.	Pelabuhan Tanjung Perak (TGP)	3,86	77,21	Loyal
5.	Pelabuhan Celukan Bawang (CLB)	4,81	96,13	Sangat Loyal
6.	Pelabuhan Gresik (GSK)	4,28	85,53	Sangat Loyal
7.	Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo (TGT)	4,25	85,00	Sangat Loyal
8.	Kantor Pusat Pelindo III Surabaya (KANPUS)	3,87	77,39	Loyal
9.	Pelabuhan Banjarmasin (BJN)	3,89	77,75	Loyal
10.	Pelabuhan Tenau-Kupang (TNU)	4,02	80,33	Loyal
11.	Pelabuhan Benoa-Bali (BNA)	4,16	83,21	Loyal
12.	Pelabuhan Tanjung Emas-Semarang	4,08	81,64	Loyal
13.	Pelabuhan Lembar (LMR)	4,02	80,30	Loyal
14.	UPP Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS)	4,20	83,94	Loyal
15.	Pelabuhan Maumere (MME)	4,27	85,42	Sangat Loyal
16.	Pelabuhan Sampit (SMT)	4,00	79,98	Loyal
17.	Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi (TGW)	4,19	83,71	Loyal
18.	Pelabuhan Kumai (KMI)	4,36	87,18	Sangat Loyal



PRODUK DAN PELAYANAN BAGI KONSUMEN

Perusahaan berupaya memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pelanggan telah memenuhi standar layanan terbaik. Guna menjamin hal tersebut, Perusahaan telah tersertifikasi berdasarkan ISO 9001, ISO 14001 serta The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

REALISASI PELAYANAN KELUHAN PELANGGAN TAHUN 2018

Selama tahun 2018 Pelindo III menerima sebanyak 708 keluhan pelanggan, dengan rincian sebagai berikut:

PELAYANAN KELUHAN PELANGGAN 2018

NO.	CABANG PELABUHAN	KELUHAN PELANGGAN			STATUS TINDAK LANJUT PELANGGAN	
		TERIMA	TOLAK	JUMLAH	DALAM PROSES	SELESAI
1.	Tanjung Perak	321	95	416	-	416
2.	Tanjung Emas	19	-	19	-	19
3.	Tanjung Intan	8	-	8	-	8
4.	Banjarmasin	159	1	160	-	160
5.	TPKS	47	-	47	-	47
6.	Gresik	7	-	7	-	7
7.	Tanjung Wangi	5	1	6	-	6
8.	Benoa	1	-	1	-	1
9.	Sampit	13	-	13	-	13
10.	Tenau Kupang	-	-	-	-	-
11.	Kumai	1	-	1	-	1
12.	Kotabaru	7	-	7	-	7
13.	Celukan Bawang	8	1	9	-	9
14.	Lembar	4	-	4	-	4
15.	Maumere	1	-	1	-	1
16.	Bima	-	-	-	-	-
17.	Probolinggo	3	-	3	-	3
JUMLAH		610	98	708	-	708
Prosentase Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan					0%	100%



LAPORAN
MANAJEMEN



PROFIL
PERUSAHAAN



TINJAUAN
PENDUKUNG BISNIS



ANALISIS DAN
PEMBAHASAN MANAJEMEN

Halaman ini sengaja dikosongkan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Pelindo III tahun 2018 telah dimuat secara lengkap; dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Mei 2019

DEWAN KOMISARIS

Wahyu Satrio Utomo
Komisaris

Hari Bowo
Komisaris Utama

Zainal Abidin
Komisaris Independen

Heddy Lugito
Komisaris Independen

Dedi Syarif Usman
Komisioner

DIREKSI

Putut Sri Muljanto
Direktur Operasi dan Komersial

Doso Agung
Direktur Utama

Joko Norhudha
Direktur Teknik

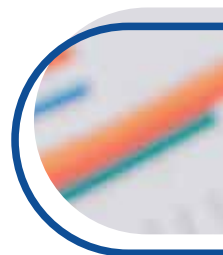
Toto Heli Yanto
Direktur Sumber Daya Manusia

Iman Rachman
Direktur Keuangan

Toto Nugroho
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis



07 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN





PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
***Consolidated financial statements
as of December 31, 2018 and for the year then ended
with independent auditors' report***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK ("KELOMPOK USAHA")
UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING TO THE
RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS OF PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) AND SUBSIDIARIES ("THE GROUP")
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND FOR
THE YEAR THEN ENDED**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| 1. Nama | Doso Agung | Name |
| Alamat kantor | Jl. Tanjung Perak Timur No. 610
Surabaya | Office address |
| Alamat domisili sesuai
KTP atau identitas | Jl H Noin No.2
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | Domicile as stated
in ID Card |
| Nomor telepon | +62-31-3298631 | Phone number |
| Jabatan | Direktur Utama / President Director | Position |
| 2. Nama | Iman Rachman | Name |
| Alamat kantor | Jl Tanjung Perak Timur No. 610
Surabaya | Office address |
| Alamat domisili sesuai
KTP atau identitas | Jl. Wijaya Kusuma III/ 3A
Cilandak, Jakarta Selatan | Domicile as stated
in ID Card |
| Nomor telepon | +62-31-3298631 | Phone number |
| Jabatan | Direktur Keuangan / Finance Director | Position |

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements. |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha disajikan secara lengkap dan benar. | 3. a. All information contained in the Group's consolidated financial statements are complete and correct. |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts. |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Kelompok Usaha. | 4. We are responsible for the Group's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This Statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors
Surabaya,

12 April / April 12, 2019



Doso Agung
Direktur Utama / President Director

Iman Rachman
Direktur Keuangan / Finance Director

HEAD OFFICE

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - Indonesia

T: +62 31 3298631-37
F: +62 31 3295204

www.pelindo.co.id

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 - 3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4 - 5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7 - 8	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	9 - 161	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00556/3.0311/AU.1/06/0240-1/1/IV/2019

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00556/3.0311/AU.1/06/0240-1/1/IV/2019

**The Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00556/3.0311/AU.1/06/0240-1/1/IV/2019 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00556/3.0311/AU.1/06/0240-1/1/IV/2019 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00556/3.0311/AU.1/06/0240-1/1/IV/2019 (lanjutan)

Penekanan suatu hal

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2017/31 Desember 2016 untuk mengoreksi perhitungan liabilitas imbalan kerja dan akun terkait lainnya serta untuk menyesuaikan dengan klasifikasi akun dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018.

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2017/31 Desember 2016 diaudit oleh auditor independen lain sebelum penyajian kembali sebagaimana didiskusikan di atas yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 28 Februari 2018.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00556/3.0311/AU.1/06/0240-1/1/IV/2019 (continued)

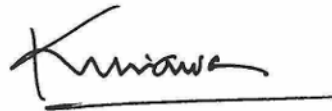
Emphasis of matter

As disclosed in Note 4 to the accompanying consolidated financial statements, the Company restated the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2017 and for the year then ended, and consolidated statement of financial position as of January 1, 2017/December 31, 2016 to correct calculation of employee benefits liability and related accounts, and to conform with classification of accounts applied in the consolidated financial statements as of December 31, 2018.

Other matter

The consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2017 and for the year then ended, and consolidated statement of financial position of January 1, 2017/December 31, 2016, were audited by other independent auditors prior to the restatement mentioned above, who expressed an unmodified opinion with emphasis of matter paragraph and other matter paragraph on such consolidated financial statements on February 28, 2018.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

12 April 2019/April 12, 2019

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 4)/ As restated and reclassified (Note 4)					
					1 Januari 2017/ 31 Desember 2016/
	Catatan/ Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ January 1, 2017/ December 31, 2016	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5,8	4.612.047.296	2.750.527.471	1.815.986.830	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	6,8	-	5.149.595	33.213.107	Restricted cash
Investasi jangka pendek	7	57.920.390	10.988.190	4.917.631	Short-term investment
Piutang usaha - neto	9				Trade receivables - net
Pihak ketiga		516.377.060	396.513.588	412.798.055	Third parties
Pihak berelasi	8	340.360.505	219.579.089	23.413.817	Related parties
Piutang lain-lain - neto	10				Other receivables - net
Pihak ketiga		36.236.852	27.384.747	34.396.494	Third parties
Pihak berelasi	8	262.531.359	198.236.334	191.968.284	Related parties
Pendapatan masih akan diterima	11	317.662.932	210.411.250	91.097.662	Accrued revenues
Persediaan	12	52.115.524	25.022.701	25.152.456	Inventories
Pajak dibayar dimuka	19a	146.709.690	291.446.197	130.469.123	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	13	98.388.521	34.243.295	62.916.537	Prepaid expense
Aset lancar lainnya		22.518.736	24.575.506	22.775.409	Other current assets
TOTAL ASET LANCAR		6.462.868.865	4.194.077.963	2.849.105.405	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	14	1.090.565.886	1.182.361.316	1.088.286.804	Investment in associates
Properti investasi - neto	15	103.267.839	103.246.755	108.980.990	Investment properties - net
Aset tetap - neto	16	16.231.547.122	14.096.408.282	11.706.389.984	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan	19g	263.407.156	350.196.597	321.622.265	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	17	5.147.470.056	5.152.883.969	4.563.184.691	Intangible assets - net
Estimasi tagihan pajak	19f	430.661.045	444.237.232	622.146.461	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	18	775.927.618	227.687.033	1.180.300.657	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		24.042.846.722	21.557.021.184	19.590.911.852	TOTAL NON CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		30.505.715.587	25.751.099.147	22.440.017.257	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 4)/ As restated and reclassified (Note 4)			
			1 Januari 2017/ 31 Desember 2016/ January 1, 2017/ December 31, 2016		
	Catatan/ Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017		
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	20	-	677.400.000	671.800.000	Short-term bank loans
Utang usaha Pihak ketiga	21	527.416.198	700.197.574	577.087.004	Trade payables Third parties
Utang lain - lain Pihak berelasi	8	79.144.186	5.607.325	19.588.094	Related parties Other payables
Utang pajak	19b	260.741.232	126.440.505	118.924.652	Tax payables
Beban akrual	23	1.287.510.462	824.294.545	833.461.820	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka jangka pendek	24,8	306.552.410	241.568.400	205.153.084	Short-term unearned revenue
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:					Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	25	351.140.707	328.516.973	325.801.155	Bank loans
Utang sewa pembiayaan		62.813.193	-	-	Finance lease liability
Liabilitas jangka pendek lainnya		81.715	7.400.601	6.156.258	Other current liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		3.574.313.477	3.308.624.232	3.044.586.662	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	19g	63.213.116	62.588.195	55.786.473	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	25	256.387.236	3.582.375.713	2.201.202.547	Bank loans
Utang sewa pembiayaan		-	63.257.235	67.289.363	Finance lease liability
Surat berharga yang diterbitkan	26	14.329.612.957	6.714.419.072	6.650.329.957	Securities issued
Liabilitas imbalan kerja	28	1.572.167.803	2.318.610.462	1.578.997.868	Employee benefits liabilities
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	27	353.005.199	330.998.765	321.733.688	Long-term unearned revenue
Liabilitas jangka panjang lainnya		1.702.002	4.610.340	5.581.612	Other non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		16.576.088.313	13.076.859.782	10.880.921.508	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS (dipindahkan)		20.150.401.790	16.385.484.014	13.925.508.170	TOTAL LIABILITIES (carried forward)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 4)/ As restated and reclassified (Note 4)			
				1 Januari 2017/ 31 Desember 2016/ January 1, 2017/ December 31, 2016	
	Catatan/ Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017		
TOTAL LIABILITAS (pindahan)		20.150.401.790	16.385.484.014	13.925.508.170	TOTAL LIABILITIES (brought forward)
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham					Share capital - par value Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 3.200.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.018.953 saham	29	1.018.953.000	1.018.953.000	1.018.953.000	Authorized capital - 3,200,000 shares, subscribed and paid up amounting to 1,018,953 shares
Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	31	38.740.826	56.420.249	60.722.514	Difference from changes in equity in subsidiaries and effects of transaction with non- controlling interest
Saldo laba:					Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya	29, 30	7.048.818.143	6.022.038.102	5.297.104.815	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		(481.116.013)	219.744.010	(94.244.721)	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	32	1.453.839.874	718.347.423	1.128.024.560	Other comprehensive income
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		9.079.235.830	8.035.502.784	7.410.560.168	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	33	1.276.077.967	1.330.112.349	1.103.948.919	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		10.355.313.797	9.365.615.133	8.514.509.087	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		30.505.715.587	25.751.099.147	22.440.017.257	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2018	Catatan/ Notes	2017 Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 4)/ As restated and reclassified (Note 4)	
Pendapatan operasi	10.174.932.027	34	8.849.406.638	Operating revenue
Pendapatan konstruksi	603.841.389	35	126.676.775	Construction revenues
Beban operasi	(6.879.589.941)	36	(5.883.266.559)	Operating expenses
Beban konstruksi	(597.016.991)	35	(115.899.850)	Construction expenses
Beban operasi lainnya - neto	(733.923.638)	37	(67.104.682)	Other operating expenses - net
LABA USAHA	2.568.242.846		2.909.812.322	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	143.193.611	38	111.571.741	Finance income
Beban keuangan	(808.410.118)	39	(600.181.782)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi	(30.976.449)	40	97.403.931	Equity in income of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.872.049.890		2.518.606.212	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(48.544.590)	19d	(45.806.243)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.823.505.300		2.472.799.969	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
Kini	(597.212.172)	19d	(453.185.371)	Current
Tangguhan	159.109.419	19d	(114.536.653)	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	(438.102.753)		(567.722.024)	CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	1.385.402.547		1.905.077.945	INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2018	Catatan/ Notes	2017 Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 4)/ As restated and reclassified (Note 4)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	915.126.260		(545.237.051)	Remeasurements of defined benefit plans
Efek pajak tangguhan - pengukuran kembali program imbalan pasti	(228.756.291)		136.309.263	Deferred tax effect - remeasurement of defined benefit plans
Perubahan cadangan aset revaluasi	71.069.966		-	Changes in asset revaluation reserves
Efek pajak tangguhan - perubahan cadangan aset revaluasi	(17.767.491)		-	Deferred tax effect - changes in asset revaluation reserves
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	739.672.444		(408.927.788)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.125.074.991		1.496.150.157	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	759.639.040		1.341.521.122	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	625.763.507		563.556.823	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN	1.385.402.547		1.905.077.945	INCOME FOR THE YEAR
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	1.502.624.862		931.843.985	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	622.450.129	33	564.306.172	Non-controlling interests
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.125.074.991		1.496.150.157	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	745	2t	1.316	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent entity

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Selisih atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali/Difference from changes in equity of Subsidiaries and effects of transactions with non-controlling interest	Saldo laba/Retained earnings				Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		Kerentanan nonpengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total Equity	
			Ditentukan penggunaan/Used Appropriated	Belum ditentukan penggunaan/Not Unappropriated	Surplus revaluasi aset tetap/Fixed assets revaluation gains	Pengukuran kembali program imbalan pensiun/Remeasurements of defined benefit plans	Neto/Net				
Saldo per 31 Desember 2016 (sebelum disajikan kembali) Efek perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan	1.018.953.000	62.460.000 (1.737.486)	5.297.104.815 -	1.037.329.721 (1.131.574.442)	1.166.601.138 -	(38.693.298) 116.720	8.543.755.376 (1.133.195.208)	1.101.724.224 2.224.695		9.645.479.600 (1.130.970.513)	Balance as of December 31, 2016 (before restated) Effects of changes in accounting policies and errors
Saldo per 31 Desember 2016 (disajikan kembali) Laba tahun berjalan Saham treasury PT PEL Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Reklasifikasi ke saldo laba	1.018.953.000	60.722.514 (4.302.265)	5.297.104.815 - - -	(94.244.721) 1.341.521.122 - 9.797.330	1.166.601.138 - - -	(38.576.578) - (409.677.137)	7.410.560.188 1.341.521.122 (4.302.265) (409.677.137) 9.797.330	1.103.948.919 563.556.823 (92.735) 749.349 (9.797.330)		8.514.509.087 1.905.077.945 (4.395.000) (408.927.788) -	Balance as of December 31, 2016 (as restated) Profit for the year Treasury stocks of PT PEL Remeasurement of employee benefit liability Reclassification on retained earnings
Peralihan saham nonpengendali Penyusutan saldo laba hak minoritas Penyesuaian saham PT BIMA Tambahan setoran modal entitas anak baru Pembentukan cadangan umum Dividen tunai Dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali	-	- - - - -	- (1.197.518) - 726.130.805 -	- - - (311.198.916)	- - - -	- - - -	- (1.197.518) (770.791) - (311.198.916)	- 1.197.518 (770.791) 600.972 -		(4.388.000) - (770.791) 600.972 (311.198.916)	Transfer of capital stock of non-controlling interest Retained earnings adjustment of non-controlling interest Adjustment for shareholding PT BIMA Additional paid-in capital of new subsidiary Appropriation of retained earnings Cash dividend
Saldo per 31 Desember 2017 Laba tahun berjalan Saham treasury PT PEL Penambahan agio saham Disagio saham PMS	1.018.953.000	56.420.249 430.227 11.012.625 (29.122.275)	6.022.038.102 -	219.744.010 759.639.041 - -	1.166.601.138 -	(448.253.715) - - -	8.035.502.784 759.639.041 430.227 11.012.625 (29.122.275)	1.330.112.349 625.763.507 9.273 (11.012.625) (627.725)		9.365.615.133 1.385.402.548 439.500 - (29.750.000)	Balance as of December 31, 2017 Income for the year Treasury stocks of PT PEL Addition of share premium Share premium of PMS Transfer of capital stock of non-controlling interest
Peralihan saham nonpengendali Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan revaluasi aset tetap Dekonsolidasi BUTI - GAMA JO Dividen tunai Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali Pembentukan cadangan umum Pelepasan aset revaluasi oleh BUTI	-	- - - -	- (2.563.117)	- (441.147.068)	57.589.897 -	685.395.925 - -	742.985.822 (2.563.117) (441.147.068)	(3.313.379) (83.637) -		739.672.443 (2.646.754) (441.147.068)	Remeasurement of employee benefit liability and fixed assets revaluation Deconsolidation BUTI - GAMA JO Cash dividend
Saldo per 31 Desember 2018	1.018.953.000	38.740.826	7.048.818.143 -	9.991.162 (481.116.013)	1.216.697.664 (7.493.371)	237.142.210	9.079.235.830 2.497.791	(664.705.697) -	81.506 1.276.077.967	(664.705.697) - 2.579.297 10.355.313.797	Cash dividend paid by Subsidiaries to non-controlling interests Appropriation for general reserve Disposal of revaluation assets by BUTI Balance as of December 31, 2018

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2018	Catatan/ Notes	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan dan non-pelanggan	10.113.237.676		Cash received from customers and non-customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(4.395.947.181)		Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(1.212.050.265)		Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(478.448.300)		Payment for income taxes
Penghasilan bunga	143.193.611		Interest received
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	4.169.985.541		Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	6.387.567		Receipt of dividend
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(3.417.301.058)		Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penempatan investasi jangka pendek	(46.932.200)	7	Placement of short-term investments
Pencairan deposito jangka panjang	-		Withdrawal of long-term deposits
Investasi pada penyertaan saham	-		Investment in shares of stock
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.457.845.691)		Net Cash Used in Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)**

**For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2018	Catatan/ Notes	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	6.901.500.000		Receipt of loans
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(4.040.117.626)		Payment of bank loans and other financial institution
Pembayaran beban bunga	(677.007.121)		Payment of interest
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(444.042)		Payment of obligation under finance lease
Pembayaran dividen	(1.105.852.765)	30	Payment of dividend
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.078.078.446		Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	1.790.218.296		NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	71.301.529		Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.750.527.471		CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4.612.047.296	5	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Perusahaan") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan III berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 16 tahun 1983. Perum Pelabuhan III merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 1991, Perum Pelabuhan III mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 5 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-9992 HT.01.01.Th.93 tanggal 30 September 1993. Sejak terbentuknya Kementerian BUMN pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 08 dari Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., di Surabaya, tanggal 13 Agustus 2012 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-61954.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012.

Berdasarkan Akta No. 08 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Negara BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp209.730.528 yang merupakan Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp809.222.000 menjadi sebesar Rp1.018.953.000.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("the Company") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan III based on Government Regulation No. 16, Year 1983. It was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 58 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan III was changed into a State Owned Company (Persero). As a result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) was established based on Notarial Deed No. 5 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-9992 HT.01.01.Th.93 dated September 30, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MSOE"), the Company has been under the supervision of the MSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Resolution notarized by Notarial Deed No. 08 of Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, dated August 13, 2012 regarding the Company's additional share capital issued and fully paid share capital. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Acceptance Letter No. AHU-61954.AH.01.02 Year 2012 dated December 5, 2012.

Based on the Notarial Deed No. 08 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of State-Owned Enterprises (MSOE) increased its investment in the Company amounting to Rp209,730,528 as an Addition in State Capital Participation as stated in Government Regulation No. 8 of 2012 concerning the Addition of the State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). With the additional paid-in capital of the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company's increased from Rp809,222,000 to Rp1,018,953,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa transportasi laut, jasa rumah sakit, jasa perbaikan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Perak Timur No.610, Surabaya 60165, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mengelola 4 kantor regional yang meliputi 17 Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

Regional	Cabang/Branch	Region
Jawa Timur	Tanung Perak, Gresik, Tanjung Tembaga, Kalianget	East Java
Bali Nusra	Bima, Celukan Bawang, Maumere, Bena, Tenau Kupang, Lembar, Tanjung Wangi, Badas, Waingapu, Kalabahi, Ende	Bali Nusra
Jawa Tengah	Tanjung Emas, Terminal Petikemas Semarang, Tanjung Intan, Tegal	Central Java
Kalimantan	Sampit, Banjarmasin, Pulang Pisau, Kotabaru, Batulicin, Mekar Putih, Bagendang, Kumai, Bumiharjo	Kalimantan

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, sea transportation services, hospital services, repair services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Perak Timur No.610, Surabaya 60165, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company manages 4 regional offices which includes 17 Port Branches as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- Keputusan Menteri Perhubungan No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 603 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- Perjanjian konsesi (Catatan 44).

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of Establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
				2018	2017	2018	2017
PT Terminal Petikemas Surabaya ("PT TPS")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Services	1999	50,50%	50,50%	1.906.460.765	1.956.847.094
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("PT BJTI")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Services	1999	96,84%	96,84%	3.614.637.234	3.506.118.050
PT Pelindo Husada Citra ("PT PHC")	Surabaya	Layanan Jasa Kesehatan/ Health Care Services	1999	98,73%	98,73%	307.164.679	293.590.391
PT Pelindo Marine Service ("PT PMS")	Surabaya	Pelayanan Jasa Perkapalan/ Shipping services	2011	97,89%	97,89%	1.515.961.390	1.325.144.432
PT Terminal Teluk Lamong ("PT TTL")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas dan Curah Kering/ Container Port Service and Dry Bulk	2013	99,50%	99,50%	584.691.292	374.983.507
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PT PDS")	Surabaya	Layanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/ Human Resources Services	2013	90,00%	90,00%	110.814.712	85.776.614

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

- Decree of Minister of Transportation No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as Port Operation Entity ("BUP").
- Decree of Minister of Transportation No. KP 603 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- Concession Agreements (Notes 44).

b. Subsidiaries and Associates

As of December 31, 2018 and 2017, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
				2018	2017	2018	2017
Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership							
Dimiliki melalui/Owned through PT BJTJ							
PT Berlian Manyar Sejahtera ("PT BMS")	Surabaya	Layanan Terminal/ Port Services	2012	60,00%	60,00%	876.948.065	870.399.764
PT Pelindo Properti Indonesia ("PT PPI")	Surabaya	Pengelolaan Properti/ Property Management	2014	99,91%	99,91%	139.085.277	131.516.374
PT Berkah Industri Mesin Angkat ("PT BIMA")	Surabaya	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Maintenance and Repair Service	2015	90,00%	90,00%	83.307.537	15.514.603
PT Terminal Curah Semarang ("PT TCS")	Semarang	Jasa Pelayanan Curah Cair dan Gas/ Liquid Bulk and Gas Service	2015	51,00%	51,00%	53.040.445	52.954.855
PT Berlian Manyar Stevedore ("PT BMST")	Gresik	Jasa Bongkar Muat/ Stevedoring Service	2016	60,00%	60,00%	688.268	722.065
Dimiliki melalui/Owned through PT PHC							
PT Prima Citra Nutrindo ("PT PCN")	Surabaya	Layanan Jasa Boga dan Nutrisi/ Catering Business	2016	70,00%	70,00%	8.295.363	7.227.583
Dimiliki melalui/Owned through PT PMS							
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya ("PT APBS")	Surabaya	Jasa Pengerukan, Jasa Reklamasi dan Pengelolaan Alur Pelayaran/ Dredging Service, Reclamation Service and Management of Shipping Channel	2014	90,00%	60,00%	456.100.756	444.578.569
PT Pelindo Energi Logistik ("PT PEL")	Surabaya	Perdagangan Jasa/ Trading Services	2014	90,00%	90,00%	562.992.029	485.969.348
PT Berkah Multi Cargo ("PT BMNGKC")	Surabaya	Jasa Angkutan Multi Moda/ Loading and Unloading of Goods to and from Ship Services	2015	90,00%	90,00%	44.278.709	1.015.157
Dimiliki melalui/Owned through PT TTL							
PT Lamong Energi Indonesi ("PT LEGI")	Surabaya	Penyediaan Energi/ Energy Provider	2014	99,00%	99,00%	84.423.327	78.033.116

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries and Associates (continued)

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
				2018	2017	2018	2017
	Dimiliki melalui/Owned through PT PDS						
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera ("PT TEDS")	Surabaya	Kegiatan Tally/ Tally Activity	2014	99,00%	99,00%	12.507.042	9.173.970
	Entitas Asosiasi/Associates Entities						
PT Portek Indonesia	Surabaya	Pemeliharaan Peralatan Bongkar Muat/ Stevedoring Equipment Maintenance	1998	49,00%	49,00%	45.545.658	115.920.153
PT Terminal Petikemas Indonesia ("PT TPI")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Service	1999	25,00%	25,00%	131.715.920	135.742.778
PT Ambang Barito Nusapersada ("PT Ambapers")	Banjarmasin	Pengelolaan Alur Pelayaran Sungai Barito/ Management of Shipping Barito River	2004	40,00%	40,00%	119.302.049	101.457.563
PT Jasa Marga Bali Tol ("PT JBT")	Bali	Pengelolaan Tol Bali/ Bali Toll Operator	2011	17,58%	17,58%	1.949.801.148	1.900.825.550
	Dimiliki melalui/Owned through PT BJTI						
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("PT BKMS")	Surabaya	Pengelolaan Kawasan Industri JIPE/ JIPE Industrial Estate Management	2012	40,00%	40,00%	4.969.892.546	4.890.829.980
PT Terminal Nilam Utara ("PT TNU")	Surabaya	Layanan Terminal Curah Cair dan Gas/ Liquid Bulk and Gas Terminal Service	2013	40,00%	40,00%	450.049.481	327.136.064
PT Energi Manyar Sejahtera ("PT EMS")	Surabaya	Jasa Pembangkit Listrik/ Power Plant Service	2015	30,00%	30,00%	1.070.672	1.044.309

PT TPS

PT TPS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No.C-6465 HT.01.01 Th.99 tanggal 9 April 1999.

Modal dasar PT TPS sebesar Rp127.884.057 terdiri dari 255.768.116 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries dan Associates (continued)

PT TPS

PT TPS was established under the Notarial Deed No. 1 dated April 1, 1999 of Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-6465 HT.01.01 Th.99 dated April 9, 1999.

The authorized capital of PT TPS amounted to Rp127,884,057 composed of 255,768,116 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT TPS (lanjutan)

- Perusahaan memiliki sebesar 50,50% atau sebanyak 129.162.897 saham dengan nilai nominal Rp64.581.448.
- P&O Dover memiliki 49,00% atau sebanyak 125.326.377 saham dengan nilai nominal Rp62.663.188.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau sebanyak 1.278.841 saham dengan nilai nominal Rp639.420.

PT BJTI

PT BJTI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 9 Januari 2002 oleh Notaris Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 tanggal 5 Maret 2002.

Anggaran Dasar PT BJTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 1 tanggal 1 Maret 2017 oleh Mira Irani, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2017 dan peningkatan modal dasar menjadi Rp4.000.000.000 terbagi atas 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham dan persetujuan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp1.114.310.000 terbagi atas 1.114.310 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0006656.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 18 Maret 2017.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 96,84% atau sebanyak 1.079.138 saham dengan nilai sebesar Rp1.079.138.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 3,16% atau sebanyak 35.172 saham dengan nilai nominal sebesar Rp35.172.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT TPS (continued)

- The Company owns 50.50% or 129,162,897 shares with total amount of Rp64,581,448.
- P&O Dover owns 49.00% or 125,326,377 shares with total amount of Rp62,663,188.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 1,278,841 shares with total amount of Rp639,420.

PT BJTI

PT BJTI was established under the Notarial Deed No. 1 dated January 9, 2002 of Notary Moendjiati Soegito S.H., Notary in Jakarta, and was approved Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 dated March 5, 2002.

PT BJTI's Articles of Association has been amended several times, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated March 1, 2017 by Mira Irani, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the approval of Company's Budget Plan (RKAP) year 2017 and increase of authorized capital to become Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and approval of reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp1,114,310,000 divided into 1,114,310 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0006656.AH.01.02. Year 2017 dated March 18, 2017.

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 96.84% or 1.079.138 shares amounting to Rp1.079.138.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 3.16% or 35.172 shares amounting to Rp35.172.000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT PHC

PT PHC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 September 1999 oleh Notaris Syafran, S.H., Notaris di Semarang, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, tanggal 13 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 13 September 1999.

Modal dasar PT PHC sebesar Rp142.000.000 terdiri dari 284.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 98,73% atau sebanyak 280.400.000 saham dengan nilai nominal Rp140.200.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,27% atau sebanyak 3.600.000 saham dengan nilai nominal Rp1.800.000.

PT PMS

PT PMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Desember 2011 oleh Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-34988.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.

Modal dasar PT PMS sebesar Rp260.500.000 terdiri dari 260.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 97,89% atau sebanyak 255.000.000 saham dengan nilai nominal Rp255.000.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 2,11% atau sebanyak 5.500.000 saham dengan nilai nominal Rp5.500.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT PHC

PT PHC was established under Notarial Deed No. 1 dated September 1, 1999 of Notary Syafran, S.H., Notary at Semarang, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, dated September 13, 1999 and was published in the State Gazette No. 11, dated September 13, 1999.

The authorized capital of PT PHC amounted to Rp142,000,000 composed of 284,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 98.73% or 280,400,000 shares with total amount of Rp140,200,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.27% or 3,600,000 shares with total amount of Rp1,800,000.

PT PMS

PT PMS was established under the Notarial Deed No. 8 dated December 31, 2011, of Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-34988.AH.01.01 Year 2012 dated September 27, 2012.

The authorized capital of PT PMS amounted to Rp260,500,000 composed of 260,500,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 97.89% or 255,000,000 shares with total amount of Rp225,000,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 2.11% or 5,500,000 shares with total amount of Rp5,500,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT TTL

PT TTL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 309 tanggal 30 Desember 2013, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., Master Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014.

Modal dasar PT TTL sebesar Rp400.000.000. terdiri dari 400.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000. (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 99,50% atau sebanyak 134.325 saham dengan nilai nominal Rp134.325.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau 675 saham dengan nilai nominal Rp675.000.

PT PDS

PT PDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 10 Maret 2008 oleh Notaris Inas Abdullah Thalib, S.H., Notaris di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 tanggal 16 April 2008.

Modal dasar PT PDS sebesar Rp50.000.000 terdiri dari 35.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 31.500 saham dengan nilai nominal Rp15.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 10,00% atau sebanyak 3.500 saham dengan nilai nominal Rp1.750.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT TTL

PT TTL was established under Notarial Deed No. 309 dated December 30, 2013, of Notary Yatiningsih, S.H., Master of Laws, Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-10997.AH.01.01 Year 2014 dated March 13, 2014.

The authorized capital of PT TTL amounted to Rp400,000,000. composed of 400,000 shares with par value of Rp1.000. (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 99.50% or 134,325 shares with total amount of Rp134,325,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 675 shares with total amount of Rp675,000.

PT PDS

PT PDS was established under Notarial Deed No. 41 dated March 10, 2008 of Notary Inas Abdullah Talib, S.H., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 dated April 16, 2008.

The authorized capital of PT PDS amounted to Rp50,000,000 composed of 35,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 90.00% or 31,500 shares with total amount of Rp15,750,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 3,500 shares with total amount of Rp1,750,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT BMS

PT BMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 12 Juni 2012 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya. PT BMS secara resmi telah menjadi BUP, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.164 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013.

Modal dasar PT BMS adalah sebesar Rp1.000.000.000 terdiri dari 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 432.600 saham dengan nilai sebesar Rp432.600.000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara ("PT UEPN") memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 288.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.400.000.

PT PPI

PT PPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Desember 2014 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0130014.40.80.2014 tanggal 12 Desember 2014.

Modal dasar PT PPI adalah sebesar Rp220.000.000 terdiri dari 220.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 99,91% atau sebanyak 84.920.000 saham dengan nilai sebesar Rp84.920.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 0,09% atau sebanyak 80.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp80.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT BMS

PT BMS was established under Notarial Deed No. 12 dated June 12, 2012 of Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya. PT BMS had officially become BUP, by Minister of Transportation under Decision Letter No. KP.164 Year 2013 dated February 15, 2013.

The authorized capital of PT BMS amounted to Rp1,000,000,000 composed of 1,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 60.00% or 432,600 shares amounting to Rp432,600,000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara ("PT UEPN") owns 40.00% or 288,400 shares amounting to Rp288,400,000.

PT PPI

PT PPI was established under Notarial Deed No. 5 dated December 5, 2014 by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014.

The authorized capital of PT PPI amounted to Rp220,000,000 composed of 220,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 99.91% or 84,920,000 shares amounting to Rp84,920,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.09% or 80,000 shares amounting to Rp80,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT BIMA

PT BIMA didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 11 November 2015 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2468002.AH.01.01 tanggal 23 November 2015.

Modal dasar PT BIMA adalah sebesar Rp10.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 90,00% atau 6.750 saham dengan nilai sebesar Rp6.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp750.000.

PT TCS

PT TCS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 189 tanggal 15 Desember 2015, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0003534.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2016.

Modal dasar PT TCS adalah sebesar Rp240.000.000 terdiri dari 240.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 51,00% atau sebanyak 30.600 saham dengan nilai sebesar Rp30.600.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 29.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp29.400.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT BIMA

PT BIMA was established under Notarial Deed No. 6 dated November 11, 2015, by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2468002.AH.01.01 dated November 23, 2015.

The authorized capital of PT BIMA amounted to Rp10,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 90.00% or 6,750 shares amounting to Rp6,750,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 750 shares amounting to Rp750,000.*

PT TCS

PT TCS was established, under Notarial Deed No. 189 dated December 15, 2015, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0003534.AH.01.01 dated January 21, 2016.

The authorized capital of PT TCS amounted to Rp240,000,000 composed of 240,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 51.00% or 30.600 shares amounting to Rp30,600,000.*
- *PT Andahanesa Abadi owns 49.00% or 29,400 shares amounting to Rp29,400,000.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT BMST

PT BMST didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 241 tanggal 28 Januari 2016, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013280.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2016.

Modal dasar PT BMST adalah sebesar Rp2.000.000 terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- PT UEPN memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 200 saham dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.

PT PCN

PT PCN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 11 Januari 2016, oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.

Modal dasar PT PCN adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PHC memiliki sebesar 70,00% atau sebanyak 7.000 saham dengan nilai sebesar Rp3.500.000.
- PT BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 3.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT BMST

PT BMST was established under Notarial Deed No.241 dated January 28, 2016 by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0013280.AH.01.11 dated January 30, 2016.

The authorized capital of PT BMST amounted to Rp2.000.000 composed of 2.000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 60.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.
- PT UEPN owns 40.00% or 200 shares amounting to Rp200,000.

PT PCN

PT PCN was established under Notarial Deed No. 35 dated January 11, 2016, by Notary Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0002328.AH.01.01 Year 2016 dated January 15, 2016.

The authorized capital of PT PCN amounted to Rp20,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PHC owns 70.00% or 7,000 shares amounting to Rp3,500,000.
- PT BJTI owns 30.00% or 3,000 shares amounting to Rp1,500,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT APBS

PT APBS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 21 April 2014 oleh Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-06051.40.10.2014 tanggal 25 April 2014.

Modal dasar PT APBS adalah sebesar Rp750.000.000 terdiri dari 750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 168.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp168.750.000.
- Van Oord memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.
- Gerbang Sarana Utama memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.

PT PEL

PT PEL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 9 September 2014 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2963.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014.

Modal dasar PT PEL adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 9.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.000.000.
- PT PEL (pembelian kembali) memiliki sebesar 9,00% atau sebanyak 900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp900.000.
- PT BJTI memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 100.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT APBS

PT APBS was established under Notarial Deed No. 9 dated April 21, 2014 by Notary Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notary in Depok, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-06051.40.10.2014 dated April 25, 2014.

The authorized capital of PT APBS amounted to Rp750,000,000 composed of 750,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PMS owns 90.00% or 168,750,000 shares amounting to Rp168,750,000.
- Van Oord owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.
- Gerbang Sarana Utama owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.

PT PEL

PT PEL was established under Notarial Deed No. 2 dated September 9, 2014, by Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2963.40.10.2014 dated October 14, 2014.

The authorized capital of PT PEL amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PMS owns 90.00% or 9,000,000 shares amounting to Rp9,000,000.
- PT PEL (buyback) owns 9.00% or 900,000 shares amounting to Rp900,000.
- PT BJTI owns 1.00% or 100,000 shares amounting to Rp100,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT BMC

PT BMC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 16 Desember 2015, oleh Notaris Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU.2473417.AH.01.01 tanggal 21 Desember 2015.

Modal dasar PT BMC adalah sebesar Rp4.000.000 terdiri dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 900 saham dengan nilai sebesar Rp900.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

PT LEGI

PT LEGI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 8 Desember 2014, oleh Notaris Yatiningsih, SH., M.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005031.AH.01.01 tanggal 3 Februari 2015.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Akta Notaris No. 35 oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., tanggal 7 Juni 2017, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak saham PT TTL pada Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 91 saham atau sebesar Rp91.000. Penjualan saham tersebut telah disahkan dengan akta jual beli saham No. 36 tanggal 7 Juni 2017 oleh Yatiningsih, S.H., M.H..

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT BMC

PT BMC was established under Notarial Deed No.17 dated December 16, 2015, by the Notary Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notary in Kendal, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU.2473417.AH.01.01 dated December 21, 2015.

The authorized capital of PT BMC amounted to Rp4,000,000 composed of 1,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PMS owns 90.00% or 900 shares amounting to Rp900,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.

PT LEGI

PT LEGI was established under Notary Deed No. 58 dated December 8, 2014 by Notary Yatiningsih, SH., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0005031.AH.01.01 on February 3, 2015.

Based on Extraordinary General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 35 dated June 7, 2017 by Yatiningsih, S.H., M.H., the shareholders approved and authorized the transfer of shares from PT TTL to Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to 91 shares or equivalent to Rp91,000. The transfer of shares was approved by Deed of Sale and Purchase of shares No. 36 dated June 7, 2017 by Yatiningsih, S.H., M.H..

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT LEGI (lanjutan)

Modal dasar PT LEGI adalah sebesar Rp36.000.000 terdiri dari 36.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT TTL memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 9.009 saham dengan nilai sebesar Rp9.009.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 91 saham dengan nilai nominal sebesar Rp91.000.

PT TEDS

PT TEDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 360 tanggal 29 September 2014, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-306131.40.10.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Modal dasar PT TEDS adalah sebesar Rp5.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PDS memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 3.960 saham dengan nilai sebesar Rp1.980.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 40 saham dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 175 tanggal 21 September 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-2242 HT.01.01 TH2000 tanggal 14 Februari 2000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT LEGI (continued)

The authorized capital of PT LEGI amounted to Rp36,000,000 composed of 36,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT TTL owns 99.00% or 9,009 shares amounting to Rp9,009,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 91 shares amounting to Rp91,000.

PT TEDS

PT TEDS was established under Notarial Deed No. 360 dated September 29 2014, by Notary Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-306131.40.10.2014 dated October 21, 2014.

The authorized capital of PT TEDS amounted to Rp5,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PDS owns 99.00% or 3,960 shares amounting to Rp1,980,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 40 shares amounting to Rp20,000.

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia was established under Notary Deed No. 175 dated September 21, 1999 by Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-2242 HT.01.01 TH2000 dated February 14, 2000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT Portek Indonesia (lanjutan)

Modal dasar PT Portek Indonesia adalah sebesar USD2.000.000 (angka penuh) terdiri dari 400 saham dengan nilai nominal USD5.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 49 saham dengan nilai sebesar Rp2.670.500.
- Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapura memiliki 51,00% atau sebanyak 51 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.779.500.

PT TPI

PT TPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 10 April 2013, oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar PT TPI adalah sebesar Rp500.000.000 terdiri dari 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT Portek Indonesia (continued)

The authorized capital of PT Portek Indonesia amounted to USD2,000,000 (full amount) composed of 400 shares with par value of USD5,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 49.00% or 49 shares amounting to Rp2,670,500.
- Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapore owns 51.00% or 51 shares amounting to Rp2,779,500.

PT TPI

PT TPI was established under Notary Deed No. 36 dated April 10, 2013 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-21873.AH.01.01. Year 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of PT TPI amounted to Rp500,000,000 composed of 500,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT Ambapers

PT Ambapers didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 26 Maret 2004 oleh Notaris Grace Senda Sardjito, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-14469 HT.01.TH.2004 11 Juni 2004.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 16 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., tanggal 9 Maret 2018, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp5.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 33 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., tanggal 21 Maret 2017, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp6.000.000.

Modal dasar PT Ambapers adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 6.000 saham dengan nilai sebesar Rp6.000.000.
- PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 60,00% atau sebanyak 9.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT Ambapers

PT Ambapers was established under Notary Deed No. 9 dated March 26, 2004 by Notary Grace Senda Sardjito, S.H., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-14469 HT.01.TH.2004 dated June 11, 2004.

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 16 dated March 9, 2018 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp5.000.000.

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 33 dated March 21, 2017 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp6.000.000.

The authorized capital of PT Ambapers amounted to Rp20,000,000 composed of 20,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 40.00% or 6,000 shares amounting to Rp6,000,000.
- PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan owns 60.00% or 9,000 shares amounting to Rp9,000,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT JBT

PT JBT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 oleh Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 tanggal 25 November 2011.

Modal dasar PT JBT adalah sebesar Rp745.434.000 terdiri dari 745.434 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 17,58% atau sebanyak 131.048 saham dengan nilai sebesar Rp131.048.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 55,00% atau sebanyak 409.993 saham dengan nilai nominal sebesar Rp409.993.000.
- Pemerintah Provinsi Bali memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- Pemerintah Kabupaten Badung memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- PT Angkasa Pura I memiliki 8,00% atau sebanyak 59.635 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.635.000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Utama Karya (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Wijaya Karya Persero Tbk memiliki 0,40% atau sebanyak 2.982 saham dengan nominal sebesar Rp2.982.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT JBT

PT JBT was established under Notary Deed No. 2 dated August 22, 2011 by Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 dated November 25, 2011.

The authorized capital of PT JBT amounted to Rp745,434,000 composed of 745,434 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 17.58% or 131,048 shares amounting to Rp131,048,000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 55.00% or 409,993 shares amounting to Rp409,993,000.
- Government of Bali Province owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- Government of Badung District owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- PT Angkasa Pura I owns 8.00% or 59,635 shares amounting to Rp59,635,000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Utama Karya (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 0.40% or 2,982 shares amounting to Rp2,982,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT BKMS

PT BKMS didirikan dengan Akta Notaris No. 56 tanggal 18 Mei 2012 oleh Notaris Ardi Kristiar berkedudukan di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Andayani Risilawati SH., MH., CN., No. 01 tanggal 19 Maret 2014 berkedudukan di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0019775 tanggal 27 Maret 2015.

Modal dasar PT BKMS adalah sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 800.000 saham dengan nilai sebesar Rp800.000.000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) memiliki 60,00% atau sebanyak 1.200.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000.

PT TNU

PT TNU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 23 Agustus 2013 oleh Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-13479.AH.01.01 tahun 2014.

Modal dasar PT TNU adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 68.500 saham dengan nilai sebesar Rp68.500.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki 60,00% atau sebanyak 102.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp102.750.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT BKMS

PT BKMS was established Akby deed, No. 56 dated May 18, 2012 by Notary Ardi Kristiar, in Jakarta and has recent amended by Notary Andayani Risilawati, SH., MH., CN., No. 01 dated March 19, 2014 domiciled in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0019775 dated March 27, 2015.

The authorized capital of PT BKMS amounted to Rp4,000,000,000 composed of 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 40.00% or 800,000 shares amounting to Rp800,000,000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) owns 60.00% or 1,200,000 shares amounting to Rp1,200,000,000.

PT TNU

PT TNU was established under Notary Deed No. 89 dated August 23, 2013 of Notary Yulia, SH., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-13479.AH.01.01 2014.

The authorized capital of PT TNU amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 40.00% or 68,500 shares amounting to Rp68,500,000.
- PT Andahanesa Abadi owns 60.00% or 102,750 shares amounting to Rp102,750,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT EMS

PT EMS didirikan berdasarkan Akta No.14 tanggal 5 Maret 2015 dari Yulia, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010566.AH.01.01 tanggal 6 Maret 2015.

Modal dasar PT EMS adalah sebesar Rp4.000.000 terdiri dari 4.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- PT UEPN memiliki 45,00% atau sebanyak 450 saham dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.
- PT Santiniluwansa Lestari memiliki 15,00% atau sebanyak 150 saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.
- PT Amanah Indo Invest memiliki 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

**c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Komite Good Corporate Governance dan
Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan
dan Karyawan**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 20 September 2018 dan SK-289/MBU/11/2018 tanggal 9 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT EMS

PT EMS was established under Notary Deed No. 14 dated March 5, 2015 by Yulia, SH., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0010566.AH.01.01 dated March 6, 2015.

The authorized capital of PT EMS amounted to Rp4,000,000 composed of 4,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 30.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.*
- *PT UEPN owns 45.00% or 450 shares amounting to Rp450,000.*
- *PT Santiniluwansa Lestari owns 15.00% or 150 shares amounting to Rp150,000.*
- *PT Amanah Indo Invest owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.*

**c. Board of Commissioners, Board of
Directors, Audit Committee, Good
Corporate Governance Committee and Risk
Management, Corporate Secretary and
Employees**

Based on the Statement of Decree of the Minister of State Owned Enterprise (SOE) in lieu of the General Meeting of the Company's Shareholders No. SK-244/MBU/09/2018 dated September 20, 2018, and SK-289/MBU/11/2018 dated November 9, 2018, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2018 are as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

- c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Hari Bowo
Komisaris Independen	Heddy Lugito
Komisaris Independen	Zainal Abidin
Komisaris	Wahju Satrio Utomo
Komisaris	Dedi Syarif Usman

Dewan Direksi

Direktur Utama	Doso Agung
Direktur Operasi dan Komersial	Putut Sri Mulyanto
Direktur Teknik	Joko Noerhudha
Direktur SDM	Toto Heliyanto
Direktur Keuangan	Iman Rachman
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Toto Nugroho

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-89/MBU/5/2017 tanggal 4 Mei 2017, SK-198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Hari Bowo
Komisaris	Soritaon Siregar
Komisaris	Heddy Lugito
Komisaris	Wahju Satrio Utomo
Komisaris	Zainal Abidin

Dewan Direksi

Direktur Utama	I Gusti Ngurah Askhara D.
Direktur	Muhammad Iqbal
Direktur	Husein Latif
Direktur	Toto Heliyanto
Direktur	U. Saefudin Noer

1. GENERAL (continued)

- c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management, Corporate Secretary and Employees (continued)

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner

Board of Commissioners

Board of Directors

President Director
Operational and Commercial Director
Technical Director
Human Resources Director
Finance Director
Business Transformation and Development Director

Based on the Statement of Decree of the Minister of SOE in lieu of the General Meeting of the Company's Shareholders No. SK-89/MBU/5/2017 dated 4 May 2017, No. SK-198/MBU/09/2017 dated 14 September 2017 the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2017 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director
Director

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Komite Audit, Komite *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Zainal Abidin
Anggota	Andi Sudhana
Anggota	Amilin

Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko

Ketua	Heddy Lugito
Anggota	Pandu Fajar Wisudha
Anggota	Tubagus Arief Fahmi

Sekretaris Perusahaan

Faruq Hidayat

Susunan Komite Audit, Komite *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Soritaon Siregar
Anggota	Andi Sudhana
Anggota	Amilin

Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko

Ketua	Heddy Lugito
Anggota	Pandu Fajar Wisudha
Anggota	Ivan Malik

Sekretaris Perusahaan

Faruq Hidayat

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebanyak 4.855 dan 4.467 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management, Corporate Secretary and Employees (continued)

The Company's Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management and Corporate Secretary as of December 31, 2018 are as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Good Corporate Governance Committee and Risk Management

Chairman
Member
Member

Corporate Secretary

The Company's Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management and Corporate Secretary as of December 31, 2017 are as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Good Corporate Governance Committee and Risk Management

Chairman
Member
Member

Corporate Secretary

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2018 and 2017 are 4,855 and 4,467 employees, respectively (unaudited).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah.

e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 11 April 2019 Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

1. GENERAL (continued)

d. Reporting Currency

The Group's reporting currency is Rupiah.

e. Completion of consolidated financial statements

The consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2018 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on April 19, 2019 by The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

Perusahaan memiliki kontrol atas entitas anak apabila Perusahaan memiliki dampak dari atau memiliki hak atas penerimaan/imbal hasil variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk penerimaan tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak.
- menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP.
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada.
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima.
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Group mentioned in Note 1.

The Company have control to entity when the Company have an impact to, or has right of, variable return from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

If it loses control over a subsidiary, the Group:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries.*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI.*
- *derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity.*
- *recognizes the fair value of the consideration received.*
- *recognizes the fair value of any investment retained.*
- *recognizes any surplus or deficit in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Kelompok Usaha dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries entity that not attributable directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not impact in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's and non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent Company.

c. Foreign currency transactions and balances

The Group applied PSAK 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (nilai penuh):

	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	14.481

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

f. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Foreign currency transactions and balances
(continued)**

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2018 and 2017 (full amount):

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	13.548	United States Dollar (USD) 1

Exchange differences arising on the settlement of monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

d. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

e. Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

f. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya.

h. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan di mana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk *goodwill* diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lainnya. Mutasi penghasilan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66, "Pengaturan Bersama".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

h. Investment in associates

Associates entities over which the Group has significant influence but not control. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Group's investment in associates including goodwill is identified on acquisition, net of impairment loss.

The Group's share of profits or losses in its associates post acquisition is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Group's share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

The Group does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the Group ceases to have significant influence over an associate and records for the investment in accordance with PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement", from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK 66, "Joint Arrangement".

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Ketika kehilangan pengaruh signifikan, maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap selisih antara:

- nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan
- jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014).

i. Properti investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan *rental* atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Kelompok Usaha telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa tanah dan bangunan (10-50 tahun).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Investment in associates (continued)

On the loss of significant influence, the Group shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Group shall recognize in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income any difference between:

- the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and
- the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.

When an investment ceases to be an associate and is recorded for in accordance with PSAK 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK 55 (Revised 2014).

i. Investment properties

Investment properties represent properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Group has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of land and building (10-50 years).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

j. Aset tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan yang lebih pendek antara estimasi umur manfaat ekonomis dan masa konsesi sebagai berikut:

Jenis Aset	Tahun/Years
Bangunan fasilitas pelabuhan	2 - 50
Kapal	4 - 20
Alat fasilitas pelabuhan	2 - 20
Instalasi fasilitas pelabuhan	2 - 50
Jalan dan bangunan	2 - 50
Peralatan	3 - 25
Kendaraan	4 - 5
Emplasemen	3 - 50

Sejak 1 Juli 2016, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan dicatat pada nilai revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup berkala untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Investment properties (continued)

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

j. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets starts when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

Type of Assets
Port facility
Ships
Port facility equipment
Port facility installation
Building and roads
Equipments
Vehicles
Emplacement

Since July 1, 2016, Port Facility and Port Facility Equipment are stated at their revalued amount. Revaluations are performed with sufficient regularity such that the carrying amount is not different materially from that which would be determined using fair values at the statement of financial position.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan yang berasal dari revaluasi Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan tersebut langsung dikreditkan ke surplus revaluasi pada bagian penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelum penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap dibebankan dalam laba rugi apabila penurunannya tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Kelompok Usaha menetapkan bahwa:

- Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan cara dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.
- Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dipindahkan ke dalam saldo laba pada saat penghentian/pelepasan aset oleh entitas. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

Perusahaan menerapkan ISAK No.25 tentang "Hak Atas Tanah", yang menyatakan bahwa hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal atas hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Fixed assets (continued)

Any revaluation increase arising from the revaluation of such Building Port Facility and Port Facility Tool is credited to fixed asset revaluation surplus in the other comprehensive income section, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising from the evaluation of such fixed asset is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the fixed asset revaluation surplus relating to a previous revaluation of such fixed asset, if any.

The Group's decided to:

- Accumulated depreciation at the date of revaluation to be treated by eliminating the gross carrying amount and the carrying amount of net assets after elimination is restated as revaluation amount of assets.
- The revaluation surplus included in equity is transferred to retained earnings upon termination/disposal of assets by the entity. Transfer of revaluation surplus to retained earnings is not made through profit or loss.

The Company adopted Interpretation of ISAK No.25 on "Land Rights", which states that land rights are stated at cost and not depreciated, unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land is likely or definitely not be obtained. The cost of legal rights to land when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition of land. The cost of the extension or renewal of legal rights to land is recognized as intangible assets and amortized over the life of the legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Aset tetap (lanjutan)

Biaya perbaikan dan pemugaran terminal pelabuhan dan lahan penumpukan yang dioperasikan oleh entitas anak dalam jangka waktu tertentu dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan masa perbaikan berikutnya atau jangka waktu operasional entitas anak berakhir.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan laba (rugi) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat suatu aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat penyusutan aset yang bersangkutan.

Biaya pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan

Masa manfaat dalam mempertahankan kedalaman alur dan kolam pelabuhan tersebut adalah 5 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus apabila pekerjaan pengerukan tersebut perlu dilakukan kembali.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

k. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Fixed assets (continued)

The costs of repairs and restoration of container yard and port terminals operated by the subsidiaries within a certain period of time are capitalized when incurred and amortized on a straight line basis until the time of the next repair or operating period of the subsidiaries ends.

The routine repair and maintenance are expensed to profit (loss) as incurred. Repairs which add useful life of the fixed assets are capitalized and depreciated at their applicable depreciation rates.

Dredging costs of shipping channels and port waters

The useful life of depths obtained on the dredged channels and port waters is 5 years and the remaining amortization period will be expensed off at a point when the dredging works need to be done before that period ends.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

k. Lease

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan di akhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

Kelompok Usaha sebagai lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Lease (continued)

The Group as a lessee

A finance lease that transfers to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

The Group as a lessor

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak atas tanah, aset hak konsesi, piranti lunak, goodwill, merk dagang dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: i) dilepaskan atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Kelompok Usaha terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

Goodwill tidak diamortisasi namun penurunan nilainya dievaluasi setidaknya secara tahunan atau lebih, bila terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk keperluan pengujian penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas yang diharapkan dapat memanfaatkan sinergi dari kombinasi bisnis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets

Intangible assets of the Group consist of land rights, concession rights asset, software, goodwill, trademark and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset shall be derecognized: i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, whose benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

Goodwill

Goodwill represents the excess of acquisition cost of the Group ownership over the fair value of the acquiree's net asset. Non-controlling interest is measured at proportional of non-controlling interest ownership over net asset which identified on the acquisition date.

Goodwill is not amortized but the impairment value is reviewed at least annually or more frequently when there is an indication of impairment value. For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the cash-generating units expected to benefit from the synergies of the business combination.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

1. Aset takberwujud (lanjutan)

Jika jumlah tercatat dari unit penghasil kas tersebut kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* pada unit penghasil kas tersebut dan kemudian pada aset lainnya dari unit penghasil kas tersebut atas dasar proporsional. Kerugian penurunan nilai *goodwill* tidak dipulihkan pada tahun berikutnya.

Goodwill dievaluasi dengan mempertimbangkan hasil usaha tahun berjalan dan prospek di masa yang akan datang dari entitas anak secara berkala.

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" sehubungan dengan Hak Konsesi.

ISAK No. 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK No. 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK No. 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset hak konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset hak konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jasa kepelabuhanan yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi diakui sebagai aset hak konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset hak konsesi tersebut siap digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Intangible assets (continued)

If the recorded amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment losses are allocated firstly to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets using prorate basis. An impairment loss of goodwill is not reversed in the subsequent period.

Goodwill is evaluated periodically by considering the current year operating results and future prospects of the subsidiary.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK No. 16, "Service Concession Arrangement" and ISAK No. 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" related to the concession rights.

ISAK No. 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK No. 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK No. 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession rights assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession rights assets are sea port services concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation. During the construction period, the accumulated construction cost is recognized as concession rights assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession rights assets are ready to be operated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

1. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Aset hak konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset hak konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa syarat.

Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

Kelompok Usaha menetapkan margin konstruksi untuk konsesi sebesar 1,8%.

Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")

Kontrak konstruksi APBS merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan yang dikeluarkan sehubungan dengan proses persiapan pembangunan dan seluruh biaya konstruksi pembangunan pengerukan alur (*Capital Dredging*) dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung serta biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Terminal Multipurpose Teluk Lamong ("TMTL")

Kontrak konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset hak konsesi TMTL yang meliputi biaya pengadaan tanah, proses studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

The concession rights assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession rights assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kementerian Perhubungan Republik Indonesia for no consideration.

The Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

The Group set a construction margin for concessions of 1.8%.

Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")

Construction contract of APBS is the cost directly attributable to the construction incurred in relation to the preparation process for construction, the entire cost of dredging construction (*Capital Dredging*), other costs related directly, and costs of borrowing related directly used to fund these asset constructions are capitalized until the construction is completed and in operation.

Terminal Multipurpose Teluk Lamong ("TMTL")

Construction contract is the cost directly attributable to the construction of TMTL concession rights assets which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus costs of borrowing directly used for financing the construction of concession rights asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

**Terminal Multipurpose Teluk Lamong
("TMTL")**

Aset hak konsesi dicatat sebesar nilai wajar, yaitu sebesar biaya konstruksi pembangunan aset hak konsesi ditambah dengan margin konstruksi yang ditentukan manajemen.

Aset hak konsesi APBS dan TMTL akan diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

**Terminal Pelabuhan Manyar Gresik
("TPMG")**

Aset hak konsesi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset hak konsesi TPMG yang meliputi biaya pembangunan fasilitas pelabuhan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan.

Aset konsesi diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan dengan metode garis lurus selama periode umur aset sampai dengan akhir periode konsesi

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset hak konsesi sebagai aset takberwujud di mana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

**Terminal Multipurpose Teluk Lamong
("TMTL")**

Concession rights assets are recorded at fair value, i.e. construction cost of concession rights assets plus a profit margin determined by the management.

Concession rights asset of APBS and TMTL are amortized over the concession period using the straight-line method.

Manyar Gresik Terminal Port ("TPMG")

Concession rights asset is the cost directly attributable to the construction of concession rights assets TPMG which includes cost of port development and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required.

The concession assets that amortized over the period of assets are expected to use using straight line method for the assets useful life up to the concession period.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession rights asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

l. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

**Terminal Pelabuhan Manyar Gresik
("TPMG") (lanjutan)**

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Aset takberwujud yang melekat pada suatu komponen fisik dan bukan merupakan bagian yang signifikan dari suatu aset fisik, diakui sebagai bagian dari aset berwujud dan diperlakukan sebagai aset tetap.

Umur manfaat suatu aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut. Akan tetapi, jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut dapat diperbarui, maka umur manfaat mencakup periode yang diperbarui, hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan yang dilakukan oleh estimasi tanpa biaya yang signifikan.

m. Kapitalisasi biaya pinjaman

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

**Manyar Gresik Terminal Port ("TPMG")
(continued)**

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Intangible assets that are attached to a physical component and are not a significant part of a physical asset, is recognized as part of the tangible assets and treated as fixed assets.

Useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of the contractual or other legal rights. However, if the contractual or other legal rights can be renewed, the useful life shall include renewal period, only if there is an evidence to support that renewal is performed without significant cost.

m. Capitalization of borrowing costs

The Group implemented PSAK 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Kapitalisasi biaya pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

n. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

o. Pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

- Pendapatan jasa kapal, jasa terminal petikemas, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.
- Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien.
- Penghasilan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai.
- Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
- Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Capitalization of borrowing costs
(continued)**

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

n. Unearned revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long-term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

o. Revenues and expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

The criteria of revenue recognition are as follows:

- Revenue from ship services, container services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.
- Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items have been delivered to the patients.
- Interest income is accrued on time basis, with reference to the outstanding principal and the applicable interest rate.
- Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts.
- Dividend revenue is recognized when the Group's right to receive the dividend payment is established.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Pendapatan dan beban (lanjutan)

- Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
- Pendapatan Kerjasama Mitra: Perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk melakukan pekerjaan tertentu atau operasi tanah dan wadah kegiatan bongkar muat. Kerjasama dengan mitra usaha adalah berdasarkan perjanjian kontrak dengan periode waktu yang disepakati bersama. Pendapatan dari mitra usaha patungan diakui berdasarkan faktur bruto (*invoice*) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Biaya yang berkaitan dengan pendapatan usaha bersama mitra disajikan dalam "biaya operasional".
- Pendapatan konstruksi. Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.
- Pendapatan atau penjualan barang diakui pada saat risiko dan hak atas kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Revenues and expenses (continued)

- Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet been billed are recorded as accrued income. Excess of payments received from customers over value of work that has been completed the are recorded as unearned revenue.
- Revenue of Partner Cooperation: The Company is cooperating with business partners to carry out a particular job or operation of land and container loading and unloading activities. Cooperation with business partners is based on contractual agreements with mutually agreed time period. Revenue from joint venture partners are recognized based on gross invoices issued by the Company to third parties. Expenses which relate to the revenue of the joint venture partners are presented as "operating expenses".
- Construction revenues. The Group recognizes intangible assets of construction services in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis.
- Revenue or sales of goods are recognized when the risks and rights of ownership of goods have passed significantly to the buyer.

Expenses are recognized when incurred on accrual basis.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

p. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Kelompok Usaha menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Kelompok Usaha memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Revenues and expenses (continued)

Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

The Group accounted for construction revenue and construction cost at the same time of recognition of intangible asset during construction phase.

p. Employee benefits

Post-employment benefits

The Group has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Group also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Other long-term employment benefits including the long services leave benefit are determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long-term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Program iuran pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, di mana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara berkala merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode di mana jasa diberikan oleh pekerja.

q. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tanah dan bangunan sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Employee benefits (continued)

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

q. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determines that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from land and building rent revenue as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

r. Instrumen keuangan

i). Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diizinkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan Piutang".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that are previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

r. Financial instruments

i). Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each financial year.

Financial assets are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

The financial assets of the Group, which include cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investment and other non-current assets, are all classified as "Loans and Receivables".

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i). Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (a). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka pendek dalam kategori ini.

- (b). Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

i). Financial assets (continued)

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (a). Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are presented in the consolidated statements of financial position at fair value with gains or losses recognized as profit or loss.

The Group has short-term investment classified under this category.

- (b). Loan and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or defined payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i). Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

**(b). Pinjaman yang diberikan dan piutang
(lanjutan)**

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini.

ii). Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha yang mencakup pinjaman bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, sewa pembiayaan, utang obligasi serta liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

i). Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

(b). Loan and receivables (continued)

The Group has cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non-current assets that are classified under this category.

ii). Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, included directly attributable transaction costs.

The financial liabilities of the Group, which include bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liabilities, finance lease, bonds payable and other non-current liabilities, are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii). Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

iii). Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iv). Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

v). Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

ii). Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii). Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a current enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

iv). Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method deducted by allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

v). Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**v). Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**v). Impairment of financial assets
(continued)**

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and on which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**v). Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**v). Impairment of financial assets
(continued)**

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a condition that the carrying amount of the financial assets exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**vi). Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan**

Aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**vi). Derecognition of financial assets and
liabilities**

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**vi). Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Liabilitas keuangan

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**vi). Derecognition of financial assets and
liabilities (continued)**

Financial assets (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

Financial liabilities

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Nilai wajar instrument keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's-length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

t. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 1.018.953 saham.

u. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined based on quoted market prices or dealer price quotation (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm's-length market transactions, referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

t. Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year, which is 1,018,953 shares.

u. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika kemungkinan kecil (*remote*) terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

w. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

x. Penurunan nilai aset non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

y. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang merupakan peristiwa non-penyesuaian diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is unlikely to take place, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

w. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated.

x. Impairment of non-financial assets

Group assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

y. Events after the reporting period

Events after reporting period that provide additional information about the Company's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru

Efektif tanggal 1 Januari 2018, Kelompok Usaha menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap Kelompok Usaha berikut ini:

- PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.
- Amendemen PSAK 13 - Properti Investasi: Pengalihan Properti Investasi.
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Adoption of new accounting standards

Effective January 1, 2018, the Group adopted several new accounting standards which are relevant to the Group as follows:

- *Amendments to PSAK 2: Statement of Cash -Flows on the Disclosures Initiative.*
- *Amendments to PSAK 13 - Investment Property: Transfer of Investment Property.*
- *Amendments to PSAK 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses.*
- *PSAK 15 (2017 Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures.*
- *PSAK 67 (2017 Improvement): Disclosure of Interests in Other Entities.*

The adoption has no significant impact on the financial reporting and disclosure in the consolidated financial statements.

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- *PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.*

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirements based on management's judgment.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

This PSAK establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- ISAK 33 - Foreign currency Transaction and Advance Consideration, effective January 1, 2019 with earlier application is permitted.

These amendments clarify the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Interpretasi ini merupakan interpretasi atas PSAK 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- Amandemen PSAK 71 - Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- ISAK 34 - *Uncertainty over Income Tax Treatments*, effective January 1, 2019 with earlier application is permitted.

This Interpretation which is the interpretation of PSAK 46: Income Taxes, clarifies and provides guidance to reflex the uncertainty of income tax treatments in the financial statements.

- *Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures*, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

These amendments provides that the entity also applies PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

- *Amendments to PSAK 71 - Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation*, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This amendments provides that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 24 (2018) - Imbalan Kerja tentang Amendemen, kurtailmen, atau Penyelesaian Program, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

- Penyesuaian 2018 PSAK 22 - Kombinasi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama, memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66), dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- *Amendments to PSAK 24 (2018) - Employee Benefits on the Plan Amendment, Curtailment or Settlement, effective January 1, 2019 with early application is permitted.*

This amendments provides clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after plan amendment, curtailment or settlement because they use the new actuarial assumptions (previously using actuary assumptions at the beginning of the period of annual report). In addition, Amendment to PSAK 24 also clarifies how the accounting requirements for plan amendment, curtailment or settlement can affect the upper limit of asset requirements which can be seen from the reduction in surplus which causes the impact of the asset's upper limit to change.

- *2018 Improvement to PSAK 22 - Business Combinations, effective January 1, 2019 with early application is permitted.*

This improvement clarifies that when one party in a joint arrangement, obtains control over a business which is a joint operation (as defined in PSAK 66), and has rights to assets and liabilities related to the joint operation shortly before date of acquisition, the transaction is a business combination that is achieved in stages.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- Penyesuaian 2018 PSAK 26 - Biaya Pinjaman, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode namun entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai.

- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- 2018 Improvement to PSAK 26 - Borrowing Costs, effective January 1, 2019 with early application is permitted.

This improvement clarifies that the capitalization rate of borrowing costs is the weighted average of borrowing costs on all loan balances over the period but the entity excludes from the calculation the borrowing costs of loans obtained specifically to obtain qualifying assets up to substantially all activities needed to prepare the assets so that can be used according to the intensity or sold has done.

- 2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes, effective January 1, 2019 with early application is permitted.

This improvement affirming the consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instruments) arises when an entity recognizes liabilities to pay dividends. The consequences of the income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distribution to the owner. Therefore, the entity recognizes the consequences of the income tax in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of the past transaction or event.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- Penyesuaian 2018 PSAK 66 - Pengaturan Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama dalam hal aktivitas operasi bersama merupakan suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis). Dalam kasus demikian, kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tidak diukur kembali.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- 2018 Improvement to PSAK 66 - Joint Arrangements, effective January 1, 2019 with early application is permitted.

This improvement clarifies that the parties participating in, but not having joint control over, a joint operation can obtain joint control over joint operations in the case that joint operating activities are a business (as defined in PSAK 22: Business Combinations). In such cases, the interests held previously in joint operations are not measured again.

The Group has presently evaluated and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS**

In the applications of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represents a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 55 (2014) dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 2.

Penyisihan penurunan nilai piutang

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan Catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. That currency is the currency that mainly influences the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities are determined by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2.

The allowance of impairment of receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customers, quality of collateral received and the customers' current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai piutang (lanjutan)

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti objektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 9.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 44a). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal Kalibaru kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal Kalibaru.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

The allowance of impairment of receivables (continued)

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, the Group includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group. Further details are disclosed in Note 9.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Otoritas Pelabuhan ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 44a). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the Kalibaru Terminal free of any form of charge to OP, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the Kalibaru Terminal.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset hak konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset hak konsesi atau peningkatan kemampuan aset hak konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset hak konsesi dan biaya konstruksi atas aset hak konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset hak konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Service concession arrangement (continued)

The Group has made judgment that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession rights asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession rights assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group recognizes construction revenue of concession rights asset and construction costs of concession rights asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar.

PSAK No. 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 42.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities

The Company applies PSAK No. 68 (Amendment 2014): Fair Value Measurement.

PSAK No. 68 (Amendment 2014): Fair Value Measurement require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities is disclosed in Note 42.

Estimate of useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12, 13, 14, 15 dan 16.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on the results of operations of the Group.

Further details are disclosed in Notes 12, 13, 14, 15 and 16.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 20.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 20.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada pendapatan komprehensif lainnya yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28.

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Kelompok usaha menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2017/31 Desember 2016 untuk mengoreksi perhitungan liabilitas imbalan kerja dan akun terkait lainnya serta untuk menyesuaikan dengan klasifikasi akun dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized as other comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. Further details are disclosed in Note 28.

4. RESTATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS

The Group restated the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2017 and for the year then ended, and consolidated statement of financial position as of January 1, 2017/December 31, 2016 to correct calculation of employee benefits liability and related accounts, and to conform with classification of accounts applied in the consolidated financial statements as of December 31, 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)**

Akun-akun yang dipengaruhi atas penyajian kembali dan reklasifikasi diikhtisarkan sebagai berikut:

**4. RESTATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)**

Accounts which were affected by the restatements and reclassification are summarized as follows:

	Dilaporkan sebelumnya/ <i>Previously reported</i>	Penyesuaian atas penyajian kembali/ <i>Restatement adjustments</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah penyajian kembali dan reklasifikasi/ <i>After restatement and reclassification</i>	
Laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2018/31 Desember 2017					Statement of financial position as of January 1, 2018/ December 31, 2017
Aset lancar					Current assets
Piutang usaha		-			Trade receivable
Pihak berelasi	268.879.466	-	(49.300.377)	219.579.089	Related parties
Pihak ketiga	557.624.460	-	(161.110.872)	396.513.588	Third parties
Piutang lain-lain		-			Other receivable
Pihak berelasi	194.736.334	-	3.500.000	198.236.334	Related parties
Pihak ketiga	27.384.747	-	-	27.384.747	Third parties
Pendapatan yang masih akan diterima	-	-	210.411.250	210.411.250	Accrued revenue
Persediaan	35.651.066	-	(10.628.365)	25.022.701	Inventories
Uang muka	218.067.687	-	(218.067.687)	-	Advances
Beban dibayar dimuka	67.790.205	-	(33.546.910)	34.243.295	Prepaid expense
Aset tetap yang dimiliki untuk dijual	1.411.936	-	(1.411.936)	-	Fixed assets held for sale
Aset lancar lainnya	-	-	24.575.506	24.575.506	Other current assets
Aset tidak lancar					Non Current Assets
Investasi pada entitas asosiasi	1.193.403.689	(11.042.373)	-	1.182.361.316	Investment in associates
Properti investasi, neto	49.443.955	-	53.802.800	103.246.755	Investment properties, net
Aset tetap, neto	11.811.833.204	-	2.284.575.078	14.096.408.282	Fixed assets, net
Piutang lain-lain	3.500.000	-	(3.500.000)	-	Other receivable
Aset takberwujud, neto	7.439.730.077	-	(2.286.846.108)	5.152.883.969	Intangible assets, net
Goodwill	1.143.301	-	(1.143.301)	-	Goodwill
Aset pajak tangguhan	20.355.840	329.840.757	-	350.196.597	Deferred tax assets, net
Aset tidak lancar lainnya	15.599.021	-	212.088.012	227.687.033	Other non current assets
Liabilitas dan ekuitas					Liabilities and equity
Utang usaha		-			Trade payables
Pihak berelasi	182.569.128	-	(176.961.803)	5.607.325	Related parties
Pihak ketiga	928.788.363	-	(228.590.789)	700.197.574	Third parties
Utang lain-lain		-			Other payables
Pihak berelasi	-	-	128.805.326	128.805.326	Related parties
Pihak ketiga	-	-	268.392.983	268.392.983	Third parties
Uang persekot/panjar	50.042.010	-	(50.042.010)	-	Advances from customer
Uang titipan	131.237.654	-	(131.237.654)	-	Fund retained
Utang dana pensiun	4.030.109	-	(4.030.109)	-	Pension fund payable
Pendapatan diterima dimuka	60.288.736	-	181.279.664	241.568.400	Unearned revenue
Utang lancar lainnya	3.343.819	-	(3.343.819)	-	Other current payable
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	-	7.400.601	7.400.601	Other current liabilities
Bagian lancar liabilitas jangka panjang :					Current portion of long-term liabilities :
Liabilitas imbalan kerja	31.013.653	-	(31.013.653)	-	Employee benefits
Utang bank	3.565.584.964	16.790.749	-	3.582.375.713	Long-term bank loans
Surat berharga yang diterbitkan	6.709.109.457	5.309.615	-	6.714.419.072	Securities issued
Liabilitas pajak tangguhan	116.796.889	(54.208.694)	-	62.588.195	Deferred tax liabilities
Utang sewa pembiayaan	-	63.257.235	-	63.257.235	Finance lease liability
Uang jaminan	4.610.340	-	(4.610.340)	-	Guaranteed deposit received
Liabilitas imbalan kerja	349.970.189	1.968.640.273	-	2.318.610.462	Employee benefits liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	4.610.340	4.610.340	Other non current liabilities
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	6.021.594.418	443.684	-	6.022.038.102	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	1.470.490.226	(1.260.543.546)	-	209.946.680	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	1.076.483.328	(358.135.905)	-	718.347.423	Other comprehensive income
Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	66.881.155	(10.460.906)	-	56.420.249	Difference from changes in equity in subsidiaries and effects of transaction with non- controlling interest
Kepentingan non pengendali	1.329.465.447	646.903	-	1.330.112.350	Non controlling interest

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)**

Akun-akun yang dipengaruhi atas penyajian kembali dan reklasifikasi diikhtisarkan sebagai berikut:
(lanjutan)

**4. RESTATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)**

Accounts which were affected by the restatements and reclassification are summarized as follows:
(continued)

	Dilaporkan sebelumnya/ Previously reported	Penyesuaian atas penyajian kembali/ Restatement adjustments	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah penyajian kembali dan reklasifikasi/ After restatement and reclassification	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017					Statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2017
Beban operasi	(5.687.053.398)	(196.213.161)	-	(5.883.266.559)	Operating expenses
Laba pelepasan aset tetap dan properti investasi	(3.076.219)	-	3.076.219	-	Gain on disposals of fixed assets and investment properties
Pendapatan keuangan	101.262.769	10.308.972	-	111.571.741	Finance Income
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	57.286.261	(57.286.261)	-	-	Gain (loss) on foreign exchange-net
Pendapatan operasi lainnya - neto	(12.894.640)	-	(54.210.042)	(67.104.682)	Other operating income-net
Beban pajak penghasilan badan tangguhan	(171.411.538)	56.874.885	-	(114.536.653)	Deferred corporate income tax expense
Penghasilan komprehensif lainnya					Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas imbalan pasti	(67.566.884)	(477.670.167)	-	(545.237.051)	Remeasurement of defined benefit plans
Pajak penghasilan terkait	16.891.721	119.417.542	-	136.309.263	Related income taxes
Laba yang dapat diatribusikan kepada:					Profit attributable to:
Pemilik entitas induk	1.470.490.226	(128.969.104)	-	1.341.521.122	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	563.617.022	(60.199)	-	563.556.823	Non-controlling interests
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					Comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas Induk	1.419.065.714	(487.221.729)	-	931.843.985	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	564.366.371	(60.199)	-	564.306.172	Non-controlling interests
Laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2017/31 Desember 2016					Statement of financial position as of January 1, 2017/ December 31, 2016
Aset lancar					Current assets
Piutang usaha					Trade receivable
Pihak berelasi	43.286.454	-	(19.872.637)	23.413.817	Related parties
Pihak ketiga	484.023.080	-	(71.225.025)	412.798.055	Third parties
Pendapatan yang masih akan diterima	-	-	91.097.662	91.097.662	Accrued revenue
Uang muka	1.176.361.747	-	(1.176.361.747)	-	Advances
Beban dibayar dimuka	71.536.742	-	(8.620.205)	62.916.537	Prepaid expense
Aset tetap yang dimiliki untuk dijual	955.584	-	(955.584)	-	Fixed assets held for sale
Aset lancar lainnya	-	-	22.775.409	22.775.409	Other current assets
Aset tidak lancar					Non current assets
Properti investasi, neto	55.178.190	-	53.802.800	108.980.990	Investment properties, net
Investasi pada entitas asosiasi	1.101.729.177	(13.442.373)	-	1.088.286.804	Investment in associates
Aset tetap, neto	9.770.759.518	-	1.935.630.466	11.706.389.984	Fixed assets, net
Piutang lain-lain	7.000.000	-	(7.000.000)	-	Other receivables
Aset takberwujud, neto	6.487.110.116	-	(1.923.925.425)	4.563.184.691	Intangible assets, net
Goodwill	1.143.301	-	(1.143.301)	-	Goodwill
Aset pajak tangguhan	115.098.328	206.523.937	-	321.622.265	Deferred tax assets, net
Aset tidak lancar lainnya	9.119.642	-	1.171.181.015	1.180.300.657	Other non current assets

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)**

Akun-akun yang dipengaruhi atas penyajian kembali dan reklasifikasi diikhtisarkan sebagai berikut:
(lanjutan)

**4. RESTATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)**

Accounts which were affected by the restatements and reclassification are summarized as follows:
(continued)

	Dilaporkan sebelumnya/ Previously reported	Penyesuaian atas penyajian kembali/ Restatement adjustments	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah penyajian kembali dan reklasifikasi/ After restatement and reclassification	
Laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2017/31 Desember 2016 (lanjutan)					Statement of financial position as of January 1, 2017/ December 31, 2016 (continued)
Liabilitas dan ekuitas					Liabilities and equity
Utang usaha					Trade payables
Pihak berelasi	213.063.833	-	(193.475.739)	19.588.094	Related parties
Pihak ketiga	670.225.860	-	(93.138.856)	577.087.004	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	-	-	210.579.835	210.579.835	Related parties
Pihak ketiga	-	-	76.034.760	76.034.760	Third parties
Uang persekot/panjar	48.180.532	-	(48.180.532)	-	Advances from customer
Uang titipan	80.309.518	-	(80.309.518)	-	Retained fund
Utang dana pensiun	3.891.187	-	(3.891.187)	-	Pension fund payable
Pendapatan diterima dimuka	76.663.034	-	128.490.050	205.153.084	Unearned revenue
Utang lancar lainnya	2.265.071	-	(2.265.071)	-	Other current payable
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	-	6.156.258	6.156.258	Other current liabilities
Bagian lancar liabilitas jangka panjang :					Current maturities of long-term liabilities:
Liabilitas imbalan kerja	36.242.044	-	(36.242.044)	-	Employee benefits
Liabilitas pajak tangguhan	57.019.106	(1.232.633)	-	55.786.473	Deferred tax liabilities
Utang bank	2.177.131.455	24.071.092	-	2.201.202.547	Long-term bank loans
Surat berharga yang diterbitkan	6.645.931.711	4.398.246	-	6.650.329.957	Securities issued
Utang sewa pembiayaan	-	67.289.363	-	67.289.363	Finance lease liability
Uang jaminan	5.581.612	-	(5.581.612)	-	Guaranteed deposit received
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	247.846.386	1.331.151.482	-	1.578.997.868	Long-term employee benefits liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	5.581.612	5.581.612	Other non current liabilities
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	5.297.104.815	-	-	5.297.104.815	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	1.037.329.721	(1.131.574.442)	-	(94.244.721)	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	1.127.907.840	-	116.720	1.128.024.560	Other comprehensive income
Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	62.460.000	(1.737.486)	-	60.722.514	Difference from changes in equity in subsidiaries and effects of transaction with non-controlling interest
Kepentingan nonpengendali	1.101.724.224	2.224.695	-	1.103.948.919	Non-controlling interest

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Kas	2.107.112	2.815.391	Cash on hand
Bank	657.439.613	715.356.644	Cash in banks
Deposito berjangka	3.952.500.571	2.032.355.436	Time deposit
Total kas dan setara kas	4.612.047.296	2.750.527.471	Total cash and cash equivalents

a. Kas

a. Cash on hand

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Rupiah	2.107.112	2.815.391	Rupiah

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

b. Bank

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Rupiah:		
Pihak ketiga		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	49.117.912	87.515.235
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	37.112.935	48.141.286
PT Bank Permata Tbk	15.120.598	5.675.641
PT Bank DBS Indonesia	7.187.150	7.051.100
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.033.361	2.235.776
PT Bank Bukopin Tbk	2.486.977	4.901.320
Standard Chartered Bank	1.963.086	1.820.998
PT Bank Central Asia Tbk	1.343.534	731.137
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.008.250	-
PT Bank UOB Indonesia	807.588	547.210
PT Bank QNB Indonesia Tbk	632.193	712.754
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	501.963	3.528.131
PT Bank Panin Tbk	433.687	1.906.010
PT Bank ANZ Indonesia	58.221	58.347
Pihak berelasi (Catatan 8)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	289.028.344	177.755.429
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	153.492.846	211.178.824
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	56.113.723	82.142.228
PT Bank Tabungan Negara Tbk	346.914	15.451.654
Subtotal	621.789.282	651.353.080
Dolar AS:		
Pihak ketiga		
Standard Chartered Bank	5.703.591	5.185.695
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	4.882.771	6.184.840
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.849.025	178.315
PT Bank QNB Indonesia Tbk	1.961.047	1.814.799
PT Bank Permata	1.444.011	351.373
Deutsche Bank	754.078	708.395
PT Bank ANZ Indonesia	715.470	669.440
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	146.437	137.470
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	162.605
Pihak berelasi (Catatan 8)		
PT Bank Syariah Mandiri	6.731.895	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.165.998	42.724.603
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.265.913	3.685.372
PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk)	2.930.493	2.100.533
PT Bank Tabungan Negara Tbk	99.602	-
Subtotal	35.650.331	63.903.440

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Cash in banks

Rupiah:	
Third parties	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank DBS Indonesia	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Bukopin Tbk	
Standard Chartered Bank	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
PT Bank UOB Indonesia	
PT Bank QNB Indonesia Tbk	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
PT Bank Panin Tbk	
PT Bank ANZ Indonesia	
Related parties (Note 8)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk)	
PT Bank Tabungan Negara Tbk	
Subtotal	
US Dollar:	
Third parties	
Standard Chartered Bank	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank QNB Indonesia Tbk	
PT Bank Permata	
Deutsche Bank	
PT Bank ANZ Indonesia	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Related parties (Note 8)	
PT Bank Syariah Mandiri	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk)	
PT Bank Tabungan Negara Tbk	
Subtotal	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

b. Bank (lanjutan)

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Dolar Singapura:		
Pihak berelasi (Catatan 8)		
PT Bank Mandiri	-	100.124
(Persero) Tbk		
Total	657.439.613	715.356.644

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Cash in banks (continued)

Singapore Dollar	
Related Parties (Notes 8)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Total	

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Rupiah:		
Pihak ketiga		
PT Bank Pembangunan		
Daerah Jawa Timur Tbk	130.530.000	179.020.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	90.000.000	136.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	78.000.000	77.000.000
PT Bank Muamalat		
Indonesia Tbk	77.500.000	47.000.000
PT Bank Maybank		
Indonesia Tbk	61.500.000	82.500.000
PT Bank Pembangunan		
Daerah Banten	25.000.000	-
PT Bank Pembangunan		
Daerah Kalimantan		
Tengah	18.000.000	8.000.000
PT Bank Pembangunan		
Daerah Bali	15.000.000	15.000.000
PT Bank Permata Tbk	9.000.000	5.000.000
PT Bank Mandiri Taspen		
Pos	8.000.000	10.500.000
PT Bank Pembangunan		
Daerah Jawa Tengah	8.000.000	8.000.000
PT Bank DKI	6.226.129	18.193.836
PT Bank Pembangunan		
Daerah Kalimantan		
Selatan	5.000.000	8.000.000
PT Bank Pembangunan		
Daerah Nusa Tenggara		
Barat	5.000.000	8.000.000
PT Bank Mega Syariah	4.000.000	5.000.000
PT Bank Pembangunan		
Daerah Nusa Tenggara		
Timur	-	13.000.000
PT Bank UOB Indonesia	-	12.500.000
PT Bank Panin Dubai		
Syariah Tbk	-	8.000.000
PT Bank Pan Indonesia		
Tbk	-	3.000.000

Rupiah:	
Third parties	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawa Timur Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Bukopin Tbk	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Banten	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Tengah	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Bali	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen Pos	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawa Tengah	
PT Bank DKI	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Selatan	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Nusa Tenggara Barat	
PT Bank Mega Syariah	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Nusa Tenggara Timur	
PT Bank UOB Indonesia	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

31 Desember/December 31,		
	2018	2017
Pihak berelasi (Catatan 8)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	186.750.000	128.250.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	172.945.000	161.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk)	124.000.000	89.000.000
PT Bank Tabungan Negara Tbk	45.000.000	39.000.000
Subtotal	1.069.451.129	1.060.963.836
Dolar AS:		
Pihak ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	36.202.500	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	203.220.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	169.350.000
Pihak berelasi (Catatan 8)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.787.880.374	440.310.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	543.037.500	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	515.929.068	158.511.600
Subtotal	2.883.049.442	971.391.600
Total	3.952.500.571	2.032.355.436

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

31 Desember/December 31,		
	2018	2017
Rupiah	6,00% - 9,25%	5,75% - 9,25%
Dolar AS	1,75% - 2,80%	1,75% - 2,50%
Deposito Syariah	58,00%	50,00% - 70,45%

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

6. RESTRICTED CASH

31 Desember/December 31,		
2018	2017	
Pihak berelasi (Catatan 8)		Related parties (Note 8)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.149.595	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total	5.149.595	Total
Tingkat bunga kontraktual deposito berjangka per tahun		Contractual interest rates of time deposits per annum
Rupiah	5,7% - 6,0%	Rupiah
Jangka waktu	4-12 bulan/months	Time period
PT BJTJ menjaminkan deposito jangka pendek dan jangka panjang sebesar Rp5.149.595 di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan beberapa proyek yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2017.		PT BJTJ pledged short-term and long-term deposits amounted to Rp5.149.595 at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk which are used as collateral for projects which have not been completed as of December 31, 2017.

7. INVESTASI JANGKA PENDEK

7. SHORT TERM INVESTMENTS

31 Desember/December 31,		
2018	2017	
Rupiah		Rupiah
PT Bank BNI Syariah	10.707.973	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	8.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	3.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	9.917	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Dolar AS		US Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk	36.202.500	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total	57.920.390	Total

Investasi jangka pendek merupakan deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Short term investments represent time deposits with maturities of more than 3 months but no more than 1 year and were not used as collateral.

Suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

31 Desember/December 31,		
2018	2017	
Rupiah	7,00% - 7,50%	Rupiah
Dolar AS	2,00%	US Dollar
	0,55% - 1,80%	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**8. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party
Pemegang saham/ Shareholder	Negara Republik Indonesia
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri
	PT Pertamina (Persero)
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Virama Karya (Persero) PT Hutama Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Nindya Karya (Persero) PT Pengerukan Indonesia (Persero) Tentara Nasional Indonesia PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) PT Bahtera Adhiguna PT Dharma Lautan Nusantara (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Petrokimia Gresik PT Perikanan Nusantara (Persero) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Semen Tonasa BPJS Kesehatan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3) Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)

**8. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the entity has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or has significant influence over the Group in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties are as follows:

Jenis transaksi/ Nature of transactions
Jasa konsesi/Concession service
Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Penjualan jasa dan kegiatan operasional/Sales and operational activities Penjualan jasa dan kegiatan operasional/Sales and operational activities Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Pinjaman dana dan biaya pengerukan/Loan funds and dredging costs Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Jasa pensiun/Pension services Jasa pensiun/Pension services

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**8. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party
Entitas Asosiasi/ Associates	PT Portek Indonesia PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Ambang Barito Nusapersada PT Jasa Marga Bali Tol PT Lamin Aspalindo Tiga PT Terminal Nilam Utara PT Energi Manyar Sejahtera PT Terminal Petikemas Indonesia
Memiliki manajemen kunci yang sama/ Under the same key management	Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia III

Jenis transaksi/ Nature of transactions
Jasa pemeliharaan alat fasilitas pelabuhan/ Port facilities equipment maintenance service Investasi saham dan pemberian pinjaman dana/ Investment in stock and lending funds Pemberian pinjaman dana/Lending fund Investasi saham/Investment in stock Investasi saham/Investment in stock Investasi saham/Investment in stock Investasi saham/Investment in stock Investasi saham/Investment in stock
Jasa tenaga kerja bongkar muat/ Handling service

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government, state owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 5)

a. Cash and cash equivalent (Note 5)

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Bank		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	289.028.344	177.755.429
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	153.492.846	211.178.824
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	56.113.723	82.142.228
PT Bank Tabungan Negara Tbk	346.914	15.451.654
Total	498.981.827	486.528.135
Dolar AS		
PT Bank Syariah Mandiri	6.731.895	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.165.998	42.724.603
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.265.913	3.685.372
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.930.493	2.100.533
PT Bank Tabungan Negara Tbk	99.602	-
Total	17.193.901	48.510.508
Dolar Singapura		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	100.124
Total	-	100.124

Bank
Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk
Total
US Dollar
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk
Total
Singapore Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**8. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

a. Kas dan setara kas (Catatan 5) (lanjutan)

a. Cash and cash equivalent (Note 5) (continued)

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Deposito		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	186.750.000	128.250.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	172.945.000	161.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	124.000.000	89.000.000
PT Bank Tabungan Negara Tbk	45.000.000	39.000.000
Total	528.695.000	417.250.000
Dolar AS		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.787.880.374	440.310.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	543.037.500	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	515.929.068	158.511.600
Total	2.846.846.942	598.821.600

Deposits	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara Tbk	
Total	
US Dollar	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Total	

b. Kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 6)

b. Restricted cash (Note 6)

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Bank		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	5.149.595

Bank	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**8. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

c. Piutang usaha (Catatan 9)

c. Trade receivables (Note 9)

		31 Desember/December 31,		
		2018	2017	
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	72.149.140		70.640.405	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	68.247.983		68.086.390	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)
PT Pertamina (Persero)	39.527.408		-	PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	28.953.310		28.816.042	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Petrokimia Gresik	27.463.487		27.430.705	PT Petrokimia Gresik
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)	11.543.521		36.991.132	Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)
PT Bahtera Adhiguna	10.859.277		-	PT Bahtera Adhiguna
PT Perikanan Nusantara (Persero)	6.920.612		-	PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	6.311.709		-	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
Lain-lain di bawah Rp5 miliar	70.121.318		2.714.486	Others below Rp5 billion
Subtotal	342.097.765		234.679.160	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(1.737.260)		(15.100.071)	Less: Allowance for impairment
Total	340.360.505		219.579.089	Total

d. Piutang lain-lain (Catatan 10)

d. Other receivables (Note 10)

		31 Desember/December 31,		
		2018	2017	
PT BKMS	208.881.837		137.931.727	PT BKMS
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	52.267.802		52.267.802	Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	29.330.404		30.267.150	PT Pengerukan Indonesia (Persero)
PT Ambapers	-		7.000.000	PT Ambapers
Lain-lain di bawah Rp5 miliar	7.556.110		6.274.449	Others below Rp5 billion
Subtotal	298.036.153		233.741.128	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(35.504.794)		(35.504.794)	Less: Allowance for impairment
Total	262.531.359		198.236.334	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**8. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

e. Utang usaha (Catatan 21)

e. Trade payables (Note 21)

31 Desember/December 31,		
2018	2017	
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	34.392.785	-
Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	15.878.580	256.721
PT Portek Indonesia	6.935.879	4.047.083
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4.898.774	66.903
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.557.701	83.000
Lain-lain di bawah Rp4 Miliar	12.480.467	1.153.618
Total	79.144.186	5.607.325

f. Utang lain-lain (Catatan 22)

f. Other payables (Note 22)

31 Desember/December 31,		
2018	2017	
PT Nindya Karya (Persero)	108.231.555	38.301.996
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	79.163.886	45.152.684
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	42.476.420	12.742.730
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	19.108.606	12.437.522
Dana Pensiun Pelindo Purnakarya	-	16.635.634
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar	10.550.846	3.534.760
Total	259.531.313	128.805.326

g. Utang bank jangka panjang (Catatan 25)

a. Long-term bank loans (Note 25)

31 Desember/December 31,		
2018	2017	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	3.009.873.779
Total	-	3.009.873.779

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**8. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

h. Pendapatan diterima dimuka jangka pendek

h. Short-term unearned revenue

31 Desember/December 31,		
2018	2017	
<u>Uang persekot/panjar</u>		<u>Advances from customer</u>
Lain-lain di bawah Rp5 miliar	12.784.828	Others below Rp5 billion
<u>Uang titipan</u>		<u>Fund retained</u>
Lain-lain di bawah Rp5 miliar	22.567.368	Others below Rp5 billion
Total	35.352.196	Total

i. Remunerasi personel manajemen kunci

i. Key management personnel remuneration

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp21.460.340 dan Rp17.806.448, masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017.

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Company's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp21,460,340 and Rp17,806,448 for 2018 and 2017, respectively.

9. PIUTANG USAHA

9. TRADE RECEIVABLES

a. Berdasarkan pelanggan:

a. By customer:

31 Desember/December 31,		
2018	2017	
Pihak ketiga		Third parties
Swasta	578.460.164	Private
Perorangan	4.039.844	Individuals
Dikurangi:		Less:
Penyisihan penurunan nilai	(66.122.948)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	516.377.060	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 8)	342.097.765	Related parties (Note 8)
Dikurangi:		Less:
Penyisihan penurunan nilai	(1.737.260)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	340.360.505	Related parties - net
Piutang usaha - neto	856.737.565	Trade receivables - net

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

9. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Analisis umur piutang usaha

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	352.959.208	213.174.310
Lewat jatuh tempo:		
1 - 30 hari	106.171.043	147.115.642
31 - 60 hari	140.044.847	33.704.599
61 - 90 hari	10.864.971	41.168.425
91 - 180 hari	86.582.590	205.523.335
> 180 hari	227.975.114	66.739.312
	924.597.773	707.425.623
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(67.860.208)	(91.332.946)
Piutang usaha - neto	856.737.565	616.092.677

Neither past due
nor impaired
Overdue:
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 180 days
> 180 days

Less:
Allowance for impairment
Trade receivables - net

c. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Rupiah	909.244.045	692.750.007
Dolar AS	15.353.728	14.675.616
Total	924.597.773	707.425.623
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(67.860.208)	(91.332.946)
Neto	856.737.565	616.092.677

Rupiah
US Dollar

Less:
Allowance for impairment
Net

d. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Saldo awal	91.332.946	68.269.936
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan	(23.472.738)	23.063.010
Saldo akhir	67.860.208	91.332.946

Beginning balance
Provision (reversal) for the year
Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 piutang usaha tidak dijaminkan.

As of December 31, 2018 and 2017 trade receivables are not pledged as collateral.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PIUTANG LAIN-LAIN

10. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	50.765.718	29.635.963	Private
Perorangan	2.984.456	2.551.792	Individuals
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(17.513.322)	(4.803.008)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	36.236.852	27.384.747	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 8)	298.036.153	233.741.128	Related parties (Note 8)
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(35.504.794)	(35.504.794)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	262.531.359	198.236.334	Related parties - net
Piutang lain-lain - neto	298.768.211	225.621.081	Other receivables - net

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment of other receivable is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Saldo awal	(40.307.802)	(27.734.534)	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	(12.710.314)	(12.573.268)	Provision for the year
Saldo akhir	(53.018.116)	(40.307.802)	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting period, the Group believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 piutang lain-lain tidak dijaminkan.

As of December 31, 2018 and 2017 other receivables are not pledged as collateral.

11. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

11. ACCRUED REVENUES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pihak ketiga	242.607.104	160.693.968	Third parties
Pihak berelasi	75.055.828	49.717.282	Related parties
Total	317.662.932	210.411.250	Total

Pendapatan masih akan diterima merupakan pendapatan yang belum difakturkan.

Accrued revenues represent unbilled revenue.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. PERSEDIAAN

12. INVENTORIES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Suku cadang	39.183.361	14.361.057	Spare parts
Bahan bakar dan pelumas	7.725.715	5.610.367	Fuel and lubrication
Obat medis	3.234.358	3.591.886	Medical medicine
Lain-lain	3.112.907	2.396.187	Others
Total	53.256.341	25.959.497	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.140.817)	(936.796)	Allowance for decline in value
Neto	52.115.524	25.022.701	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for decline in value of inventories are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Saldo awal	936.796	1.010.382	Beginning balance
Penambahan (pemulihan) pada tahun berjalan	204.021	(73.586)	Addition (reversal) during the year
Saldo akhir	1.140.817	936.796	Ending balance

Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan tingkat perputaran persediaan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Based on the review of the condition and turnover of the inventory items, the Group believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover any possible losses from decrease in value.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 persediaan tidak dijaminkan.

As of December 31, 2018 and 2017 inventories are not pledged as collateral.

13. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

13. PREPAID EXPENSE

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban dibayar dimuka - Pegawai	58.296.053	2.536.158	Prepaid expenses - Personnel
Beban dibayar dimuka - Sewa	20.407.776	4.620.622	Prepaid expenses - Rental
Beban dibayar dimuka - Asuransi	19.684.692	27.086.515	Prepaid expenses - Insurance
Total	98.388.521	34.243.295	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
PT BKMS	909.524.691	972.184.724	PT BKMS
PT TNU	68.785.862	69.288.859	PT TNU
PT JBT	60.548.923	69.550.444	PT JBT
PT TPI	32.588.155	33.778.663	PT TPI
PT Ambapers	18.797.053	15.988.103	PT Ambapers
PT EMS	321.202	313.293	PT EMS
PT Portek Indonesia	-	21.257.230	PT Portek Indonesia
Total	1.090.565.886	1.182.361.316	Total

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The movements of investments in associates are as follows:

31 Desember 2018/December 31, 2018						
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value		Equity method
Metode ekuitas						
PT BKMS	40,00%	800.000.000	109.448.167	76.524	909.524.691	PT BKMS
PT TNU	40,00%	68.500.000	285.862	-	68.785.862	PT TNU
PT JBT	17,58%	131.047.297	(70.545.463)	47.089	60.548.923	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	(4.911.845)	-	32.588.155	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	6.000.000	12.867.225	(70.172)	18.797.053	PT Ambapers
PT EMS	30,00%	300.000	21.202	-	321.202	PT EMS
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	PT Portek Indonesia
Total		1.046.017.797	44.494.648	53.441	1.090.565.886	Total

31 Desember 2017/December 31, 2017						
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value		Equity method
Metode ekuitas						
PT BKMS	40,00%	800.000.000	172.184.724	-	972.184.724	PT BKMS
PT TNU	40,00%	68.500.000	788.859	-	69.288.859	PT TNU
PT JBT	17,58%	131.047.297	(61.434.825)	(62.028)	69.550.444	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	(3.721.337)	-	33.778.663	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	4.000.000	12.075.935	(87.832)	15.988.103	PT Ambapers
PT EMS	30,00%	300.000	13.293	-	313.293	PT EMS
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	18.586.730	-	21.257.230	PT Portek Indonesia
Total		1.044.017.797	138.493.379	(149.860)	1.182.361.316	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. PROPERTI INVESTASI

Mutasi 2018	Saldo 1 Januari 2018/ Balance January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2018/ Balance December 31, 2018	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	85.298.157	-	-	-	85.298.157	Land
Bangunan	24.634.502	3.167.634	(2.194.305)	(3.853.653)	21.754.178	Building
Sub Total	109.932.659	3.167.634	(2.194.305)	(3.853.653)	107.052.335	Sub Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan	(6.685.904)	(1.488.635)	1.039.369	3.350.674	(3.784.496)	Building
Sub Total	(6.685.904)	(1.488.635)	1.039.369	3.350.674	(3.784.496)	Sub Total
Nilai buku	103.246.755				103.267.839	Net book value

Mutasi 2017	Saldo 1 Januari 2017/ Balance January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2017/ Balance December 31, 2017	2017 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	85.298.157	-	-	-	85.298.157	Land
Bangunan	30.409.330	24.605.276	-	(30.380.104)	24.634.502	Building
Sub Total	115.707.487	24.605.276	-	(30.380.104)	109.932.659	Sub Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan	(6.726.497)	(1.734.249)	-	1.774.842	(6.685.904)	Building
Sub Total	(6.726.497)	(1.734.249)	-	1.774.842	(6.685.904)	Sub Total
Nilai buku	108.980.990				103.246.755	Net book value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai beban operasi.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.595.803.543 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Immanuel, Jhonny dan Rekan dalam laporannya No. 00023A.1/PA/HH-VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi ini adalah pendekatan pasar dengan menggunakan hirarki level 2.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 properti investasi tidak dijaminkan.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as operating expenses.

The fair value of investment properties as of December 31, 2018 amounting to Rp4,595,803,543 are based on the appraisal valuation performed by KJPP Immanuel, Jhonny and Partners in its report No. 00023A.1/PA/HH-VII/2018 dated July 30, 2018.

The valuation approach used in the assessment of this revaluation is market approach using hierarchy level 2.

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of investment properties as of December 31, 2018 and 2017.

As of December 31, 2018 and 2017 investment properties are not pledged as collateral.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TETAP

16. FIXED ASSETS

Mutasi 2018	Saldo 1 Januari 2018/ Balance January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2018/ Balance December 31, 2018	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	129.162.446	30.000	-	1.300.935	130.493.381	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	3.733.669.573	25.721.222	-	531.243.836	4.290.634.631	Port facilities
Kapal	1.056.649.930	11.076.770	-	953.413.090	2.021.139.790	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	6.672.166.810	722.350.617	(15.241.800)	939.390.628	8.318.666.255	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	852.913.506	15.378.052	-	216.348.643	1.084.640.201	Port facility installations
Jalan dan bangunan	1.034.773.818	4.140.987	-	74.022.309	1.112.937.114	Roads and buildings
Peralatan	465.530.427	10.572.916	(308.060)	25.341.320	501.136.603	Equipments
Kendaraan	67.619.624	386.530	(692.255)	2.134.382	69.448.281	Vehicles
Emplasemen	217.538.888	6.315.264	-	11.741.296	235.595.448	Emplacement
Subtotal	14.230.025.022	795.972.358	(16.242.115)	2.754.936.439	17.764.691.704	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	69.278.038	-	-	-	69.278.038	Leased assets
Aset dalam penyelesaian	1.979.179.413	2.350.219.400	(3.105.668)	(2.762.312.238)	1.563.980.907	Construction in progress
Subtotal	16.278.482.473	3.146.191.758	(19.347.783)	(7.375.799)	19.397.950.649	Sub-total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan fasilitas pelabuhan	(244.844.965)	(172.167.138)	-	-	(417.012.103)	Port facilities
Kapal	(217.673.446)	(86.935.239)	-	-	(304.608.685)	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	(799.267.281)	(521.306.320)	5.974.786	1.669.280	(1.312.929.535)	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	(205.011.865)	(56.148.909)	-	-	(261.160.774)	Port facility installations
Jalan dan bangunan	(332.424.142)	(55.689.532)	-	-	(388.113.674)	Roads and buildings
Peralatan	(257.818.122)	(56.262.451)	5.030	-	(314.075.543)	Equipments
Kendaraan	(48.656.830)	(7.026.184)	844.149	-	(54.838.865)	Vehicles
Emplasemen	(64.007.732)	(11.193.500)	-	-	(75.201.232)	Emplacement
Subtotal	(2.169.704.383)	(966.729.273)	6.823.965	1.669.280	(3.127.940.411)	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	(4.329.877)	(3.463.902)	-	-	(7.793.779)	Leased assets
Subtotal	(2.174.034.260)	(970.193.175)	6.823.965	1.669.280	(3.135.734.190)	Sub-total
Total	14.104.448.213	2.175.998.583	(12.523.818)	(5.706.519)	16.262.216.459	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	(8.039.931)	(22.629.406)	-	-	(30.669.337)	Allowance for impairment
Nilai buku neto	14.096.408.282				16.231.547.122	Net book value

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TETAP (LANJUTAN)

16. FIXED ASSETS (CONTINUED)

Mutasi 2017	Saldo 1 Januari 2017/ Balance January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2017/ Balance December 31, 2017	2017 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	122.278.133	6.494.298	-	390.015	129.162.446	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	3.426.588.427	5.807.275	(7.982.334)	309.256.205	3.733.669.573	Port facilities
Kapal	576.646.649	236.660.998	-	243.342.283	1.056.649.930	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	5.381.278.256	663.689.186	(2.342.528)	629.541.896	6.672.166.810	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	770.955.368	30.037.961	-	51.920.177	852.913.506	Port facility installations
Jalan dan bangunan	928.988.594	31.015.275	(4.589.941)	79.359.890	1.034.773.818	Roads and buildings
Peralatan	390.471.131	21.809.742	(1.090.887)	54.340.441	465.530.427	Equipments
Kendaraan	55.955.998	14.996.049	(2.455.068)	(877.355)	67.619.624	Vehicles
Emplasemen	204.720.902	4.336.154	-	8.481.832	217.538.888	Emplacement
Subtotal	11.857.883.458	1.014.846.938	(18.460.758)	1.375.755.384	14.230.025.022	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	69.278.038	-	-	-	69.278.038	Leased assets
Aset dalam penyelesaian	1.169.214.902	2.187.034.150	-	(1.377.069.639)	1.979.179.413	Construction in progress
Subtotal	13.096.376.398	3.201.881.088	(18.460.758)	(1.314.255)	16.278.482.473	Sub-total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan fasilitas pelabuhan	(97.116.593)	(148.516.474)	788.102	-	(244.844.965)	Port facilities
Kapal	(180.312.687)	(37.360.759)	-	-	(217.673.446)	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	(360.256.525)	(439.734.497)	518.442	205.299	(799.267.281)	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	(154.829.888)	(50.181.977)	-	-	(205.011.865)	Port facility installations
Jalan dan bangunan	(283.903.693)	(49.598.241)	1.077.792	-	(332.424.142)	Roads and buildings
Peralatan	(208.866.250)	(51.215.925)	1.611.450	652.603	(257.818.122)	Equipments
Kendaraan	(41.867.030)	(8.141.593)	1.351.793	-	(48.656.830)	Vehicles
Emplasemen	(53.919.948)	(10.087.784)	-	-	(64.007.732)	Emplacement
Subtotal	(1.381.072.614)	(794.837.250)	5.347.579	857.902	(2.169.704.383)	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	(865.975)	(3.463.902)	-	-	(4.329.877)	Leased assets
Subtotal	(1.381.938.589)	(798.301.152)	5.347.579	857.902	(2.174.034.260)	Sub-total
Total	11.714.437.809	2.403.579.936	(13.113.179)	(456.353)	14.104.448.213	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	(8.047.825)	-	7.894	-	(8.039.931)	Allowance for impairment
Nilai buku neto	11.706.389.984				14.096.408.282	Net book value

Revaluasi Aset Tetap

Penambahan aset tetap pada tahun 2018, termasuk surplus revaluasi aset tetap bangunan fasilitas pelabuhan dan alat fasilitas pelabuhan masing-masing sebesar Rp15.917.131 dan Rp66.701.449.

Termasuk dalam reklasifikasi adalah pemindahan aset alat fasilitas pelabuhan ke aset tidak lancar lainnya.

Revaluasi kelompok aset tetap bangunan fasilitas pelabuhan dan alat-alat fasilitas pelabuhan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Immanuel, Jhonny dan Rekan, KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan dan KJPP Wahyono Adi dan Rekan.

Revaluation of Fixed Assets

Addition of fixed assets in 2018, including the revaluation surplus of port building facilities and port facility equipments amounts to Rp15,917,131 and Rp66,701,449, respectively.

Included in the reclassification is the transfer of port facility equipments assets to other non-current assets.

Revaluation class of fixed assets for port facility bulidings and port facility equipments based on valuation performed by KJPP Immanuel, Jhonny and Partners, KJPP Satria Iskandar Setiawan and Partners dan KJPP Wahyono Adi and Partners.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi Aset Tetap (lanjutan)

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari bangunan fasilitas pelabuhan dan alat fasilitas pelabuhan yang dinilai.

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi ini adalah pendekatan pasar dengan menggunakan hirarki level 2.

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan dalam beban operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap dan aset takberwujud (Catatan 17) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jasa Raharja Putera Muda, PT Zurich Insurance Indonesia, PT Sarana Janesia Utama, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Wahana Tata, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Tugu Pratama Indonesia, PT AIG Insurance Indonesia, PT Duta Semesta Raya, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Astra Buana (Garda Oto), PT Asuransi Tri Pakarta dengan total nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp13.099.316.643 dan US\$1.031.786 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp8.429.002.033 dan US\$605.000 pada tanggal 31 Desember 2017. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 aset tetap tidak dijaminkan.

Hak atas tanah Perusahaan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan ("HPL").

16. FIXED ASSETS (continued)

Revaluation of Fixed Assets (continued)

The fair value was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the appraisers are based on active market prices, significantly adjusted for difference in the nature, location and condition of the building port facilities and port facility equipments.

The valuation approach used in the assessment of this revaluation is market approach using hierarchy level 2.

Depreciation expense of fixed assets is allocated to operating expenses.

As of December 31, 2018 and 2017, the Group insured its fixed assets and intangible assets (Note 17) against risk from fire and other insurable risks to PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jasa Raharja Putera Muda, PT Zurich Insurance Indonesia, PT Sarana Janesia Utama, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Wahana Tata, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Tugu Pratama Indonesia, PT AIG Insurance Indonesia, PT Duta Semesta Raya, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Astra Buana (Garda Oto), PT Asuransi Tri Pakarta with total insurance coverage amounting to Rp13,099,316,643 and USD1,031,786 as of December 31, 2018 and Rp8,429,002,033 and USD605,000 as of December 31, 2017. In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible impairments losses on fixed assets.

As of December 31, 2018 and 2017 fixed assets are not pledged as collateral.

The Company's land rights such as Rights Management Certificate ("HPL").

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TETAP (lanjutan)

Hak atas tanah seluas 564.400 m2 masih atas nama pemilik lama dan saat ini masih dalam proses balik nama menjadi nama Perusahaan.

16. FIXED ASSETS (continued)

Land rights measuring 564,400 sqm is still in the name of the former owner and is currently still in the process of being transferred to the Company's name.

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of sales of fixed assets are as follows:

31 Desember/December 31,

	2018	2017	
Hasil penjualan aset tetap	2.682.015	10.865.555	Proceeds from sales of fixed assets
Nilai buku	12.523.818	13.113.179	Net book value
Kerugian penjualan aset tetap	9.841.803	2.247.624	Loss on sale of fixed assets

Aset dalam penyelesaian

Construction in progress

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

Construction in progress consists of:

31 Desember 2018/ December 31, 2018

31 Desember 2017/ December 31, 2017

	Nilai perolehan / Cost	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Target penyelesaian/ Target of completion		Nilai perolehan / Cost	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Target penyelesaian/ Target of completion	
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.287.501.431	2% - 98%	2019		455.307.220	12% - 97%	2018	Port facilities
Kapal	4.657.116	87%	2019		857.285.907	5% - 63%	2019	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	106.921.176	5% - 90%	2019		544.366.816	7% - 95%	2018	Port equipment
Peralatan	4.559.177	4% - 97%	2019		1.076.292	4% - 97%	2018	Equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	72.147.950	15% - 78%	2019		37.365.433	43% - 98%	2018	Port installation
Jalan dan bangunan	82.879.952	8% - 90%	2019		71.450.347	5% - 90%	2018	Roads and buildings
Emplasemen	5.314.105	36% - 95%	2019		12.327.398	3% - 40%	2018	Emplacement
Total	1.563.980.907				1.979.179.413			Total

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp5.039.859 dan RpNihil masing-masing pada tahun 2018 dan 2017.

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp5,039,859 and RpNil in 2018 and 2017, respectively.

17. ASET TAKBERWUJUD

17. INTANGIBLE ASSETS

Mutasi 2018	Saldo 1 Januari 2018/ Balance January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2018/ Balance December 31, 2018	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Aset hak konsesi	5.328.536.755	96.303.783	-	-	5.424.840.538	Concession rights assets
Piranti lunak	114.977.615	17.313.917	-	-	132.291.532	Software application
Goodwill	1.143.301	-	-	-	1.143.301	Goodwill
	5.444.657.671	113.617.700	-	-	5.558.275.371	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Aset hak konsesi	(272.269.825)	(94.186.278)	-	-	(366.456.103)	Concession rights assets
Piranti lunak	(19.503.877)	(24.845.335)	-	-	(44.349.212)	Software application
	(291.773.702)	(119.031.613)	-	-	(410.805.315)	
Nilai buku	5.152.883.969				5.147.470.056	Net book value

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

17. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Mutasi 2017	Saldo 1 Januari 2017/ Balance January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2017/ Balance December 31, 2017	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Aset hak konsesi	4.712.208.970	636.149.974	(19.822.189)	-	5.328.536.755	Concession rights assets
Piranti lunak	28.748.599	86.229.016	-	-	114.977.615	Software application
Goodwill	1.143.301	-	-	-	1.143.301	Goodwill
	4.742.100.870	722.378.990	(19.822.189)	-	5.444.657.671	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Aset hak konsesi	(172.482.684)	(105.637.876)	5.850.735	-	(272.269.825)	Concession rights assets
Piranti lunak	(6.433.495)	(13.070.382)	-	-	(19.503.877)	Software application
	(178.916.179)	(118.708.258)	5.850.735	-	(291.773.702)	
Nilai buku	4.563.184.691				5.152.883.969	Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of intangible assets as of December 31, 2018 and 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 aset takberwujud tidak dijaminkan.

As of December 31, 2018 and 2017 intangible assets are not pledged as collateral.

Aset hak konsesi

Concession rights assets

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan (KSOP) kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan APBS, TMTL dan TPMG berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 44a).

Concession rights are assets built on the rights granted by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia Harbourmaster Office and Port Authority (KSOP) to the Company to build and operate APBS, TMTL and TPMG based on Concession Agreement (Notes 44a).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing persentase rata-rata penyelesaian pembangunan TMTL masih dalam konstruksi sebesar 51,00% dan 66,00%.

As of December 31, 2018 and 2017, the average percentage completion of construction of TMTL under construction is 51.00% and 66.00%, respectively.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan TMTL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp6.621.136 dan Rp5.381.842.

Borrowing costs capitalized for the concession rights assets of TMTL for the year ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp6,621,136 and Rp5,381,842, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support* (ATS) dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

Goodwill

Goodwill berasal dari akuisisi PT PDS pada tanggal 24 Februari 2014 yaitu sebesar Rp1.143.301. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan.

17. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Software

Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application for car terminal services, container terminal services and warehouse including Annual Technical Support (ATS) and change request, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP (finance, human resources, technical information system), development of Port Community System/Inaportnet, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, autogate integration and VGM for terminal operating system.

Goodwill

Goodwill was initially derived from the acquisition of PT PDS on February 24, 2014 amounting to Rp1,143,301. Management believes that there was no impairment in the value of goodwill as of December 31, 2018 and 2017, therefore no allowance of impairment losses required.

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

18. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Piutang dalam kepengurusan Negara	17.636.751	17.636.751	Receivable from the State management
Penyisihan piutang dalam kepengurusan Negara	(17.636.751)	(17.636.751)	Allowances of receivable from the State management
Subtotal	-	-	Sub-total
Uang muka pembelian aset tetap	676.634.108	197.628.019	Advance for purchase fixed assets
Aset lain-lain - neto	99.293.510	30.059.014	Other assets - net
Total	775.927.618	227.687.033	Total

Piutang dalam kepengurusan Negara merupakan piutang macet dan telah didaftarkan pada Panitia Urusan Piutang Negara ("PUPN") untuk ditindaklanjuti.

Receivable from the State management represent loss accounts which have already been registered to Panitia Urusan Piutang Negara ("PUPN") to be followed up.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Perusahaan			The Company
PPN - Masukan	9.845.140	29.081.021	VAT - In
PPh Final	9.469.870	9.340.945	Final Income Tax
Entitas Anak			Subsidiaries
PPN - Masukan	125.593.372	253.024.231	VAT - In
PPh Pasal 23/26	1.661.688	-	Income Tax Article 23/26
PPh Final	139.620	-	Final Income Tax
Total	146.709.690	291.446.197	Total

b. Utang pajak

b. Tax payables

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Perusahaan			The Company
PPh Pasal 4(2)	37.263.647	22.361.868	Income Tax Article 4(2)
PPh Pasal 15	572.118	435.274	Income Tax Article 15
PPh Pasal 21	12.354.367	8.877.504	Income Tax Article 21
PPh Pasal 22	553.497	-	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23/26	3.108.136	974.928	Income Tax Article 23/26
PPN WAPU	34.361.992	30.783.897	VAT WAPU
Pajak Lainnya	-	181.021	Other Taxes
Subtotal	88.213.757	63.614.492	Sub-total
Entitas Anak			Subsidiaries
PPh Pasal 4(2)	376	227.280	Income Tax Article 4(2)
PPh Pasal 15	804.133	477.244	Income Tax Article 15
PPh Pasal 21	6.609.122	4.910.631	Income Tax Article 21
PPh Pasal 22	225.356	-	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23/26	2.226.203	13.585.016	Income Tax Article 23/26
PPh Pasal 25	7.116.674	3.102.274	Income Tax Article 25
PPN (Neto)	15.463.338	949.773	VAT (Net)
PPh Pasal 29	140.082.273	39.573.795	Income Tax Article 29
Subtotal	172.527.475	62.826.013	Sub-total
Total	260.741.232	126.440.505	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.823.505.300	2.472.799.969
Dikurangi:		
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.448.498.848	1.462.769.975
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	375.006.452	1.010.029.994
<u>Beda temporer:</u>		
Beban imbalan kerja	150.854.860	181.719.212
Cadangan beban pegawai	31.167.932	(55.900.116)
Penyisihan penurunan nilai piutang	(15.134.364)	25.974.512
Penyisihan penurunan aset tetap	3.948.820	-
Biaya emisi obligasi	7.889.848	911.368
Bunga	94.737.084	459.760
Amortisasi	(912.342.356)	(4.759.280)
Penyusutan	364.208.276	(465.576.132)
Jumlah perbedaan temporer	(274.669.900)	(317.170.676)
<u>Beda permanen:</u>		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	468.419.658	314.007.312
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(615.626.250)	(707.900.768)
Beban berkaitan dengan pendapatan final	58.524.070	7.102.206
Pendapatan yang bukan merupakan objek pajak	(880.451.063)	(539.220.634)
Jumlah perbedaan tetap	(969.133.585)	(926.011.884)
Taksiran rugi pajak	(868.797.033)	(233.152.566)
Beban pajak penghasilan kini	-	-
Dikurangi pajak dibayar di muka:		
Pasal 22	6.563.562	16.724.451
Pasal 23	14.379.287	127.460.601
Pasal 25	14.734.925	2.172.491
Lebih bayar beban pajak penghasilan badan	35.677.774	146.357.543

19. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss in 2018 and 2017 is as follows:

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Less:
Income before corporate income tax of subsidiaries
Profit before corporate income tax expenses - the Company
<u>Temporary differences:</u>
Employee Benefit expense
Employee expenses reserve
Provision for impairment of receivables
Provision for impairment of fixed assets
Obligation fee
Interest
Amortization
Depreciation
Total temporary differences
<u>Permanent differences:</u>
Non-deductible expenses
Income subject to final tax
Expenses related to income subject to final tax
Income not subjected to tax
Total permanent differences
Estimated tax loss
Current income tax expense
Less prepaid taxes:
Article 22
Article 23
Article 25
Overpayment of corporate income tax expense

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.823.505.300	2.472.799.969
Dikurangi:		
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.448.498.848	1.462.769.975
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	375.006.452	1.010.029.994
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	93.751.613	252.507.499
Dampak perbedaan permanen	(242.283.395)	(231.502.971)
Penyisihan akumulasi rugi fiskal	-	58.288.141
Perusahaan	(148.531.782)	79.292.669
Entitas anak	586.634.535	488.429.355
Beban pajak penghasilan badan	438.102.753	567.722.024

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018.

19. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate is as follows:

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Less:
Income before corporate income tax of subsidiaries
Profit before corporate income tax expenses - the Company
Income tax calculated at applicable rate
Effect of permanent Differences
Allowance for tax losses carried forward
The Company Subsidiaries
Corporate income tax Expense

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2018 will be used as a basis in filling the 2018 annual corporate income tax return.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

d. The details of income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban pajak final			Final tax expense
Perusahaan	39.029.899	40.488.717	The Company
Entitas anak	9.514.691	5.317.526	Subsidiaries
Subtotal	48.544.590	45.806.243	Sub-total
Beban pajak penghasilan badan			Corporate income tax expense
Kini			Current
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	597.212.172	453.185.371	Subsidiaries
Subtotal	597.212.172	453.185.371	Sub-total
Tanggungan			Deferred
Perusahaan	(148.531.782)	79.292.669	The Company
Entitas anak	(10.577.637)	35.243.984	Subsidiaries
Subtotal	(159.109.419)	114.536.653	Sub-total
Total	438.102.753	567.722.024	Total

e. Rincian saldo rugi fiskal adalah sebagai berikut:

e. Details of tax loss carry forward is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Taksiran rugi pajak	(868.797.033)	(233.152.566)	Estimated tax loss
Dikurangi: Penyisihan akumulasi rugi pajak	-	233.152.566	Less: allowance of tax loss carry forward
Saldo rugi fiskal	(868.797.033)	-	Tax loss carry forward

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Estimasi tagihan pajak

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Perusahaan			The Company
Pajak Penghasilan			Income Tax
2018	35.677.774	-	2018
2017	146.357.543	146.357.543	2017
2016	-	137.862.610	2016
2014	34.719.428	34.719.428	2014
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
2018	79.033.751	-	2018
2017	13.252.788	13.252.788	2017
2016	-	48.192.674	2016
2010	-	250.056	2010
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Penghasilan			Income Tax
PT BJTI	31.881.876	44.617.700	PT BJTI
PT PMS	20.819.960	113.128	PT PMS
PT TTL	66.884	4.044.347	PT TTL
PT PHC	-	1.477.906	PT PHC
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
PT BJTI	68.851.087	13.349.052	PT BJTI
Total	430.661.045	444.237.232	Total

g. Pajak tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

g. Deferred taxes

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

31 Desember 2018/December 31, 2018				
Dibebankan pada/Charged to				
Saldo awal/ Beginning balance	Laporan laba rugi/ Statement of profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ loss and other comprehensive	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset Pajak Tangguhan				Deferred Tax Assets
Perusahaan				Company
Liabilitas imbalan kerja	561.960.488	37.713.715	(227.307.758)	372.366.445
Cadangan beban pegawai	42.338.655	7.791.983	-	50.130.638
Penyisihan penurunan nilai piutang	29.032.107	(3.783.591)	-	25.248.516
Bunga	32.069.920	23.684.271	-	55.754.191
Biaya emisi obligasi	1.327.404	1.972.462	-	3.299.866
Provisi penurunan aset tetap	2.011.956	987.205	-	2.999.161
Rugi fiskal	167.019.280	178.282.899	-	345.302.179
Penyisihan atas rugi fiskal	(167.019.280)	38.916.359	-	(128.102.921)
Penyusutan	(292.629.122)	91.052.069	(20.654.645)	(222.231.698)
Amortisasi	(49.942.325)	(228.085.589)	-	(278.027.914)
Subtotal	326.169.083	148.531.783	(247.962.403)	226.738.463
Entitas anak	24.027.514	14.912.027	(2.270.848)	36.668.693
Total	350.196.597	163.443.810	(250.233.251)	263.407.156
Liabilitas Pajak Tangguhan				Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(62.588.195)	(4.334.390)	3.709.469	(63.213.116)
Total	(62.588.195)	(4.334.390)	3.709.469	(63.213.116)

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2017/December 31, 2017				
	Dibebankan pada/Charged to				
	Saldo awal/ Beginning balance	Laporan laba rugi/ Statement of profit or loss	Penghasilan Komprehensif lain/ Loss and other comprehensive	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Perusahaan					Company
Liabilitas imbalan kerja	380.844.555	45.429.803	135.686.130	561.960.488	Employee Benefit
Cadangan beban pegawai	56.313.684	(13.975.029)	-	42.338.655	Employee expenses reserve
Penyisihan penurunan nilai piutang	22.538.479	6.493.628	-	29.032.107	Provision for impairment of receivables
Bunga	31.954.980	114.940	-	32.069.920	Interest
Biaya emisi obligasi	1.099.562	227.842	-	1.327.404	Obligation fee
Penyisihan penurunan aset tetap	2.011.956	-	-	2.011.956	Provision for impairment of fixed assets
Rugi fiskal	127.446.092	39.573.189	-	167.019.280	Tax losses carried forward
Penyisihan atas rugi fiskal	(127.446.092)	(39.573.189)	-	(167.019.280)	Allowance for tax losses carried forward
Penyusutan	(176.235.089)	(116.394.033)	-	(292.629.122)	Depreciation
Amortisasi	(48.752.505)	(1.189.820)	-	(49.942.325)	Amortization
Subtotal	269.775.622	(79.292.669)	135.686.130	326.169.083	Subtotal
Entitas anak	51.846.643	(29.009.515)	1.190.386	24.027.514	Subsidiaries
Total	321.622.265	(108.302.184)	136.876.516	350.196.597	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(55.786.473)	(6.234.469)	(567.253)	(62.588.195)	Subsidiaries
Total	(55.786.473)	(6.234.469)	(567.253)	(62.588.195)	Total

h. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2010

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") Pajak Penghasilan Badan No. 00003/406/10/093/13 tanggal 18 Desember 2013, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2010 sebesar Rp2.627.479. Perusahaan telah mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan kepada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar empat melalui Surat No. KU.05/02/P.III-2014 tanggal 7 Februari 2014 dan lebih bayar tersebut telah dikompensasikan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari-Desember 2010 sebesar Rp2.627.479.

19. TAXATION (continued)

g. Deferred taxes (continued)

h. Tax Assessment Letter

The Company

Tax assessment for fiscal year 2010

Based on Tax Overpayment Assessment Letter of Corporate Income Tax ("SKPLB") No. 00003/406/10/093/13 dated December 18, 2013, the Company had declared an overpayment of corporate income tax for the fiscal year 2010 amounting to Rp2,627,479. The Company has filed a request for the refund of the excess income tax payments to the tax office for large four taxpayers No. KU.05/02/P.III-2014 through letter dated February 7, 2014 and the overpayment has been compensated with Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") and Tax Collection Notice ("STP") of Value Added Tax for the period of January-December 2010 amounting to Rp2,627,479.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut melalui suratnya No. KU.05/20/P.III-2014 tanggal 5 Maret 2014 dan dengan Keputusan No. KEP-241/WPJ.19/2015 tanggal 16 Februari 2015 permohonan tersebut dikabulkan sebagian dan menambah jumlah PPh yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp2.667.995. Perusahaan masih keberatan sehingga mengajukan banding dengan surat No. KU.05/50/P.III.2015 tanggal 27 Maret 2015.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.77827/PP/M.XIIIA/15/2016 tanggal 24 November 2016, Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-241/WPJ.19/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Keberatan atas SKPLB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 No.00003/406/10/093/13 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan total pajak lebih bayar sebesar Rp5.258.541.

Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak penghasilan tahun pajak 2010 tersebut sebesar Rp2.590.546 pada tanggal 12 Januari 2017 melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 10 Agustus 2017 dan 20 Desember 2017, Perusahaan telah memperoleh Putusan Pengadilan Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari-Desember 2010, di mana Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan Banding Perusahaan terhadap Keputusan DJP sebesar Rp6.134.145.

19. TAXATION (continued)

h. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

The Company filed an objection to the SKPLB through letter No. KU.05/20/P.III-2014 dated March 5, 2014 and by Decree No. KEP-241/WPJ.19/2015 dated February 16, 2015 that objection was granted partially and increased the amount of overpaid income tax to Rp2,667,995. The Company still had reservations so appealed with letter No. KU.05/50/P.III.2015 dated March 27, 2015.

Based on the Tax Court Decision No. Put.77827/PP/M.XIIIA/15/2016 dated November 24, 2016, the Tax Court decided to fully grant the Company's appeal against the decision of the Director General of Tax No. KEP-241/WPJ.19/2015 dated February 16, 2015 on the Objections to SKPLB of Corporate Income Taxes Year 2010 No. 00003/406/10/093/13 dated December 18, 2013 with a total of tax overpayment amounting to Rp5,258,541.

The Company received the refund on overpayment of income tax in 2010 amounting to Rp2,590,546 on January 12, 2017 via PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

On August 10, 2017 and December 20, 2017, the Company has obtained a Tax Court Decision on Taxpayer Objection of SKPKBt of Value Added Tax on Goods and Services of the Tax Period January-December 2010, whereby the Tax Court decided to partially grant the Company's Appeal against the Decision of the DGT amounting to Rp6,134,145.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pengembalian atas Keputusan Pengadilan Pajak untuk PPN masa pajak Januari-Desember 2010 tersebut sebesar Rp6.134.145 telah dikompensasikan dengan Utang Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2017, melalui pemotongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP"). Sementara untuk Pengembalian atas keputusan Pengadilan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa November 2010 sejumlah Rp250.056 telah diterima Perusahaan pada tanggal 18 Mei 2018. Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Keputusan Pengadilan Pajak sebesar Rp2.266.145 dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Pajak penghasilan badan 2014

Berdasarkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan No. 00001/206/14/093/16 tanggal 17 Februari 2016 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2014 sebesar Rp8.959.588 ditambah sanksi administrasi sebesar Rp2.508.685, dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp785.944.424.

Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut melalui Surat No. KU.05/47/P.III-2016 tanggal 31 Maret 2016. Namun berdasarkan No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya No. KU.05/47/P.III.2016 tanggal 31 Maret 2016. Perusahaan telah membayar pajak terutang atas keputusan tersebut pada tanggal 17 Mei 2017. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Pada tanggal 14 Juni 2017, Perusahaan melalui Surat No. KU.05/44/P.III-2017 mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017 kepada Pengadilan Pajak tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2014. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan atas keberatan tersebut.

19. TAXATION (continued)

h. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

The refund on the Tax Court Decision for VAT for the tax period of January-December 2010 amounting to Rp6,134,145 has been offset against the October 2017 VAT payable through Payment Instruction Letter for Tax Overpayment ("SPMKP"). While, for the Refund of Tax Court's decision on Value Added Tax for November 2010 amounting to Rp250,056 has been received by the Company on May 18, 2018. The amount not granted by Tax Court Decision amounting to Rp2,266,145 was charged to current year's profit or loss.

Corporate income tax 2014

Based on the SKPKB of Corporate Income Tax No. 00001/206/14/093/16 dated February 17, 2016 from the Head of the Tax Office for Large Taxpayers Four, the Company had an underpayment of corporate income tax for 2014 amounting to Rp8,959,588 plus administrative sanction amounting to Rp2,508,685 with taxable income amounting to Rp785,944,424.

The Company has filed an objection to the SKPKB through Letter No. KU.05/47/P.III-2016 dated March 31, 2016. However, based on No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017, Directorate General of Taxes rejected the objection of the Tax Payer in letter No. KU.05/47/P.III.2016 dated March 31, 2016. The Company has paid the indebted tax on such decision on May 17, 2017. The Company appealed against the decision.

On June 14, 2017, the Company through Letter No. KU.05/44/P.III-2017 filed an Appeal on Decision of the Director General of Tax No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017 to the Tax Court about objection of SKPKB PPh Badan Year 2014. Until the completion date of the financial statements, the Company has not yet received the decision on the objection.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016

Pajak Penghasilan Badan 2016

Berdasarkan SKPLB Pajak Penghasilan Badan No. 00012/406/16/093/18 tanggal 17 April 2018 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2016 sebesar Rp137.657.930.

Pada tanggal 15 Mei 2018, Perusahaan menerima SPMKP dari DJP No. 80185/093-0185-2018 sebesar Rp137.657.930 dan telah dikompensasikan dengan surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar Rp15.756.445. Lebih bayar pajak sebesar Rp121.901.485 telah diterima Perusahaan pada tanggal 15 Mei 2018.

Pajak Pertambahan Nilai 2016

Berdasarkan SKPLB Pajak Penghasilan Badan No. 00052/407/16/093/18 tanggal 14 Maret 2018 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak pertambahan nilai masa Desember 2016 sebesar Rp47.018.091. Pada tanggal 11 April 2018, Perusahaan menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Dirjen Pajak No. 80144/093-0144-2018 sebesar Rp47.310.090.415 dan telah dikompensasikan dengan surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar Rp291.999.093. Lebih bayar pajak sebesar Rp47.018.091.322 telah diterima Perusahaan pada tanggal 13 April 2018.

19. TAXATION (continued)

h. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

Tax assessment for fiscal year 2016

Corporate Income Tax 2016

Based on SKPLB Corporate Income Tax No. 00012/406/16/093/18 dated April 17, 2018 from the Head of the Tax Office of the Large Taxpayers Four, the Company had an overpayment of corporate income tax 2016 amounting to Rp137,657,930.

On May 15, 2018, the Company has obtained SPMKP from DGT No. 80185/093-0185-2018 amounting to Rp137,657,930 and has been compensated with the assessment letters on tax underpayment amounting to Rp15,756,445. The overpayment of taxes amounting to Rp121,901,485 was received by the Company on May 15, 2018.

Value Added Tax 2016

Based on SKPLB Corporate Income Tax No. 00052/407/16/093/18 dated March 14, 2018 from the Head of Tax Office of the Large Four Taxpayers, the Company had an overpayment of value added tax for December, 2016 amounting to Rp47,018,091. On April 11, 2018, the Company has obtained Payment Instruction Letter for Tax Overpayment (SPMKP) from DJP No. 80144/093-0144-2018 amounting to Rp47,310,090,415, and has been compensated with the assessment letters on tax underpayment amounting to Rp291,999,093. The overpayment of taxes amounting to Rp47,018,091,322 was received by the Company on April 13, 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Entitas Anak

PT BJTJ

PT BJTJ menerima SKPLB No. 00005/406/15/093/17 pada 6 April 2017 atas pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp13.855.172 dari tagihan lebih bayar pajak yang diajukan PT BJTJ sebesar Rp21.777.420. PT BJTJ telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp10.377.508 yang telah dikompensasi dengan SKPKB pajak pertambahan nilai masa Mei dan Desember 2015 sebesar Rp3.477.664. PT BJTJ telah mengajukan keberatan atas SKLB tersebut tanggal 30 Juni 2017. PT BJTJ menerima Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-00507/KEB/WPJ.19/218 tanggal 5 Juni 2018 yang menyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2015 menjadi sebesar Rp19.028.847. Selisih sebesar Rp2.748.572 diakui sebagai bagian dari beban pajak kini tahun 2018. PT BJTJ juga telah menerima sisa pengembalian sebesar Rp5.173.675 pada tanggal 6 Juli 2018.

PT BJTJ menerima SKPLB No. 00013/406/16/093/18 pada 19 April 2018 atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp5.069.701 dari tagihan lebih bayar pajak yang diajukan PT BJTJ sebesar Rp35.046.414. Pengembalian tersebut dikompensasi dengan SKPKB pajak pertambahan nilai masa Januari hingga Desember 2016. PT BJTJ telah mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut tanggal 16 Juli 2018. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, belum ada tanggapan dari kantor pajak.

19. TAXATION (continued)

h. Tax Assessment Letter (continued)

Subsidiaries

PT BJTJ

PT BJTJ received SKPLB No. 00005/406/15/093/17 dated April 6, 2017 for corporate income tax year 2015 amounting to Rp13,855,172 out of the Rp21,777,420 claim for tax refund claimed by PT BJTJ. The refund received amounting to Rp10,377,508 which has been compensated with SKPKB of value added tax for May and December 2015 amounting to Rp3,477,664. PT BJTJ has filed an objection to the SKPLB dated June 30, 2017. PT BJTJ received a decision letter from the Directorate General of Taxes No. KEP-00507/KEB/WPJ.19/218 dated June 5, 2018 stated the overpayment corporate income tax year 2015 became Rp19,028,847. The difference amounting to Rp2,748,572 is recorded as part of current income tax expenses year 2018. PT BJTJ has also received the remaining refund amounting to Rp5,173,675 dated July 6, 2018.

PT BJTJ received SKPLB No. 00013/406/16/093/18 pada April 19, 2018 of overpayment of corporate income tax for the year 2016 amounting to Rp5,069,701 out of the Rp35,046,414 claim for tax refund claimed by PT BJTJ. The refund has been compensated with SKPKB value added tax for January to December 2016. PT BJTJ has filed an objection to the SKPLB dated July 16, 2018. Up to the date of financial statements, there is no feedback yet from tax office.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT BJTI (lanjutan)

PT BJTI menerima SKPKB tanggal 19 April 2018 atas pajak pertambahan nilai masa Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp9.253.777 yang terdiri dari kurang bayar sebesar Rp5.986.618 dan sanksi administrasi sebesar Rp3.267.159. Nilai tersebut dikompensasi dengan lebih bayar pajak penghasilan badan 2016 sebesar Rp5.069.702 dan sisanya telah dibayarkan pada Mei 2018. Pada tahun 2018, manajemen memutuskan untuk membebaskan kurang bayar Rp5.986.618 tersebut yang diakui sebagai bagian dari beban operasi lainnya. Atas sanksi administrasi, PT BJTI mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pada tanggal 28 Agustus 2018 dan telah menerima surat penolakan dari kantor pajak pada tanggal 12 Oktober 2018. PT BJTI kembali mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kedua pada tanggal 22 Januari 2019. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, belum ada tanggapan dari kantor pajak.

PT PMS

Termasuk di dalam jumlah estimasi tagihan pajak adalah kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan PT PMS tahun 2018 sebesar Rp7.212.895, kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan PT PEL tahun 2018 sebesar Rp13.597.741, dan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan PT BMC tahun 2017 sebesar Rp9.324.

19. TAXATION (continued)

h. Tax Assessment Letter (continued)

Subsidiaries (continued)

PT BJTI (continued)

PT BJTI received SKPKB dated April 19, 2018 for value added tax for January to December 2016 amounting to Rp9,253,777 consisting of underpayment amounting to Rp5,986,618 and administrative penalty amounting to Rp3,267,159. The stated amount has been compensated with overpayment of corporate income tax 2016 amounting to Rp5,069,702 and the remaining amount has been paid on May 2018. In 2018, the management decided to charge the underpayment of Rp5,986,618 as part of other operating expenses. For the administrative expenses, PT BJTI has submitted tax abolishment dated August 28, 2018 and has received rejection letter from tax office dated October 12, 2018. PT BJTI then submitted the second tax abolishment dated January 22, 2019. Up to the date of financial statements, there is no feedback yet from the tax office.

PT PMS

Included in PT PMS' estimated claims for tax refund year 2018 are the overpayment of PT PMS corporate income tax year 2018 amounting Rp7,212,895, the overpayment of PT PEL corporate income tax year 2018 amounting Rp13,597,741, and the overpayment of PT BMC corporate income tax year 2017 amounting Rp9,324.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

20. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

20. SHORT-TERM BANK LOANS

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
PT Bank ANZ Indonesia	-	677.400.000	PT Bank ANZ Indonesia

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 22 April 2015, yang terakhir diubah tanggal 25 September 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar US\$50.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank ANZ Indonesia. Tingkat bunga pinjaman bank jangka pendek dalam Dolar Amerika Serikat pada tahun 2017 adalah sebesar *London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1,2%* per tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 31 Mei 2018. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini.

Based on credit agreement dated April 22, 2015 which was lastly amended on September 25, 2017 the Company obtained a US\$50,000,000 (full amount) Working Capital Loan (KMK) facility from PT Bank ANZ Indonesia. Annual interest rate of short-term bank loans in US Dollar in 2017 was *London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1,2%*. This loan was fully paid on May 31, 2018. There is no collateral given for these facilities.

21. UTANG USAHA

21. TRADE PAYABLES

a. Berdasarkan pemasok

a. By supplier

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	527.416.198	700.197.574	Private
Pihak berelasi (Catatan 8)	79.144.186	5.607.325	Related parties (Note 8)
Total	606.560.384	705.804.899	Total

b. Berdasarkan mata uang

b. By currency

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Rupiah	593.136.130	692.297.971	Rupiah
Dolar AS	13.424.254	13.506.928	US Dollar
Total	606.560.384	705.804.899	Total

22. UTANG LAIN-LAIN

22. OTHER PAYABLES

a. Berdasarkan pemasok

a. By supplier

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	439.382.061	268.392.983	Private
Pihak berelasi (Catatan 8)	259.531.313	128.805.326	Related parties (Note 8)
Total	698.913.374	397.198.309	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Dollar AS	135.136.363	168.388.751	US Dollar
Euro	1.248.233	-	Euro
Rupiah	562.528.778	228.809.558	Rupiah
Total	698.913.374	397.198.309	Total

22. OTHER PAYABLES (continued)

b. By currency

23. BEBAN AKRUAL

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pegawai	371.878.190	312.424.177	Employees
Kerjasama mitra usaha	370.799.194	166.121.216	Partnership
Bunga	220.023.521	98.459.988	Interest
Umum	193.127.666	90.590.104	General
Pemeliharaan	59.280.793	117.323.014	Maintenance
Lain-lain	72.401.098	39.376.046	Others
Total	1.287.510.462	824.294.545	Total

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk bonus karyawan dan tantiem.

Accrued expenses - employees mainly represent accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Accrued expenses - partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for stevedoring activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pembelian bahan bakar.

Accrued expenses - generally represent accrued expenses for fuel purchase.

Beban akrual - pemeliharaan merupakan beban akrual untuk suku cadang dan pemeliharaan.

Accrued expenses - maintenance represent accrued expenses for spareparts and maintenance.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JANGKA PENDEK

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Uang untuk diperhitungkan		
Pihak ketiga	191.086.509	62.105.671
Pihak berelasi (Catatan 8)	35.352.196	119.173.993
Subtotal	226.438.705	181.279.664
Pelayanan jasa perusahaan		
tanah, bangunan, air, dan		
listrik	26.698.909	6.804.680
Lain - lain	650.200	1.244.102
Subtotal	27.349.109	8.048.782
Bagian lancar pendapatan		
diterima di muka jangka		
panjang (Catatan 27)	52.764.596	52.239.954
Total	306.552.410	241.568.400

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang dimuka dari pelanggan berkaitan dengan pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

24. SHORT-TERM UNEARNED REVENUE

*Advances from customers
Third parties
Related parties (Note 8)*

Subtotal

*Land, building, water and
electricity service
Others*

Subtotal

*Current portion of
long-term unearned
revenue (Note 27)*

Total

Advances from customers represent advances received from customers related to ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Pihak ketiga		
Deutsche Bank AG, London		
Branch	607.527.943	901.018.907
Pihak berelasi (Catatan 8)		
Pinjaman Bank Sindikasi	-	3.009.873.779
Subtotal	607.527.943	3.910.892.686
Bagian lancar utang bank jangka		
panjang	(351.140.707)	(328.516.973)
Total	256.387.236	3.582.375.713

*Third parties
Deutsche Bank AG, London
Branch*

*Related party (Note 8)
Syndicated Bank Loans*

Subtotal

*Current maturities of long-term
bank loans*

Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Tingkat bunga pinjaman bank jangka panjang:

	31 Desember/December 31,
	2018
Rupiah	7,53% - 7,68%
Dolar AS	2,27%

Perusahaan

Deutsche Bank AG, London Branch

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 Agustus 2013, yang terakhir diubah tanggal 19 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas *letter of credit* (LC) sebesar US\$121.241.871 (angka penuh) yang terdiri dari Fasilitas A dan Fasilitas B, masing-masing sejumlah US\$62.913.953 (angka penuh) dan US\$58.327.918 (angka penuh) dari Deutsche Bank AG, London Branch. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini.

Pembayaran pinjaman dilakukan setiap semester selama 10 kali dimulai sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 29 Desember 2019 untuk fasilitas A dan tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 Mei 2021 untuk fasilitas B. Jumlah pokok pinjaman yang dibayarkan pada tahun 2018 adalah sebesar US\$12.582.791 (angka penuh) untuk fasilitas A dan US\$11.665.584 (angka penuh) fasilitas B.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan.

Pinjaman Bank Sindikasi

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Juni 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *non revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.500.000.000 dari Bank Sindikasi yang terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini.

Pembayaran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan selama 24 kali dimulai sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2024. Saldo per 31 Desember 2018 utang sindikasi sebesar Rp3.000.000.000.000 (angka penuh) sudah dilunasi pada 28 Februari 2018.

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Annual interest rate of long-term bank loans:

	31 Desember/December 31,
	2017
Rupiah	7,53% - 7,68%
US Dollar	2,27%

The Company

Deutsche Bank AG, London Branch

Based on credit agreement dated August 30, 2013 which was lastly amended on April 19, 2018 the Company obtained a letter of credit (LC) loan facility amounting to US\$121,241,871 (full amount) which consists of Facility A and Facility B amounting to US\$62,913,953 (full amount) and US\$58,327,918 (full amount), respectively, from Deutsche Bank AG, London Branch. There is no collateral given for these facilities.

The repayment is done every semester for 10 installments starting from June 29, 2015 until December 29, 2019 for facility A and November 30, 2016 until May, 30 2021 for facility B. Total repayments made in 2018 amounted to US\$12,582,791 (full amount) for facility A and US\$11,665,584 (full amount) for facility B.

As of December 31, 2018 and December 31, 2017, the Company complied with the required covenants.

Syndicated Bank Loans

Based on credit agreement dated 23 Juni 2016, the Company obtained a non revolving loan facility with a maximum facility of Rp4,500,000,000 from Syndicated Banks which consist of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. There is no collateral given for these facilities.

The repayment installment is done every 3 months for 24 installments starting from June 23, 2016 until June 23, 2024. Balance of Syndicated Bank Loans as at December 31, 2018 amounting Rp3,000,000,000,000 (full amount) has been paid on February 28, 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

26. SECURITIES ISSUED

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Senior notes penerbitan tahun 2014 USD500.000.000	7.240.500.000	6.774.000.000	Senior notes issued in 2014 USD500,000,000
Senior notes penerbitan tahun 2018 USD500.000.000	7.240.500.000	-	Senior notes issued in 2018 USD500,000,000
Diskonto dan biaya penerbitan	48.773.678	28.679.060	Discount and issuance cost
Dikurangi:			Less:
Diskonto dan biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(200.160.721)	(88.259.988)	Unamortized of discount and issuance cost
Total	14.329.612.957	6.714.419.072	Total

Obligasi/ Bonds	Pokok utang/Debt principal	Penerbit/ Issuer	Tempat pencatatan/Listed	Tanggal terbit/Issue date	Jatuh tempo/ Due date	Periode pembayaran bunga/Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Senior Notes due 2024	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	1 Oktober 2014/ October 1, 2014	1 Oktober 2024/ October 1, 2024	Setengah tahunan/Semi- Annually	4,875%
Senior Notes due 2024	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	2 Mei 2018/ May 2, 2018	2 Mei 2023/ May 2, 2023	Setengah tahunan/Semi- Annually	4,500%

Perusahaan menerbitkan US\$500.000.000 (nilai penuh) Senior Notes masing-masing berdasarkan perjanjian pembelian pada tanggal 24 September 2014 dan tanggal 24 April 2018, yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 2 Mei 2023, dengan harga penerbitan masing-masing adalah 99,314% dan 99,809%. Senior Notes tersebut digunakan untuk pelunasan outstanding utang, keperluan pendanaan ekspansi dan keperluan umum korporasi lainnya.

The Company issued US\$500,000,000 (full amount) Senior Notes based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and addendum to this agreement dated September 30, 2014, which will be due on October 1, 2024 with issue price of 99.314%. The Senior Notes are used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes.

Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2014 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, dan Standard Chartered Bank. Wali Amanat untuk tahun 2014 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners for 2014 are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, and Standard Chartered Bank. Acting as the trustee for 2014 is The Bank of New York Mellon Corporation.

Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2018 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, dan Standard Chartered Bank. Wali amanat untuk tahun 2018 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners for 2018 are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, and Standard Chartered Bank. Acting as the trustee for 2018 is The Bank of New York Mellon Corporation.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**26. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
(lanjutan)**

Senior Notes masing-masing dikenakan bunga tetap sebesar 4,875% dan 4,500% per tahun yang dibayarkan masing-masing setengah tahunan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober untuk tahun 2014 dan setiap tanggal 2 Mei dan 2 November untuk tahun 2018. *Senior Notes* dicatat pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.

Pada tahun 2018, Perusahaan telah memperoleh penilaian dari tiga Lembaga Pemeringkat Internasional, yaitu Fitch Rating, Standard and Poors (S&P), dan Moody's Investor Service dengan peringkat dari obligasi tersebut masing-masing BBB-, BB+ dan Baa3. Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana untuk pelunasan utang *Senior Notes* ini.

26. SECURITIES ISSUED (continued)

The *Senior Notes* bear fixed interest at 4.875% and 4.500% per annum respectively, payable semi-annually in arrears on April 1 and October 1 for 2014 and May 2 and November 2 for 2018. These Notes, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.

In 2018, the Company has obtained ratings from three International Rating Agencies, namely Fitch Rating, Standard and Poors (S&P) and Moody's Investors Service whereby the bonds are rated at BBB-, BB+ and Baa3, respectively. The Company is not required to provide sinking fund with respect to repayment of the *Senior Notes*.

27. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JANGKA PANJANG

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	147.654.701	161.952.834
PT Salim Ivomas Pratama, Tbk	55.894.129	58.159.915
Lain-lain	202.220.965	163.125.970
Subtotal	405.769.795	383.238.719
Bagian lancar (Catatan 24)	(52.764.596)	(52.239.954)
Total bagian jangka panjang	353.005.199	330.998.765

Pendapatan diterima dimuka jangka panjang merupakan sewa tanah HGB dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang jatuh tempo lebih dari setahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp353.005.199 dan Rp330.998.765.

27. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	
PT Salim Ivomas Pratama, Tbk	
Others	
Subtotal	
Current portion (Notes 24)	
Total long-term portion	

Long-term unearned revenue represents advance received from rental of landrights and buildings around the port which will be due in more than a year. Balance as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp353,005,199 and Rp330,998,765, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT RAS Actuarial Consulting, PT Emerald Delta Consulting dan PT Binaputera Jaga Hikmah, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Tingkat diskonto	8,50%/tahun/year	7,25%/tahun/year	Discount rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6,50%/tahun/year	6,50% /tahun/year	Salary increase projection rate
Tingkat mortalitas	TMI III 2011 10% dari tabel mortalitas/of mortality rate	TMI III 2011 10% dari tabel mortalitas/of mortality rate	Mortality rate
Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas)	1,00% usia/age 20-29 0,5% usia/age 30-39 0,25% usia/age 40-45 0,13% usia/age 45 ke atas/and above	1,00% usia/age 20-29 0,5% usia/age 30-39 0,25% usia/age 40-45 0,13% usia/age 45 ke atas/and above	Permanent disability rate (from mortality table)
Tingkat pengunduran diri	58 tahun/58 years	56 tahun / 56 years	Resignation level
Usia pensiun normal			Normal pension age

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Program pensiun	333.828.742	315.335.402	Pension program
Program kesehatan pensiunan	1.143.277.616	1.919.273.738	Pension healthcare program
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	12.359.423	13.232.813	Other long-term employee benefits
Subtotal	1.489.465.781	2.247.841.953	Sub-total
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya	82.702.022	70.768.509	Pension program and other post-benefits program
Total	1.572.167.803	2.318.610.462	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2003 dan sebelumnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) dan untuk yang dipekerjakan sejak tahun 2004 dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Manfaat yang diperhitungkan termasuk penghargaan purna bakti dan cinderamata yang mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun dengan definisi gaji yang meliputi gaji *merit* dan tunjangan prestasi pegawai.

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Pension program

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2003 and managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) and for employees hired with permanent status since 2004 managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Benefits that are calculated include the gratuity and compensation benefits in accordance with the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund, with the salary including merit pay and employee performance allowance.

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

31 Desember/December 31,			
	2018	2017	
Nilai kini liabilitas	369.772.468	387.688.085	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(35.943.726)	(72.352.683)	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	333.828.742	315.335.402	Recognized liabilities
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2018	2017	
Biaya jasa kini	28.561.646	30.703.999	Current service cost
Biaya bunga	21.404.276	17.696.509	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	18.225.077	Past service cost
Beban yang diakui	49.965.922	66.625.585	Recognized expense
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2018	2017	
Liabilitas awal tahun	315.335.402	233.655.987	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	49.965.922	66.625.585	Expense recognized in profit or loss
Beban yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	8.735.429	65.977.365	Expense recognized in the other comprehensive income
Iuran pemberi kerja	(10.926.833)	(11.735.751)	Employer's contributions
Pembayaran manfaat	(29.281.178)	(39.187.784)	Benefit payments
Liabilitas akhir tahun	333.828.742	315.335.402	Liabilities at end of year

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Program pensiun (lanjutan)

a. Pension program (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2018	2017	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	387.688.085	310.025.398	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	28.561.646	30.703.999	Current service cost
Biaya bunga	26.754.346	24.298.813	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	18.225.077	Past service cost
Pembayaran manfaat Keuntungan (kerugian) aktuarial	(37.325.257) (35.906.352)	(48.314.022) 52.748.820	Benefit payments Actuarial gain (loss)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	369.772.468	387.688.085	Present value of liabilities - end of year
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2018	2017	
Nilai wajar aset program awal tahun	72.352.683	76.369.411	Fair value of program assets - beginning of year
Pendapatan bunga	5.350.070	6.602.304	Interest income
Rugi ekspektasian aset program	(44.641.781)	(13.228.545)	Expected loss from program assets
Iuran pemberi kerja	10.926.833	11.735.751	Employer's contributions
Iuran peserta program	-	-	Plan participants' contributions
Pembayaran manfaat	(8.044.079)	(9.126.238)	Benefits payments
Nilai wajar aset program akhir tahun	35.943.726	72.352.683	Fair value of program assets at end of year

Aset program yang dimiliki oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Plan assets owned by the Group are as follows:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - Reksa dana 51,96% | - Mutual funds 51.96% |
| - Aset tetap 16,76% | - Fixed assets 16.76% |
| - Investasi saham 10,06% | - Investment in shares 10.06% |
| - Surat utang negara 8,10% | - State bonds 8.10% |
| - Penempatan langsung 5,05% | - Direct placement 5.05% |
| - Sukuk 7,04% | - Sukuk 7.04% |
| - Deposito berjangka 0,70% | - Time deposits 0.70% |
| - Deposito on-call 0,30% | - Deposit on-call 0.30% |
| - Tabungan 0,02% | - Savings 0.02% |

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program pensiun (lanjutan)

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Jatuh tempo <= 1 tahun	26.305.916	30.700.726
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	47.315.101	42.540.775
Jatuh tempo > 5 tahun	1.115.830.654	1.025.255.268
Total	1.189.451.671	1.098.496.769

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek terhadap nilai kini liabilitas pada tahun 2018 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Tingkat diskonto	(44.503.947)	52.240.528
Tingkat kenaikan gaji	33.798.419	(59.802.762)

Masa kerja

Pada tanggal 31 Desember 2018, durasi tertimbang dari liabilitas imbalan kerja adalah 11 tahun.

b. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga (termasuk anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 orang yang belum bekerja, masih kuliah dan belum kawin dengan maksimal umur 25 tahun). Program ini tidak didanai.

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Nilai kini liabilitas	1.143.277.616	1.919.273.738
Liabilitas yang diakui	1.143.277.616	1.919.273.738

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Biaya jasa kini	42.170.482	100.850.495
Biaya bunga	137.591.754	106.875.977
Beban yang diakui	179.762.236	207.726.472

28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Pension program (continued)

The maturity profiles of employee benefits liability as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Maturity <= 1 year
Maturity > 1 year and <= 5 years
Maturity > 5 years

A one percentage point change in the assumed discount rate and salary expense rate would have the following effects to present value of liabilities in 2018:

Discount rate
Salary increase rate

Years of service

As of December 31, 2018, weighted duration of employee benefits liability was 11 years.

b. Pension healthcare program

The Company also provides long-term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family (including up to 2 unemployeed dependants, undergraduate and single with maximum age of 25 years old). This program is unfunded.

Present value of liabilities
Recognized liabilities

Current service cost
Interest cost

Recognized expense

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Liabilitas awal tahun	1.919.273.738	1.279.948.754
Beban yang diakui dalam laba rugi	179.762.236	207.726.472
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(912.845.465)	476.767.156
Pembayaran manfaat	(42.912.893)	(45.168.644)
Liabilitas akhir tahun	1.143.277.616	1.919.273.738

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Jatuh tempo <= 1 tahun	670.515.390	786.549.217
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	31.154.068	73.847.150
Jatuh tempo > 5 tahun	2.937.779.769	4.853.542.729
Total	3.639.449.227	5.713.939.096

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan biaya kesehatan akan memiliki efek terhadap nilai kini liabilitas pada tahun 2018 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase
Tingkat diskonto	(169.615.763)
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	217.732.706

c. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap Perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Pension healthcare program (continued)

*Liabilities at beginning of year
Expense recognized in profit or loss
Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Benefit payments
Liabilities at end of year*

The maturity profiles of employee benefits liability as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

*Maturity <= 1 year
Maturity > 1 year and <= 5 years
Maturity > 5 years
Total*

A one percentage point change in the assumed discount rate and health cost increment would have the following effects to present value of liabilities in 2018:

	Penurunan/ Decrease	
Tingkat diskonto	223.503.872	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	(168.935.686)	Health cost increment

c. Other long-term employee benefits

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 years of continuous service and given long services gratuity amounting to 1 time regular income. This program is not funded.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

c. Other long-term employee benefits (continued)

31 Desember/December 31,			
	2018	2017	
Nilai kini liabilitas	12.359.423	13.232.813	Present value of liabilities
Liabilitas yang diakui	12.359.423	13.232.813	Recognized liabilities
31 Desember/December 31,			
	2018	2017	
Biaya jasa kini	4.505.570	3.838.082	Current service cost
Biaya bunga	916.794	(241.638)	Interest cost
Beban yang diakui	5.422.364	3.596.444	Recognized expense
31 Desember/December 31,			
	2018	2017	
Liabilitas awal tahun	13.232.813	8.232.651	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	5.422.364	3.596.444	Expense recognized in profit or loss
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(5.120.994)	23.554.628	Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Pembayaran manfaat	(1.174.760)	(22.150.910)	Benefit payments
Liabilitas akhir tahun	12.359.423	13.232.813	Liabilities at end of year

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek terhadap nilai kini liabilitas pada tahun 2018 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate and salary increase rate would have the following effects to present value of liabilities in 2018:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Tingkat diskonto	(794.680)	901.712	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	910.662	(815.881)	Salary increase rate

d. Program pensiun iuran pasti

d. Defined contribution plan

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2004. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2004. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Pada tahun 2018 dan 2017, iuran program yang dibayarkan Kelompok Usaha masing-masing sebesar Rp19.625.197 dan Rp18.717.160.

In 2018 and 2017, contribution plan paid by the Group amounted to Rp19,625,197 and Rp18,717,160, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah:

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	1.018.953	100%	1.018.953.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan No. SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000 terbagi atas 3.200.000 saham, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Based on General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 08 dated August 13, 2012 by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary public in Surabaya, regarding the amendment of the Articles of Association and based on a copy of the Decree of the Secretary of the MSOE as the Representative of the MSOE as the Company's General Meeting of shareholders No. SK-226/MBU/S/2012 dated July 16, 2012, the Company's authorized capital amounting to Rp3,200,000,000 divided into 3,200,000 shares, has been placed and held by the Republic of Indonesia in the following details:

	Nominal/Amount	
Setoran modal lama sesuai dengan akta No. 3 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat oleh notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH.	809.222.000	Issued and paid up capital in accordance with notary deed No. 3 dated August 15, 2008 of Notary Agus Sudiono Kuntjoro, SH.
Peningkatan modal disetor tahun 2012 berasal dari:		Increase in paid up capital in 2012 came from:
- Penyertaan modal pemerintah (PMN) yang tertuang dalam PP No. 08 Tahun 2012	209.730.528	Conversion from Government Contribution (PMN) as decreed in Government Regulation (PP) No. 08 Year 2012
- Kapitalisasi sebagai cadangan sampai tahun buku 2011	472	Capitalization of unappropriated retained earnings up to year 2011
Total peningkatan modal disetor tahun 2012	209.731.000	Total increase in paid up capital in 2012
Total modal ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2013 dan 2012	1.018.953.000	Total issued and paid up capital as of December 31, 2013 and 2012

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

*The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk menyisihkan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

Kebijakan Kelompok Usaha adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya dan utang neto).

29. SHARE CAPITAL (continued)

Capital management

The primary objective of the Company capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40 year 2007 effective on August 16, 2007 to allocate up until at least 20% from the issued and paid-in capital into non-distributable reserve.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owner of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income and net payables).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. DIVIDEN

- a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 2 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Emy Susilowati, SH., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp441.147.068.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.029.343.158.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 3 Mei 2018.

- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 2 tanggal 8 Mei 2017 dari Notaris Nanda Emy Susilowati, SH., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp311.198.916.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp726.130.805.

Dividen tersebut di atas telah sepenuhnya dibayar pada tanggal 8 November 2017.

30. DIVIDEND

- a. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 2 on April 3, 2018 of Emy Susilowati, SH., the shareholders approved, among others:
- utilization of 2017 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp441,147,068.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp1,029,343,158.

The Company has paid the above mentioned dividend on May 3, 2018.

- b. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 2 on May 8, 2017 of Emy Susilowati, SH. as the Notary, the shareholders approved, among others:
- utilization of 2016 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp311,198,916.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp726,130,805.

Above mentioned dividend has been fully paid on November 8, 2017.

31. SELISIH ATAS PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS ANAK DAN DAMPAK TRANSAKSI DENGAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI

31. DIFFERENCE FROM CHANGES IN EQUITY OF SUBSIDIARIES AND EFFECTS OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
PT BMS	38.697.264	38.697.264
PT APBS	33.037.875	22.025.250
PT PEL	(3.872.038)	(4.302.265)
PT PMS	(29.122.275)	-
Total	38.740.826	56.420.249

PT BMS
PT APBS
PT PEL
PT PMS
Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31. SELISIH ATAS PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS ANAK DAN DAMPAK TRANSAKSI DENGAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

31. DIFFERENCE FROM CHANGES IN EQUITY OF SUBSIDIARIES AND EFFECTS OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST (continued)

PT BMS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari PT Usaha Era Pratama Nusantara sebesar Rp38.697.264.

PT BMS

This account represents the difference between the par value to the capital contribution received from PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp38,697,264.

PT APBS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging dan Marine Contractor, BV masing-masing sebesar Rp33.037.875 dan Rp22.025.250 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

PT APBS

This account represents the difference between the par value to the capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV amounting to Rp33,037,875 and Rp22,025,250 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

PT PEL

Akun ini merupakan nominal pembelian saham kembali milik PT PEL dan reklasifikasi dari bagian non pengendali atas pembelian saham kembali oleh PT PEL. Berdasarkan Akta Notaris Amanda Mirza Ervariana No 2, tanggal 24 Mei 2018, PT BJTJ membeli 1% saham treasury PT PEL sehingga saldo saldo tambahan modal disetor pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp3.872.038 dan Rp4.302.265.

PT PEL

This account represents the shares buy-back transactions of PT PEL and reclassification of the non-controlling interest that part of the shares buy back by PT PEL. Based on Amanda Mirza Ervariana Notarial Deed No 2, dated May 24, 2018, PT BJTJ purchase 1% of PT PEL's treasury shares so that the additional balance of paid-in capital as of December 31, 2018 and 2017 is Rp3,872,038 and Rp4,302,265, respectively.

PT PMS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PT APBS yang dibeli oleh PT PMS dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama dengan setoran modal saham sebesar Rp29.122.275 pada tanggal 31 Desember 2018.

PT PMS

This account represents the difference between the par value owned by PT APBS which bought by PT PMS from Van Oord Dredging Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama to the capital contribution received amounting to Rp29,122,275 as of December 31, 2018.

32. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

32. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	237.142.210	(448.253.715)	Remeasurements of defined benefit plans
Perubahan cadangan aset revaluasi	1.216.697.664	1.166.601.138	Changes in asset revaluation reserves
Total	1.453.839.874	718.347.423	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

33. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	Aset Neto/Net Assets	
	31 Desember/ December 31,	
	2018	2017
PT TPS	735.519.559	787.120.313
PT BJT dan entitas anak	431.951.123	430.119.123
PT PHC dan entitas anak	3.504.646	3.563.323
PT PMS dan entitas anak	98.279.493	103.794.589
PT TTL dan entitas anak	1.585.840	748.683
PT PDS dan entitas anak	5.237.306	4.766.318
Total	1.276.077.967	1.330.112.349

33. NON-CONTROLLING INTEREST

	Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2018	2017
PT TPS	597.478.243	526.526.891
PT BJT dan subsidiaries	8.483.517	12.906.848
PT PHC and subsidiary	179.928	157.972
PT PMS and subsidiaries	13.985.070	22.629.872
PT TTL and subsidiary	1.039.288	507.011
PT PDS and subsidiary	1.284.083	1.577.578
Total	622.450.129	564.306.172

34. PENDAPATAN OPERASI

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Pelayanan terminal petikemas	6.026.392.640	5.229.494.182
Pelayanan jasa kapal	1.494.394.845	1.089.850.993
Pelayanan jasa terminal	837.081.110	769.600.211
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	598.533.246	583.164.160
Pelayanan jasa barang	503.651.814	461.561.017
Lain-lain	714.878.372	715.736.075
Total	10.174.932.027	8.849.406.638

34. OPERATING REVENUES

Container services
Vessel services
Terminal services
Land, building, water and
electricity services
Cargo services
Others

35. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan APBS dan TMTL. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

35. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of APBS and TMTL. Construction revenue is measured using cost method, which all cost is directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Pendapatan konstruksi APBS dan TMTL	603.841.389	126.676.775
Beban konstruksi APBS dan TMTL	(597.016.991)	(115.899.850)

Construction revenues of APBS and TMTL

Construction expenses of APBS and TMTL

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

36. BEBAN OPERASI

36. OPERATING EXPENSES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Umum	3.013.393.087	2.735.451.414	General
Kerja sama mitra usaha	1.921.118.838	1.576.335.218	Partnership
Pemeliharaan, penyusutan dan amortisasi	1.674.253.953	1.336.913.625	Maintenance, depreciation and amortization
Asuransi	187.352.678	169.948.355	Insurance
Administrasi kantor	30.006.966	24.345.485	Office administration
Lain-lain	53.464.419	40.272.462	Others
Total	6.879.589.941	5.883.266.559	Total

Beban umum terutama merupakan beban konsesi, beban jasa konsultan, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of concession fee, consultants, employee benefits, business traveling, education and training and marketing expenses.

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan lift on dan lift off di pelabuhan serta beban pegawai non-organik.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for stevedoring activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

37. BEBAN OPERASI LAINNYA - NETO

37. OTHER OPERATING EXPENSES - NET

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Rugi selisih kurs - neto	(791.880.261)	(57.286.261)	Loss on foreign exchange - net
Lain-lain - neto	57.956.623	(9.818.421)	Others - net
Total	(733.923.638)	(67.104.682)	Total

38. PENDAPATAN KEUANGAN

38. FINANCE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pendapatan bunga deposito	94.357.416	76.811.608	Interest income from deposits
Pendapatan bunga pinjaman	35.828.952	24.896.203	Interest income on loans
Pendapatan jasa giro	13.007.243	9.863.930	Interest income on current account
Total	143.193.611	111.571.741	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

39. BEBAN KEUANGAN

39. FINANCE COSTS

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	803.022.758	595.032.362	Interest expenses and amortization of discount and transaction cost
Beban administrasi	5.387.360	5.149.420	Administration expenses
Total	808.410.118	600.181.782	Total

40. BAGIAN LABA (RUGI) ENTITAS ASOSIASI

40. EQUITY IN INCOME (LOSS) OF ASSOCIATES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
PT Portek Indonesia	(21.257.229)	(1.374.498)	PT Portek Indonesia
PT Ambapers	9.596.516	7.927.319	PT Ambapers
PT TPI	(1.190.508)	(978.961)	PT TPI
PT JBT	(9.001.520)	(11.583.946)	PT JBT
PT BKMS	(8.628.619)	104.172.174	PT BKMS
PT EMS	7.909	7.314	PT EMS
PT TNU	(502.998)	(765.471)	PT TNU
Total	(30.976.449)	97.403.931	Total

**41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

	31 Desember 2018/December 31, 2018				
		Dalam mata uang asing/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	201.553.744	2.918.699.767	Cash and cash equivalents	
Investasi jangka pendek	USD	2.500.000	36.202.500	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	1.060.267	15.353.726	Trade receivables	
Total aset			2.970.255.993	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	989.179.155	14.324.303.344	Bond payables	
Beban akrual	USD	101.405.894	1.468.458.751	Accrued expenses	
Utang bank	USD	41.953.452	607.527.938	Bank loans	
Utang usaha	USD	927.025	13.424.249	Trade payables	
Total liabilitas			16.413.714.282	Total liabilities	
Liabilitas neto			13.443.458.289	Net liabilities	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING (lanjutan)**

**41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

		31 Desember 2017/December 31, 2017			
		Dalam mata uang asing/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	76.416.817	1.035.295.037	Cash and cash equivalents	
	SGD	9.881	133.868		
Piutang usaha	USD	1.083.231	14.675.614	Trade receivables	
Investasi jangka pendek	USD	50.000	677.400	Short-term investments	
Total aset			1.050.781.919	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	495.602.234	6.714.419.066	Bond payables	
Utang bank	USD	66.505.677	901.018.912	Bank loans	
Beban akrual	USD	6.851.876	92.829.216	Accrued expenses	
Utang usaha	USD	996.968	13.506.922	Trade payables	
Total liabilitas			7.721.774.116	Total liabilities	
Liabilitas neto			6.670.992.197	Net liabilities	

42. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

		31 Desember 2018/ December 31, 2018			
		Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair value		
Aset keuangan				Financial assets	
Kas dan setara kas		4.612.047.296	4.612.047.296	Cash and cash equivalents	
Investasi jangka pendek		57.920.390	57.920.390	Short-term investments	
Piutang usaha - Pihak ketiga		516.377.060	516.377.060	Trade receivables - Third parties	
Piutang usaha - Pihak berelasi		340.360.505	340.360.505	Trade receivables - Related parties	
Piutang lain-lain - Pihak ketiga		36.236.852	36.236.852	Other receivables - Third parties	
Piutang lain-lain - Pihak berelasi		262.531.359	262.531.359	Other receivables - Related parties	
Pendapatan masih akan diterima		317.662.932	317.662.932	Accrued revenues	
Total		6.143.136.394	6.143.136.394	Total	
Liabilitas keuangan				Financial liabilities	
Surat berharga yang diterbitkan		13.469.505.780	14.329.612.957	Securities issued	
Beban akrual		1.287.510.462	1.287.510.462	Accrued expenses	
Utang usaha - Pihak ketiga		527.416.198	527.416.198	Trade payables - Third parties	
Utang usaha - Pihak berelasi		79.144.186	79.144.186	Trade payables - Related parties	
Utang lain - lain - Pihak ketiga		439.382.061	439.382.061	Other payables - Third parties	
Utang lain - lain - Pihak berelasi		259.531.313	259.531.313	Other payables - Related parties	
Utang bank		607.527.943	607.527.943	Bank loans	
Liabilitas jangka pendek lainnya		81.715	81.715	Other current liabilities	
Liabilitas jangka panjang lainnya		1.702.002	1.702.002	Other non-current liabilities	
Total		16.671.801.660	17.531.908.837	Total	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**42. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

**42. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		
	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	2.750.527.471	2.750.527.471	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	5.149.595	5.149.595	Restricted cash
Investasi jangka pendek	10.988.190	10.988.190	Short-term investments
Piutang usaha - Pihak ketiga	396.513.588	396.513.588	Trade receivables - Third parties
Piutang usaha - Pihak berelasi	219.579.089	219.579.089	Trade receivables - Related parties
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	27.384.747	27.384.747	Other receivables - Third parties
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	198.236.334	198.236.334	Other receivables - Related parties
Pendapatan masih akan diterima	210.411.250	210.411.250	Accrued revenues
Total	3.818.790.264	3.818.790.264	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	677.400.000	677.400.000	Short-term bank loans
Surat berharga yang diterbitkan	6.658.419.072	6.714.419.072	Securities issued
Beban akrual	824.294.545	824.294.545	Accrued expenses
Utang usaha - Pihak ketiga	700.197.574	700.197.574	Trade payables - Third parties
Utang usaha - Pihak berelasi	5.607.325	5.607.325	Trade payables - Related parties
Utang lain - lain - Pihak ketiga	268.392.983	268.392.983	Other payables - Third parties
Utang lain - lain - Pihak berelasi	128.805.326	128.805.326	Other payables - Related parties
Utang bank	3.910.892.686	3.910.892.686	Bank loans
Liabilitas jangka pendek lainnya	7.400.601	7.400.601	Other current liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	4.610.340	4.610.340	Other non-current liabilities
Total	13.186.020.452	13.242.020.452	Total

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**42. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi pada entitas asosiasi, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, pendapatan diterima dimuka jangka pendek, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
- Estimasi nilai wajar utang obligasi, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Selain item-item tersebut diatas, Perusahaan tidak memiliki aset atau kewajiban lain yang diukur atau diungkapkan berdasarkan nilai wajar, sehingga tidak ada keharusan untuk menyajikan hirarki nilai wajar berdasarkan PSAK 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar.

**42. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, restricted cash, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues, investments in associates, short-term bank loans, trade payables, other payables, short term unearned revenue, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discount.*
- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*
- *The estimated fair values of bonds payable, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.*

Other than those items mentioned above, the Company does not have any assets or liabilities that are measured or disclosed based on fair value, therefore it is not considered necessary to present fair value hierarchy based on PSAK 68 (Amendment 2014): Fair Value Measurement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang Dollar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menurun/meningkat sebesar 1% dengan semua variabel konstan, pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebesar Rp138.593.600 lebih rendah/tinggi, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang bank dan surat berharga yang diterbitkan dalam satuan mata uang asing.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in US Dollar.

As of December 31, 2018 had the exchange rate of the Rupiah against the foreign currency depreciated/appreciated by 1% with all other variables held constant, income before tax for the year then ended would have been Rp138,593,600 lower/higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivable, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, bank loans, securities issued denominated in foreign currency.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko di mana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2018.

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk are to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2018.

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Jumlah/ Total	
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year		
Aset						Assets
Kas dan setara kas	4.612.047.296	-	-	-	4.612.047.296	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	-	57.920.390	-	57.920.390	Short-term investments
Liabilitas						Liabilities
Utang bank	-	-	351.140.707	256.387.236	607.527.943	Bank loans
Utang sewa pembiayaan	-	-	62.813.193	63.257.235	126.070.428	Finance lease liability
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	14.329.612.957	14.329.612.957	Securities issued
Total	4.612.047.296	-	471.874.290	14.649.257.428	19.733.179.014	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Aset keuangan		
Kas dan setara kas	4.612.047.296	2.750.527.471
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	5.149.595
Piutang usaha - neto	856.737.565	616.092.677
Piutang lain-lain - neto	298.768.211	225.621.081
Pendapatan masih akan diterima	317.662.932	210.411.250
Investasi jangka pendek	57.920.390	10.988.190
Total	6.143.136.394	3.818.790.264

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follows:

Financial assets
Cash and cash equivalents
Restricted cash
Trade receivables - net
Other receivables - net
Accrued revenues
Short-term investments
Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi di mana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Kelompok Usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Kelompok Usaha.

Selain itu, Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continues to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Jumlah/ Total	
	< 1 tahun/ < 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-3 tahun/ 2-3 years	> 3 tahun/ > 3 years		
Utang usaha	606.560.384	-	-	-	606.560.384	Trade payables
Utang lain-lain	698.913.374	-	-	-	698.913.374	Other payables
Beban akrual	1.287.510.462	-	-	-	1.287.510.462	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	81.715	-	-	-	81.715	Other short-term liabilities
Utang obligasi	-	-	-	14.329.612.957	14.329.612.957	Bond payables
Utang bank	351.140.707	-	-	256.387.236	607.527.943	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.702.002	-	-	-	1.702.002	Other non-current liabilities
Total	2.945.908.644	-	-	14.586.000.193	17.531.908.837	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING

Perusahaan

a) Perjanjian Konsesi

1) Perjanjian Konsesi APBS

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 dan No. HK. 0501/175/P.III-2014 (Perjanjian Konsesi APBS) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan diharuskan untuk membiayai, merencanakan/merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran, serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS.
- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 25 tahun, yang terdiri dari masa pra-konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender, masa konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender, dan masa operasi selama 23 tahun terhitung sejak masa pemungutan pertama jasa penggunaan alur pelayaran hingga sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Konsesi APBS.

44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company

a) Concession Agreement

1) APBS Concession Agreement

The Company entered into an agreement on the provision of Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") utilization services No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 and No. HK.0501/175/P.III-2014 (Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 8, 2014. Based on this agreement, the Company obtained the right to provide the APBS utilization services with the following conditions:

- *The Company is required to finance, plan/design, build, operate, and maintain the APBS including the installation of shipping navigation facilities, as well as collecting APBS service fee.*
- *The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 25 years, consisting of the pre-construction period no later than 12 calendar months, the construction period of no later than 12 calendar months, and the operating period for 23 years from the first collection period until the end of the Concession Agreement.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

1) Perjanjian Konsesi APBS (lanjutan)

- Perusahaan wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 3,5% dari pendapatan kotor pengoperasian APBS kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.
- Perusahaan wajib mengembalikan aset pengoperasian APBS yang berupa *capital dredging* kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.
- Atas kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS, Perusahaan berhak untuk memungut tarif jasa penggunaan APBS berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun.

Berdasarkan Surat dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 tanggal 5 November 2015, alur baru APBS dinyatakan siap beroperasi. Pemungutan tarif jasa pengguna APBS dilakukan 2 hari setelah sosialisasi kepada para pengguna APBS.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait dengan APBS sebesar Rp952.594.783 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 17).

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

1) APBS Concession Agreement (continued)

- *The Company is required to pay concession revenue amounting to 3.5% of the APBS operation's gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every month, no later than 15 days in the following month.*
- *The Company is required to return the APBS operating assets in form of capital dredging to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.*
- *For the APBS utilization services provision, the Company has the right to collect the APBS utilization service fee based on the mechanism required by the Law. The tariff is valid for at least 2 years.*

Based on the Letter from Tanjung Perak Main Port Authority Office No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 dated November 5, 2015, the new APBS channel was declared ready to operate. The collection APBS service fee was carried out 2 days after the socialization to APBS users.

As of December 31, 2018, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to APBS amounting to Rp952,594,783 and recorded them as part of "Intangible assets - concession assets" in the consolidated statements of financial position of the Company (Note 17).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

2) Perjanjian Konsesi TTL

Perusahaan mengadakan perjanjian penyediaan dan pelayaran perusahaan jasa kepelabuhanan di TMTL No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 (Perjanjian Konsesi TTL) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2015. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan memperoleh hak perusahaan TMTL untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatan pengoperasian dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 72 tahun sejak diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.001/3/20/DPPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong pada tanggal 11 November 2014.
- Perusahaan wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan perusahaan TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap 3 bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan pertama per triwulannya.
- Perusahaan wajib melaporkan laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan konsesi TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan dan setiap tahun, dengan laporan tahunan diaudit oleh auditor independen.
- Perusahaan wajib mengembalikan aset konsesi TMTL yang berupa dermaga kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

2) TTL Concession Agreement

The Company entered into an agreement on the provision of port services in TMTL No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 (TTL Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 19, 2015. Based on this agreement, the Company obtained the TMTL utilization rights for the construction and the development of port facilities, maintenance activities, and the operational activities with the following conditions:

- *The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 72 years since the issuance of the General Director of Sea Transportation's Letter No. PP.001/3/20/DPPL-14 concerning the Operational Trials at Teluk Lamong Terminal on November 11, 2014.*
- *The Company is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the TMTL's utilization service provision activities' gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every 3 months, no later than 15 days in the first month of each quarter.*
- *The Company is required to report TMTL's operational performance and concession revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia monthly and annually, with the annual report audited by an independent auditor.*
- *The Company is required to return TMTL's concession assets in form of port to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

2) Perjanjian Konsesi TTL (lanjutan)

- Perusahaan berhak melakukan kerja sama dengan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan konsesi TMTL dengan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Perusahaan berhak untuk menetapkan tarif awal jasa kepelabuhanan, melakukan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan, serta mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhanan.

3) Perjanjian Konsesi di Pelabuhan yang diusahakan oleh Perusahaan

Perusahaan mengadakan perjanjian kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak pada tanggal 9 November 2015. Perjanjian ini telah diubah dengan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atas Perjanjian Kegiatan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan No. HK.107/01/12/OP.Tpr-216 dan No. HK.0502/437/P.III-2016 tanggal 14 Oktober 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan memperoleh hak perusahaan di area yang terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan milik Perusahaan yang telah diusahakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

2) TTL Concession Agreement (continued)

- The Company has the right to cooperate with other competent parties to carry out TMTL's concession activities with written notification to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.
- The Company has the right to determine the initial rates of port services first rate of, make amendments to the port services rate, and apply and collect the port services rate payment.

3) Concession Agreement in the port operated by the Company

The Company entered into an agreement on the port services provision in the Commercial Ports No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 with Tanjung Perak Main Port Authority Office on November 9, 2015. This agreement was updated with the Additional Agreement (*Addendum*) on the Port Services Provision Agreement in the Ports No. HK.107/01/12/OP.Tpr-216 and No. HK.0502/437/P.III-2016 dated October 14, 2016. Based on this agreement, the Company obtained the rights to commercially utilize the locations where the Company's terminals and port facilities are located and operated with the following conditions:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

**3) Perjanjian Konsesi di Pelabuhan yang
diusahakan oleh Perusahaan (lanjutan)**

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 30 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi dan diperpanjang selama area konsesi masih diusahakan Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.
- Perusahaan wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan pengusahaan di area konsesi setiap 3 bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.
- Perusahaan wajib melaksanakan audit laporan keuangan tahunan secara menyeluruh dengan auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.
- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan berhak di antaranya menetapkan dan memungut tarif pelayanan jasa di area konsesi serta melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- Lahan dan aset di dalam area konsesi yang telah berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap sebagai hak pengelolaan dan/atau aset Perusahaan.
- Apabila Perusahaan telah melakukan kerja sama operasi dengan mitra kerja sama sebelum Perjanjian Konsesi ditandatangani, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Kegiatan pengusahaan dari perjanjian kerja sama tersebut diperhitungkan sebagai komponen pendapatan konsesi dengan mekanisme yang disepakati dan diatur sendiri antara Perusahaan dan mitra kerja sama.

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

**3) Concession Agreement in the port
operated by the Company (continued)**

- *The Concession Agreement is valid for 30 years since the signing of the Concession Agreement and is extended as long as the concession areas are still operated by the Company in accordance with the applicable regulations.*
- *The Company is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the commercial port utilization activities' gross revenue obtained from the concession area every 3 months, no later than the 15th of the first month of each quarter.*
- *The Company is required to carry out annual financial statement audits with independent auditors appointed by the Company.*
- *Based on the Concession Agreement, the Company has the right to determine and collect the service fee in the concession area and to cooperate with other parties.*
- *The land and assets within the concession area whose utilization rights and/or ownerships are under the Company's name remain as the Company's utilization rights and/or assets.*
- *If the Company had entered into cooperation agreements before the Concession Agreement was signed, the cooperation agreements are still valid until their expiration date. The cooperation agreements' commercial activities are to be included as concession revenue components with mechanisms agreed and regulated by the Company and the cooperation partners.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

- 4). Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan sedang dalam proses pengajuan permohonan hak konsesi atas Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar. Perusahaan memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang Rencana Kegiatan Pengembangan TPGML berdasarkan keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 tanggal 11 Mei 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP, No.LR860/PW13/2/2017 tanggal 2 November 2017, jangka waktu konsesi diusulkan selama 59 tahun.
- 5). Berdasarkan Perjanjian Konsesi No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, BMS dan Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan Kelas II Gresik mengikatkan diri dalam perjanjian konsesi tentang kegiatan perusahaan jasa kepelabuhan terminal manyar di pelabuhan Gresik dengan jangka waktu selama 76 tahun terhitung dari sejak tanggal ditandatangani perjanjian. Pendapatan konsesi pada area konsesi Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sebesar 2,75% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi.

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

- 4). As at the date of the financial report, the Company is still in the process of requesting the concession rights for Terminal Gilimas in Lembar Port. The Company obtained an Utilization Permit for Development Activity Plan TPGML based on the decision of the West Nusa Tenggara Investment Coordinating Board for Integrated Investment and Licensing Agency No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 dated May 11, 2016. Based on BPKP Report of Review No. LR860/PW13/2/2017 dated November 2, 2017, the concession period was proposed for 59 years.
- 5). Based on the Concession Agreement No. 02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 dated December 15, 2017, BMS and the Class II of Gresik Port Authority and Authority Office bind themselves in a concession agreement concerning the activities of port terminal services in the port of Gresik for a period of 76 years from the date of the signing of the agreement. The concession revenue of Terminal Manyar in Gresik Port is 2.75% of the gross revenue of port service operations in the concession area.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b) Kontrak Pembelian

- 1) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.16/HK.0502/P.III-2018 tanggal 5 Februari 2018 dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk pekerjaan desain dan pembangunan aksesibilitas darat (*flyover* dan *tapper*) di Terminal Teluk Lamong sebesar Rp1.309.892.657. Pada tanggal 31 Desember 2018 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 30,04%.
- 2) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.113/HK.0502/P.III-2018 tanggal 10 April 2018 dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk pekerjaan pembangunan lanjutan *Container Yard* Terminal Teluk Lamong sebesar Rp399.950.000. Pada tanggal 31 Desember 2018 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 51,31%.
- 3) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.44/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk pekerjaan pembangunan kantor *Tower Pelindo* sebesar Rp466.965.400. Pada tanggal 31 Desember 2018 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 25,02%.
- 4) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.42/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 yang terakhir telah diperbarui dengan *Addendum I* No. SP2.333.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 3 September 2018 dengan PT Van Oord Indonesia untuk pekerjaan pengerukan kolam dan alur Pelabuhan Cabang Benoa sebesar Rp541.219.237. Pada tanggal 31 Desember 2018 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 79%.

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

b) Purchase Contract

- 1) The Company entered into contract No. SP2.16/HK.0502/P.III-2018 dated February 5, 2018 with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the design and construction for land accessibility work (*flyover* and *tapper*) at Terminal Teluk Lamong amounting to Rp1,309,892,657. As of December 31, 2018 the work progress has reached 30.04% completion rate.
- 2) The Company entered into contract No. SP2.113/HK.0502/P.III-2018 dated April 10, 2018 with PT Nindya Karya (Persero) for the construction of *Container Yard* holdings in Terminal Teluk Lamong amounting to Rp399,950,000. As of December 31, 2018 the work progress has reached 51.31% completion rate.
- 3) The Company entered into contract No. SP2.44/HK.0502/P.III-2018 dated February 21, 2018 with PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the construction of *Pelindo Office Tower* amounting to Rp466,965,400. As of December 31, 2018 the work progress has reached 25.02% completion rate.
- 4) The Company entered into contract No. SP2.42/HK.0502/P.III-2018 dated February 21, 2018 which was last updated with *Addendum I* No. SP2.333.1/HK.0502/P.III-2018 dated September 3, 2018 with PT Van Oord Indonesia for dredging of pool and flow in Benoa Port amounting to Rp541,219,237. As of December 31, 2018 the work progress has reached 79% completion rate.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c) Kontrak Pembelian (lanjutan)

- 5) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.249.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan design dan konstruksi pengembangan terminal kalibaru pelabuhan Tanjung Emas sebesar Rp524.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2018 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 0%.

d) Informasi Penting Lainnya

- 1) Berkaitan dengan penggunaan tanah HPL milik Perusahaan untuk pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa oleh PT JBT (Entitas Asosiasi), Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) menyampaikan surat ke Kasubdit Pengadaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum mengenai hal pendataan sebagai berikut:

Pemilik/ Landowners	Luas/ Land area	NJOP	Appraisal	Keterangan/ Information
Perusahaan (darat/land)	522 m2/sqm	1.227.744.000	2.589.120.000	-
Perusahaan (perairan/waters)	41.490 m2/sqm	-	-	Dalam proses P2T/ In the process P2T

Sampai dengan tanggal Laporan ini, keputusan uang ganti rugi terhadap HPL milik Perusahaan tersebut masih dalam proses menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

c) Purchase Contract (continued)

- 5) The Company entered into contract No. SP2.249.1/HK.0502/P.III-2018 dated July 27, 2018 with PT Wijaya Karya (Persero) for design and construction of expansion of Kalibaru terminal of Tanjung Emas port amounting to Rp524,000,000. As of December 31, 2018 the work progress has reached 0% completion rate.

d) Other Important Information

- 1) In connection with the Company's use of HPL for the construction of highways Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa by PT JBT (Associate), Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) delivered a letter to the Head of Sub Land Acquisition Department of Public Works regarding the data collection as follows:

As of the date of this Report, the decision of compensation for the HPL of the Company is still in the process of awaiting direction from the Directorate General of Highways Ministry of Public Works and Public Housing.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

d) Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

- 2) Pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS

P&O Dover (*Holdings*) Ltd dan Perusahaan telah menyepakati proses pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS, yang hasilnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Poin penting yang disepakati adalah bahwa pada tanggal 28 April 2019 akan dilakukan pengambil alihan saham P&O Dover (*Holdings*) Ltd oleh Perusahaan. Perusahaan sudah mendapat Persetujuan Menteri Negara BUMN dan telah menyepakati Perjanjian Jual Beli Bersyarat dan Perjanjian Penyelesaian dengan P&O Dover (*Holdings*) Ltd. Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan dalam proses pemenuhan Perjanjian Jual Beli Bersyarat dan Perjanjian Penyelesaian dalam rangka pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS.

- 3) HPL Perusahaan seluas 12,8 hektar di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang juga dicatat sebagai aset PT Pertamina UPPDN IV Semarang. Sampai tanggal laporan keuangan, belum ada penyelesaian atas penguasaan HPL yang tumpang tindih ini.

- 4) Pengangkatan kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera

Perusahaan menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 pada tanggal 4 Februari 2016 tentang penugasan penyingkiran kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan Muatannya.

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

d) Other Important Information (continued)

- 2) Termination of the cooperation on PT TPS operation

P&O Dover (*Holdings*) Ltd and the Company have agreed to terminate the cooperation on PT TPS operation, which agreement has been supported by the Company's Board of Commissioners. The important points on this termination process include the transfer of PT TPS' shares. The Company has obtained the approval from the Minister of State-Owned Enterprises (MSOE) and have agreed on the Settlement Agreement and Conditional Agreement of Sales and Purchase of Share by the Company and P&O Dover (*Holdings*) Ltd. At the reporting date, the Company is in the process of fulfilling the the Settlement Agreement and Conditional Agreement of Sales and Purchase of Share.

- 3) The Company's 12.8 hectares HPL in Semarang's Tanjung Emas Branch Port are also recorded as PT Pertamina UPPDN IV's asset. Until the date financial statements authorization date, this overlapping HPL haven't been resolved.

- 4) Removal of ship frame KMP Wihan Sejahtera

The Company received a Decision letter of the head of Harbourmaster Main Office Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 dated February 4, 2016 regarding the assignment to remove the ship frame and the cargo of KMP Wihan Sejahtera.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

d) Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

- 4) Pengangkatan kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera (lanjutan)

Perusahaan telah menyingkirkan kerangka KMP Wihan Sejahtera, atas penugasan tersebut Perusahaan membukukan biaya sebesar Rp58,678,059 dan berharap biaya tersebut dapat dikompensasikan dengan konsesi yang diterima oleh Perusahaan sehingga proses kompensasi dapat dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak

Tagihan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sebesar Rp49,445,203 dicatat sebagai piutang lain-lain jangka panjang.

- 5) Penggunaan tanah HPL oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Perusahaan menyerahkan penggunaan bagian tanah HPL pelabuhan Cabang Gresik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dengan perjanjian No PGSK.30/662/1982 tanggal 11 Desember 1982 dengan luas wilayah sebesar 179.450m² berlaku mulai tanggal 1 April 1981 sampai dengan tanggal 31 Maret 1996. Sementara itu, Perusahaan memperoleh hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur pada tanggal 22 November 1993 dengan hasil luas 280.287m² untuk penggunaan tanah pelabuhan dengan perjanjian No PGSK.30/662/1982. terdapat selisih sebesar 100.837m² dikarenakan adanya perairan yang telah berubah menjadi daratan.

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

d) Other Important Information (continued)

- 4) Removal of ship frame KMP Wihan Sejahtera (continued)

The Company had removed ship frame of KMP Wihan Sejahtera, upon the assignment the Company incur costs amounting to Rp58.678.059 and wish the costs can be compensated with the concession received by the Company. Therefore, the compensation process can be executed by the Authority of Main Port of Tanjung Perak.

Receivables to the head of Harbourmaster Main Office Tanjung Perak amounting to Rp49,445,203 recorded as part of other long-term receivables.

- 5) HPL utilization by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

The Company handed over the administer HPL on branch port of Gresik to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) with agreement No PGSK.30/662/1982 dated December 11, 1982 with an area of 179.450m² effective from April 1, 1981 until March 31, 1996. Meanwhile, The Company obtained the result of measurement from the National Land Agency region of East Java on November 22, 1993 with the results of 280.287m² for the right to use a part of the land in Port with Agreement no PGSK.30/662/1982. There are different amounting to 100.837m² due to changes of sea area which have become land.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

d) Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

- 5) Penggunaan tanah HPL oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (lanjutan)

Perusahaan mengadakan rapat dengan PT PLN PJB II pada tanggal 26 Februari 2015 dan disepakati bahwa Perusahaan dan PT PLN PJB II akan menelaah biaya kompensasi reklamasi untuk lahan seluas 280.287m² terhitung sejak 1996 sampai Desember 2015 dan PT PLN PJB II masih berpedoman pada UU No 30 Tahun 2009 Pasal 30 penggunaan tanah untuk penyediaan tenaga listrik menggunakan ganti rugi atau kompensasi.

Perusahaan mengirimkan surat kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2018 untuk permohonan mediasi terhadap permasalahan penggunaan tanah HPL oleh perusahaan BUMN di lingkungan Perusahaan. Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu pembayaran atas penggunaan tanah HPL yang digunakan oleh PT PLN PJB II.

45. PERKARA HUKUM

Perusahaan

- a) Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara dengan No Perkara 196/Pdt.G/2009/PN.Sby.

Pada tanggal 18 Desember 2002, Perusahaan dan PT Timur Nusantara menandatangani perjanjian kerjasama No. HK 0501/36/P/III-2002 tentang pengelolaan fasilitas terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Wangi, yang seluruh asetnya merupakan aset milik Perusahaan, untuk jangka waktu yang berakhir pada 18 Januari 2004. Namun, setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, PT Timur Nusantara tidak mengembalikan dan tetap menguasai objek perjanjian tersebut. Perusahaan telah menyampaikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada PT Timur Nusantara untuk meninggalkan dan mengembalikan objek tersebut.

**44. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

d) Other Important Information (continued)

- 5) HPL utilization by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (continued)

The Company held a meeting with PT PLN PJB II dated February 26, 2015 and agreed that the Company and PT PLN PJB II will examines the cost of compensation for reclamation for land covering 280,287m² counted since 1996 to December 2015 and PT PLN PJB II still holding on Law no 30 Year 2009 article 30 The use of the land for the provision of electric power using the indemnity or compensation.

The Company sent a letter to the Audit Board of the Republic Indonesia dated January 29, 2018 requestiing for mediation against the issues of using the HPL land by another State-owned enterprises on the Company area. At the end of the reporting date, the Company is still awaiting the payment for the use of the HPL land used by PT PLN PJB II.

45. LAWSUIT

The Company

- a) The Company file lawsuit against PT Timur Nusantara with Case Number 196/Pdt.G/2009/PN.Sby.

On December 18, 2002, the Company and PT Timur Nusantara signed cooperation agreement No. HK 0501/36/P/III-2002 concerning the management of container terminal facilities at the Port of Tanjung Wangi Banyuwangi, whose assets are all owned by the Company, for a period ending on January 18, 2004. However, after the expiration of the agreement, PT Timur Nusantara retained the control and didn't return the object of the agreement. The Company had submitted legal warning letters for three times reminding PT Timur Nusantara to leave and return the object.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- a) Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara dengan No Perkara 196/Pdt.G/2009/PN.Sby. (lanjutan)

Pada 20 Maret 2009, Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara melalui Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengembalikan objek perjanjian tersebut dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.855.286. Perusahaan memenangkan gugatan ini.

Putusan serupa juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI sesuai relas putusan Mahkamah Agung RI No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2012, yang memenangkan Perusahaan dan menolak permohonan kasasi dari PT Timur Nusantara. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut Perusahaan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Timur Nusantara dan Perusahaan berpotensi memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset dan potensi memperoleh pendapatan serta pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.855.286 dari PT Timur Nusantara.

Perusahaan telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta penjelasan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah dikirimkan kepada PT Timur Nusantara atau Kuasa Hukumnya sesuai surat Direksi No. HK.10/01/P.III-2014 tanggal 13 Januari 2014 dan surat No. HK.01/06/P.III-2014 tanggal 18 Februari 2014.

Perusahaan telah memberikan peringatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi PT Timur Nusantara tetap menolak untuk melaksanakan putusan. Karenanya Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi (sebagai delegasi dari Pengadilan Negeri Surabaya di wilayah tempat objek eksekusi) menerbitkan Penetapan No. 06/PEN.Eks/2018/PN.Sby Jo. No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2018 yang berisikan perintah untuk melakukan sita eksekusi atas objek sengketa berupa 1 unit *Reach Stacker* milik PT Timur Nusantara.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- a) The Company filed lawsuit against PT Timur Nusantara with Case Number 196/Pdt.G/2009/PN.Sby. (continued)

On March 20, 2009, the Company filed a lawsuit against PT Timur Nusantara through Surabaya District Court to return the agreement object and pay a compensation amounting to Rp1,855,286. The Company won this lawsuit.

A similar verdict was handed down by High Court Judge in East Java and the Indonesian Supreme Court through the decision statement No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 24, 2012, which declared that the Company won and rejected the request for a cassation from PT Timur Nusantara. With regards to the Supreme Court's decision, the Company made a notification to PT Timur Nusantara and the Company had potential gain in the form of the returned asset and compensation amounting to Rp1,855,286 from PT Timur Nusantara.

The Company had sent a letter to the Surabaya District Court to clarify that the Supreme Court Cassation Decision had been sent to PT Timur Nusantara or the corresponding legal counsel in accordance with the Board of Director letter No. HK.10/01/P.III-2014 dated January 13, 2014 and letter No.HK.01/06/P.III-2014 dated February 18, 2014.

*The Company has sent a warning through the Surabaya District Court, but PT Timur Nusantara still refused to carry out the verdict. Therefore, the head of Banyuwangi District Court (as a delegation of Surabaya District Court at the place of execution) issued Determination No. 06/PEN.Eks/2018/PN/Sby Jo. No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 5, 2018 stating an order to seize the object of the dispute in the form of 1 unit *Reach Stacker* belonging to PT Timur Nusantara.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- a) Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara dengan No Perkara 196/Pdt.G/2009/PN.Sby. (lanjutan)

Atas Penetapan tersebut telah dilakukan sita eksekusi terhadap alat tersebut pada tanggal 10 Oktober 2018 bertempat di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 06/PEN.EKS/2018/PN.Sby tanggal 10 Oktober 2018. Perusahaan menunggu hasil proses pelelangan tersebut yang akan di sampaikan kepada Perusahaan.

- b) Perusahaan menggugat PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") dengan No. Perkara. 662/Pdt.G/2009/PN.SBY.

Pada tanggal 29 April 1997, Perusahaan dan PT WAL menandatangani perjanjian sewa HPL Cabang Tanjung Perak seluas 27.393m² untuk kepentingan PT WAL membangun pabrik minyak nabati cair (*refinery*) dan gudang penimbunan dengan jangka waktu 20 tahun. Hingga akhir masa perjanjian, PT WAL tidak melakukan pembangunan dan hanya melakukan pembangunan tembok pembatas. Karena PT WAL tidak segera melakukan pembangunan maka Perusahaan berupaya untuk mengembalikan atau menarik kembali tanah yang dikerjasamakan. Atas tindakan Perusahaan tersebut PT WAL melakukan gugatan kepada Perusahaan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan di pengadilan tingkat pertama ini dimenangkan oleh Perusahaan.

Upaya hukum lanjutan telah dilakukan beberapa kali, yang terakhir dengan hasil Putusan Peninjauan Kembali dengan register No. 470 PK/PDT/2012 tanggal 23 Oktober 2013 yang mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT WAL dari situs MA RI.

Perusahaan telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, yang terakhir dengan mengundang PT WAL melalui media massa Koran Nasional, namun PT WAL tidak pernah menghadiri undangan pertemuan tersebut. Karena tidak adanya respon dari PT WAL, pada tanggal laporan keuangan tanah tersebut disewakan Perusahaan kepada PT Nilam Utara.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- a) The Company filed lawsuit against PT Timur Nusantara with Case Number 196/Pdt.G/2009/PN.Sby. (continued)

Based on the decision above, the seizure was done on October 10, 2018 at the Port of Tanjung Wangi Banyuwangi as stated in the Seizure Memo No. 06/PEN.EKS/2018/PN.Sby dated October 10, 2018. The Company is waiting for the result of the auction process which will be notified to the Company by the High Court of Surabaya.

- b) The Company filed lawsuit against PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") Case number 662/Pdt.G/2009/PN.SBY.

On April 29, 1997, the Company and PT WAL signed Tanjung Perak Branch HPL lease agreement covering 27,393m² for 20 years for PT WAL's construction of vegetable oil refinery and stockpiling warehouse. Until the end of the agreement period, PT WAL hasn't done any construction and has only built the parapet wall. Since PT WAL didn't immediately carry out the development, the Company seeks to have the leased land returned or withdrawn. For the Company's action, PT WAL filed a lawsuit against the Company to Surabaya District Court. The lawsuit in the first court was won by the Company.

Following that, several legal efforts have been made, with the latest result being the Judicial Review Decision with register No. 470 PK/PDT/2012 dated October 23, 2013 which grant the Judicial review proposed by PT WAL as stated in the Supreme Court of Indonesia's Website.

The Company has attempted to resolve the lawsuit, with the latest effort by inviting PT WAL through advertisements in national newspapers. However, PT WAL had not responded to any of the meeting invitations. As there's no response from PT WAL, at the financial report date the Company leased the land to PT Nilam Utara.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- c) Perusahaan mengundurkan diri dari keikutsertaan kepemilikan PT Lamin Aspalindo Tiga ("Lamin").

PT Lamin merupakan ventura bersama antara PT Lamindo Sakti Inti dan Perusahaan. Namun, Lamin baru melakukan satu transaksi penjualan sejak pendiriannya. Melalui konsultan hukum Zaidun & Partners, Perusahaan telah melakukan uji tuntas dari segi hukum (*Legal Due Diligence*). Berdasarkan hasil uji tuntas tersebut, Perusahaan telah menerbitkan Surat Kuasa No. KP.0503/166/HOFC-2018 tanggal 17 Desember 2018 dan No. SP.0835/KP.0503/HOFC-2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang pembubaran Lamin. Sampai tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu jawaban dan kehadiran PT Lamindo Sakti Inti untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pelepasan kepemilikan Perusahaan atas PT Lamin.

- d) Perusahaan (turut tergugat) dan Sdri. Widji (tergugat) digugat oleh Sdr. Yusuf Efendi dengan Perkara No. 13/Pdt.G/2013/PN.Sby.

Saudara Yusuf Efendi, sebagai Penggugat, mengaku sebagai ahli waris yang sah atas bangunan di Jalan Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya yang berdiri di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pelabuhan. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menempati objek sengketa tanpa izin Penggugat, dan meminta kepada Perusahaan untuk mengubah izin penggunaan tanah yang sebelumnya atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat. Berdasarkan keputusan No. Pdt.G.13/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2013, Pengadilan Negeri Surabaya menerima sebagian tuntutan Penggugat.

Perusahaan telah mengajukan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengajuan banding Perusahaan diterima dan dikabulkan berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 279/PDT/2017/PT.Sby tanggal 9 Februari 2018, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Pdt.G.13/PN.Sby dibatalkan.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- c) The Company withdrew from the ownership of PT Lamin Aspalindo Tiga ("Lamin").

PT Lamin is a joint venture between PT Lamindo Sakti Inti and the Company. However, Lamin has only made one sales transaction since its establishment. Through Zaidun & Partners as the legal consultant, the Company has conducted Legal Due Diligence. Based on the results of the Due Diligence, the Company issued Power of attorney No. KP.0503/166/OFC-2018 dated December 17, 2018 on the dissolution of Lamin. Until the date of the financial statements, the Company is still waiting for PT Lamindo Sakti Inti's response and presence to carry out the General Meeting of Shareholders in order to release the Company's ownership of PT Lamin.

- d) The Company (co-defendant) and Widji (defendant) were sued by Yusuf Efendi with Case No. 13/Pdt.G/2013/PN.Sby.

Yusuf Efendi, as the Plaintiff, claimed to be the rightful heir of the building on Jalan Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya which stands on Port Management Rights (HPL). The Plaintiff stated that the Defendant has occupied the object of the dispute without the Plaintiff's permission, and requested the Company to change the previous land use permit on behalf of the Defendant to be on behalf of the Plaintiff. Based on the decision No. Pdt.G.13/PN.Sby August 28, 2013, the Surabaya District Court granted a portion of the Plaintiff's demands.

The Company had appealed the decision to the Surabaya High Court. The Company's appeal was accepted and granted based on the Appeal Decision Notice Statement Number 279/PDT/2017/PT.Sby dated February 9, 2018, thus cancelling Surabaya District Court Decision Number Pdt.G.13/PN.Sby.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- d) Perusahaan (turut tergugat) dan Sdri. Widji (tergugat) digugat oleh Sdr. Yusuf Efendi dengan Perkara No. 13/Pdt.G/2013/PN.Sby. (lanjutan)

Atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Relaas Pemberitahuan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 5 Juli 2018. Sampai tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih dalam proses pengajuan Kontra Memori Kasasi atas perkara ini.

- e) Perusahaan digugat oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) dalam Perkara Perdata No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

YLPK mendalilkan Perusahaan melakukan kebohongan dengan mencantumkan lingkup bisnis sebagai penyedia jasa air kapal pada *Annual Report* Tahun 2011. Atas dalil tersebut, YLPK tidak menuntut Perusahaan untuk membayar, namun untuk meminta maaf melalui media massa. Setelah melalui pemeriksaan di persidangan, atas gugatan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan YLPK untuk seluruhnya.

YLPK menyatakan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Surabaya pada 10 Maret 2015. Atas pengajuan banding tersebut Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2015 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan surat Pengadilan Tinggi Surabaya No. 126/PDT/2016/PT.Sby Jo. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby, pada pokoknya memberi putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih belum menerima Relaas Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- d) The Company (co-defendant) and Widji (defendant) were sued by Yusuf Efendi with Case No. 13/Pdt.G/2013/PN.Sby. (continued)

Upon the Surabaya High Court's decision, the Plaintiff filed an appeal to the Indonesian Supreme Court through Surabaya District Court with the Credential Declaration Statement Number 13/Pdt.G/2013/PN.Sby dated 5 July 2018. Until the date of the financial statements, the Company is still in the process of submitting the Cassation Memorandum Contra for the matter.

- e) The Company was sued by Consumer protection Foundation (YLPK) in Civil Case No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

YLPK sued the Company for lying by stating that the scope of the business is as water services provider for ships in the 2011 Annual Report. For the lawsuit, YLPK didn't demand any payment from the Company, but an apology through the mass media. After the examination process in the court, the Surabaya District Court judges basically ruled that YLPK's claim was rejected in full.

YLPK filed an appeal on the decision to the Surabaya High Court on March 10, 2015. In response to that appeal, the Company submitted the Counter Memory of Appeal on June 29, 2015 with Receipt of Counter Memory of Appeal No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

The Surabaya High Court's Panel of Judges, with Letter of Surabaya High Court No. 126/PDT/2016/PT.Sby Jo. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby, basically ruled a verdict that strengthened the decision of the Surabaya District Court. Until the date financial statements, the Company still hasn't received formal verdict statement from the Surabaya District Court.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- f) Perusahaan (tergugat II) bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (tergugat I) digugat oleh Masyarakat Korban Penggusuran di sekitar stasiun Kalimas dengan perkara No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.
- (a). Abdullah/Dewi Nasiroh, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby;
- (b). Kadarwati alias Ibu Baginda selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby;
- (c). Maslichah dan Soeselo, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Para penggugat dalam register perkara No. 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby merupakan korban penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI Daops VIII di sekitar Stasiun Kalimas, Surabaya. Lokasi penggusuran tersebut rencananya akan digunakan dalam rangka kerjasama usaha pengangkutan petikemas melalui sarana kereta api antara PT KAI dengan Perusahaan. Atas gugatan tersebut dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- f) The Company (Defendant II) along with PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (Defendant I) were sued by the Victim of eviction near Kalimas station with case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, and No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.
- (a). Abdullah/Dewi Nasiroh, et al as the Plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as the second defendant in the civil case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby;
- (b). Kadarwati aka Mrs. Baginda as plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as the second defendant in the civil case No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby;
- (c). Maslichah and Soeselo, et al as the Plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as Defendant II in the civil case No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

The plaintiffs in the case register No. 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby are victims of eviction conducted by PT KAI Daops VIII around Kalimas Station Surabaya. Location of eviction is planned to be used in the framework of cooperation by means of hauling container trains between PT KAI and the Company. Based on the lawsuit and through the inspection and checking in the court proceeding, the Panel Judge ruled the verdict which rejected all the plaintiffs' lawsuit.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- f) Perusahaan (tergugat II) bersama dengan PT KAI (tergugat I) digugat oleh Masyarakat Korban Penggusuran di sekitar stasiun Kalimas dengan perkara No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (lanjutan)

Bahwa atas permohonan banding dari Para Penggugat *register* perkara No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby sebagaimana relaas No. 67/Pdt/2016/PT.Sby tanggal 13 April 2016. Perusahaan masih menunggu surat No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby

Menurut informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya ketiga perkara tersebut telah diputus dalam tingkat banding dengan amar putusan menguatkan putusan PN Surabaya tersebut. Pada tanggal laporan keuangan, perusahaan masih belum menerima Relaas Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

- g) Perusahaan digugat oleh PT Upaya Export dan Ang Suanthie John, dkk dengan perkara No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby.

PT Upaya Export dan Ang Suanthie John, dkk menggugat bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sewenang-wenang melakukan perencanaan pengosongan gudang milik Penggugat di Jalan Kalimas Baru Nomor 128 dan 140, Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat secara penuh.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- f) The Company (Defendant II) along with PT KAI (Defendant I) were sued by the Victim of eviction near Kalimas station with case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (continued)

On the request for appeal from Plaintiffs with register case No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Surabaya High Court Judge has ruled with the verdict substantially strengthening the Surabaya District Court decision No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby with letter No. 67/Pdt/2016/PT.Sby dated April 13, 2016. The Company is awaiting the verdict through letter No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Based on the Information System Tracking Lawsuit of Surabaya District Court (SIPP), The 3 registered cases have been ruled in the level of appeal whose ruling strengthen the decision of the Surabaya District Court. As the reporting date, the Company has not received the formal letter from District Court of Surabaya.

- g) The Company was sued by PT Upaya Export and Ang Suanthie John, et al with Case No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby.

PT Upaya Export and Ang Suanthie John, et al sued the Company for committing unlawful act by arbitrarily planning the emptying of the Plaintiffs' warehouse in Jalan Kalimas Baru Number 128 and 140, Surabaya. The Surabaya District Court granted the Plaintiffs' claim in full.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- g) Perusahaan digugat oleh PT Upaya Export dan Ang Suanthie John, dkk dengan perkara No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby. (lanjutan)

Atas putusan tersebut, Perusahaan melalui kuasa hukumnya dari Pramono & Partners mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 507/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 6 Desember 2016. Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan keputusan Nomor 112/PDT/2017/PT.Sby Jo. No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby, mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan meminta Penggugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah HPL Perusahaan yang dikuasai Penggugat kepada Perusahaan.

Penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI atas putusan tersebut. Mahkamah Agung RI, berdasarkan putusan No. 399K/PDT/2018, menolak permohonan kasasi dari Penggugat.

Pada 26 Desember 2018, Penggugat kembali mengajukan gugatan untuk permasalahan yang sama dengan Nomor Perkara 1223/Pdt.G/2018/PN.Sby. Pada tanggal laporan keuangan, perkara ini masih dalam proses mediasi.

- h) Perusahaan digugat Ang Agus dengan perkara No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Ang Agus menggugat Perusahaan terkait sengketa perdata revitalisasi tanah di Jalan Kalimas No. 138, 158, dan 158A yang merupakan tanah HPL Perusahaan. Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan tanah tersebut sebagai tanah HPL Perusahaan.

Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No. W14U/636/HK.02/01/2017 tanggal 18 Januari 2018, dengan hasil putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- g) The Company was sued by PT Upaya Export and Ang Suanthie John, et al with Case No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby. (continued)

On that decision, the Company through its attorney, Pramono & Partners, filed an appeal to the Surabaya High Court based on the Deed No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby dated 6 December 2016. Surabaya High Court, with decision Number 112/PDT/2017/PT.Sby Jo. No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby, granted a part of the Plaintiffs' lawsuit and ordered the Plaintiffs to hand over the HPL port land controlled by the Plaintiffs to the Company in empty condition.

The Plaintiffs appealed to the Indonesian Supreme Court for the decision. The Supreme Court of the Republic of Indonesia, based on decision No. 399K/PDT/2018, rejected the appeal from the Plaintiffs.

On December 26, 2018, the Plaintiffs filed another lawsuit for the same case with Case Number 1223/Pdt.G/2018/PN.Sby. As the date of the financial report, the case is still in the mediation process.

- h) The Company was sued by Ang Agus case No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Ang Agus sued the Company related to civil disputes for revitalization of land on Kalimas Road No. 138, 158, and 158A which lies on the Company's HPL Land. The Surabaya District Court granted that part of the lawsuit from the Plaintiff and stated the HPL Land belongs to the Company.

The Plaintiff appealed to the High Court Surabaya with case No. W14U/636/HK.02/01/2017 dated January 18, 2018 which verdict that in principle strengthened the decision of Surabaya District Court.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- h) Perusahaan digugat Ang Agus dengan perkara No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby. (lanjutan)

Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Perusahaan telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 September 2018 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Kasasi No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 14 September 2018. Saat tanggal laporan keuangan, perkara sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.

- i) Perusahaan menggugat Sdr. Wawan Syarwhani dengan perkara No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Wawan Syarwhani, sebagai tergugat, merupakan pensiunan pegawai Perusahaan yang mendiami beberapa rumah tinggal di Jalan Teluk Kumai, Surabaya, yang berdiri di atas tanah HPL Pelabuhan.

Tergugat menolak untuk membayar uang pemasukan kepada Perusahaan dengan alasan Perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan uang tersebut karena kewenangan atas HPL telah dialihkan kepada Otoritas Pelabuhan. Atas penolakan ini, Perusahaan menyampaikan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar Wawan Syarwhani membayarkan ganti rugi material sejumlah Rp33.485 dan ganti rugi immaterial sejumlah Rp193.809. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan Perusahaan.

Atas putusan tersebut, Perusahaan telah menyatakan banding, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 19 September 2018. Memori Banding atas perkara tersebut sudah dikirimkan oleh Biro Hukum Perusahaan selaku kuasa hukum Perusahaan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 18 Januari 2019. Pada tanggal laporan keuangan, perkara masih dalam proses pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Tinggi Surabaya.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- h) The Company was sued by Ang Agus case No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby. (continued)

The Plaintiff appealed to the Supreme Court through Surabaya District Court. The Company submitted contra memory cassation dated September 14, 2018 as receipt of counter motion No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby dated September 14, 2018. At the Reporting Date, The cassation document is still in the process of checking by the Supreme Court of Republic Indonesia.

- i) The Company filed a Lawsuit against Wawan Syarwhani with case No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Wawan Syarwhani, the defendant, is a retired employee of the Company who lives in several houses on Jalan Teluk Kumai, Surabaya, which are situated on the Port's HPL land.

The Defendant refused to pay the obligatory fee to the Company, reasoning that the Company didn't have the authority to levy the money as the authority over the HPL has been transferred to the Port Authority. Responding to the refusal, the Company submitted a lawsuit to the Surabaya District Court for Wawan Syarwhani to pay the Rp33,485 material compensation and the Rp193,809 immaterial compensation. Based on the results of the examination in the trial, the Surabaya District Court rejected the Company's lawsuit.

In response to the decision, the Company filed an appeal in accordance with the Deed of Appeal Number 865/Pdt.G/2017/PN.Sby dated September 19, 2018. The memory of appeal upon the matter had been sent to the Company's legal decision which acted as the Company's Attorney to the High Court of Surabaya through the District Court of Surabaya with Memory Appeal Receipt Number 865/Pdt.G/2017/PN.Sby dated January 18, 2019. As of the reporting date, the lawsuit is still in the process of delivering the Appeals' document from the District Court of Surabaya to High Court of Surabaya.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- j) Perusahaan, Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digugat oleh Sdr. Ardiansyah dkk dengan perkara No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Para Penggugat mengaku sebagai pemilik bekas rumah dinas di Jalan Teluk Tomini, Jalan Teluk Buli, dan Jalan Tanjung Layar, Surabaya, yang berdiri di atas tanah HPL Perusahaan yang bernilai Rp1.000.000. Para Penggugat berdalil bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak milik kepada Penggugat maupun memberikan rekomendasi peralihan tanah HPL menjadi hak milik.

Mediasi telah dilakukan atas perkara, namun mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap sidang dengan Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hasil persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan ditolak karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena perkara merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 6 November 2018. Pada tanggal laporan keuangan, perkara ini masih dalam proses pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Tinggi Surabaya.

- k) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh Ir. H. Irmay dengan perkara No. 553/Pdt.G/2018/PN.

Penggugat berdalil bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak atas tanah kepada Penggugat dan memungut uang pemasukan atas penggunaan tanah HPL di Jalan Perak Timur, Surabaya senilai Rp1.000.000 oleh Penggugat.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- j) The Company, National Land Agency of Surabaya (Land Office II), and Minister of Public Works and Human Settlements (PUPR) were sued by Ardiansyah, et al with Case No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby.

The Plaintiffs claimed to be the owners of the former official residences on Teluk Tomini Street, Teluk Buli Street, and Tanjung Layar Street, Surabaya, standing on the Company's HPL land which value was Rp1,000,000. The Plaintiffs sued the Company for committing an unlawful act by neither granting the land's ownership to the Plaintiffs nor recommending the transfer of the land's ownership from HPL to self-owned land.

Mediation was carried out on the case, however the mediation was declared failed by the Mediator Judge. The case was then raised to a trial in Surabaya District Court.

Based on the result of the trial, the Panel of Judges concluded that the Surabaya District Court was not authorized to examine and rule the case, as the case was the absolute competence of the State Administrative Court (PTUN). In response to the decision, the Plaintiffs filed an appeal through their attorney in accordance with the Notice of Appeal Against Interlocutory Decision Statement Number 315/Pdt.G/2018/PN.Sby dated November 6, 2018. As the reporting date, the lawsuit is still in the process of delivering for the documents from District Court of Surabaya to High Court of Surabaya.

- k) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by Ir. H. Irmay with case No. 553/Pdt.G/2018/PN.

The Plaintiff sued the Company for committing unlawful acts by not granting the land's ownership to the Plaintiff and levying an obligatory fee for the Plaintiff's use of HPL land on Perak Timur Street, Surabaya which value was Rp1,000,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- k) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh Ir. H. Irmay dengan perkara No. 553/Pdt.G/2018/PN. (lanjutan)

Mediasi telah dilakukan atas perkara, namun mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap sidang. Pemeriksaan di persidangan telah memasuki tahap pemeriksaan ahli dari Penggugat pada tanggal 31 Januari 2019.

- l) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh PT Surya Segara Safety dengan perkara No. 599/Pdt.G/2018/PN.

Penggugat berdalil bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak atas tanah kepada Penggugat dan memungut uang pemasukan atas penggunaan tanah HPL senilai Rp500.000.000 oleh Penggugat.

Mediasi telah dilakukan atas perkara, namun mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap sidang. Pada tanggal laporan keuangan, perkara masih dalam proses pengecekan berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya.

- m) Perusahaan dan PT Pro Energy mengajukan somasi kepada PT Dinar Putra Mandiri.

PT Pro Energy dan Perusahaan adalah kreditur dari PT Dinar Putra Mandiri yang berencana melakukan gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT Dinar Putra Mandiri, di mana PT Dinar Putra Mandiri berutang sebesar Rp878.158.958 (angka penuh).

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- k) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by Ir. H. Irmay with case No. 553/Pdt.G/2018/PN. (continued)

Mediation was carried out on the case, however the mediation was declared failed by the Mediator Judge. The case was then raised to a trial. The hearing at the trial has entered the verification stage with the Plaintiff's expert inspection agenda scheduled on January 31, 2019.

- l) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by PT Surya Segara Safety with case No. 599/Pdt.G/2018/PN.

The Plaintiff sued the Company for committing unlawful acts by not granting the land's ownership to the Plaintiff and levying an obligatory fee for the Plaintiff's use of HPL land, which HPL value was Rp500,000,000.

Mediation was carried out on the case, however the mediation was declared failed by the Mediator Judge. On the reporting date, the lawsuit is still in the process of checking document at High Court of Surabaya.

- m) The Company and PT Pro Energy filed a Subpoena to PT Dinar Putra Mandiri.

PT Pro Energy and the Company is a creditor of PT Dinar Putra Mandiri that planned to file a bankruptcy and/or suspension of obligation for payment of debts, for which PT Dinar Putra Mandiri owed Rp878,158,958 (full amount).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- m) Perusahaan dan PT Pro Energy mengajukan somasi kepada PT Dinar Putra Mandiri. (lanjutan)

Berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa gugatan kepailitan dapat dikabulkan apabila terdapat minimal 2 kreditur dan salah satunya telah jatuh tempo. Atas dasar aturan tersebut, maka PT Pro Energy bekerja sama dengan Perusahaan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk mengajukan gugatan pailit terhadap PT Dinar Putra Mandiri.

Perusahaan telah memberikan kuasa kepada Muhammad Tri Shaoky, SH dan rekan untuk mewakili kepentingan Perusahaan dalam perkara tersebut. Pada tanggal laporan keuangan, kuasa hukum Perusahaan masih dalam proses pengajuan somasi kepada PT Dinar Putra Mandiri.

- n) Perusahaan mengajukan gugatan intervensi kepada PT Sinar Centra Cipta atas perkara No. 273/G/2017/PTUN-JKT.

PT Sinar Centra Cipta menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas rencana reklamasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang diduga memakai sebagian lahan Penggugat. Atas gugatan tersebut, Perusahaan mengajukan gugatan intervensi terhadap PT Sinar Centra Cipta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Januari 2018 karena lokasi kegiatan dan pengembangan pelabuhan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di bawah pengelolaan Perusahaan.

Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan PT Sinar Centra Cipta tidak dapat diterima karena PT Sinar Centra Cipta tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut. Atas putusan tersebut, PT Sinar Centra Cipta mengajukan upaya banding pada 1 Oktober 2018. Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu salinan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- m) The Company and PT Pro Energy filed a Subpoena to PT Dinar Putra Mandiri. (continued)

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payments of Debts, it is stated that bankruptcy lawsuits can be granted if there are at least 2 creditor and one of them is due. On the basis of this law, PT Pro Energy cooperates with the Company at Tanjung Emas Port Semarang to file a bankrupt lawsuit against PT Dinar Putra Mandiri.

The Company has authorized Muhammad Tri Shaoky, SH and partners to represent the Company in the case. As at the date of the financial report, the Company's attorney is still in the process of submitting a subpoena against PT Dinar Putra Mandiri.

- n) The Company filed an intervention lawsuit against PT Sinar Centra Cipta for Case No. 273/G/2017/PTUN-JKT.

PT Sinar Centra Cipta sued the Ministry of Environment and Forestry for the reclamation plan at the Tanjung Emas Port in Semarang which allegedly used some of the Plaintiff's land. In response to this lawsuit, the Company filed an intervention lawsuit against PT Sinar Centra Cipta and the Ministry of Environment and Forestry through the Jakarta State Administrative Court on January 31, 2018 considering that the location of port activities and development stipulated in the State Administrative Decree was under the Company's management.

The Panel of Judges ruled that the lawsuit filed by PT Sinar Centra Cipta was rejected because PT Sinar Centra Cipta did not have a legal standing to file the lawsuit. On this decision, PT Sinar Centra Cipta submitted an appeal on October 1, 2018. As at the reporting date, the Company is awaiting the copy of the ruling appeal documents from The Jakarta State Administrative Court.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- o) Sengketa pembelian tanah oleh PT PPI (cucu perusahaan)

PT PPI melakukan transaksi pembelian tanah di Labuan Bajo dari Baco Abdullah, dkk (Penjual Tanah) dan telah membayarkan uang muka pembelian tersebut. Namun, Ir. Hugeng Syatriadi menggugat Penjual Tanah bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 27 Desember 2016, gugatan ini dimenangkan oleh Ir. Hugeng Syatriadi. Atas keputusan tersebut, Penjual Tanah melakukan upaya banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 9 Januari 2017. Permohonan banding ini diterima oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Ir. Hugeng Syatriadi mengajukan upaya hukum kasasi atas keputusan banding tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3242K/Pdt/2017 tanggal 29 Januari 2018, Majelis memutuskan untuk memperkuat putusan banding. Atas Putusan Kasasi dari MA tersebut, PT PPI membebaskan uang muka pembelian tanah tersebut pada tahun 2018 dan mencatatnya sebagai bagian dari "Beban lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- p). Perusahaan digugat oleh Sui Besi berkaitan tanah HPL di Kupang.

Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Mei 2015 mengaku sebagai ahli waris dari seseorang bernama Sui Besi yang memiliki tanah seluas ±57.800 m² yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan secara diam-diam dan tanpa izin telah memasukkan tanah sengketa tersebut ke dalam Sertifikat Hak Penguasaan No.1 tanggal 1 Agustus 1975 seluas 36,25 Ha. Atas hal tersebut, Penggugat menuntut agar Perusahaan membayar ganti rugi material sebesar Rp390.000 dan ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- o) Disputes on land purchase transaction by PT PPI (second-tier subsidiary)

PT PPI entered into land purchase agreement in Labuan Bajo from Baco Abdullah, et al (Land Seller) and had paid the advance. However, Ir. Hugeng Syatriadi filed a lawsuit against the land seller, stating that the land is owned by him. Based on the Labuan Bajo District Court Decision Number 14/PDT.G/2016/PN.LBJ dated December 27, 2016, the lawsuit was won by Ir. Hugeng Syatriadi. In response to this decision, the Land Seller filed an appeal with Appeal Act Number 14/PDT.G/2016/PN.LBJ dated January 9, 2017. The appeal was granted by Labuan Bajo District Court.

Ir. Hugeng Syatriadi filed a cassation against the appeal decision. Based on the Supreme Court Decision Number 3242K/Pdt/2017 dated January 29, 2018, the Supreme Court Assembly decided to strengthen the appeal's verdict. In response to the Supreme Court Cassation Decision, PT PPI charge the advance of land purchase in 2018 and recorded it as part of "Other expenses" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

- p). The Company was sued by Sui Besi concerning HPL Land at Kupang.

The Plaintiff in its lawsuit dated May 6, 2015 claimed to be the heir of a man named Sui Besi who owned a land area of ± 57,800 sqm located in Kelurahan Alak, Alak Sub-district, Kupang City. In its lawsuit, the Plaintiff argued that the Company had secretly committed unlawful acts (PMH) and without permission had entered the disputed land into Certificate of Tenure Number 1 dated August 1, 1975 covering 36.25 Ha. Based on that, The Plaintiff demands that the Company pay material compensation amounting to Rp390,000 and compensation for immaterial damages amounting to Rp1,000,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- p). Perusahaan digugat oleh Sui Besi berkaitan tanah HPL di Kupang. (lanjutan)

Pengadilan Tinggi Kupang kemudian mengeluarkan Putusan No. 34/PDT/2016/Pt.Kpg pada tanggal 1 Juni 2016 yang pada pokoknya memperkuat Putusan Pengadilan Negeri No. 92/Pdt.G.PMH/2015/PN.Kpg. Penggugat mengajukan permohonan kasasi dan Perusahaan telah mengirimkan kontra memori kasasi.

Putusan kasasi Sdri Sui Ndun telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan amar putusan pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Sui Ndun.

Entitas Anak

TPS

Mulai Desember 2018, TPS sedang menjalani kasus hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus tindak pidana pencucian uang. Kasus ini melibatkan dana sebesar Rp14.640.744 yang telah disita oleh Kejaksaan. Pada 31 Desember 2018 kasus ini masih berjalan. TPS telah mencadangkan dana sebesar Rp14.640.744 yang disajikan pada "Piutang lain – lain" (Catatan 10).

45. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- p). The Company was sued by Sui Besi concerning HPL Land at Kupang. (continued)

The High Court of Kupang subsequently issued a Decision No. 34/PDT/2016/Pt.Kpg dated June 1, 2016 which substantially strengthened the Decision of the District Court No. 92/Pdt.G.PMH/2015/PN.Kpg. The Plaintiffs filed an appeal for cassation and the Company has sent counter motion for cassation.

The appeals verdict of Mrs Sui Ndun has been announced by the Supreme Court RI with a dictum verdict which essentially rejected cassation from Sui Ndun.

Subsidiaries

TPS

Starting December 2018, TPS is alleged with money laundering corporate crime which case is being registered at Surabaya District Court. The case involves a total fund of IDR14,640,744 which was confiscated by the attorney. As of December 31, 2018, the case is still on going. The Company recorded a provision for the IDR14,640,744 that were presented at "Other Receivables" (Note 10).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

46. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

31 Desember 2018/December 31, 2018

	Operasi kepelabuhanan/ Port operation	Jasa lainnya/ Other services	Total sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	9.860.876.991	314.055.036	10.174.932.027	-	10.174.932.027	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	2.463.187.961	403.615.560	2.866.803.521	(2.866.803.521)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	12.324.064.952	717.670.596	13.041.735.548	(2.866.803.521)	10.174.932.027	Total segment operating revenues
Beban operasi	(9.062.101.697)	(683.752.093)	(9.745.853.790)	2.866.263.849	(6.879.589.941)	Operating expenses
Beban operasi lainnya - neto	(737.961.988)	209.058	(737.752.930)	3.829.292	(733.923.638)	Other operating expenses - net
Laba usaha					2.561.418.448	Operating income
Pendapatan keuangan	278.679.346	1.331.792	280.011.138	(136.817.527)	143.193.611	Finance income
Beban keuangan	(946.280.735)	(2.036.161)	(948.316.896)	139.906.778	(808.410.118)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.099.345.431	-	1.099.345.431	(1.130.321.880)	(30.976.449)	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					(696.192.956)	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(48.544.590)	-	(48.544.590)	-	(48.544.590)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					(744.737.546)	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(583.254.015)	(13.958.157)	(597.212.172)	-	(597.212.172)	Current
Tangguhan	156.101.167	3.008.252	159.109.419	-	159.109.419	Deferred
Laba tahun berjalan					1.182.840.299	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	36.273.733.897	417.979.390	36.691.713.287	(6.185.997.700)	30.505.715.587	Segment assets
Liabilitas segmen	22.555.853.166	148.603.745	22.704.456.911	(2.554.055.121)	20.150.401.790	Segment liabilities

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

46. SEGMENT INFORMATION (continued)

31 Desember 2017/December 31, 2017

	Operasi kepelabuhanan/ Port operation	Jasa lainnya/ Other services	Total sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	8.244.008.343	605.398.295	8.849.406.638	-	8.849.406.638	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	1.996.251.887	-	1.996.251.887	(1.996.251.887)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	10.240.260.230	605.398.295	10.845.658.525	(1.996.251.887)	8.849.406.638	Total segment operating revenues
Beban operasi	(7.322.929.424)	(566.748.371)	(7.889.677.795)	2.006.411.236	(5.883.266.559)	Operating expenses
Beban operasi lainnya - neto	108.683.071	2.091.158	110.774.229	(177.878.911)	(67.104.682)	Other operating income - net
Laba usaha					2.899.035.397	Operating income
Pendapatan keuangan	215.703.425	1.039.642	216.743.067	(105.171.326)	111.571.741	Finance income
Beban keuangan	(703.332.035)	(174.270)	(703.506.305)	103.324.523	(600.181.782)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.023.660.589	-	1.023.660.589	(926.256.658)	97.403.931	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					2.507.829.287	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(45.806.243)	-	(45.806.243)	-	(45.806.243)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.462.023.044	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(437.728.828)	(12.794.192)	(450.523.020)	(2.662.351)	(453.185.371)	Current
Tangguhan	(117.209.383)	1.203.962	(116.005.421)	1.468.768	(114.536.653)	Deferred
Laba tahun berjalan					1.894.301.020	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	31.440.619.429	379.351.650	31.819.971.079	(6.068.871.932)	25.751.099.147	Segment assets
Liabilitas segmen	18.972.940.761	121.027.558	19.093.968.319	(2.708.484.305)	16.385.484.014	Segment liabilities

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERUBAHAN PADA LIABILITAS

47. CHANGES IN LIABILITIES

	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Arus kas/ Cash flows	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Perubahan pada nilai wajar/ Change in fair value	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	11.302.711.758	2.861.382.374	769.080.630	3.966.138	14.937.140.900	Bank loans and other financial institution
Utang sewa pembiayaan	63.257.235	(444.042)	-	-	62.813.193	Obligation under finance lease
	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Arus kas/ Cash flows	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Perubahan pada nilai wajar/ Change in fair value	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	9.849.133.659	1.338.794.074	119.021.281	(4.237.260)	11.302.711.758	Bank loans and other financial institution
Utang sewa pembiayaan	67.289.363	(4.032.128)	-	-	63.257.235	Obligation under finance lease

48. AKTIVITAS NON-KAS

48. NON-CASH ACTIVITIES

Aktivitas non-kas yang mendukung laporan arus kas pada setiap tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Non-cash activities supporting the cash flows at each reporting dates are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	(444.042)	(4.032.128)	Acquisitions of fixed assets through finance lease
Penambahan aset tetap melalui penambahan utang	301.569.459	110.583.714	Acquisitions of fixed assets through addition on payable
Penambahan aset tetap melalui uang muka	479.006.089	(968.292.008)	Acquisitions of fixed assets through advance

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) nomor SK.-42/02/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Dewan Komisaris setuju untuk memberhentikan dengan hormat Sdr Amilin sebagai Anggota Komite Audit. Selanjutnya, mengangkat Sdr. Mohammad Rizqa sebagai Anggota Komite Audit.

49. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Based on SK.-42/02/KEP/DK.P.III/2019 dated February 18, 2019 related to Dismissal and Appointment of Audit Committee Member of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), The Board of Commissioner agreed upon the dismissal with respect of Mr Amilin as an Audit Committee Member. Furthermore, Appointment of Mr Mohammad Rizqa as an Audit Committee.

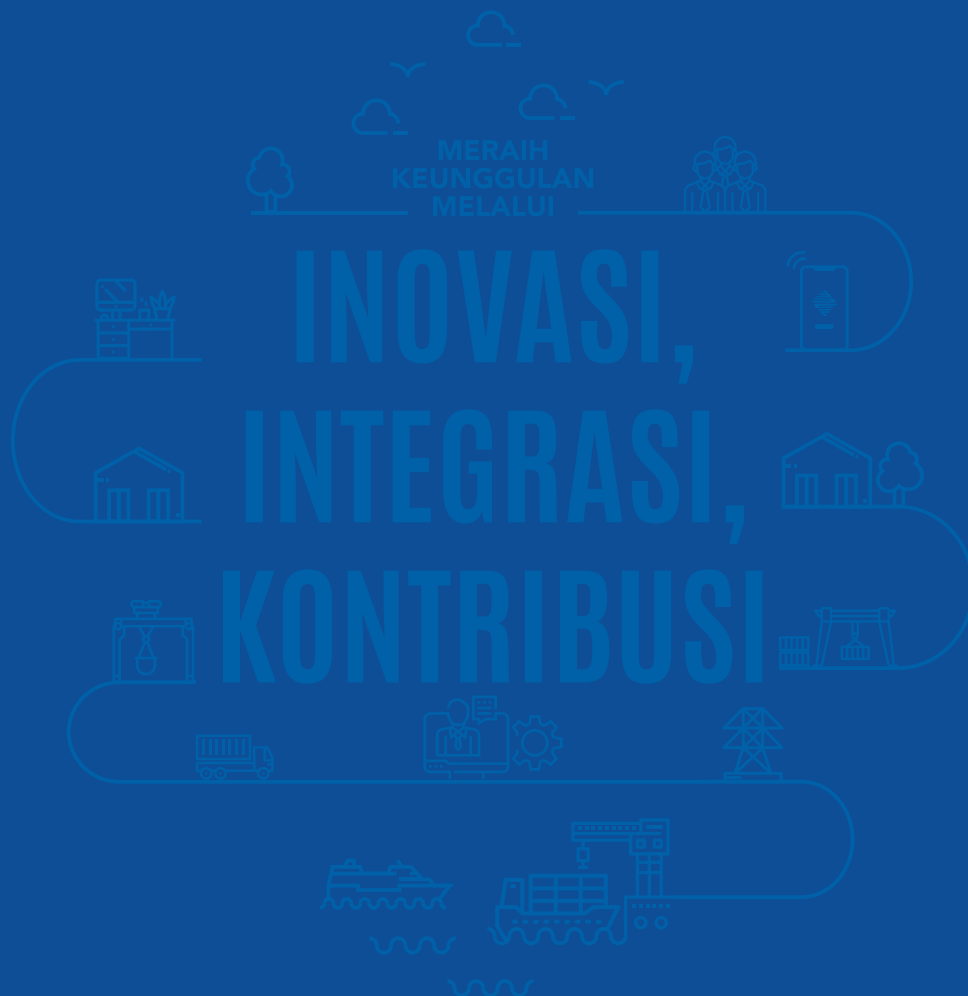


PELINDO III

Beyond Port of Indonesia

2018

LAPORAN TAHUNAN



PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - Indonesia
Telp. +62 31 3298631-37
Fax. +62 31 3295204

www.pelindo.co.id